



**PERUBAHAN RENCANA  
KERJA PEMERINTAH  
DAERAH TAHUN 2023**





# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 19 TAHUN 2023**

### **TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 dan pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 29);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 88);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 105);



28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 106); dan
29. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 562).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kabupaten Pesawaran adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran yang memuat penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat dengan RKPD Kabupaten Pesawaran adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

9. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD.
11. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
15. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
19. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.

BAB II  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2023

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2023, disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
  - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
  - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
  - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
  - f. BAB VI : PENUTUP
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan:

- a. Dasar Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- b. Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan PPAS.
- c. Landasan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- d. Bahan Evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD.

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan;
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan;
  - c. penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2023;
  - d. penambahan kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

- (2) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2023 perlu memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara Bupati dengan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

### BAB III PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal Agustus 2023

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
pada tanggal Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESAWARAN,

WILDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023 NOMOR

DAFTAR ISI

**DAFTAR ISI ..... i**  
**DAFTAR TABEL ..... iii**  
**DAFTAR GAMBAR ..... vii**

**BAB I PENDAHULUAN..... I-1**  
1.1 LATAR BELAKANG ..... I-1  
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN..... I-1  
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ..... I-3  
    1.1.1 Hubungan dengan RKP Nasional ..... I-3  
    1.1.2 Hubungan dengan RKPD Provinsi Lampung..... I-4  
    1.1.3 Hubungan dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026..... I-4  
    1.1.4 Hubungan dengan Renja OPD ..... I-4  
    1.1.5 Hubungan dengan RTRW Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039..... I-4  
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN..... I-4  
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD ..... I-5

**BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023 ..... II-1**  
2.1 KONDISI UMUM DAN KONDISI DAERAH..... II-1  
    2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II-1  
    2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II-14  
    2.1.3 Aspek Pelayanan Umum..... II-22  
    2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ..... II-70  
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI  
    DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 ..... II-73  
    2.2.1 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD ..... II-74  
    2.2.2 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD ..... II-74  
    2.2.3 Evaluasi Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah..... II-264  
2.3 PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN..... II-269  
2.4 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ..... II-272  
    2.4.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan  
        Sasaran Pembangunan Daerah ..... II-272  
    2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah  
        Daerah ..... II-273

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ..... III-1**  
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH ..... III-1  
    3.1.1 Kondisi dan Arahana Perekonomian Nasional ..... III-1  
    3.1.2 Kondisi dan Arahana Perekonomian Provinsi Lampung ..... III-2  
    3.1.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Pesawaran ..... III-3  
3.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2023 ..... III-9  
3.3 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ..... III-13  
    3.3.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III-14  
    3.3.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah..... III-25  
    3.3.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... III-38

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 .... IV-1**  
4.1 TUJUAN DAN SASARAN DAERAH ..... IV-2  
    4.1.1 Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Pesawaran ..... IV-2  
4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023..... IV-6  
    4.2.1 Prioritas dan Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2023 ..... IV-6  
    4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 .... IV-8  
    4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun  
        2023 ..... IV-8  
4.3 SASARAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
    KABUPATEN PESAWARAN ..... IV-19  
4.4 SASARAN PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)  
    KABUPATEN PESAWARAN ..... IV-21  
4.5 PRIORITAS PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023..... IV-23

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V-1**  
5.1 KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN BERDASARKAN  
PRIORITAS KABUPATEN TAHUN 2023 .....V-1  
5.2 RENCANA PERUBAHAN PAGU INDIKATIF BELANJA TAHUN 2023 .....V-2

**BAB VI PENUTUP .....VII-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Pesawaran menurut Kecamatan..... II-1

Tabel 2.2 Kemiringan Lereng menurut Kecamatan ..... II-2

Tabel 2.3 Kondisi Klimatologi Tahun 2022 ..... II-3

Tabel 2.4 Formasi Jenis Batuan di Kabupaten Pesawaran..... II-4

Tabel 2.5 Karakteristik Penggunaan Lahan..... II-6

Tabel 2.6 Risiko Bencana Alam ..... II-7

Tabel 2.7 Jumlah, Distribusi, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan  
Tahun 2022..... II-13

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kabupaten Pesawaran Tahun 2018-2022..... II-13

Tabel 2.9 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022 ..... II-14

Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut  
Lapangan Usaha Tahun 2018-2022..... II-15

Tabel 2.11 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan  
Usaha Tahun 2018-2022 (dalam Miliar)..... II-16

Tabel 2.12 Struktur Komposisi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut  
Lapangan Usaha Tahun 2018-2022..... II-16

Tabel 2.13 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut  
Pengeluaran Tahun 2018-2022 (dalam Miliar)..... II-17

Tabel 2.14 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Tahun 2018-2022 ..... II-18

Tabel 2.15 Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2018-2022..... II-21

Tabel 2.16 Kondisi Pembangunan Gender Tahun 2017-2022 ..... II-21

Tabel 2.17 Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata Tahun 2017-2021.... II-22

Tabel 2.18 Sekolah Kondisi Bangunan Baik Tahun 2018-2022..... II-23

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun  
2018-2022..... II-23

Tabel 2.20 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun  
2018-2022..... II-24

Tabel 2.21 Jumlah PKBM Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 ..... II-24

Tabel 2.22 Jumlah Putus Sekolah di Kabupaten Pesawaran Tahun 2018-2021... II-24

Tabel 2.23 Capaian SPM Pendidikan. .... II-25

Tabel 2.24 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Tahun 2018-2022..... II-29

Tabel 2.25 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022 ..... II-29

Tabel 2.26 Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022..... II-30

Tabel 2.27 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun  
2017-2022..... II-31

Tabel 2.28 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun  
2017-2022..... II-32

Tabel 2.29 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin  
Tahun 2018-2022 ..... II-32

Tabel 2.30 Angka Kejadian Malaria dan Tingkat Kematian Tahun 2017-2022 ..... II-32

Tabel 2.31 Angka Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2017-2022..... II-33

Tabel 2.32 Cakupan Pelayanan dan Penanganan Penyakit TBC BTA Tahun  
2017-2022..... II-33

Tabel 2.33 Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi Tahun 2017-2022 ..... II-35

Tabel 2.34 Persentase Penduduk Usia 15-24 yang Mengetahui Komprehensif  
tentang HIV/AIDS Tahun 2017-2022..... II-36

Tabel 2.35 Jumlah Kasus Stunting per Kecamatan Tahun 2020-2022 ..... II-38



Tabel 2.36 Capaian SPM Kesehatan ..... II-38

Tabel 2.37 Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun  
2018-2022 ..... II-41

Tabel 2.38 Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk per 10.000 jiwa  
Tahun 2018-2022 ..... II-41

Tabel 2.39 Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam  
Kondisi Baik Tahun 2018-2022 ..... II-42

Tabel 2.40 Sebaran Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pesawaran ..... II-42

Tabel 2.41 Persentase Bangunan yang Memiliki IMB Tahun 2016-2020 ..... II-42

Tabel 2.42 Capaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... II-43

Tabel 2.43 Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2016-2020 ..... II-45

Tabel 2.44 Rumah Layak Huni Tahun 2017-2021 ..... II-45

Tabel 2.45 Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2019-2021 ..... II-46

Tabel 2.46 Capaian SPM Perumahan ..... II-46

Tabel 2.47 Lahan Bersertifikat Tahun 2017-2022 ..... II-46

Tabel 2.48 Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan  
Masyarakat Tahun 2017-2022 ..... II-47

Tabel 2.49 Kinerja Urusan Sosial Tahun 2017-2022 ..... II-48

Tabel 2.50 Capaian SPM Sosial ..... II-48

Tabel 2.51 Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017-2022 ..... II-49

Tabel 2.52 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Tahun 2018-2022 ..... II-51

Tabel 2.53 Kinerja Urusan Pangan Tahun 2017-2021 ..... II-51

Tabel 2.54 Kinerja Persampahan Tahun 2016-2022 ..... II-52

Tabel 2.55 Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan  
Tahun 2016-2022 ..... II-52

Tabel 2.56 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun  
2018-2022 ..... II-54

Tabel 2.57 Status Kemandirian dan Kemajuan Desa di Kabupaten Pesawaran  
Tahun 2018-2022 ..... II-54

Tabel 2.58 Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Tahun 2018-2022 ..... II-56

Tabel 2.59 Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018-2022 ..... II-57

Tabel 2.60 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun  
2018-2022 ..... II-58

Tabel 2.61 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun  
2018-2022 ..... II-58

Tabel 2.62 Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2017-2021 ..... II-59

Tabel 2.63 Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun  
2016-2022 ..... II-59

Tabel 2.64 Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2018-2022 ..... II-60

Tabel 2.65 Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2018-2022 ..... II-61

Tabel 2.66 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2022 ..... II-61

Tabel 2.67 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2022 ..... II-62

Tabel 2.68 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2016-2022 ..... II-62

Tabel 2.69 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018-2022 ..... II-63

Tabel 2.70 Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun  
2018-2022 ..... II-64

Tabel 2.71 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016-2022 ..... II-65

Tabel 2.72 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016-2022 .....	II-65
Tabel 2.73 Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB .....	II-65
Tabel 2.74 Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2016-2020 .....	II-66
Tabel 2.75 Indikator Urusan Perencanaan Tahun 2018-2022 .....	II-66
Tabel 2.76 Inovasi Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran .....	II-67
Tabel 2.77 Indikator Urusan Keuangan Tahun 2017-2022 .....	II-69
Tabel 2.78 Indikator Urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Tahun 2017-2022 .....	II-70
Tabel 2.79 Indikator Urusan Pengawasan Tahun 2017-2022 .....	II-70
Tabel 2.80 Kategori Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran .....	II-73
Tabel 2.81 Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun Anggaran 2023 .....	II-74
Tabel 2.82 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan Kedua Tahun 2023 Kabupaten Pesawaran .....	II-79
Tabel 2.83 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 .....	II-265
Tabel 2.84 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 .....	II-268
Tabel 2.85 Rekapitulasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan .....	II-270
Tabel 3.1 Pertumbuhan PDRB Rill Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 .....	III-5
Tabel 3.2 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (dalam Miliar Rupiah) .....	III-7
Tabel 3.3 Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2018-2022 .....	III-8
Tabel 3.4 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Tahun 2018-2022 .....	III-9
Tabel 3.5 Pertumbuhan Sektoral PDRB Riil Tahun 2018-2022 .....	III-10
Tabel 3.6 Perkembangan ICOR Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2019 .....	III-11
Tabel 3.7 Proyeksi Perubahan Indikator Kinerja Makro Tahun 2023 .....	III-13
Tabel 3.8 Realisasi Pendapatan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020-2023 (Rupiah) .....	III-22
Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 (Rupiah) .....	III-23
Tabel 3.10 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020-2023 (Rupiah) .....	III-36
Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 (Rupiah) .....	III-36
Tabel 3.12 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020-2023 (Rupiah) .....	III-42
Tabel 3.13 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020-2023 (Rupiah) .....	III-43
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 .....	IV-2
Tabel 4.2 Sasaran Makro RKP 2023 .....	IV-7
Tabel 4.3 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 .....	IV-8
Tabel 4.4 Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pesawaran .....	IV-9

Tabel 4.5 Sasaran Makro Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 ..... IV-10

Tabel 4.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesawaran, Provinsi  
Lampung, dan Nasional beserta Pagu per Prioritas ..... IV-17

Tabel 4.7 Target capaian SPM Bidang Trantibumlinmas untuk Tahun 2023 ..... IV-20

Tabel 4.8 Target TPB yang menjadi urusan Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 . IV-22

Tabel 5.1 Perubahan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2023 ..... V-3

Tabel 5.2 Perubahan Pagu Indikatif Program Prioritas Tahun 2023 ..... V-5

Tabel 5.3 Rekapitulasi Daftar Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja  
Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023 ..... V-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Kabupaten Pesawaran ..... II-2

Gambar 2.2 Peta Kelerengan ..... II-3

Gambar 2.3 Peta Jenis Batuan..... II-5

Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai ..... II-5

Gambar 2.5 Peta Penggunaan Lahan ..... II-6

Gambar 2.6 Peta Risiko Bencana Alam ..... II-7

Gambar 2.7 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya ..... II-8

Gambar 2.8 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pesawaran Tahun  
2019-2039 ..... II-9

Gambar 2.9 Peta Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Daerah ..... II-10

Gambar 2.10 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesawaran, Provinsi  
Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-15

Gambar 2.11 Grafik Perkembangan PDRB ADHK Perkapita Tahun 2018-2022  
(dalam Juta) ..... II-18

Gambar 2.12 Grafik Angka Harapan Hidup Tahun 2018-2022 ..... II-19

Gambar 2.13 Grafik Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2022..... II-19

Gambar 2.14 Grafik Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018-2022 ..... II-20

Gambar 2.15 Grafik Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Tahun 2018-2022 ..... II-20

Gambar 2.16 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2022 ..... II-20

Gambar 2.17 Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia  
Sekolah Tahun 2017-2021 ..... II-22

Gambar 2.18 Grafik Angka Kelulusan Tahun 2017-2021 ..... II-23

Gambar 2.19 Grafik Angka Melanjutkan Tahun 2017-2021 ..... II-24

Gambar 2.20 Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2018-2022 ..... II-29

Gambar 2.21 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Tahun  
2018-2022 ..... II-30

Gambar 2.22 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang  
Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2017-2022 ..... II-31

Gambar 2.23 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)  
Tahun 2018-2022 ..... II-31

Gambar 2.24 Jumlah Kasus Malaria di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 ..... II-32

Gambar 2.25 Distribusi Kasus Tuberculosis Berdasarkan Wilayah Kerja  
Puskesmas di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 ..... II-34

Gambar 2.26 Cakupan Cure Rate dan Success Rate (SR) Penderita Kasus TBC  
di Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021 ..... II-34

Gambar 2.27 Persentase Keberhasilan Pengobatan Kasus TB (Success Rate)  
Berdasarkan Puskesmas di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 ..... II-35

Gambar 2.28 Distribusi Kasus HIV Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis  
Kelamin di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 ..... II-36

Gambar 2.29 Grafik Perkembangan Persentase Prevalensi Stunting Tahun  
2020-2022 ..... II-37

Gambar 2.30 Grafik Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2016-2020 ..... II-44

Gambar 2.31 Grafik Rumah Bersanitasi Tahun 2016-2020 ..... II-45

Gambar 2.32 Grafik Rasio Penduduk Ber-KTP Tahun 2017-2022 ..... II-53

Gambar 2.33 Grafik Rasio Bayi Ber-Akte Kelahiran Tahun 2016-2022 ..... II-53

Gambar 2.34 Grafik Rasio Pasangan Ber-Akte Nikah Tahun 2018-2022 ..... II-53

Gambar 2.35 Grafik Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2016-2020 ..... II-57

Gambar 2.36 Grafik Produktivitas Pertanian Padi dan Bahan Pangan Utama  
Tahun 2016-2020 ..... II-62

Gambar 2.37 Grafik Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB  
Tahun 2018-2022 ..... II-63

Gambar 2.38 Grafik Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun  
2018-2022 ..... II-64

Gambar 2.39 Nilai Tukar Petani Tahun 2018-2022 ..... II-71

Gambar 2.40 Grafik Persentase Capaian Angka Kriminalitas yang Tertangani  
Tahun 2018-2022 ..... II-71

Gambar 2.41 Grafik Rasio Ketergantungan Tahun 2018-2022..... II-72

Gambar 2.42 Grafik Perkembangan IKLH 2020-2022..... II-72

Gambar 3.1 Struktur PDRB Rill Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2022 .... III-4

Gambar 3.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesawaran, Provinsi  
Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... III-6

Gambar 3.3 Grafik Perkembangan PDRB Riil per Kapita Tahun 2018-2022  
(dalam Juta Rupiah)..... III-6

Gambar 3.4 Grafik Laju Inflasi Di Kabupaten Pesawaran, 2017-2021 ..... III-8

Gambar 4.1 Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Pesawaran .. IV-3

Gambar 4.2 Rencana Tahapan Pengembangan Kawasan Industri Tegineneng ..... IV-3

Gambar 4.3 Peta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Teluk Pandan ..... IV-4

Gambar 4.4 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Pesawaran..... IV-5

Gambar 4.5 Peta Rencana Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Pesawaran .... IV-6

Gambar 4.6 17 Goals SDG's..... IV-21

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Pesawaran berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan nasional. Proses perumusan perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 sebagai penjabaran tahun kedua periode RPJMD Kabupaten Pesawaran 2021-2026 telah dituangkan ke dalam rencana tahunan sebagaimana Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 yang merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan dengan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa pemerintah daerah dapat melakukan perubahan RKPD apabila hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya kesesuaian dengan perkembangan keadaan. Dalam pelaksanaannya RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dan memperhatikan hasil evaluasi pada tahun berjalan, maka Pemerintah Kabupaten Pesawaran melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan-RKPD) Tahun 2023, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan untuk tahun berjalan.

### 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan Hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar



- Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 29);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 88);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 105);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 106); dan
  29. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 562).

### 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD adalah dokumen pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yang terdiri dari RKPD, KUA, PPAS, dan rencana kerja anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023; RPJMD Provinsi Lampung 2020-2024 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023; serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025. Selanjutnya Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 akan menjadi acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2023.

#### 1.1.1 Hubungan dengan RKP Nasional

Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 mengacu berbagai substansi dalam RKP nasional. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan secara

nasional, RKP nasional harus menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran. Meskipun Perubahan RKPD harus berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pesawaran, tetapi dinamika nasional dalam rentang waktu tahunan tidak dapat diabaikan.

Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh atau memiliki tujuan terhadap pembangunan Kabupaten Pesawaran.

### **1.1.2 Hubungan dengan RKPD Provinsi Lampung**

Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 juga harus mengacu berbagai substansi dalam RKPD Provinsi Lampung. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan dalam cakupan wilayah Provinsi Lampung, RKPD provinsi Lampung harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pesawaran. Dinamika regional tahunan memerlukan antisipasi ataupun dukungan agar dapat memaksimalkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Wilayah Kabupaten Pesawaran yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Lampung, sangat perlu untuk memperhatikan arah pembangunan Provinsi terkait dengan keberadaan kota/kabupaten lain di sekitar wilayah Kabupaten Pesawaran.

### **1.1.3 Hubungan dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026**

Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 berpedoman dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesawaran tahun 2021-2026 terkait perencanaan di tahun 2023. Program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD diuraikan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Selain untuk menjabarkan, melalui Perubahan RKPD dapat diketahui hasil-hasil capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. Melalui Perubahan RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode perencanaan dalam RPJMD.

### **1.1.4 Hubungan dengan Renja Perangkat Daerah**

Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 menjadi pedoman bagi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perubahan RKPD menjadi Pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Meskipun Perubahan RKPD menjadi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, namun perlu dilakukan koordinasi dalam penyusunannya. Sehingga, waktu penyusunan dilakukan secara bersamaan. Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini harus bersesuaian.

### **1.1.5 Hubungan dengan RTRW Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039**

Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 mengacu kepada RTRW Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039 dalam proses penyusunannya. Perencanaan terkait tata ruang dan pola ruang dalam rentang waktu hingga Tahun 2039 perlu diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2023. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat Kabupaten Pesawaran.

## **1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

Perubahan RKPD Tahun 2023 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2023 yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2023 antara Bupati dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan RKA PD sebagai lampiran Raperda Perubahan APBD untuk dibahas dan memperoleh

persetujuan DPRD.

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD yang dilaksanakan dengan:

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2023 sebagai patokan dalam penyusunan rencana perubahan pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah Tahun 2023;
4. Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesawaran sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026.

## 1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang  
Menjelaskan tentang Latar Belakang Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2023.
- 1.2 Dasar Hukum  
Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2023.
- 1.3 Hubungan antar Dokumen  
Menjelaskan tentang hubungan Perubahan RKPD tahun 2023 dengan dokumen-dokumen perencanaan baik tingkat nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran.
- 1.4 Maksud dan Tujuan  
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2022.
- 1.5 Sistematika Dokumen RKPD  
Memberikan gambaran penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

### BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

2. 1 Kondisi Umum dan Kondisi Daerah.  
Menjelaskan tentang Kondisi Umum dan Kondisi Daerah yang melingkupi data capaian pembangunan Kabupaten Pesawaran berdasarkan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.
2. 2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.  
Menjelaskan Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD, serta Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD.
2. 3 Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Menjelaskan kinerja pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mengelompokkan capaian indikator ke dalam empat kategori yakni indikator yang sudah tercapai, belum tercapai, tidak ada data, dan diluar wilayah kajian.

2. 4 Permasalahan Pembangunan Daerah.

Uraian rumusan umum permasalahan dan tantangan pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3. 1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Berisikan uraian mengenai rancangan perubahan kerangka ekonomi makro daerah meliputi Pertumbuhan PDRB, Struktur Ekonomi, PDRB Per Kapita, PDRB Menurut Pengeluaran serta arah kebijakan ekonomi daerah.

3. 2 Tantangan dan Prospek Ekonomi.

Berisikan uraian mengenai Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah, Tantangan Perekonomian Nasional dan Global, Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran serta Prospek Perekonomian Nasional dan Global, Provinsi Lampung, dan Pesawaran Tahun 2023 yang bertujuan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai acuan untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

3. 3 Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah.

Menjelaskan perubahan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pembangunan tahun 2023.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran, serta arah kebijakan pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung, RKPD Provinsi Lampung dan RPJMD Kabupaten Pesawaran.

4. 2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Menjelaskan tentang Prioritas dan Sasaran Makro Pembangunan Nasional, Prioritas dan Sasaran Makro Provinsi Lampung, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pesawaran, Dasar Perumusan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (RKPD) Tahun 2023, serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pesawaran.

4. 3 Menjelaskan Pencapaian SPM Kabupaten Pesawaran

Menjelaskan sasaran pencapaian standar pelayanan minimal pada Pelayanan Dasar yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

4. 4 Sasaran Pencapaian SDG's Kabupaten Pesawaran

Menjelaskan dengan agenda pembangunan daerah dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Kabupaten Pesawaran yang memegang peran kunci dalam menghubungkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

4. 5 Prioritas Pembangunan Pesawaran Tahun 2023

Berisikan tentang Prioritas pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2023.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mencakup Pagu Indikatif Per Perangkat Daerah dan Rencana Program, Kegiatan, Sasaran, target, lokasi kegiatan, serta Pagu Pendanaan baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP

Penegasan Perubahan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan Perubahan APBD Kabupaten Pesawaran.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 KONDISI UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

a. Wilayah Administrasi

Pada awal terbentuknya Kabupaten Pesawaran hanya terdiri dari tujuh Kecamatan dengan luas wilayah mencapai 1.173,77 km<sup>2</sup> sesuai UU Nomor 33 Tahun 2007. Seiring dengan berkembangnya data kewilayahan berbasis pemetaan yang lebih akurat maka sesuai dengan peta indikatif batas wilayah Kabupaten Pesawaran dari Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Tahun 2019 luas wilayahnya menjadi 1.278,21 km<sup>2</sup> dan tertuang dalam RTRW Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039 sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2019. Selanjutnya pada awal Tahun 2022 Kementerian Dalam Negeri dengan berdasar pada data spasial dari BIG melakukan pembaruan data kembali sehingga luas wilayah Kabupaten Pesawaran menjadi 1.279,60 km<sup>2</sup> yang ditetapkan melalui Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022. Kemudian, pada akhir Tahun 2022 Kementerian Dalam Negeri kembali melakukan pembaruan data batas wilayah dengan merujuk pada data spasial hasil pemutakhiran penyelesaian batas wilayah sehingga luas wilayah Kabupaten Pesawaran berubah menjadi 1.288,08 km<sup>2</sup> yang ditetapkan melalui Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022. Adapun dalam hal penyajian peta tematik yang bersumber dari RTRW Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039 pada dokumen ini belum mengikuti luas wilayah terbaru mengingat basis data penyusunan peta tematik sedang diperbarui oleh BIG selaku penyelenggara data spasial nasional. Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Pesawaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Pesawaran menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Punduh Pedada	95,45	7,41
2	Marga Punduh	78,96	6,13
3	Padang Cermin	174,15	13,52
4	Teluk Pandan	119,66	9,29
5	Way Ratai	97,64	7,58
6	Kedondong	88,75	6,89
7	Way Khilau	62,73	4,87
8	Way Lima	128,94	10,01
9	Gedong Tataan	147,61	11,46
10	Negeri Katon	151,22	11,74
11	Tegineneng	142,98	11,10
	Jumlah	1.288,08	

Sumber: Kepmedagri 100.1.1-6117 Tahun 2022

Kecamatan Padang Cermin merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Pesawaran dengan luas 174,15 km<sup>2</sup> atau persentase sebesar 13,52%, sedangkan Kecamatan Way Khilau memiliki luas wilayah terkecil seluas 62,73 km<sup>2</sup> dengan persentase 4,87% dari Luas Kabupaten Pesawaran yaitu 1.288,08 km<sup>2</sup> yang terdistribusi menjadi 148 desa. Kondisi wilayah Kabupaten Pesawaran juga terbentuk oleh pulau besar dan kecil sejumlah 36 pulau. Tiga pulau terbesar yaitu pulau Legundi, Pahawang dan Kelagian. Kabupaten Pesawaran juga memiliki beberapa gunung dengan puncak tertinggi berada di Gunung Pesawaran Kecamatan Way Ratai yang memiliki ketinggian 1.681 m dari permukaan laut.

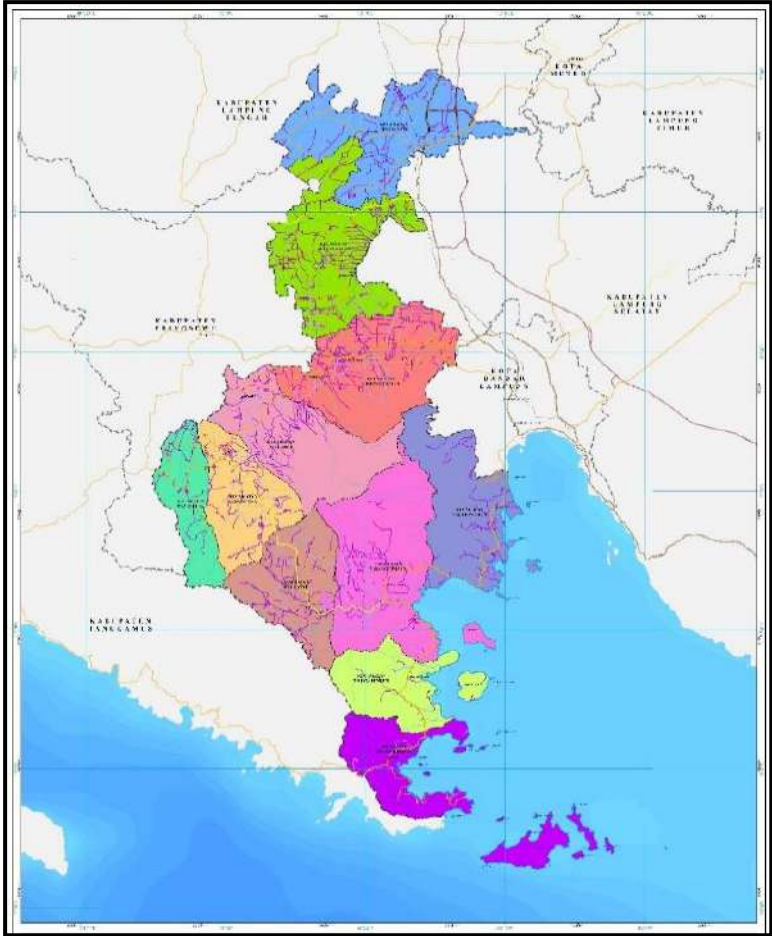
Secara geografis Kabupaten Pesawaran terletak pada kedudukan 104,92<sup>o</sup>-105,34<sup>o</sup> Bujur Timur (BT) dan 5,12<sup>o</sup>-5,84<sup>o</sup> Lintang Selatan (LS). Secara terperinci batas-batas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo, Bangunrejo, Bumi Ratu Nuban, dan Trimurjo (Kabupaten Lampung Tengah).
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Lampung, Kecamatan Kelumbayan, dan Cukuh Balak (Kabupaten Tanggamus).



- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pardasuka, Ambarawa, Gadingrejo, dan Adiluwih (Kabupaten Pringsewu).
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Natar (Kabupaten Lampung Selatan), Kecamatan Kemiling, dan Teluk Betung Barat (Kota Bandar Lampung).

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Kabupaten Pesawaran



Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

b. Topografi

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Pesawaran berdasarkan kemiringan lerengnya dapat dibedakan menjadi 5 kelas yaitu <8%, 8-15%, 15-25%, 25-45% dan >40%. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode interpolasi dapat diketahui sebagian wilayah merupakan wilayah berbukit terjal yang hampir tersebar di seluruh bagian wilayah. Sedangkan wilayah yang memiliki kondisi lahan yang cukup datar berada di wilayah bagian utara. Kelerengn tanah menurut kecamatan di Kabupaten Pesawaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Kemiringan Lereng menurut Kecamatan

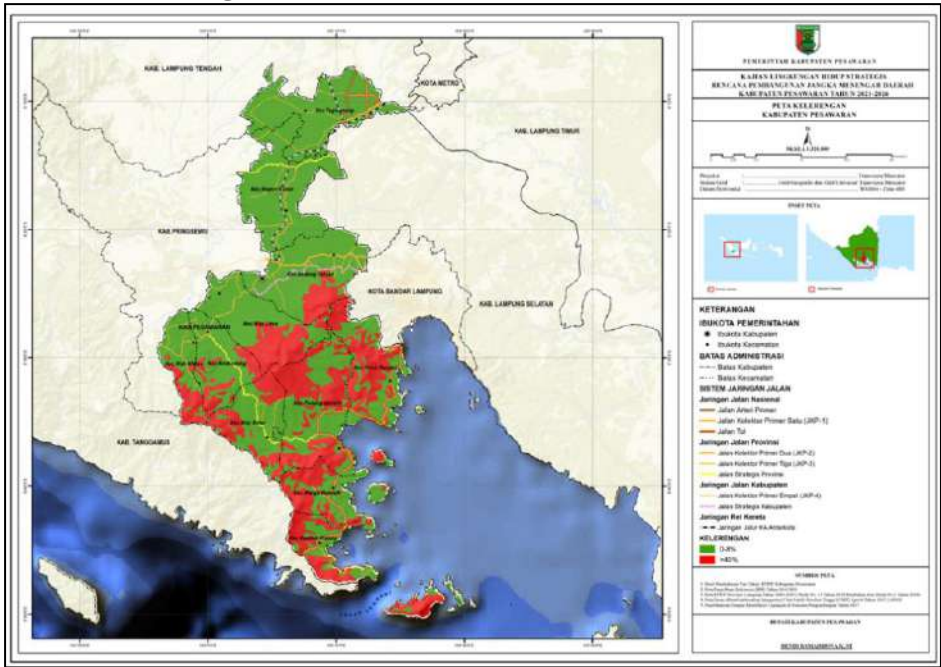
No	Kecamatan	Kelas Lereng (Ha)					Jumlah (Ha)
		<8%	8-15%	15-25%	25-45%	>45%	
1	Punduh Pedada	2.033,25	1.211,62	1.750,67	2.935,67	1.535,43	9.466,64
2	Marga Punduh	2.140,07	891,91	1.450,63	2.742,13	610,55	7.835,29
3	Padang Cermin	4.129,66	2.641,90	2.992,18	5.782,23	1.732,50	17.278,47
4	Teluk Pandan	2.485,77	1.510,72	2.024,37	4.325,64	1.530,71	11.877,21
5	Way Ratai	1.802,86	2.066,14	2.003,93	2.971,50	847,85	9.692,28
6	Kedondong	3.418,22	1.376,63	1.345,06	2.363,15	300,59	8.803,65
7	Way Khilau	2.519,39	505,50	797,55	1.815,74	581,84	6.220,02
8	Way Lima	5.184,28	2.259,09	1.466,93	2.305,05	1.584,38	12.799,73
9	Gedong Tataan	9.745,76	1.741,54	1.193,98	1.389,16	580,81	14.651,25
10	Negeri Katon	14.565,02	293,81	95,62	44,38	6,55	15.005,38
11	Tegineneng	13.755,01	317,77	81,80	24,35	11,42	14.190,35
Jumlah							127.821,20

Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui luas wilayah terbesar dengan kemiringan <8% seluas 14.565,02 ha berada di wilayah Kecamatan Negeri Katon, selanjutnya wilayah terbesar dengan kemiringan 8-15% seluas 2.641,90 ha, wilayah terbesar dengan kemiringan 15-25% seluas 2.992,18 ha, wilayah terbesar dengan kemiringan 25-45% seluas 5.782,23 ha, dan wilayah terbesar dengan kemiringan >45% seluas 1.732,50 ha berada di wilayah Kecamatan Padang Cermin. Adapun pengelompokkan luas wilayah berdasarkan kemiringan lereng di Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

- a. Kemiringan lereng <8% : 61.779,29 ha (48,33%)
- b. Kemiringan lereng 8-15% : 14.816,63 ha (11,59%)
- c. Kemiringan lereng 15-25% : 15.202,72 ha (11,89%)
- d. Kemiringan lereng 25-45% : 26.699,00 ha (20,88%)
- e. Kemiringan lereng >45% : 9.322,63 ha (7,29%)

Gambar 2.2 Peta Kelereng



Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

c. **Klimatologi**

Kabupaten Pesawaran memiliki iklim tropis, suhu tertinggi mencapai 37,0°C pada bulan November dan terendah mencapai 20,8°C pada bulan Juli. Adapun curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember mencapai 254,8 mm dan terendah pada bulan Juni mencapai 85,2 mm dengan rata-rata kelembaban udara antara 74,86 sampai 85,88%. Berdasarkan data curah hujan pada tabel berikut, kondisi iklim mikro sangat berpengaruh pada produksi pertanian di Kabupaten Pesawaran namun perubahan iklim tersebut tidak dapat diprediksi karena suatu hal yang alami tapi hal tersebut dapat diantisipasi dengan mencermati kondisi siklus iklim sebelumnya dan juga memperhatikan informasi cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Kondisi Klimatologi Tahun 2022

No	Bulan	Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )	Hari Hujan	Suhu Rata-rata (°C)	Kelembaban (%)
1	Januari	186,10	23	28,23	78,58
2	Februari	208,50	21	28,41	77,62
3	Maret	201,80	21	28,87	76,71
4	April	206,00	15	29,52	73,39
5	Mei	179,10	20	28,87	78,94
6	Juni	85,20	22	27,93	79,82
7	Juli	139,00	15	28,49	77,86
8	Agustus	99,10	19	28,35	78,58
9	September	154,50	22	28,57	76,93
10	Oktober	183,90	18	28,63	76,16



No	Bulan	Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )	Hari Hujan	Suhu Rata-rata (°C)	Kelembaban (%)
11	November	201,10	25	28,61	76,71
12	Desember	254,80	23	27,83	79,94

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

**d. Geologi**

Secara geologi, wilayah Kabupaten Pesawaran terdapat beberapa Formasi yang berasal dari masa Tersier dan Kuartar. Formasi Qhv (Batuan Gunung Api kuartar muda) merupakan formasi terluas dan mendominasi di wilayah Kecamatan Gedongtatan dan Way Lima. Di Kecamatan Padang Cermin, formasi ini terutama terdapat di bagian tengah, utara, dan sebagian timur. Formasi Tov/Qvt (Batuan Gunung Api Kuartar tua) mendominasi wilayah Kecamatan Punduh Pedada. Formasi ini juga terdapat di wilayah Kecamatan Kedondong dan sebagian wilayah Kecamatan Padang Cermin di bagian barat dan selatan. Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi atau di bawah permukaan. Formasi Geologi ini menunjukkan kelompok-kelompok batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang.

Formasi Qt (Endapan Fluvial) terdapat di timur wilayah Kecamatan Padang Cermin dan timur wilayah Kecamatan Punduh Pedada. Sementara formasi lainnya tersebar di Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Tegineneng dan Punduh Pedada. Untuk kedalaman efektif tanah di wilayah Kabupaten Pesawaran berkisar antara 30 – 100 cm. Kondisi ini dasarnya sangat berpengaruh pada kegiatan pertanian baik lahan basah, lahan kering dan tanaman keras, karena kegiatan pertanian memerlukan kedalaman efektif tanah lebih besar dari 30 cm. Oleh sebab itu, khusus untuk tanaman pangan lahan basah dipersyaratkan pada kedalaman lebih dari 60 cm, sedangkan tanaman pangan lahan kering dan tanaman tahunan/keras cukup sesuai untuk kedalaman efektif tanah lebih dari 30 cm, dan untuk kedalaman tanah kurang dari 30 cm dapat dijadikan lahan konservasi. Kedalaman efektif tanah > 90 cm, meliputi daerah-daerah lembah, bantaran sungai dan dataran banjir yang tersebar di Kabupaten Pesawaran. Kedalaman efektif tanah antara 30 – 90 cm, meliputi daerah-daerah yang berada disekitar perbukitan (Padang Cermin, Way Ratai, Marga Punduh).

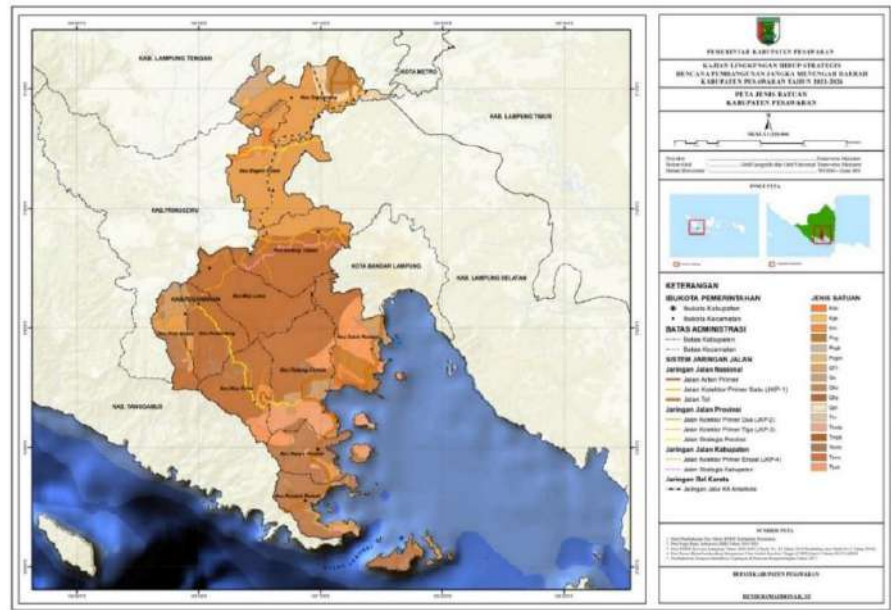
Kedalaman efektif tanah kurang dari 30 cm meliputi sebagian daerah-daerah perbukitan yaitu Padang Cermin, Way Ratai, Marga Punduh. Tekstur tanah ikut menunjang bagi pertumbuhan tanaman dimana tanah yang teksturnya sedang sampai halus relatif lebih mudah diolah dengan kandungan unsur hara serta penyuburnya relatif terjaga. Kondisi tekstur tanah sedang sampai halus sangat cocok pembudidayaan tanaman lahan basah dan tanaman lahan kering sedangkan tekstur kasar lebih sesuai untuk tanaman keras/tahunan.

Tabel 2.4 Formasi Jenis Batuan di Kabupaten Pesawaran

No	Formasi Batuan	Luas (Ha)	Persentase
1	Kds	1.064,62	0,83
2	Kgk	157,70	0,12
3	Km	1.570,88	1,23
4	Pzg	1.802,49	1,41
5	Pzgk	1.910,32	1,49
6	Pzgm	723,46	0,57
7	Qa	6.924,63	5,42
8	Qhv	3.218,04	2,52
9	Qhy	50.793,75	39,74
10	Qpt	2.514,92	1,97
11	Qtl	26.670,49	20,87
12	Tm	52,87	0,04
13	Tmda	6.011,69	4,70
14	Tmpk	157,73	0,12
15	Tomh	16.886,60	13,21
16	Tpos	848,40	0,66
17	Tpot	6.511,97	5,09
	Jumlah	127.960,27	

Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

Gambar 2.3 Peta Jenis Batuan

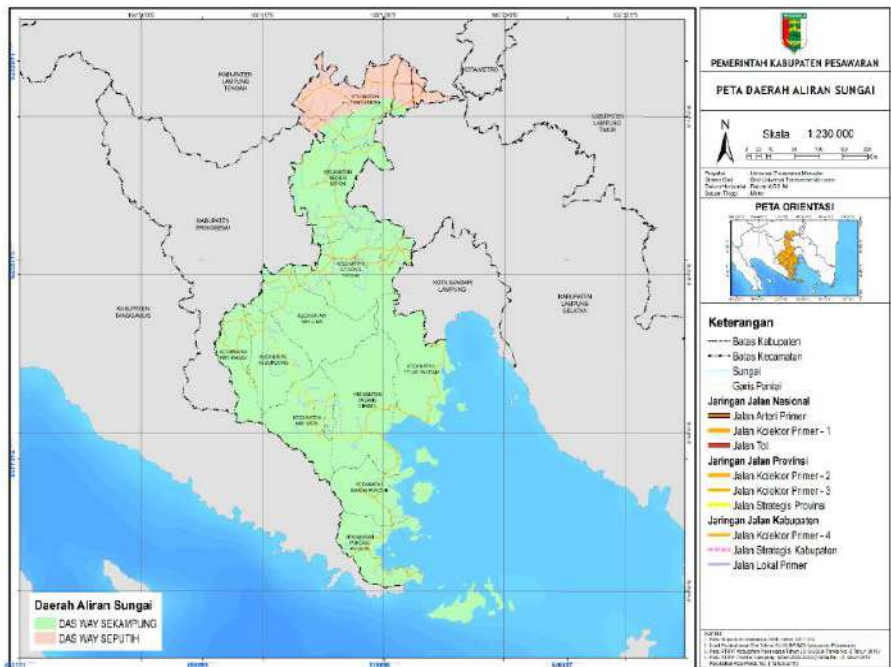


Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

**e. Hidrologi**

Sungai terpanjang di Kabupaten Pesawaran adalah Way Semah di Kecamatan Gedong Tataan dengan panjang 53 km dan daerah aliran sungai seluas 135 km<sup>2</sup> dan sungai terpendek adalah sungai Way Kepayang di Kecamatan Kedondong dengan panjang 4 km. Bentukan morfologis, jenis batuan, proses-proses geomorfik serta keadaan tata air yang ada di Kabupaten Pesawaran sangat menentukan pola drainasenya. Daerah pegunungan dan perbukitan yang pada umumnya mempunyai gradient yang cukup besar membentuk pola drainase dendritik, sedang di daerah dimana proses tektonik nyata mempunyai pola drainase rectangular. Daerah volkan dengan bentukan-bentukan kerucut yang masih utuh membentuk pola radial di daerah puncak dan lereng atas, sedang di lereng tengah dan bawah paralel dan sub-paralel. Kabupaten Pesawaran dilintasi oleh dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Sekampung seluas 1.165,47 km<sup>2</sup> dan DAS Seputih seluas 113,60 km<sup>2</sup>, sehingga Kabupaten Pesawaran memiliki potensi yang relatif besar, khususnya berupa ketersediaan air permukaan yang dapat dikembangkan untuk mendukung sektor pertanian, antara lain dimanfaatkan untuk pengembangan irigasi, budidaya perikanan air tawar, sarana penyediaan air bersih, dan sumber energi baru terbarukan bagi masyarakat, dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), baik secara konvensional maupun inkonvensional, yang selama ini belum dikelola secara maksimal.

Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai



Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

f. Penggunaan Lahan

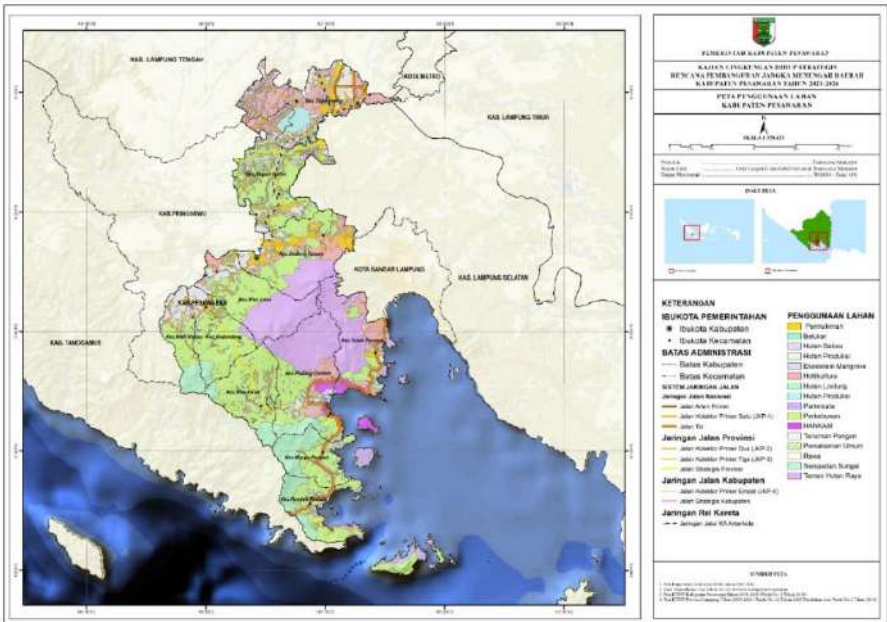
Aspek penting lainnya yang perlu diketahui dan digunakan sebagai bahan kajian adalah pola penggunaan lahan. Pola penggunaan lahan pada suatu wilayah merupakan perwujudan fisik dari semua kegiatan sosial ekonomi penduduk. Hal ini sangat diperlukan, baik untuk memperoleh gambaran mengenai potensi daerah maupun untuk mengetahui pola distribusi kegiatan sosial ekonomi serta intensitas penggunaan lahan dan berbagai kegiatan yang ada. Pola penggunaan lahan di Kabupaten Pesawaran pada dasarnya masih didominasi oleh hutan, perkebunan, sawah dan semak belukar dengan masing-masing persentase mencapai 45,70%; 27,91%; 9,27%; dan 7,33%. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan perekonomian masyarakat masih berada pada sektor primer pertanian dan perkebunan sehingga masih banyak potensi lahan untuk pengembangan wilayah terbangun yang dapat menggeser sektor perekonomian primer ke sekunder (industrialisasi) untuk meningkatkan perekonomian wilayah. Adapun karakteristik penggunaan lahan di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Karakteristik Penggunaan Lahan

No	Penggunaan Lahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Belukar	93,64	7,33
2	Hamparan Pasir Pantai	0,01	0,00
3	Hutan Bakau	6,96	0,54
4	Hutan Campuran	584,11	45,70
5	Ladang	21,40	1,67
6	Pelabuhan antar pulau	0,02	0,00
7	Pemukaman Umum	0,14	0,01
8	Perkebunan	356,76	27,91
9	Permukiman	77,81	6,09
10	Rawa	0,01	0,00
11	Sawah	125,04	9,78
12	Sungai	2,62	0,20
13	Tambak Ikan	9,25	0,72
14	Tanah Kosong	0,31	0,02
15	Waduk	0,13	0,01
Jumlah		1.278,21	

Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039, diolah dari data CSRT Spot 6 LAPAN

Gambar 2.5 Peta Penggunaan Lahan



Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

g. Risiko Bencana Alam

Wilayah Kabupaten Pesawaran memiliki risiko bencana alam berupa rawan banjir, rawan gerakan tanah, rawan tsunami dan rawan gempa bumi. Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran merupakan daerah rawan gempa bumi dengan



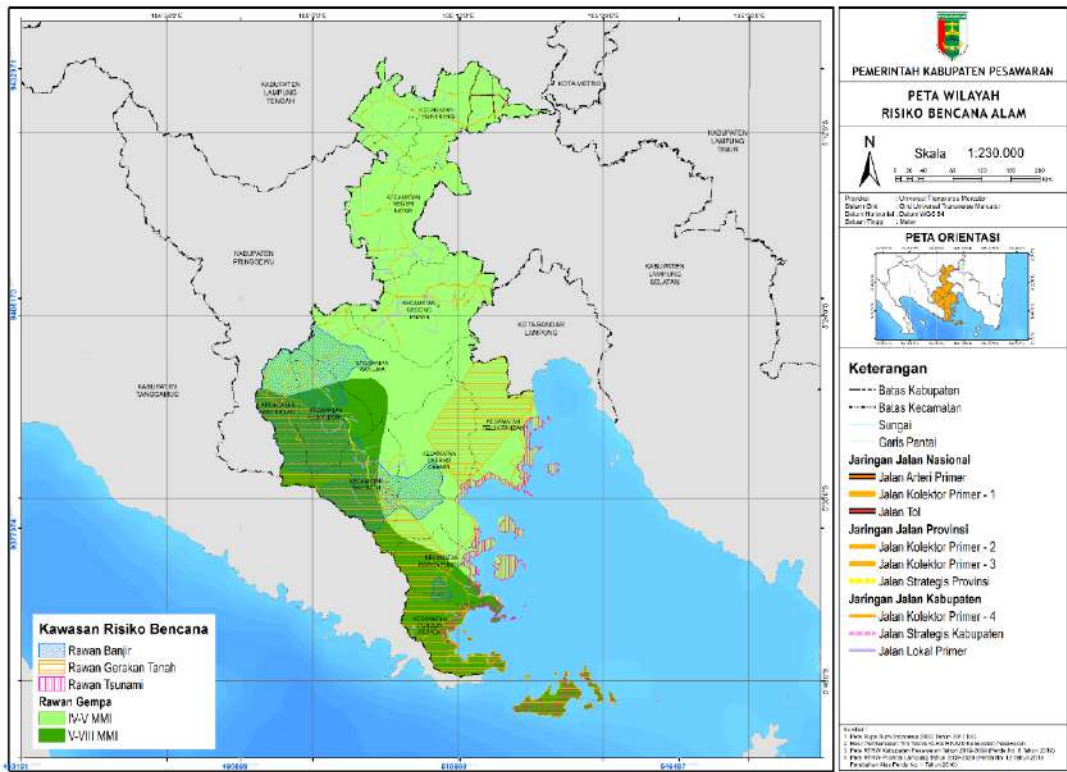
skala MMI yang beragam dari IV hingga VIII. Untuk daerah dengan risiko bencana alam rawan banjir berada pada wilayah barat menuju selatan Kabupaten Pesawaran yakni di Kecamatan Kedondong, Marga Punduh, Padang Cermin, Punduh Pedada, Way Khilau, Way Lima dan Way Ratai. Daerah dengan risiko bencana alam rawan gerakan tanah berada pada wilayah yang juga memiliki risiko bencana alam rawan banjir dan pada wilayah pegunungan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya pada Kecamatan Teluk Pandan, Kedondong, Marga Punduh, Padang Cermin, Punduh Pedada, Way Khilau, dan Way Ratai. Selanjutnya untuk wilayah dengan risiko bencana alam rawan tsunami berada pada daerah pesisir dengan tingkat kerawanan yang tinggi pada Kecamatan Marga Punduh, Padang Cermin, Punduh Pedada, dan Teluk Pandan.

Tabel 2.6 Risiko Bencana Alam

No	Kecamatan	Rawan Banjir	Rawan Gerakan Tanah	Rawan Tsunami	Rawan Gempa Bumi
1	Gedong Tataan	-	-	-	Skala IV-V MMI
2	Kedondong	Ada	Ada	-	Skala V-VIII MMI
3	Marga Punduh	Ada	Ada	Ada	Skala V-VIII MMI
4	Negeri Katon	-	-	-	Skala IV-V MMI
5	Padang Cermin	Ada	Ada	Ada	Skala IV-V MMI
6	Punduh Pedada	Ada	Ada	Ada	Skala IV-V MMI
7	Tegineneng	-	-	-	Skala IV-V MMI
8	Teluk Pandan	-	Ada	Ada	Skala IV-V MMI
9	Way Khilau	Ada	Ada	-	Skala V-VIII MMI
10	Way Lima	Ada	-	-	Skala IV-V MMI
11	Way Ratai	Ada	Ada	-	Skala V-VIII MMI

Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

Gambar 2.6 Peta Risiko Bencana Alam



Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039

**h. Potensi Pengembangan Wilayah**

Berdasarkan uraian kondisi geografis di atas, maka dapat diketahui potensi pengembangan wilayah Kabupaten Pesawaran dengan tetap mengacu pada rencana tata ruang yang telah diatur dalam Perda. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam kerangka pemikiran potensi pengembangan wilayah meliputi aspek letak wilayah (administratif dan geostrategis), kondisi topografi, klimatologi, geologi, hidrologi, penggunaan lahan maupun kondisi geografi lainnya.

Gambar 2.7 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



Potensi pengembangan wilayah terkait dengan kawasan budidaya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039. Berdasarkan Perda dimaksud Kawasan Budidaya Kabupaten Pesawaran terdiri atas:

**1) Kawasan Hutan Produksi**

Kawasan hutan produksi yaitu kawasan hutan produksi Register 18 Tangkit Titi Bungur ditetapkan seluas kurang lebih 1.350 hektar berada di Kecamatan Negeri Katon dan Tegineneng.

**2) Kawasan Pertanian**

Kawasan pertanian terdiri dari kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan perkebunan. Kawasan tanaman pangan ditetapkan seluas lebih dari sama dengan 13.318 hektar yang tersebar di Kecamatan Kedondong, Punduh Pedada, Marga Punduh, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Ratai, Way Khilau, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon, dan Tegineneng. Kawasan hortikultura ditetapkan seluas kurang lebih 13.849 hektar tersebar di Kecamatan Tegineneng, Negeri Katon, Gedong Tataan, Way Lima, Kedondong, Way Khilau, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Ratai, Marga Punduh, dan Punduh Pedada. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 13.847 hektar yang tersebar pada peruntukkan kawasan tanaman pangan dan hortikultura. Kawasan perkebunan ditetapkan seluas kurang lebih 47.414 hektar tersebar di Kecamatan Tegineneng, Negeri Katon, Gedong Tataan, Way Lima, Kedondong, Way Khilau, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Ratai, Marga Punduh, dan Punduh Pedada.

**3) Kawasan Perikanan**

Kawasan perikanan terdiri atas kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budi daya, dan sarana penunjang perikanan. Kawasan perikanan tangkap berada di wilayah perairan Kecamatan Teluk Pandan, Padang Cermin, Marga Punduh dan Punduh Pedada. Kawasan perikanan budi daya ditetapkan seluas kurang lebih 703 hektar yang tersebar di Kecamatan Teluk Pandan, Padang Cermin, Marga Punduh, dan Punduh Pedada. Adapun sarana untuk menunjang kegiatan perikanan berupa pelabuhan perikanan yang terdiri dari pelabuhan perikanan Durian dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berada di Kecamatan Padang Cermin.

**4) Kawasan Pertambangan dan Energi**

Kawasan pertambangan dan energi terdiri dari kawasan pertambangan mineral dan kawasan panas bumi. Kawasan pertambangan mineral meliputi:

- Kawasan pertambangan mineral logam berada di Kecamatan Negeri Katon, Tegineneng, Way Lima, Kedondong, Padang Cermin, Way Ratai, Marga Punduh dan Punduh Pedada;
- Kawasan pertambangan mineral bukan logam berada di Kecamatan Padang Cermin, Teluk Pandan, Marga Punduh dan Punduh Pedada; dan
- Kawasan pertambangan batuan berada di Kecamatan Tegineneng, Negeri Katon, Way Lima, Kedondong, Padang Cermin, Teluk Pandan, Marga Punduh dan Punduh Pedada.

Adapun kawasan panas bumi sebagai potensi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) berada di Kecamatan Way Ratai, Way Lima, Kedondong dan Padang Cermin.

**5) Kawasan Peruntukan Industri**

Kawasan peruntukan industri terdiri atas kawasan industridan sentra industri kecil dan menengah.Kawasan industri ditetapkan seluas kurang lebih 1.341 hektar yang berada di Kecamatan Tegineneng dan Teluk Pandan. Sedangkan sentra industri kecil dan menengah dikembangkan diseluruh kecamatan di Kabupaten Pesawaran.

**6) Kawasan Pariwisata**

Kawasan pariwisata ditetapkan seluas kurang 2.193 hektar yang meliputi Kecamatan Teluk Pandan, Padang Cermin, Marga Punduh, dan Punduh Pedada dengan daya tarik wisata berupa wisata alam pesisir pantai, laut, air terjun, perbukitan, dan wisata buatan.

**7) Kawasan Permukiman**

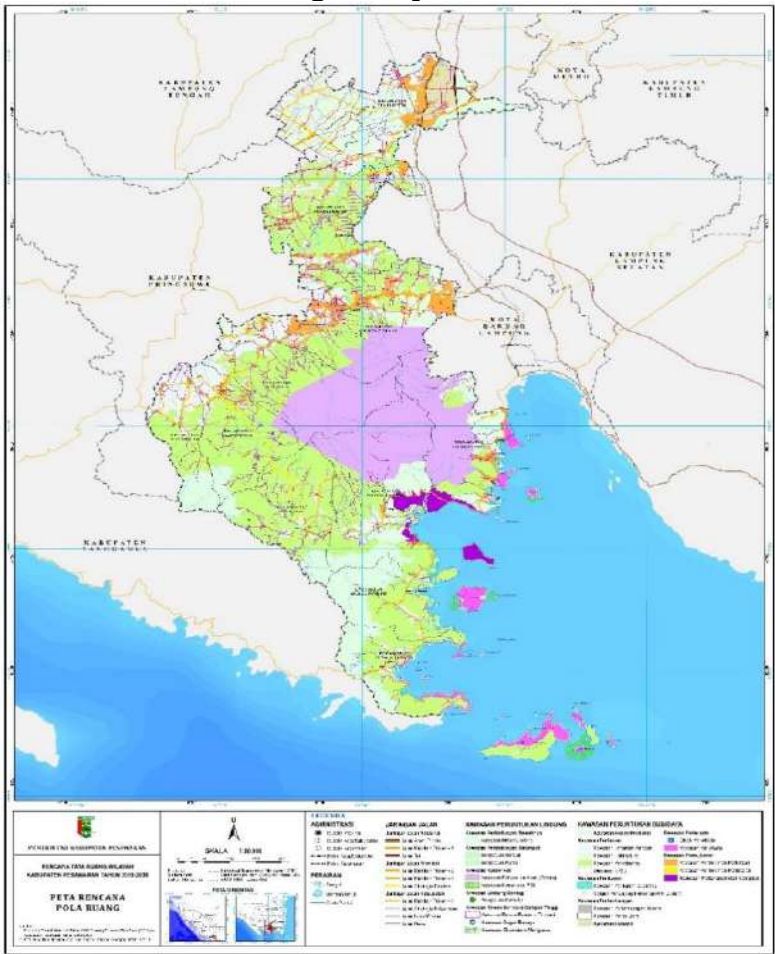
Kawasan permukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. Kawasan pemukiman perkotaan ditetapkan seluas lebih kurang 7.758 hektar tersebar di pusat-pusat kegiatan di Kecamatan Gedong Tataan, Tegineneng, Negeri Katon, Padang Cermin, Teluk Pandan, Kedondong, Way Lima, danWay Ratai. Sedangkan untuk kawasan pemukiman perdesaan ditetapkan seluas lebih kurang 3.147 hektar yang tersebar diKecamatan Tegineneng, Negeri Katon, Gedong Tataan, Way Lima, Kedondong, Way Khilau, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Ratai, Marga Punduh, dan Punduh Pedada.

**8) Kawasan Pertahanan dan Keamanan**

Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:

- a) Kawasan Terpadu Kepentingan Pertahanan dan Keamanan ditetapkan seluas kurang lebih 1.474 hektar berada di Kecamatan Teluk Pandan dan Padang Cermin;
- b) Brigade Infantri (Brigif) 9 Marinir di Kecamatan Padang Cermin;
- c) Kepolisian Resor (Polres)berada di Kecamatan Gedong Tataan;
- d) Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Gedong Tataan;
- e) Kompi Senapan A Batalyon 143 di Kecamatan Gedong Tataan;
- f) Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan; dan
- g) Kepolisian Sektor (Polsek)berada di seluruh kecamatan.

Gambar 2.8 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039



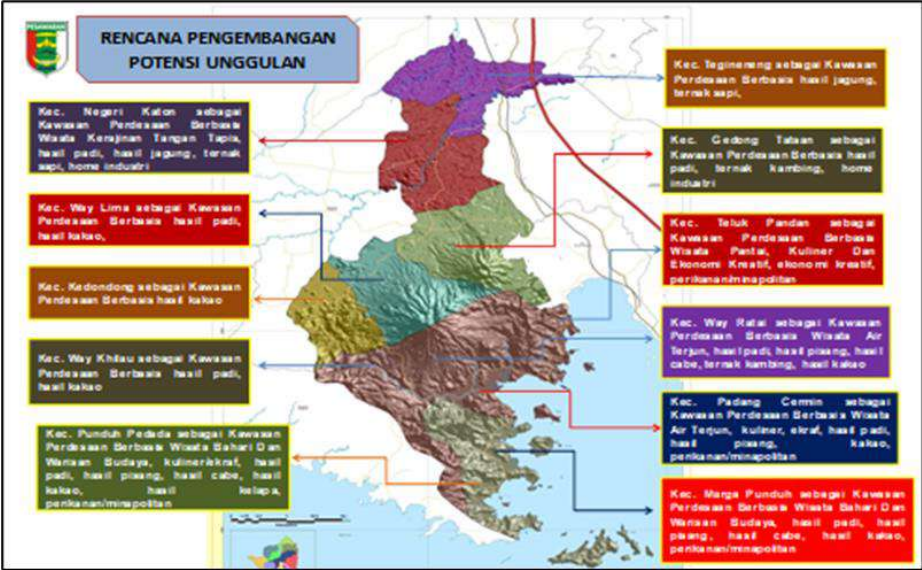
Sumber: RTRW Kabupaten Pesawaran 2019-2039



i. **Potensi Unggulan Daerah**

Pembangunan di Kabupaten Pesawaran diarahkan pada Percepatan perwujudan Desa Tangguh dan Mandiri didorong dalam perspektif kawasan sehingga akselerasi pembangunan dapat lebih cepat terwujud mengingat potensi dan permasalahan desa terpetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih komprehensif.

Gambar 2.9 Peta Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Daerah



Adapun rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pesawaran sebagai berikut:

1) **Pariwisata**

Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Air Terjun, ditetapkan pada Kecamatan Way Ratai, meliputi Desa Gunung Rejo; Desa Sumber Jaya; Desa Ceringin Asri; Desa Poncorejo; Desa Pesawaran Indah; Desa Harapan Jaya; dan Desa Wates Way Ratai. Kecamatan Padang Cermin, meliputi Desa Way Urang; Desa Paya; dan Desa Tambangan.

Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Pantai, Kuliner Dan Ekonomi Kreatif, ditetapkan pada Kecamatan Teluk Pandan, meliputi Desa Sukajaya Lempasing; Desa Sidodadi; Desa Batumenyan; Desa Hanura; Desa Hurun; Desa Cilimus; Desa Talangmulya; Desa Munca; dan Desa Tanjung Agung. Kecamatan Padang Cermin, meliputi Desa Sanggi; Desa Gebang; dan Desa Durian.

Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Bahari Dan Warisan Budaya, ditetapkan pada Kecamatan Punduh Pidada, meliputi Desa Pagar Jaya; Desa Pulau Legundi; dan Desa Sidodadi. Kecamatan Marga Punduh, meliputi Desa Pulau Pahawang; Desa Kekatang; Desa Kampung Baru; Desa Pekon Ampai; Desa Kunyaiyan; Desa Cilimus; dan Desa Tajur. Kecamatan Teluk Pandan, meliputi Desa Batumenyan.

Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Kerajinan Tangan Tapis, ditetapkan pada: Kecamatan Negeri Katon, meliputi Desa Kagungan Ratu; Desa Negeri Katon; Desa Tanjung Rejo; Desa Halangan Ratu; dan Desa Pujo Rahayu.

2) **Pertanian**

Kawasan Perdesaan Berbasis Hasil Padi, ditetapkan pada: Kecamatan Marga Punduh, meliputi Desa Suka Jaya Punduh; Desa Maja; Desa Tajur; Desa Pekon Ampai; Desa Umbul Limus; Desa Kunyaiyan; Desa Kekatang; dan Desa Kampung Baru. Kecamatan Punduh Pedada, meliputi Desa Suka Maju; Desa Bawang; Desa Pagar Jaya; Desa Kota Jawa; Desa Rusaba; Desa Sukajaya Pedada; Desa Baturaja; Desa Banding Agung; dan Desa Bangun Rejo. Kecamatan Way Lima, meliputi Desa Gunung Rejo; Desa Cimanuk; Desa Suka Mandi; Desa Way Harong; Desa Margo Dadi; Desa Tanjung Agung; Desa Kota Dalam; Desa Baturaja; Desa Sindang Garut; Desa Sidodadi; Desa Gedung Dalam; Desa Pekondoh; Desa Pekondoh Gedung; Desa Banjar Negeri; Desa Padang Manis; dan Desa Paguyuban. Kecamatan Way Khilau, meliputi Desa Gunung Sari; Desa Kububatu; Desa Tanjungrejo; Desa Kotajawa; Desa Tanjungkerta; Desa Sukajaya; Desa Padang cermin; Desa Bayas Jaya; Desa Penengahan; dan Desa

Madajaya. Kecamatan Way Ratai, meliputi Desa Gunung Rejo; Desa Mulya Sari; Desa Ponco Rejo; Desa Pesawaran Indah; Desa Harapan Jaya; Desa Wates Way Ratai; Desa Ceringin Asri; Desa Bunut Seberang; Desa Sumber Jaya; dan Desa Bunut. Kecamatan Padang Cermin, meliputi Desa Padang Cermin; Desa Durian; Desa Sanggi; Desa Gayau; Desa Banjaran; Desa Khepong Jaya; Desa Hanau Bekhak; Desa Tambangan; Desa Paya; Desa Way Urang; dan Desa Tri Mulyo. Kecamatan Gedong Tataan, meliputi Desa Kurungan Nyawa; Desa Negeri Sakti; Desa Suka Banjar; Desa Bernung; Desa Taman Sari; Desa Wiyono; Desa Kebagusan; Desa Sukaraja; Desa Bagelen; Desa Gedong Tataan; Desa Bogorejo; Desa Sukadadi; Desa Way Layap; Desa Cipadang; Desa Pampangan; Desa Padang ratu; Desa Karang anyar; dan Desa Kutoarjo. Kecamatan Tegineneng, meliputi Desa Kresno Widodo; Desa Gedung Gumanti; Desa Kejadian; Desa Bumi Agung; Desa Batang Hari Ogan; Desa Rejo Agung; Desa Kota Agung; Desa Negara Ratu Wates; Desa Gunung Sugih Baru; Desa Margo Mulyo; Desa Tri Mulyo; Desa Sinar Jati; Desa Margo Rejo; Desa Gerning; Desa Panca Bakti; dan Desa Sri Wedari. Kecamatan Negeri Katon, meliputi Desa Purworejo; Desa Kagungan Ratu; Desa Pujo Rahayu; Desa Kali Rejo; Desa Tanjung Rejo; Desa Negeri Katon; Desa Negara Saka; Desa Pejambon; Desa Halangan Ratu; Desa Tresno Maju; Desa Lumbir Rejo; Desa Rowo Rejo; Desa Sidomulyo; Desa Poncokresno; Desa Trirahayu; Desa Sinar Bandung; Desa Bangun Sari; Desa Karang Rejo; dan Desa Negeri Ulangan Jaya.

Kawasan Perdesaan Berbasis Hasil Pisang; ditetapkan pada Kecamatan Marga Punduh, meliputi Desa Suka Jaya Punduh; Desa Maja; Desa Tajur; Desa Pekon Ampai; Desa Umbul Limus; Desa Kunyaian; Desa Kekatang; dan Desa Kampung Baru. Kecamatan Punduh Pedada, meliputi : Desa Suka Maju; Desa Bawang; Desa Pagar Jaya; Desa Kota Jawa; Desa Rusaba; Desa Sukajaya Pedada; Desa Baturaja; Desa Banding Agung; dan Desa Bangun Rejo. Kecamatan Way Ratai, meliputi Desa Wates Way Ratai; Desa Sumber Jaya; Desa Bunut; Desa Ceringin Asri; Desa Pesawaran Indah; dan Desa Mulya Sari. Kecamatan Padang Cermin, meliputi Desa Banjaran; Desa Durian; Desa Sanggi; Desa Padang Cermin; dan Desa Hanau Bekhak. Kawasan Perdesaan Berbasis Cabe; ditetapkan pada Kecamatan Marga Punduh, meliputi Desa Suka Jaya Punduh; Desa Maja; Desa Tajur; Desa Pekon Ampai; Desa Umbul Limus; Desa Kunyaian; Desa Kekatang; dan Desa Kampung Baru. Kecamatan Punduh Pedada, meliputi Desa Suka Maju; Desa Bawang; Desa Pagar Jaya; Desa Kota Jawa; Desa Rusaba; Desa Sukajaya Pedada; Desa Baturaja; Desa Banding Agung; dan Desa Bangun Rejo. Kecamatan Way Ratai, meliputi Desa Gunung Rejo; Desa Poncorejo; Desa Ceringin Asri; Desa Pesawaran Indah; Desa Mulyasari; dan Desa Wates Way Ratai.

Kawasan Perdesaan Berbasis Hasil Jagung ditetapkan pada Kecamatan Tegineneng, meliputi Desa Kresno Widodo; Desa Gedung Gumanti; Desa Kejadian; Desa Bumi Agung; Desa Batang Hari Ogan; Desa Rejo Agung; Desa Kota Agung; Desa Negara Ratu Wates; Desa Margo Mulyo; Desa Tri Mulyo; Desa Sinar Jati; Desa Margo Rejo; Desa Gerning; Desa Panca Bakti; dan Desa Sri Wedari. Kecamatan Negeri Katon, meliputi Desa Pujo Rahayu; Desa Tanjung Rejo; Desa Pejambon; Desa Halangan Ratu; Desa Tresno Maju; Desa Lumbir Rejo; Desa Rowo Rejo; Desa Sidomulyo; Desa Poncokresno; Desa Tri Rahayu; Desa Sinar Bandung; dan Desa Bangun Sari.

### **3) *Peternakan***

Kawasan Perdesaan Pengembangan Ternak Kambing ditetapkan pada Kecamatan Way Ratai, yang meliputi Desa Gunung Rejo; Desa Mulyasari; Desa Pesawaran Indah; Desa Harapan Jaya; Desa Wates Way Ratai; Desa Sumber Jaya; Desa Bunut; Desa Bunut Seberang; Desa Caringin Asri. Kecamatan Gedong Tataan, meliputi Desa Kurungan Nyawa; Desa Negeri Sakti; Desa Suka Banjar; Desa Bernung; Desa Taman Sari; Desa Wiyono; Desa Kebagusan; Desa Sukaraja; Desa Bagelen; Desa Gedong Tataan; Desa Bogorejo; Desa Sukadadi; Desa Way Layap; Desa Cipadang; Desa Pampangan; Desa Padang ratu; Desa Karang anyar; Desa Kutoarjo; dan Desa Sungai Langka.

Kawasan Perdesaan Berbasis Hasil Ternak Sapi ditetapkan pada Kecamatan Tegineneng, meliputi Desa Kresno Widodo; Desa Margo Mulyo; Desa Tri Mulyo; Desa Sinar Jati; Desa Gerning; Desa Panca Bakti; Desa Sri Wedari; dan Desa Margo Rejo.



Kecamatan Negeri Katon, yang meliputi : Desa Tanjung Rejo; Desa Negeri Katon; Desa Pejambon; Desa Tresno Maju; Desa Rowo Rejo; Desa Sido Mulyo; Desa Poncokresno; Desa Karang Rejo; Desa Bangun Sari; Desa Tri Rahayu; dan Desa Sinar Bandung.

#### **4) Perkebunan**

Kawasan Pengembangan dan Pengolahan Kakao wilayah I ditetapkan pada: Kecamatan Kedondong, meliputi Desa Tempel Rejo; Desa Sinar harapan, Desa Harapan Jaya; Desa Babakan Loa; Desa Kedondong; Desa Pesawaran; Desa Teba Jawa; Desa Sukamaju. Kecamatan Way Khilau meliputi Desa Bayas Jaya; Desa Padang Cermin; Sukajaya, Penengahan; Mada Jaya; Tanjung Rejo; Desa Kubu Batu; Desa Kota Jawa; Desa Tanjung Kerta. Kecamatan Way Lima meliputi Desa Padang Manis; Desa Banjar Negri; Desa Way harong; Desa Gunung Rejo; Desa Cimanuk; dan Desa Margodadi.

Kawasan Pengembangan dan Pengolahan Kakao wilayah II ditetapkan pada Kecamatan Padang Cermin, meliputi Desa Banjaran; Desa Sanggi; Desa Padang Cermin; Desa Durian; Desa Way Urang; Kecamatan Way Ratai meliputi Desa Gunung Rejo; Desa Harapan Jaya; Desa Pesawaran Indah; Desa Sumber Jaya; Desa Bunut Sebrang; Desa Bunut; Desa Paya; Desa Tambangan; Desa Gayau; Desa Wates Way Ratai. Kecamatan Marga Punduh meliputi Desa Penyandingan; Desa Tajur; Desa Umbul limus; Desa Sukajaya Punduh; Pulau Pehawang. Kecamatan Punduh Pidada, meliputi Desa Banding Agung; Desa Kunyaian; Desa Suka Maju; Desa Bawang; Desa Bangun Rejo; Desa Sukarame; dan Desa Batu Raja.

Kawasan Pengembangan dan Pengolahan Kelapa wilayah II ditetapkan pada Kecamatan Punduh Pidada meliputi Pulau Legundi; Desa Kampung Baru; Desa Sukajaya Punduh; Desa Banding Agung.

#### **5) Perikanan**

Kawasan Perdesaan Pengembangan Perikanan, ditetapkan pada Kecamatan Padang Cermin, meliputi Desa Durian; Desa Sanggi; dan Desa Gayau. Kecamatan Teluk Pandan, meliputi Desa Gebang; dan Desa Suka Jaya. Kecamatan Marga Punduh; meliputi Desa Tajur; dan Desa Pulau Pahawang. Kecamatan Punduh Pidada meliputi Desa Pulau Legundi; dan Desa Sukarame.

Penetapan kawasan perdesaan berbasis minapolitan, ditetapkan pada Kecamatan Padang Cermin, meliputi Desa Padang Cermin; dan Desa Durian. Kecamatan Teluk Pandan, meliputi Desa Gebang; Desa Hurun; Desa Hanura; dan Desa Sidodadi. Kecamatan Punduh Pidada meliputi Desa Bangunrejo; Desa Sukarame; Desa Kampung Baru; Desa Kekatang; Desa Kota Jawa; dan Desa Rusaba.

#### **6) Industri**

Penetapan kawasan perdesaan berbasis home industri ditetapkan pada Kecamatan Gedong Tataan, meliputi Desa Kutoarjo; Desa Bagelen; dan Desa Karang Anyar. Kecamatan Negeri Katon, meliputi Desa Kagungan Ratu; Desa Karang Rejo; Desa Purworejo; Desa Pujo Rahayu; dan Desa Kalirejo.

Penetapan kawasan perdesaan berbasis sentra industri kerajinan tapis, ditetapkan pada Kecamatan Negeri Katon, meliputi Desa Kagungan Ratu, Desa Negeri Katon; Desa Tanjung Rejo; Desa Halangan Ratu; Desa Negara Saka; Desa Kalirejo; Desa Pejambon; dan Desa Negeri Ulangan Jaya.

### **j. Demografi**

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pesawaran, jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2022 sebanyak 487.150 jiwa yang terdiri dari 250.674 jiwa penduduk laki-laki dan 236.479 jiwa penduduk perempuan. Dilihat dari distribusi antar kecamatan di Tahun 2022, maka ada dua kecamatan yaitu Kecamatan Punduh Pidada dan Marga Punduh tercatat sebagai daerah dengan penduduk di bawah 20 ribu jiwa dan Kecamatan Gedong Tataan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Pesawaran dengan jumlah 110.470 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 mencapai 381,12

jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 11 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Gedong Tataan dengan kepadatan sebesar 754,04 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Punduh Pidada sebesar 167,10 jiwa/km<sup>2</sup>. Masyarakat Kabupaten Pesawaran merupakan masyarakat yang heterogen. Etnis yang ada antara lain Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Tionghoa, Bugis, dan beberapa suku dari wilayah kepulauan Indonesia lainnya. Adapun jumlah penduduk, distribusi persentase penduduk dan kepadatan penduduk Tahun 2022 menurut Kecamatan di Kabupaten Pesawaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Jumlah, Distribusi, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah	Persentase	Kepadatan
		(jiwa)	(%)	(jiwa/km <sup>2</sup> )
1.	Punduh Pidada	15.820	3,25	167,10
2.	Marga Punduh	15.620	3,21	199,40
3.	Padang Cermin	29.670	6,09	171,70
4.	Teluk Pandan	40.070	8,22	337,36
5.	Way Ratai	35.560	7,30	366,94
6.	Kedondong	38.690	7,94	439,45
7.	Way Khilau	31.570	6,48	507,60
8.	Way Lima	38.530	7,91	301,00
9.	Gedong Tataan	110.470	22,68	754,04
10.	Negeri Katon	72.770	14,94	484,94
11.	Tegineneng	58.380	11,98	411,44
Jumlah		487.150	100,00	381,12

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

Peningkatan jumlah penduduk utamanya dipengaruhi oleh migrasi masuk dan tingkat kelahiran. Peningkatan kepadatan penduduk memberikan 2 (dua) dampak sekaligus, bagaikan dua sisi dalam satu mata uang, yaitu dampak negatif dan dampak positif secara bersamaan. Terpusatnya penduduk pada suatu wilayah (*aglomerasi*), akan berdampak pada aktivitas ekonomi dengan intensitas tinggi, di mana dalam perspektif ekonomi timbulnya *aglomerasi* akan menciptakan efisiensi “biaya” dalam proses transformasi sumberdaya-sumberdaya yang ada serta *multiplier effect* berupa peningkatan produksi dan konsumsi masyarakat sebagai penggerak ekonomi utama.

Di sisi lain, terpusatnya penduduk pada suatu wilayah tertentu, bukan saja akan berimplikasi terhadap masalah kependudukan, seperti permukiman kumuh, peningkatan pelayanan publik, disfungsi tata guna lahan dan akan berimplikasi pula terhadap masalah keamanan, ketertiban, ketenteraman dan masalah sosial lainnya.

Pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi pada peningkatan kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, daya dukung lingkungan serta sarana prasarana lainnya. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesawaran dalam beberapa tahun terakhir adalah sebesar rata-rata 2,28% per tahun. Perkembangan penduduk Kabupaten Pesawaran terlihat dari tabel berikut.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kabupaten Pesawaran Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Punduh Pidada	13.575	13.619	15.500	15.640	15.820
2.	Marga Punduh	13.698	13.744	15.360	15.500	15.620
3.	Padang Cermin	28.753	29.181	29.200	29.460	29.670
4.	Teluk Pandan	37.447	38.007	39.210	39.560	40.070
5.	Way Ratai	36.201	36.740	35.290	35.600	35.560
6.	Kedondong	34.385	34.573	38.020	38.360	38.690
7.	Way Khilau	27.300	27.448	30.890	31.160	31.570
8.	Way Lima	31.033	31.148	37.400	37.730	38.530
9.	Gedong Tataan	98.593	99.982	107.370	108.320	110.470
10.	Negeri Katon	66.374	66.860	71.630	72.270	72.770

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
11.	Tegineneng	52.883	53.078	57.600	58.110	58.380
<b>Jumlah</b>		<b>440.192</b>	<b>444.380</b>	<b>477.470</b>	<b>481.710</b>	<b>487.150</b>
<b>Pertumbuhan</b>		<b>1,00%</b>	<b>0,95%</b>	<b>7,45%</b>	<b>0,88%</b>	<b>1,12%</b>
<b>Pertumbuhan Rata-rata per Tahun</b>						<b>2,28%</b>

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2019-2023

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi untuk melakukan percepatan pembangunan daerah yang diiringi dengan program-program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi dapat juga menjadi beban/masalah jika tidak disertai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang mumpuni. Dari aspek rasio jenis kelamin (*sex ratio*), secara umum penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat dijelaskan dari *sex ratio* yang nilainya lebih dari 100. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 sebesar 106 yang berarti dari tiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 106 penduduk laki-laki. Kecamatan Padang Cermin memiliki nilai *sex ratio* tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu, sebesar 108,5.

Tabel 2.9 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Total	Laki-Laki	Perempuan	
1.	Punduh Pidada	15.820	8.172	7.641	106,2
2.	Marga Punduh	15.620	8.145	7.527	107,7
3.	Padang Cermin	29.670	15.513	14.282	108,5
4.	Teluk Pandan	40.070	20.805	19.201	108,2
5.	Way Ratai	35.560	18.663	17.342	107,5
6.	Kedondong	38.690	19.929	18.860	105,6
7.	Way Khilau	31.570	16.296	15.219	106,6
8.	Way Lima	38.530	19.494	18.660	104,0
9.	Gedong Tataan	110.470	56.051	53.498	105,3
10.	Negeri Katon	72.770	37.613	35.471	106,3
11.	Tegineneng	58.380	29.993	28.778	104,2
<b>Jumlah</b>		<b>487.150</b>	<b>250.674</b>	<b>236.479</b>	<b>106,0</b>

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran 2023

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan indikator makro yang masih relevan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi, variabel lainnya, dan distribusi pendapatan (*distribution of income*) antar golongan masyarakat. Dengan demikian ukuran pertumbuhan ekonomi masih tetap digunakan sebagai tolok ukur terutama oleh negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi dari barang dan jasa pada periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya jika negatif menunjukkan adanya penurunan perekonomian. Munculnya Berdasarkan tabel dibawah ini pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor lapangan usaha pada Tahun 2022 tertinggi pada sektor jasa lainnya sebesar 28,54% dan terendah pada sektor pertambangan dan penggalian yang berkontraksi hingga -2,84%. Covid-19 pada akhir Tahun 2019 memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesawaran dalam tiga tahun terakhir. Sebelum terjadinya Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi berada pada angka minimal 5% per tahunnya, dimana pada Tahun 2020, tahun pertama Covid-19 menyebabkan perekonomian berkontraksi hingga -1,26%. Seiring dengan berjalannya waktu pada Tahun 2021 aktivitas perekonomian mulai bangkit hingga dapat mencapai angka pertumbuhan sebesar 2,08% dan terus berkembang mencapai 4,55% pada Tahun 2022.

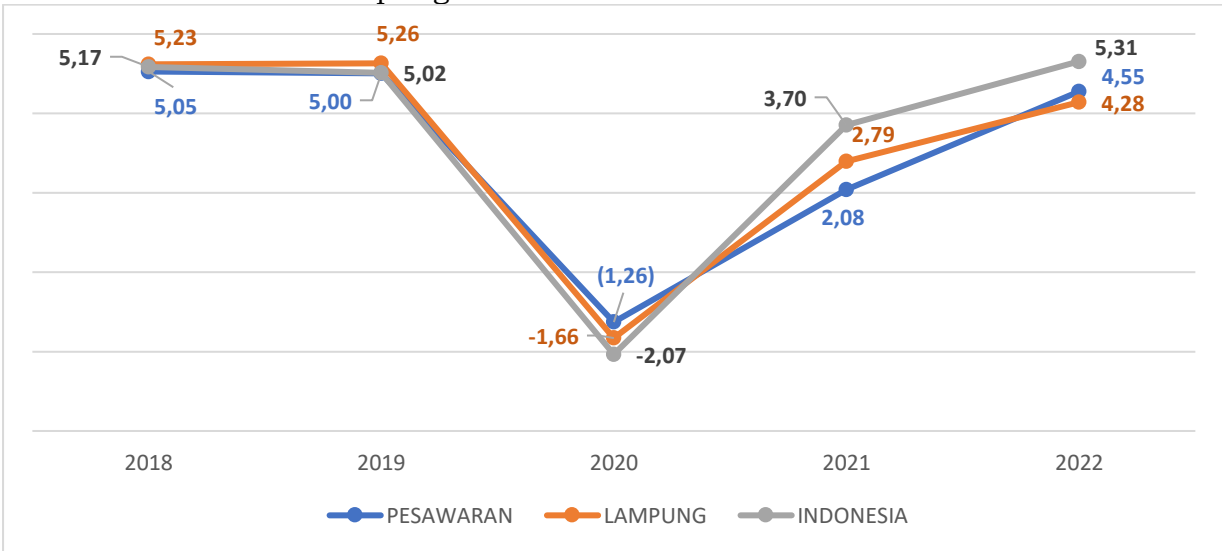
Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,58	1,19	0,07	-1,27	1,56
2	Pertambangan dan Penggalian	4,23	2,35	-0,03	1,87	-2,84
3	Industri Pengolahan	7,51	5,59	-4,77	6,90	2,20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,58	7,62	7,23	4,49	6,18
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,58	6,48	5,18	8,39	1,20
6	Konstruksi	9,96	9,00	-2,18	1,59	7,57
7	Perdagangan Besar dan Eceran	7,39	8,55	-4,87	5,63	10,52
8	Transportasi dan Pergudangan	6,74	10,46	-4,03	5,25	18,93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,53	17,93	-3,81	0,28	14,51
10	Informasi dan Komunikasi	8,96	8,88	9,05	6,67	5,14
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,04	3,59	2,78	0,91	-1,56
12	Real Estate	5,92	6,51	-2,29	1,32	7,59
13	Jasa Perusahaan	2,12	4,16	-2,15	2,04	14,31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,06	5,11	3,84	2,45	-1,61
15	Jasa Pendidikan	9,49	10,03	3,85	3,32	2,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,88	7,04	9,26	5,12	0,01
17	Jasa Lainnya	7,96	12,78	-11,57	4,28	28,54
	<b>Kabupaten Pesawaran</b>	<b>5,05</b>	<b>5,00</b>	<b>-1,26</b>	<b>2,08</b>	<b>4,55</b>

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

Secara total berdasarkan PDRB harga konstan Tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran berfluktuasi, Tahun 2018 sebesar 5,05%, Tahun 2019 sebesar 5,00%, Tahun 2020 menjadi -1,26%, Tahun 2021 menjadi 2,08%, dan Tahun 2022 menjadi 4,55%. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022 tersaji pada gambar berikut.

Gambar 2.10 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

**b. Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi dan kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (*lapangan usaha*) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha pada tahun 2022 adalah sebesar 18.687,39 miliar rupiah. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan penyumbang PDRB terbesar yaitu 7.450,97 miliar rupiah. Kategori dengan penyumbang nilai PDRB terbesar kedua di Kabupaten Pesawaran adalah Kategori Perdagangan Besar dan Eceran yaitu 2.872,81 miliar rupiah. Sedangkan kategori dengan penyumbang nilai PDRB terbesar ketiga adalah Kategori Industri Pengolahan yaitu 2.641,91 miliar rupiah. Perkembangan PDRB ADHB per sektor lapangan usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (dalam Miliar)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.444,83	6.669,87	6.787,28	6.830,86	7.450,97
2	Pertambangan dan Penggalian	192,21	201,83	220,63	230,05	229,66
3	Industri Pengolahan	2.181,36	2.335,74	2.242,32	2.464,09	2.641,91
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,36	8,10	8,63	9,34	10,00
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9,08	9,71	10,23	11,18	11,43
6	Konstruksi	1.523,01	1.688,65	1.647,12	1.724,52	1.903,31
7	Perdagangan Besar dan Eceran	2.017,96	2.277,83	2.211,87	2.369,09	2.872,81
8	Transportasi dan Pergudangan	412,22	457,01	447,42	478,45	636,62
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	195,06	232,65	224,88	226,18	264,28
10	Informasi dan Komunikasi	489,43	537,87	576,94	599,49	636,66
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	63,10	66,35	68,23	71,44	75,41
12	Real Estate	311,02	350,49	350,05	354,86	392,90
13	Jasa Perusahaan	9,04	9,57	9,52	9,79	11,59
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	567,01	599,10	629,34	642,44	650,04
15	Jasa Pendidikan	469,70	530,01	550,75	581,03	616,55
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	94,06	101,92	112,29	120,31	123,01
17	Jasa Lainnya	113,15	131,49	114,24	119,86	160,24
	<b>Nilai PDRB Kab. Pesawaran</b>	<b>15.099,60</b>	<b>16.208,19</b>	<b>16.211,74</b>	<b>16.842,98</b>	<b>18.687,39</b>

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

Tabel diatas menunjukkan perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Pesawaran yang mengalami kenaikan setiap tahunnya persektor lapangan usaha dari tahun 2018–2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa masing-masing sektor masih sangat memungkinkan untuk berkembang sesuai dengan kemajuan daerah Kabupaten Pesawaran. Walaupun tidak dapat menunjukkan unsur pemerataan pendapatan perorang sebagai cerminan kesejahteraan daerah namun demikian ukuran kesejahteraan pada umumnya PDRB menjadi *proxi* yang masih dipakai hingga saat ini.

Tabel 2.12 Struktur Komposisi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Sektor Ekonomi	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	42,68	41,15	41,87	40,55	39,87
B	Pertambangan dan Penggalian	1,27	1,25	1,36	1,37	1,23
C	Industri Pengolahan	14,45	14,41	13,83	14,63	14,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06



Sektor Ekonomi	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
F	Konstruksi	10,09	10,42	10,16	10,24	10,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran	13,36	14,05	13,64	14,06	15,37
H	Transportasi dan Pergudangan	2,73	2,82	2,76	2,84	3,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,29	1,44	1,39	1,34	1,41
J	Informasi dan Komunikasi	3,24	3,32	3,56	3,57	3,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,42	0,41	0,42	0,42	0,40
L	Real Estate	2,06	2,16	2,16	2,11	2,10
M,N	Jasa Perusahaan	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,76	3,70	3,88	3,81	3,48
P	Jasa Pendidikan	3,11	3,27	3,40	3,45	3,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62	0,63	0,69	0,71	0,66
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,75	0,81	0,70	0,71	0,86

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

Berdasarkan tabel diatas sektor basis ekonomi yang menunjang perekonomian Kabupaten Pesawaran berturut-turut yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 39,87 persen, Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 15,37 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 14,14 persen.

Berdasarkan Struktur PDRB Atas Harga Berlaku menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Pesawaran (miliar rupiah) Tahun 2022, distribusi terbesar terdapat pada Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga yaitu sebesar 10.816,88 miliar Rupiah, Pembentukan Modal Tetap Bruto yaitu 5.702,62 miliar Rupiah, serta Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yaitu sebesar 1.103,13 miliar Rupiah. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Pesawaran (miliar rupiah) Tahun 2018–2022 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.13 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (dalam Miliar)

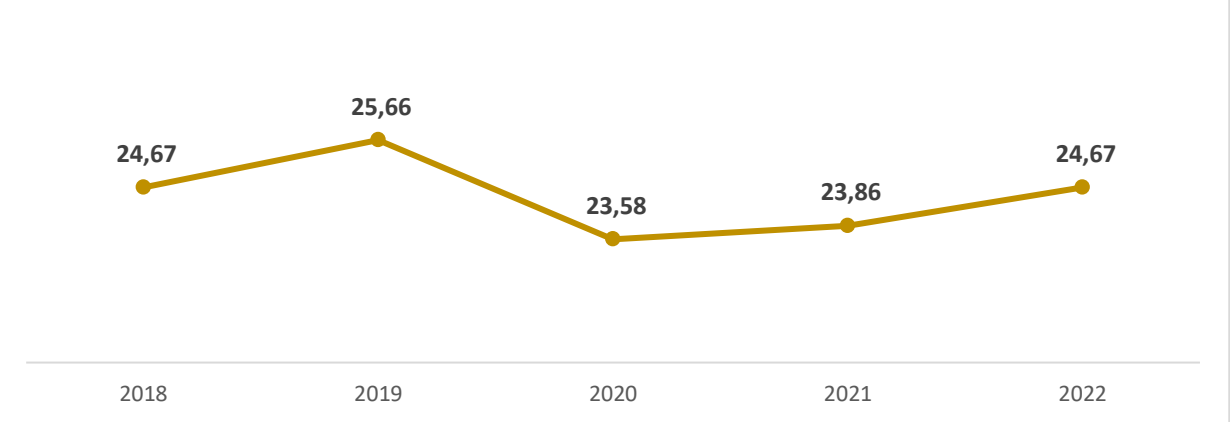
Jenis Pengeluaran	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.659,59	9.349,29	9.325,11	9.780,52	10.816,88
Pengeluaran Konsumsi LNPRT NPISH	198,79	220,37	225,11	230,55	243,87
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.074,8	1.125,38	1.119,81	1.141,64	1.103,13
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.706,00	5.167,52	5.029,77	5.324,66	5.702,62
Perubahan Inventori	5,61	2,07	182,34	-245,34	0,48
Net Ekspor Barang dan Jasa/Net	454,82	343,57	329,60	613,02	820,40
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>15.099,60</b>	<b>16.208,19</b>	<b>16.211,74</b>	<b>16.845,05</b>	<b>18.687,38</b>

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

**c. PDRB per Kapita**

PDRB Per kapita Kabupaten Pesawaran berdasarkan data BPS Tahun 2021 menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. Pada Tahun 2017 PDRB Per kapita Kabupaten Pesawaran sebesar 23,71 juta per tahun, tahun 2018 sebesar 24,67 juta per tahun, tahun 2019 sebesar 25,66 juta per tahun, dan tahun 2020 menurun menjadi 23,58 juta per tahun akibat dampak Pandemi Covid-19 serta kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 23,86 juta per tahun, sebagaimana tercantum dalam grafik di bawah.

Gambar 2.11 Grafik Perkembangan PDRB ADHK Perkapita Tahun 2018-2022 (dalam Juta)



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

**d. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)**

Dalam kurun waktu Tahun 2018 hingga 2022, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pesawaran mengalami tren yang fluktuatif dimana mengalami peningkatan pada Tahun 2021 sebesar 0,35% akibat dampak Pandemi Covid-19. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 1,26% menjadi 13,85% atau sebanyak 63.170 jiwa. Data perkembangan penduduk miskin dari Tahun 2018 hingga 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.14 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Tahun 2018-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Per kapita per bulan)	Penduduk Miskin		Indeks Gini
		Jumlah	Persentase (%)	
2018	360.909	70.140	15,97	0,316
2019	372.649	67.360	15,19	0,310
2020	403.444	66.040	14,76	0,288
2021	420.032	68.310	15,11	0,299
2022	452.521	63.170	13,85	0,251

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

Selanjutnya indeks Gini di Kabupaten Pesawaran menunjukkan tren fluktuatif, pada Tahun 2018 berada pada 0,316, mengalami penurunan pada angka 0,310 pada tahun 2019 dan kembali menurun pada Tahun 2020 di angka 0,288 poin. Namun mengalami peningkatan pada Tahun 2021 menjadi 0,299 poin dan hingga Tahun 2022 mengalami tren positif yang menurun pada angka 0,251 poin. Hal ini bermakna bahwa terjadi penurunan angka ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pesawaran, lebih lanjut indeks Gini Kabupaten Pesawaran lebih baik dengan capaian Provinsi Lampung (0,313) pada Tahun 2022 dan lebih baik dari capaian nasional (0,381).

**e. Indeks Pembangunan Manusia**

IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Dengan pengukuran IPM ini paling tidak ada 3 manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah: i) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); ii) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan iii) IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

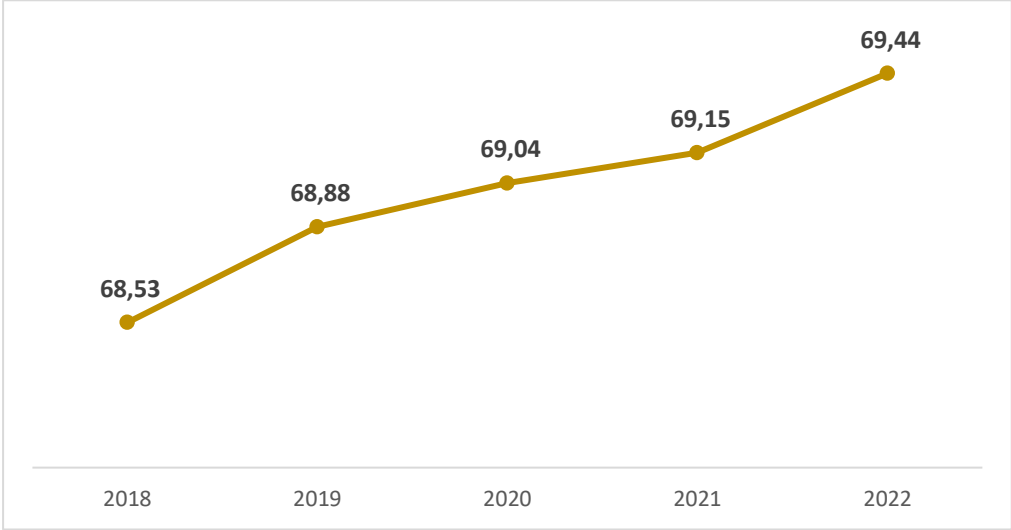
Sejak Tahun 2010 BPS telah menggunakan metode baru dalam penentuan IPM. Perubahan tersebut mencakup data yang digunakan dan metode perhitungan. Dengan mengganti angka melek huruf dengan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Sementara itu dari sisi pendapatan PNB per kapita menggantikan PDB per kapita karena lebih



menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Selain itu dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Hal tersebut menunjukkan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Perkembangan angka harapan hidup di Kabupaten Pesawaran dari Tahun 2018 sampai 2022 menunjukkan tren yang baik. Pada Tahun 2018 berada pada angka 68,53 poin dan meningkat menjadi 68,88 di Tahun 2019. Selanjutnya terus mengalami peningkatan hingga Tahun 2022 berada pada angka 69,44 poin.

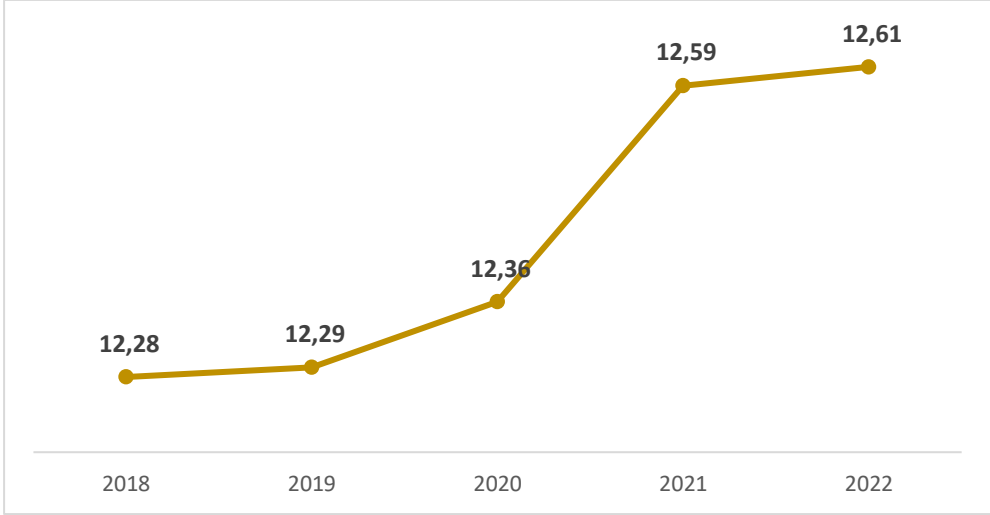
Gambar 2.12 Grafik Angka Harapan Hidup Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

Angka harapan lama sekolah menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Harapan lama sekolah pada rentang waktu Tahun 2018-2022 meningkat dari angka 12,28 menjadi 12,61. Harapan lama sekolah di Kabupaten Pesawaran pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang paling besar dalam lima tahun terakhir sebesar 0,23 poin. Secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,61 tahun atau setara dengan Diploma I.

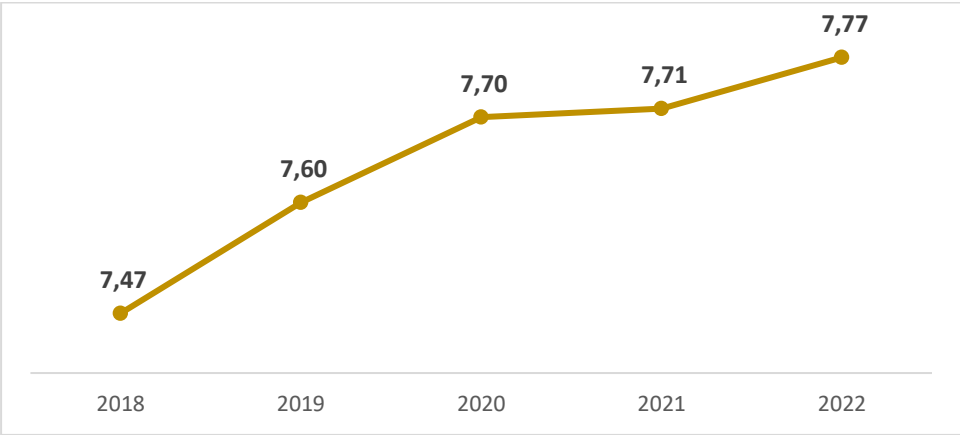
Gambar 2.13 Grafik Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

Angka rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan dari Tahun 2018 pada angka 7,47 menjadi 7,77 pada Tahun 2022. Rata-rata lama sekolah pada Tahun 2022 menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk di Kabupaten Pesawaran yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,77 tahun atau hampir menyelesaikan kelas VIII (Pendidikan menengah pertama kelas 2).

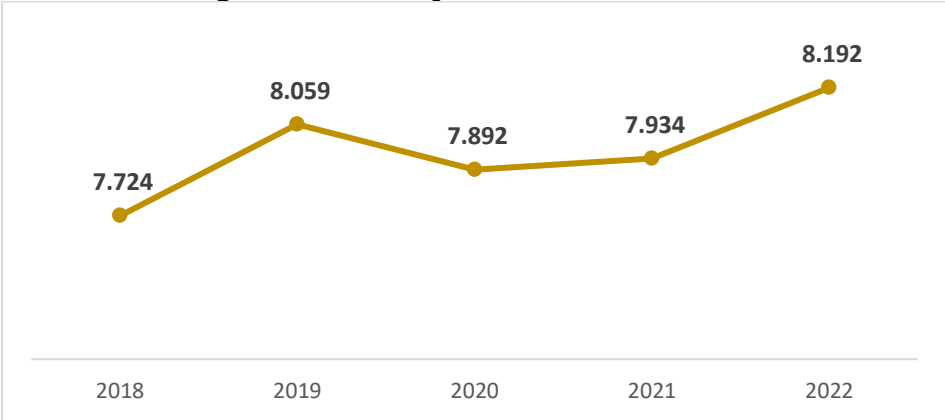
Gambar 2.14 Grafik Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

Daya beli adalah kemampuan masyarakat untuk membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Kemampuan daya beli menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Kemampuan daya beli di Kabupaten Pesawaran pada rentang waktu 2018 sampai 2022 befluktuasi. Pada Tahun 2018 berada pada angka 7.724,00 ribu rupiah/orang/tahun meningkat hingga Tahun 2019 pada angka 8.059,00 ribu rupiah/orang/tahun dan menjadi 7.892,00 ribu rupiah/orang/tahun pada Tahun 2020 karena adanya Pandemi Covid-19, kemudian pada Tahun 2021 meningkat kembali menjadi 7.934,00 ribu rupiah/orang/tahun hingga mencapai 8.192,00 ribu rupiah/orang/tahun pada Tahun 2022.

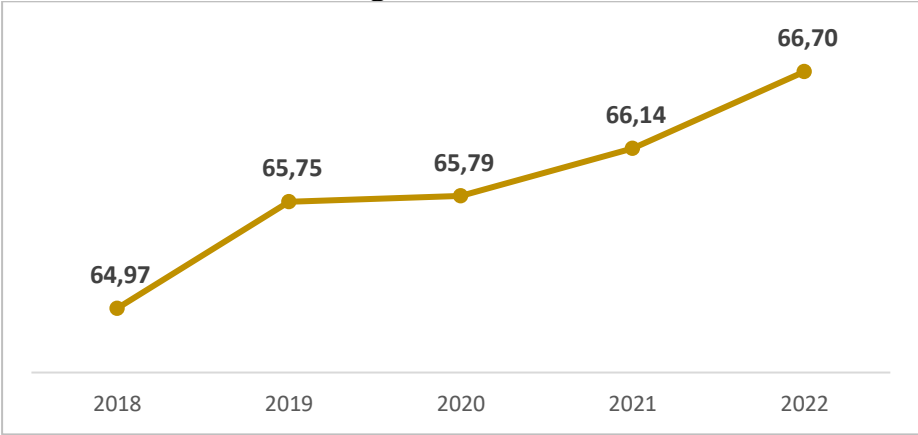
Gambar 2.15 Grafik Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

Perkembangan IPM Kabupaten Pesawaran dari Tahun 2018 hingga 2022 setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 tercatat 64,97 poin meningkat menjadi 66,70 poin di Tahun 2022 yang artinya nilai IPM tersebut masih masuk ke dalam kategori sedang.

Gambar 2.16 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

**f. Ketenagakerjaan**

Indikator ketenagakerjaan yang paling umum digunakan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK

mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja pada usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Sedangkan TPT adalah ukuran yang menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan data pada tabel dibawah, TPAK Kabupaten Pesawaran pada lima tahun terakhir mengalami perkembangan menuju tren yang berfluktuatif. Selama kurun waktu tersebut persentase jumlah angkatan kerja yang terserap dalam dunia kerja mengalami perkembangan yang cukup baik, pada tahun 2018 persentase jumlah angkatan kerja yang berkerja sebesar 68,23 persen yang meningkat menjadi 69,49 persen pada Tahun 2020 namun mengalami penurunan pada Tahun 2021 menjadi 65,42 persen akibat Pandemi Covid-19. Selanjutnya cerminan angka tersebut tidak berpengaruh terhadap *progress* menurunnya tingkat pengangguran dari 4,64 persen pada Tahun 2018 menjadi 4,19 pada Tahun 2021. Namun pada Tahun 2022 tingkat pengangguran meningkat menjadi 5,06 persen.

Tabel 2.15 Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2018-2022

Tahun	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka
2018	68,23	4,64
2019	67,80	4,34
2020	69,49	4,64
2021	65,42	4,19
2022	71,27	5,06

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

**g. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender**

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Indikator yang menjadi pengukuran dalam hal pengarusutamaan gender adalah Indeks Pembangunan gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG). IPG terdiri dari 4 (empat) indikator komposit yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) , Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah dan Sumbangan pendapatan.

Pembangunan perempuan dalam suatu pembangunan wilayah yang diukur menggunakan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sejak Tahun 2017 hingga 2022, IPG Kabupaten Pesawaran mengalami tren peningkatan kecuali pada Tahun 2019 menurun 0,27 dan pada Tahun 2020 kembali meningkat sampai dengan Tahun 2022 yaitu berada pada angka 87,77. Hal tersebut menunjukkan perlunya upaya peningkatan pembangunan SDM perempuan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam indikator-indikator pembentuk IPM.

Tabel 2.16 Kondisi Pembangunan Gender Tahun 2017-2022

Indikator Gender	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,25	87,57	87,30	87,20	87,22	87,77
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,51	67,03	72,59	72,21	73,70	73,70

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesawaran 2023

Sedangkan IDG terdiri dari 3 (tiga) indikator komposit yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manager, profesional, teknisi dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. Kabupaten Pesawaran selama kurun waktu Tahun 2017-2022 mengalami tren fluktuatif, pada Tahun 2017 berada pada poin 70,51, kemudian mengalami penurunan menjadi 67,03 di Tahun 2018 dan meningkat kembali pada angka tertinggi 72,59 pada Tahun 2019 dan

meningkat kembali pada Tahun 2021 di angka 73,70 dan tetap berada pada angka yang sama di Tahun 2022.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan Urusan Wajib

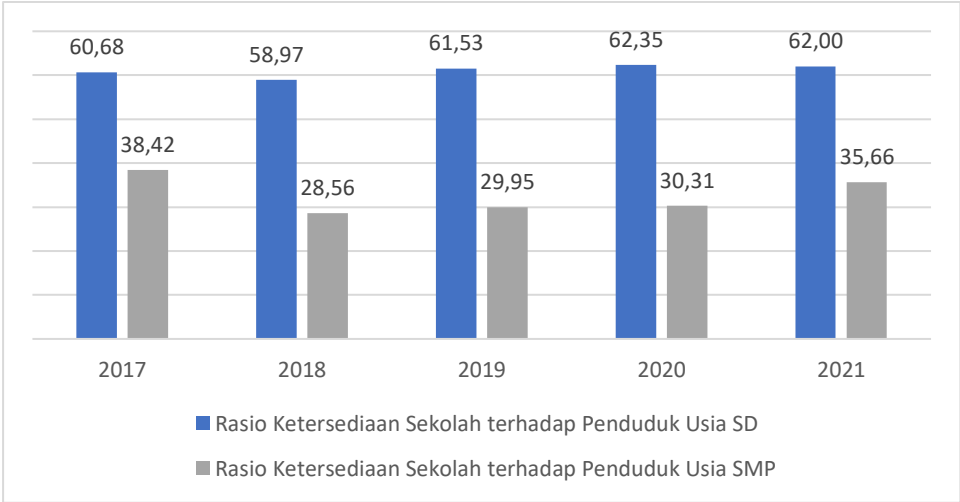
A. Urusan Pendidikan

1) Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan penduduk usia pendidikan menengah pertama.

Secara umum, tren rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Pesawaran selama kurun waktu Tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2017 rasio ketersediaan sekolah jenjang SD tercatat 60,68 per 10.000 penduduk usia SD dan mengalami peningkatan menjadi 62,00 per 10.000 penduduk usia SD di Tahun 2021. Sedangkan rasio ketersediaan sekolah pada jenjang SMP di Tahun 2017 tercatat 38,42 per 10.000 penduduk usia SMP kemudian menurun menjadi 35,66 per 10.000 penduduk usia SMP di Tahun 2021. Kondisi demikian bermakna masih kurangnya ketersediaan sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Pesawaran. Kondisi rasio ketersediaan sekolah dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.17 Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran 2022

2) Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata

Rasio Guru terhadap murid idealnya 500 orang guru untuk 10.000 murid atau 1 (satu) orang guru untuk 20 murid. Jenjang pendidikan SD di Kabupaten Pesawaran jika dibandingkan dengan angka rasio ideal sudah melampaui. Pada Tahun 2017 rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata jenjang SD sebesar 1 (satu) guru untuk 70 murid, sedangkan pada jenjang SMP di tahun yang sama 1 (satu) guru untuk 12 murid. Hal ini menggambarkan ketersediaan guru di Kabupaten Pesawaran masih belum mencukupi terkhusus untuk guru seklah dasar.

Tabel 2.17 Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata Tahun 2017-2021

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
SD	1 : 70	1 : 76	1 : 63	1 : 70	1 : 70
SMP	1 : 12	1 : 10	1 : 10	1 : 11	1 : 11

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran, 2022

3) Sekolah Kondisi Bangunan Baik

Kondisi sekolah dengan bangunan baik di Kabupaten Pesawaran pada jenjang SD dan SMP mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada jenjang SD di Tahun 2021 tercatat 250 bangunan sekolah dalam kondisi baik meningkat

pada Tahun 2022 menjadi 284 bangunan sekolah dalam kondisi baik atau sekitar 91,02 persen dari seluruh SD. Sedangkan pada jenjang SMP di Tahun 2018 tercatat 53 bangunan sekolah dalam kondisi baik meningkat pada Tahun 2022 menjadi 66 bangunan dalam kondisi baik atau sekitar 97,05 persen dari seluruh SMP.

Tabel 2.18 Sekolah Kondisi Bangunan Baik Tahun 2018-2022

Tahun	SD			SMP		
	Bangunan Baik	Jumlah Sekolah	Persentase	Bangunan Baik	Jumlah Sekolah	Persentase
2018	250	309	80,91	53	61	86,89
2019	270	309	87,38	60	66	90,91
2020	278	312	89,10	63	68	92,65
2021	280	312	89,74	65	68	95,58
2022	284	312	91,02	66	68	97,05

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran 2023

4) Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar dan Menengah

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, perkembangan APM di Kabupaten Pesawaran selama periode Tahun 2017-2021 secara umum mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017 APM jenjang SD berada pada angka 98,34% dan meningkat menjadi 99,61% pada Tahun 2021. Sedangkan APM jenjang SMP pada Tahun 2017 berada pada angka 92,75% dan meningkat menjadi 97,87% pada Tahun 2021. Secara umum APM jenjang SD lebih tinggi daripada jenjang SMP sehingga kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat anak usia pada pendidikan menengah yang tidak melanjutkan sekolah setelah lulus dari jenjang SD.

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2018-2022

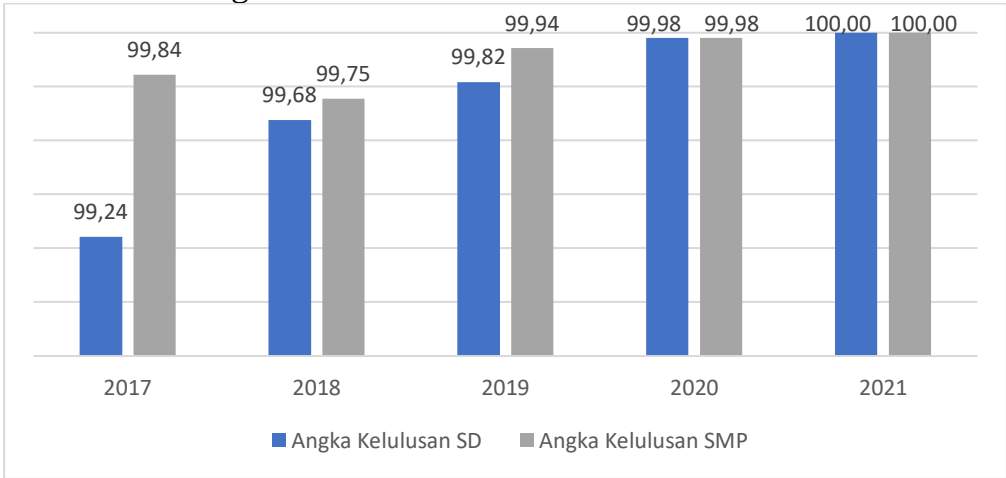
Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
SD	98,71	98,65	99,23	99,61	99,92
SMP	92,97	94,74	98,58	97,87	99,15

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran 2023

5) Angka Kelulusan

Angka kelulusan di Kabupaten Pesawaran selama kurun waktu Tahun 2017-2021 untuk SD selalu mengalami peningkatan namun untuk SMP berfluktuasi pada rentang 2017-2019. Secara umum progress angka kelulusan jenjang SMP lebih tinggi daripada jenjang SD. Pada akhir periode Tahun 2021 angka kelulusan SD dan SMP telah mencapai 100% dan perlu dipertahankan untuk kedepannya.

Gambar 2.18 Grafik Angka Kelulusan Tahun 2017-2021

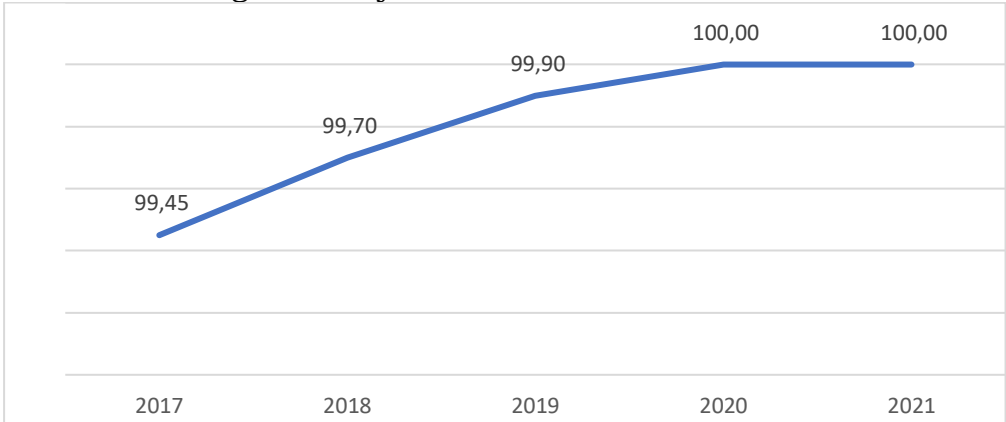


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran 2022

6) Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD ke SMP selama lima tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017 tercatat sebesar 99,45% murid SD/MI yang telah lulus melanjutkan ke jenjang SMP, kemudian meningkat menjadi kemudian meningkat menjadi 100% di Tahun 2021. Hal ini menunjukkan minat murid SD/MI di Kabupaten Pesawaran untuk melanjutkan studi ke tingkat selanjutnya semakin tinggi.

Gambar 2.19 Grafik Angka Melanjutkan Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran 2022

7) **Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**

Berdasarkan tabel di bawah ini, persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV pada rentang waktu Tahun 2018-2022 selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 Guru yang memenuhi Kualifikasi berada pada angka 96,21 persen dan meningkat menjadi 99,72 persen pada Tahun 2022.

Tabel 2.20 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	96,21	97,87	98,95	99,00	99,72

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran 2022

8) **Data Jumlah PKBM dan Data Putus Sekolah Kabupaten Pesawaran**

Dalam rangka mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing maka perlu juga dikembangkan jalur pendidikan non formal agar dapat mengakomodir pelajar yang tidak meneruskan pendidikan, sehingga dibutuhkan data putus sekolah dan jumlah PKBM di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021, sebagaimana tarcantum pada tabel 2.21 di bawah ini.

Tabel 2.21 Jumlah PKBM Kabupaten Pesawaran Tahun 2021

No.	Nama Lembaga	LKP			PKBM			SKB			PONPES			TOTAL
		N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
1	Kec. Padang Cermin	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
2	Kec. Punduh Pedada	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4
3	Kec. Kedondong	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
4	Kec. Way Lima	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
5	Kec. Gedung Tataan	0	5	5	0	2	2	1	0	1	0	0	0	8
6	Kec. Negeri Katon	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
7	Kec. Tegineneng	0	1	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	4
8	Kec. Marga Punduh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kec. Way Khilau	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	6
10	Kec. Teluk Pandan	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
11	Kec. Way Ratai	0	3	3										

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran 2022

Tabel 2.22 Jumlah Putus Sekolah di Kabupaten Pesawaran Tahun 2018-2021

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Kec. Padang Cermin	4
2	Kec. Punduh Pedada	1
3	Kec. Kedondong	21
4	Kec. Way Lima	9



No.	Kecamatan	Jumlah
5	Kec. Gedung Tataan	2
6	Kec. Negeri Katon	16
7	Kec. Tegineneng	8
8	Kec. Marga Punduh	2
9	Kec. Way Khilau	1
10	Kec. Teluk Pandan	3
11	Kec. Way Ratai	1
JUMLAH		68

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran 2022

9) Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Pesawaran

Berikut disajikan kinerja capaian SPM Bidang Pendidikan pada Tahun 2021  
Tabel 2.23 Capaian SPM Pendidikan.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM		Level	Capaian	Persentase
I.	Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota	1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	SD	100,00	100,00
				MI	100,00	
				SMP	100,00	
				MTs	100,00	
		2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 28 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 32 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	SD	67,86	82,21
				MI	57,14	
				SD	97,06	
				MI	92,86	
				SMP	78,33	
				MTS	68,89	
				SMP	100,00	
		3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	SMP	40,00	26,67
				MTS	13,33	
				SMP	40,00	
				MTs	13,33	
		4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	SD	79,74	84,26
				MI	78,57	
				SMP	90,00	
				MTs	82,22	
				SMP	88,33	
		5	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4	SD	86,27	72,09
				MI	66,67	
				SD	64,00	
				MI	71,43	

			(empat) orang guru setiap satuan pendidikan			
		6	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	SMP	66,67	70,83
				MTs	75,00	
				SMP	66,67	
				MTs	75,00	
		7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	SD	66,34	66,32
				MI	59,52	
				SD	67,97	
				MI	71,43	
		8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	SMP	88,89	81,15
				MTS	75,00	
				SMP	85,71	
				MTs	75,00	
		9	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn	SMP	77,78	76,39
				MTs	75,00	
		10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SD	98,69	89,23
				MI	79,76	
		11	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	SMP	98,33	84,72
				MTs	71,11	
		12	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	SD	100,00	95,83
				MI	91,67	
		13	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	SD		
				MI		
				SMP		
				MTs		
			100 bila kab/ kota memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan			

			kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif			
			50 bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan			
			0 bila tidak memiliki rencana untuk membantu sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.			
		14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;	SD	100,00	100,00
				MI	100,00	
				SMP	100,00	
				MTs	100,00	
II	Pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	15	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	SD	83,23	76,31
				MI	62,34	
				SD	88,24	
				MI	71,43	
		16	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	SMP	88,24	68,11
				MTs	71,43	
				SMP	75,00	
				MTs	37,78	
		17	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	SD	41,50	47,54
				MI	53,57	
		18	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	SD	82,35	71,50
				MI	54,76	
				SMP	86,67	
				MTs	62,22	
		19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan	89,73	88,01
				SD	97,06	
				MI	90,48	
				SMP	91,67	
				MTs	71,11	

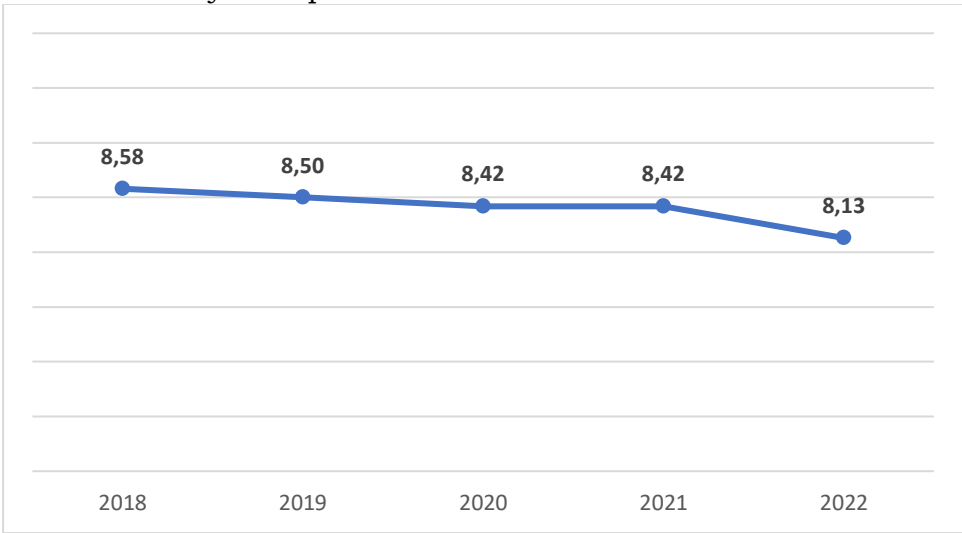
		20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :	Jumlah rombongan belajar yang memenuhi standar	80,72	96,14
			Kelas I - II : 18 jam per minggu	SD	100,00	
			Kelas III : 24 jam per minggu	MI	100,00	
			Kelas IV – VI : 27 jam per minggu	SMP	100,00	
			Kelas VII – IX : 27 jam per minggu	MTs	100,00	
		21	Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	SD	100,00	100,00
				MI	100,00	
				SMP	100,00	
				MTs	100,00	
		22	Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	SD	100,00	100,00
				MI	100,00	
				SMP	100,00	
				MTs	100,00	
		23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	98,62	97,76
				SD	98,69	
				MI	97,62	
				SMP	98,33	
				MTs	95,56	
		24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	SD	100,00	
				MI	100,00	
				SMP	100,00	
				MTs	100,00	
		25	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	SD	100,00	100,00
				MI	100,00	
				SMP	100,00	
				MTs	100,00	
		26	Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhire (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau	Jumlah satuan pendidikan yang menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN)	100,00	100,00
				SD	100,00	
				MI	100,00	
				SMP	100,00	
				MTs	100,00	
PROSENTASE KETERCAPAIAN						75,96

B. Urusan Kesehatan

1) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Berdasarkan Tabel berikut dapat diketahui bahwa rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2018 hingga 2022 cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2018 berada pada poin 8,58 dan menurun sedikit pada Tahun 2019 ke poin 8,50 dan 8,42 pada Tahun 2020. Selanjutnya sampai pada Tahun 2022 berada pada poin 8,13.

Gambar 2.20 Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2022

2) Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per Satuan Penduduk

Ketersediaan fasilitas kesehatan berupa Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu pada rentang waktu Tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang menurun. Bertambahnya jumlah penduduk namun tidak diimbangi dengan penambahan penyediaan fasilitas kesehatan tersebut sehingga dapat berdampak terhadap menimbulkan penurunan tingkat kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan tabel 2.25 dibawah ini pada Tahun 2018 rasio fasilitas kesehatan berada pada angka perbandingan 1:884 yang kemudian meningkat menjadi 1:978 pada Tahun 2022, sehingga penambahan puskesmas/poliklinik/pustu menjadi keharusan dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Tabel 2.24 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	Rasio
2018	440.192	498	1 : 884
2019	444.380	498	1 : 892
2020	477.470	498	1 : 959
2021	481.710	498	1 : 967
2022	487.150	498	1 : 978

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2022

3) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Sampai dengan Tahun 2018, rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Pesawaran yang dihitung berdasarkan *bed to population* sebesar 1:2.651 penduduk dan meningkat menjadi 1:2.934 pada Tahun 2022 (Tabel 2.26). Jika dibandingkan dengan rasio ideal rumah sakit, yakni 1:100.000 penduduk atau dengan berdasarkan *bed to population* sebesar 1:1.000, maka ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Pesawaran masuk dalam kategori belum mencukupi.

Tabel 2.25 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Sakit	Rasio
2018	440.192	166	1 : 2.651
2019	444.380	166	1 : 2.676
2020	477.470	166	1 : 2.876

2021	481.710	166	1 : 2.901
2022	487.150	166	1 : 2.934

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2022

4) **Rasio Tenaga Kesehatan**

Berdasarkan Tabel dibawah ini, rasio tenaga kesehatan dan dokter secara umum masih belum ideal terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Pesawaran. Pada tahun 2018 rasio dokter yaitu 1 dokter melayani 8.465 penduduk yang mana rasio ini semakin bertambah pada Tahun 2022 hingga mencapai 1 dokter untuk 9.192 penduduk. Adapun untuk rasio tenaga kesehatan perkembangannya berfluktuasi dimana pada Tahun 2018, 1 tenaga kesehatan melayani 446 penduduk dan pada akhir periode berada pada rasio 1 berbanding 393. Oleh karena itu perlunya penambahan jumlah dokter dan tenaga medis sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada penduduk dengan harapan dapat mencapai kondisi ideal rasio 1 dokter melayani 1.000 penduduk.

Tabel 2.26 Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022

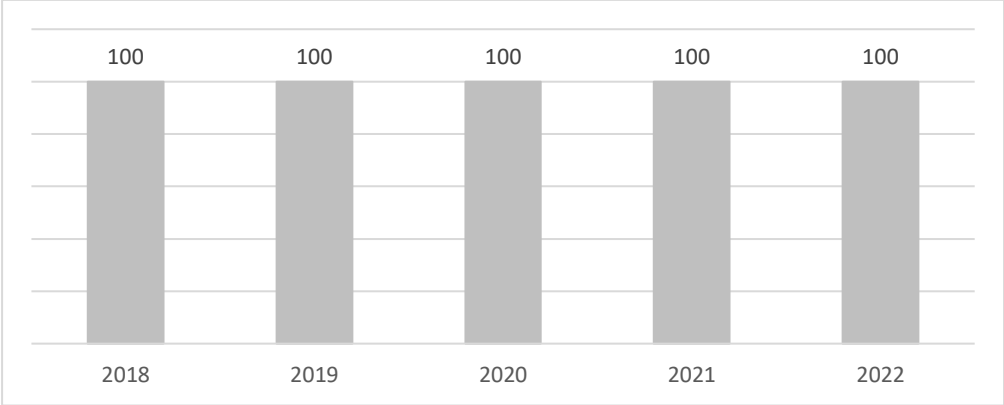
Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Dokter	52	52	52	59	53
Jumlah Tenaga Kesehatan	987	1137	1193	1.193	1.238
Jumlah Penduduk	440.192	444.380	477.470	481.708	487.150
Rasio Dokter per Satuan Penduduk	1 : 8.465	1 : 8.546	1 : 9.182	1 : 8.165	1 : 9.192
Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk	1 : 446	1 : 391	1 : 400	1 : 404	1 : 393

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2021

5) **Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani**

Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani di Kabupaten Pesawaran dari periode Tahun 2018-2022 sudah mencapai 100%, yang artinya bahwa semua ibu hamil dengan komplikasi yang datang ke sarana kesehatan atau ditemukan oleh tenaga kesehatan sudah tertangani seluruhnya (Gambar berikut). Pencapaian initerwujud karena sudah tercukupinya tenaga kebidanan dan dengan demikian capaian tersebut telah melampaui SPM.

Gambar 2.21 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Tahun 2018-2022



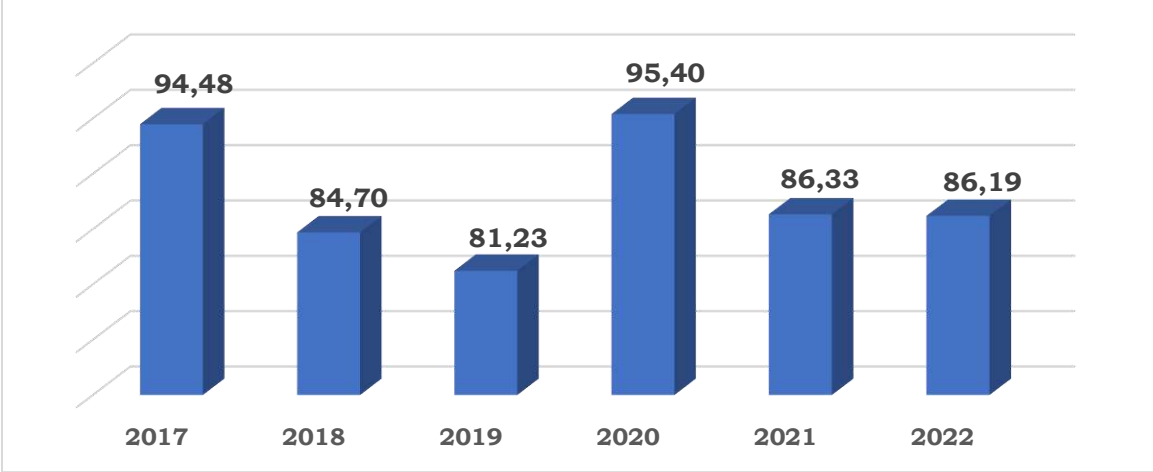
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2022

6) **Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan**

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Pesawaran dari periode Tahun 2017 berfluktuasi. Tercatat pada tahun 2022 telah mencapai 86,19% (Gambar berikut), artinya bahwa proses persalinan sudah seluruhnya ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan sudah melampaui SPM.



Gambar 2.22 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2017-2022

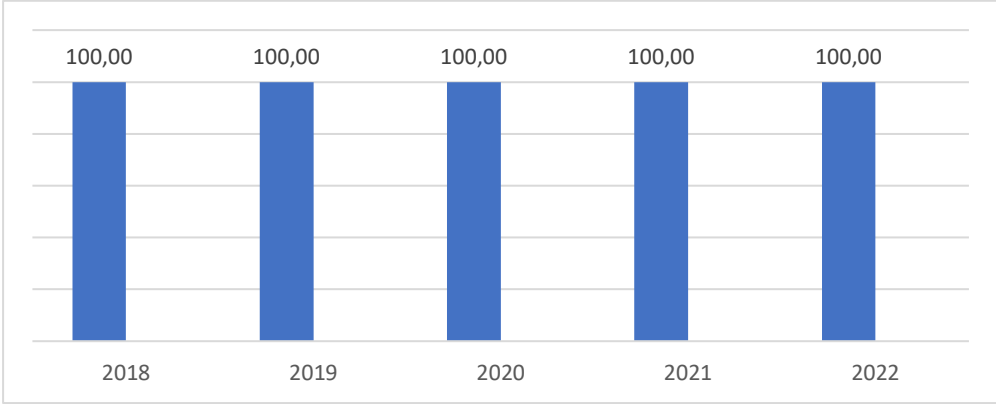


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2023

7) **Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**

Perkembangan cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Pesawaran selama periode Tahun 2018-2022 telah terpenuhi sesuai standar pelayanan minimal 100%. Oleh karena itu pencapaian ini perlu dipertahankan sehingga seluruh bayi pada setiap desa mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam kurun waktu satu tahun.

Gambar 2.23 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2022

8) **Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan**

Perkembangan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Pesawaran selama periode 2017-2022 sudah mencapai 100% (Tabel 2.27). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kasus balita gizi buruk di Tahun 2017-2022 telah tertangani seluruhnya dan telah mencapai SPM Kementerian Kesehatan (100%).

Tabel 2.27 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100	100
Standar Minimal	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, 2023

9) **Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD**

Berdasarkan Tabel 2.28 dibawah ini, perkembangan kasus penyakit DBD berfluktuasi setiap tahunnya, pada Tahun 2017 terdapat 190 kasus dan pada Tahun 2019 mengalami kenaikan tertinggi menjadi 644 kasus dan menurun ke 372 kasus pada Tahun 2020 dan 2021 dan kembali meningkat menjadi 432 kasus pada Tahun 2022. Hal tersebut disebabkan terjadinya curah hujan yang lebih tinggi pada Tahun 2019 namun dapat ditangani dengan baik dari periode 2017 sampai 2022.

Tabel 2.28 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD	100	100	100	100	100	100
Jumlah Kasus	190	209	644	372	372	432

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2023

10) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Menurut SPM Kementerian Kesehatan, target cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin ditetapkan sebesar 100%. Jika melihat angka pada tabel di bawah maka terlihat bahwa sampai ada Tahun 2022 Kabupaten Pesawaran sudah seluruhnya memberikan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

Tabel 2.29 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	100	100	100	100
Standar Minimal	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2022

11) Angka Kejadian Malaria dan Tingkat Kematian

Kasus penyakit malaria dalam rentang waktu Tahun 2017-2022 jumlahnya berfluktuasi dari Tahun awal sebanyak 251 kasus per 100.000 penduduk menjadi 87 kasus per 100.000 pada Tahun 2022. Banyaknya jumlah kasus malaria tersebut masih dapat diimbangi dengan penanganan yang baik oleh pelayanan kesehatan sehingga tidak terdapat kasus kematian akibat kejadian malaria.

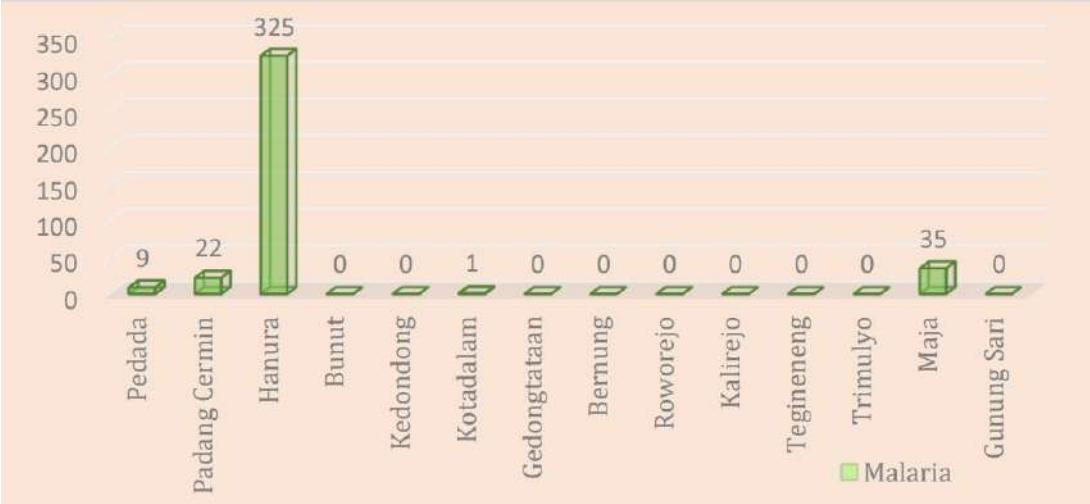
Tabel 2.30 Angka Kejadian Malaria dan Tingkat Kematian Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penderita Malaria	1.096	1.553	876	301	392	427
Penderita Malaria terhadap Jumlah Penduduk per 100.001	251,48	352,80	197,13	63,04	81,38	87,65
Jumlah Kematian Akibat Malaria terhadap Jumlah Penduduk per 1.000	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2023

Lebih lanjut jumlah kasus malaria berdasarkan wilayah kerja Puskesmas di Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.24 Jumlah Kasus Malaria di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2022

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi kasus penyakit malaria di 5 wilayah kerja puskesmas. Adapun kelima wilayah kerja puskesmas tersebut adalah Puskesmas Pedada dengan 9 kasus, Padang Cermin 22 kasus, Hanura tertinggi dengan jumlah 325 kasus, Kota Dalam dengan 1 kasus, dan Maja dengan 35 kasus. Adapun wilayah kerja Puskesmas Kota Dalam sebenarnya bukan merupakan wilayah endemik malaria. Namun, melihat gambaran wilayah Kota Dalam yang berbatasan langsung dengan wilayah Padang Cermin, maka sangat memungkinkan kejadian kasus tersebut terjadi akibat adanya kunjungan masyarakat dari wilayah non endemik malaria ke wilayah endemik malaria.

**12) Kesehatan Ibu dan Anak**

Pelayanan kesehatan ibu adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan ibu agar mampu melahirkan generasi sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Upaya kesehatan ibu meliputi kegiatan peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan. Salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu yaitu dengan melihat angka kematian ibu (AKI). AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Upaya pemeliharaan kesehatan pada Ibu dan anak dilakukan sejak janin masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun. Upaya pemeliharaan kesehatan anak ini ditunjukan untuk mempersiapkan generasi akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian anak. Upaya kesehatan anak diharapkan mampu menurunkan angka kematian yang terjadi pada anak. Indikator angka kematian yang berhubungan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA). Sebagai gambaran Kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Pesawaran Kabupaten Pesawaran kurun waktu 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31 Angka Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2017-2022

NO	TAHUN	AKB	AKI	AKABA
1.	2017	1,67	5	1,8
2.	2018	0,99	4	0,99
3.	2019	0,93	5	0,93
4.	2020	0,53	2	0
5.	2021	1,20	3	0
6.	2022	1,11	3	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2023

**13) Cakupan Pelayanan dan Penanganan Penyakit Tuberkulosis Bakteri Tahan Asam (TBC BTA)**

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang diakibatkan oleh infeksi bakteri. TBC pada umumnya menyerang paru-paru, tetapi dapat juga menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Penularan penyakit TBC terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup udara yang mengandung kuman Mycobacterium Tuberculosis. Kasus penyakit Tuberkulosis BTA dalam rentang waktu Tahun 2017-2022 jumlahnya bertambah dari Tahun awal sebanyak 671 kasus menjadi 483 kasus pada Tahun 2022 dan sempat mengalami lonjakan tinggi pada Tahun 2018 sebanyak 1.173 kasus. Dari sekian banyaknya kasus tersebut perkembangan penanganan kesehatan setiap tahunnya cendeung mengalami peningkatan meskipun belum secara maksimal sehingga diperlukan upaya penanganan lebih lanjut agar seluruh penderita penyakit TBC BTA dapat tertangani dengan baik.

Tabel 2.32 Cakupan Pelayanan dan Penanganan Penyakit TBC BTA Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penderita yang Tertangani	455	490	544	372	250	245
Jumlah Penderita Seluruhnya	671	1.173	719	774	512	483

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Penanganan	67,81	41,77	75,66	48,06	48,83	50,72

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2023

Lebih lanjut distribusi jumlah penderita TB Paru BTA+ berdasarkan wilayah kerja Puskesmas adalah sebagai berikut:

Gambar 2.25 Distribusi Kasus Tuberculosis Berdasarkan Wilayah Kerja Puskesmas di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021



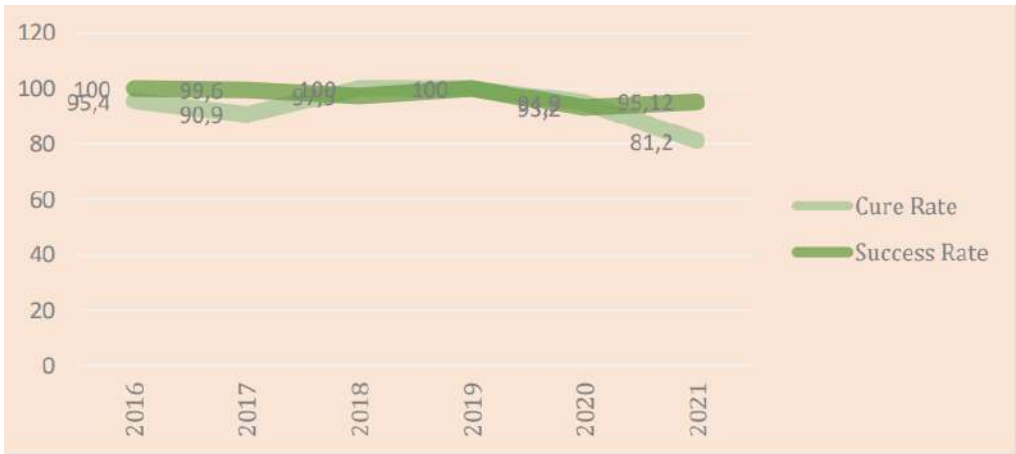
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2022

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus Tuberculosis di Kabupaten Pesawaran berjumlah sebanyak 250 kasus. Kasus tertinggi berada di wilayah kerja Puskesmas Kedondong dengan jumlah 69 kasus. Sedangkan, jumlah kasus terendah berasal dari wilayah kerja puskesmas Pedada dan Maja dengan jumlah masing-masing sebanyak 6 kasus.

Pada kasus TBC salah satu indikator yang sangat penting untuk dilihat yaitu angka kesembuhan penderita kasus TBC (Cure Rate). Cure Rate adalah sebutan untuk pasien yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan hasil pemeriksaan apusan dahak ulang (follow up) dengan hasil negatif pada akhir pengobatan dan pada satu pemeriksaaan sebelumnya.

Berikut ini merupakan gambaran cakupan angka Cure Rate dan Succer Rate (SR) penderita kasus TBC di Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021:

Gambar 2.26 Cakupan Cure Rate dan Success Rate (SR) Penderita Kasus TBC di Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2022

Berdasarkan Gambar diatas dapat diketahui bahwa cakupan cure Rate dan Success Rate di Kabupaten Pesawaran Tahun 2015-2021 memiliki nilai yang berfluktuatif. Adapun angka kesembuhan (Cure Rate) di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 adalah 82,1. Angka tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai angka Cure Rate sebesar 94,9%. Sedangkan untuk nilai Success Rate di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 mengalami angka kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang bernilai 93,2% menjadi 95,12%. Berikut ini rincian jumlah persentase keberhasilan pengobatan Kasus TB berdasarkan wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021:

Gambar 2.27 Persentase Keberhasilan Pengobatan Kasus TB (Success Rate) Berdasarkan Puskesmas di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2022

Berdasarkan Gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat 6 wilayah kerja Puskesmas di Kabupaten Pesawaran memiliki nilai Success Rate sebesar 100% yaitu pada Puskesmas Pedada, Padang Cermin, Bunut, Kota Dalam, Tegineneng, dan Gunung Sari. Sedangkan wilayah kerja Puskesmas dengan nilai Success Rate terendah berasal dari wilayah kerja Puskesmas Maja dengan persentase hanya sebesar 84,62%.

14) **Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi**

Penyakit HIV/AIDS disebabkan oleh virus Human Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tubuh sehingga penderitanya mengalami penurunan ketahanan tubuh. HIV dapat ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari individu yang terinfeksi, seperti darah, air susu ibu, air mani dan cairan vagina. Penyakit ini ditularkan melalui proses hubungan seksual, transfusi darah, penggunaan jarum suntik secara bergantian dan penularan dari ibu keanak dalam kandungan melalui plasenta dan kegiatan menyusui. Individu tidak dapat terinfeksi melalui kontak sehari-hari biasa seperti berciuman, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagi benda pribadi, makanan atau air. Pada dasarnya kasus HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es yaitu jumlah penderita yang dilaporkan jauh lebih kecil dari pada kenyataan di lapangan. Hal ini terjadi mengingat penderita HIV tidak dapat terdeteksi sejak dini hingga beberapa tahun kemudian. Namun dengan semakin giatnya usaha petugas dalam penemuan kasus HIV/AIDS maka semakin banyak pula kasus yang ditemukan sehingga semakin tinggi pula upaya dalam pengendaliannya. Tren jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Pesawaran pada rentang waktu Tahun 2017-2022 tumbuh dengan lambat dari 12 kasus pada Tahun 2017 kemudian naik menjadi 21 pada Tahun 2019 dan menurun menjadi 18 kasus pada Tahun 2022.

Tabel 2.33 Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pasien HIV/AIDS	12	12	21	9	14	18
Jumlah Penduduk	435.827	440.192	444.380	477.470	481.710	487.153

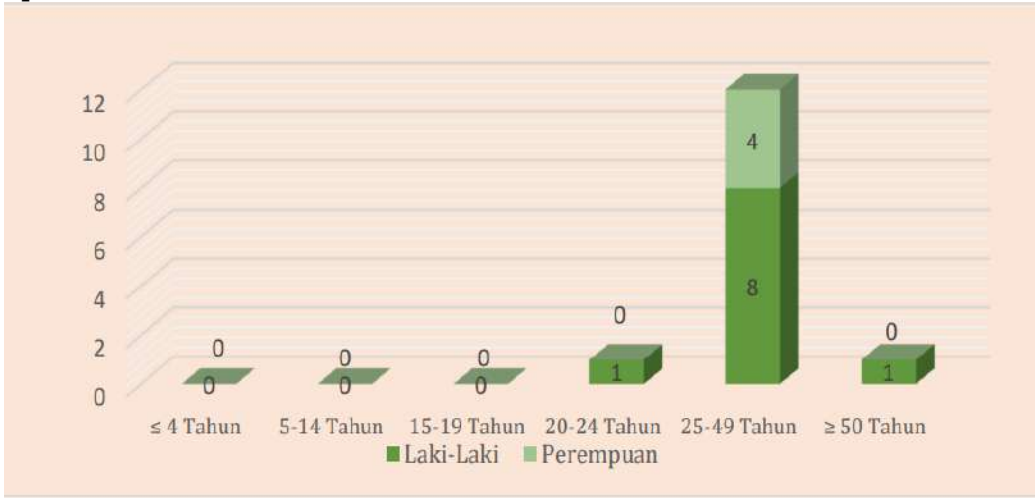


Prevalensi HIV/AIDS (%)	0,0028	0,0027	0,0047	0,0019	0,0029	0,003695
-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2023

Lebih lanjut jika melihat gambaran jumlah penderita kasus HIV berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 maka dapat diketahui bahwa dapat diketahui bahwa jumlah kasus HIV tertinggi terdapat pada kelompok umur 25-49 tahun dengan jumlah 12 kasus, terdiri dari 8 kasus penderita berjenis kelamin laki-laki dan 4 kasus lainnya diderita orang perempuan.

Gambar 2.28 Distribusi Kasus HIV Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesawaran Tahun 2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2022

Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui pelayanan kesehatan telah melakukan upaya untuk mencegah perkembangan penyakit HIV/AIDS melalui sosialisasi, publikasi, dan seminar wawasan terhadap penduduk yang berusia 15-24 tahun. Dari populasi penduduk tersebut persentase yang mengetahui komprehensi tentang HIV/AIDS disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.34 Persentase Penduduk Usia 15-24 yang Mengetahui Komprehensif tentang HIV/AIDS Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Proporsi Penduduk usia 15-24 tahun	76,04	77,03	78,50	79,80	80,75	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2023

15) Percepatan Penanggulangan dan Penurunan Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, stunting dan malnutrisi diperkirakan berkontribusi pada berkurangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Penyebab stunting antara lain, praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan termasuk pelayanan ANC (Ante natal care), Post natal dan pembelajaran dini yang kurang berkualitas, kurangnya akses ke air bersih dan Sanitasi.

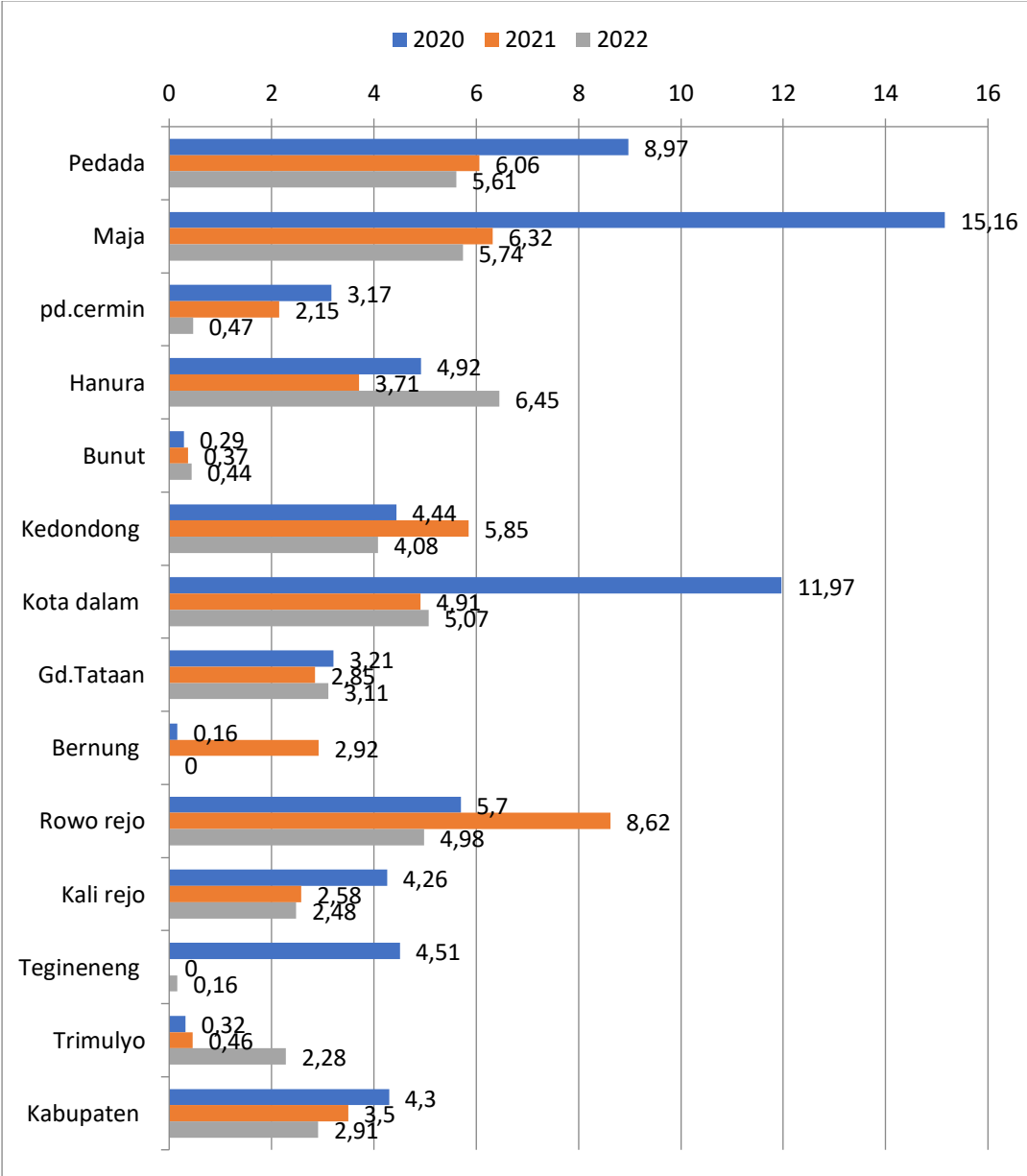
Upaya penurunan stunting dilaksanakan melalui Intervensi Gizi Spesifik seperti intervensi dengan sasaran ibu hamil, intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan serta intervensi dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan serta intervensi Gizi Sensitif seperti menyediakan dan memastikan akses pada air bersih dan sanitasi, melakukan fortifikasi bahan pangan, menyediakan akses kepada pelayanan kesehatan dan KB, JKN, Jampersal, Memberikan pendidikan

pengasuhan pada orang tua dan PAUD Universal, Pendidikan Gizi masyarakat, edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta Gizi pada Remaja, menyediakan bantuan dan jamsos bagi keluarga miskin serta meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

Salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam upaya percepatan penurunan stunting adalah membentuk tim percepatan penurunan stunting Tingkat Kabupaten yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 195/IV.07/HK/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting. Selain itu juga dibentuk TPPS tingkat Kecamatan dan Desa. Saat ini di Kabupaten Pesawaran telah terbentuk 256 Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan 768 kader yang terdiri dari bidan, Tim Penggerak PKK dan kader institusi masyarakat pedesaan.

Stunting di Kabupaten Pesawaran terus mengalami penurunan. Hal ini dapat kita lihat dari perkembangan Prevalensi stunting dari tahun ketahun, yaitu Tahun 2017 sebesar 35,20% (Riskesdas); Tahun 2018 : 27,49% (Riskesdas); Tahun 2019: 26,80 (SSGBI) Tahun 2021: 17,60% (SSGI); namun pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 7,5% menjadi 25,1% (SSGI). Hal ini berbeda dengan hasil penghitungan EPPGBM yang dilakukan oleh Puskesmas, pada pengukuran EPPGBM data hasil pengukuran diinput kedalam aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM) yang di entry oleh petugas gizi puskesmas, dan apabila ada data yang bermasalah gizi dikonfirmasi dan divalidasi oleh petugas puskesmas dan Dinas Kesehatan.

Gambar 2.29 Grafik Perkembangan Persentase Prevalensi Stunting Tahun 2020-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2023

Dari grafik terlihat bahwa terjadi Penurunan prevalensi balita stunting sebesar 0,8% dari 4,3 % di Tahun 2020 menjadi 3,5 % di Tahun 2021. Penurunan prevalensi balita stunting di tahun 2021 belum bisa menggambarkan prevalensi stunting yang sesungguhnya, hal ini dikarenakan cakupan balita yang diukur dibandingkan sasaran di tahun 2021 hanya 85,43 % sedangkan untuk tahun 2020 cakupan balita yang diukur adalah sebesar 98,94 % , yaitu 31.209 balita yang diukur dari 31544 sasaran yang tercatat di ePPGBM. Turunnya cakupan balita yang diukur dari tahun 2020 ke tahun 2021 juga menunjukkan masih rendahnya kualitas status gizi yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Pesawaran.

Sebaran prevalensi stunting di wilayah Kabupaten Pesawaran didapatkan dari data EPPGBM yang telah di validasi dan telah dianalisis pertahun. Berikut hasil sebaran prevalensi stunting Kabupaten Pesawaran Tahun 2020, 2021 dan 2022.

Tabel 2.35 Jumlah Kasus Stunting per Kecamatan Tahun 2020-2022

No	Kecamatan	Puskesmas	Tahun		
			2020	2021	2022
1	Pedada	Pedada	99	66	50
2	Marga Punduh	Maja	158	55	38
3	Padang Cermin	Padang Cermin	58	31	5
4	Way Ratai	Bunut	9	9	9
5	Kedondong	Kedondong	194	215	92
6	Way Lima	Kota Dalam	286	101	96
7	Teluk Pandan	Hanura	127	82	126
8	Gedong Tataan	Gedong Tataan	111	83	70
9		Bernung	6	104	0
10	Negeri Katon	Kalirejo	93	52	46
11		Roworejo	118	131	51
12	Tegineneng	Tegineneng	59	0	1
13		Trimulyo	6	8	28
Kabupaten			1.324	937	620

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2023

16) Capaian SPM Kesehatan

Capaian SPM Bidang Kesehatan, Analisa capaian, dan subkegiatan pendukung serta pagu dan realisasi anggaran dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.36 Capaian SPM Kesehatan

NO	SPM	TARGET	CAPAIAN	ALASAN TIDAK TERCAPAI	ANGGARAN		
					SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9.860	8.517	Rendahnya pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu sebesar 86,38% dikarenakan masih terdapat ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan atau melakukan pemeriksaan ke yankes lain dan tidak tercover puskesmas, permasalahan ini salah satunya disebabkan oleh tempat tinggal yang letaknya jauh dari puskesmas.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	167.959.000	167.959.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.412	8.112	Rendahnya pelayanan kesehatan ibu bersalin yaitu sebesar 86,19 % dikarenakan masih terdapat akseptor yang takut menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang seperti implant dan IUD	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	368.700.000	368.700.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	8.964	8.112	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	72.858.000	72.858.000

NO	SPM	TARGET	CAPAIAN	ALASAN TIDAK TERCAPAI	ANGGARAN		
					SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI
4	Pelayanan Kesehatan Balita	57.289	51.915	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	118.602.000	118.602.000
5	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	102.370	95.650	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	120.001.000	120.001.000
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	289.999	93.182	Rendahnya pelayanan kesehatan pada usia produktif yaitu sebesar 32,13 % dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat usia produktif untuk memeriksakan kesehatannya di puskesmas serta kurangnya sosialisasi kegiatan deteksi dini PTM usia produktif (15 sd 59 thn) di masyarakat sampai dengan tingkat desa dan dusun baik oleh tenaga kesehatan maupun oleh aparat desa, selain itu belum adanya media KIE dan kurangnya persediaan BHP gula darah di puskesmas menyebabkan pelayanan kesehatan pada masyarakat usia produktif menjadi tidak maksimal. Permasalahan lainnya adalah kurangnya koordinasi lintas program, lintas sector dan kurangnya perencanaan di tingkat puskesmas untuk mencari sasaran di masyarakat serta kurangnya anggaran untuk melakukan pertemuan dan monev program secara berkala ke puskesmas.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	129.627.000	129.627.000
7	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	33.516	31.013	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	75.004.000	75.004.000
8	Pelayanan Kesehatan Hipertensi	95.602	40.713	Rendahnya pelayanan kesehatan penderita hipertensi yaitu sebesar 42,59% disebabkan oleh kurangnya alat penunjang dan kurangnya sosialisasi tentang pencegahan dan pengendalian penyakit Hipertensi di masyarakat. Selain itu pelaksanaan Pandu PTM di Puskesmas yang belum maksimal dengan belum menerapkan algoritma Pandu PTM dan penggunaan Carta PTM dalam melaksanakan pelayanan terhadap pasien Hipertensi di FKTP serta belum optimalnya pelaksanaan monev program secara berkala ke puskesmas dikarenakan kendala anggaran.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	20.000.000	20.000.000

NO	SPM	TARGET	CAPAIAN	ALASAN TIDAK TERCAPAI	ANGGARAN		
					SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI
9	Pelayanan Kesehatan Diabetes	3.427	3.376	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	239.193.170	239.193.170
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ	994	749	Rendahnya pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yaitu sebesar 75,35% dikarenakan masih banyak kasus ODGJ yang tidak rutin atau putus minum obat yang disebabkan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang masalah gangguan jiwa disertai kurangnya tenaga kesehatan khusus terlatih Kesehatan Jiwa. Kurangnya perhatian dari keluarga ODGJ juga menyebabkan ODGJ tidak memiliki KTP maupun BPJS serta tidak melaporkan kasus ODGJ ke pihak terkait. Permasalahan lainnya adalah kurangnya dukungan aparat desa dalam upaya keluarga mendapatkan pengobatan pasien dengan gangguan jiwa mengakibatkan lambatnya penanganan kasus ODGJ di Kabupaten Pesawaran.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	63.775.000	63.775.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB	5.611	4.156	Rendahnya pelayanan kesehatan orang terduga TB yaitu sebesar 74,07 % dikarenakan penemuan pasien terduga tuberkolosis masih belum maksimal karena penjangkauan hanya dilakukan secara masiv dengan menunggu pasien datang ke puskesmas. Kurangnya koordinasi lintas sector serta koordinasi dengan DPPM (klinik, dokter praktek swasta, bidan praktek mandiri) juga menyebabkan pelayanan kesehatan orang terduga TB menjadi belum maksimal.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	562.150.000	562.150.000
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	9.589	6.079	Rendahnya pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV yaitu sebesar 63,40% dikarenakan pencapaian skrining HIV pada ibu hamil belum maksimal karena masih dilakukan di puskesmas, bukan di bidan desa, serta belum semua pasien TB melakukan skrining HIV.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	49.400.000	49.400.000

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran 2023

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

C.1. Urusan Pekerjaan Umum

1) Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan yang menjadi kewenangan kabupaten. Hal ini mengindikasikan semua ruas jalan dengan



permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan  $\leq 6\%$ ), sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan desain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Secara umum tren panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan setiap tahunnya (Tabel berikut). Pada Tahun 2018 tercatat 566,22 km, kemudian meningkat menjadi 616,98 km di Tahun 2019 hingga mengalami peningkatan menjadi 665,05 km di Tahun 2021. Dengan demikian pada Tahun 2022 sudah terdapat 61,83% jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Pesawaran dari total panjang jalan sebesar 918,96 km.

Tabel 2.37 Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan Seluruhnya	918,96	918,96	918,96	918,96	918,96
Panjang Jalan Kondisi Baik	566,22	616,98	601,35	665,05	568,20
Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik (>40 km per jam)	61,62	67,14	65,44	72,37	61,83

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pesawaran 2021

2) **Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk per 10.000 jiwa**

Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk adalah rasio panjang jalan per 10.000 jiwa yang menggambarkan bahwa ruas-ruas jalan telah menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang melayani jumlah penduduk di wilayah tertentu. Dalam kurun waktu Tahun 2018-2022 rasio panjang jalan per 10.000 jiwa di Kabupaten Pesawaran menunjukkan tren penurunan. Pada Tahun 2018 tercatat sebesar 20,88 km/10.000 jiwa, dan mengalami penurunan pada Tahun 2022 menjadi 18,86 km/10.000 jiwa (Tabel berikut).

Tabel 2.38 Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Penduduk per 10.000 jiwa Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan Seluruhnya	918,96	918,96	918,96	918,96	918,96
Jumlah Penduduk	440.192	444.380	477.470	481.708	487.150
Rasio	0,002088	0,002068	0,001925	0,001908	0,001886

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pesawaran 2022

Jika mengacu pada Lampiran II Permen PU Nomor 14 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk kategori wilayah dengan kepadatan penduduk  $100 \leq KP < 500$  jiwa/km<sup>2</sup> (kepadatan penduduk Kabupaten Pesawaran yakni 381,12 km<sup>2</sup>), maka SPM rasio ideal panjang jalan per 10.000 jiwa adalah 11 km/10.000 jiwa. Mengacu pada tabel diatas rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Pesawaran telah memenuhi target SPM yaitu mencapai 0,001886 atau 18,86 km /10.000 jiwa.

3) **Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik**

Pemerintah Kabupaten Pesawaran berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan sungai dan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten, dengan tiga pilar pengelolaan sumberdaya air yang meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

Selama Tahun 2018 hingga 2022 persentase irigasi dalam kondisi baik menunjukkan tren peningkatan. Pada Tahun 2018 tercatat 33,80%, kemudian selama empat

tahun meningkat menjadi 67,50% di Tahun 2022. Meskipun secara tren meningkat perlu terus diupayakan agar persentase irigasi dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan pada tahun berikutnya. Selain itu rasio jaringan irigasi juga mengalami peningkatan pada Tahun 2020 menjadi 75% dari semula 69,00% di Tahun 2018. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kualitas dan kuantitas irigasi di Kabupaten Pesawaran minimal dipertahankan dan terus ditingkatkan untuk menunjang produktifitas pertanian yang lebih baik.

Tabel 2.39 Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (persen ha)	33,80	38,80	48,80	61,30	67,50
Rasio Jaringan Irigasi (persen panjang)	69,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pesawaran 2022

C.2. Urusan Penataan Ruang

1) Persentase Ruang Terbuka Hijau dari Luas Wilayah Kota

Dalam perspektif tata ruang kota, untuk meminimalkan timbulnya fenomena perubahan iklim, maka keberadaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Keberadaan RTH di wilayah perkotaan adalah untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim mikro, maupun sistem ekologis lain. RTH sangat diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan air dan udara bersih bagi masyarakat serta menciptakan estetika kota. Luas RTH di wilayah perkotaan agar dapat menjalankan proses-proses ekologis tersebut minimal 30% dari total luas wilayah kota yang terdiri atas RTH publik 20% dan RTH privat 10%.

Tabel 2.40 Sebaran Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pesawaran

No	Nama RTH	Luas (m <sup>2</sup> )
1	Taman Jejama Sidototo	10.000
2	Taman Andan Jejama	15.000
3	Tugu Pengantin	2.500
4	Taman Komplek Pemda	50.000
5	Taman Kantor DPRD	1.000
6	Taman RSUD Pesawaran	1.000
7	Taman Tugu Perbatasan	1.000
8	Taman Tugu Juang	1.000
9	Taman Tugu Cokelat	100
10	Taman Desa Negeri Sakti	100
11	Taman Desa Sukaraja	5.000

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pesawaran 2022

2) Persentase Bangunan yang Memiliki IMB

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang dikeluarkan untuk keperluan rencana pembangunan bangunan baru, rehabilitasi, dan revonasi. IMB dikeluarkan atas dasar kesesuaian pemanfaatan ruang dan pertimbangan terhadap keamanan dan keselamatan penghuni bangunan tersebut. Dalam rentang waktu Tahun 2016 sampai 2020 persentase bangunan yang memiliki IMB di Kabupaten Pesawaran masih rendah. Oleh karena itu perlunya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat perlunya mengurus IMB sebagai dokumen penting dalam pembangunan rumah dan prasyarat untuk mengurus pajak bumi bangunan.

Tabel 2.41 Persentase Bangunan yang Memiliki IMB Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bangunan ber IMB	405	506	618	778	1.187
Jumlah Bangunan	111.398	113.529	115.700	114.145	114.145
Persentase	0,36	0,45	0,53	0,68	1,04

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pesawaran 2021

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Tabel 2.42 Capaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar			Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Ket.
				Indikator	Realisasi		
I	Sumber Daya Air	Prioritas Utama penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat		1 Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	-	2021	-
				2 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	72,57 %		
II	Jalan	Jaringan	Akses-bilitas	3 Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	-	-	-
			Mobilitas	4 Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	-		
			Kesela-matan	5 Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	-		
		Ruas	Kondisi Jalan	6 Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	72,37 %	2021	Dinas yg membidangi Pekerjaan Umum
			Kecepatan	7 Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	-		
III	Air minum	Cluster Pelayanan		8 Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari			
			Sangat buruk		-	-	-
			Buruk		-	-	-
			Sedang		-	-	-
			Baik		-	-	-
			Sangat Baik		-	-	-
IV	Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan	Air Limbah Permukiman		9 Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	-	-	-
		Pengelolaan Sampah		10 Tersedianya system air limbah skala komunitas/kawasan/kota	-		
				11 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	-		
		Drainase		13 Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	-		
V	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan			14 Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan			
VI	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Izin Mendirikan Bangunan		15 Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.	83,94 %	2021	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
		Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)		16 Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung	90,80 %	2021	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu Pencapaian	Ket.
			Indikator	Realisasi			
				Negara di Kabupaten /kota			
VII	Jasa Konstruksi	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	17	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	99,87 %	2021	Unit yang melakukan Pembinaan Jasa konstruksi
		Sistem Informasi Jasa Konstruksi	18	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100 %	2021	Unit yang melakukan Pembinaan Jasa konstruksi
VIII	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	19	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	98,64 %	2021	Dinas/SKPD yang membidangi Penataan Ruang
		Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR	20	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang	52,98 %	2021	Dinas/SKPD yang membidangi Penataan Ruang

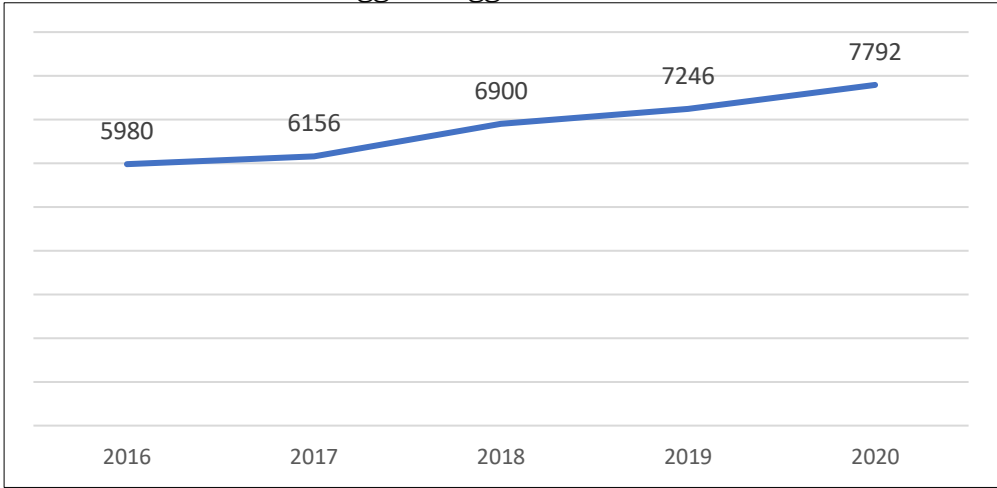
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk dalam mencapai kriteria hidup sehat. Hidup sehat sangat terkait dengan pola hidup yang bersih, baik bersih lingkungan maupun bersih sumber air. Berdasarkan Grafik berikut di bawah ini pada Tahun 2016 jumlah sambungan rumah pengguna air bersih mencapai 5980 dan meningkat menjadi 7.792 sambuan rumah pada Tahun 2020.

Gambar 2.30 Grafik Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2016-2020

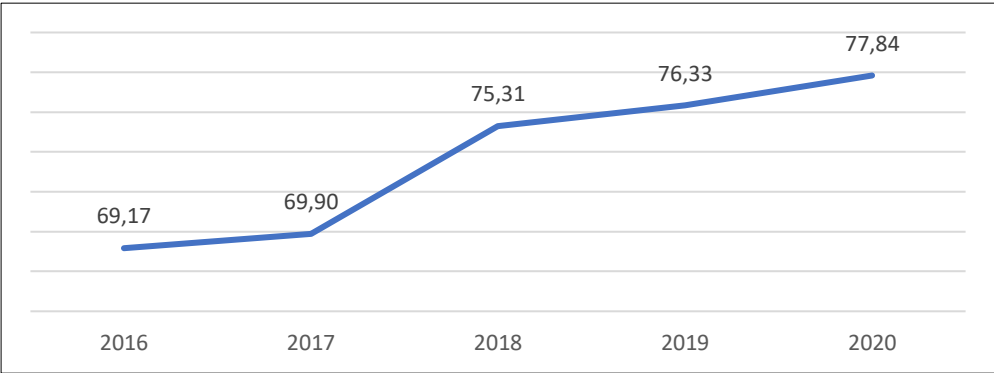


Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran 2021

2) Rumah Tangga Bersanitasi

Target Nasional Tahun 2019 menetapkan bahwa pada akhir Tahun 2019 rumah tangga yang memiliki sanitasi mencapai 100%. Berdasarkan grafik di bawah ini, dapat kita ketahui bahwa rumah tangga yang memiliki sanitasi di Kabupaten Pesawaran selama periode Tahun 2016-2020 belum mencapai target 100% namun sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik namun belum mencapai target. Pada Tahun 2016 terjadi akses sanitasi pada rumah tanggal berada pada angka 69,17% dan meningkat pada akhir Tahun 2020 menjadi 77,84% rumah tangga yang berakses terhadap sanitasi.

Gambar 2.31 Grafik Rumah Bersanitasi Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pesawaran 2021

3) **Lingkungan Permukiman Kumuh**

Perkembangan penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Pesawaran sampai dengan Tahun 2020 sudah mencapai luas 1.064,1 hektar. Upaya penanganan kawasan permukiman kumuh sebagai bentuk pelayanan pemerintah untuk menyehatkan masyarakat agar dapat menurunkan tingkat resiko penyakit dan penyehatan lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan. Namun dari sisi jumlah dan persentase rumah tangga yang tinggal dipermukiman kumuh meningkat cukup besar dari periode 2016 hingga 2020 menjadi 3.966 rumah tangga kumuh atau sekitar 17,47 persen.

Tabel 2.43 Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Penanganan Permukiman Kumuh (ha)	249,79	64,35	199,54	271,58	278,84
Jumlah Rumah Tangga Kumuh	778	789	862	3.169	3.966
Jumlah Keseleruhan Rumah Tangga	16.143	17.937	19.929	22.144	24.144
Proporsi Rumah Tangga Kumuh	4,82	4,4	4,33	14,31	17,47

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pesawaran 2021

4) **Cakupan Rumah Layak Huni**

Cakupan rumah layak huni dihitung berdasarkan ketersediaan rumah layak huni dan layanan rumah layak huni yang terjangkau. Cakupan ketersediaan rumah layak huni dihitung berdasarkan persentase perbandingan antara jumlah seluruh rumah layak huni terhadap jumlah seluruh rumah, sedangkan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dihitung berdasarkan persentase perbandingan rumah tangga MBR yang menghuni rumah layak terhadap jumlah rumah tangga MBR.

Cakupan rumah layak huni di Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2021 tercatat 96,7% sedangkan cakupan MBR yang menguni rumah layak telah mencapai 51,7% perlu ditingkatkan kembali agar MBR juga memiliki akses terhadap tempat tinggal yang layak. Jika dibandingkan dengan SPM Kementerian Perumahan Rakyat tentang rasio rumah layak huni, yakni sebesar 70%, maka capaian rasio rumah layak huni di Kabupaten Pesawaran telah mencapai target.

Tabel 2.44 Rumah Layak Huni Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	96,64	94,51	92,95	95,40	96,7
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	52,55	50,76	49,86	49,86	51,7

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pesawaran 2021



5) **Rumah Tangga Pengguna Listrik**

Berdasarkan data Kabupaten Pesawaran Dalam Angka 2022, pada Tahun 2021 masih terdapat 406 rumah tangga yang belum menggunakan listrik dari PLN. Sebagian besar rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik PLN di Kecamatan Padang Cermin dan Teluk Pandan dengan jumlah masing-masing 203 dan 74 rumah tangga.

Tabel 2.45 Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2019-2021

Indikator	Tahun		
	2019	2020	2021
Listrik PLN	127.033	129.407	133.764
Listrik Bukan PLN	1.378	902	381
Bukan Pengguna Listrik	1.353	675	406

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2022

6) **Capaian SPM Bidang Perumahan**

Berikut disajikan data capaian SPM Bidang Perumahan

Tabel 2.46 Capaian SPM Perumahan

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai	
1	Rumah layak huni dan terjangkau	a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	96,7%	2021
		b. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	51,7%	2021
2	Lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum	c. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU	95,36%	2021

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pesawaran 2021

E. **Urusan Pertanahan**

1) **Lahan Bersertifikat**

Perkembangan lahan bersertifikat dari Tahun 2017-2022 menunjukkan tren yang baik dari semula Tahun 2017 lahan bersertifikat berjumlah 28.045.421 dan terus meningkat menjadi 38.465.400 pada Tahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 23.300.995, selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 60.007.707 dan pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 14.537.570. Pencapaian ini perlu ditingkatkan kembali dengan harapan seluruh bidang tanah dapat tersertifikasi sehingga kepemilikan lahan di Kabupaten Pesawaran dapat terdata dengan baik.

Tabel 2.47 Lahan Bersertifikat Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lahan Bersertifikat	28.045.421	38.183.896	38.465.400	23.300.995	60.007.707	14.537.570
Jumlah Bidang Lahan Seluruhnya	1.021.216.221	1.021.216.221	1.021.216.221	1.021.216.221	1.021.216.221	1.021.216.221
Persentase	2,75	3,74	3,77	2,28	5,88	1,42

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pesawaran, 2023

2) **Kasus Pertanahan**

Kasus Pertanahan (Sengketa, Konflik dan Perkara Tanah) di Kabupaten Pesawaran sejak 5 (lima) tahun terakhir yang mengemuka adalah dampak dari pembangunan mega proyek Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar dan penyelesaian perbatasan dengan Kabupaten/Kota berbatasan (Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pringsewu) serta sebagian lagi merupakan konflik horisontal (antar pemilik lahan). Sejak tahun 2016-2020 jumlah penyelesaian kasus pertanahan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran sebanyak 17 kasus.

3) **Izin Lokasi**

Proses penerbitan Izin Lokasi dilaksanakan secara kolektif dengan SKPD terkait, yang *leading* sektornya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun Bidang Penataan Ruang dan Cipta Karya yang mengurus Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap izin lokasi di Kabupaten Peswaran yang pelaksanaannya targetnya selalu mencapai 100% dalam kurung lima tahun terakhir dari Tahun 2017 hingga 2021.

**F. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Dengan mengacu pada Tabel dibawah ini, dapat diketahui bahwa cakupan petugas perlindungan masyarakat pada Tahun 2022 tercatat 26,00%, sehingga indikator ini perlu ditingkatkan untuk mencapai perlindungan masyarakat yang lebih luas. Penegakan Perda Kabupaten Pesawaran selama Tahun 2017 hingga 2022 menunjukkan angka realisasi 100%. Hal ini bermakna seluruh pelanggaran perda telah ditindaklanjuti. Selanjutnya indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Pesawaran selama Tahun 2017-2022 mencapai 100% setiap tahunnya. Hal ini bermakna seluruh pelanggaran K3 telah diselesaikan. Sementara itu untuk cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten selama Tahun 2017 hingga 2022 tidak mengalami perubahan yakni sebesar 15,00%. Sementara itu sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2022 waktu tanggap di Kabupaten Pesawaran telah mencapai 100%. Secara numerik penjelasan lebih lanjut mengenai data kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.48 Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	25,73	25,73	25,73	25,73	26,00	26,00
Penegakan Perda (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (%)	100,00	80,00	96,43	100,00	100,00	100,00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Pesawaran 2023

**G. Urusan Sosial**

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial terhadap masyarakat miskin atau masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui dalam bentuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, Jaminan Sosial dan perlindungan Sosial. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Pada tahun 2017 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 16,54% dan terus mengalami peningkatan sampai pada Tahun 2022 menjadi 92,31%. Perkembangan bantuan sosial tersebut perlu ditingkatkan lagi pada periode berikutnya agar dapat meningkatkan kelayakan hidup PMKS di Kabupaten Pesawaran. Sementara itu pada indikator lainnya yaitu persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dan korban yang

dievakuasi menggunakan prasarana tanggap darurat lengkap sudah terlayani 100% dengan baik selama periode Tahun 2017-2022. Pencapaian ini perlu ditingkatkan kedepannya sebagai bentuk tanggap darurat pasca bencana.

Tabel 2.49 Kinerja Urusan Sosial Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	16,54	51,84	51,81	65,58	65,58	92,31
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Sosial Pesawaran 2023

Capaian SPM Bidang Sosial

Berikut disajikan data capaian SPM pada Bidang Urusan Sosial

Tabel 2.50 Capaian SPM Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai Capaian (%)	
1	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial a. Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala kab/kota	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	2022
	b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	100%	2022
2	Penyediaan sarana dan prasarana sosial	Persentase (%) panti sosial skala kab/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	-	2022
	a. Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial			
	b. Penyediaan sarana pelayanan luar panti	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%	2022
3	Penanggulangan korban bencana	Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	2022
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana kab/kota			
	b. Evakuasi korban bencana	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/ kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai Capaian (%)	
4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	Persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	80,36%	2022
	a. Penyelenggaraan jaminan sosial			

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran, 2023

**H. Urusan Tenaga Kerja**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur kewenangan pemerintah tingkat kabupaten dalam urusan tenaga kerja, yakni meliputi sub urusan (1) pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja (pelaksanaan pelatihan, pembinaan lembaga pelatihan, perizinan lembaga pelatihan, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil); (2) sub urusan penempatan tenaga kerja (pengelolaan informasi pasar kerja, penerbitan izin LPTKS, perlindungan TKI); dan (3) sub urusan hubungan industrial (pengesahan peraturan perusahaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan industrial). Berdasarkan kewenangan tersebut, dapat diukur realisasi kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Pesawaran yang mencakup indikator-indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.51 Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017-2022

No	Indikator (dalam persen)	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sengketa pengusaha pekerja per tahun	11,67	10,00	10,00	5,00	5,00	0,00
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	14,55	14,55	18,18	31,82	50,00	0,00
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	4,55	4,55	4,55	9,09	10,00	0,00
4	Keselamatan dan perlindungan	20,00	20,00	25,00	55,00	80,00	82,00
5	Besaran pekerja/baruh yang menjadi peserta program Jamsostek	23,48	28,70	29,57	41,74	50,00	52,00
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	14,29	14,29	19,05	33,33	50,00	0,00
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	18,18	18,18	23,64	52,73	60,00	80,00
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	23,81	28,57	28,57	42,86	50,00	0,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pesawaran 2023

Indikator angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun menunjukkan tren penurunan, pada Tahun 2017-2022 mengalami penurunan masing-masing dari 11,67% di Tahun 2017 menjadi 0,00% di Tahun 2022. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa sosialisasi kepada pengusaha maupun pekerja tentang pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing telah berhasil mengurangi angka sengketa pengusaha-pekerja. Selanjutnya untuk indikator besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama secara tren mengalami peningkatan, pada Tahun 2017 sebanyak 14,55% yang kemudian meningkat menjadi 50,00 % di Tahun 2021 dan sebaliknya mengalami penurunan drastis menjadi 0,00% di Tahun 2022. Indikator besaran pencari kerja yang terdaftar ditempatkan mengalami peningkatan selama Tahun 2017-2021. Hal ini disebabkan karena pencari kerja yang telah ditempatkan telah mengembalikan kartu kuning (yang sudah bekerja telah melapor kembali ke Disnaker). Sehingga dalam perspektif kedepan perlu terus dilakukan peningkatan motivasi bekerja, pada pencari kerja untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan memberikan motivasi bekerja pada pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan, kerjasama dengan perusahaan pengguna tenaga kerja untuk megembalikan kartu kuning.

Selanjutnya untuk indikator keselamatan dan perlindungan menunjukkan persentase perusahaan yang telah menerapkan K3 (keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja) masih minim di Kabupaten Pesawaran. Pada Tahun 2022 sudah tercatat 82,00% perusahaan yang menerapkan K3, capaian ini masih sehingga perlu ditingkatkan agar perusahaan yang belum menerapkan K3 dapat segera menerapkan aturan tersebut. Adapun untuk indikator pekerja yang mendapatkan Jamsostek mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2017 sebanyak 23,48% pekerja menerima Jamsostek dan meningkat menjadi lebih dari dua kali lipat pada Tahun 2022 yaitu sebanyak 52,00%. Peningkatan pekerja yang menerima Jamsostek masih perlu ditingkatkan lagi kedepannya, agar pekerja mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah.

Indikator perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah menunjukkan angka 14,29% pada Tahun 2017 dan meningkat menjadi 50,00% pada Tahun 2020, kemudian terjadi penurunan yang sangat signifikan yang menunjukkan angka 0,00% pada Tahun 2022. Hal ini bermakna bahwa kasus perselisihan buruh dan pengusaha terkait kebijakan pemerintah daerah dapat terselesaikan dengan baik.

Adapun indikator besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berupa pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan berbasis kewirausahaan mengalami tren peningkatan pada sepanjang periode Tahun 2017-2022. Pada Tahun 2017 tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan masing-masing berada pada angka 18,18; 5,00; dan 23,81; mengalami peningkatan pada Tahun 2021 menjadi 60,00; 5,00; dan 50,00; dan pada Tahun 2022 besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi mengalami peningkatan akan tetapi indikator besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dan berbasis kewirausahaan mengalami penurunan tajam menjadi masing-masing indikator berada pada angka 80,00; 0,00 dan 0,00. Secara matematis perkembangan tersebut masih perlu ditingkatkan lebih baik lagi agar tenaga kerja di Kabupaten Pesawaran memiliki kompetensi yang dapat bersaing dalam dunia kerja sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **I. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Berdasarkan Tabel dibawah ini, dapat diketahui bahwa persentase partisipasi angkatan kerja perempuan di dunia kerja pada umumnya dipengaruhi oleh struktur ekonomi dalam proses pembangunan. Pada Tahun 2018 terdapat 3,71% perempuan yang berpartisipasi di lembaga pemerintah, kemudian menurun menjadi 3,5% di Tahun 2022. Selanjutnya persentase perempuan yang menduduki kursi DPRD juga menurun dari 29,41% ke 26,67%. Sedangkan untuk partisipasi perempuan di lembaga swasta mengalami peningkatan, pada Tahun 2018 sejumlah 34,53% perempuan dan mengalami peningkatan menjadi 44,3% di Tahun 2022. Angka partisipasi tersebut menggambarkan bahwa peluang dan tingkat partisipasi perempuan belum seimbang



antara perempuan dan laki-laki dalam berkarir pada lingkungan pekerjaan, baik di lembaga pemerintahan maupun di lembaga swasta.

Indikator rasio KDRT pada Tahun 2018 masih nol kasus, adapun untuk Tahun 2019-2022 tercatat dibawah 0,01 kasus. Angka tersebut tergolong kecil sehingga mengindikasikan bahwa di Kabupaten Pesawaran tergolong aman terhadap kekerasan rumah tangga. Adapun realisasi indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu telah mencapai angka 100% sepanjang Tahun 2018 hingga 2022. Dalam perspektif kedepan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat desa dan kabupaten perlu terus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mau melaporkan jika terdapat tindak kekerasan dalam rumah tangga mereka, sehingga diharapkan dapat ditangani secara cepat dan pelaku tindak kekerasan dapat segera diproses untuk menimbulkan efek jera. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.52 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2022

No	Indikator (dalam persen)	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,71	3,78	3,78	3,5	3,50
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	29,41	32,35	32,35	26,67	26,67
3	Partisipasi Perempuan di lembaga Swasta	34,53	34,19	34,08	44,3	44,3
4	Rasio KDRT	0,00	0,01	0,003	0,007	0,003
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	94,87	94,87	94,87	91	91
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas PPPA serta PPKB Kabupaten Pesawaran, 2022

**J. Urusan Pangan**

Berdasarkan Tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa realisasi indikator urusan pangan di Kabupaten Pesawaran meliputi ketersediaan pangan utama dan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Sejak Tahun 2017 hingga 2021 persentase rasio ketersediaan pangan mengalami peningkatan dari angka 22,32% ke 75,84%. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi Dinas terkait untuk tetap meningkatkan pasokan ketersediaan pangan agar tidak terjadi kelangkaan bahan pangan dimasa depan. Selanjutnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dilakukan untuk memastikan kualitas dan distribusi bahan pangan dapat terjamin dan merata. Adapun persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan mengalami peningkatan dengan jumlah sampel yang dilakukan pengawasan adalah 61 sampel bahan pangan.

Tabel 2.53 Kinerja Urusan Pangan Tahun 2017-2021

Indikator (dalam persen)	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Ketersediaan pangan utama	22,32	37,54	29,32	34,66	75,84
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	87,50	88,89	90,00	75,00	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pesawaran 2021

**K. Urusan Lingkungan Hidup**

**1) Persampahan**

Pengelolaan sampah di Kabupaten Pesawaran pada periode Tahun 2016-2022 masih belum terlaksana secara optimal. Skema pengelolaan ditempuh melalui

penanganan dan pengurangan di sumber sampah. Persentase penanganan sampah sampai akhir Tahun 2022 baru mencapai 10,38% atau  $\pm 35.575\text{m}^3$  sampah diangkut ke Tempat Penyimpanan Akhir Sampah (TPAS) dari total timbunan sampah  $\pm 70.329 \text{ m}^3$ . Sampah terangkut ke TPAS dimaksud terutama berasal dari wilayah perkotaan yang merupakan area pelayanan persampahan. Upaya pengurangan sampah dilakukan melalui pendekatan 3 R (Ruduce, Reuse, Recycle). Dalam perspektif pembangunan target penanganan dan pengurangan sampah di sumber sampah perlu lebih ditingkatkan lagi untuk dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Adapun sebagian besar timbunan sampah yang belum tertangani diharapkan dapat dikelola dan ditangan oleh individu masyarakat sehingga secara bersama-sama Kabupaten Pesawaran dapat mencapai tingkat pencemaran yang rendah.

Tabel 2.54 Kinerja Persampahan Tahun 2016-2022

Indikator	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sampah yang dapat ditangani ( $\text{m}^3$ )	599	680	720	770	828	1.445	7.300
Sampah yang berkurang melalui 3R ( $\text{m}^3$ )	229	282	304	516	599	24.590	28.275
Jumlah sampah yang tertangani ( $\text{m}^3$ )	828	962	1.024	1.286	1.427	26.035	35.575
Total timbunan sampah ( $\text{m}^3$ )	54.392	54.814	58.647	64.670	68.559	71.892	70.329
Rasio	1,52	1,76	1,75	1,99	2,08	2,01	10,38

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Pesawaran 2023

2) **Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan**

Realisasi indikator cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH di Kabupaten Pesawaran pada periode Tahun 2016-2022 berfluktuasi. Pada Tahun 2016 tercatat 63 kemudian terus meningkat mencapai 111 pada Tahun 2020, kemudian mengalami penurunan tajam pada Tahun 2021 yang tercatat pada angka 46 dan pada Tahun 2022 kembali mengalami peningkatan yang berada pada angka 72. Capaian Tahun 2022 tersebut masih harus terus ditingkatkan mengingat usaha/kegiatan Wajib Izin Lingkungan akan meningkat pula seiring dengan peningkatan aktivitas investasi di Kabupaten Pesawaran.

Tabel 2.55 Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Tahun 2016-2022

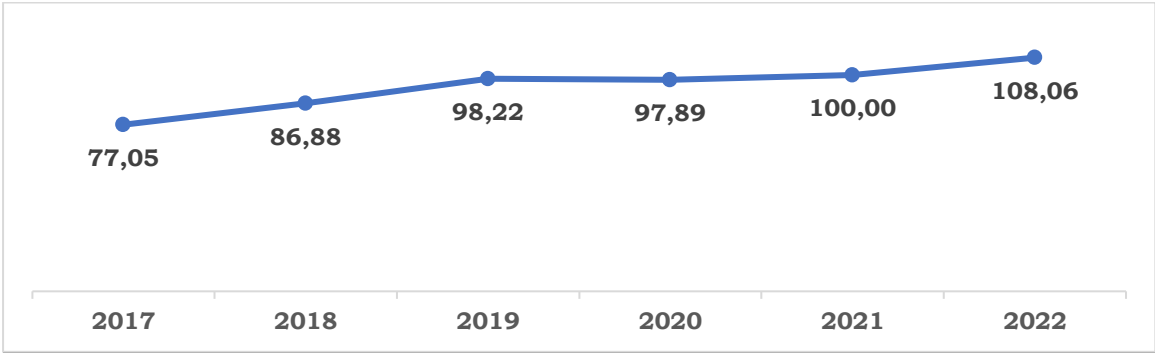
Indikator	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	63	73	75	99	111	46	72

Sumber: Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran 2023

L. **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Persentase kepemilikan KTP, berdasarkan Gambar dibawah ini tren rasio penduduk ber-KTP mengalami peningkatan dari Tahun 2017 hingga 2022. Pada Tahun 2017 tercatat 77,05% kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada Tahun 2018 dan 2019 hingga mencapai 98,22%. Meskipun sedikit menurun pada Tahun 2020 pada angka 97,89%, kemudian pada tahun 2021 mencapai 100% dan pada Tahun 2022 terus mengalami peningkatan yakni mencapai 108,06%. Pencapaian ini perlu dipertahankan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

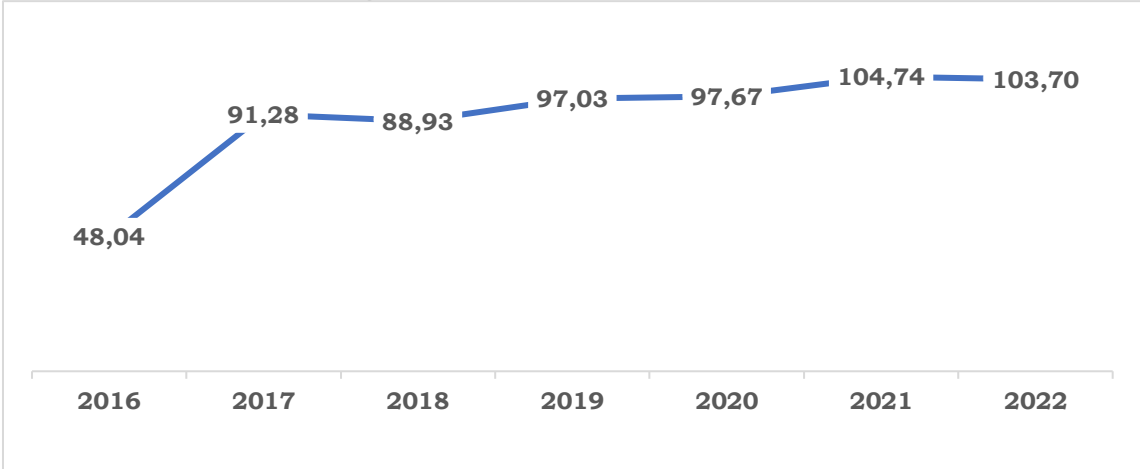
Gambar 2.32 Grafik Rasio Penduduk Ber-KTP Tahun 2017-2022



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pesawaran, 2023

Sedangkan indikator rasio bayi berakte kelahiran secara tren menunjukkan peningkatan, pada Tahun 2016 persentase bayi lahir memiliki akte kelahiran sebesar 48,04%, kemudian pada Tahun 2017 mengalami peningkatan yang berada pada 91,28%, kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2018 yaitu sebesar 88,93%, selanjutnya terus mengalami peningkatan sampai dengan Tahun 2022 persentase rasio bayi ber-akte kelahiran sebesar 103,70% (Gambar berikut).

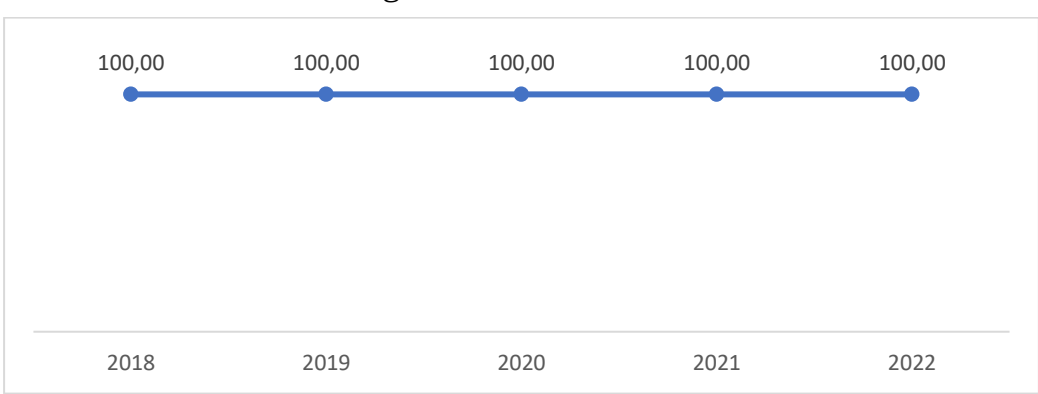
Gambar 2.33 Grafik Rasio Bayi Ber-Akte Kelahiran Tahun 2016-2022



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pesawaran 2023

Pada indikator rasio pasangan berakte nikah (Gambar berikut), Tahun 2018 hingga 2022 sudah tercatat 100% pasangan yang memiliki akte nikah. Pencapaian ini perlu dipertahankan dikemudian hari agar kelengkapan data administrasi pendudukan memiliki kinerja yang baik.

Gambar 2.34 Grafik Rasio Pasangan Ber-Akte Nikah Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pesawaran 2023

Selanjutnya indikator penerapan KTP Nasional berbasis NIK dan indikator ketersediaan data base kependudukan skala provinsi di Kabupaten Pesawaran telah terpenuhi sejak Tahun 2016. Dalam rangka pemanfaatan pemanfaatan database kependudukan pemerintah daerah, seyogyanya diperlukan pengadaan server (warehouse) pada Disdukcapil yang terintegrasi. Pemanfaatan database kependudukan ini penting kedepannya, misalnya saja dalam penentuan penerima bansos.

**M. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Secara umum pencapaian target dalam merealisasikan indikator urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.56 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	98,61	99,31	100,00	100,00	100,00
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	144	144	144	144	144
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	144	144	144	144	144
4	Rata-rata jumlah LSM aktif	62	73	90	109	142
5	Posyandu aktif	459	457	461	466	464
6	Persentase swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	67,40	96,00	94,86		
7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	337	480	664		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2022

Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik dari Tahun 2018 hingga 2022 telah mencapai 100% sehingga diharapkan Pemerintah Desa dapat menjalankan pelayanan kepada masyarakat dengan sangat baik dan menjaga kualitas pelayanan yang dicapai pada Tahun 2022.

Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dan PKK dari Tahun 2018-2022 jumlahnya tetap sebanyak 144, sedangkan jumlah LSM aktif selalu mengalami penambahan tiap tahunnya dari sejumlah 62 organisasi pada Tahun 2018 menjadi 142 organisasi pada Tahun 2022.

Untuk capaian target indikator kinerja posyandu aktif sejak Tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami tren peningkatan. Pada Tahun 2016 tercatat 427 kemudian meningkat menjadi 440 di Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan jumlah balita, maka rasio posyandu per satuan balita pada Tahun 2020 mencapai 1:345 atau dengan kata lain satu posyandu dapat melayani 345 balita, angka tersebut telah melampaui SPM Kementerian Kesehatan yakni 1:100. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan signifikan dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020, tercatat Tahun 2016 sebesar 24,60% menjadi 94,86% di Tahun 2020. Adapun indikator pemeliharaan program pasca program pemberdayaan masyarakat juga menunjukkan angka yang signifikan sejak 2016 hingga 2020 tercatat 123 meningkat menjadi 664.

Tabel 2.57 Status Kemandirian dan Kemajuan Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun 2018-2022

No	Status Desa	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Mandiri	1	3	6	7	10
2.	Maju	6	12	12	13	31
3.	Berkembang	83	118	123	123	103
4.	Tertinggal	54	11	3	1	0
5.	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0

Indeks Desa Membangun (IDM) dicanangkan oleh pemerintah untuk mengukur perkembangan suatu desa dengan menilai aspek pembangunan pada ruang lingkup sosial, ekonomi, dan ekologi serta kebijakan dan pembangunan/pemberdayaan masyarakat guna menghasilkan rekomendasi kebijakan agar lebih tepat sasaran. Berdasarkan capaian tabel diatas, Pada Tahun 2022 di Kabupaten Pesawaran sudah tidak terdapat Desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal sehingga dapat dikatakan pembangunan desa telah berjalan dengan baik dan perlu ditingkatkan agar

seluruh desa dapat mencapai status maju dan mandiri yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa.

#### **N. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Berdasarkan Tabel dibawah ini, dapat diketahui bahwa secara umum realisasi indikator urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah menunjukkan tren yang baik, secara berurutan penjelasan indikator tersebut dideskripsikan pada paragraf selanjutnya.

Indikator laju pertumbuhan penduduk berfluktuasi selama periode Tahun 2018 sampai 2022 yaitu dari 1,00% ke 1,13% dimana pada Tahun 2020 sempat mengalami peningkatan tertinggi pada angka 7,45%. Selanjutnya dari sisi rata-rata jumlah anak per keluarga jumlahnya menurun dari Tahun 2018 hingga 2022 yang mencapai angka 2,31 anak per keluarga.

Indikator Rasio Akseptor KB per 1.000 Pasangan Usia Subur (PUS) selama Tahun 2018-2022 menunjukkan realisasi yang cenderung stagnan. Selanjutnya dari indikator rasio akseptor KB tersebut diantaranya 71,89% pada Tahun 2018 menggunakan jenis kontrasepsi jangka panjang. Angka tersebut meningkat menjadi 72,68% pada Tahun 2022.

Sementara itu untuk indikator Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun menurun sedikit dari 11,90% pada Tahun 2018 menjadi 11,50% pada Tahun 2022. Secara ideal perempuan sebaiknya menikah sesuai dengan program BKKBN yaitu pendewasaan usia perkawinan (PUP) wanita menikah umur 20 tahun sedangkan untuk laki-laki umur 25 tahun. Pada umur 20 tahun ke atas, organ reproduksi perempuan sudah siap mengandung dan melahirkan. Sedangkan pada usia 35 tahun mulai terjadi proses regeneratif. Selain itu, secara psikologis, pada usia 20 tahun mulai matangnya emosional dan nalar seseorang. Di masyarakat masih ditemui PUS dimana istri berusia kurang dari 20 tahun. Pada tahun 2022 tercatat 11,50%. Hal ini menunjukkan bahwa masih cukup besar perkawinan yang terjadi pada usia dini sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan persentase usia muda menikah minimal 20 tahun. Indikator Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*) di Kabupaten Pesawaran juga mengalami progres yang baik dimana selama periode 2018-2022 hanya 13,90% sampai 9,00% yang belum terpenuhi, masih sedikit diatas capaian nasional yang berada pada angka 8,55%. Namun demikian perlu terus diupayakan agar angka indikator ini menurun sehingga semua pasangan usia subur dapat terpenuhi program KB.

Adapun indikator Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB selama Tahun 2018-2020 bersifat fluktuatif dan cenderung meningkat dari angka 68,73% menjadi angka 70,00% sehingga kedepan perlu terus diupayakan perbaikan kebijakan sebagai upaya untuk menunda kehamilan pada keluarga yang memiliki balita sebagai upaya salah satu aspek pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu serta mematangkan psikologis anak balita.

Selanjutnya indikator Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk telah mencapai target setiap tahunnya, sejak Tahun 2018 hingga 2022 realisasi telah mencapai 100%.

Indikator Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri selama Tahun 2018 mencapai titik tertinggi pada angka 86,04% namun mengalami penurunan ke angka 83,38% pada Tahun 2019-2020 dan meningkat kembali ke angka 85,00% pada Tahun 2022. Untuk realisasi Indikator Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan selama Tahun 2018-2022 telah mencapai realisasi 100% sehingga kedepan perlu dipertahankan.

Indikator Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat masih perlu ditingkatkan dimana pada periode



2018-2022 masih terealisasi 22,00%, sehingga capaian ini perlu ditingkatkan lagi untuk mendukung indikator rasio akseptor KB dan mengurangi persentase cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi. Kemudian indikator Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa telah mencapai realisasi diseluruh desa di Kabupaten Pesawaran.

Tabel 2.58 Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,00	0,95	7,45	0,89	1,13
2	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,63	3,60	3,55	2,34	2,31
3	Ratio Akseptor KB	71,89	72,37	72,37	72,38	72,68
4	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	33,35	33,55	33,75	33,95	34,15
5	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan nikah usia 15 – 49	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00
6	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang isterinya dibawah 20 tahun	11,90	11,80	11,70	11,60	11,50
7	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	13,90	13,73	13,21	10,70	9,00
8	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	68,73	68,40	68,61	66,45	70,00
9	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri	86,04	83,38	83,38	83,59	85,00
11	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPPKBD) setiap desa/kelurahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Cakupan ketersediaan dan distribusi obat dan alat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	20,50	20,75	21,00	21,50	22,00
13	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	144	144	144	144	144

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana, 2022

O. Urusan Perhubungan

Pada periode Tahun 2018-2022 jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami penurunan. Pada Tahun 2018 tercatat 4.536 penumpang, kemudian menurun menjadi 2.232 penumpang di Tahun 2022. Penurunan yang cukup besar ini merupakan implikasi dari bertambahnya kepemilikan kendaraan pribadi sehingga mengurangi penumpang yang menggunakan transportasi umum. Selanjutnya pada indikator jumlah orang/barang melalui Dermaga per hari mencapai 469 orang/barang

pada Tahun 2018 dan menurun menjadi 455 orang/barang pada Tahun 2022 yang didominasi untuk penyebaran wisatawan ke objek wisata pulau-pulau.

Sementara itu indikator persentase jumlah uji KIR angkutan umum secara tren mengalami peningkatan, pada Tahun 2018 tercatat 85,00% kendaraan yang melakukan uji KIR, kemudian meningkat di Tahun 2022 menjadi 88,15% yang melaksanakan uji KIR. Peningkatan persentase uji KIR tersebut dapat bermakna meningkatnya pengawasan terhadap ketertiban administrasi kendaraan yang wajib KIR. Hal ini didukung oleh indikator persentase kepemilikan KIR angkutan umum nilainya meningkat dari 66,67% pada Tahun 2018 menjadi 100,00% pada Tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya pengawasan secara khusus pada angkutan umum atau menurunnya jumlah angkutan umum di Kabupaten Pesawaran juga terindikasi karena meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi secara berangsur-angsur dari tahun ke tahun serta tersedianya transportasi online.

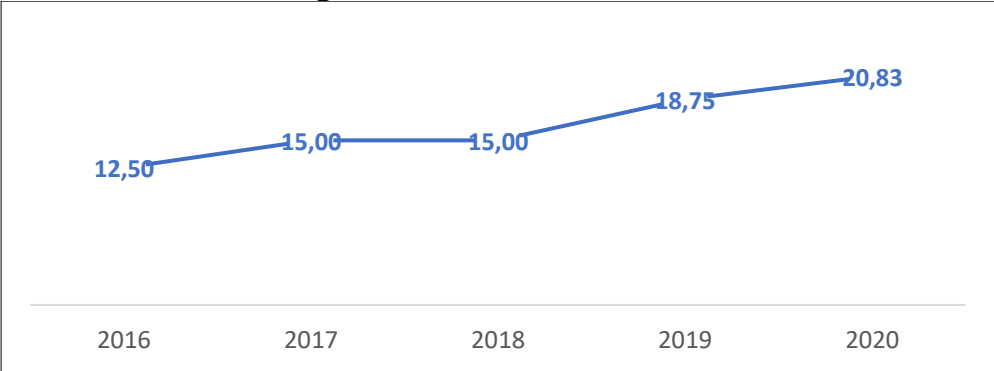
Tabel 2.59 Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah arus penumpang angkutan umum	4.536	4.104	3.672	3.650	2.232
Jumlah orang/barang melalui Dermaga per hari	469	480	500	390	455
Persentase uji KIR angkutan umum	85,00	87,00	87,00	87,50	88,15
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	66,67	70,02	71,05	100,00	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan 2022

Selanjutnya untuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas, data pada Gambar 2.21 menunjukkan progres yang tumbuh bertahap. Pada Tahun 2016 sebesar 12,5% namun pada akhir periode Tahun 2020 menjadi 20,83%. Kedepan pemasangan rambu lalu lintas perlu ditargetkan lebih tinggi lagi, karena hal ini terkait dengan keselamatan para pengguna jalan.

Gambar 2.35 Grafik Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Perhubungan 2021

**P. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Sesuai dengan arah pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional, penyediaan infrastruktur TIK ditujukan antara lain untuk memastikan tersedianya konektivitas di seluruh pelosok Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan layanan telepon dan internet di seluruh wilayah, yang menjadi bagian dari *Program Universal Service Obligation* (USO) atau kewajiban pelayanan universal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu sesaat (*realtime*). Dalam konteks ini, penggunaan internet sehat oleh masyarakat (rumah tangga) perlu didorong dalam rangka menciptakan masyarakat yang melek informasi, sehingga terbukanya akses informasi dapat menciptakan masyarakat yang lebih tanggap dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah, hal ini ditunjang oleh adanya pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan. Sepanjang periode Tahun 2018-2022 cakupan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan hanya mencapai 10%, artinya belum seluruh kecamatan mendapatkan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

Dalam hal mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*), sarana prasarana telepon pintar/komputer/desktop/notebook dan ketersediaan akses internet di tingkat rumah tangga menjadi suatu tuntutan. Proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2022 sebesar 60%, dengan demikian masih terdapat sebagian besar rumah tangga yang tidak memiliki akses internet. Penjelasan lebih lanjut disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.60 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	11	11	11	11	11
Proporsi rumah tangga dengan akses internet	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika 2022

**Q. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dimaksudkan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Secara umum tren persentase koperasi aktif di Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2018-2022 menunjukkan tren peningkatan, pada Tahun 2018 tercatat sebesar 49,54% koperasi aktif, kemudian meningkat menjadi 59,61% pada Tahun 2022. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa keaktifan koperasi di Kabupaten Pesawaran masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat bermakna perlunya kebutuhan sumber daya manusia peserta/anggota koperasi yang memahami manajemen koperasi dan upaya meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan hasil produksi koperasi.

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerja setempat dan memiliki resistensi terhadap gejolak perekonomian eksternal. Jumlah UMKM yang produktif di Kabupaten Pesawaran selama periode Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi akibat Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020, di awal Tahun 2018 tercatat 1.187 pelaku usaha yang meningkat menjadi 1.371 pada Tahun 2022. Adapun untuk perkembangan IKM yang produktif juga berpola sama dimana pada Tahun 2018 terdapat 491 pelaku usaha dan meningkat menjadi 615 pada Tahun 2022. Lebih lanjut data kinerja koperasi dan UMKM disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.61 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Koperasi aktif	49,54	56,70	58,42	59,61	67,37
Jumlah UMKM yang produktif	1.187	1.259	1.055	1.213	1.371
Jumlah IKM yang produktif	491	509	482	521	615

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2022

## R. Urusan Penanaman Modal

Dilihat dari jumlah investor di Kabupaten Pesawaran terdapat peningkatan yang cukup besar sejak Tahun 2017 dengan jumlah investor mencapai 212 naik di Tahun 2021 dengan jumlah investor mencapai 304. Hal tersebut juga didukung dengan pesatnya peningkatan nilai investasi dari 210.874 miliar pada Tahun 2017 menjadi 283.595 miliar pada Tahun 2021 dan memberikan dampak terhadap serapan

tenaga kerja. Sejak Tahun 2017, tenaga kerja yang terserap melalui PMDN maupun PMA sebesar 4.122 dan menurun menjadi 3.997 tenaga kerja pada Tahun 2021. Disisi lain juga terjadi penurunan terhadap indikator kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN dari 6,43% pada Tahun 2017 yang kemudian menurun pada Tahun 2021 menjadi -31,53%.

Tabel 2.62 Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	212	199	392	337	304
Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (dalam juta)	210,874	395,784	403,732	414,196	283,595
Daya serap tenaga kerja	4.122	5.531	6.578	4.672	3.997
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Jutaan rupiah) (%)	6,43	40,27	2,01	2,59	-31,53

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2022

**S. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Berdasarkan Tabel dibawah ini, dapat diketahui indikator kinerja urusan pemuda dan olahraga secara tren menunjukkan realisasi yang positif. Untuk indikator persentase organisasi pemuda yang aktif sudah mencapai 100%. Hal ini bermakna bahwa pemuda di Kabupaten Pesawaran memiliki penambahan tempat untuk berkreasi dan berekspresi sehingga dapat membangun prestasi dalam bidang kepemudaan.

Selanjutnya jumlah wirausaha muda sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2022 mengalami peningkatan. Tercatat pada Tahun 2016 berjumlah 56 pengusaha muda dan pada Tahun 2020 meningkat menjadi 121. Selanjutnya untuk Tahun 2021 hingga 2022 terjadi perubahan penilaian kinerja dari jumlah menjadi rasio yang tercapai 100 persen. Hal ini bermakna bahwa kondisi ekonomi/mekanisme pasar di Kabupaten Pesawaran memberikan kesempatan bagi anak usia muda untuk menjadi wirausahawan.

Cakupan pembinaan olahraga selama Tahun 2016 hingga Tahun 2022 setiap tahunnya rata-rata dibina 20 cabang olahraga dan telah mencapai 100%. Adapun pelatih cabang olahraga yang bersertifikasi masih diangka 56,20%, dalam perpektif kedepan jumlah pelatih yang bersertifikasi perlu terus ditingkatkan terutama pada cabang olahraga populer dan prioritas di Kabupaten Pesawaran.

Lebih lanjut cakupan pembinaan atlet muda pada Tahun 2016 berada pada angka 60,00% dan cenderung stagnan hingga pada Tahun 2021 meningkat menjadi 65,45% dan pada Tahun 2022 mengalami peningkatan kembali yang berada pada 65,65%. Dalam konteks urusan olahraga, perlu menjadi perhatian bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan-kegiatan olahraga ditargetkan adanya peningkatan prestasi dari cabang olahraga atau atlet olahraga. Sehingga dalam perspektif kedepan akan terus diupayakan agar atlet dan cabang olahraga yang telah dibina dapat menghasilkan prestasi untuk memajukan Kabupaten Pesawaran dalam dunia olahraga. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.63 Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2022

No	Indikator	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah wirausaha muda	56	68	82	112	121	100,00	100,00
3	Cakupan pembinaan olah raga	72,73	86,36	86,36	90,91	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	46,67	47,06	47,37	47,62	43,48	56,00	56,20
5	Cakupan pembinaan atlet muda	60,00	60,78	60,77	60,38	60,74	65,45	65,65

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga 2023

T. Urusan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa di tingkat pemerintahan kabupaten urusan statistik mencakup penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota melalui sistem yang terintegrasi. Adapun Buku Kabupaten Pesawaran Dalam Angka selama periode Tahun 2018-2022 selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan.

Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Pesawaran yang dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Pesawaran selama periode 2018-2022 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Pesawaran. Informasi lebih lanjut dapat disimak dalam tabel di bawah ini.

Selanjutnya untuk indikator perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah telah mencapai 80% pada Tahun 2022. Dalam upaya memenuhi kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik, Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah mencapai 100% dan perlu dipertahankan kedepannya. Untuk capaian konten informasi dalam menjawab narasi negatif atau *misleading* informasi berkembang cukup baik dari angka 36% pada Tahun 2020 dan terus meningkat hingga dua kali lipatnya pada Tahun 2022 di angka 72%. Adapun untuk capaian informasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan regulasi keterbukaan informasi publik pada Tahun 2022 sudah mencapai 48%. Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan guna menunjang capaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informais publik.

Tabel 2.64 Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Buku "kabupaten Pesawaran dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Presentase (%) perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik	NA	NA	NA	50,00	100,00
Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah, counter narasi negatif, hoax, dan informasi missleading terhadap pemerintah daerah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi	NA	NA	36,00	54,00	72,00
Persentase (%) Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Provinsi dan kab/kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukan Informasi Publik	NA	NA	14,00	30,00	48,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

U. Urusan Persandian

Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat



diukur dengan indikator Jumlah Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dan *security cyber* baik dalam komunikasi Perangkat Daerah maupun dalam pemanfaatan *IT* di Pemerintah Daerah. Berdasarkan Tabel 2.65 dapat diketahui bahwa selama lima tahun hanya terdapat 6 Perangkat Daerah yang setiap tahunnya menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.

Tabel 2.65 Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika 2022

**V. Urusan Kebudayaan**

Berdasarkan Tabel dibawah ini, dapat diketahui bahwa dari Tahun 2018 hingga 2022 terdapat 11 festival seni dan budaya yang diselenggarakan. Dengan adanya penyelenggaraan festival, bukan berarti hanya melestarikan seni dan budaya namun juga dapat memberi nilai tambah ekonomi khususnya terhadap penggiat seni dan budaya, umumnya terhadap aktivitas perekonomian lokal. Pelaksanaan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilakukan pada Tahun 2022 sebanyak 11 lokasi. Lebih lanjut jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan dikelola secara terpadu pada Tahun 2022 berjumlah 10 benda, sehingga kedepan masih perlu dilakukan upaya tersebut agar dapat membuka peluang kegiatan festival seni dan budaya yang berdampak pada kegiatan perekonomian. Adapun indikator kinerja urusan kebudayaan disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.66 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	11	11	11	12	11
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	4	5	7	9	10
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	1	2	3	4
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1	1	3	3	3

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2021

**W. Urusan Perpustakaan**

Berdasarkan tren data series empat indikator kinerja urusan perpustakaan pada Tabel berikut ini selama periode Tahun 2016-2022 rata-rata realisasi menunjukkan capaian yang positif. Jumlah perpustakaan pada Tahun 2016 sebanyak 245 yang kemudian mengalami peningkatan di Tahun 2022 sebanyak 472 perpustakaan. Adapun perkembangan kunjungan perpustakaan per tahun juga mengalami peningkatan setiap tahunnya dari Tahun 2016 mencapai 2.720 dan terus meningkat sampai pada Tahun 2019 menjadi sebanyak 3.335 pengunjung dan mengalami penurunan pada angka 1.700 pada Tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 dan sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan menjadi sebanyak 4.400 pengunjung. Selanjutnya koleksi judul buku pada Tahun 2022 tersedia 8.180 judul buku. Dalam konteks ini jumlah perpustakaan adalah jumlah perpustakaan yang terdapat di seluruh Kabupaten Pesawaran (mencakup perpustakaan SD-SMP Perpustakaan di Kantor OPD) dan jumlah setiap tahunnya merupakan agregat dari tahun sebelumnya, begitu pula jumlah pengunjung merupakan jumlah pengunjung seluruh perpustakaan di Kabupaten Pesawaran.

Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, diarahkan untuk memperkuat perannya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan literasi. Serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan mengurangi kesenjangan akses informasi. Terutama dukungan untuk perpustakaan desa yang terintegrasi dengan program Smart Village Provinsi Lampung.

Adapun Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat belum tersedia sehingga strategi manajemen perpustakaan mulai dari pengelolaan sarpras perpustakaan, hingga strategi peningkatan minat baca melalui perpustakaan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Dalam perspektif kedepan perlu terus diupayakan agar pelayanan urusan perpustakaan dapat berkontribusi pada peningkatan minat baca masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Penjelasan lebih lanjut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.67 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2022

Indikator	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah perputakaan	245	278	296	321	339	463	472
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	2.720	2.809	3.060	3.335	1.700	2.700	4.400
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	5.014	5.608	6.027	6.726	6.959	7.241	8.180
Jumlah Pustakawan Tenaga Teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	0	0	0	0	0	2	4

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2023

**X. Urusan Kearsipan**

Kinerja urusan kearsipan periode Tahun 2016-2022 dapat digambarkan oleh indikator pada Tabel berikut ini. Indikator persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku secara tren menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2016 tercatat sejumlah 13,33% atau 6 dari 45 OPD yang mengelola arsip secara baku, kemudian pada Tahun 2022 meningkat menjadi 33,33% atau 14 dari 43 OPD. Rasio ini perlu ditingkatkan kembali agar setiap OPD memiliki kelengkapan arsip untuk dipergunakan sebagai evaluasi dan mengukur kinerja kualitas OPD. Kemudian untuk indikator peningkatan SDM pengelola kearsipan mengalami penurunan, pada Tahun 2016 terdapat 23 arsiparis, kemudian pada Tahun 2022 terdapat 22 arsiparis.

Tabel 2.68 Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2016-2022

Indikator	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	13,33	17,78	20,00	22,22	22,22	22,22	33,33
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	23	23	27	27	10	36	22

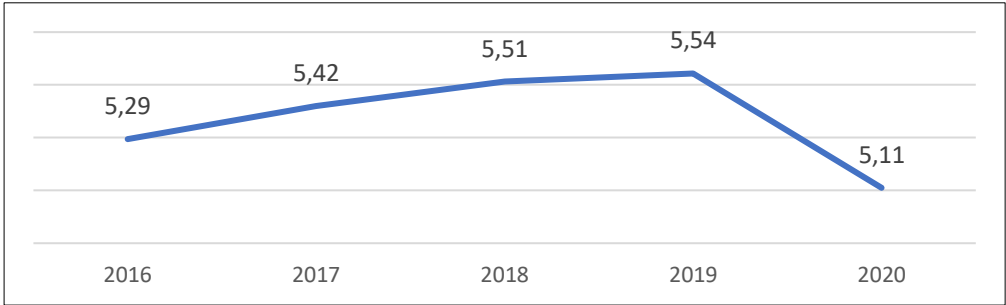
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2023

**Pelayanan Urusan Pilihan**

**A. Urusan Pertanian**

Bahan makanan utama penduduk di Kabupaten Pesawaran adalah beras, secara umum, tren produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal mengalami peningkatan sepanjang Tahun 2016-2020. Adapun capaian produksi (panen) sebesar 205.442,00 ton dengan luas lahan 38.809 hektar tercapai di Tahun 2016, mengalami kenaikan sampai Tahun 2019 namun kembali mengalami penurunan panen menjadi 150.540,60 ton dengan luas lahan pertanian 29.460 hektar di Tahun 2020.

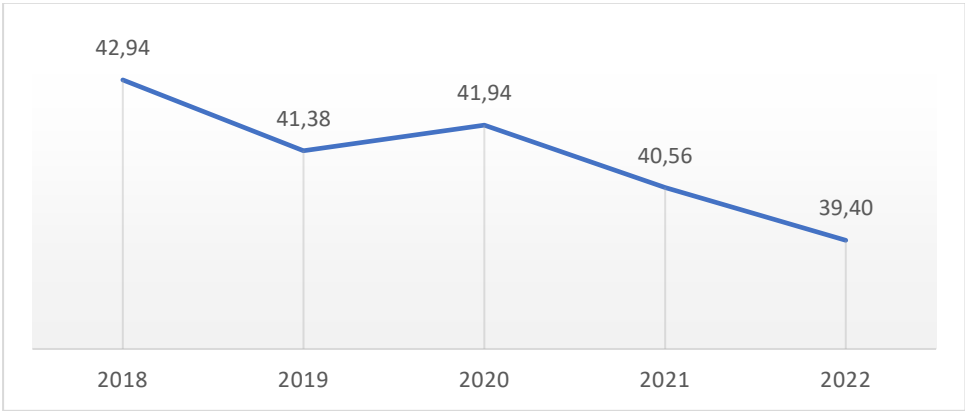
Gambar 2.36 Grafik Produktivitas Pertanian Padi dan Bahan Pangan Utama Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pertanian 2021

Sementara itu, kontribusi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan terhadap PDRB cenderung mengalami penurunan, pada Tahun 2018 tercatat 42,94%, kemudian menurun menjadi 41,38% pada Tahun 2019 dan meningkat ke 41,94% pada Tahun 2020. Selanjutnya proporsi sektor ini terus menurun hingga mencapai 39,40% pada Tahun 2022. Hal ini terjadi karena adanya perubahan aktivitas ekonomi yang berdampak pada perubahan guna lahan dari pertanian ke lahan terbangun serta perpindahan mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor lainnya. Penjelasan lebih lanjut disampaikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.37 Grafik Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

**B. Urusan Pariwisata**

Sektor pariwisata harus dipandang sebagai sektor yang berfungsi menjadi katalisator pembangunan (*agent of development*) yang berkontribusi terhadap proses pembangunan, yakni berperan dalam peningkatan pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja, mempercepat pemerataan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi alam yang terbatas. Adapun daerah tujuan wisata di Kabupaten Pesawaran didominasi oleh objek wisata alam pesisir, informasi mengenai hal ini telah diuraikan pada pembahasan pola ruang kawasan budidaya dalam sub bab kawasan pariwisata.

Hingga saat ini daerah tujuan wisata di Kabupaten Pesawaran masih didominasi wisata berskala lokal dan memiliki daya tarik yang hampir mirip antara satu destinasi dengan destinasi yang lainnya, selain itu juga belum seluruhnya dilengkapi dengan fasilitas utama penunjang pariwisata yakni warung makan (kuliner) dan penginapan serta akses transportasi yang memadai. Dalam konteks pengembangan pariwisata hal ini dapat bermakna bahwa daerah tujuan wisata tersebut belum mampu berperan optimal dalam memberikan nilai tambah ekonomi kepada masyarakat.

Tabel 2.69 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kunjungan Wisatawan	1.155.851	1.387.029	873.829	1.135.978	437.978
Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	24,49	20,00	-37,00	30,00	-61,44

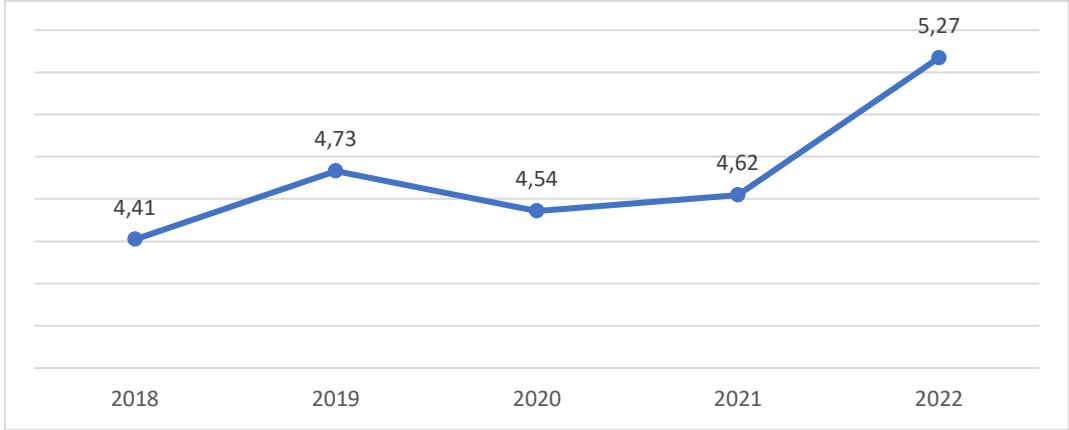
Sumber: Dinas Pariwisata 2022

Kunjungan wisata pada objek wisata di Kabupaten Pesawaran mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi pada periode Tahun 2018-2022 dengan jumlah kunjungan sebanyak 1.158.851 wisatawan pada Tahun 2018 dan menurun menjadi 437.978 wisatawan pada Tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 7,29% per tahun.

Sementara itu, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB mengalami perkembangan yang cukup baik meskipun sempat terkontraksi akibat Pandemi Covid-19. Pada Tahun 2018 tercatat 4,41%, kemudian meningkat menjadi 4,73% pada

Tahun 2019 dan menurun pada angka 4,54% pada Tahun 2020. Selanjutnya pada Tahun 2022 mencapai 5,27%.

Gambar 2.38 Grafik Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

C. Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Pesawaran mengalami penurunan yang cukup besar namun dengan perkembangan yang fluktuatif. Pada Tahun 2018 tercatat 49.756 ton produksi yang terus menurun hingga Tahun 2022 mencapai 19.667 ton. Dari total produksi perikanan tersebut pada Tahun 2018, 24% berasal dari tangkapan nelayan yang proporsinya berfluktuasi selama periode hingga Tahun 2022 yang mencapai 23,28%, dimana proporsi terbesarnya pada Tahun 2021 sebanyak 36,87%. Hal tersebut sejalan dengan adanya tren perkembangan cakupan bina kelompok nelayan dimana pada awal Tahun 2018 tercakup 28,33% dan menurun menjadi 18,73% pada Tahun 2022.

Selanjutnya, jumlah konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Pesawaran per kapita sudah menunjukkan capaian yang fluktuatif pada Tahun 2018-2022 dimana pada Tahun 2018 sebanyak 27 kg/kapita dan meningkat menjadi 56 kg/kapita pada Tahun 2021 namun menurun sesuai dengan ketersediaan produksi perikanan menjadi 35 kg/kapita. Upaya untuk menyosialisasikan gerakan makan ikan terjadi seiring dengan kampanye GEMARIKAN (Memasyarakatkan Gemar Makan Ikan) untuk meningkatkan cakupan nutrisi penduduk. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.70 Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi perikanan (Ton)	49.756	43.921	30.017	31.149	19.667
Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	24,10	28,60	35,53	36,87	23,28
Cakupan bina kelompok nelayan	28,33	28,59	28,59	29,66	18,73
Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	27	42	54	56	35

Sumber: Dinas Perikanan 2022

D. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan penyumbang PDRB terbesar kedua setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada Tahun 2022 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Pesawaran tercatat 15,37%. Sektor perdagangan ini dijalankan oleh pedagang/usaha formal dan pedagang/usaha informal, dengan jumlah kelompok pedagang/usaha yang dibina sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2022 sebesar 45,52%.

Tabel 2.71 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016-2022

Indikator	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran	13,06	13,06	13,36	14,05	13,64	14,06	15,37
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	38,72	38,72	38,72	38,72	42,24	43,59	45,52

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2023

E. Urusan Perindustrian

Sektor industri pengolahan merupakan penyumbang PDRB terbesar ketiga setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor perdagangan besar dan eceran pada Tahun 2020 tercatat 13,83%. Dalam konteks ini, industri berdasarkan kapasitas tenaga kerjanya dari yang terkecil dibedakan menjadi industri skala kecil, industri skala menengah dan industri skala besar. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian urusan perindustrian untuk kewenangan Kabupaten mencakup industri kecil dan sedang, yang didalamnya terdapat kelompok usaha kecil berupa pengrajin dan industri rumah tangga. Adapun realisasi cakupan bina kelompok pengrajin mengalami tren peningkatan. Pada Tahun 2016 tercatat bina kelompok pengrajin dengan cakupan mencapai 52,99%, kemudian pada Tahun 2022 cakupan pembinaan mencapai 99,60%. Hal ini menunjukkan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam mendukung usaha industri kecil menengah sehingga kedepan perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar usaha tersebut dapat mandiri.

Tabel 2.72 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016-2022

Indikator	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan bina kelompok pengrajin	52,99	64,43	80,9	89,71	99,57	99,58	99,60

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2023

Tabel 2.73 Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Industri Pengolahan (%)	13,94	14,01	13,51	14,15	13,83

Sumber: Pesawaran Dalam Angka, 2023

Dukungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam rangka mewujudkan pembangunan industri di Kawasan Industri Pesawaran (Kecamatan Tegineneng) dan untuk mendukung kebijakan pembangunan industri pengolahan sesuai janji kerja Gubernur Lampung telah dilaksanakan melalui kebijakan penyusunan *feasibility study* (studi kelayakan) Kawasan Industri Tegineneng pada Tahun 2017, penyusunan Masterplan Kawasan Industri Tegineneng pada Tahun 2018, MoU dengan SDCP Holdings PTY LTD pada Tahun 2019, Penyusunan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tegineneng Tahun 2022-2042, Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Koridor Kawasan Industri Tegineneng – Negeri Katon Tahun 2022-2042, dan peninjauan yang difasilitasi oleh Kementerian Investasi/BKPM dan DPMPSTP Provinsi Lampung terkait rencana Investasi Angel Yeast.Co.Ltd pada Bulan Maret 2023.

F. Urusan Transmigrasi

Pelaksanaan transmigrasi saat ini dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta difasilitasi oleh pemerintah pusat ditujukan bagi kemanfaatan daerah itu sendiri. Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat yang proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah



daerah sebagai pelaksana (*rowing*) sedangkan pemerintah pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (*steering*), maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan *demand side*, dimana pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat yang melibatkan pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota. Selama periode Tahun 2016-2020 transmigran swakarsa tercatat sebanyak 13 orang yang sebagian besar merupakan tenaga kerja indonesia di luar negeri.

Tabel 2.74 Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Transmigran Swakarsa	5	8	0	0	0

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2021

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Urusan Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesawaran telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama periode Tahun 2011-2025 telah ada dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat diacu dan terlegitimasi. RPJMD Kabupaten Pesawaran Periode Tahun 2021-2026 juga sudah ditetapkan menjadi Perda melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026. Selain itu, selama periode Tahun 2017-2021 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019. Secara lebih lengkap, gambaran indikator kinerja urusan perencanaan yang telah dicapai sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.75 Indikator Urusan Perencanaan Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (persen)	100	100	100	100	100
Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (persen)	100	100	100	100	100
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2023

Berdasarkan Tabel diatas selama Tahun 2018-2022 bahwa penjabaran konsistensi program dalam RPJMD pada dokumen RKPD telah terakomodir 100%, termasuk penjabaran konsistensi program dalam RKPD pada APBD. Selanjutnya untuk tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan pola ruang dan/atau struktur ruang dalam RTRW juga telah mencapai 100%.

B. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan dalam kebijakan yang terkait otonomi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan inovasi daerah yang bertujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kabupaten Pesawaran pada tahun 2020 mendapatkan capaian indeks inovasi daerah

(IID) sebesar 2.454 dengan kriteria sangat inovatif. Pada Tahun 2021 sebesar 48,71 dengan kategori inovatif. Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) didasarkan pada 97 Indikator yang tersusun menjadi 23 dimensi, 12 pilar dan 4 aspek. Pengukuran IDSD Kabupaten Pesawaran akan dilaksanakan pada Tahun 2022. Pengukuran IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) didasarkan pada 6 dimensi data perencanaan dan keuangan tahun 2018-2020. Hasil pengukuran IPKD Kabupaten Pesawaran dari tahun 2018-2020 berada dalam kategori tidak ada predikat dengan nilai Tahun 2018 sebesar 39,76 Tahun 2019 sebesar 35,69 dan Tahun 2020 sebesar 52,64. Sedangkan IKKD (Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah sebagai amanat Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 direncanakan akan dilaksanakan Tahun 2022. Dalam Rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, atau pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 387 dijelaskan bahwa dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintah daerah mengacu pada prinsip:

- peningkatan efisiensi;
- perbaikan efektivitas;
- perbaikan kualitas pelayanan;
- tidak ada konflik kepentingan;
- berorientasi kepada kepentingan umum;
- dilakukan secara terbuka;
- memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pada periode Tahun 2018-2022 Inovasi Daerah yang telah diterapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.76 Inovasi Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran

No.	Inovasi	Perangkat Daerah
1	<i>Daily Evaluation System</i> (DES)	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Desa Tangguh Bencana (DESTANA)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Sistem Informasi Manajemen PAD	Badan Pendapatan Daerah
4	Pembekalan Juru Pungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah
5	Inovasi Andan Jejama (Jurnal Inovasi dan Kelitbangan)	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	Pengelolaan Data Online	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Sistem Penatausahaan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum
9	Sistem Administrasi Terpadu (SIATU)	Bagian Organisasi
10	Fungsi Koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran	Bagian Organisasi
11	Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Pesawaran	Bagian Perekonomian
12	Fasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten	Bagian Perlengkapan
13	Perhutanan Sosial Masyarakat Pesawaran (PERSAMARAN)	Bagian Sumber Daya Alam
14	Potensi Tambak Garam Desa Pesisir Pesawaran	Bagian Sumber Daya Alam
15	Pelayanan keliling Jemput bola (JEBOL)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	Peningkatan Pelayanan Pasien Rujukan dengan Pendampingan Pasien	Dinas Kesehatan

No.	Inovasi	Perangkat Daerah
17	Perawat Homecare meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dari rumah ke rumah	Dinas Kesehatan
18	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kader Posyandu	Dinas Kesehatan
19	Kesinambungan Update Data SISDMK untuk ketepatan Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
20	Peningkatan Capaian Target Program TBC Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal	Dinas Kesehatan
21	Kordinator Mitra UMKM (KOMIT-UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
22	Pembuatan Pelaporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Berbasis Akuntansi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
23	Digitalisasi Produk UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
24	Fasilitasi Pengembangan Pemasaran UMKM dengan Toko Modern	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
25	Peningkatan Kualitas Potensi UMKM Di Kecamatan Dengan Program <i>One Village One Destination</i>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
26	TABIK PUN (Training, Bantuan Modal, Insentif, Kolaborasi, Pusat Perbelanjaan)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
27	Pengelolaan <i>Website</i>	Dinas Lingkungan Hidup
28	Sosialisasi <i>Destination Branding</i>	Dinas Pariwisata
29	Siskeudes <i>Online</i>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
30	Sipades <i>Online</i>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
31	Industri Rumahan (IR) Bagi Perempuan Pedesaan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Tanggap Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33	Pembinaan Pemuda Berkarakter dan Berprestasi	Dinas Pemuda dan Olahraga
34	Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCantik)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
35	Penyelenggaraan Bina Murid	Dinas Pendidikan
36	Pembinaan Sanggar Seni Budaya Daerah	Dinas Pendidikan
37	Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Non Kependidikan	Dinas Pendidikan
38	Pelatihan Pendidikan Berjenjang PTK PAUDNI Tingkat Dasar (Diksar)	Dinas Pendidikan
39	Pembinaan dan Pembentukan Kampung KB Terpadu	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
40	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok PIK Remaja dan Lomba PIK Remaja	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
41	Peningkatan Pembinaan Kesertaan ber-KB melalui TKBK (Tim KB Keliling)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
42	Pengembangan Sistem Informasi Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
43	<i>Integrated Fisheries Clinic Services</i>	Dinas Perikanan
44	Pengendalian OPT Tanaman Pangan	Dinas Pertanian
45	Pengembangan Desa Mandiri Benih	Dinas Pertanian
46	Pendamping Stimulan Perumahan Swadaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
47	Penyusunan Database Pengembangan Perumahan Komersil dan Subsidi Kabupaten Pesawaran	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
48	Air Minum Perdesaan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
49	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Budidaya Kambing	Dinas Sosial
50	Lampung Terang Pesawaran Terang (LARANG PERANG)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Inovasi	Perangkat Daerah
51	Pembuatan Aplikasi <i>Website</i> Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
52	Bersama Inspektorat Mencari Solusi (BERISI)	Inspektorat
53	Saber Pungli	Inspektorat
54	Sistem Pengendalian <i>Intern</i> Pemerintah (SPIP)	Inspektorat
55	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja
56	Patroli Siaga	Satuan Polisi Pamong Praja

**C. Urusan Keuangan**

Berdasarkan pada tabel di bawah, secara keseluruhan kinerja urusan penunjang keuangan dapat dikatakan baik. Beberapa indikator telah memenuhi target dan sebagian kecil belum tercapai. Namun demikian, pengelolaan keuangan dapat dikatakan telah baik dengan dapat dipertahankannya opini LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI selama 6 tahun berturut-turut. Begitu juga kinerja pelaksanaan program dan kegiatan juga sangat baik dengan tidak ada satupun program pembangunan daerah yang tidak dilaksanakan (0%) sehingga terdapat keyakinan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah telah mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan yaitu RPJMD. Selanjutnya persentase PAD terhadap APBD berfluktuasi, pada Tahun 2017 berada pada angka 7,42% dan menurun menjadi 6,50% pada Tahun 2022. Fenomena adanya penurunan SILPA dan kebijakan alokasi anggaran serta bagaimana perkembangan kinerja realisasinya akan dibahas lebih lanjut pada Bab III.

Tabel 2.77 Indikator Urusan Keuangan Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase SILPA terhadap APBD	0,98	4,33	0,25	0,97	0,81	0,63
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persentase PAD terhadap APBD	7,42	4,53	5,13	5,66	6,61	6,50
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2023

**D. Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**

Berdasarkan Tabel berikut ini, dapat diketahui kinerja penyelenggaraan urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Secara umum indikator rata-rata lama pegawai mendapatkan diklat selama periode Tahun 2017-2022 telah sesuai dengan standar, kemudian untuk indikator persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal telah mencapai nilai maksimum, hal ini menggambarkan adanya komitmen pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran untuk meningkatkan kompetensi ASN. Indikator Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural secara tren mengalami peningkatan selama periode Tahun 2017-2022, hal ini terjadi karena adanya pembagian skala prioritas untuk pelaksanaan diklat struktural. Selanjutnya pada indikator Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural serta pada indikator Jumlah jabatan administrasi terus meningkat menjadi 21,11% dan 179 pada Tahun 2022. Selanjutnya jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu juga mengalami tren peningkatan meskipun pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dari 3.207 menjadi 3.142 orang pegawai.

Tabel 2.78 Indikator Urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Tahun)	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100,00	100,00	100,00	95,00	100,00	99,90
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	18,38	21,04	21,04	21,04	21,04	21,11
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	39	39	39	39	38	38
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	166	168	169	163	174	179
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu	-	2.631	2.778	2.884	3.207	3.142
Jumlah pemangku jabatan fungsional umum	-	1.044	990	984	102	712

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2023

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah

A. Urusan Pengawasan

Seiring dengan mampu dipertahankannya peroleh predikat opini WTP pada LKPD Kabupaten Pesawaran oleh BPK RI selama 6 tahun terakhir, menunjukkan adanya kualitas kinerja pengawasan, terutama di bidang keuangan. Indeks kapabilitas APIP menunjukkan capaian yang cukup baik yakni pada level 3 (integrated) dari 5 (optimized). Kinerja pengawasan terkait dengan tindak lanjut hasil temuan BPK yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan OPD terkait mencapai peningkatan dari 41,94% ke angka 73,51%. Namun demikian, jika dilihat dari kecenderungan jumlah temuan dari hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan penurunan kecuali pada Tahun 2018 yang meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini perlu adanya perhatian terkait dengan penurunan kualitas tata kelola keuangan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat berdampak pada kualitas akuntabilitas dalam penyajian LKPD sehingga akan berdampak pada penurunan opini LKPD. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM auditor fungsional serta peningkatan sarana penunjang perlu terus ditingkatkan.

Tabel 2.79 Indikator Urusan Pengawasan Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kapabilitas APIP	1	3	3	3	3	3
Persentase tindak lanjut temuan	41,94	33,63	33,33	59,26	72,96	73,51
Persentase pelanggaran pegawai	0,04	0,21	0,61	0,07	0,00	0,00
Jumlah temuan BPK	22	30	11	0	19	0

Sumber : Inspektorat 2023

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

a. Nilai Tukar Petani

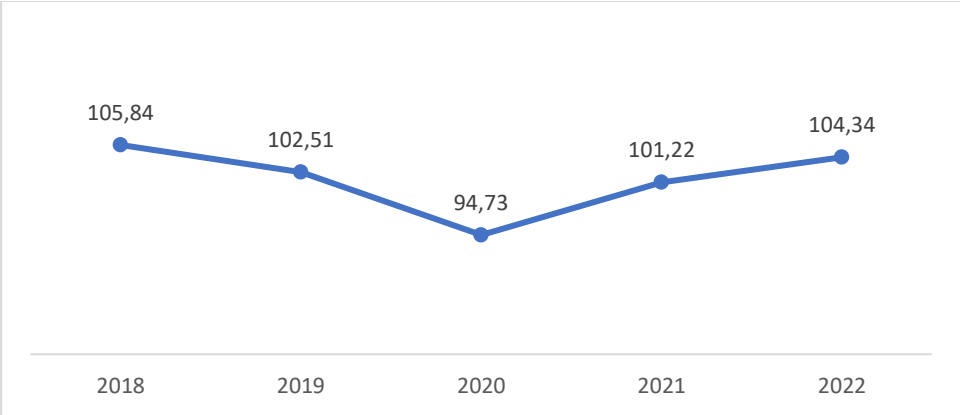
Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Adapun makna besaran nilai tukar petani yakni:

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga



- produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- $NTP < 100$ , berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Gambar 2.39 Nilai Tukar Petani Tahun 2018-2022



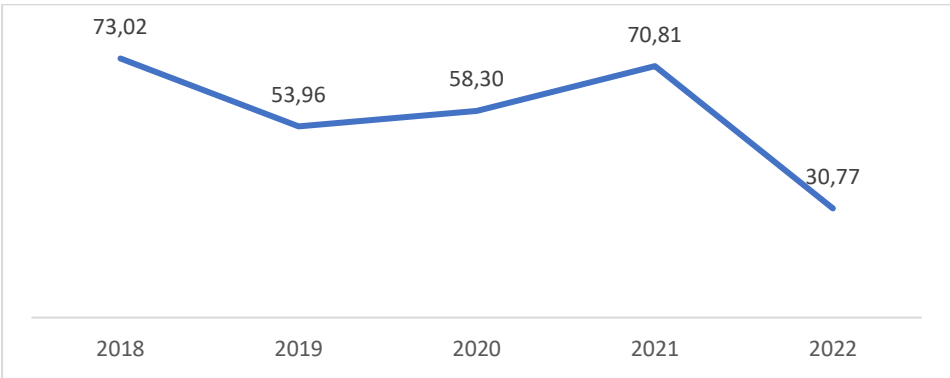
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

Mengacu pada gambar di atas dapat diketahui bahwa NTP di Kabupaten Pesawaran yang dicirikan dengan data NTP Provinsi Lampung selama periode Tahun 2018-2022 mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 dan meningkat kembali hingga Tahun 2022 pada angka 104,34.

**b. Angka Kriminalitas**

Angka kriminalitas merupakan indikator yang selalu diupayakan untuk disusutkan, walaupun tidak mungkin untuk mencapai angka nol. Tindak kriminal yang terjadi di suatu tempat, memunculkan rasa tidak aman bagi warganya. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, berpotensi terjadi. Capaian angka kriminalitas yang ditangani tercatat selama periode Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi, pada Tahun 2018 berada pada posisi 73,02 persen, menurun ke angka 53,96% pada Tahun 2019, kemudian Tahun 2020 dan 2021 meningkat menjadi 70,81% dan menurun ke angka 30,77% pada akhir periode. Dengan masih adanya jumlah kejahatan, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir.

Gambar 2.40 Grafik Persentase Capaian Angka Kriminalitas yang Tertangani Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2022

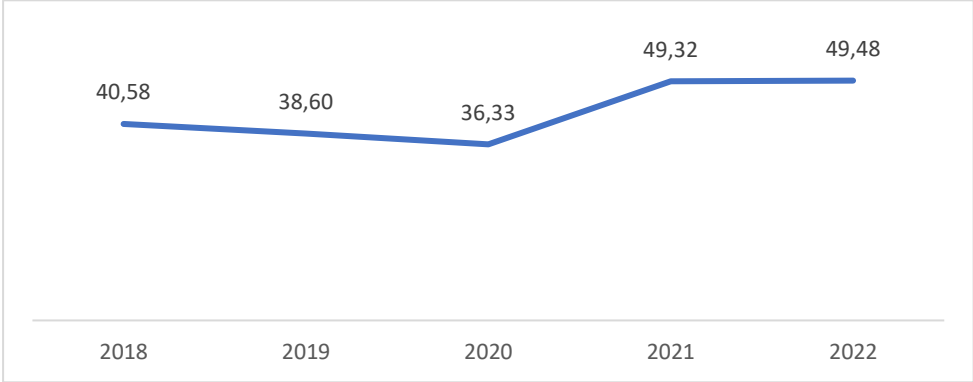
**c. Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan untuk melihat apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas penduduk yang

tinggi atau daerah berkembang dengan produktivitas penduduk yang masih rendah. Rasio ini merupakan indikator demografi yang sangat penting. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi.

Pada Tahun 2018, angka ketergantungan Kabupaten Pesawaran sebesar 40,58% kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2019 dan 2020 hingga menjadi 36,33%. Namun angka ketergantungan naik kembali pada angka 49,32% di Tahun 2021 dan 49,48% pada Tahun 2022. Artinya pada Tahun 2022, penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) menanggung kurang lebih sebanyak 49 penduduk usia non produktif (usia <15 dan >64 tahun), dimana kualitas penduduk (baik tingkat pendidikan, keahlian, profesionalitas dan kreativitas) mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat terendah yang berguna untuk mendorong pembangunan ekonomi. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.41 Grafik Rasio Ketergantungan Tahun 2018-2022

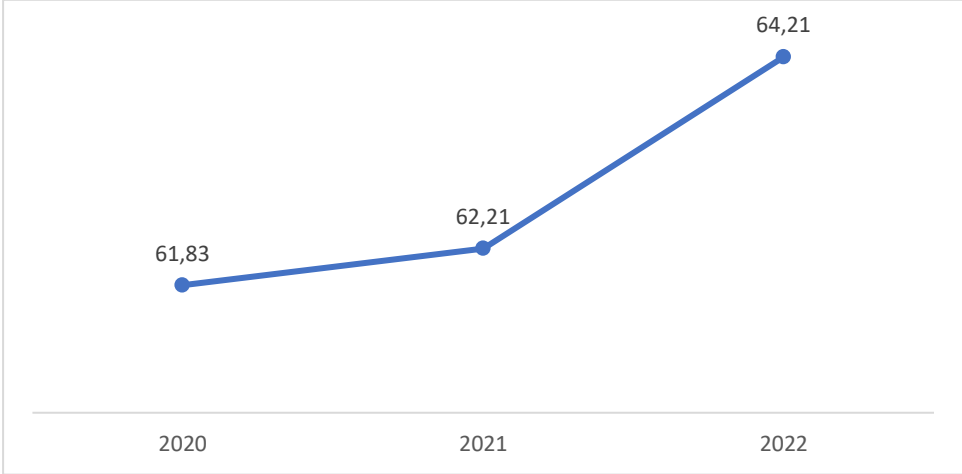


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; BPS Kabupaten Pesawaran 2023

**d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH terdiri atas tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKLH bertujuan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Pada Tahun 2020 IKLH Kabupaten Pesawaran menunjukkan angka 61,83 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai poin 64,21 pada Tahun 2022 sehingga masuk dalam kategori cukup baik (interval 60-70). Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran harus terus berupaya menggalakkan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Gambar 2.42 Grafik Perkembangan IKLH 2020-2022



Sumber: Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Pesawaran 2023

**e. Indeks Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya yang telah dan terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menciptakan *good governance* menuju *clean governance*. Langkah awalnya adalah melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai oleh organisasi yang sangat gemuk dan berjenjang, adanya tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundang-undangan, rendahnya produktivitas kerja pegawai, ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang seharusnya tergambar dalam *machinery of government* (MoG) yakni *interconnected between structural and process*, belum semuanya memiliki *standard operational procedure*(SOP) yang jelas dan terukur, serta penempatan sumber daya manusia aparatur yang belum menerapkan *the right man in the right place*.

Melalui reformasi birokrasi, perlu dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, dengan mengutamakan nilai 4E yakni efektivitas, efisiensi, *equity* (rasa adil), dan ekonomis (hemat dan optimal). Tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Pengukuran penerapan reformasi birokrasi menggunakan nilai indeks reformasi birokrasi. Indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2022 masih berada pada angka 54,27 dengan predikat CC (cukup). Oleh karena itu kedepan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran akan mengupayakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan berkinerja tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Misi ke-1 pembangunan daerah periode 2021-2026.

**2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2023**

Indikator makro pembangunan memberikan gambaran secara makro terhadap hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dengan melibatkan masyarakat dan stakeholders lainnya. Upaya pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam membangun daerah diarahkan pada pencapaian visi : “PESAWARAN LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN MASYARAKAT YANG PRODUKTIF” sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 serta “Pesawaran Sejahtera dan Berdaya Saing Menjadi Bumi Wisata 2025” yang merupakan visi jangka panjang Kabupaten Pesawaran sebagaimana tercantum dalam RPJPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dilaksanakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja program pembangunan beserta realisasi anggaran sampai triwulan kedua beserta permasalahan yang dihadapinya sehingga pada akhir Tahun 2023 pelaksanaan pembangunan dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran dikategorikan berdasarkan kriteria sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.80 Kategori Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

INTERVAL NILAI REALISASI	KRITERIA PENILAIAN	KODE
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
76% ≤ 90%	Tinggi	T
66% ≤ 75%	Sedang	S

INTERVAL NILAI REALISASI	KRITERIA PENILAIAN	KODE
51% ≤ 65%	Rendah	R
≤ 50%	Sangat Rendah	SR

2.2.1 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD

Dari laporan Evaluasi Hasil Renja OPD yang sudah di sampaikan ke Bappeda, setelah di lakukan perhitungan di dapat bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 sampai dengan triwulan II adalah 32,44% (Sangat Rendah), dan rata-rata realisasi anggaran sebesar 33,16% (Sangat Rendah).

2.2.2 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD

Dari laporan Evaluasi Hasil Renja OPD yang sudah di sampaikan ke Bappeda, setelah di lakukan perhitungan di dapat bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja RPJMD Kabupaten Pesawaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 22,87% (Sangat Rendah), dan rata-rata realisasi anggaran sebesar 22,21% (Sangat Rendah)

Rekapitulasi evaluasi hasil RKPD Triwulan II Tahun Anggaran 2023 terhadap tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2023 serta terhadap tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.81 Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun Anggaran 2023

No	Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
		K	Rp.	K	Rp.
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13,95	29,17	47,67	67,79
		SR	SR	SR	S
2	Dinas Kesehatan	17,03	14,10	32,60	31,10
		SR	SR	SR	SR
3	RSUD Pesawaran	21,85	15,67	18,57	22,42
		SR	SR	SR	SR
4	Puskesmas Gedong Tataan	33,78	13,59	10,89	12,78
		SR	SR	SR	SR
5	Puskesmas Kedondong	37,31	15,92	11,84	19,19
		SR	SR	SR	SR
6	Puskesmas Roworejo	35,91	25,72	11,87	10,32
		SR	SR	SR	SR
7	Puskesmas Bernung	16,85	19,59	6,81	8,88
		SR	SR	SR	SR
8	Puskesmas Hanura	26,55	41,86	9,82	5,78
		SR	SR	SR	SR
9	Puskesmas Kalirejo	24,77	18,64	9,01	2,39
		SR	SR	SR	SR

No	Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
		K	Rp.	K	Rp.
10	Puskesmas Way Lima	43,99	15,91	13,40	6,73
		SR	SR	SR	SR
11	Puskesmas Trimulyo	38,52	20,42	24,17	19,94
		SR	SR	SR	SR
12	Puskesmas Padang Cermin	32,65	30,56	10,29	19,80
		SR	SR	SR	SR
13	Puskesmas Bunut	34,16	43,95	10,42	9,78
		SR	SR	SR	SR
14	Puskesmas Pedada	19,86	12,25	8,12	6,24
		SR	SR	SR	SR
15	Puskesmas Tegineneng	39,39	25,24	30,41	15,57
		SR	SR	SR	SR
16	Puskesmas Maja	22,96	18,50	9,33	4,13
		SR	SR	SR	SR
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	35,96	24,17	18,43	38,76
		SR	SR	SR	SR
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	18,19	18,86	5,93	6,79
		SR	SR	SR	SR
19	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	32,28	33,35	22,24	22,24
		SR	SR	SR	SR
20	Dinas Sosial	7,70	6,19	19,16	19,74
		SR	SR	SR	SR
21	Dinas Koperasi, Dan Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	61,40	52,38	13,79	11,32
		R	R	SR	SR
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29,57	29,6	47,84	42,73
		SR	SR	SR	SR
23	Dinas Ketahanan Pangan	33,99	25,20	36,15	61,37
		SR	SR	SR	R
24	Dinas Pertanahan Lingkungan Hidup	44,31	44,31	36,12	29,38
		SR	SR	SR	SR
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8,85	8,85	25,39	31,56
		SR	SR	SR	SR



No	Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
		K	Rp.	K	Rp.
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	40,89	40,43	35,31	26,75
		SR	SR	SR	SR
27	Dinas Perhubungan	24,86	24,01	44,44	12,18
		SR	SR	SR	SR
28	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	24,80	19,12	18,24	25,03
		SR	SR	SR	SR
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34,72	39,49	17,58	17,02
		SR	SR	SR	SR
30	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8,29	11,52	6,38	3,60
		SR	SR	SR	SR
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	28,56	14,82	16,80	20,23
		SR	SR	SR	SR
32	Dinas Perikanan	8,33	15,77	12,52	10,71
		SR	SR	SR	SR
33	Dinas Pariwisata	35,71	32,95	17,63	14,36
		SR	SR	SR	SR
34	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	26,20	37,21	40,26	26,73
		SR	SR	SR	SR
35	Dinas Perkebunan dan Peternakan	19,44	33,31	32,04	52,26
		SR	SR	SR	R
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26,24	34,94	28,67	35,60
		SR	SR	SR	SR
37	Bagian Tata Pemerintahan	84,62	59,28	20,99	10,50
		T	R	SR	SR
38	Bagian Kesejahteraan Rakyat	54,27	53,26	26,64	12,07
		R	R	SR	SR
39	Bagian Hukum	100,00	97,76	32,86	21,12
		ST	ST	SR	SR
40	Bagian Perekonomian	24,02	43,53	31,73	18,55
		SR	SR	SR	SR
41	Bagian Administrasi Pembangunan	57,14	20,00	20,86	19,74
		R	SR	SR	SR
42	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	50,00	75,44	20,00	22,55
		SR	S	SR	SR

No	Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
		K	Rp.	K	Rp.
43	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	50,00	61,72	16,76	27,78
		SR	R	SR	SR
44	Bagian Umum	55,36	56,27	42,56	34,84
		R	R	SR	SR
45	Bagian Perlengkapan	42,16	37,49	5,85	20,88
		SR	SR	SR	SR
46	Bagian Organisasi	14,29	45,81	11,24	13,45
		SR	SR	SR	SR
47	Bagian Kerja Sama	23,34	30,00	22,28	20,00
		SR	SR	SR	SR
48	Bagian Sumber Daya Alam	0,00	24,47	4,17	36,63
		SR	SR	SR	SR
49	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30,78	40,65	35,43	35,54
		SR	SR	SR	SR
50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32,32	40,49	22,16	11,51
		SR	SR	SR	SR
51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35,95	65,47	21,08	9,48
		SR	R	SR	SR
52	Kecamatan Gedongtataan	46,76	29,61	42,70	33,85
		SR	SR	SR	SR
53	Kecamatan Negeri Katon	33,04	48,74	45,50	16,90
		SR	SR	SR	SR
54	Kecamatan Tegineneng	79,17	94,76	4,29	39,92
		T	ST	SR	SR
55	Kecamatan Way Lima	18,43	18,43	7,99	10,45
		SR	SR	SR	SR
56	Kecamatan Padang Cermin	32,26	13,65	23,01	30,65
		SR	SR	SR	SR
57	Kecamatan Punduh Pedada	17,92	20,11	7,51	7,94
		SR	SR	SR	SR
58	Kecamatan Kedondong	15,82	17,33	6,36	4,79
		SR	SR	SR	SR
59	Kecamtan Marga Punduh	11,97	22,32	14,29	24,04
		SR	SR	SR	SR

No	Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
		K	Rp.	K	Rp.
60	Kecamatan Way Khilau	45,83	32,91	35,30	34,62
		SR	SR	SR	SR
61	Kecamatan Teluk Pandan	24,34	23,01	24,34	23,01
		SR	SR	SR	SR
62	Kecamatan Way Ratai	18,52	20,74	5,24	10,23
		SR	SR	SR	SR
63	Inspektorat	22,82	24,23	49,44	50,72
		SR	SR	SR	SR
64	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36,02	55,21	94,17	29,39
		SR	R	ST	SR
65	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	30,88	43,92	21,97	22,13
		SR	SR	SR	SR
66	Badan Pendapatan daerah	15,86	38,01	13,97	18,02
		SR	SR	SR	SR
67	Badan Kepegawaian dan PSDM	50,93	38,10	32,54	30,27
		R	SR	SR	SR
68	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	41,40	54,68	31,64	37,55
		SR	R	SR	SR
JUMLAH		32,44	33,16	22,87	22,21
		SR	SR	SR	SR

Berdasarkan hasil evaluasi Tabel T-C.19 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Pesawaran didapatkan secara rata-rata Capaian Kinerja RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 baik capaian kinerja program maupun penyerapan dana masuk ke dalam predikat **SANGAT RENDAH**, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.82 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan Kedua Tahun 2023 Kabupaten Pesawaran

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144	Bln	5.412.695.500	108	3.966.081.000	10	50.000.000	3	26.570.500	30	53	111	3.992.651.500	77	74
	1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72	Bln	100.800.000	60	81.968.000	5	30.000.000	2	14.690.300	40	49	62	96.658.300	86	96
	1.01.01.2.01.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	72	Bln	5.311.895.500	48	3.884.113.000	5	20.000.000	1	11.880.200	20	59	49	3.895.993.200	68	73
Rata-rata capaian kinerja (%)													30	54,18			77,08	84,62
Predikat kinerja													SR	R			T	T
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Tersediaan Jasa Administrasi Keuangan	504	Bln	5.904.983.250	347	4.253.828.700	84	601.521.000	15	279.539.541	125	401	362	4.533.368.241	72	77
	1.01.01.2.06.01	Tersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72	Bln	100.800.000	60	60.000.000	12	60.000.000	-	57.215.000	-	95	60	117.215.000	83	116
	1.01.01.2.06.02	Tersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72	Bln	5.311.895.500	48	3.884.113.000	12	96.045.000	3	57.816.400	25	60	51	3.941.929.400	71	74
	1.01.01.2.06.03	Tersediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	72	Bln	163.535.500	48	69.111.500	12	15.400.000	3	14.950.000	25	97	51	84.061.500	71	51
	1.01.01.2.06.04	Tersediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72	Bln	98.639.050	48	70.004.200	12	157.795.000	3	61.525.000	25	39	51	131.529.200	71	133
	1.01.01.2.06.05	Tersediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	72	Bln	62.999.000	48	30.000.000	12	24.721.000	-	9.800.000	-	40	48	39.800.000	67	63
	1.01.01.2.06.06	Tersediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	Bln	55.814.200	48	30.000.000	12	50.000.000	3	20.000.000	25	40	51	50.000.000	71	90

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	Bln	111.300.000	47	110.600.000	12	197.560.000	3	58.233.141	25	29	50	168.833.141	69	152
Rata-rata capaian kinerja (%)													17,86	57,25			71,83	97,10
Predikat kinerja													SR	R			S	ST
	1.01.01.2.07	Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		72	Bln	100.000.000	48	43.870.000	12	466.747.000	3	321.204.000	25	69	51	365.074.000	71	365
	1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	72	Bln	100.000.000	48	43.870.000	12	466.747.000	3	321.204.000	25	69	51	365.074.000	71	365
Rata-rata capaian kinerja (%)													25,00	19,66			20,24	104,31
Predikat kinerja													SR	SR			SR	ST
	1.01.01.2.08	Tersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah		144	Bln	2728780000	96	126300000	24	2.602.480.000	6	1.267.727.300	25	49	102	1.394.027.300	71	51
	1.01.01.2.08.02	Tersediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	Bln	95.200.000	48	15.600.000	12	79.600.000	3	25.467.300	25	32	51	41.067.300	71	43
	1.01.01.2.08.04	Tersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Bln	2.633.580.000	48	110.700.000	12	2.522.880.000	3	1.242.260.000	25	49	51	1.352.960.000	71	51
Rata-rata capaian kinerja (%)													25,00	40,62			70,83	47,26
Predikat kinerja													SR	SR			S	SR
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		216	Bln	333075000	96	231804000	36	618392000	6	171.142.000	17	28	102	402.946.000	47	121
	1.01.01.2.09.02	Tersediaan Jasa Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	72	Bln	92.075.000	48	35.760.000	12	276.392.000	3	42.500.000	25	15	51	78.260.000	71	85
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72	Bln	120.500.000	48	98.022.000	12	12.000.000	3	5.465.000	25	46	51	103.487.000	71	86
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72	Bln	120.500.000		98.022.000	12	330.000.000	-	123.177.000	-	37	0	221.199.000	-	184
Rata-rata capaian kinerja (%)													16,67	32,75			47,22	118,15
Predikat kinerja													SR	SR			SR	ST
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		4993	-	351.048.249.000	2055	69.607.462.000	11563	114.301.430.900	337	13.285.844.566	3	12	2392	82.893.306.566	48	24



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6			7			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	1.01.02.2	Pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar		1573		196.130.414.500	700	11.509.640.000	3521	80.219.379.900	26	11.107.841.900	1	14	726	22.617.481.900	46	12		
	1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - SD	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	60	lokal	16.987.071.000	40	110.390.000	5	411.608.400	-	11.832.000	-	3	40	122.222.000	67	1		
	1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah - SD	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	60	Unit	18.187.246.800	40	230.000.000	20	856.959.000	-	23.798.000	-	3	40	253.798.000	67	1		
	1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah - SD	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	744	Unit	35.293.844.000	320	578.700.000	4	587.905.600	-	16.794.000	-	3	320	595.494.000	43	2		
	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - SD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	240	Unit	21.249.616.200	120	203.970.000	30	3.334.284.900	-	119.644.500	-	4	120	323.614.500	50	2		
	1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas - SD	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	96	lokal	18.608.585.000	40	782.000.000	55	3.382.217.000	-	96.175.000	-	3	40	878.175.000	42	5		
	1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat						730	240.400.400	-		-							
	1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat						60	244.660.000	-		-							
	1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat						12	295.529.600	-		-							
	1.01.02.2.01.17	Pengelolaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	60	Unit	15.156.564.000	30	238.000.000	730	552.500.000	1	2.700.000	0	0	31	240.700.000	52	2		
	1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - SD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	78	Unit	19.338.720.000	30	382.700.000	315	1.625.000.000	-	-	-	-	30	382.700.000	38	2		
	1.01.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	60	Unit	17.860.330.000	20	2.782.090.000	316	1.091.134.000	10	524.950.000	3	48	30	3.307.040.000	50	19		
	1.01.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	60	Peserta	15.966.273.700	20	5.670.990.000	50	33.560.400	12	3.554.000	24	11	32	5.674.544.000	53	36		
	1.01.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi.	60	Peserta	15.554.626.850	20	190.800.000	1366	26.777.429.400	3	10.308.394.400	0	38	23	10.499.194.400	38	67		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.	K	Rp. (000)		K
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		K	Rp.	13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi																	
	1.01.02.2.01.28.	Pembinaan Kelembagaan Manajemen Sekolah SD	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan	55	Peserta	1.927.536.950	20	340.000.000	314	51.481.200	-	-	-	-	20	340.000.000	36			
	1.01.02.2.01.29.	Pengelolaan Danas BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						316	41.515.300.000	-	-	-	-						
	1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar							4	2.886.045.000										
Rata-rata capaian kinerja (%)													1,72	7,04			33,51	8,45		
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR		
	1.01.02.2	Pengelolaan Pendidikan sekolah menengah Pertama		1338		144.821.647.000	600	57.260.768.000	6184	23.129.385.000	311	940.273.200	5	4	911	58.201.041.200	68	40		
	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Sarana Prasarana dan utilitas Sekolah	60	lokal	16.987.071.000	20	1.230.000.000	12	2.772.660.000	-	87.170.000	-	3	20	1.317.170.000	33	8		
	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - SD	Pembangunan Sarana Prasarana dan utilitas Sekolah						5	9.960.727.000	-									
	1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Pembangunan Sarana Prasarana dan utilitas Sekolah						10	4.721.640.000	-									
	1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Pembangunan Sarana Prasarana dan utilitas Sekolah						3	344.699.000	-									
	1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Sarana Prasarana dan utilitas Sekolah						4	47.044.000	-									
	1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Sarana Prasarana dan utilitas Sekolah						4	986.597.000	-									
	1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Pembangunan Sarana Prasarana dan utilitas Sekolah						4	740.724.000	-									
	1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana Prasarana dan utilitas Sekolah						2	423.619.600	-									
	1.01.02.2.02.28	Pengelolaan Perlengkapan Siswa	Pengadaan Perlengkapan Siswa	60	Unit	18.187.246.800	20	2.300.900.000	730	2.098.899.000	-	3.900.000	-	0	20	2.304.800.000	33	13		
	1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	744	Unit	35.293.844.000	350	2.309.090.000	15	125.000.000	-	-	-	-	350	2.309.090.000	47	7		
	1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	240	Unit	21.249.616.200	120	15.400.000.000	5063	498.240.000	267	265.307.800	5	53	387	15.665.307.800	161	74		
	1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	96	lokal	18.608.585.000	30	12.000.998.000	80	40.000.000	22	9.870.400	28	25	52	12.010.868.400	54	65		
	1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan TenagaKependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	60	Unit	15.156.564.000	30	13.009.890.000	150	1.700.000.000	10	558.875.000	7	33	40	13.568.765.000	67	90		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

N o	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		K	Rp.		14 = 6 + 12		K	15 = 14/5*100	
	1.01.02.2.02.41.	Pembinaan Kelembagaan Manajemen Sekolah SMP	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	78	Unit	19.338.720.000	30	11.009.890.000	64	429.686.000	12	15.150.000	19	4	42	11.025.040.000	54	57		
	1.01.02.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						70	15.464.900.000	-	-	-	-	0	-				
	1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Pembangunan Sarana Prasarana dan utilitas Sekolah						2	338.848.000	-	-	-	-						
	1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Pembangunan Sarana Prasarana dan utilitas Sekolah						3	49.444.000	-	-	-	-						
Rata-rata capaian kinerja (%)													3,88	7,84			24,98	17,32		
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR		
	1.01.02.2.	Pengelolaan Pendidikan anak usia Dini (PAUD)		187 2		9.896.187.500	610	738.989.000	461	9.290.736.000	-	1.078.104.996	-	12	610	1.817.093.996	33	18		
	1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Sarana Prasarana dan utilitas Sekolah						5	264.747.000										
	1.01.02.2.03.03.	Rehabilitasi Sedang,Berat Gedung,Ruang Kelas,Ruang Guru PAUD	Terpenuhinya Rehab gedung	50	Unit	536.000.000	30	231.000.000	10	222.632.000	-	-	-	-	30	231.000.000	60	43		
	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Terpenuhi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	300	Unit	200.000.000	120	122.000.000	315	449.710.000		9.879.000	-	2	120	131.879.000	40	66		
	1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terpenuhi Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1200	peserta	8.710.026.000	237	340.989.000	68	8.369.037.000		882.448.996	-	11	237	1.223.437.996	20	14		
	1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidik PAUD	Terpenuhi Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidik PAUD	322	peserta	450.161.500	223	45.000.000	68	249.357.000		185.777.000	-	75	223	230.777.000	69	51		
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	22			47	44		
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR		
	1.01.02.2	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		210		200.000.000	145	98.065.000	1397	1.661.930.000	-	159.624.470	-	10	145	257.689.470	69	129		
	1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana Prasarana dan utilitas Sekolah						1	408.979.000										
	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Terselenggara Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	210	Kec	200.000.000	145	98.065.000	1397	1.661.930.000		159.624.470	-	10	145	257.689.470	69	129		
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	5			35	64		
Predikat kinerja													SR	SR			SR	R		
	1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan		80		600.000.000	20	120.000.000	20	86.850.000	-	17.400.000	-	70	20	137.400.000	100	93		
	1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar	20	Dok	125.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	-	1.850.000	-	7	5	26.850.000	25	21		

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
			yangDiselenggarakan oleh Masyarakat															
	1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20	Dok	175.000.000	5	35.000.000	5	25.000.000	-	6.050.000	-	24	5	41.050.000	25	23
	1.01.05.2.01.03	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20	Dok	125.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	-	9.500.000	-	38	5	34.500.000	25	28
	1.01.05.2.01.04	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20	Dok	175.000.000	5	35.000.000	5	11.850.000	-	-	-	-	5	35.000.000	25	20
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	17,4			25	23,13429
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			2400		2.178.914.385	395	994.914.385	6	1.184.000.000	-	307.700.000	-	52	395	1.302.614.385	33	106
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggara Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1200	orang	1.506.324.385	20	914.324.385	3	592.000.000		153.850.000	-	26	20	1.068.174.385	1,67	70,91
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1200	sangra r	672.590.000	375	80.590.000	3	592.000.000		153.850.000	-	26	375	234.440.000	31,25	34,86
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	26			16,46	52,88
Predikat kinerja													SR	SR			SR	R
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			700		398.410.000	480	207.270.000	9	651.158.900	3	81.513.900	100	95	483	288.783.900	166	253
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/kota	70	WBTB	103.410.000	60	58.200.000	3	36.300.000	1	15.600.000	33,33	42,98	61	73.800.000	53,67	59,58
	2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	600	peserta	100.000.000	400	58.200.000	3	36.300.000	1	15.600.000	33,33	42,98	401	73.800.000	56,33	96,96
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	30	peserta	195.000.000	20	90.870.000	3	578.558.900	1	50.313.900	33,33	8,70	21	141.183.900	56,33	96,96
Rata-rata capaian kinerja (%)													33,33	31,55			55,44	84,50
Predikat kinerja													SR	SR			R	T
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										153.906.621.900		17.919.244.473						

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
				1	2	3	4	5		6	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)												13,95	29,17			47,67	67,79
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)												SR	SR			SR	S

## 2. Dinas Kesehatan

N o	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)				
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100				
1.						Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				184.574.038,18		36.305.928												
1.	02	.				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				184.574.038,18		36.305.928												
1.	02	.	01	.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko ta	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	238.575.842,58	231	94.433.866,03	45	683.884	27	399.200,76	60,00	58,37	258	94.833.067	258	39,75		
1.	02	.	01	.	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	persen	150.000,00	6	37.650,00	3	-	3	-	100,00	-	9	37.650	9	25,10		
1.	02	.	01	.	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022	6	Dokumen	60.000	2	19.875	1	-	1	-	100,00	-	3	19.875,00	50,00	33,13	
1.	02	.	01	.	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen LAKIP dan LPPD Dinas Kesehatan	12	Dokumen	90.000	4	17.775	2	-	2	-	100,00	-	6	17.775,00	50,00	19,75
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	-			50,00	26,44			
Predikat kinerja																ST	R			R	R			
1.	02	.	01	.	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan pada Dinas Kesehatan	100	persen	1.605.840,00	28	518.430,00	12	280.640	6	280.640,32	50,00	100,00	34	799.070	34	49,76	
1.	02	.	01	.	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	Jumlah laporan Pengelola Keuangan Dinas Kesehatan	72	bulan	1.515.840	24	488.430	12	280.640	6	280.640	50,00	100,00	30	769.070	41,67	50,74



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021- 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
								K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2					3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan/Triwul an/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	12	laporan	90.000	4	30.000	-	-	-	-	-	-	4	30.000	33,33	33,33
Rata-rata capaian kinerja (%)																	50,00	100,00			37,50	42,03
Predikat kinerja																	R	R			R	R
1.	02	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi Umum pada Dinas Kesehatan</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>1.254.000</b>	<b>118</b>	<b>334.830,60</b>	<b>12</b>	<b>25.000</b>	<b>6</b>	<b>11.608,17</b>	<b>50,00</b>	<b>46,43</b>	<b>124</b>	<b>346.439</b>	<b>124</b>	<b>27,63</b>
1.	02	01	2	06	02	Jumlah ATK Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK Sekretariat Dinas Kesehatan	72	bulan	120.000	24	40.975	12	25.000	6	11.608	50,00	46,43	30	52.583	41,67	43,82
1.	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	72	bulan	120.000	24	45.000	-	-	-	-	-	-	24	45.000	33,33	37,50
1.	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Surat Kabar Harian dan Buku Perundang-Undangan	72	bulan	216.000	24	47.000	-	-	-	-	-	-	24	47.000	33,33	21,76
1.	02	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum Rapat Dinas Kesehatan dan Puskemas	66	bulan	390.000	22	110.540	-	-	-	-	-	-	22	110.540	33,33	28,34
1.	02	01	2	06	09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Kepala Dinas, Sekretaris dan Sub Bagian Sekretariat Dinas Kesehatan	72	bulan	408.000	24	91.316	-	-	-	-	-	-	24	91.316	33,33	22,38
Rata-rata capaian kinerja (%)																	50,00	46,43			35,00	30,76
Predikat kinerja																	R	R			R	R
1	02	01	2	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang pada Dinas Kesehatan</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>169.590</b>	<b>7</b>	<b>41.435</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>41.435</b>	<b>7</b>	<b>24,43</b>
01	02	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Sofa Ruang Kepala Dinas Kesehatan	5	unit	89.490	1	14.915	-	-	-	-	-	-	1	14.915	20,00	16,67
01	02	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan Personal Computer (PC), peralatan Printer, AC, Wireless dan Awning parkir Dinas Kesehatan	30	unit	80.100	6	26.520	-	-	-	-	-	-	6	26.520	20,00	33,11

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-			20,00	24,89	
Predikat kinerja																R	R			R	R	
1.	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pada Dinas Kesehatan	100	persen	216.000	24	73.260	12	72.000	6	21.216,67	50,00	29,47	30	94.477	30	43,74
1.	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tersedianya jasa listrik pada Dinas Kesehatan dan Instalasi Farmasi	72	bulan	216.000	24	73.260	12	72.000	6	21.217	50,00	29,47	30	94.477	41,67	43,74
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,00	29,47			41,67	43,74	
Predikat kinerja																R	R			R	R	
1.	02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah pada Dinas Kesehatan	100	persen	1.552.466	12	381.153	6	306.244	6	85.735,60	100,00	28,00	18	466.889	18	30,07
1.	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas dan Operasional Dinas Kesehatan	30	unit	1.477.466	10	368.653	6	306.244	6	85.736	100,00	28,00	16	454.389	53,33	30,75
1.	02	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas Kesehatan	12	unit	75.000	2	12.500	-	-	-	-	-	-	2	12.500	16,67	16,67
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	28,00			35,00	23,71	
Predikat kinerja																R	R			R	R	
1.	02	01	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD pada UPT Dinas Kesehatan	100	persen	233.627.947	36	93.047.107	-	-	-	-	-	-	36	93.047.107	36	39,83
1.	02	01	2	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD (13 Puskesmas)	72	bulan	179.027.947	24	76.983.561	-	-	-	-	-	-	24	76.983.561	33,33	43,00
							Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan JKN di RSUD	72	bulan	54.600.000	12	16.063.546	-	-	-	-	-	-	12	16.063.546	16,67	29,42

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
Rata-rata capaian kinerja (%)														-	-			25,00	36,21			
Predikat kinerja														R	R			R	R			
1.	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin	100	Persen	599.928.081	526.347	74.388.884	27.615	27.738.571	2.050	7.486.640,048	7,43	26,99	528.397	81.875.524	528.397	13,65
1.	02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal	100	persen	297.230.923	420	8.877.091	162	11.532.593	1	40.500,00	0,62	0,35	421	8.917.591	421	3,00
1.	02	02	2	01	05	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana pendukungnya	Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) LB3 Cold Storage	2	Unit	100.000.000	1	373.975	-	-	-	-	-	1	373.975	50,00	0,37	
							Jumlah Pembangunan Rumah sakit tipe D beserta sarana dan prasarana pendukungnya	2	unit	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	02	02	2	01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	26	paket	37.843.299	8	2.894.888	-	-	-	-	-	8	2.894.888	30,77	7,65	
							Jumlah Peralatan Kantor rumah sakit	16	paket	1.274.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Jumlih Ketersediaan Tempat pembuangan sampah (TPS) LB3 Cold Storage, instalasi jaringan air PDAM,pembangunan ruang bedah sentral	5	Unit	9.654.500	1	-	-	-	-	-	-	1	-	20,00	-	
1.	02	2.	2	01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Pembangunan peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	2	unit	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	02	02	2	01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah rehabilitasi bangunan rumah sakit ( gedung rawat inap)	5	unit	4.450.000	2	149.336	-	-	-	-	-	2	149.336	40,00	3,36	
							Jumlah pemeliharaan gedung rumah sakit	21	kali	285.000	8	-	-	-	-	-	-	8	-	38,10	-	
							Jumlah pemeliharaan Instalasi Listrik Rumah Sakit	72	bulan	145.000	24	9.568	-	-	-	-	-	24	9.568	33,33	6,60	
							Jumlah Pemeliharaan Instalasi Air Bersih	48	kali	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

N o	Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021- 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)		
								K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2					3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
							Jumlah Pemeliharaan perlengkapan rumah sakit	72	bulan		775.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.	02	02	2	01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah pemeliharaan puskesmas	6	pkm	-	630.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.	02	02	2	01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah Pemeliharaan Pustu	4	pustu	1	1.902.420	-	-	-	-	-	-	1	1.902.420	25,00	475,61		
1.	02	02	2	01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan pusling rawat inap dan rawat jalan	9	unit	3	150.840	-	-	-	-	-	-	3	150.840	33,33	5,28		
							Jumlah Pengadaan Ambulance	6	unit	1	605.000	-	-	-	-	-	-	1	605.000	16,67	20,02		
1.	02	02	2	01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan alat kesehatan dipuskesmas dan jaringannya	9	paket	8	609.075	31	3.104.145	-	-	-	-	8	609.075	88,89	5,48		
							Jumlah monitoring evaluasi pertemuan aspak	6	kali	1	381.306	-	-	-	-	-	-	1	-	16,67	-		
1.	02	02	2	01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin dipuskesmas dan jaringannya	600	item	200	802.896	100	3.317.397	1	40.500	1,00	1,22	201	843.396	33,50	3,57		
							jumlah distribusi obat dan logistik	72	bulan	102	-	-	-	-	-	-	-	102	-	141,67	-		
1.	02	02	2	01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai di Puskesmas (DAK dan APBD)	180	item	60	1.379.092	30	5.100.051	-	-	-	-	60	1.379.092	33,33	19,87		
1.	02	02	2	01	20	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas gunung sari)	Jumlah Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan	1*4	paket	-	44.000	-	11.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,25	0,31			100,21	91,30		
Predikat kinerja																R	R			R	R		
1.	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	100	persen		302.204.854	525.886	65.436.389	27.450	15.931.178	8.201	7.446.140,05	29,87	46,74	534.087	72.882.529	534.087	24,12

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						Kabupaten/Kota															
1.	02	02	2	02	01	Pengelola Pelayan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Pertemuan Peningkatan Pelayanan kesehatan pada ibu hamil	6	kali	2	46.240	1	16.100	-	-	-	-	2	16.100	33,33	34,82
1.	02	02	2	02	01	Pengelola Pelayan Kesehatan Ibu Hamil (puskesmas Gunung sari)	Target Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.348	orang	-	180.372	337	46.100	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	02	02	2	02	02	Pengelolaan Pelayan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Rumah Tunggu Kelahiran	6	RTK	3	13.100.645	3	1.958.657	-	-	-	-	3	1.958.657	50,00	14,95
1.	02	02	2	02	02	Pengelolaan Pelayan Kesehatan Ibu Bersalin (puskesmas Gunung sari)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.288	orang	-	89.400	322	22.350	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	02	02	2	02	03	Pengelolaan Pelayan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumah pertemuan Rapat perjanjian kasus kematian ibu dan anak	56	pkm	-	79.148	14	67.148	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	02	02	2	02	03	Pengelolaan Pelayan Kesehatan Bayi Baru Lahir (puskesmas Gunung sari)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.228	orang	-	12.000	307	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	02	02	2	02	04	Pengelolaan Pelayan Kesehatan Balita	Jumlah Pertemuan Pemantauan Tumbuh Kembang Balita Bagi Kader Paud dan TK/RA	56	pkm	-	406.954	14	71.481	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	02	02	2	02	04	Pengelolaan Pelayan Kesehatan Balita (puskesmas Gunung sari)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.836	orang	-	484.120	1.959	121.030	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	02	02	2	02	05	Pengelolaan Pelayan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah pelatihan pelayanan kesehatan korban kekerasan perempuan dan anak	144	orang	-	350.700	36	87.300	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	02	02	2	02	05	Pengelolaan Pelayan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (puskesmas gunung sari)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.004	orang	-	263.400	3.501	65.850	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	02	02	2	02	06	Pengelolaan Pelayan	Jumlah pertemuan dalam rangka validasi	22	kali	5	56.100	14	16.100	4	13.500	28,57	2,68	9	29.600	40,91	52,76



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100			
						Kesehatan Pada Usia Produktif	data pelayanan kesehatan (deteksi dini penyakit tidk menular) pada usia produktif berbasis web																
1.	02	02	2	02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (puskesmas Gunung sari)	Target Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72.068	orang		115.640	-	18.017	28.910	2.557	1.500	14,19	5,19	2.557	1.500	3,55	1,30	
1.	02	02	2	02	07	Pengelolaan Pelayanan Keschatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Pertemuan peningkatan pengetahuan kader lansia diwilayah kabupaten pesawaran	6	Kali		75.000	2	20.000	14	10.000	-	-	-	-	2	20.000	33,33	26,67
1.	02	02	2	02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (puskesmas Gunung sari)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.584	orang		202.800	-	1.146	50.700	768	3.000	67,02	5,92	768	3.000	16,75	1,48	
1.	02	02	2	02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan kasus Hipertensi di Masyarakat	88	pkm		340.400	28	37.750	14	10.000	2	-	14,29	-	30	37.750	34,09	11,09
1.	02	02	2	02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan kasus Diabetes Mellitus (DM) di Masyarakat	88	pkm		166.100	28	39.200	14	12.460	2	-	14,29	-	30	39.200	34,09	23,60
1.	02	02	2	02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus (puskesmas Gunung sari)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	848	orang		74.760	-	212	18.690	452	-	213,21	-	452	-	53,30	-	
1.	02	02	2	02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan kasus dan Pelayanan Kesehatan Sesuai standar terhadap ODGJ	88	pkm		164.000	28	43.700	14	49.000	2	-	14,29	-	30	43.700	34,09	26,65
1.	02	02	2	02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (puskesmas Gunung sari)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	192	orang		44.400	-	48	11.100	110	2.250	228,47	20,27	110	2.250	57,12	5,07	
1.	02	02	2	02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan pada orang dengan	90	Pkm dan RS		170.000	30	40.000	15	10.000	15	-	100,00	-	45	40.000	50,00	23,53

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
						Orang Terduga Tuberkulosis	terduga TBC disemua layanan kesehatan															
1.	02	02	2	02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (puskesmas Gunung sari)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.380	orang	22.600	-	345	5.650									
1.	02	02	2	02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Pelayanan Kesehatan pada orang dengan resiko Terinfeksi HIV disemua layanan kesehatan	75	pkm dan RS	200.000	15	20.000	15	140.000	15	-	100,00	-	30	20.000	40,00	10,00
1.	02	02	2	02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV(puskesmas Gunung sari)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2.632	orang	24.000	-	658	6.000	98	1.500	14,89	25,00	98	1.500	3,72	6,25	
1.	02	02	2	02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	72	bulan	22.260.000	24	7.310.902	-	-	-	-	-	24	7.310.902	33,33	32,84	
1.	02	02	2	02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita Gizi Buruk di tangani	24	blita gizi buruk	149.890.000	6	69.931	14	6.750	-	-	-	6	69.931	25,00	0,05	
							Jumlah Balita Gizi kurang yang mendapat PMT	420	balita BGM	-	35	-	-	-	-	-	-	35	-	8,33	-	
							Jumlah Ibu Hamil KEK yang mendapat PMT	300	ibu hamil KEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	02	02	2	02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (puskesmas Gunung sari)	arget Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	16	dokumen	1.278.200	-	4	319.550	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	02	02	2	02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar	75	pkm	152.628	30	20.000	-	-	-	-	-	30	20.000	40,00	13	
							Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Olahraga	75	pkm	152.628	15	-	-	-	-	-	-	15	-	20,00	-	
							Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah Puskesmas	75	pos	109.650	5	-	-	-	-	-	-	5	-	6,67	-	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

N o	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021- 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
								K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2					3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		K	Rp.
							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kesehatan Olahraga bagi anak SD	75	pkm	162.750	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1,33	-	
							Jumlah Calon Jamaah Haji yang diperiksa kebugarannya	750	orang	152.628	150	-	-	-	-	-	-	150	-	20,00	-	
1.	02	02	2	02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa ODF	70	desa	600.000	43	55.796	33	153.572	-	11.250	-	7,33	43	67.046	61,43	11,17
							jumlah sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	180	lokasi	152.628	21	-	-	-	-	-	-	21	-	11,67		
							jumlah pembinaan fasyankes ( Rs dan PKM) yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	75	pkm dan RS	122.102	15	-	-	-	-	-	-	15	-	20,00		
							jumlah peembinaanTempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	90	lokasi	122.102	15	-	-	-	-	-	-	15	-	16,67		
1.	02	02	2	02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (puskesmas Gunung sari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	dokumen	30.000	-	-	3	7.500	-	-	-	-	-	-	-	
1.	02	02	2	02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisonal Lainnya	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	20	pkm	130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	02	02	2	02	20	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Verifikasi Sinyal/ Penyelidikan Epidemiologi (PE)/ Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB/Wabah dan Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, Zoonosis, hewan berbisa beracun, NTD's, dan penyakit menular lainnya	4	kali	30.000	-	-	-	-	-	-	-					
1.	02	02	2	02	20	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	dokumen	30.000	-	-	1	7.500								

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

N o	Kode					Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021- 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
								K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.	
1	2					3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						(puskesmas Gunung sari)																
1.	02	02	2	02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah pelayanan pada hari-hari besar dan Pelayanan Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan, PMI	780	posko	1.074.050	142	462.750	130	200.000	130	200.000	100,00	100,00	272	662.750	34,87	61,71
						Jumlah Peserta Sunatan Massal		570	anak	420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	02	02	2	02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular	Jumlah Larvaciding, Pemeriksaan darah Malaria, Pengangkatan lumut dan Penyemprotan Rumah	192	lokasi	1.175.000	72	96.000	72	36.000	36	18.000	50,00	50,00	108	114.000	56,25	9,70
						Jumlah Penyemprotan / Fogging sarang nyamuk		1.350	focus	1.000.000	40	-	-	-	-	-	-	-	40	-	2,96	-
1.	02	02	2	02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (dinkes dan pkm )	Jumlah pasien BPJS yang dilayani di RSUD , (57.479) jiwa	72	bulan	81.140.000	24	34.590.102	12	10.956.377	6	6.969.267	50,00	63,61	30	41.559.369	41,67	51,22
						jumlah masyarakat yang ditanggung jamkesda		227.500	jiwa	135.640.000	522.999	-	-	-	-	-	-	522.999	-	229,89	-	-
						jumlah bantuan jasa pelayanan kesehatan peserta tidak mampu yang tidak memiliki JKN		7.500	jiwa	-	1.711	-	-	-	-	-	-	1.711	-	22,81	-	-
						jumlah bantuan transportasi dan akomodasi pendamping pasien		1.950	jiwa	-	56	-	-	-	-	-	-	56	-	2,87	-	-
1.	02	02	2	02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat ( pkm gunung sari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	72	bulam	3.828.945.728	24	-	12	957.236								
1.	02	02	2	02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rumah Sakit	72	kali	809.218	24	15.576.823	-	-	-	-	-	24	15.576.823	33,33	1.925	
						Jumlah pencetakan administrasi dan surat menyurat, list pasien dan labeling rumah sakit		72	kali	537.500	24	-	-	-	-	-	-	24	-	33,33	-	
						Jumlah pemeliharaan ambulance dan mobil jenazah		72	kali	596.750	24	-	-	-	-	-	-	24	-	33,33	-	
						Jumlah Obat-Obatan, BMHP dan Bahan Reagen Laboratorium &		72	kali	793.023.000	24	-	-	-	-	-	-	24	-	33,33	-	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021- 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)		
								K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2					3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
							Radiologi, Obat Hemodialisa																
							Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kebutuhan Gizi Pasien Rawat Inap serta Petugas Shift Malam RSUD	72	kali		5.131.620	24	-	-	-	-	-	-	24	-	33,33	-	
							Terpenuhinya SDM dr umum, spesialis dan dokter gigi RSUD	72	kali		22.996.000	24	-	-	-	-	-	-	24	-	33,33	-	
							Jumlah penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Rumah Tangga Rumah Sakit	72	kali		2.340.000	24	-	-	-	-	-	-	24	-	33,33	-	
							Jumlah Pelatihan Kesehatan bagi tenaga medis RSUD	34	kali		327.000	5	-	-	-	-	-	-	5	-	14,71	-	
							Jumlah Pelatihan Kesehatan bagi tenaga paramedis RSUD	30	kali		327.000	6	-	-	-	-	-	-	6	-	20,00	-	
							Jumlah survei kepuasan pasien RSUD	20	kali		368.000	4	-	-	-	-	-	-	4	-	20,00	-	
							Jumlah promosi kesehatan kepada pengunjung RSUD	120	kali		368.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Jumlah kegiatan PPI RSUD	5	paket		621.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	02	02	2	02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Puskesmas	88	pkm		18.120.000	24	4.695.550	3	292.290	1	33.600	33,33	11,50	25	4.729.150	28,41	26,10
1.	02	02	2	02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (pkm Gunung Sari)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	bulan		949.020	24	-	12	237.255	3	11.816	25,00	-	27	11.816	37,50	1,25
1.	02	02	2	02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Akreditasi di Kabupaten Pesawaran.	10	pkm		1.662.081.708	5	285.998	2	138.312	-	-	-	5	285.998	50,00	0,02	
							Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Re-Akreditasi di Kabupaten Pesawaran.	33	pkm		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	02	02	2	02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (KIPI)	88	pkm		170.000	28	34.640	14	18.000	-	-	-	28	34.640	31,82	20,38	
1.	02	02	2	02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak di harapkan (Keiadian	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian	4	laporan		3.000	-	-	1	750	-	-	-	-	-	-	-	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021- 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
								K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2					3	4	5			6			7			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
						Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (pkm Gunung Sari)	Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
1.	02	02	2	02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan respon Wabah	88	pkm	370.000	28	46.391	14	74.400	6	18.600	42,86	25,00	34	64.991	38,64	17,57			
1.	02	02	2	02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Pertemuan kader masyarakat dalam pencegahan Penyakit Menular: Malaria, TBC, penanggulangan penyakit Tropis Terabaikan (Kusta / frambusia / schistosomiasis / Filariasis / cacingan)	88	pkm	416.837.000	-	-	46	104.209	-	-									
1.	02	02	2	02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (pkm Gunung Sari)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	72	orang	38640*4	24	-	12	38.640	12	1.800									
1.	02	02	2	02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Kegiatan OJT Kader Pendamping ODHIV	88	pkm	40.000	-	-	30	10.000		-									
1.	02	02	2	02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	JumlahPertemuan Pemetaan Daerah Reseptif Malaria	88	pkm	2.462.835	-	-	15	615.709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		23,35	11,32			33,27	46,90		
Predikat kinerja																		R	R			R	R		
1.	02	02	2	03		Penyelenggara an Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase cakupan pengelolaan data dan informasi kesehatan	100	Persen	427.204	5	64.604	1	-	-	-	-	-	5	64.604	5	15,12			
1.	02	02	2	03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	jumlah Dokumen Profil Kesehatan Kabupaten Pesawaran	6	Dokumen	302.600	4	58.083	1	-	-	-	-	4	58.083	66,67	19,19				
1.	02	02	2	03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Laporan Sisten Informasi Puskesmas (SIP)	6	laporan	135.000	1	6.521,00	-	-	-	-	-	1	6.521	16,67	4,83				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		-	-			41,67	12,01		
Predikat kinerja																		R	R			R	R		
1.	02	02	2	04		Penerbitan izin Rumah Sakit	Persentase FKTP sesuai standar	100	Persen	65.100	36	10.800.00	2	274.800	-	-	-	-	36	10.800	36	17			



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021- 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
								K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2					3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
1.	02	02	2	04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah pembinaan n di fasyankes (RS, Puskesmas, Klinik, Bidan Praktek mandiri, Dokter Praktek Mandiri, apotek, dan Optik) di Kabupaten Pesawaran	76	Fasyankes	91.080	36	10.800,00	2	274.800	-	-	-	-	36	10.800	47,37	11,86
Rata-rata capaian kinerja (%)																	-	-			47,37	11,86
Predikat kinerja																	R	R			R	R
1.	02	03				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	9	Persen	37.487.411	52	12.184.036	12	6.409.000	6	2.694.500,00	50,00	42,04	58	14.878.536	634	39,69
1.	02	03	2	01		Pemberian Izin Praktik Tenaga kesehatan Di wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga kesehatan teregistrasi	23	Persen	141.561	24	16.986,00	-	-	-	-	-	-	24	16.986	104	12,00
1.	02	03	2	01	01	Pengendalian izin Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga kesehatan teregistrasi	140	orang	149.575	24	16.986	-	-	-	-	-	-	24	16.986	17,14	11,36
Rata-rata capaian kinerja (%)																	-	-			17,14	11,36
Predikat kinerja																	R	R			R	R
1.	02	03	2	02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayaagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	100	Persen	37.193.600	24	12.129.000	12	6.409.000	6	2.694.500,00	50,00	42,04	30	14.823.500	30	39,85
1.	02	03	2	02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Jumlah SDM tenaga home care, tenaga kontrak RSUD, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan	72	bulan	37.053.600	24	12.129.000	12	6.409.000	6	2.694.500	50,00	42,04	30	14.823.500	41,67	40,01
Rata-rata capaian kinerja (%)																	50,00	42,04			41,67	40,01
Predikat kinerja																	R	R			R	R

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021- 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
								K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2					3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
1.	02	03	2	03		Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota.	Persentase cakupan mutu dan kompetensi tenaga kesehatan	100	Persen	152.250	4	38.050	-	-	-	-	-	-	4	38.050	4	24,99
1.	02	03	2	03	01	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota.	jumlah sosialisasi dan penilaian dupak pada jabatan fungsional kesehatan Keluaran	12	Semester	160.000	4	38.050	-	-	-	-	-	-	4	38.050	33,33	23,78
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-			33,33	23,78	
Predikat kinerja																R	R			R	R	
1.	02	04				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu per satuan penduduk	7	Persen	1.223.410	141	871.536	30	406.572	-	42.190,00	-	10,38	141	913.726	2.070	74,69
1.	02	04	2	03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai izin produksi untuk Produk Makanan dan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Persentase PIRT yang memiliki SPP-IRT	100	Persen	996.308	66	848.486	30	406.572	-	42.190,00	-	10,38	66	890.676	66	89,40
1.	02	04	2	03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan, industri rumah tangga dan nomor PIRT	Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi sarana PIRT dan pembinaan ke sarana	174	sarana	903.522	66	848.486	30	406.572	-	42.190	-	10,38	66	890.676	37,93	98,58

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga															
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	10,38			37,93	98,58
Predikat kinerja																R	R			R	R
1.	02	04	2	04		Penerbitan Serifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase cakupan tempat pengelolaan makanan dan DAM yng memenuhi syarat kesehatan	100	Persen	125.000	75	23.050	-	-	-	-	-	75	23.050	75	18,44
1.	02	04	2	04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah rumh makan/restoran/depot air mnum yang memenuhi syarat kesehatan	390	Sarana	125.000	75	23.050	-	-	-	-	-	75	23.050	19,23	18,44
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-			19,23	18,44
Predikat kinerja																R	R			R	R
1.	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	88	Persen	9.752.216	26	2.695.716	14	1.067.900	-	-	-	26	2.695.716	29	27,64
1.	02	05	2	01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan	Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih	100	Persen	960.000	-	1	196.520	-	-	-	-	-	-	-	-

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
						Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dn Sehat (PHBS) di kabupaten Pesawaran															
1.	02	05	2	01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lomba desa kesrak PKK-KB Kes, P3KSS Tingkat Provinsi dan Nasional	24	lomba	960.000	5	47.373	3	180.020	-	-	-	-	5	47.373	20,83	4,93
1.	02	05	2	01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (pkm Gunung Sari)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	dokumen	66.000	-	-	1	16.500	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	-	-			-	-
Predikat kinerja																	R	R			R	R
1.	02	05	2	02		Pelaksanaan Hidup Sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hidup sehat	100	Persen	595.000	2	20.000,00	1	197.380	-	-	-	-	2	20.000	2	3,36
1.	02	05	2	02	01	Penyelenggaraa n promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Jumlah pameran pembangunan tingkat Kabupaten Pesawaran	10	Kali	710.000	2	20.000,00	1	197.380	-	-	-	-	2	20.000	20,00	2,82
Rata-rata capaian kinerja (%)																	-	-			20,00	2,82
Predikat kinerja																	R	R			R	R
1.	02	05	2	03		Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat Daerah kabupaten/kota	Persentase pelayanan kesehatan masyarakat di posyandu	100	Persen	8.197.216	24	2.675.716	12	674.000	-	-	-	-	24	2.675.716	24	32,64
1.	02	05	2	03	01	Bimbingan teknis dan	jumlah transport kader posyandu (2.220)	72	bulan	8.239.058	24	2.675.716	12	674.000	-	-	-	-	24	2.675.716	33,33	32,48

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021- 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
			supervisi pengembangan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)														
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-			33,33	32,48
Predikat kinerja												R	R			R	R
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										36.305.927,520	10.622.530,804						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												17,03	14,10			32,60	31,10
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												SR	SR			SR	SR

### 3. RSUD Pesawaran

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2					3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					31.798.364,02		23.301.760									
02.					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					31.798.364,02		23.301.760									
02.	01.				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	54.600.000,00	12	16.063.196,07	12	14.800.000	6	5.412.440,10	50,00	36,57	18	21.475.636	18	39,33
02.	01.	2.	10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD pada UPT Dinas Kesehatan	100	persen	54.600.000	12	16.063.196,07	12	14.800.000	6	5.412.440,10	50,00	36,57	18	21.475.636	18	39,33
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan JKN di RSUD	72	bulan	54.600.000	12	16.063.196,07	12	14.800.000	6	5.412.440	50,00	36,57	18	21.475.636	25,00	39,33
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,00	36,57			25,00	19,67
Predikat kinerja																ST	R			SR	SR
02.	02.				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin	100	Persen	599.928.081	210	15.735.168	118	8.501.760	56	2.752.247,06	47,46	32,37	26 6	18.487.415	266	3,08
02.	02.	2.	01.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal	100	persen	297.230.923	42	149.346	26	106.000	13	36.329,39	50,00	34,27	55	185.675	55	0,06
02.	02.	2.	01.	08.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah rehabilitasi bangunan rumah sakit ( gedung rawat inap)	5	unit	4.450.000	2	149.346	-	106.000	-	36.329	-	34,27	2	185.675	40,00	4,17
						Jumlah pemeliharaan gedung rumah sakit	21	kali	285.000	4	-	2	-	1	-	50,00	-	5	-	23,81	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
								K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.	K	Rp. (000)	
2						3	4	5			6			7			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
							Jumlah pemeliharaan Instalasi Listrik Rumah Sakit	72	bulan	145.000	24	-	12	-	6	-	50,00	-	30	-	41,67	-		
							Jumlah Pemeliharaan Instalasi Air Bersih	48	kali	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							Jumlah Pemeliharaan perlengkapan rumah sakit	72	bulan	775.000	12	-	12	-	6	-	50,00	-	18	-	25,00	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		10,00	6,85			26,10	0,70	
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR	
02.	02.	2.	02.			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	100	persen	302.204.854	168	15.585.822	92	8.395.760	43	2.715.917,68	46,74	32,35	211	18.301.740	211	6,06		
02.	02.	2.	02.	32.		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rumah Sakit	72	kali	809.218	24	15.585.822	12	8.395.760	6	2.715.918	50,00	32,35	30	18.301.740	41,67	2.262		
							Jumlah pencetakan administrasi dan surat menyurat, list pasien dan labeling rumah sakit	72	kali	537.500	24	-	12	-	6	-	50,00	-	30	-	41,67	-		
							Jumlah pemeliharaan ambulance dan mobil jenazah	72	kali	596.750	24	-	12	-	6	-	50,00	-	30	-	41,67	-		
							Jumlah Obat-Obatan, BMHP dan Bahan Reagen Laboratorium & Radiologi, Obat Hemodialisa	72	kali	793.023.000	24	-	12	-	6	-	50,00	-	30	-	41,67	-		
							Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kebutuhan Gizi Pasien Rawat Inap serta Petugas Shift Malam RSUD	72	kali	5.131.620	24	-	12	-	6	-	50,00	-	30	-	41,67	-		
							Terpenuhinya SDM dr umum, spesialis dan dokter gigi RSUD	72	kali	22.996.000	24	-	12	-	6	-	50,00	-	30	-	41,67	-		
							Jumlah penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Rumah Tangga Rumah Sakit	72	kali	2.340.000	24	-	12	-	6	-	50,00	-	30	-	41,67	-		
							Jumlah Pelatihan Kesehatan bagi tenaga medis RSUD	34	kali	327.000	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							Jumlah Pelatihan Kesehatan bagi tenaga paramedis RSUD	30	kali	327.000	-	-	4	-	1	-	-	-	1	-	3,33	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		5,56	3,59			4,63	46,90	
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														23.301.760.000			8.164.687,161							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																		21,85	15,67			18,57	22,42	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																		SR	SR			SR	SR	

#### 4. Puskesmas Gedung Tataan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 127*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								catatan untuk (x33:n33*4)*100 (untuk dm.0da1,b1)							



# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)		
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
3				4		5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
02				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																
02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	100	17.211.451,84	24	3.563.225,45	12	3.037.550	6	470.958.099,34	50,00	15.504,54	30	474.521.325	30	2.757,01	
02	01	2	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Terselenggaranya BLUD di Puskesmas Gedung Tataan	100	17.211.452	24	3.563.225	12	3.037.549,6	6	470.958.099,34	50,00	15.504,54	30	474.521.325	30	2.757,01	
02	01	2	10	01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	72	17.211.451,836	24	3.563.225,450	12	3.037.549.609	6	470.958.099	50,00	15.504,54	30	474.521.325	41,67	2.757,01
Rata-rata capaian kinerja (%)														50,00	15.504,54			20,83	1.378,50	
														R	R			R	R	
02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin	100	55.240	-	-	1	1.248.888	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	02	2	01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal	100	55.240	-	-	1	13.810	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	02	2	01	20.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4	55.240	-	-	1	13.810	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)														-	-			0	-	
Predikat kinerja														R	R			R	R	
02	02	2	02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	100	4.940.312	24	1.861.155	62.055	1.235.078	33.949	376.246.488,00	54,71	30.463,38	33.973	378.107.643	33.973	7.653,52	
02	02	2	02	01.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.796	236.400	-	-	1.199	59.100	457	22.020.000	38,12	37.258,88	457	22.020.000	9,53	9.314,72
02	02	2	02	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.580	87.540	-	-	1.145	21.885	451	21.585.000	39,39	98.629,20	451	21.585.000	9,85	24.657,30
02	02	2	02	03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.360	13.200	-	-	1.090	3.300	451	1.650.000	41,38	50.000,00	451	1.650.000	10,34	12.500,00
02	02	2	02	04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23.660	639.640	-	-	5.915	159.910	2.640	56.730.000	44,63	35.476,21	2.640	56.730.000	11,16	8.869,05
02	02	2	02	05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	49.804	351.900	-	-	12.451	87.975	5.611	23.175.000	45,06	26.342,71	5.611	23.175.000	11,27	6.585,68
02	02	2	02	06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	139.284	143.920	-	-	34.821	35.980	20.122	15.580.000	57,79	43.301,83	20.122	15.580.000	14,45	10.825,46
02	02	2	02	07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16.308	224.400	-	-	4.077	56.100	2.497	16.500.000	61,25	29.411,76	2.497	16.500.000	15,31	7.352,94
02	02	2	02	09.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.652	18.060	-	-	413	4.515	601	4.515.000	145,52	100.000,00	601	4.515.000	36,38	25.000,00
02	02	2	02	10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	368	58.800	-	-	92	14.700	142	7.200.000	154,35	48.979,59	142	7.200.000	38,59	12.244,90
02	02	2	02	11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2.696	21.520	-	-	674	5.380	490	-	72,70	-	490	-	18,18	-
02	02	2	02	12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.088	24.000	-	-	-	6.000	425	1.500.000	-	25.000,00	425	1.500.000	8,35	6.250,00
02	02	2	02	15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	1.718.820	-	-	3	429.705	2	106.475.000	66,67	24.778,63	2	106.475.000	16,67	6.194,66
02	02	2	02	17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	73.200	-	-	1	18.300	2	5.070.000	200,00	27.704,92	2	5.070.000	16,67	6.926,23
02	02	2	02	20.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	9.000	-	-	1	2.250	2	750.000	200,00	33.333,33	2	750.000	50,00	8.333,33
02	02	2	02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48	1.128.652	24	1.861.155	12	282.163	6	75.081.488,000	50,00	26.609,26	30	76.942.643	62,50	6.817,22
02	02	2	02	36.	Investigasi Awal Kejadian Tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	umlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4	13.200	-	-	1	3.300	2	450.000	200,00	13.636,36	2	450.000	50,00	3.409,09

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
02.02.02.40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1	680	178.060	-	-	160	44.515	48	17.965.000	30,00	40.357,18	48	17.965.000	7,06	10.089,30
Rata-rata capaian kinerja (%)											85,11	38.871,76			22,72	9727,64
Predikat kinerja											R	R			R	R
02.05.01.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	88	26.500	-	-	1	6.625	-	-	-	-	-	-	-	-
02.05.02.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di kabupaten Pesawaran	100	26.500	-	-	1	6.625	-	-	-	-	-	-	-	-
02.05.02.01.01.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	26.500	-	-	1	6.625			-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-			-	-
Predikat kinerja											R	R			R	R
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								4.293.062,609		470.958.099,339						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											33,78	13,59			10,89	12,78
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											R	R			R	R

## 5. Puskesmas Kedondong

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2					3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																
02					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																
02	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	15.182.069	24	3.829.841	12	2.491.326	6	989.464	50,00	39,72	30	4.819.305	30	32
02	01	2.	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD pada UPT Dinas Kesehatan	100	persen	15.182.069	24	3.829.841	12	2.491.326,1	6	989.464	50,00	39,72	30	4.819.305	30	32
02.	01.	2.	10.	01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di puskesmas Kedondong	72	bulan	15.182.069	24	3.829.841	12	2.491.326	6	989.464	50,00	40	30	4.819.305	41,67	32
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,00	39,72			20,83	16
																R	R			R	R
02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin	100	Persen	56.000	-	-	1	1.268.924	-	-	-	-	-	-	-	-
02	02	2.	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal	100	persen	56.000	-	-	1	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-
02.	02.	2.	01.	20.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah kalibrasi alat kesehatan dipuskesmas	4	kali	56.000	-	-	1	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-			0	-

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)				
2						3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100				
														Predikat kinerja		R		R							
02	02	2.	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	100	persen	11.723.788	24	2.634.695	41.606	1.254.924	23.877	122.996.920,00	57,39	9.801,14	23.901	125.631.615	23.901	1.071,60				
02.	02.	2.	02.	01.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.140	orang	361.300	-		785	90.325	374	40.585	47,64	44,93	374	40.585	11,91	11,23				
02.	02.	2.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.996	orang	30.000	-	-	749	7.500	372	1.800	49,67	24,00	372	1.800	12,42	6,00				
02.	02.	2.	02.	04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.248	orang	564.800	-	-	4.562	141.200	2.509	54.940	55,00	38,91	2.509	54.940	13,75	9,73				
02.	02.	2.	02.	05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32.604	orang	402.000	-	-	8.151	100.500	4.157	22.800	51,00	22,69	4.157	22.800	12,75	5,67				
02.	02.	2.	02.	06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91.820	orang	235.400	-	-	22.955	58.850	13.506	29.500	58,84	50,13	13.506	29.500	14,71	12,53				
02.	02.	2.	02.	07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.676	orang	439.680	-	-	2.669	109.920	1.919	36.960	71,90	33,62	1.919	36.960	17,97	8,41				
02.	02.	2.	02.	09.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.084	orang	40.320	-	-	271	10.080	184	3.360	67,90	33,33	184	3.360	16,97	8,33				
02.	02.	2.	02.	10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	248	orang	97.200	-	-	62	24.300	188	7.500	303,23	30,86	188	7.500	75,81	7,72				
02.	02.	2.	02.	11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.768	orang	228.000	-	-	442	57.000	260	25.200	58,82	44,21	260	25.200	14,71	11,05				
02.	02.	2.	02.	12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3.352	orang	13.200	-	-	838	3.300	363	450	43,32	13,64	363	450	10,83	3,41				
02.	02.	2.	02.	15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	Dokumen	1.400.400	-	-	1	350.100	2	60.192.500	200,00	17.192,94	2	60.192.500	50,00	42,98				
02.	02.	2.	02.	17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4	Dokumen	22.800	-	-	1	5.700	2	5.700	200,00	100,00	2	5.700	50,00	25,00				
02.	02.	2.	02.	20.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	Dokumen	26.200	-	-	1	6.550	2	3.275	200,00	50,00	2	3.275	50,00	12,50				
02.	02.	2.	02.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	Dokumen	7.794.488	24	2.634.695	12	272.599	6	62.561.200,000	50,00	22.949,90	30	65.195.895	41,67	836,44				
02.	02.	2.	02.	36.	Investigasi Awal Kejadian Tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4	Laporan	3.000	-	-	1	750	1	-	100,00	-	1	-	25,00	-				
02.	02.	2.	02.	37.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4	Dokumen	43.400	-	-	1	10.850	1	7.550	100,00	69,59	1	7.550	25,00	17,40				
02.	02.	2.	02.	40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1	420	orang	21.600	-	-	105	5.400	31	3.600	29,52	66,67	31	3.600	7,38	16,67				
Rata-rata capaian kinerja (%)																99,23	23,98			26,52	60,88601957				
Predikat kinerja																R	R			R	R				

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2					3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	88	Persen	26.500	-	-	1	21.005	1	21.005,00	100,00	100,00	1	21.005	1	79,26
02	05	2.	01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dn Sehat (PHBS) di akbupaten Pesawaran	100	Persen	26.500	-	-	1	21.005	1	21.005,00	100,00	100,00	1	21.005	1	79,26
02.	05.	2.	01.	01.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	Dokumen	26.500	-	-	1	21.005			-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-			-	-
Predikat kinerja																R	R			R	R
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														3.781.255,080			1.010.468,624				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																37,31	15,92			11,84	19,19
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																R	R			R	R

## 6. Puskesmas Roworejo

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegia tan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
1.						Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar															
1.	02.					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan															
1.	02.	01.				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Ko ta	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	15.231.548,98	24	2.733.128,19	12	1.925.099	3	332.374,15	25,00	17,27	27	3.065.502	27	20,13
1.	02.	01.	2.	10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD pada UPTD Puskesmas Roworejo	100	15.231.549	24	2.733.128	12	1.925.098,5	3	332.374,15	25,00	17,27	27	3.065.502	27	20,13
1.	02.	01.	2.	10.	01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah yang menyediakan pelayanan dan	72	15.231.548,981	24	2.733.128,193	12	1.925.098,535	3	332.374	25,00	17,27	27	3.065.502	37,50	20,13

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
							penunjang pelayanan														
Rata-rata capaian kinerja (%)																25,00 R	17,27 R			18,75 R	10,06 R
1.	02.	02.				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin	100	45.360	-	-	1	1.026.303	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	02.	02.	2.	01.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal	100	45.360	-	-	1	11.340	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	02.	02.	2.	01.	20.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4	45.360	-	-	1	11.340	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-			0	-
Predikat kinerja																R	R			R	R
1.	02.	02.	2.	02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	100	8.688.658	24	8.636.587	39.479	1.014.963	18.111	528.734,42	45,88	52,09	18.135	9.165.321	18.135	105,49
1.	02.	02.	2.	02.	01.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2912	293.000	-	-	728	73.250	347	57.050	47,66	77,88	347	57.050	11,92	19,47
1.	02.	02.	2.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2780	95.800	-	-	695	23.950	302	47.000	43,45	196,24	302	47.000	10,86	49,06
1.	02.	02.	2.	02.	04.	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Balita yang Mendapatkan	16924	715.700	-	-	4.231	178.925	2.037	121.925	48,14	68,14	2.037	121.925	12,04	17,04

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar														
1.	02.	02.	2.	02.	05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30240	273.000	-	-	7.560	68.250	3.480	42.075	46,03	61,65	3.480	42.075	11,51	15,41
1.	02.	02.	2.	02.	06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	86500	117.540	-	-	21.625	29.385	8.646	27.060	39,98	92,09	8.646	27.060	10,00	23,02
1.	02.	02.	2.	02.	07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9900	128.000	-	-	2.475	32.000	2.252	20.500	90,99	64,06	2.252	20.500	22,75	16,02
1.	02.	02.	2.	02.	09.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1020	39.900	-	-	255	9.975	254	9.975	99,61	100,00	254	9.975	24,90	25,00
1.	02.	02.	2.	02.	10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	228	22.800	-	-	57	5.700	143	4.350	250,88	76,32	143	4.350	62,72	19,08
1.	02.	02.	2.	02.	11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1668	17.640	-	-	417	4.410	243	4.410	58,27	100,00	243	4.410	14,57	25,00
1.	02.	02.	2.	02.	12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3168	18.000	-	-	792	4.500	252	3.825	31,82	85,00	252	3.825	7,95	21,25
1.	02.	02.	2.	02.	15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	1.232.744	-	-	1	308.186	2	44.590	200,00	14,47	2	44.590	50,00	3,62



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
1.	02.	02.	2.	02.	17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4	54.000	-	-	1	13.500	4	20.810	400,00	154,15	4	20.810	100,00	38,54
1.	02.	02.	2.	02.	20.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	28.800	-	-	1	7.200	2	5.100	200,00	70,83	2	5.100	50,00	17,71
1.	02.	02.	2.	02.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	5.540.614	24	8.636.587	1	227.952	2	97.654,423	200,00	42,84	26	8.734.241	36,11	157,64
1.	02.	02.	2.	02.	40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1	2560	111.120	-	-	640	27.780	145	22.410	22,66	80,67	145	22.410	5,66	20,17
1.	02.	02.	2.	02.	41.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		-	-	-	-			-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
1.	02.	02.	2.	02.	42.	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria		-	-	-	-			-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Rata-rata capaian kinerja (%)																118,63	85,62			28,73	31,20
Predikat kinerja																R	R			R	R
1.	02.	05.				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	88	9.200	0	-	1	2.300	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	02.	05.	2.	01.		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di kabupaten Pesawaran	100	9.200	0	-	1	2.300	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	02.	05.	2.	01.	01.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	9.200	0	-	1	2.300			-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-			-	-
Predikat kinerja																R	R			R	R

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegia tan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.				
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								2.953.701,535				332.374,150									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												35,91		25,72				11,87		10,32	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												R		R				R		R	

## 7. Puskesmas Bernung

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar															
02.					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan															
02.	01.				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	10.136.741,10	24	2.683.653,90	12	1.801.141	6	666.278	50,00	36,99	30	3.349.932	30	33,05
02.	01.	2.	10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD pada UPT Dinas Kesehatan	100	10.136.741	24	2.683.654	12	1.801.141,0	6	666.278	50,00	36,99	30	3.349.932	30	33,05
02.	01.	2.	10.	01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di puskesmas Bernung	72	10.136.741	24	2.683.653,900	12	1.801.141,04	6	666.278	50,00	36,99	30	3.349.932	41,67	33,05
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,00	36,99			20,83	16,52
															R	R			R	R
02.	02.				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin	100	46.440	-	-	1	1.041.822	-	-	-	-	-	-	-	
02.	02.	2.	01.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal	100	46.440	-	-	1	11.610	-	-	-	-	-	-	-	
02.	02.	2.	01.	20.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah kalibrasi alat kesehatan dipuskesmas	4	46.440	-	-	1	11.610	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			0	-
Predikat kinerja															R	R			R	R
02.	02.	2.	02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	100	4.120.848	24	1.567.666	53.580	1.030.212	17.554	268.831,49	32,76	26,09	17.578	1.836.498	17.578	44,57
02.	02.	2.	02.	01.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.072	274.200	-	-	1.018	68.550	238	17.775	23,38	25,93	238	17.775	5,84	6,48
02.	02.	2.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.888	147.380	-	-	972	36.845	229	28.470	23,56	77,27	229	28.470	5,89	19,32
02.	02.	2.	02.	03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.700	19.200	-	-	925	4.800	229	1.200	24,76	25,00	229	1.200	6,19	6,25
02.	02.	2.	02.	04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23.660	566.520	-	-	5.915	141.630	1.433	38.765	24,23	27,37	1.433	38.765	6,06	6,84
02.	02.	2.	02.	05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42.276	303.000	-	-	10.569	75.750	3.983	16.800	37,69	22,18	3.983	16.800	9,42	5,54

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
02.02.2.02.06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	118.264	110.720	-	-	29.566	27.680	9.930	15.080	33,59	54,48	9.930	15.080	8,40	13,62
02.02.2.02.07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13.840	144.600	-	-	3.460	36.150	1.212	8.370	35,03	23,15	1.212	8.370	8,76	5,79
02.02.2.02.10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	316	69.600	-	-	79	17.400	44	5.550	13,92	31,90	44	5.550	13,92	7,97
02.02.2.02.11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2.292	32.200	-	-	573	8.050	256	9.070	44,68	112,67	256	9.070	11,17	28,17
02.02.2.02.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	1.275.920	-	-	3	318.980	-	74.280	-	23,29	-	74.280	-	5,82
02.02.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	54.200	-	-	6	13.550	-	6.095	-	44,98	-	6.095	-	11,25
02.02.2.02.20.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	15.000	-	-	1	3.750	-	2.400	-	64,00	-	2.400	-	16,00
02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	934.408	24	1.567.666	6	233.602	-	33.511.492	-	14,35	24	1.601.178	33,33	171,36
02.02.2.02.36.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.404	20.620	-	-	351	5.155	-	2.615	-	50,73	-	2.615	-	12,68
02.02.2.02.40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1	544	153.280	-	-	136	38.320	-	8.850	-	23,09	-	8.850	-	5,77
Rata-rata capaian kinerja (%)											17,39	41,36			6,41	18,99220
Predikat kinerja											R	R			R	R
02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	88	56.200	-	-	1	14.050	1	-	100,00	-	1	-	1	-
02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dn Sehat (PHBS) di akbupaten Pesawaran	100	56.200	-	-	1	14.050	1	-	100,00	-	1	-	1	-
02.05.2.01.01.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	56.200	-	-	1	14.050			-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-			-	-
Predikat kinerja											R	R			R	R
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									2.857.013,035	666.278,491						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											16,85	19,59			6,81	8,88
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											SR	SR			SR	SR

8. Puskesmas Hanura

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar															
02.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan															
02. 01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	16.350.135.304,00	24	4.225.157,50	12	2.861.334	6	477.850.610,56	50,00	16.700,27	30	482.075.768	30	2,95
02. 01. 2. 10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD pada UPT Dinas Kesehatan	100	16.350.135.304	24	4.225.157	12	2.861.334,2	6	477.850.610,56	50,00	16.700,27	30	482.075.768	30	2,95
02. 01. 2. 10. 01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di puskesmas Hanura	72	16.350.135.304	24	4.225.157	12	2.861.334	6	477.850.611	50,00	16.700,27	30	482.075.768	41,67	2,95
									Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	16.700,27			20,83	1,47
											R	R			R	R
02. 02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin	100	48.000	-	-	1	1.083.598	-	-	-	-	-	-	-	-
02. 02. 2. 01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal	100	48.000	-	-	1	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-
02. 02. 2. 01. 20.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah kalibrasi alat kesehatan dipuskesmas	4	48.000	-	-	1	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-
									Predikat kinerja		R	R			R	R
02. 02. 2. 02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	174.284	4.286.392	24	1.460.236	43.544	1.071.598	18.053	325.598,29	41,46	30,38	18.077	1.785.834	10	41,66
02. 02. 2. 02. 01.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.032	92.400	-	-	728	23.100	277	12.300	38,05	53,25	277	12.300	9,14	13,31
02. 02. 2. 02. 02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.776	32.800	-	-	694	8.200	271	6.550	39,05	79,88	271	6.550	9,76	19,97
02. 02. 2. 02. 04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.280	353.200	-	-	3.570	88.300	1.956	45.100	54,79	51,08	1.956	45.100	13,70	12,77
02. 02. 2. 02. 05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia sekolah dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30.244	222.600	-	-	7.561	55.650	5.144	17.550	68,03	31,54	5.144	17.550	17,01	7,88
02. 02. 2. 02. 06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	102.088	233.500	-	-	25.522	58.375	7.658	23.625	30,01	40,47	7.658	23.625	7,50	10,12
02. 02. 2. 02. 07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.476	144.000	-	-	3.619	36.000	1.839	18.000	50,82	50,00	1.839	18.000	12,70	12,50
02. 02. 2. 02. 09.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus	Jumlah Penderita diabetes mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.168	88.800	-	-	292	22.200	202	-	69,18	-	202	-	17,29	-
02. 02. 2. 02. 10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	244	6.000	-	-	61	1.500	114	1.500	186,89	100,00	114	1.500	46,72	25,00
02. 02. 2. 02. 12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3.316	36.000	-	-	829	9.000	274	3.000	33,05	33,33	274	3.000	8,26	8,33
02. 02. 2. 02. 15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48	1.369.720	-	-	12	342.430	3	62.645	25,00	18,29	3	62.645	6,25	4,57
02. 02. 2. 02. 17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	57.900	-	-	12	14.475	6	6.540	50,00	45,18	6	6.540	50,00	11,30
02. 02. 2. 02. 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	72	889.672	24	1.460.236	12	222.418	6	54.563,288	50,00	24,53	30	1.514.799	41,67	170,26
02. 02. 2. 02. 37.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	jumlah laporan kewaspadaan dini dan respon wabah	48	150.000	-	-	12	37.500	6	13.500	50,00	36,00	6	13.500	12,50	9,00

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
02. 02. 2. 02. 40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	jumlah pasien tuberkulosis yan endapat pelayanan sesuai standar	2.432	179.600	-	-	608	44.900	291	17.750	47,86	39,53	291	17.750	11,97	9,88
02. 02. 2. 02. 42.	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	jumlah dokumen pengelolaan peayanan kesehatan malaria di puskesmas	48	430.200	-	-	12	107.550	6	42.975	50,00	39,96	6	42.975	12,50	9,99
											56,18	42,87			18,46	21,66
											R	R			R	R
02. 05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	88	30.600	-	-	12	7.650	6	-	50,00	-	6	-	7	-
02. 05. 2. 01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dn Sehat (PHBS) di akbupaten Pesawaran	100	30.600	-	-	12	7.650	6	-	50,00	-	6	-	6	-
02. 05. 2. 01. 01.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	48	30.600	-	-	12	7.650			-	-	-	-	-	-
											-	-			-	-
											R	R			R	R
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								3.952.582,226		477.850.610,561						
											26,55	41,86			9,82	5,78
											SR	SR			SR	SR

## 9. Puskesmas Kalirejo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar															
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan															
02. 01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	100	12.975.236.452	24	3.434.237,68	12	2.238.551	6	471.689.952,67	50,00	21.071,21	30	475.124.190	30	3,66
02. 01. 2. 10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Terselenggaranya BLUD di Puskesmas Kalirejo	100	12.975.236.452	24	3.434.238	12	2.238.551,5	6	471.689.952,67	50,00	21.071,21	30	475.124.190	30	3,66
02. 01. 2. 10. 01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	72	12.975.236.452	24	3.434.238	12	2.238.551	6	924.075	50,00	41,28	30	4.358.312	41,67	0,03
Rata-rata capaian kinerja (%)											50,00	41,28			20,83	0,02
											R	R			R	R
02. 02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin	100	46.280	-	-	1	1.039.715	-	-	-	-	-	-	-	-
02. 02. 2. 01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal	100	46.280	-	-	1	11.570	-	-	-	-	-	-	-	-
02. 02. 2. 01. 20.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4	46.280	-	-	1	11.570	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-			0	-

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)		Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2				3		4		5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
														Predikat kinerja		R	R			R	R
02.	02.	2.	02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Yang mendapatkan jaminan Pelayanan Kesehatan	100	8.916.834	24	1.531.614	40.861	1.028.145	17.976	311.551,04	43,99	30,30	18.000	1.843.165	18.000	20,67	
02.	02.	2.	02.	01.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.004	245.400	-	-	751	61.350	293	13.200	39,06	21,52	293	13.200	9,76	5,38	
02.	02.	2.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.868	111.800	-	-	717	27.950	265	27.650	36,96	98,93	265	27.650	9,24	24,73	
02.	02.	2.	02.	03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.732	9.000	-	-	683	2.250	262	750	38,31	33,33	262	750	9,58	8,33	
02.	02.	2.	02.	04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.456	500.240	-	-	4.364	125.060	1.988	36.600	45,55	29,27	1.988	36.600	11,39	7,32	
02.	02.	2.	02.	05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	umlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standa	31.192	283.200	-	-	7.798	70.800	7.244	18.000	92,90	25,42	7.244	18.000	23,22	6,36	
02.	02.	2.	02.	06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	89.212	220.080	-	-	22.303	55.020	5.613	16.650	25,17	30,26	5.613	16.650	6,29	7,57	
02.	02.	2.	02.	07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.212	149.600	-	-	2.553	37.400	1.708	13.750	66,89	36,76	1.708	13.750	16,72	9,19	
02.	02.	2.	02.	09.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.056	16.100	-	-	264	4.025	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.	02.	2.	02.	10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	240	58.200	-	-	60	14.550	38	6.375	63,33	43,81	38	6.375	15,83	10,95	
02.	02.	2.	02.	11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.736	25.080	-	-	434	6.270	211	3.135	48,62	50,00	211	3.135	12,15	12,50	
02.	02.	2.	02.	12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3.244	21.600	-	-	811	5.400	333	1.800	41,10	33,33	333	1.800	10,28	8,33	
02.	02.	2.	02.	15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	16	1.296.540	-	-	4	324.135	1	88.750	25,00	27,38	1	88.750	6,25	6,85	
02.	02.	2.	02.	17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	90.000	-	-	3	22.500	2	8.670	66,67	38,53	2	8.670	16,67	9,63	
02.	02.	2.	02.	20.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	15.000	-	-	1	3.750	2	1200	200,00	32,00	2	1.200	50,00	8,00	
02.	02.	2.	02.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48	5.739.754	24	1.531.614	12	233.875	4	62.061,044	33,33	26,54	28	1.593.675	58,33	27,77	
02.	02.	2.	02.	40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1	412	135.240	-	-	103	33.810	12	12.960	11,65	38,33	12	12.960	2,91	9,58	
														Rata-rata capaian kinerja (%)		49,09	33,26			15,21	9,55805538
														Predikat kinerja		R	R			R	R



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)		Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	88	49.280	-	-	1	12.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor (PHBS) di Kabupaten Pesawaran Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dn Sehat (PHBS) di Kabupaten Pesawaran	100	49.280	-	-	1	12.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.05.2.01.01.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	49.280	-	-	1	12.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-	-	-	-	-
Predikat kinerja															R	R	-	-	R	R
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										3.290.586,496		471.689.952,672								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)															24,77	18,64			9,01	2,39
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)															R	R			R	R

10. Puskesmas Way Lima

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)		Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
02.01.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																			
02.01.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																			
02.01.2.10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	10.007.177,88	24	2.840.198,55	12	1.799.797	6	740.949,85	50,00	41,17	30	3.581.148	30	35,79				
02.01.2.10.01.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD pada UPT Dinas Kesehatan	100	10.007.178	24	2.840.199	12	1.799.797,0	6	740.949,85	50,00	41,17	30	3.581.148	30	35,79				
02.01.2.10.01.01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di puskesmas Kota Dalam	72	10.007.177,880	24	2.840.198,551	12	1799797,02	6	740.950	50,00	41,17	30	3.581.148	41,67	35,79				
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,00	41,17			20,83	17,89
Predikat kinerja															R	R			R	R
02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin	100	46.000	-	-	1	1.042.355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal	100	46.000	-	-	1	11.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.2.01.20.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah kalibrasi alat kesehatan dipuskesmas	4	46.000	-	-	1	11.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			0	-
Predikat kinerja															R	R			R	R
02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	100	5.633.874	24	1.510.454	33.642	1.030.855	53.426	309.164,00	158,81	29,99	53.450	1.819.618	53.450	32,30				

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
02.02.2.02.01	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.332	190.200	-	-	583	47.550	411	12.000	70,50	25,24	411	12.000	17,62	6,31
02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.128	168.660	-	-	532	42.165	346	-	65,04	-	346	-	16,26	-
02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.112	28.800	-	-	528	7.200	346	2.400	65,53	33,33	346	2.400	16,38	8,33
02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	69.980	546.280	-	-	17.495	136.570	14.474	44.400	82,73	32,51	14.474	44.400	20,68	8,13
02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21.820	324.000	-	-	5.455	81.000	6.465	28.200	118,52	34,81	6.465	28.200	29,63	8,70
02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20.988	209.000	-	-	5.247	52.250	38.216	20.050	728,34	38,37	38.216	20.050	182,09	9,59
02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.916	141.120	-	-	2.479	35.280	3.419	14.040	137,92	39,80	3.419	14.040	34,48	9,95
02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.316	8.400	-	-	329	2.100	425	-	32,29	-	425	-	32,29	-
02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.268	84.840	-	-	317	21.210	337	2.820	106,31	13,30	337	2.820	26,58	3,32
02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.340	9.600	-	-	335	2.400	465	-	138,81	-	465	-	34,70	-
02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20	1.275.500	-	-	5	318.875	4	112.950	80,00	35,42	4	112.950	20,00	8,86
02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24	36.340	-	-	6	9.085	2	2.550	33,33	28,07	2	2.550	8,33	7,02
02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	9.000	-	-	1	2.250	2	1.050	200,00	46,67	2	1.050	50,00	11,67
02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	2.451.794	24	1.510.454	12	235.335	6	58.354.000	50,00	24,80	30	1.568.808	41,67	63,99
02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4	9.600	-	-	1	2.400	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1	1.268	140.740	-	-	317	35.185	337	10.350	106,31	29,42	337	10.350	26,58	7,35
Rata-rata capaian kinerja (%)											125,98	22,45			32,78	9,0129
Predikat kinerja											R	R			R	R

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)																														
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.																													
2					3					4					5					6					7					12 = 8+9+10+11					13 = 12/7*100					14 = 6 + 12					15 = 14/5*100				
02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	88	15.000	-	-	1	3.750	1	3.750,00	100,00	100,00	1	3.750	1	25,00																													
02	05	2.	01			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dn Sehat (PHBS) di Kabupaten Pesawaran	100	15.000	-	-	1	3.750	1	3.750,00	100,00	100,00	1	3.750	1	25,00																												
02.	05.	2.	01.	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	15.000	-	-	1	3.750			-	-	-	-	-	-																													
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-					-	-																											
Predikat kinerja															R	R					R	R																											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													2.845.902,020		744.699,845																																		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)															43,99	15,91					13,40	6,73																											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)															SR	SR					SR	SR																											

## 11. Puskesmas Trimulyo

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar															
02.					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan															
02.	01.				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	8.136.612,63	24	2.090.127,96	12	1.432.718	6	511.495,31	50,00	35,70	30	2.601.623	30	31,97
02.	01.	2.	10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD pada UPT Dinas Kesehatan	100	8.136.613	24	2.090.128	12	1.432.718,1	6	511.495,31	50,00	35,70	30	2.601.623	30	31,97
02.	01.	2.	10.	01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas Trimulyo	72	8.136.613	24	2.090.128	12	1.432.718	6	511.495	50,00	35,70	30	2.601.623	41,67	31,97
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,00	35,70			41,67	31,97
															R	R			R	R
02.	02.				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin	100	54.680	-	-	1	1.175.142	0	13.670,000	25,00	1,16	0	13.670	0	25,00
02.	02.	2.	01.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal	100	54.680	-	-	1	13.670	1	13.670,00	100,00	100,00	1	13.670	1	25,00
02.	02.	2.	01.	20.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah kalibrasi alat kesehatan dipuskesmas	4	54.680	-	-	1	13.670	1	13.670	-	-	1	13.670	25,00	25,00
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			25	25,00
Predikat kinerja															R	R			R	R
02.	02.	2.	02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	100	4.645.888	24	1.871.025	34.292	1.161.472	24.755	329.571,00	72,19	28,38	24.779	2.200.596	24.779	47,37

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
02.	02.	2.	02.	01.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.380	364.380	-	-	595	91.095	248	30.750	41,68	33,76	248	30.750	10,42	8,44
02.	02.	2.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.272	58.800	-	-	568	14.700	201	14.400	35,39	97,96	201	14.400	8,85	24,49
02.	02.	2.	02.	03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.164	14.400	-	-	541	3.600	200	1.200	36,97	33,33	200	1.200	9,24	8,33
02.	02.	2.	02.	04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.668	580.800	-	-	2.917	145.200	1.675	41.850	57,42	28,82	1.675	41.850	14,36	7,21
02.	02.	2.	02.	05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24.716	165.600	-	-	6.179	41.400	5.086	8.400	82,31	20,29	5.086	8.400	20,58	5,07
02.	02.	2.	02.	06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.812	122.400	-	-	18.703	30.600	15.365	14.250	82,15	46,57	15.365	14.250	20,54	11,64
02.	02.	2.	02.	07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12.896	364.800	-	-	3.224	91.200	1.252	32.400	38,83	35,53	1.252	32.400	9,71	8,88
02.	02.	2.	02.	09.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	880	15.800	-	-	220	3.950	178	3.950	80,91	100,00	178	3.950	20,23	25,00
02.	02.	2.	02.	10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	200	55.200	-	-	50	13.800	93	8.100	46,67	58,70	93	8.100	46,67	14,67
02.	02.	2.	02.	11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.988	161.560	-	-	497	40.390	280	17.120	56,34	42,39	280	17.120	14,08	10,60
02.	02.	2.	02.	12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2.712	6.000	-	-	678	1.500	155	450	22,86	30,00	155	450	5,72	7,50
02.	02.	2.	02.	15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36	1.635.320	-	-	9	408.830	2	84.570	22,22	20,69	2	84.570	5,56	5,17
02.	02.	2.	02.	17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8	6.000	-	-	2	1.500	2	1.500	100,00	100,00	2	1.500	25,00	25,00
02.	02.	2.	02.	20.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	16.200	-	-	1	4.050	1	1.500	100,00	37,04	1	1.500	25,00	9,26
02.	02.	2.	02.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	1.034.528	24	1.871.025	12	258.632	6	66.356	50,00	25,66	30	1.937.381	41,67	187,27
02.	02.	2.	02.	40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	384	44.100	-	-	96	11.025	11	2.775	11,46	25,17	11	2.775	2,86	6,29
Rata-rata capaian kinerja (%)															54,08	45,99			17,53	22,80
Predikat kinerja															R	R			R	R
02.	05.				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	88	271.800	-	-	4	67.950	2	29.550,00	50,00	43,49	2	29.550	2	10,87
02.	05.	2.	01.		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran	Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dn Sehat (PHBS) di kabupaten Pesawaran	100	271.800	-	-	4	67.950	2	29.550,00	50,00	43,49	2	29.550	2	10,87

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2						3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
02.	05.	2.	01.	01.		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	16	271.800	-	-	4	67.950	2		50,00	-	2	-	12,50	-
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,00	-			12,50	-
Predikat kinerja														R	R			R	R		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													2.675.810,065		554.715,312						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																38,52	20,42			24,17	19,94
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																SR	SR			SR	SR

## 12. Puskesmas Padang Cermin

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
1.						Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar															
1.	02.					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan															
1.	02.	01.				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	13.129.370,00	24	3.382.720,00	12	2.127.984	6	731.174,00	50,00	34,36	30	4.113.894	30	31,33
1.	02.	01.	2.	10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD pada UPT Dinas Kesehatan	100	13.129.370,00	24	3.382.720	12	2.127.983,7	6	731.174,00	50,00	34,36	30	4.113.894	30	31,33
1.	02.	01.	2.	10.	01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di puskesmas Padang Cermin	72	13.129.370	24	3.382.720	12	2.127.984	6	731.174	50,00	34,36	30	4.113.894	41,67	31,33
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,00	34,36			20,83	15,67
																R	SR			SR	SR
1.	02.	02.				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin	100	55.440	-	-	1	1.260.302	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	02.	02.	2.	01.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal	100	55.440	-	-	1	13.860	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	02.	02.	2.	01.	20.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	umlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4	55.440	-	-	1	13.860	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-			-	-
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR
1.	02.	02.	2.	02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	100	6.904.147	24	1.904.777	64.162	1.246.442	#####	593.960,00	19,98	47,65	12.842	2.498.737	12.842	36,19

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023**

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
1.	02.	02.	2.	02.	01.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.432	417.720	-	-	608	104.430	247	17.400	40,63	16,66	247	17.400	10,16	4,17
1.	02.	02.	2.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.320	119.280	-	-	580	29.820	209	26.220	36,03	87,93	209	26.220	9,01	21,98
1.	02.	02.	2.	02.	03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.208	14.400	-	-	552	3.600	209	3.600	37,86	100,00	209	3.600	9,47	25,00
1.	02.	02.	2.	02.	04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.904	716.740	-	-	2.976	179.185	937	19.200	31,49	10,72	937	19.200	7,87	2,68
1.	02.	02.	2.	02.	05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25.216	216.000	-	-	6.304	54.000	3.782	17.700	59,99	32,78	3.782	17.700	15,00	8,19
1.	02.	02.	2.	02.	06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74.544	180.000	-	-	18.636	45.000	5.522	14.400	29,63	32,00	5.522	14.400	7,41	8,00
1.	02.	02.	2.	02.	07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13.768	432.000	-	-	3.442	108.000	1.231	24.840	35,76	23,00	1.231	24.840	8,94	5,75
1.	02.	02.	2.	02.	10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	204	56.400	-	-	51	14.100	99	7.200	194,12	51,06	99	7.200	48,53	12,77
1.	02.	02.	2.	02.	11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2.028	73.800	-	-	507	18.450	277	9.150	54,64	49,59	277	9.150	13,66	12,40
1.	02.	02.	2.	02.	15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	1.307.480	-	-	3	326.870	2	87.750	66,67	26,85	2	87.750	16,67	6,71
1.	02.	02.	2.	02.	17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	60.000	-	-	3	15.000	2	2.550	66,67	17,00	2	2.550	16,67	4,25
1.	02.	02.	2.	02.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	3.147.247	24	1.904.777	12	307.217	6	348.410	50,00	113,41	30	2.253.187	41,67	71,59
1.	02.	02.	2.	02.	36.	Investigasi Awal Kejadian Tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	umlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4	14.400	-	-	1	3.600	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	02.	02.	2.	02.	40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1	340	68.800	-	-	85	17.200	15	1.500	17,65	8,72	15	1.500	4,41	2,18
1.	02.	02.	2.	02.	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.428	7.200	-	-	607	1.800	280	5.400	46,13	300,00	280	5.400	11,53	75,00
1.	02.	02.	2.	02.	42.	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	119.180	72.680	-	-	29.795	18.170	-	8.640	-	47,55	-	8.640	-	11,89
Rata-rata capaian kinerja (%)																47,95	57,33			10,04	12,39
Predikat kinerja																SR	R			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													3.388.285,663		731.174,000						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																32,65	30,56			10,29	19,80
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																SR	SR			SR	SR



### 13. Puskesmas Bunut

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)																		
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.															
2					3					4					5					6					7					12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																																
02.					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																																
02.	01.				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	10.848.104,00	24	3.926.500,00	12	1.730.401	6	1.182.991,99	50,00	68,37	30	5.109.492	30	47,10																	
02.	01.	2.	10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD pada UPT Dinas Kesehatan	100	10.848.104	24	3.926.500	12	1.730.400,9	6	1.182.991,99	50,00	68,37	30	5.109.492	30	47,10																	
02.	01.	2.	10.	01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di puskesmas Bunut	72	10.848.104	24	3.926.500	12	1.730.401	6	1.182.992	50,00	68,37	30	5.109.492	41,67	47,10																	
															Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	68,37			20,83	23,55															
															Predikat kinerja		R	R			R	R															
02.	02.				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin	100	53.840	-	-	1	1.209.473	-	-	-	-	-	-	-	-																	
02.	02.	2.	01.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal	100	53.840	-	-	1	13.460	-	-	-	-	-	-	-	-																	
02.	02.	2.	01.	20.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4	53.840	-	-	1	13.460	-	-	-	-	-	-	-	-																	
															Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			0	-															
															Predikat kinerja		R	R			R	R															
02.	02.	2.	02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	100	16.251.774	24	1.814.134	42.943	1.196.013	#####	635.832,00	59,46	53,16	25.558	2.449.966	25.558	15,08																	
02.	02.	2.	02.	01.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.280	257.400	-	-	820	64.350	467	30.600	56,95	47,55	467	30.600	14,24	11,89																	
02.	02.	2.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.128	200.200	-	-	782	50.050	443	49.750	56,65	99,40	443	49.750	14,16	24,85																	
02.	02.	2.	02.	04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16.072	545.400	-	-	4.018	136.350	1.757	72.300	43,73	53,03	1.757	72.300	10,93	13,26																	
02.	02.	2.	02.	05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Kesehatan pada usia pendidikan dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34.044	271.200	-	-	8.511	67.800	5.470	31.200	64,27	46,02	5.470	31.200	16,07	11,50																	
02.	02.	2.	02.	06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	89.944	133.560	-	-	22.486	33.390	#####	21.390	56,52	64,06	12.710	21.390	14,13	16,02																	
02.	02.	2.	02.	07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16.576	345.600	-	-	4.144	86.400	2.950	51.400	71,19	59,49	2.950	51.400	17,80	14,87																	
02.	02.	2.	02.	09.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.480	69.320	-	-	370	17.330	740	17.330	200,00	100,00	740	17.330	50,00	25,00																	
02.	02.	2.	02.	10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	276	34.800	-	-	69	8.700	108	-	156,52	-	108	-	39,13	-																	
02.	02.	2.	02.	11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2.740	24.360	-	-	685	6.090	361	12.180	52,70	200,00	361	12.180	13,18	50,00																	
02.	02.	2.	02.	12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3.736	6.000	-	-	934	1.500	474	900	50,75	60,00	474	900	12,69	15,00																	
02.	02.	2.	02.	15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	1.614.000	-	-	1	403.500	2	118.085	200,00	29,27	2	118.085	50,00	7,32																	
02.	02.	2.	02.	17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4	5.880.000	-	-	1	14.700	1	92.845	100,00	631,60	1	92.845	25,00	1,58																	
02.	02.	2.	02.	20.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	9.000	-	-	1	2.250	1	2.670	100,00	118,67	1	2.670	25,00	29,67																	
02.	02.	2.	02.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	6.711.954	24	1.814.134	12	266.358	6	112.742.000	50,00	42,33	30	1.926.876	41,67	28,71																	
02.	02.	2.	02.	40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1	436	148.980	-	-	109	37.245	44	22.440	40,37	60,25	44	22.440	10,09	15,06																	
															Rata-rata capaian kinerja (%)		86,64	107,44			20,83	15,57173															
															Predikat kinerja		R	R			R	R															
02.	05.				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	88	59.200	-	-	1	14.800	-	-	-	-	-	-	-	-																	
02.	05.	2.	01.		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dn Sehat (PHBS) di kabupaten Pesawaran	100	59.200	-	-	1	14.800	-	-	-	-	-	-	-	-																	

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
02. 05. 2. 01. 01.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	59.200	-		1	14.800			-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)											-		-		-	
Predikat kinerja											R		R		R	
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program											2.954.673.947		1.182.991.986			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											34,16		43,95		10,42	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											SR		SR		SR	

## 14. Puskesmas Pedada

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
02. 01. 2. 10. 01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	7.370.679,10	24	1.854.972,58	12	1.296.920	3	220.800,00	25,00	17,02	27	2.075.773	27	28,16
02. 01. 2. 10. 01.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD pada UPT Dinas Kesehatan	100	7.370.679	24	1.854.973	12	1.296.919,5	3	220.800,00	25,00	17,02	27	2.075.773	27	28,16
02. 01. 2. 10. 01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di puskesmas Punduh Pedada	72	7.370.679,100	24	1.854.973	12	1.296.920	3	220.800	25,00	17,02	27	2.075.773	37,50	28,16
Rata-rata capaian kinerja (%)											25,00		17,02		18,75	
Predikat kinerja											R		R		R	
02. 02. 2. 01. 01.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin	100	52.160	-	-	1	1.031.409	-	-	-	-	-	-	-	-
02. 02. 2. 01. 01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal	100	52.160	-	-	1	13.040	-	-	-	-	-	-	-	-
02. 02. 2. 01. 20.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah kalibrasi alat kesehatan di puskesmas	4	52.160	-	-	1	13.040	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)											-		-		0	
Predikat kinerja											R		R		R	
02. 02. 2. 02. 01.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	100	5.866.050	24	1.792.242	32.446	1.018.369	7.837	280.545,00	24,15	27,55	7.861	2.072.787	7.861	35,34
02. 02. 2. 02. 01.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.280	220.000	-	-	320	55.000	159	19.800	49,69	36,00	159	19.800	12,42	9,00
02. 02. 2. 02. 02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.224	3.000	-	-	306	750	152	-	49,67	-	152	-	12,42	-
02. 02. 2. 02. 03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.164	3.600	-	-	291	900	149	450	51,20	50,00	149	450	12,80	12,50
02. 02. 2. 02. 04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.440	514.000	-	-	1.860	128.500	807	42.900	43,39	33,39	807	42.900	10,85	8,35
02. 02. 2. 02. 05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar Sesuai Standar	Jumlah Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar Sesuai Standar	13.292	144.000	-	-	3.323	36.000	2.575	7.200	77,49	20,00	2.575	7.200	19,37	5,00
02. 02. 2. 02. 06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36.216	169.800	-	-	9.054	42.450	2.928	14.700	32,34	34,63	2.928	14.700	8,08	8,66
02. 02. 2. 02. 07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.352	527.520	-	-	1.088	131.880	907	45.110	83,36	34,21	907	45.110	20,84	8,55
02. 02. 2. 02. 10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100	31.200	-	-	25	7.800	45	1.950	180,00	25,00	45	1.950	45,00	6,25
02. 02. 2. 02. 11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	708	75.000	-	-	177	18.750	54	8.400	30,51	44,80	54	8.400	7,63	11,20

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)		Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
02.02.2.02.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	48	1.262.920	-	-	12	315.730	6	59.950	50,00	18,99	6	59.950	12,50	4,75				
02.02.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	48	77.520	-	-	12	19.380	6	6.750	50,00	34,83	6	6.750	12,50	8,71				
02.02.2.02.20.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	48	134.240	-	-	12	33.560	6	13.030	50,00	38,83	6	13.030	12,50	9,71				
02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	2.583.250	24	1.792.242	12	197.669	6	48.605.000	50,00	24,59	30	1.840.847	41,67	71,26				
02.02.2.02.40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1	168	19.200	-	-	42	4.800	8	2.250	19,05	46,88	8	2.250	4,76	11,72				
02.02.2.02.42.	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan malaria	63.648	100.800	-	-	15.912	25.200	29	9.450	0,18	37,50	29	9.450	0,05	9,38				
Rata-rata capaian kinerja (%)															54,46	31,98			13,73	10,8835524
Predikat kinerja															R	R			R	R
02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	88	616.200	-	-	2	154.050	1	74.960,00	50,00	48,66	1	74.960	1	12,16				
02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dn Sehat (PHBS) di kabupaten Pesawaran	100	616.200	-	-	2	154.050	1	74.960,00	50,00	48,66	1	74.960	1	12,16				
02.05.2.01.01.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	8	616.200	-	-	2	154.050			-	-	-	-	-	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			-	-
Predikat kinerja															R	R			R	R
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.482.378.525	295.760.000									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)															19,86	12,25			8,12	6,24
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)															SR	SR			SR	SR

**15. Puskesmas Tegineneng**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)		Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																			
02.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																			
02.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	7.160.598,472	24	2.553.174,35	12	1.790.150	6	657.668,61	50,00	36,74	30	3.210.843	30	44,84				
02.01.2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD pada UPT Dinas Kesehatan	100	7.160.598,472	24	2.553.174	12	1.790.149,6	6	657.668,61	50,00	36,74	30	3.210.843	30	44,84				
02.01.2.10.01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di puskesmas Tegineneng	72	7.160.598,472	24	2.553.174,346	12	1.790.150	6	657.669	50,00	36,74	30	3.210.843	41,67	44,84				
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,00	36,74			20,83	22,42
Predikat kinerja															R	R			R	R
02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin	100	55.240	-	-	1	1.194.713	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2					3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
02	02	2.	01	.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal	100	55.240	-	-	1	13.140	-	-	-	-	-	-	-	-
02.	02.	2.	01.	20	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah kalibrasi alat kesehatan dipuskesmas	4	55.240	-	-	1	13.140	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			0	-
Predikat kinerja															R	R			R	R
02	02	2.	02	.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	100	5.025.372	24	1.861.155	32.180	1.181.573	15.739	344.944,52	48,91	29,19	15.763	2.206.100	15.763	43,90
02.	02.	2.	02.	01	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.388	482.680	-	-	597	120.670	238	53.140	39,87	44,04	238	53.140	9,97	11,01
02.	02.	2.	02.	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.280	87.540	-	-	570	34.700	237	16.600	41,58	47,84	237	16.600	10,39	18,96
02.	02.	2.	02.	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.172	13.200	-	-	543	2.400	237	-	43,65	-	237	-	10,91	-
02.	02.	2.	02.	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13.880	639.640	-	-	3.470	119.775	1.952	32.310	56,25	26,98	1.952	32.310	14,06	5,05
02.	02.	2.	02.	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24.800	351.900	-	-	6.200	79.425	3.898	26.325	62,87	33,14	3.898	26.325	15,72	7,48
02.	02.	2.	02.	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70.588	143.920	-	-	17.647	46.780	5.310	14.070	30,09	30,08	5.310	14.070	7,52	9,78
02.	02.	2.	02.	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.120	224.400	-	-	2.030	20.400	3.009	6.800	148,23	33,33	3.009	6.800	37,06	3,03
02.	02.	2.	02.	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	188	58.800	-	-	47	27.900	86	30.300	182,98	108,60	86	30.300	45,74	51,53
02.	02.	2.	02.	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.348	21.520	-	-	337	42.990	343	16.770	101,78	39,01	343	16.770	25,45	77,93
02.	02.	2.	02.	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	16	1.282.520	-	-	1	320.630	-	48.085	-	15,00	-	48.085	-	3,75
02.	02.	2.	02.	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	73.200	-	-	1	11.100	1	8.160	100,00	73,51	1	8.160	8,33	11,15
02.	02.	2.	02.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16	1.276.732	24	1.861.155	12	319.183	4	68.344,524	33,33	21,41	28	1.929.500	175,00	151,13
02.	02.	2.	02.	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4	13.200	-	-	1	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-
02.	02.	2.	02.	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan	320	178.060	-	-	80	28.420	106	22.240	132,50	78,25	106	22.240	33,13	12,49

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
		pelayanan kesehatan sesuai standar 1														
02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Target penemuan Kasus HIV,	48	178.060	-	-	644	5.400	318	1.800	49,38	33,33	318	1.800	662,50	1,01
Rata-rata capaian kinerja (%)											68,17	38,97			70,39	24,29
Predikat kinerja											R	R			R	R
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									2.984.862,618	657.668,607						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											39,39	25,24			30,41	15,57
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											SR	SR			SR	SR

## 16. Puskesmas Maja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar															
02.02.01.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan															
02.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	13.669.490,26	24	1.319.583,19	12	900.964,97	3	302.760,50	25,00	33,60	27	1.622.344	27	11,87
02.01.2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD pada UPT Dinas Kesehatan	100	13.669.490	24	1.319.583	12	900.964,97	3	302.760,50	25,00	33,60	27	1.622.344	27	11,87
02.01.2.10.01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di puskesmas Maja	72	13.669.490,260	24	1.319.583,185	12	900.964,965	3	302.761	25,00	33,60	27	1.622.344	37,50	11,87
Rata-rata capaian kinerja (%)											25,00	33,60			18,75	5,93
Predikat kinerja											R	R			R	R
02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin	100	44.000	-	-	1	928.266	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal	100	44.000	-	-	1	11.000	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.2.01.20.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan puskesmas maja	4	44.000	-	-	1	11.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-			-	-
Predikat kinerja											R	R			R	R
02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	100	12.474.096	24	1.304.749	35.310	917.266	9.798	245.387,00	27,75	26,75	9.822	1.550.136	9.822	12,43
02.02.2.02.01.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.268	305.400	-	-	317	76.350	245	22.575	77,29	29,57	245	22.575	19,32	7,39
02.02.2.02.02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.212	100.560	-	-	303	25.140	233	15.140	76,90	60,22	233	15.140	19,22	15,06
02.02.2.02.03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.152	4.200	-	-	288	1.050	233	150	80,90	14,29	233	150	20,23	3,57
02.02.2.02.04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.372	434.400	-	-	1.843	108.600	864	35.400	46,88	32,60	864	35.400	11,72	8,15
02.02.2.02.05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13.172	171.600	-	-	3.293	42.900	1.625	11.250	49,35	26,22	1.625	11.250	12,34	6,56
02.02.2.02.06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36.544	241.800	-	-	9.136	60.450	2.112	22.200	23,12	36,72	2.112	22.200	5,78	9,18

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2						3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
02.	02.	2.	02.	07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.312	258.480	-	-	1.078	64.620	531	22.090	49,26	34,18	531	22.090	12,31	8,55	
02.	02.	2.	02.	08.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12.048	37.000	-	-	3.012	9.250	2.144	4.350	71,18	47,03	2.144	4.350	17,80	11,76	
02.	02.	2.	02.	09.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	428	38.220	-	-	107	9.555	203	3.705	189,72	38,78	203	3.705	47,43	9,69	
02.	02.	2.	02.	10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100	12.000	-	-	25	3.000	79	1.500	316,00	50,00	79	1.500	79,00	12,50	
02.	02.	2.	02.	11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	712	51.600	-	-	178	12.900	21	4.200	11,80	32,56	21	4.200	2,95	8,14	
02.	02.	2.	02.	15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	1.052.240	-	-	1	263.060	-	35.225	-	13,39	-	35.225	-	3,35	
02.	02.	2.	02.	17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4	44.400	-	-	1	11.100	1	7.950	100,00	71,62	1	7.950	25,00	17,91	
02.	02.	2.	02.	20.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	34.640	-	-	1	8.660	-	4.855	-	56,06	-	4.855	-	14,02	
02.	02.	2.	02.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	9.616.756	24	1.304.749	12	202.931	3	46.847.000	25,00	23,09	27	1.351.596	37,50	14,05	
02.	02.	2.	02.	37.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4	18.000	-	-	1	4.500	-	2.100	-	46,67	-	2.100	-	11,67	
02.	02.	2.	02.	40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1	168	14.400	-	-	42	3.600	4	750	9,52	20,83	4	750	2,38	5,21	
02.	02.	2.	02.	42.	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	62.688	38.400	-	-	15.672	9.600	1.500	5.100	9,57	53,13	1.500	5.100	2,39	13,28	
Rata-rata capaian kinerja (%)														66,85	40,41			18,55	10,6		
Predikat kinerja														R	R			R	R		
02.	05.				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	88	321.100	-	-	1	80.275	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.	05.	2.	01.		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dn Sehat (PHBS) di kabupaten Pesawaran	100	321.100	-	-	1	80.275	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.	05.	2.	01.	01.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	321.100	-	-	1	80.275			-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)														-	-			-	-		
Predikat kinerja														R	R			R	R		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												1.909.505,965	302.760.500								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)														22,96	18,50			9,33	4,13		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)														SR	SR			SR	SR		

**17. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode Renstra SKPD tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
2	1	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2075	41.466.502.550	193	15.151.221.005	452	8.293.300.510	21,00	3.471.367.831	28,98	4,65	214	18.622.588.836	10,31	44,91



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode Renstra SKPD tahun 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
		<b>DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>															
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>															
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya rencana strategis SKPD	200	108.905.000	2	17.470.000	1	21.781.000	-	9.700.000	0,00	44,53	2	27.170.000	1,00	24,95
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen Dinas Pekerjaan Umum	42	320.516.000	12	37.450.000	1	64.103.200	0	28.600.000	0,00	44,62	12	66.050.000	28,57	20,61
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Neraca Dinas Pekerjaan Umum	50	111.670.000	6	12.500.000	1	22.334.000	0	9.000.000	0,00	40,30	6	21.500.000	12,00	19,25
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>															
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Menunjang Kelancaran kinerja pegawai	61	25.210.414.290	14	9.304.822.681	12	5.042.082.858	6	2.246.646.386	50,00	44,56	20	11.551.469.067	32,79	45,82
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Menunjang Kelancaran kinerja pegawai	280	118.075.000	2	25.000.000	40	23.615.000	10	12.000.000	25,00	50,82	12	37.000.000	4,29	31,34
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>															
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Menunjang Kelancaran kinerja pegawai	60	369.850.000	12	53.793.850	12	73.970.000	6	41.500.000	50,00	56,10	18	95.293.850	30,00	25,77
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>															
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menunjang Kelancaran kinerja pegawai	60	1.146.181.500	12	502.485.400	60	229.236.300	25	125.954.800	41,67	54,95	37	628.440.200	61,67	54,83
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Menunjang Kelancaran kinerja pegawai	60	138.830.000	7	129.484.000	7	27.766.000	4	18.600.000	57,14	66,99	11	148.084.000	18,33	106,67
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Menunjang Kelancaran kinerja pegawai	650	125.000.000	12	83.985.000	12	25.000.000	0	-	0,00	0,00	12	83.985.000	1,85	67,19
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum	42	100.000.000	12	65.200.000	12	20.000.000	-	-	0,00	0,00	12	65.200.000	28,57	65,20
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelancaran komunikasi dan tugas pegawai	120	764.940.000	40	320.081.732	43	152.988.000	18	87.939.035	41,86	57,48	58	408.020.767	48,33	53,34
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>															
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	60	714.000.000	12	171.321.000	12	142.800.000	-	-	0,00	0,00	12	171.321.000	20,00	23,99
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	102	188.700.000	12	156.611.000	12	37.740.000	-	-	0,00	0,00	12	156.611.000	11,76	82,99
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>															

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode Renstra SKPD tahun 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
		<b>Pemerintahan Daerah</b>															
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	72	765.000.000	12	185.948.342	2	153.000.000	1	52.997.610	50,00	34,64	13	238.945.952	18,06	31,23
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Menunjang Kelancaran kinerja pegawai	72	9.864.270.500	7	3.264.498.000	206	1.972.854.100	75	805.430.000	36,41	40,83	82	4.069.928.000	113,89	41,26
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	72	1.153.900.260	7	714.070.000	7	230.780.052	2	33.000.000	28,57	14,30	9	747.070.000	12,50	64,74
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	72	266.250.000	12	106.500.000	12	53.250.000	-	-	0,00	0,00	12	106.500.000	16,67	40,00
Rata-rata capaian kinerja (%)												27,19	39,29		1330184917	32,88	57,08
Predikat kinerja												SR	SR			SR	R
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		30425	85.124.148.740	274	46.294.602.485	1808	13.032.809.602	837	3.348.577.854	25,12	46,29	1111	49.643.180.339	3,65	58,32
		<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>															
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya dokumen Dinas Pekerjaan Umum	100	1.367.459.390	7	2.357.362.625	2	273.491.878	1	36.937.000	50,00	13,51	8	2.394.299.625	8,00	175,09
		Rehabilitasi Tanggul Sungai	Terlaksananya Rehabilitasi Tanggul Sungai	300	29.960.100.730	5	35.524.115.863	650	5.992.020.146	300	378.766.854	46,15	6,32	305	35.902.882.717	101,67	119,84
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pengerukan Sungai	14000	29.960.100.730	260	2.677.150.000	650	2.000.000.000	300	1.541.075.000	46,15	25,72	560	4.218.225.000	4,00	14,08
		<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>															
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pengerukan Sungai	12000	12.658.285.000		4.585.584.997	338	2.531.657.000	170	60.014.000	50,30	2,37	170	4.645.598.997	1,42	36,70
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	25	10.000.000.000		1.133.799.000	143	2.000.000.000	50	1.326.785.000	34,97	66,34	50	2.460.584.000	200,00	24,61

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode Renstra SKPD tahun 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
		Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	4000	1.178.202.890	2	16.590.000	25	235.640.578	16	5.000.000	64,00	2,12	18	21.590.000	0,45	1,83
Rata-rata capaian kinerja (%)												29,16	11,64	111	4.964.318.033,90	31,55	37,21
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
3	1 01	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		800	24.729.250.000	1	97.964.500	8	7.778.300.000	6	1.668.512.500	10,73	75,00	8	9.593.965.350	1,00	38,80
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota															
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Terlaksananya Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4000	14.162.250.000	1	7.827.488.350	4	2.832.450.000	2	9.300.000	50,00	0,33	3	7.836.788.350	0,08	55,34
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	800	24.729.250.000	1	97.964.500	8	4.945.850.000	4	1.659.212.500	50,00	33,55	5	1.757.177.000	0,63	7,11
0												50,00	16,94	4	4.796.982.675	0,35	31,22
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
5	1 01	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		8000	25.975.000.000	0	5.343.257.500	2	195.000.000	1	10.000.000	3,08	50,00	1	5.353.257.500	0,03	36,71
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota															
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen Dinas Pekerjaan Umum	4000	975.000.000		145.167.500	2	195.000.000	1	10.000.000	50,00	5,13	1	155.167.500	0,03	15,91
		Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terlaksananya Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	4000	25.000.000.000		5.198.090.000			-	-			0	5.198.090.000	-	20,79
Rata-rata capaian kinerja (%)												25,00	2,56	1	2.676.628.750,00	0,01	18,35
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
	03 01	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		200	97.192.998.775	12	10.919.937.150	35	19.438.599.755	21	3.225.100.400	15,01	60,00	33	14.145.037.550	16,50	14,55
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung															

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode Renstra SKPD tahun 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Ser tifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	pembangunan gedung, pematangan lahan, dan rehabilitasi gedung	100	1.245.000.000	12	386.452.350	1	249.000.000	1	151.000.000	100,00	60,64	13	537.452.350	13,00	43,17
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen Dinas Pekerjaan Umum	100	95.947.998.775		10.533.484.800	34	19.189.599.755	20	3.074.100.400	58,82	16,02	20	13.607.585.200	20,00	14,18
Rata-rata capaian kinerja (%)												13,24	6,39	3	1.178.753.129	2,75	4,78
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
01	01	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>		60	60.000.000.000	17	12.609.942.560	6	1.416.706.600	3	590.347.000	39,38	50,00	32	15.844.528.010	26,41	137,51
		<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>															
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen Dinas Pekerjaan Umum	20	50.000.000.000	5	9.965.704.110	-	-					5	9.965.704.110	25,00	19,93
		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	20	5.000.000.000	12	2.644.238.450	5	1.000.000.000	2	463.590.000	40,00	46,36	14	3.107.828.450	70,00	62,16
		Monitoring Penataan /Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Monitoring Penataan /Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	20	5.000.000.000	12	371.024.883	1	416.706.600	1	126.757.000	100,00	30,42	13	2.770.995.450	65,00	55,42
Rata-rata capaian kinerja (%)												46,67	25,59	32	15.844.528.010	53,33	45,84
Predikat kinerja												SR	SR			R	SR
6	1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>		1276	223.350.000.000	15	114.135.458.135	47	106.038.203.181	19	32.933.737.650	40,43	31,06	34	147.069.195.785	2,66	65,85
		<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>															
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya dokumen Dinas Pekerjaan Umum	64	83.000.000.000		1.947.573.750	12	879.289.762	6	14.101.100	50,00	1,60	6	1.961.674.850	9,38	2,36
		Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jalan di Kabupaten Pesawaran	61	9.500.000.000	11	90.943.110.985	3	46.787.477.957	2	15.931.220.600	66,67	34,05	13	106.874.331.585	21,31	1.124,99
		Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan Jalan di Kabupaten Pesawaran	47	2.000.000.000		17.019.615.500	9	21.996.560.000	1	2.190.066.550	11,11	9,96	1	19.209.682.050	2,13	960,48

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode Renstra SKPD tahun 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
		Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan di Kabupaten Pesawaran	61	16.000.000.000		35.610.000			-	-			0	35.610.000	-	0,22
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan di Kabupaten Pesawaran	50	2.500.000.000		1.525.375.000	5	2.000.000.000	2	1.088.527.900	40,00	54,43	2	2.613.902.900	4,00	104,56
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Pesawaran	95	6.000.000.000		35.540.000			-	-			0	35.540.000	-	0,59
		Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan Jembatan di Kabupaten Pesawaran	175	5.000.000.000		1.777.841.400	6	32.224.689.000	2	13.686.182.100	33,33	42,47	2	15.464.023.500	1,14	309,28
		Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan di Kabupaten Pesawaran	86	1.800.000.000		35.654.000			-	-			0	35.654.000	-	1,98
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Pesawaran	90	3.000.000.000		35.590.000			-	-			0	35.590.000	-	1,19
		Pemeliharaan Berkala Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan di Kabupaten Pesawaran	66	900.000.000		35.590.000			-	-			0	35.590.000	-	3,95
		Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Terlaksananya Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat	406	3.650.000.000	4	643.570.000	0		-	-			4	643.570.000	0,99	17,63
		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Terlaksananya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan di Kabupaten Pesawaran	75	90.000.000.000		100.387.500	12	2.150.186.462	6	23.639.400	50,00	1,10	6	124.026.900	8,00	0,14
Rata-rata capaian kinerja (%)												17,94	10,26	2	7.003.295.037,38	2,24	120,35
Predikat kinerja												SR	SR			SR	ST
01	11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>		<b>937</b>	<b>2.700.000.000</b>	<b>36</b>	<b>618.136.424</b>	<b>81</b>	<b>423.271.500</b>	<b>37</b>	<b>125.144.760</b>	<b>22,07</b>	<b>45,68</b>	<b>73</b>	<b>743.281.184</b>	<b>7,79</b>	<b>27,53</b>
		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>															
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	2700	800.000.000	12	287.636.924	50	295.047.000	20	33.587.000	40,00	11,38	32	321.223.924	1,19	40,15
		<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>															
		Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha	12	500.000.000	12	144.995.500	30	85.133.300	16	54.825.560	53,33	64,40	28	199.821.060	233,33	39,96
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	100	1.400.000.000	12	185.504.000	1	43.091.200	1	36.732.200	100,00	85,24	13	222.236.200	13,00	15,87
												64,44	53,68	24	123.880.197	41,25	32,00

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode Renstra SKPD tahun 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021-2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	%	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
				Predikat kinerja		SR		SR		SR		SR		SR		SR	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		86	29.146.000.000	11	2.342.786.677	2	530.000.000	2	187.600.000	30,80	100,00	12	2.530.386.677	13,95	8,68
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota															
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen	35	800.000.000	11	1.395.213.850	1	327.459.500	1	84.400.000	25,00	51,15	3	1.479.613.850	3,00	3,95
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersusunnya Dokumen	35	500.000.000		798.102.827		-		-	25,00	51,15	3	798.102.827	3,00	3,95
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota															
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	8	18.564.000.000	0	119.220.000	1	202.540.500	1	103.200.000	25,00	51,15	3	222.420.000	3,00	3,95
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota															
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	8	9.282.000.000	0	30.250.000		-		-	25,00	51,15	3	30.250.000	3,00	3,95
Rata-rata capaian kinerja (%)												50,00	51,15	6	252.670.000	1,50	1,97
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
				43859	589.683.900.065	559	207.513.306.436	2441	157.146.191.148	947	45.560.387.995	23,95	51,41	169	263.545.421.231	9,14	48,09
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												0,00					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												35,96	24,17	634	329.642.029.957	18,43	38,76
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												SR	SR			SR	SR

## 18. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun ( 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
1	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20.043.291.747		4.073.512.131		4.226.834.120		1.806.611.695						



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun ( 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	PERMUKIMAN																
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		305.380.000		50.343.000		47.100.000		31.014.400						
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dok	62.880.000	2	10.437.500	1	8.100.000	0	8.100.000	-	100,00	2	18.537.500	33,33
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	dok	60.000.000	1	9.978.000	1	10.000.000	0	9.990.000	-	99,90	1	19.968.000	16,67
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	dok	60.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	0	-	-	-	1	10.000.000	16,67
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	dok	62.500.000	4	9.940.000	4	11.000.000	0	7.507.000	-	68,25	4	17.447.000	16,67
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	dok	60.000.000	1	9.987.500	1	8.000.000	0	5.417.400	-	67,72	1	15.404.900	16,67
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		19.567.579.456		2.712.447.195		2.826.434.820		1.251.672.612						
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	173	Org/bln	19.506.528.456	29	2.702.447.195	28	2.816.434.820	1	1.248.147.612	50,00	44,32	43	3.950.594.807	24,86
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	laporan	61.051.000	1	10.000.000	1	10.000.000	0	3.525.000	-	35,25	1	13.525.000	16,67
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		170.332.290												
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	168	paket	170.332.290		-	0	-	0	-	-	-	0	-	-
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.428.841.211		193.216.500		92.900.000		48.964.000						
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	360	paket	385.794.200	50	51.988.500	20	28.000.000	0	15.048.000	-	53,74	50	67.036.500	13,89

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun ( 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	115 2	paket 338.318.551	19 2	46.108.000	12	26.000.000	6	13.200.000	50,00	50,77	198	59.308.000	17,19	17,53
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	302 4	dok 426.324.460	67 2	54.600.000		-	0	-	-	-	672	54.600.000	22,22	12,81
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	72	laporan 179.627.500	12	25.000.000	12	15.000.000	6	7.540.000	50,00	50,27	18	32.540.000	25	18,12
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	laporan 98.776.500	12	15.520.000	12	23.900.000	6	13.176.000	50,00	55,13	18	28.696.000	25	29,05
		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>84.726.578</b>		<b>21.998.250</b>		<b>-</b>		<b>-</b>						
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24	Unit 84.726.578	4	21.998.250	0	-	0	-	-	-	4	21.998.250	16,67	25,96
		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>6.482.497.206</b>		<b>797.692.669</b>		<b>963.308.000</b>		<b>400.320.683</b>						
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	laporan 256.414.200	1	22.562.469	1	26.400.000	0	13.940.383	-	52,80	1	36.502.852	16,67	14,24
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	laporan 6.226.083.006	1	775.130.200	1	936.908.000	0	386.380.300	-	41,24	1	1.161.510.500	16,67	18,66
		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>2.100.085.246</b>		<b>297.814.517</b>		<b>297.091.300</b>		<b>74.640.000</b>						
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	unit 1.920.376.596	4	286.314.517	4	297.091.300	0	74.640.000	-	25,12	4	360.954.517	16,67	18,80
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	unit 89.708.650	16	11.500.000		-	0	-	-	-	16	11.500.000	13,33	12,82
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya per tahun	600	tahun 90.000.000		-		-	0	-	-	-			-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)												11,76	43,79	54,47	5.880.123.826	17,10	18,99
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun ( 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
2		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase lingkungan pemukiman kumuh				143.949.500		2.590.920.000		77.710.050,00						
		Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni diluar kawasan permukiman kumuh	420	3.957.107.000		143.949.500		2.590.920.000		77.710.050						
		Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	166 0 unit/rumah	3.957.107.000	20	143.949.500	11 0	2.590.920.000	0	77.710.050	-	3,00	20	221.659.550	1,20	5,60
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	3,00	20	221.659.550	1,20	5,60
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
3		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau				217.476.800		50.000.000		-						
		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kab/Kota yang terverifikasi		1.262.000.000		198.891.800		-		-						
		Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4 dok	600.000.000		198.891.800	1			-	-	-	0	198.891.800	-	33,15
		Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	3 dok	662.000.000				0		-			0	-	-	-
		Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	150 Orang	248.250.000				-		-						
		Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme	150 orang	248.250.000				0		-			0	-	-	-

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun ( 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
			Akses Perumahan KPR-FLPP														
		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase operasional, rehabilitasi, dan pemeliharaan perumahan bagi korban bencana	200	2.750.000.000		-		50.000.000	0	-			0	-	-	-
		Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	100 unit/rumah	2.500.000.000			3	50.000.000	0	-			0	-	-	-
		Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	1 unit/rumah	250.000.000					0	-			0	-	-	-
		Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Dokumen perencanaan dan pengembangan perumahan	5 dok	2.415.115.000				-		-						
		Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	4 dok	1.951.015.000	1				0	-			1	-	25,00	-
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4 laporan	464.100.000					0	-			0	-	-	-
		Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah tersusunnya dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	5 laporan	610.510.000		18.585.000				-						
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	5 laporan	610.510.000		18.585.000			0	-	-	-	0	18.585.000	-	3,04
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-	0,5	217.476.800	3	4,52
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
4		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					2.545.581.744		1.709.043.000		64.764.400						
		Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	5 dok/laporan	1.379.865.000		49.548.400		-		-						

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun ( 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
		Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	5	dok	915.765.000	1	49.548.400		0	-	-	-	1	49.548.400	20,00	5,41
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	4	laporan	464.100.000				0	-			0	-	-	-
		Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	5	dok	1.799.610.000	70	1.191.723.000	400.000.000		34.203.800						
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1	dok	150.000.000				0	-			0	-	-	-
		Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi / Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1	dok	250.000.000				0	-			0	-	-	-
		Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2	dok	350.000.000				0	-			0	-	-	-
		Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	4	laporan	278.460.000		1	400.000.000	0	34.203.800			0	34.203.800	-	12,28
		Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	4	laporan	348.075.000				0	-			0	-	-	-
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	4	laporan	348.075.000				0	-			0	-	-	-
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran	30	keluarga	75.000.000				0	-			0	-	-	-

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun ( 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangakt Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
			Hukum Tentang Kepemilikan Rumah															
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman		32.628.302.510		2.496.033.344		1.309.043.000		64.764.400							
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	3	dok	464.100.000		2	225.000.000	0	5.465.100			0	5.465.100	-	1,18	
		Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	330	unit/rumah	30.344.932.510	60	2.448.314.944	36	1.084.043.000	0	59.299.300	-	5,47	60	2.507.614.244	18,18	8,26
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	3	laporan	248.250.000				0	-			0	-	-	-	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	3	ha	1.221.020.000	1	47.718.400		0	-	-	-	0,5	47.718.400	20,00	3,91	
		Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	2	dok	250.000.000				0	-			0	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	1,82	4,39	2.644.549.944	4,16	2,22	
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR	
5		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	581	persen		17.221.398.337		21.725.975.300		9.820.340.750							
		Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyelenggaraan PSU perumahan		267.084.186.011		17.221.398.337		21.725.975.300		9.820.340.750							
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	562	lokasi	259.802.947.237	11	17.221.398.337	101	21.475.975.300	80	9.809.357.450	79,21	45,68	91	27.030.755.787	16,19	10,40
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4	laporan	232.050.000				0	-			0	-	-	-	
		Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	44	dok	6.701.113.774		1	250.000.000	0	10.983.300			0	10.983.300	-	0,16	
		Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Perumahan	4	dok	348.075.000				0	-			0	-	-	-	



# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Urusan	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun ( 2021 s.d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Pearangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Pearangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
Rata-rata capaian kinerja (%)												79,21	45,68	38,97	27.041.739.087	4,05	2,64
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM												18,19	18,86			5,93	6,79
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												SR	SR			SR	SR

## 19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Pearangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	1 05	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		100	%	96.712.583.280	237	27.984.102.005	99	14.536.365.590	47	7.176.693.472	47,47	49,37	42833	35.160.795.477	36,36	36,36
	1 05	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD	100	%	96.320.000	6	20.030.000	0	-	0	-	0,00	0,00	21171	20.030.000	20,80	20,80
	1 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA SKPD	4	Dok	11.550.000	-	-	0	-	0	-			10596	-	0,00	0,00
	1 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya RKA Perubahan SKPD	4	Dok	11.550.000	-	-	0	-	0	-			5310	-	0,00	0,00
	1 05	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersusunnya DPA SKPD	6	Laporan	20.850.000	2	13.730.000	0	-	0	-			2762	13.730.000	65,85	65,85
	1 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya DPA Perubahan SKPD	4	Dok	13.550.000	0	-	0	-	0	-			1381	-	0,00	0,00
	1 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Laporan	38.820.000	4	6.300.000	0	-	0	-			691	6.300.000	16,23	16,23
	1 05	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	100	%	17.842.498.280	32	5.638.837.777	26	3.478.124.290	13	1.738.330.972	50,00	49,98	431	7.377.168.749	41,35	41,35
	1 05	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84	bulan	16.430.155.868	14	5.237.917.777	14	3.341.884.290	7	1.666.590.972	50,00	49,87	21	6.904.508.749	25,00	42,02
	1 05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	72	bulan	1.412.342.412	18	400.920.000	12	136.240.000	6	71.740.000	50,00	52,66	24	472.660.000	33,33	33,47
	1 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	1.914.908.000	1	6.800.000	0	-	0	-	0,00	0,00	214	6.800.000	0,36	0,36
	1 05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2480	seperangkat	1.873.500.000	-	-	0	-	0	-			0	-	0,00	0,00
	1 05	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Tersusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	60	bulan	41.408.000	1	6.800.000	0	-	0	-			1	6.800.000	1,67	16,42

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			
				K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		K	Rp.	13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	1	05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum SKPD	100	%	657.714.300	156	141.979.800	36	45.480.000	15	29.099.250	41,67	63,98	171	171.079.050	26,01	26,01	
	1	05	Penyediaan Peralatan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72	bulan	15.770.000	12	3.920.000	0	-	0	-	0,00	0,00	12	3.920.000	16,67	24,86	
	1	05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	bulan	152.141.000	12	37.000.000	12	14.435.000	6	7.647.650	50,00	52,98	18	44.647.650	25,00	29,35	
	1	05	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	72	bulan	25.633.000	12	6.583.000	0	-	0	-	0,00	0,00	12	6.583.000	16,67	25,68	
	1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Waktu PenyediaanBarang Cetak dan Penggandaan	72	bulan	36.397.300	12	10.871.800	12	10.285.000	6	3.841.600	50,00	37,35	18	14.713.400	25,00	40,42	
	1	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan (Koran) dan Peraturan Perundang-undangan	576	eksemplar	46.848.000	96	15.360.000	0	-	0	-	0,00	0,00	96	15.360.000	16,67	32,79	
	1	05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	72	bulan	380.925.000	12	68.245.000	12	20.760.000	3	17.610.000	25,00	84,83	15	85.855.000	20,83	22,54	
	1	05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	%	250.500.000	-	-	0	-	0	-			1434	-	0,00	0,00	
	1	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perangkat Komputer yang tersedia	10	unit	90.500.000	-	-	0	-	0	-			734	-	0,00	0,00	
	1	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan gedung Kantor yang tersedia	1	unit	160.000.000	-	-	0	-	0	-			376	-	0,00	0,00	
	1	05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	%	72.443.226.400	26	21.447.795.000	25	10.574.000.000	13	5.249.120.000	52,00	49,64	190	26.696.915.000	36,85	36,85	
	1	05	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	720	buah	72.000.000	-	-	0	-	0	-			95	-	0,00	0,00	
	1	05	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Pembayaran Listrik, Air, dan Komunikasi Kantor	72	bulan	108.000.000	12	36.000.000	12	18.000.000	6	9.000.000	50,00	50,00	18	45.000.000	25,00	41,67	
	1	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penerimaan Gaji dan Uang Makan (Anggota SATPOL - PP)	3720	pegawai	72.263.226.400	14	21.411.795.000	13	10.556.000.000	7	5.240.120.000	53,85	49,64	21	26.651.915.000	0,56	36,88	
	1	05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	3.507.416.300	16	728.659.428	12	438.761.300	6	160.143.250	50,00	36,50	34	888.802.678	25,34	25,34	
	1	05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	94	unit	3.355.566.300	12	720.659.428	12	438.761.300	6	160.143.250	50,00	36,50	18	880.802.678	19,15	26,25	
	1	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34	unit	36.350.000	4	8.000.000	0	-	0	-			4	8.000.000	11,76	22,01	
	1	05	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	4	unit	115.500.000	0	-	0	-	0	-			0	-	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja													32,28	33,35			25,12	25,12		
Predikat Kinerja													SR	SR			SR	SR		
2	1	05	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		100	%	1.598.550.000	69	252.419.000	0	-	0	-			12	252.419.000	15,79	15,79	
	1	05	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban		100	%	1.352.650.000	51	203.969.000	0	-	0	-			51	203.969.000	51,00	15,08	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
		Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
	1 05	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Waktu Pelaksanaan Kegiatan	72	bulan	513.850.000	12	112.650.000	0	-	0	-		12	112.650.000	16,67	21,92	
	1 05	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kegiatan Penindakan terhadap Gangguan Trantibum	6	kegiatan	58.400.000	1	9.025.000	0	-	0	-		1	9.025.000	16,67	15,45	
	1 05	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu Koordinasi Trantibum Tingkat Kabupaten/Kota	72	bulan	59.400.000	12	10.880.000	0	-	0	-		12	10.880.000	16,67	18,32	
	1 05	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Wilayah Pembinaan Anggota LINMAS	66	kecamatan	122.500.000	11	12.914.000	0	-	0	-		11	12.914.000	16,67	10,54	
	1 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan Anggota SATPOL-PP	575	peserta	598.500.000	15	58.500.000	0	-	0	-		15	58.500.000	2,61	9,77	
	1 05	Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		100	%	245.900.000	18	48.450.000	0	-	0	-		18	48.450.000	18,00	19,70	
	1 05	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Wilayah Sosialisasi	59	kecamatan	103.350.000	4	18.350.000	0	-	0	-		4	18.350.000	6,78	17,76	
	1 05	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Wilayah Pengawasan atas Kepatuhan Perda/Perkada	66	kecamatan	85.750.000	11	17.500.000	0	-	0	-		11	17.500.000	16,67	20,41	
	1 05	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Waktu Penanganan atas Pelanggaran Perda	58	kecamatan	56.800.000	3	12.600.000	0	-	0	-		3	12.600.000	5,17	22,18	
Rata-Rata Capaian Kinerja												0,00	0,00			34,50	17,39	
Predikat Kinerja												SR	SR			SR	SR	
3	1 05	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		100	%	634.440.000	32	92.385.000	0	-	0	-		20	92.385.000	14,56	14,56	
	1 05	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		100	%	402.800.000	20	50.715.000	0	-	0	-		20	50.715.000	20,00	12,59	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		
				K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
	1	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Alat Pemadam Kebakaran	90	unit	312.800.000	20	50.715.000	0	-	0	-			20	50.715.000	22,22	16,21
	1	05	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Anggota Pemadam Kebakaran yang terlatih	45	orang	90.000.000	0	-	0	-	0	-			0	-	0,00	0,00
	1	05	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		100	%	231.640.000	12	41.670.000	0	-	0	-			12	41.670.000	12,00	17,99
	1	05	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Waktu Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran dalam Rangka Pemungutan PAD	72	bulan	231.640.000	12	41.670.000	0	-	0	-			12	41.670.000	16,67	17,99
Rata-Rata Capaian Kinerja													0,00	0,00			16,00	15,29	
Predikat Kinerja													SR	SR			SR	SR	
							97.347.023.325		28.076.487.050		14.536.365.635		7.176.693.472				35.253.180.522		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	25,21	19,27	
Predikat kinerja																	SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)													32,28	33,35			22,24	22,24	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)													SR	SR			SR	SR	

## 20. Dinas Sosial

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat DaerahD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
1	1	06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Perkantoran	1280	Bln	3.174.171.303	236	511.416.700	53	317.450.000	26	174.622.223	146,15	155,75	262	686.038.923	209,11	381,98
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	100	org	1.792.304.733	20	298.500.000	28	118.450.000	14	71.046.000	50,00	59,98	34	369.546.000	34,00	20,62
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	165	Item	286.739.000	33	54.689.000	0	-	0	-	0,00	-	33	54.689.000	20,00	19,07
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan & Penggandaan	65	Item	84.615.000	13	15.000.000	0	-	0	-	0,00	-	13	15.000.000	20,00	17,73
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Peralatan Komponen Instalasi/ Penerangan	80	Item	81.512.450	16	14.450.000	0	-	0	-	0,00	-	16	14.450.000	20,00	17,73
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	170	Item	56.410.000	27	10.067.700	0	-	0	-	0,00	-	27	10.067.700	15,88	17,85
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran dan buku peraturan perundang - undangan	300	koran	38.358.800	60	41.800.000	0	-	0	-	0,00	-	60	41.800.000	20,00	108,97
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman rapat dan lembur	200	kotak	101.538.000	40	18.000.000	0	-	0	-	0,00	-	40	18.000.000	20,00	17,73

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat DaerahD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		K	Rp.	14 = 6 + 12		K	Rp.

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat DaerahD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		K	Rp.	14 = 6 + 12		K	Rp.	
			Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pesawaran	556	org	3.649.576.581	109	610.341.000			0	-	0,00	-	109	610.341.000	19,60	16,72
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kabupaten Pesawaran	160	Lembaga	232.050.000	0	-	5	110.000.000	0	-	0,00	-	0	-	-	0,00
			Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Jumlah warga karang taruna peserta lomba desa	165	org	564.100.000	33	95.000.000	33	120.000.000	0	-	0,00	-	33	95.000.000	20,00	16,84
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-			15,08	11,96	
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR	
6	1	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	160		631.920.000	32	105.000.000	8	14.950.000	4	5.900.000,00	50,00	39,46	36	110.900.000,00	50,00	34,96
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah penanggulangan masalah - masalah yang menyangkut tanggap cepat darurat dan KLB	40	Kejadian	323.460.000	8	60.000.000	8	14.950.000	4	5.900.000	50,00	39,46	12	65.900.000	30,00	20,37
			Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah Kejadian bencana alam / bencana sosial dan Buffer Stock	120	Paket	308.460.000	24	45.000.000	0	-	0	-	0,00	-	24	45.000.000	20,00	14,59
Rata-rata capaian kinerja (%)													25,00	19,73			25,00	17,48	
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR	
9	1	06	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Program Rehabilitasi Sosial	1.296		2.218.835.000	87	163.700.000	-	-	-	-	-	-	87	163.700.000	24,80	10,28
			Penyediaan Permakanan	Jumlah penerima bantuan bagi penyandang cacat dan eks trauma	1285	org	1.913.580.000	85	157.450.000	0	-	0	-	0,00	-	85	157.450.000	6,61	8,23
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di Kabupaten Pesawaran	11	Puskesmas	305.255.000	2	6.250.000	0	-	0	-	0,00	-	2	6.250.000	18,18	2,05
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-			12,40	5,14	
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR	
11	1	06	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pencapaian Validasi data PMKS versi Kementerian	60	Kali	551.446.500	16	70.650.000	-	-	-	-	-	-	16	70.650.000	40,00	25,76
			Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	20	Laporan	362.216.500	4	45.850.000	0	-	0	-	0,00	-	4	45.850.000	20,00	12,66
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	60	Laporan	189.230.000	12	24.800.000	0	-	0	-	0,00	-	12	24.800.000	20,00	13,11
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-			20,00	12,88	
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										776.881.300		232.122.223							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM .....)													7,70	6,19			19,16	19,74	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM .....)													SR	SR			SR	SR	



21. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6*100		13 = 5 + 11		14 = 13/4*100	
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	432	-	3.897.427.000	84	243.524.000	87	694.111.300	37	162.473.647	198,72	132,11	59	102.050.353	45,83	23,04
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		72		2.028.500.000	24	94.550.000	12	205.040.000	6	100.186.000	50,00	48,86	18	(5.636.000)	25,00	(0,28)
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Gaji PTK dan Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	72	Bulan	2.028.500.000	24	94.550.000	12	205.040.000	6	100.186.000	50,00	48,86	18	(5.636.000)	25,00	(0,28)
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		216		849.870.500	45	36.474.000	39	54.140.000	19	25576930	48,72	47,24	26	10897070		
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyedia Alat Tulis Kantor	72	Bulan	191.722.500	15	7.453.000	12	11.889.400	6	4.600.000	50,00	38,69	9	2.853.000	12,50	1,49
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	72	Bulan	124.660.000	15	4.031.000	12	7.663.600	6	4.060.000	50,00	52,98	9	(29.000)	12,50	(0,02)
2.17.01.2.06.09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi kedinasan	72	Bulan	533.488.000	15	24.990.000	15	34.587.000	7	16.916.930	46,67	48,91	8	8.073.070	11,11	1,51
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		72		119.400.000			24	255.000.000	6	3.710.717	50,00	17,67	6	17.289.283	8,33	14,48
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Langganan Sumber Daya Air dan Listrik	72	Bulan	119.400.000	12	21.000.000	12	21.000.000	6	3.710.717	50,00	17,67	6	17.289.283	8,33	14,48
2.17.01.2.08.4	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayar Honor Tenaga Kontrak	72	Bulan	1.170.000.000	12	195.000.000	12	234.000.000	6	126.000.000	50,00	53,85	6	69.000.000	8,33	5,90
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		72		899.656.500	15	112.500.000	12	179.931.300	6	33.000.000	50,00	18,34	9	79.500.000	12,50	8,84
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Mobil dinas Roda 4 dan Pembayaran Pajak	72	Bulan	899.656.500	15	112.500.000	12	179.931.300	6	33.000.000	50,00	18,34	9	79.500.000	12,50	8,84
Rata-rata capaian kinerja (%)												49,58	37,40			12,37	5,00
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang dilatih	250	org	2.084.951.225	50	416.420.000	50	457.770.000	38	157.997.300	76,00	34,51	12	258.422.700	4,80	12,39
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	250	org	2.084.951.225	50	416.420.000	50	457.770.000	38	157.997.300	76,00	34,51	12	258.422.700	4,80	12,39
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta yang Melaksanakan study Banding Pendamping Dana Hibah bagi Koperasi	250	org	2.084.951.225	50	416.420.000	50	457.770.000	38	157.997.300	76,00	34,51	12	258.422.700	4,80	12,39
Rata-rata capaian kinerja (%)												76,00	34,51			4,80	12,39
Predikat kinerja												T	SR			SR	SR
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Cakupan Sistem Pendukung Usaha Koperasi terhadap Koperasi	150	koperasi	1.025.728.032	70	200.460.000	50	145.000.000	40	57.912.000	80,00	39,94	30	142.548.000	20,00	13,90
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi	150	koperasi	1.025.728.032	70	200.460.000	50	145.000.000	40	57.912.000	80,00	39,94	30	142.548.000	20,00	13,90
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses	Jumlah Koperasi yang Mendapat Pendampingan dan Bantuan, Jumlah Koperasi	150	koperasi	1.025.728.032	70	200.460.000	50	145.000.000	40	57.912.000	80,00	39,94	30	142.548.000	20,00	13,90

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6*100		13 = 5 + 11		14 = 13/4*100	
	Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penetapan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	yang Mendapat Pendampingan untuk Mendapatkan Dana Bantuan dari LPDB															
Rata-rata capaian kinerja (%)												80,00	39,94			20,00	13,90
Predikat kinerja												T	SR			SR	SR
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cakupan Jumlah UMKM yang mendapat sapras	50	Expos	2.289.591.600	13	527.550.000	10	212.520.000	4	207.556.200	40,00	97,66	9	319.993.800	18,00	13,98
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orintasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan Fasilitas Pemasaran dan Pelatihan	50	Expos	2.289.591.600	13	527.550.000	10	212.520.000	4	207.556.200	40,00	97,66	9	319.993.800	18,00	13,98
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Event Promosi hasil pelaku usaha kecil dan menengah pada Pesawaran Fair, Lampung Fair dan Jumlah Pameran Lainnya.	50	Expos	2.289.591.600	13	527.550.000	10	212.520.000	4	207.556.200	40,00	97,66	9	319.993.800	18,00	13,98
Rata-rata capaian kinerja (%)												40,00	97,66			18,00	13,98
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									1.509.401.300		585.939.147			102.050.353			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)												61,40	52,38			13,79	11,32
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)												R	R			SR	SR

## 22. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
2	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah DaerahKabupaten/kota	%	100				3.970.841,09		1.940.699,615							
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100													
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen penyusunan Renja	dokumen	6	127.500,00	1	25.500,00	0	-	-	-	-	-	1	25.500	16,67 20,00	
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	laporan	6	100.000,00	1	20.000,00	0	-	-	-	-	-	1	20.000	16,67 20,00	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100													
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	240	20.699.080,00	80	8.075.562,13	27	3.062.059,79	-	1.491.739,615	-	48,72	80	9.567.302	33,33 46,22	
2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	72	2.907.800,00	24	1.255.320,00	12	156.400,00	6	83.460,000	50,00 53,36	30	1.338.780	41,67 46,04		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
2.14.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	125.000,00	2	25.000,00	0	-	-	-	-	-	2	25.000	16,67	20,00	
2.14.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100														
2.14.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	232	100.000,00	36	19.950,00	0	-	-	-	-	-	36	19.950	15,52	19,95	
2.14.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100														
2.14.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	72	10.000,00	24	4.000,00	0	-	-	-	-	-	24	4.000	33,33	40,00	
2.14.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	72	364.975,00	24	130.790,20	0	-	-	-	-	-	24	130.790	33,33	35,84	
2.14.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	72	32.768,00	24	9.815,70	0	-	-	-	-	-	24	9.816	33,33	29,96	
2.14.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	66	250.000,00	22	115.660,00	0	-	-	-	-	-	22	115.660	33,33	46,26	
2.14.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	72	47.990,00	24	31.293,63	0	-	-	-	-	-	24	31.294	33,33	65,21	
2.14.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	144	150.000,00	24	40.400,00	0	-	-	-	-	-	24	40.400	16,67	26,93	
2.14.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	100	540.410,00	24	183.762,00	0	-	-	-	-	-	24	183.762	24,00	34,00	
2.14.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100														
2.14.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan meubeleur kantor	set	1	10.945,00	1	10.945,00	0	-	-	-	-	-	1	10.945	100,00	100	
2.14.01.2.0 7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	24	25.000,00	17	10.000,00	0	-	-	-	-	-	17	10.000	70,83	40,00	
2.14.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100														
2.14.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	72	60.000,00	24	33.966,22	12	6.000,00	6	2.500,000	50,00	41,67	30	36.466	41,67	60,777035	
2.14.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	48	1.560.000,00	0	-	12	390.000,00	6	203.000,000	50,00	52,05	6	203.000	12,50	13,012821	
2.14.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100														
2.14.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	186	2.514.457,80	24	656.240,98	12	301.381,30	6	105.000,000	50,00	34,84	30	761.241	16,13	30,274558	
2.14.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	18	330.000,00	6	130.000,00	3	55.000,00	3	55.000,000	100,00	100,00	9	185.000	50,00	56,060606	
Rata-rata capaian kinerja (%)													16,67	18,37			33,63	39,50
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	persentase cakupan PUS <20 thn yang didampingi	%	70					-		-							
2.14.02.2.0 1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	%	100														

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Pearangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
2.14.02.2.0 1.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Kegiatan Rakerda dan Reviu Program KKBPK Dan Terlaksananya Rakernas Program KKBPK yang di ikuti	kegiatan	4	170.000,00	4	170.000,00			-	-	-	-	4	170.000	100,00	100,00
2.14.02.2.0 1.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Pembinaan Saka Kencana Pramuka	kegiatan	1	11.000,00	1	11.000,00			-	-	-	-	1	11.000	100,00	100,00
2.14.02.2.0 2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pengendalian penduduk	%	100													
2.14.02.2.0 2.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan	kecamatan	11	29.050,00	11	29.050,00			-	-	-	-	11	29.050	100,00	100,00
		Jumlah Pemutahiran Data Kependudukan Keluarga Berencana	kecamatan	11													
2.14.02.2.0 2.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Penyusunan Pelaporan Program KKBPK Berbasis Teknologi Informasi	kecamatan	11	20.000,00	11	20.000,00			-	-	-	-	11	20.000	100,00	100,00
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-			100,00	100,00
Predikat kinerja												SR	SR			ST	ST
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase cakupan PUS <20 thn yang didampingi	%	80					7.122.907,00		1.553.302,30						
2.14.03.2.0 1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	%	50													
2.14.03.2.0 1.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (DAK NF-BOKB)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	66	11.481,25	0	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.0 1.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) )	dokumen	6	82.750,00	0	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.0 1.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	dokumen	6	233.818,40	0	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.0 1.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	18	567.996,00	0	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.0 1.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	66	1.474.605,00	0	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.0 1.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	6	132.400,00	0	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.0 2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pemberdayaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)	%	51,39													
2.14.03.2.0 2.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	organisasi	66	66.200,00	0	-			-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.0 2.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB (DAK Fisik + DAK NON FISIK)	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	unit	66	24.679.147,90	22	8.181.547,90	11	5.037.355,00	-	835.860.000	-	16,59	22	9.017.408	33,33	36,54
		Jumlah Data dan Informasi Keluarga	dokumen	6													

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	dokumen	6													
2.14.03.2.0.2.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	laporan	66	2.304.116,00	22	570.204,30	11	182.857,00	-	45.716,100	-	25,00	22	615.920	33,33	26,73
		Jumlah pembinaan program KKBPK bagi PPKBD dan SUBPPKBD	kader	6282		1047		1047		1.047		100,00		2.094		33,33	
		Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Laporan	12				2		2		100,00		2		16,67	
2.14.03.2.0.2.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	orang	6282	7.651.292,00	2094	1.718.520,00	1047	1.000.000,00	-	269.285,000	-	26,93	2.094	1.987.805	33,33	25,98
2.14.03.2.0.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten dan Kota	%	51,39													
2.14.03.2.0.3.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	44	29.700,00	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.0.3.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	6515	2.860.958,54	2150	496.184,50	1600	300.000,00	400	56.140,700	25,00	18,71	2.550	552.325	39,14	19,31
		Jumlah sasaran camping program Bangsa Kencana	Kecamatan	66		11		11		-		-		11			
2.14.03.2.0.3.06	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB yang disediakan	kecamatan	44	66.200,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.0.3.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	66	1.583.000,00	22	571.800,00	11	150.000,00	-	73.737,500	-	49,16	22	645.538	33,33	40,78
2.14.03.2.0.3.13	Peningkatan kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang mendapat peningkatan Kesertaan KB Pria	orang	50	66.200,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.03.2.0.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	%	51,39													
2.14.03.2.0.4.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	organisasi	66	2.499.825,00	22	511.698,00	2	257.695,00	-	120.906,000	-	46,92	22	632.604	33,33	25,31
		Jumlah kegiatan sekolah siaga kependudukan	Kecamatan	66		22		11		11		100,00					
		Jumlah kegiatan studi komperatif ke kelompok UPPKS	kegiatan	6		2		1		1		100,00					
2.14.03.2.0.4.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	kampung	132	1.079.995,00	44	308.280,00	22	195.000,00	11	151.657,000	50,00	77,77	55	459.937	41,67	42,59
2.14.03.2.0.4.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	132	99.300,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)												33,93	37,30			14,87	12,07
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok ketahanan keluarga (BKB,BKR, BKL,PIK-R dan pemberdayaan ekonoio keluarga/UPPKA	%	52,31					1.075.940,00		631.249,50						
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter,PIK remaja dan BKR yang mendapat pembinaan genre, kelompok BKL yang melaksanakan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia dan keluarga yang mengakses PPKA	%	51,31													
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ( Bina Keluarga balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera(UPPKS) dan Pemberdayaan ekonomi keluarga)	Jumlah terbentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ( Bina Keluarga balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera(UPPKS) dan Pemberdayaan ekonomi keluarga)	kelompok	44	284.000,00					-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	unit	132	1.999.981,81	44	271.000,00	22	161.000,00	22	161.000.000	100,00	100,00	66	432.000	50,00	21,60
2.14.04.2.01.04	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	laporan	30	5.516.345,00	10	1.637.762,00	5	300.000,00	3	188.050.000	60,00	62,68	13	1.825.812	43,33	33,10
		Jumlah pembinaan pemanfaatan pekarangan keluarga	kegiatan	6		2		1		2		200,00		4		66,67	
		Jumlah pembinaan remaja dalam penyalahgunan narkoba dan napza	kecamatan	66		22		11		22		200,00		44		66,67	
		Jumlah Sasaran Kegiatan pembinaan IMP	kecamatan	66		22		11		-		-		22		33,33	
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	6282	6.093.180,40	0		-		-		-	-	-	-	-	-
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	laporan	66	2.594.041,54	22	900.940,00	11	519.940,00	-	187.199,500	-	36,00	22	1.088.140	33,33	41,95
		Jumlah kegiatan KIE motivasi dalam hari keluarga nasional (HARGANAS)	kegiatan	12				2		4		200,00		4		33,33	
		Jumlah peserta pembinaan kesling PHBS	orang	900				150		300		200,00		300		33,33	
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	66	481.895,00	22	136.000,00	11	95.000,00	11	95.000.000	100,00	100,00	33	231.000	50,00	47,94
		Jumlah peserta pola asuh anak dan remaja yang dibina	orang	3300		825		385		0		-		825		25,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)												65,00	74,67			36,25	18,98
Predikat kinerja												R	S			SR	SR
2.08																	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAANGENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Swasta (Pekerja perempuan di lembaga swasta / Jumlah pekerja perempuan) x 100	%	34,08					390.400,00		154.002,60						



# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
2.14.04.2.01	Pelebagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan kabupaten/kota	Persentase OPD yang melaksanakan perencanaan & penganggaran responsif gender (PPRG)	%	100												
2.14.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	6	307.100,00	2	71.600,00	1	15.400,00	-	-	-	2	71.600	33,33	23,31
		Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PUG	kegiatan	6		2		1								
2.14.04.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	32,35												
2.14.04.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	25	1.048.605,00	5	201.481,00	4	175.000,00	1	18.065,000	25,00	10,32	6	219.546	24,00
		Jumlah Kegiatan peringatan Hari Ibu dan Hari Kartini	kegiatan	12		4		2		1		50,00		5		41,67
2.14.04.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen hasil Sosialisasi Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	dokumen	6	167.445,00	6	166.092,00	0	0	-	0	-	6	166.092	100,00	99,19
2.14.04.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anggota DWP yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan	%	100												
2.14.04.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang	360	900.000,00	120	374.475,00	120	200.000,00	60	135.937,600	50,00	67,97	180	510.413	50,00
Rata-rata capaian kinerja (%)											31,25	26,10			49,80	50,04
Predikat kinerja											SR	SR			SR	R
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100					376.204,00		41.450,00					
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Rasio KDRT (Jumlah KDRT/Jumlah Rumah Tangga)	nilai	0												
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	12	852.289,50	4	184.550,00	7	109.700,00	1	13.950,000	14,29	12,72	5	198.500	41,67
2.08.03.2.02	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di puskesmas mampu tata laksana KIP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	%	100												
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	orang	60	84.650,00	20	20.000,00	12	12.000,00	6	2.500,000	50,00	20,83	26	22.500	43,33
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK NF)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan	72	1.748.615,00	24	190.224,00	12	254.504,00	6	25.000,000	50,00	9,82	30	215.224	41,67
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan rehabilitasi yang diberikan oleh petugas terlatih	%	100												
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	6	96.200,00	2	27.205,30	0	-	-	-	-	-	2	27.205	33,33
		Jumlah pelayanan operasional rumah penampungan sementara/rumah perlindungan	bulan	72		12		0		-	-	-	-	12		16,67

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
Rata-rata capaian kinerja (%)											28,57	14,46			35,33	22,61	
Predikat kinerja											SR	SR			SR	SR	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga pada kelompok usaha perempuan dan keluarga TKI	%	80				138.756,80		32.515,80							
2.08.04.2.0 1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan subkegiatan dalam rangka pemberdayaan ekonomi	%	100													
2.08.04.2.0 1.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	18	607.756,00	5	78.026,80	3	138.756,80	1	32.515,800	33,33	23,43	6	110.543	33,33	18,19
2.08.04.2.0 3	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga TKI	%	100													
2.08.04.2.0 3.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	layanan	6	72.150,00	2	22.500,00	0	-	-	-	-	-	2	22.500	33,33	31,19
		Jumlah peserta pembinaan Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia	orang	270		95		0		-		-		95		35,19	
Rata-rata capaian kinerja (%)											11,11	11,72			33,95	24,69	
Predikat kinerja											SR	SR			SR	SR	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	%	100				-		-							
2.08.05.2.0 1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	%	100													
2.08.05.2.0 1.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak	dokumen	1	5.700,00	1	5.700,00	0	-	-	-	-	-	1	5.700	100,00	100,00
2.08.05.2.0 1.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak	dokumen	1	6.600,00	1	6.600,00	0	-	-	-	-	-	1	6.600	100,00	100,00
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-			100,00	100,00	
Predikat kinerja											SR	SR			ST	ST	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kecamatan yang telah membentuk forum anak dan berperan aktif	%	100				138.221,00		69.100,00							
2.08.06.2.0 1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase satuan pendidikan ramah anak, masjid ramah anak dan puskes ramah anak yang terlatih Konvensi hak anak	%	25													
2.08.06.2.0 1.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	organisasi	24	247.400,00	8	108.200,00	6	20.000,00	6	19.500,000	100,00	97,50	14	127.700	58,33	51,62
2.08.06.2.0 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelompok PATBM yang aktif di desa	%	100													
2.08.06.2.0 2.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	250	553.200,00	50	107.000,00	60	75.000,00	30	49.600,000	50,00	66,13	80	156.600	32,00	28,31
2.08.06.2.0 2.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	6	272.021,00	2	73.163,00	2	43.221,00	-	-	-	-	2	73.163	33,33	26,90

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Pearangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
Rata-rata capaian kinerja (%)												50,00	54,54			41,22	35,61
Predikat kinerja												SR	R			SR	SR
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan tindak kekerasan anak yang ditangani	%	100					74.596,00		-		-				
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Perentase pelaksanaan kegiatan pengutan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	100													
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	18	455.938,00	6	108.752,85	2	74.596,00	-	-	-	-	6	108.753	33,33	23,85
		Jumlah pelayanan dukungan manajemen DAK NF PPPA	bulan	60				12									
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-			33,33	23,85
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							13.287.865,890				4.422.319,815						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 20)												29,57	29,6			47,84	42,73
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 20)												SR	SR			SR	SR

## 23. Dinas Ketahanan Pangan

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021 sampai dengan 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD perangkat daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
	URUSAN PANGAN															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Peresentase Penerapan Kepatuhan pelayanan Publik	2674	17.326.904.430	838	5.653.830.327	353	3.011.004.276	75	637.431.828	27,02	21,81	913	6.291.262.155	26,77	26,24
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Penencanaan Perangkat Daerah	50	65.200.000	10	13.040.000	0	-	-	-	-	-	10	13.040.000	20,00	20,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Berupa Renja dan Renja Perubahan	10	28.570.000	2	5.714.000			-	-	-	-	2	5.714.000	20,00	20,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	5	5.075.000	1	1.015.000			-	-	-	-	1	1.015.000	20,00	20,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	4.915.000	1	983.000			-	-	-	-	1	983.000	20,00	20,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	5	5.405.000	1	1.081.000			-	-	-	-	1	1.081.000	20,00	20,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	6.235.000	1	1.247.000			-	-	-	-	1	1.247.000	20,00	20,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa LPPD dan LKPJ	10	10.000.000	2	2.000.000			-	-	-	-	2	2.000.000	20,00	20,00

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023**

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021 sampai dengan 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD perangkat daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa LAKIP dan Laporan Akhir Tahun	10	5.000.000	2	1.000.000			-	-	-	-	2	1.000.000	20,00	20,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Laporan Keuangan, Hasil Kegiatan dan Pertanggungjawaban OPD	2010	14.288.880.630	658	4.752.222.255	320	2.626.004.276	66	572.218.628	20,63	27,32	724	5.324.440.883	25,71	26,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1848	13.517.970.630	616	4.507.602.255	308	2.491.004.276	63	527.017.628	20,45	21,16	679	5.034.619.883	36,74	37,24
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan OPD	72	722.160.000	24	234.870.000	12	135.000.000	3	45.201.000	25,00	33,48	27	280.071.000	37,50	38,78
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	60	11.250.000	12	2.250.000			-	-	-	-	12	2.250.000	20,00	20,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	5	15.000.000	1	3.000.000			-	-	-	-	1	3.000.000	20,00	20,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD Berupa Laporan Fungsional, Laporan Konsolidasi, Laporan Keuangan Per Semester	20	10.000.000	4	2.000.000			-	-	-	-	4	2.000.000	20,00	20,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	12.500.000	1	2.500.000			-	-	-	-	1	2.500.000	20,00	20,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya Laporan Barang Milik Daerah dan Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah	65	10.445.000	13	2.089.000	0	-	-	-	-	-	13	2.089.000	20,00	20,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	2.775.000	1	555.000			-	-	-	-	1	555.000	20,00	20,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Tersusunnya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	60	7.670.000	12	1.534.000			-	-	-	-	12	1.534.000	20,00	20,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180	54.305.000	36	10.861.000	0	-	-	-	-	-	36	10.861.000	20,00	20,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Layanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60	18.555.000	12	3.711.000			-	-	-	-	12	3.711.000	20,00	20,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	Terlaksananya Koordinasi, Pelayanan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	60	15.000.000	12	3.000.000			-	-	-	-	12	3.000.000	20,00	20,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60	20.750.000	12	4.150.000			-	-	-	-	12	4.150.000	20,00	20,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	174	621.486.000	58	220.526.860	0	-	-	-	-	-	58	220.526.860	33,33	36,59
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya anggaran komponen instalasi listrik/ penerangan gedung kantor	6	32.130.000	2	7.695.000			-	-	-	-	2	7.695.000	33,33	23,95
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Sebagai Penunjang Operasional Kantor	6	46.800.000	2	32.157.500			-	-	-	-	2	32.157.500	33,33	68,71
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Untuk Menjaga Kebersihan dan Kenyamanan Kantor	6	36.000.000	2	11.019.000			-	-	-	-	2	11.019.000	33,33	30,61
	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai Kantor	6	41.760.000	2	13.920.000			-	-	-	-	2	13.920.000	33,33	33,33
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Sebagai Media Publikasi dan Fungsi Kearsipan Kantor	6	50.508.000	2	16.432.200			-	-	-	-	2	16.432.200	33,33	32,53
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Terbayarnya Biaya Berlangganan Media Koran	72	57.600.000	24	19.200.000			-	-	-	-	24	19.200.000	33,33	33,33

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021 sampai dengan 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD perangkat daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan	72	356.688.000	24	120.103.160			-	-	-	-	24	120.103.160	33,33	33,67
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan SKPD	144	1.224.000.000	48	395.280.082	24	205.000.000	6	45.250.000	25,00	27,02	54	440.530.082	37,50	37,84
	Penyediaan Jasa, Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Terealisasinya Pembayaran Jasa Langganan Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon	72	54.000.000	24	18.280.082	12	10.000.000	3	3.250.000	25,00	32,50	27	21.530.082	37,50	39,87
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Petugas Tenaga Kontrak OPD	72	1.170.000.000	24	377.000.000	12	195.000.000	3	42.000.000	25,00	21,54	27	419.000.000	37,50	35,81
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51	1.062.587.800	15	259.811.130	9	180.000.000	3	19.963.200	33,33	11,09	18	279.774.330	30,83	23,21
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terawatnya Kendaraan Dinas dan terbayarnya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan	36	1.046.587.800	12	256.611.130	9	180.000.000	3	19.963.200	33,33	11,09	15	276.574.330	41,67	26,43
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	16.000.000	3	3.200.000			-	-	-	-	3	3.200.000	20,00	20,00
Rata-rata capaian kinerja (%)											27,02	21,81			26,77	26,24
Predikat Kinerja											SR	SR			SR	SR
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			12	12.739.590.000	3	1.585.639.858	0	-	-	-	-	-	3	1.585.639.858	59,09	55,71
Penyediaan infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			12	12.739.590.000	3	1.585.639.858	0	-	-	-	-	-	3	1.585.639.858	59,09	55,71
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan j*			11	12.710.200.000	2	1.556.489.858			-	-	-	-	2	1.556.489.858	18,18	12,25
Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur			1	29.390.000	1	29.150.000			-	-	-	-	1	29.150.000	100,00	99,18
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-			59,09	55,71
Predikat Kinerja											-	-			R	R
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			147	4.071.864.900	38	3.710.271.500	4	360.000.000	1	11.821.800	25,00	2,57	39	3.722.093.300	28,24	177,56
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			66	2.206.768.800	22	317.840.700	2	230.000.000	1	11.821.800	50,00	5,14	23	329.662.500	35,42	17,87
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			6	205.818.500	2	37.365.000			-	-	-	-	2	37.365.000	33,33	18,15
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			12	1.571.275.000	4	193.867.700	2	230.000.000	1	11.821.800	50,00	5,14	5	205.689.500	41,67	13,09
Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya			24	203.489.000	8	39.428.500			-	-	-	-	8	39.428.500	33,33	19,38
Pemantauan Stok, Pasokan, dan Harga Pangan			24	226.186.300	8	47.179.500			-	-	-	-	8	47.179.500	33,33	20,86
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota			63	640.203.600	10	3.194.824.600	0	-	-	-	-	-	10	3.194.824.600	15,98	499,03

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD PD pada tahun 2021 sampai dengan 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD perangkat daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Beras Kabupaten Pesawaran	63	640.203.600	10	3.194.824.600			-	-	-	-	10	3.194.824.600	15,98	499,03
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya Target Konsumsi Pangan Masyarakat Pesawaran Per Kapita/Tahun	18	1.224.892.500	6	197.606.200	2	130.000.000	-	-	-	-	6	197.606.200	33,33	15,78
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Terpantaunya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Per Tahun	6	230.178.500	2	26.356.200			-	-	-	-	2	26.356.200	33,33	11,45
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal )*	Memberdayakan masyarakat dalam penyediaan makanan dari Sumber Daya Lokal	12	994.714.000	4	200.000.000	2	130.000.000	-	-	-	-	4	200.000.000	33,33	20,11
Rata-rata capaian kinerja (%)											25,00	2,57			28,24	177,56
Predikat Kinerja											SR	SR			SR	ST
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			6	527.357.000	2	143.490.000	0	-	-	-	-	-	2	143.490.000	33,33	27,21
Penanganan kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota			6	527.357.000	2	143.490.000	0	-	-	-	-	-	2	143.490.000	33,33	27,21
Kordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota			6	527.357.000	2	143.490.000			-	-	-	-	2	143.490.000	33,33	27,21
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-			33,33	27,21
Predikat Kinerja											-	-			SR	SR
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			30	248.678.500	10	50.000.000	0	-	-	-	-	-	10	50.000.000	33,33	20,11
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota			30	248.678.500	10	50.000.000	0	-	-	-	-	-	10	50.000.000	33,33	20,11
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			30	248.678.500	10	50.000.000			-	-	-	-	10	50.000.000	33,33	20,11
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-			33,33	20,11
Predikat Kinerja											SR	SR			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											357	3.371.004.276	76	649.253.628		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											33,99	25,20	967	11.792.485.313	36,15	61,37
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											SR	SR			SR	R

## 24. Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100	
2.10.04.2.01	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa tanah dalam kabupaten/kota	16	348.810.000	0	-	4	25.000.000	4	21.315.000	100,00	85,26	4	103.514.500	20,00	29,68
2.10.042.01.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16	348.810.000	0	-	4	25.000.000	4	21.315.000	100,00	-	4	103.514.500	20,00	29,68



# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100	
2.10.042.01.01.02	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	43	837.605.000	11	82.199.500	0	-	-	-	-	-	11	82.199.500	25,58	9,81
2.10.042.01.01.02	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20	348.810.000			4	25.000.000	4	21.315.000	100,00	85,26	4	21.315.000	20,00	6,11
											100,00	85,26	4	103.514.500	20,00	29,68
											ST	T			SR	SR
2.10.05.2.01	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15	978.647.530	11	135.561.000	4	-	-	-	-	-	11	135.561.000	73,33	13,85
2.10.042.01.01	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15	978.647.530	11	135.561.000	0	-	-	-	-	-	11	135.561.000	73,33	13,85
2.10.042.01.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15	978.647.530	11	135.561.000	0	-	-	-	-	-	11	135.561.000	73,33	13,85
											-	-	11	135.561.000	73,33	13,85
											SR	SR			S	SR
2.11.01.2.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	784	27.481.447.795	251	4.607.253.625	103	3.732.564.564	49	1.726.929.463	47,57	46,27	300	6.334.183.088	38,27	23,05
2.11.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	74.615.000	4	20.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	100,00	100,00	6	25.000.000	60,00	33,51
2.11.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	74.615.000	4	20.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	100,00	100,00	6	25.000.000	60,00	33,51
2.05.2.05.01.01.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	156	19.461.842.299	38	2.726.486.316	38	2.755.903.264	20	1.294.395.910	52,63	46,97	59	4.025.882.226	37,82	20,69
2.05.2.05.01.01.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84	18.023.688.889	14	2.385.426.316	25	2.563.323.264	12	1.190.535.910	48,00	46,45	26	3.575.962.226	30,95	19,84
2.05.2.05.01.01.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	1.438.153.410	24	341.060.000	12	187.580.000	7	98.860.000	58,33	52,70	31	439.920.000	43,06	30,59
2.05.2.05.01.01.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	74.615.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	100,00	100,00	2	10.000.000	40,00	13,40
2.05.2.05.01.01.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%Administrasi Umum Perangkat Daerah	324	784.094.317	112	137.723.400	24	49.112.000	12	20.274.033	50,00	41,28	124	157.997.433	38,27	20,15
2.05.2.05.01.01.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	35.525.500	4	7.873.200	0	0	-	-	-	-	4	7.873.200	33,33	22,16
2.05.2.05.01.01.02.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	219.693.619	24	53.534.500	0	-	-	-	-	-	24	53.534.500	33,33	24,37
2.05.2.05.01.01.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	72	35.525.500	24	7.895.000	0	-	-	-	-	-	24	7.895.000	33,33	22,22
2.05.2.05.01.01.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	72	41.418.665	24	11.101.700	12	7.126.000	6	3.275.000	45,96	45,96	30	14.376.700	41,67	34,71
2.05.2.05.01.01.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24	10.000.000	12	1.980.000	0	0	-	-	-	-	12	1.980.000	50,00	19,80

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100	
2.05.2.05.01.01.06.09	Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan luar Provinsi Lampung	72	441.931.033	24	55.339.000	12	41.986.000	6	16.999.033	40,49	40,49	30	72.338.033	41,67	16,37
2.05.2.05.01.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150	3.546.865.920	49	950.254.824	24	478.158.000	12	241.015.000	50,00	50,40	61	1.191.269.824	40,67	33,59
2.05.2.05.01.01.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	122.207.720	24	14.254.824	12	18.600.000	6	6.015.000	50,00	32,34	30	20.269.824	41,67	16,59
2.05.2.05.01.01.08.03	Sub Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	219.693.619	24	31.370.000	12	31.558.000	6	7.899.000	50,00	25,03	30	39.269.000	41,67	17,87
2.05.2.05.01.01.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78	3.424.658.200	25	936.000.000	12	428.000.000	6	235.000.000	54,91	54,91	31	1.171.000.000	39,74	34,19
2.05.2.05.01.01.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144	3.614.030.259	48	772.789.085	15	444.391.300	3	166.244.520	37,41	37,41	51	939.033.605	35,42	25,98
2.05.2.05.01.01.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72	3.574.504.759	24	764.069.335	15	444.391.300	3	166.244.520	37,41	37,41	27	930.313.855	37,50	26,03
2.05.2.05.01.01.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72	39.525.500	24	8.719.750	0	0	-	-	-	-	24	8.719.750	33,33	22,06
											37,41	46,27	300	6.334.183.088	38,27	23,05
											SR	SR			SR	SR
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	TERINTERGRITASNYA RPPLH DALAM RENCANA PEMBANGUNAN KABUPATEN	1	456.540.700	1	133.355.123	2	466.254.000	-	14.060.000	3,02	3,02	0	-	-	-
2.11.02.2.01	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten/kota	1	456.540.700	1	133.355.123	2	466.254.000	-	14.060.000	-	3,02	0	-	-	-
2.11.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1	456.540.700	1	133.355.123	2	466.254.000	-	14.060.000	-	3,02	1	147.415.123	100,00	32,29
											-	3,02	0	-	-	-
											SR	SR			SR	SR
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS AIR(IKA)	6	262.050.000	9	47.531.000	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	% penurunan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	6	262.050.000	9	47.531.000	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-
2.11.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	6	262.050.000	8	29.900.000	0	0	-	-	-	-	8	29.900.000	133,33	11,41
2.11.03.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4	122.102.000	1	17.631.000	0	0	1	-	-	-	2	17.631.000	50,00	14,44
											-	-	0	-	SR	SR
											SR	SR			SR	SR
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN (IKTL)	60	1.071.510.250	12	167.753.200	10	274.250.000	6	146.496.000	60,00	53,42	18	314.249.200	30,00	29,33

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	% Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	60	1.071.510.250	12	167.753.200	10	274.250.000	6	146.496.000	60,00	53,42	18	314.249.200	30,00	29,33
2.05.2.05.01.0 1.20.04	Pengeloaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Pengeloalan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	60	1.071.510.250	12	167.753.200	10	274.250.000	6	146.496.000	60,00	53,42	18	314.249.200	30,00	29,33
											60,00	53,42	18	314.249.200	30,00	29,33
											R	R			SR	SR
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE IZIN PENGUMPULAN DAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 YANG DITERBITKAN	161	517.690.000	37	48.119.000	0	-	0	-	-	-	25	35.705.000	15,53	6,90
2.11.05.2.01	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Rekomendasi TPS Limbah B3	85	212.435.000	25	35.705.000	0	-	-	-	-	-	25	35.705.000	29,41	16,81
2.11.05.2.01.0 2	Sub Kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	85	212.435.000	25	35.705.000	0	0	-	-	-	-	25	35.705.000	29,41	16,81
2.11.05.2.02	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	76	305.255.000	12	12.414.000	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-
2.11.05.2.02.0 2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkornisai Pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	76	305.255.000	12	12.414.000	0	0	-	-	-	-	12	12.414.000	15,79	4,07
											-	-	0	-	-	-
											SR	SR			SR	SR
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG TAAT LINGKUNGAN	270	332.050.000	60	60.238.000	2	15.000.000	1	5.400.000	50,00	36,00	61	65.638.000	22,59	19,77
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	270	332.050.000	60	60.238.000	2	15.000.000	1	5.400.000	50,00	36,00	61	65.638.000	22,59	19,77
2.11.06.2.01.0 3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	270	332.050.000	60	60.238.000	2	15.000.000	1	5.400.000	50,00	36,00	61	65.638.000	22,59	19,77
											50,00	36,00	61	65.638.000	22,59	19,77
											SR	SR			SR	SR

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100		
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENANGANAN SAMPAH	81	4.909.000.800	25	1.826.636.850	0	841.000.000	3	458.275.600	-	54,49	31	2.284.912.450	38,27	46,55	
2.11.11.2,01	Pengelolaan Sampah	% Pengelolaan Sampah	81	4.909.000.800	25	1.826.636.850	12	841.000.000	3	458.275.600	25,00	54,49	28	2.284.912.450	34,57	46,55	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis	15	272.050.000	3	20.377.500	0	0	0	-	-	-	3	20.377.500	20,00	7,49	
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	66	4.636.950.800	22	1.806.259.350	12	841.000.000	3	458.275.600	25,00	54,49	25	2.264.534.950	37,88	48,84	
											25,00	54,49	28	2.284.912.450	34,57	46,55	
											SR	R			SR	SR	
										5.354.068.564		2.372.476.063					
										-			227	4.574.302.900	36,12	29,38	
											SR	SR			SR	SR	

## 25. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian KinerjaRPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021,2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	3	4	5	6	7	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100							
2	12	3	Program pencatatan sipil		20	34.295.000	8	22.580.000,00	0	-	-	0,00	0,00	8	6.620.000	20,00	9,65	
2	12	3	pelayanan pencatatan sipil	tersedianya layanan pencatatan sipil	20	34.295.000	8	6.620.000,00			-	0,00	0,00	8	6.620.000	40,00	19,30	
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00			20,00	9,65	
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR	
2	12	4	program pengolahan informasi administrasi kependudukan		220	68.352.000	36	115.861.800,00	0	-	-	0,00	0,00	18	35.600.000	19,58	53,35	
2	12	4	pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data kependudukan	Tersedianya Profil Perkembangan Kependudukan	160	33.250.000	20	229.373.600,00	0	-	-	0,00	0,00	20	33.250.000	12,50	100,00	
2	12	4	tersedianya layanan administrasi keendudukan	tersedianya layanan administrasi keendudukan	60	35.102.000	16	2.350.000,00		-	-	0,00	0,00	16	2.350.000	26,67	6,69	
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00			19,58	53,35	
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR	
2	12	01	Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran	2257	38.630.599.045	561	8.010.345.739	83	3.981.642.984	-	1.728.407.090	7,24	7,24	54,55	9738752829,00	50,78	25,82
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah	75	150.000.000				-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Pelaporan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	60	100.000.000				-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
2	12	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	70	17.069.244.045	24	4.160.747.881,00	12	2.245.791.684	6	1.049.135.912	0,00	0,00	30	5.209.883.793	42,86	30,52

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian KinerjaRPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021,2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
1	2		3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
2	12	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya dokumen pelaporan capaian keuangan OPD (semesteran dan tahunan)	70	12.000.000.000	24	2.279.830.000,00	12	96.320.000	6	54.370.000	0,00	0,00	30	2.334.200.000	42,86	19,45	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	400	220.000.000				-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya ASN yang mengikuti diklat/bimtek dan sosialisasi	100	110.000.000				-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
			Penyedia komponen instakasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya peralatan listrik dan penenrangan kantor	60	24.500.000	24	5.545.000,00		-	-	0,00	0,00	24	5.545.000	40,00	22,63		
			penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	60	5.301.855.000	24	722.409.468,00	12	242.228.000	3	5.253.000	2,17	2,17	27	727.662.468	45,00	13,72	
			Penyedia peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	60	25.000.000	12	3.101.000,00		-	-	0,00	0,00	12	3.101.000	20,00	12,40		
			penyedia bahan logistik kantor	Tersedianya makan minum tamu	55	100.000.000	23	7.846.000,00		-	-	0,00	0,00	23	7.846.000	41,82	7,85		
			penyedia barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	60	40.000.000	24	9.949.000,00		-	-	0,00	0,00	24	9.949.000	40,00	24,87		
			penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan acaan	720	90.000.000	288	20.780.000,00		-	-	0,00	0,00	288	20.780.000	40,00	23,09		
			penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	50	750.000.000	22	276.384.963,00	11	120.012.000	6	28.750.665	23,96	23,96	28	305.135.628	56,00	40,68	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	5	520.000.000				-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	52	500.000.000				-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	372.000.000	24	74.161.899,00	12	60.000.000	6	16.245.513	27,08	27,08	30	90.407.412	50,00	24,30	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan kantor	60	18.000.000	12			-	-	0,00	0,00	12	-	20,00	0,00		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya layanan administrasi keuangan dan layanan umum kantor	60	0,00	-		12	939.000.000	6	501.000.000	0,00	0,00	6	501.000.000	10,00	3,00	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin dan berkala	60	1.100.000.000	24	434.251.528,00	12	278.291.300	6	73.652.000	26,47	26,47	30	507.903.528	50,00	46,17	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya jasa layanan perbaikan peralatan dan mesin	60	40.000.000	12			-	-	0,00	0,00	12	-	20,00	0,00		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan gedung/ bangunan kantor	60	100.000.000	24	15.339.000,00		-	-	0,00	0,00	24	15.339.000	40,00	15,34		
										-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)													8,85	8,85				25,39	31,56
Predikat kinerja													SR	SR				SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										3.981.642.984		1.728.407.090							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)													8,85	8,85				25,39	31,56
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)													SR	SR				SR	SR

26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
2.13.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4452	18.416.074.700	1595	6005467158	690	3.206.781.598	402	1.507.777.761	58%	47%	1997	7.513.244.919	45%	41%
2.13.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Berkinerja Tinggi	1992	14.597.234.200	741	5.113.431.230	346	2.715.880.298	222	1.312.449.561	64%	48%	963	6.425.880.791	48%	44%
2.13.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Tambahan Penghasilan Pegawai	1260	13.535.280.600	270	4.352.399.630	322	2.559.560.898	210	1.204.030.761	65%	47%	480	5.556.430.391	38%	41%
2.13.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan keuangan	720	1.033.506.000	467	756.957.000	24	156.319.400	12	108.418.800	50%	69%	479	865.375.800	67%	84%
2.13.01.2.02.07.	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	12	28.447.600	4	4.074.600	-	-	-	-	0%	0%	4	4.074.600	33%	14%
Rata-rata capaian kinerja (%)											38%	39%	963	6.425.880.791	46%	46%
Predikat kinerja											SR	SR			SR	SR
2.13.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		504	925.884.000	168	239.718.078	0	-	0	-	0%	0%	168	239.718.078	33%	26%
2.13.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik	72	22.500.000	24	5.190.000	0	-	-	-	0%	0%	24	5.190.000	33%	23%
2.13.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor tersedia	72	124.140.000	24	43.632.000			-	-	0%	0%	24	43.632.000	33%	35%
2.13.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	72	23.616.000	24	6.134.000	0	-	-	-	0%	0%	24	6.134.000	33%	26%
2.13.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah konsumsi peserta rapat	72	106.920.000	24	29.820.000	0	-	-	-	0%	0%	24	29.820.000	33%	28%
2.13.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kelengkapan administrasi kesekretariatan	72	97.326.000	24	26.221.000	0	-	-	-	0%	0%	24	26.221.000	33%	27%
2.13.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah referensi perundang-undangan	72	201.840.000	24	42.280.000	0	-	-	-	0%	0%	24	42.280.000	33%	21%
2.13.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	72	349.542.000	24	86.441.078	0	-	-	-	0%	0%	24	86.441.078	33%	25%
Rata-rata capaian kinerja (%)											0%	0%	168	239.718.078	33%	26%
Predikat kinerja											SR	SR			SR	SR
2.13.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1512	1.684.800.000	518	284.846.500	272	277.000.000	138	132.086.700	51%	48%	656	416.933.200	43%	25%
2.13.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya biaya langganan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	124.800.000	24	28.846.500	12	18.000.000	6	6.086.700	50%	34%	30	34.933.200	42%	28%



# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Urusan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
2.13.01.2.08.04	Jasa Pelayanan Umum Kantor	120	1440	1.560.000.000	494	256.000.000	260	259.000.000	132	126.000.000	51%	49%	626	382.000.000	43%	24%
Rata-rata capaian kinerja (%)											25%	34%	30	34.933.200	42%	28%
Predikat kinerja											SR	SR			SR	SR
2.13.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		444	1.208.156.500	168	367.471.350	72	213.901.300	42	63.241.500	58%	30%	210	430.712.850	47%	36%
2.13.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang terpelihara	300	962.156.500	120	292.471.350	60	193.901.300	30	43.241.500	50%	22%	150	335.712.850	50%	35%
2.13.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan yang terpelihara	72	126.000.000	24	35.000.000	0	-	-	-	0%	0%	24	35.000.000	33%	28%
2.13.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kantor	72	120.000.000	24	40.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	100%	100%	36	60.000.000	50%	50%
Rata-rata capaian kinerja (%)											75%	61%	210	430.712.850	44%	38%
Predikat kinerja											SR	SR			SR	SR
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		73774	15.953.130.000	24613	3.920.734.960	14123	1.477.433.600	10.499	1.159.389.512	74%	78%	35112	5.080.124.472	48%	32%
2.13.04.2.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		73774	15.953.130.000	24613	3.920.734.960	14123	1.477.433.600	10.499	1.159.389.512	74%	78%	35112	5.080.124.472	48%	32%
2.13.04.2.01.01.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Rapat Koordinasi Kepala Desa yang dilaksanakan	15	1.197.950.000	4	198.529.000	2	55.000.000	-	-	0%	0%	4	198.529.000	27%	17%
2.13.04.2.01.03.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan	30	235.000.000	12	41.500.000	0	-	-	-	0%	0%	12	41.500.000	40%	18%
2.13.04.2.01.04.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparatur desa yang terlatih dalam pengelolaan keuangan desa	720	554.500.000	288	265.894.320	0	-	-	-	0%	0%	288	265.894.320	40%	48%
2.13.04.2.01.05.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Kepala Desa serta Aparatur desa yang mengikuti pelatihan	496	695.000.000	37	78105000	0	-	-	-	0%	0%	37	78.105.000	7%	11%
2.13.04.2.01.08.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDes yang Terbina	720	340.000.000	288	66.900.000	0	-	-	-	0%	0%	288	66.900.000	40%	20%
2.13.04.2.01.09.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa di Kabupaten Pesawaran	496	2.996.000.000	74	1.540.246.600	0	-	-	-	0%	0%	74	1.540.246.600	15%	51%
2.13.04.2.01.11.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang Terbina dan Terdata se Kabupaten Pesawaran dalam Sistem Informasi Profil Desa	5	230.000.000	2	38.953.500	0	-	-	-	0%	0%	2	38.953.500	40%	17%
2.13.04.2.01.12.	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Kepala Desa dan Aparatur Desa yang memperoleh tanggungan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Pesawaran	69120	6.955.680.000	23040	1.078.187.340	14120	1.382.433.600	10.499	1.159.389.512	74%	84%	33539	2.237.576.852	49%	32%

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Urusan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
2.13.04.2.01.13.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Data Inventaris Aset dan Kekayaan Desa se-Kabupaten Pesawaran	720	375.000.000	288	54.715.000	0	-	-	-	0%	0%	288	54.715.000	40%	15%
2.13.04.2.01.14.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang Terbina	720	570.000.000	288	134.250.000	1	40.000.000	-	-	0%	0%	288	134.250.000	40%	24%
2.13.04.2.01.16.	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	720	340.000.000	288	62.150.000	0	-	-	-	0%	0%	288	62.150.000	40%	18%
2.13.04.2.01.18.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Lomba Desa yang dilaksanakan baik tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	12	1.464.000.000	4	361.304.200	0	-	-	-	0%	0%	4	361.304.200	33%	25%
Rata-rata capaian kinerja (%)											25%	28%	35112	5.080.124.472	34%	25%
Predikat kinerja											SR	SR			SR	SR
2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		1455	2.532.737.000	293	409.083.500	0	-	-	-	0%	0%	293	409.083.500	20%	16%
2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		1455	2.532.737.000	293	409.083.500	0	-	-	-	0%	0%	293	409.083.500	20%	16%
2.13.05.2.01.02.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan terhadap Kader Pembangunan Manusia (KPM)	720	300.000.000	144	20.000.000	0	-	-	-	0%	0%	144	20.000.000	20%	7%
2.13.05.2.01.03.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pokjantal/ Pokja di Kabupaten Pesawaran yang terbina	720	300.000.000	144	36.700.000	0	-	-	-	0%	0%	144	36.700.000	20%	12%
2.13.05.2.01.06.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pembinaan dan Keikutsertaan dalam TTG Tingkat Provinsi dan Nasional	5	345.000.000	2	77.034.000	0	-	-	-	0%	0%	2	77.034.000	40%	22%
2.13.05.2.01.07.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Kegiatan BBGRM tingkat Kabupaten dan Keikutsertaan Tingkat Provinsi	10	1.587.737.000	3	275.349.500	0	-	-	-	0%	0%	3	275.349.500	30%	17%
Rata-rata capaian kinerja (%)											0%	0%	293	409.083.500	28%	15%
Predikat kinerja											SR	SR			SR	SR

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Urusan	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPД Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPД Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPД Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
3.32.03.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		75	1.006.000.000	15	98.177.760	0	-	-	-	0%	0%	15	98.177.760	20%	10%
3.32.03.2.1.	Penataan Pesebaran Penduduk yang Berasl dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		75	1.006.000.000	15	98.177.760	0	-	-	-	0%	0%	15	98.177.760	20%	10%
3.32.03.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah calon peserta transmigrasi	25	264.412.000	5	25.812.000	0	-	-	-	0%	0%	5	25.812.000	20%	10%
3.32.03.2.01.04.	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta transmigrasi yang diberangkatkan	25	449.289.000	5	43.911.760	0	-	-	-	0%	0%	5	43.911.760	20%	10%
3.32.03.2.01.05.	Penyuluhan Transmigrasi (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Jumlah calon peserta transmigrasi yang mendapat pelatihan	25	292.299.000	5	28.454.000	0	-	-	-	0%	0%	5	28.454.000	20%	10%
Rata-rata capaian kinerja (%)											0%	0%	15	98.177.760	20%	10%
Predikat kinerja											SR	SR			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM			37.907.941.700		10.433.463.378		4.684.215.198		2.667.167.273			13.100.630.651				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)											40,89	40,43			35,31	26,75
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)											SR	SR			SR	SR

## 27. Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100	
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	325	60.529.324.105	49	8.156.193.794	54	8.775.772.120	262	4.505.046.493	49,57	46,04	761	12.661.240.287	25,00	19,32
2 15 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Keuangan	217	25.053.976.875	33	3.248.060.459	36	2.701.830.820	172	1.258.779.868	48,71	48,55	503	4.506.840.327	24,05	17,26
2 15 01 2.0 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210	17.258.261.155	31	2.150.860.459	35	2.510.884.220	166	1.161.719.868	47,43	46,27	485	3.312.580.327	23,10	19,19
2 15 01 2.0 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	7.795.715.720	12	1.097.200.000	12	190.946.600	6	97.060.000	50,00	50,83	18	1.194.260.000	25,00	15,32
2 15 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat	144	32.661.860.496	12	4.514.233.335	24	5.677.960.000	12	3.109.066.625	50,00	54,93	24	7.623.299.960	25,00	21,82
2 15 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	32.661.860.496	12	4.514.233.335	12	4.754.960.000	6	2.612.066.625	50,00	54,93	18	7.126.299.960	25,00	21,82
2 15 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72		0	-	12	923.000.000								

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)					
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2				3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100					
2	15	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang Dipelihara	936	2.813.486.734	15	6	393.900.000	15	6	395.981.300	78	137.200.000	50,00	34,65	234	531.100.000	25,00	18,88	
2	15	01	2.0	02	9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	936	2.813.486.734	15	6	393.900.000	15	6	395.981.300	78	137.200.000	50,00	34,65	234	531.100.000	25,00	18,88
Rata-rata capaian kinerja (%)														49,57	46,04			24,68	19,32				
Predikat kinerja														SR	SR			SR	SR				
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas	12	515.880.950	34		83.150.000	45		190.000.000	21	30.046.800	-	-	55	113.196.800	70,83	4,03	
2	15	02	2.0	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Terpasangnya Perlengkapan Lalu Lintas Jalan dan Pemeliharaannya yang ada di Kabupaten	0	-	0		-	43		60.000.000	21	30.046.800	-	-	21	30.046.800	-	-	
2	15	02	2.0	04	2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			0	-	43		60.000.000									
2	15	02	2.0	6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Presentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	12	515.880.950	34		83.150.000	2		130.000.000	0	-	-	-	34	83.150.000	141,67	8,06	
2	15	03	2.0	02	6	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	12	515.880.950	34		83.150.000	2		130.000.000	0	-	-	34	83.150.000	283,33	16,12	
Rata-rata capaian kinerja (%)														-	-			70,83	4,03				
Predikat kinerja														SR	SR			S	SR				
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase orang/barang melalui dermaga per tahun	78	1.486.204.000	15		220.000.000	13		217.000.000	6	107.557.600	25,00	25,98	21	107.557.600	37,50	13,19	
2	15	03	2.0	7	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Tersedianya Alur Penyeberangan Rakyat	72	1.242.000.000	12		220.000.000	12		207.000.000	6	107.557.600	50,00	51,96	18	327.557.600	25,00	26,37	
2	15	03	2.0	02	7	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasioan untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupten/ Kota	72	1.242.000.000	12		220.000.000	12		207.000.000	6	107.557.600	50,00	51,96	18	327.557.600	25,00	26,37
2	15	03	2.1	2	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Presentase Pelaksanaan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	6	244.204.000	3	-	-	1		10.000.000	0	-	-	-	3	-	50,00	-	
2	15	03	2.1	01	2	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	6	244.204.000	3	-	-	1		10.000.000	0	-	-	-	3	-	50,00	-
Rata-rata capaian kinerja (%)														25,00	25,98			37,50	13,19				
Predikat kinerja														SR	SR			SR	SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									60	0	9.182.772.120	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				837	12.881.994.687						
TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)														24,86	24,01			44,44	12,18				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)														SR	SR			SR	SR				

28. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
								K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.
1	2					3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
1	2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		100	%	22.721.150.442	134	9.181.988.703	134	4.827.272.130	66	1.995.564.691	189,29	0,00	200	11.177.553.394	101,87	130,29
	2	16	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	100	%	21.018.619.142	26	7.179.324.772	26	3.852.742.830	12	1.291.767.018	46,43	39,76	38	8.471.091.790	26,39	41,75
	2	16	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72	bulan	17.402.099.142	14	5.914.794.772	14	3.193.222.830	6	967.037.018	42,86	30,28	20	6.881.831.790	27,78	39,55
	2	16	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	72	bulan	3.616.520.000	12	1.264.530.000	12	659.520.000	6	324.730.000	50,00	49,24	18	1.589.260.000	25,00	43,94
	2	16	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum SKPD	100	%	-	72	1.490.246.597	72	706.998.000	36	644.398.000	42,86	33,19	108	2.134.644.597	21,43	23,26
	2	16	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	72	bulan	22.775.000	12	7.775.000	12	-	6	-	50,00	0,00	18	7.775.000	25,00	34,14
	2	16	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK Belanja Pakai Habis	72	bulan	174.750.000	12	68.359.000	12	5.000.000	6	3.300.000	50,00	66,00	18	71.659.000	25,00	41,01
	2	16	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	72	bulan	16.429.700	12	3.377.000	12	-	6	-	50,00	0,00	18	3.377.000	25,00	20,55
	2	16	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan dan Minuman Tamu	72	bulan	24.996.200	12	8.391.100	12	-	6	-	50,00	0,00	18	8.391.100	25,00	33,57
	2	16	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Keperluan Kantor	72	bulan	60.467.200	12	18.788.800	12	1.998.000	6	1.498.000	50,00	74,97	18	20.286.800	25,00	33,55
	2	16	01	2,06	09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Rapat antar SKPD	72	bulan	400.000.000	12	-	12	53.664.000	6	25.605.000	50,00	47,71	18	25.605.000	25,00	6,40
	2	16	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Operasional Kantor PIPPD di Jakarta	72	bulan		12	1.383.555.697	12	700.000.000	6	639.600.000	50,00	91,37	18	2.023.155.697	25,00	-
	2	16	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	%	222.000.000	12	49.206.979	12	42.000.000	6	15.299.673	50,00	36,43	18	64.506.652	29,06	29,06
	2	16	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	72	bulan	222.000.000	12	49.206.979	12	42.000.000	6	15.299.673	50,00	36,43	18	64.506.652	29,06	29,06
	2	16	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	1.480.531.300	24	463.210.355	24	225.531.300	12	44.100.000	50,00	9,78	36	507.310.355	25,00	36,23
	2	16	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Operasional / BBM Kendaraan Dinas PP dan PA : roda 4 (3 Unit) roda 2 (2 Unit)	72	bulan	1.225.531.300	12	363.210.355	12	225.531.300	6	44.100.000	50,00	19,55	18	407.310.355	25,00	33,24
	2	16	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Halaman dan Bangunan Gedung Kantor	72	bulan	255.000.000	12	100.000.000	12	-	6	-	50,00	0,00	18	100.000.000	25,00	39,22
Rata-Rata Capaian Kinerja																	47,32	39,72			33,96	43,43
Predikat Kinerja																	ST	SR			T	S
2	2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	100	%	24.215.020.000	36	7.018.065.806	36	5.035.272.350	18	2.594.983.241	50,00	33,16	54	9.613.049.047	25,00	26,31
	2	16	02	2,01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		100	%	24.215.020.000	36	7.018.065.806	36	5.035.272.350	18	2.594.983.241	50,00	33,16	54	9.613.049.047	25,00	26,31

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
								K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.
1	2					3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																
	2	16	02	2,01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	72	bulan	500.000.000	12	57.680.000	12	78.332.000	6	9.810.000	50,00	12,52	18	67.490.000	25,00	13,50
	2	16	02	2,01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	72	bulan	3.015.000.000	12	549.200.000	12	399.220.000	6	132.300.000	50,00	33,14	18	681.500.000	25,00	22,60
	2	16	02	2,01	06	Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Pelayanan Informasi Publik	72	bulan	500.000.000	12		12	63.448.000	6	11.800.000	50,00	18,60	18	11.800.000	25,00	2,36
	2	16	02	2,01	07	Layanan Hubungan Media	Terlaksananya Layanan Hubungan Media	72	bulan	20.700.020.000	12	6.411.185.806	12	4.557.720.350	6	2.452.873.241	50,00	53,82	18	8.864.059.047	25,00	42,82
Rata-Rata Capaian Kinerja																16,67	11,05			8,33	8,77	
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR	
	2	16	03			Program Aplikasi Informatika	-Meningkatnya penerapan SPBE (e-Government)	100	%	13.053.502.100	84	4.692.710.293	84	2.407.674.100	30	1.005.328.532	80,00	70,78	114	5.698.038.825	46,67	-
	2	16	03	2,01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		100	%	11.721.570.100	24	4.414.392.393	24	2.175.612.100	12	902.956.405	50,00	40,46	36	5.317.348.798	25,00	43,32
	2	16	03	2,01	02	Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dab Sub Domain dalam Penelenggara Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penelenggara Pemerintah Daerah	72	bulan	366.279.650	12	124.638.126	12	66.279.650	6	26.084.650	50,00	39,36	18	150.722.776	25,00	41,15
	2	16	03	2,01	03	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	72	bulan	11.355.290.450	12	4.289.754.267	12	2.109.332.450	6	876.871.755	50,00	41,57	18	5.166.626.022	25,00	45,50
	2	16	03	2,02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		100	%	1.331.932.000	60	278.317.900	60	232.062.000	18	102.372.127	30,00	30,32	78	380.690.027	21,67	54,84
	2	16	03	2,02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	72	bulan	39.440.000	12	39.436.000	12	-	-	-	0,00	0,00	12	39.436.000	16,67	99,99
	2	16	03	2,02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	72	bulan	47.961.000	12	47.820.500	12	-	-	-	0,00	0,00	12	47.820.500	16,67	99,71
	2	16	03	2,02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	72	bulan	780.000.000	12	130.000.000	12	169.000.000	6	72.220.000	50,00	42,73	18	202.220.000	25,00	25,93
	2	16	03	2,02	11	Pengelolaan Government chief Information Officer(GCIO)	Terlaksananya Pengelolaan Government chief Information Officer(GCIO)	72	bulan	345.000.000	12	34.025.000	12	44.062.000	6	16.652.127	50,00	37,79	18	50.677.127	25,00	14,69
	2	16	03	2,02	12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistemSPBE	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistemSPBE	72	bulan	119.531.000	12	27.036.400	12	19.000.000	6	13.500.000	50,00	71,05	18	40.536.400	25,00	33,91
Rata-Rata Capaian Kinerja																26,67	23,59			32,22	61,61	
Predikat Kinerja																SR	SR			T	ST	



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		
1	2					3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
3	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARA STATISTIK DAERAH	TERLAKSANANYA PENYELENGGARA STATISTIK DAERAH	100	%	958.000.000	36	137.899.800	36	143.000.000	18	44.623.500	50,00	31,85	54	182.523.300	25,00	19,76	
	2	20	02	2,01		Penyelenggara Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/ kota		100	%	958.000.000	36	137.899.800	36	143.000.000	18	44.623.500	50,00	31,85	54	182.523.300	25,00	19,76	
	2	20	02	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronissi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronissi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	72	bulan	250.000.000	12	44.959.900	12	45.000.000	6	20.184.500	50,00	44,85	18	65.144.400	25,00	26,06	
	2	20	02	2,01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yangTerintegrasi	Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yangTerintegrasi	72	bulan	360.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	6	2.689.000	50,00	5,38	18	52.689.000	25,00	14,64	
	2	20	02	2,01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	72	bulan	348.000.000	12	42.939.900	12	48.000.000	6	21.750.000	50,00	45,31	18	64.689.900	25,00	18,59	
															Rata-Rata Capaian Kinerja		16,67	10,62			8,33	6,59	
																Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR
	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARA PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	TERLAKSANANYA PENYELENGGARA PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100	%	230.000.000	12	26.870.000	12	19.276.000	6	6.126.000	50,00	31,78	18	32.996.000	25,00	14,35	
	2	21	02	2,01		Penyelenggara persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/ Kota		100	%	230.000.000	12	26.870.000	12	19.276.000	6	6.126.000	50,00	31,78	18	32.996.000	25,00	14,35	
	2	21	02	2,01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik	72	bulan	230.000.000	12	26.870.000	12	19.276.000	6	6.126.000	50,00	31,78	18	32.996.000	25,00	14,35	
																Rata-Rata Capaian Kinerja		16,67	10,59			8,33	4,78
																Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR
										61.177.672.542		21.057.534.602		12.432.494.580		2.040.188.191				23.097.722.793			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																24,80	19,12			18,24	25,03		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																SR	SR			SR	SR		

29. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		12= 8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		12= 8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			25.862.713.679		3.716.062.819		3.852.273.348		1.742.623.619				5.458.686.438		
	2.18.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		40	90.000.000		45.000.000	8	40.000.000		22.471.400				67.471.400		
1	2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	30.000.000	3	35.000.000	3	30.000.000	2	14.121.400	66,67	47,07	5	49.121.400	33,33	163,74
2	2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	60.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	4	8.350.000	80,00	83,50	9	18.350.000	36,00	30,58
	2.18.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		190	15.919.111.250	32	2.252.528.491	37	2.669.304.748		1.237.886.962				3.490.415.453		
3	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	14.607.873.022	14	2.074.568.491	19	2.467.419.748	19	1.149.967.962	100,00	46,61	33	3.224.536.453	39,29	22,07
4	2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	106	1.311.238.228	18	177.960.000	18	201.885.000	18	87.919.000	100,00	43,55	36	265.879.000	33,96	20,28
	2.18.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		2.488	2.636.838.180		410.724.200	422	235.209.600		90.558.300				501.282.500		
6	5.1.02.01.01.0024	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	93	180.524.623	16	26.971.000	16	12.475.400	6	7.076.700	37,50	56,73	22	34.047.700	23,66	18,86
7	2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	228	309.512.987	40	46.379.500	40	34.726.800	20	16.645.300	50,00	47,93	60	63.024.800	26,32	20,36
8	2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	162	236.760.174	28	30.459.200	28	17.785.400	14	9.046.200	50,00	50,86	42	39.505.400	25,93	16,69
9	2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	64	317.930.391	11	40.188.500	11	21.685.000	6	11.126.800	54,55	51,31	17	51.315.300	26,56	16,14
10	2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan yang disediakan	1179	140.002.000	200	20.000.000	200	25.000.000	100	11.400.000	50,00	45,60	300	31.400.000	25,45	22,43
11	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	762	1.452.108.005	127	246.726.000	127	123.537.000	42	35.263.300	33,07	28,54	169	281.989.300	22,18	19,42
	2.18.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		80	3.119.008.559	13	403.174.128	13	151.659.000		0				403.174.128		
12	2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	38	649.993.037	6	112.588.200	6	35.184.000	0	-	-	-	6	112.588.200	15,79	17,32
13	2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	28	994.863.222	5	77.585.928	5	106.000.000	0	-	-	-	5	77.585.928	17,86	7,80
14	2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	14	1.474.152.300	2	213.000.000	2	10.475.000	0	-	-	-	2	213.000.000	14,29	14,45
	2.18.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		144	2365923853	24	308.000.000	23	332.600.000		157.602.457				465.602.457		
15	2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	18	443.230.260	3	53.000.000	3	72.600.000	2	22.602.457	66,67	31,13	5	75.602.457	27,78	17,06
16	2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	126	1.922.693.593	21	255.000.000	20	260.000.000	20	135.000.000	100,00	51,92	41	390.000.000	32,54	20,28
	2.18.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		48	1.731.831.837	8	296.636.000	9	423.500.000		234.104.500				530.740.500		
17	2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	1.438.932.554	3	238.500.000	3	238.500.000	3	49.151.000	100,00	20,61	6	287.651.000	33,33	19,99
18	2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	292.899.283	5	58.136.000	6	185.000.000	6	184.953.500	100,00	99,97	11	243.089.500	36,67	82,99

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		12= 8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
Rata-rata capaian kinerja (%)												58,14	41,49			27,70	31,20
Predikat kinerja												R	SR			SR	SR
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			6.155.556.700		447.288.200		556.525.000		143.067.600						
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		21	1.632.110.500	1	197.412.000	4	111.440.000		8.979.000			206.391.000			
20	2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	21	1.632.110.500	1	197.412.000	4	111.440.000	1	8.979.000	25,00	8,06	2	206.391.000	9,52	12,65
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		82	4.523.446.200	2	249.876.200	15	445.085.000		134.088.600			383.964.800			
21	2.18.02.2.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	82	4.523.446.200	2	249.876.200	15	445.085.000	2	134.088.600	13,33	30,13	4	383.964.800	4,88	8,49
Rata-rata capaian kinerja (%)												19,17	19,09			7,20	10,57
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			2.277.295.029		243.985.500		260.414.400		132.475.700						
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		3.978	2.277.295.029	318	243.985.500	1079	260.414.400		132.475.700			376.461.200			
22	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6	376.668.290	1	36.950.000	473	73.945.000	317	45.168.200	67,02	61,08	318	82.118.200	53,00	21,80
23	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	2.510	997.247.236	145	117.100.000	473	86.015.900	243	43.318.400	51,37	50,36	388	160.418.400	15,46	16,09
24	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	36	262.353.725	6	30.304.500	7	50.022.500	4	25.341.500	57,14	50,66	10	55.646.000	27,78	21,21
25	2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1.426	641.025.778	166	59.631.000	126	50.431.000	48	18.647.600	36,98	36,98	214	78.278.600	15,01	12,21
Rata-rata capaian kinerja (%)												53,13	49,77			27,81	17,83
Predikat kinerja												R	SR			SR	SR
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			2.693.040.265		230.883.960		495.967.000		21.746.600						
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1.649	2.693.040.265	49	230.883.960	270	495.967.000		21.746.600			252.630.560			
26	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	114	495.227.825	14	27.510.009	20	47.267.000	4	9.146.600	20,00	19,35	18	36.656.609	15,79	7,40

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		12= 8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
27	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1.060	1.358.780.506	10	158.523.951	210	295.250.000	6	9.000.000	2,86	3,05	16	167.523.951	1,51	12,33
28	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	475	839.031.934	25	44.850.000	40	153.450.000	1	3.600.000	2,50	2,35	26	48.450.000	5,47	5,77
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)												8,45	8,25			7,59	8,50
PREDIKAT KINERJA												SR	SR			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					36.988.605.673		4.638.220.479		5.165.179.748		2.039.913.519				5.458.686.438		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)												34,72	39,49			17,58	17,02
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)												SR	SR			SR	SR

## 30. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
	Urusan Wajib															
	Kepemudaan dan Olahraga															
2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.316.607.971	-	-	*100	2.534.136.430	-	1.338.412.764	-	236	-	1.338.412.764		8,74
2 19 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.650.515.192	-	-		2.120.595.630	-	1.170.042.009		55,18	-	1.170.042.009		8,57
2 19 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70	11.397.244.884	-	-	14	2.006.395.630	3	1.099.822.009	21,43	54,82	3	1.099.822.009	4,29	9,65
2 19 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120	2.253.270.308	-	-	12	114.200.000	3	70.220.000	25,00	61,49	3	70.220.000	2,50	3,12
2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			223.754.968	-	-		3.089.500	-	3.089.500		100,00	-	3.089.500		1,38
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200	223.754.968	-	-	40	3.089.500	10	3.089.500	25,00	100,00	10	3.089.500	5,00	1,38
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			117.217.920	-	-		198.400.000	-	98.611.255		49,70	-	98.611.255		84,13
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15	117.217.920	-	-	3	16.400.000	1	6.611.255	33,33	40,31	1	6.611.255	6,67	5,64
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-	-		182.000.000		92.000.000		50,55				
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.325.119.891	-	-		212.051.300	-	66.670.000		31,44	-	66.670.000		5,03
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	25	1.141.966.891	-	-	5	182.051.300	2	36.670.000	40,00	20,14	2	36.670.000	8,00	3,21

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5X100	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
		Dinas Operasional atau Lapangan														
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	183.153.000	-	1	30.000.000	1	30.000.000	100,00	100,00	1	30.000.000	20,00	16,38	
Rata-rata capaian kinerja (%)											12,38	20,87			2,48	8,17
Predikat Kinerja											SR	SR			SR	SR
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			5.974.209.098	-	-	670.000.000	-	28.754.500		4,29	-	28.754.500		0,48	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			2.066.412.733	-	-	300.000.000	-	40.370.000		13,46	-	40.370.000		1,95	
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	375	2.066.412.733	-	80	300.000.000	-	40.370.000	0,00	13,46	-	40.370.000	0,00	1,95	
2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.907.796.365	-	-	370.000.000	-	230.200.000		62,22	-	230.200.000		5,89	
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1.000	3.907.796.365	-	200	370.000.000	-	230.200.000	0,00	62,22	-	230.200.000	0,00	5,89	
Rata-rata capaian kinerja (%)											0,00	25,22			0,00	2,61
Predikat Kinerja											SR	SR			SR	SR
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			1.007.341.500	-	-	1.385.000.000	-	-		0,00	-	-			
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			183.153.000	-	-	25.000.000	-	-		0,00	-	-		0,00	
2 19 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	15	183.153.000	-	20	25.000.000	15	-	75,00	0,00	15	-	100,00	0,00	
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			192.310.650	-	-	1.280.000.000	-	-		0,00	-	-		0,00	
2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	10	192.310.650	-	4	1.280.000.000	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100		14 = 6 + 12		15 = 14/5X100	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			631.877.850		-		80.000.000	-	-		0,00	-	-		0,00
2 19 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	10	631.877.850		-	4	80.000.000	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)											12,50	0,00			16,67	0,00
Predikat Kinerja											SR	SR			SR	SR
Rata-rata capaian kinerja (%)											8,29	15,36			6,38	3,60
Predikat Kinerja											SR	SR			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											-	701.924.606		1.367.167.264		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM.....)											8,29	11,52			6,38	3,60
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM.....)											SR	SR			SR	SR

## 31. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
02.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			24.263.466.211		2.896.326.000		2.875.288.450		1.423.961.879	-	49,52	-	4.320.287.879	-	17,81
2.23.01.201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	320.102.000		30.000.000		-		-	-	-	-	30.000.000	-	9,37
2.23.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	160.051.000	3	20.000.000				-		-	3	20.000.000	60,00	12,50
2.23.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	160.051.000	4	10.000.000				-		-	4	10.000.000	80,00	6,25
2.23.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	14.211.793.364		2.399.240.000		2.548.917.150		1.300.819.349	-	51,03	-	3.700.059.349	-	26,04
2.23.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	109/70	12.058.183.010	23/14	2.062.700.000	19/14	2.143.337.150	23/7	1.098.739.349	3,00	51,26	25	3.161.439.349	20,00	26,22
2.23.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran Honorarium Pegawai	60	1.993.559.354	12	326.540.000	12	405.580.000	6	202.080.000	50,00	49,82	18	528.620.000	30,00	26,52
2.23.01.202.03	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	30	160.051.000	6	10.000.000				-		-	6	10.000.000	20,00	6,25
2.23.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	128.512.355		21.050.000				-		-		21.050.000	-	16,38
2.23.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	145	128.512.355	29	21.050.000				-		-		21.050.000	-	16,38
2.18.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1.197.013.239		114.988.000		71.790.000		16.942.530		23,60		131.930.530	-	11,02



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
2.23.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	160.051.000	12	10.000.000				-		-	12	10.000.000	20,00	6,25
2.23.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	122.102.000	12	20.000.000	12	5.630.000	6	2.790.000	50,00	49,56	18	22.790.000	30,00	18,66
2.23.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	160.051.000	12	10.000.000						-		10.000.000	-	6,25
2.23.01.206.03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	160.051.000	12	10.000.000						-		10.000.000	-	6,25
2.23.01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	160.051.000	12	10.000.000						-		10.000.000	-	6,25
2.23.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	160.051.000	12	10.000.000						-		10.000.000	-	6,25
2.23.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	274.656.239	12	44.988.000	12	66.160.000	6	14.152.530	85,71	21,39	18	59.140.530	30,00	21,53
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Mili Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	491.378.270		80.666.700		75.000.000		75.000.000		100,00		155.666.700	-	31,68
2.23.01.207.06	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	457.882.500	1	75.000.000	3	75.000.000	1	75.000.000	33,33	100,00	2	150.000.000	40,00	32,76
2.23.01.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60	14.975.215	12	10.000.000				-		-	12	10.000.000	20,00	66,78
2.23.01.207.11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60	18.520.555	12	7.000.000							12	7.000.000	20,00	37,80
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	288.091.800		18.000.000		6.000.000		3.000.000		50,00		21.000.000	-	7,29
2.23.01.208.02	Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	288.091.800	12	18.000.000	12	6.000.000	6	3.000.000	85,71	50,00	18	21.000.000	30,00	7,29
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.357.660.074		222.381.300		173.581.300		28.200.000		16,25		250.581.300	-	18,46
2.23.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30/60	1.357.660.074	6/12	222.381.300	6	173.581.300	6/3	28.200.000	50,00	16,25	6	250.581.300	30,00	18,46
	Pemeliharaan Barang Milik DAerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah			160.051.000		10.000.000				-		-		10.000.000	-	6,25
2.23.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		60	160.051.000	12	10.000.000				-		-	12	10.000.000	20,00	6,25
Rata-rata capaian kinerja (%).											39,75	22,28		-	16,67	17,09
Pedikat kinerja.											SR	SR		-	SR	SR
02.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan			1.282.071.000		410.000.000		11.736.458.000		669.963.666		5,71		1.079.963.666	-	84,24

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	1.282.071.000		210.000.000		1.109.998.000		541.921.200		48,82		751.921.200	-	58,65
2.23.02.2.01.01.	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO					1	300.000.000	1	300.000.000	100,00		1	300.000.000	20,00	20,00
2.23.02.2.01.02.	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan ditingkat daerah kabupaten/kota sesuai SNP					1	500.000.000					0	-	13,00	14,00
2.18.02.2.01.02	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	55	366.306.000	11	60.000.000	11	70.000.000	6	26.932.400	50,00	38,47	17	86.932.400	34,00	23,73
2.18.02.2.01.08	Pengembangan bahan pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	4.650	549.459.000	650	90.000.000						-	650	90.000.000	13,98	16,38
2.18.02.2.01.09	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	60	366.306.000	12	60.000.000	14.926	239.998.000	22026	214.988.800	50,00	89,58	22038	274.988.800	31,00	75,07
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah kabupaten/Kota		100%	-		200.000.000		10.626.460.000		128.042.466		1,20		328.042.466	-	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	1. Jumlah lomba bercerita; 2. Jumlah lomba pidato bahasa lampung; 3. Pelayanan perpustakaan dengan mobil keliling;	3 kegiatan	1.343.122.000	3	200.000.000	3	200.000.000	1	84.052.466	14,29	42,03	4	284.052.466	16,00	21,15
2.23.02.2.02.02.	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					2	10.426.460.000		43.990.000	-	0,42	0	43.990.000	13,00	23,00
Rata-rata capaian kinerja (%).											28,57	28,62	-	-	18,00	31,87
Pedikat kinerja.											SR	SR	-	-	SR	SR
02.24.02	Program Pengelolaan Arsip			4.826.793.109		283.072.400		303.000.000		116.771.800		38,54		399.844.200	-	8,28
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		100%	1.032.664.000		52.000.000		60.000.000		46.648.000		77,75		98.648.000	-	9,55
2.24.04.2.01.02	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	20	1.032.664.000	3	52.000.000	60	60.000.000		46.648.000	-	77,75	3	98.648.000	60,00	9,55
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		100%	1.032.664.000		52.000.000		52.000.000		28.818.000		55,42		80.818.000	-	7,83
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	7.000	1.032.664.000	1.500	52.000.000	1.500	52.000.000	486	28.818.000	69,43	55,42	7	80.818.000	0,10	7,83
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		100%	2.761.465.109		179.072.400		191.000.000		41.305.800		21,63	0	220.378.200	-	7,98
2.24.02.2.03.01	Penyediaan informasi akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	7.000	177.047.900	1.000	27.000.000	1	31.000.000		27.500.000	-	88,71	1.000	54.500.000	14,29	30,78

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah/kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	180	2.584.417.209	36	152.072.400	3	160.000.000		13.805.800	-	8,63	36	165.878.200	20,00	6,42
Rata-rata capaian kinerja (%).											17,36	51,26			15,73	11,73
Predikat kinerja.											SR	SR			SR	SR
Jumlah anggaran dan realisasi seluruh program									14.914.746.450	#####	2.210.697.345			5.800.095.745		
Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh Program											28,56	14,82			16,80	20,23
Predikat kinerja dari seluruh program											SR	SR			SR	SR

## 32. Dinas Perikanan

No	urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah padaTahun (periode 2021/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan anggaran RPKD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp. (000)
1	2	3	4	5			6			RK		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		
1	URUSAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran					3.246.221.000		3.403.333.772		1.628.368.513								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1	3.500.000				-								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5	Dok	60.000.000	1	1.500.000			-	-	0,00	0,00	2	0,00	50,00	0,00		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5	Dok	60.000.000	3	2.000.000			-	-	0,00	0,00	2	0,00	50,00	0,00		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.673.390.000		2.882.833.772		1.429.224.613								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		72	bln	12.704.437.570	12	2.459.580.000	12	2.676.523.772	6	1.338.434.613	50,00	50,01	18	3.798.014.613	25,00	29,90		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		72	bln	1.074.300.000	12	201.310.000	12	206.310.000	6	90.790.000	50,00	44,01	18	292.100.000	25,00	27,19		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5	laporan	60.000.000	1	11.500.000			-	-	-	-	1	11.500.000	20,00	19,17		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5	laporan	60.000.000	1	1.000.000			-	-	-	-	1	1.000.000	20,00	1,67		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		120	stel	105.000.000									-	-				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				686.720.000		43.831.000				-								
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		72	bln	133.000.000	12	9.111.000			-	-	-	-	12	9.111.000	16,67	6,85		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	urusan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (periode 2021/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5			6		RK		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		48	bln	67.000.000					-	-	-	-	-	-		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		72	bln	44.720.000	12	6.720.000			-	-	-	-	12	6.720.000	16,67	15,03
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		48	bln	132.000.000					-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		48	bln	67.000.000					-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60	bln	158.000.000	12	28.000.000			-	-	-	-	12	28.000.000	20,00	17,72
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		48	bln	85.000.000									-	-	0,00	0,00
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		28	unit	450.000.000									-	-	0,00	0,00
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					12	278.000.000		278.000.000		141.843.560						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		72	bln	133.000.000	12	18.000.000	2	18.000.000	-	3.843.560	0,00	21,35	12	21.843.560	16,67	16,42
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		72	bln	1.360.000.000	20	260.000.000	19	260.000.000	-	138.000.000	0,00	53,08	20	398.000.000	27,78	29,26
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						247.500.000		242.500.000		57.300.340						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		72	bln	1.122.500.000	12	217.500.000	8	217.500.000	-	43.300.340	0,00	19,91	12	260.800.340	16,67	23,23
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		72	bln	1.360.000.000	12	30.000.000	2	25.000.000	2	14.000.000	100,00	56,00	14	44.000.000	19,44	3,24
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		33,33	40,73			17,05	9,98
											Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR
2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>						270.000.000		125.000.000		-						
		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>						270.000.000				-						
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		4	buku	760.000.000					-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		57	unit	670.083.880	14	270.000.000			-	-	-	-	14	270.000.000	24,56	40,29
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		9	unit	250.000.000					-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
		<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								125.000.000								
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		3000	org	207.691.558	500	61.320.000	500	105.000.000					500	61.320.000	16,67	29,52

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	urusan				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah padaTahun (periode 2021/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2				3	4	5			6		RK		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
					Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		10	kub	40.000.000			10	20.000.000					-	-	0,00	0,00
					Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		5	kub	10.000.000									-	-	0,00	0,00
					Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																
					Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		1	dok	30.000.000									-	-	0,00	0,00
					Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		4	Unit	105.000.000									-	-	0,00	0,00
					Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
					Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT		30	Dok	45.000.000									-	-	0,00	0,00
					Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT		30	Dok	45.000.000									-	-	0,00	0,00
					Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
					Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		30	Dok	45.000.000									-	-	0,00	0,00
					Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		30	Dok	45.000.000									-	-	0,00	0,00
					Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
					Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		30	Dok	45.000.000									-	-	0,00	0,00
					Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT		30	Dok	45.000.000									-	-	0,00	0,00
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)		-	-			2,94	4,99
														Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	urusan				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah padaTahun (periode 2021/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
							K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2				3	4	5			6		RK		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
3					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1	230.000.000		30.000.000		2.700.000				232.700.000		
					Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					1	100.000.000		30.000.000		2.700.000			1	102.700.000		
					Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing													-	-	0,00	0,00
					Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		6	Dok	449.050.000	1	100.000.000	30	30.000.000	-	2.700.000	0,00	9,00	1	102.700.000	16,67	22,87
					Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						15.000.000				-						
					Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil		24	klompok	760.000.000									-	-	0,00	0,00
					Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		130	pembudidaya	138.000.000	100	15.000.000		-	-	-	-	100	15.000.000	76,92	10,87	
					Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota									-	-						
					Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		4	Dok	78.000.000					-	-			-	-	0,00	0,00
					Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		4	Dok	10.000.000						-			-	-	0,00	0,00
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						115.000.000				-						
					Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		5	Dok	138.000.000	1	20.000.000				-	-	-	1	20.000.000	20,00	14,49
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		29	paket	1.408.500.000	3	80.000.000				-	-	-	3	80.000.000	10,34	5,68
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		4	paket	143.000.000						-	-		-	-	0,00	0,00
					Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		6	Dok	753.000.000	1	15.000.000				-	-		1	15.000.000	16,67	1,99
					Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		115	Pembudidaya	153.112.000						-	-		-	-	0,00	0,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	urusan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah padaTahun (periode 2021/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			
								K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp. (000)
1	2					3	4	5			6		RK		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0,00	9,00						
															Predikat Kinerja		SR	SR						
4						PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					150.000.000		110.000.000		14.700.000									
						Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil				1	20.000.000													
						Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	dok	85.000.000	1	20.000.000				-	-	-	-	1	20.000.000	20,00	23,53		
						Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					45.000.000													
						Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	60	Poklaksar	150.000.000	10	45.000.000								10	45.000.000	16,67	30,00		
						Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					85.000.000		110.000.000		14.700.000									
						Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1500	org	280.080.000	300	65.000.000	21	110.000.000		14.700.000	0,00	13,36	300	79.700.000	20,00	28,46			
						Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8	Kelompok	217.207.028	1	20.000.000							1	20.000.000	12,50	9,21			
															Rata-rata Capaian Kinerja (%)		-	13,36						
															Predikat Kinerja									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														3.668.333.772		1.645.768.513								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																	8,33	15,77			12,52	10,71		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																	SR	SR			SR	SR		

33. Dinas Pariwisata

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)		Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir Periode Renstra SKPD) (Anggaran Renstra Untuk 5 tahun)		Realisasi Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	26	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perkantoran		514	22.539.702.020	62	3.499.211.228	52	3.514.037.770	26	1.621.087.194	50	46	88	5.120.298.422	17	23
3	26	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	374.000.000	4	32.700.000	-	-	-	-	-	-	4	32.700.000	31	9
3	26	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	65.000.000	2	25.700.000	-	-	-	-	-	-	2	25.700.000	15	40
3	26	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
3	26	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Tersedianya anggaran Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	5	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
3	26	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Tersedianya anggaran Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	62.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
3	26	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Tersedianya anggaran Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5	62.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
3	26	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Tersedianya anggaran Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	50.000.000	2	7.000.000	-	-	-	-	-	-	2	7.000.000	20	14
3	26	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	170	15.972.679.420	24	2.711.610.978	24	2.905.837.770	12	1.380.557.968	50	48	36	4.092.168.946	21	26
3	26	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tersedianya Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	60	14.839.979.420	12	2.542.110.978	12	2.704.307.770	6	1.288.446.568	50	48	18	3.830.557.546	30	26
3	26	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	1.004.700.000	12	169.500.000	12	201.530.000	6	92.111.400	50	46	18	261.611.400	30	26
3	26	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan akhir tahun	10	62.000.000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
3	26	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD Berupa Laporan Fungsional, Laporan Konsolidasi, Laporan Keuangan Per Semester	Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD Berupa Laporan Fungsional, Laporan Konsolidasi, Laporan Keuangan Per Semester	30	41.000.000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
3	26	01	2.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	25.000.000	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
3	26	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersedianya Penyediaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
3	26	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	36	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
3	26	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Anggaran Pelayanan Umum Perangkat Daerah	145	861.860.000	4	164.368.950	-	-	-	-	-	-	4	164.368.950	3	19
3	26	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5	98.343.200	1	31.651.800	-	-	-	-	-	-	1	31.651.800	20	32
3	26	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	165.281.950	1	25.799.300	-	-	-	-	-	-	1	25.799.300	20	16
3	26	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5	37.778.850	1	5.778.850	-	-	-	-	-	-	1	5.778.850	20	15
3	26	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	5	118.560.000	1	5.455.000	-	-	-	-	-	-	1	5.455.000	20	5

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir Periode Renstra SKPD) (Anggaran Renstra Untuk 5 tahun)		Realisasi Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1						2	3	4		5		6		12=8+9+10+11		13=12/6*100		14=5+12		15=14/4*100	
3	26	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	335.896.000	1	95.684.000			-	-	-	-	1	95.684.000	20	28
3	26	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10	1.096.500.000	2	21.500.000			-	-	-	-	2	21.500.000	20	2
3	26	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	286.500.000	2	21.500.000			-	-	-	-	2	21.500.000	20	8
3	26	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120	1.996.400.000	24	376.700.000	24	408.200.000	12	212.329.226	-	-	36	589.029.226	30	30
3	26	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	282.200.000	12	33.600.000	12	33.600.000	6	16.529.226	50,00	49,19	18	50.129.226	30	18
3	26	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	1.685.200.000	12	343.100.000	12	374.600.000	6	195.800.000	50,00	52,27	18	538.900.000	30	32
3	26	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20	2.223.262.600	4	192.331.300	4	200.000.000	2	28.200.000	-	-	6	220.531.300	30	10
3	26	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20	980.662.600	4	192.331.300	4	200.000.000	2	28.200.000	-	-	6	220.531.300	30	22
Rata-rata capaian kinerja (%)																40,00	38,96	16	980.345.894	30,00	24,82
Predikat Kinerja																SR	SR	SR	ST	SR	SR
3	26	02	06			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	15	21.351.144.000	2	371.144.000	1	705.457.000	1	61.040.000	-	-	2	230.884.000	40	19
3	26	02	2.01	01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota	15	4.304.844.000	2	204.844.000	1	705.457.000	1	61.040.000	-	-	2	230.884.000	40	19
3	26	02	2.01	03		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota	Jumlah Pokdarwis yang Terbina	5	1.219.844.000	1	169.844.000	1	705.457.000	1	61.040.000	-	-	2	230.884.000	40	19
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-	2	230.884.000,00	40,00	18,93
Predikat Kinerja																SR	SR	SR	ST	SR	SR
3	26	03	15			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Jumlah Destinasi Wisata yang dipromosikan	131	5.600.000.000	26	1.675.000.000	12	350.000.000	6	62.848.200	-	-	32	1.737.848.200	24	31
3	26	03	2.01	01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	131	5.600.000.000	26	1.675.000.000	12	350.000.000	6	62.848.200	-	-	32	1.737.848.200	24	31
3	26	03	2.01	01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah bahan dan sarana promosi pariwisata	5	900.000.000	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	1	50.000.000	20	6
3	26	03	2.01	02	01	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam even pemasaran pariwisata	60	1.300.000.000	12	1.490.000.000	12	350.000.000	3	62.848.200	-	-	15	1.552.848.200	25	119
3	26	03	2.01	03	01	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata	Jumlah sarana data dan informasi yang dikelola	6	200.000.000	1	85.000.000	-	-	-	-	-	-	1	85.000.000	17	43
3	26	03	2.01	04		Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen dan implementasi kerjasama dan kemitraan pariwisata	60	3.000.000.000	12	50.000.000	-	-	-	-	-	-	12	50.000.000	20	2
3	26	03	2.01	05		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi	1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan						Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)						Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir Periode Rensta SKPD) (Anggaran Renstra Untuk 5 tahun)		Realisasi Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
																		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1						2						3						4		5		6		12=8+9+10+11		13=12/6*100		14=5+12		15=14/4*100	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		-	-	6	347.569.640,00		16,33	33,83							
Predikat Kinerja																		SR	SR	SR	ST		SR	SR							
3	26	05	16			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Persentase Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikasi	600	5.523.780.000	130	522.760.000	100	420.760.000	1	107.737.600	-	-	131	630.497.600	22	11										
3	26	05	2.01			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	600	4.453.780.000	130	522.760.000	100	420.760.000	1	107.737.600	-	-	131	630.497.600	22	14										
3	26	05	2.01	01		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Tersedianya media pengembangan potensi, bakat, kreatifitas generasi muda dalam mempromosikan potensi wisata	450	2.400.000.000	100	450.000.000	100	420.760.000	1	107.737.600	-	-	101	557.737.600	22	23										
3	26	05	2.01	02		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Peningkatan pemahaman pengelola wisata tentang pelayanan thd wisatawan dan pengelola usaha wisata	150	442.760.000	30	72.760.000			-	-	-	-	30	72.760.000	20	16										
3	26	05	2.01	04		Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Pelatihan dan Ujian kompetensi tenaga kerja dibidang pariwisata	300	430.000.000	30	-			-	-	-	-	30	-	10	-										
3	26	05	2.01	05		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah event Ekonomi kreatif yang terlaksana	3	801.020.000		-		-	-	-	-	-	0	-	-	-										
3	26	05	2.01	06		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah event Ekonomi kreatif yang terlaksana	4	200.000.000	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	25	-										
Rata-rata capaian kinerja (%)																		-	-	32	126.099.520,00		15,49	7,93							
Predikat Kinerja																		SR	SR	SR	ST		SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											6.362.555.228		4.990.254.770	34	1.852.712.994	10	9	51	1.602.793.644	25	20										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SE;URUH PROGRAM(PROGRAM 1 s/d PROGRAM.....)																		35,71	32,95	36	8.013.968,22		17,63	14,36							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM(PROGRAM 1 s/d PROGRAM.....)																		SR	SR	SR	ST		SR	SR							

## 34. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)		Target RPJMD Perangkat Daerah ( periode Tahun 2021 s/d 2026 )		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2	3				4		5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
27	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah dengan maksimal		93.031.632.830		22.611.488.791		11.587.607.666		5.773.601.530	27,008004	49,83		28.385.090.321	38,03	28,91
27	01	2.0	1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Proses Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku		400.594.471		97.142.800		10.000.000		10.000.000	50,00	100,00		107.142.800	47,92	36,87
27	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	8	74.841.417	3	29.700.000	2	10.000.000	2	10.000.000	100,00	100,00	5	39.700.000	62,50	53,05
27	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD, Dokumen SAKIP, Laporan DAK, Laporan Potensi	288	325.753.054	96	67.442.800			0	-			96	67.442.800	33,33	20,70

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah ( periode Tahun 2021 s/d 2026 )		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2				3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pertanian, Laporan Evaluasi dan Konsolidasi, serta Laporan SIAP														
Rata-rata capaian kinerja (%)													50,00	100,00			47,92	36,87	
Predikat kinerja													SR	ST			SR	SR	
27	01	2.0	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		72.805.747.602		17.978.231.526		9.479.324.866		4.719.108.324	28,83	49,78		22.697.339.850	37,22	31,58
27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan TPP Pegawai Dinas Pertanian	1372	71.109.239.275	28	17.549.871.526	1302	9.209.944.866	475	4.619.648.524	36,48	50,16	503	22.169.520.050	36,66	31,18
27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	72	1.619.352.227	24	408.360.000	12	259.380.000	6	94.380.000	50,00	36,39	30	502.740.000	41,67	31,05
27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun	12	77.156.100	4	20.000.000	2	10.000.000	0	5.079.800	0,00	50,80	4	25.079.800	33,33	32,51
Rata-rata capaian kinerja (%)													28,83	49,78			37,22	31,58	
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR	
27	01	2.0	3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		233.011.422		60.400.000				-	0,00			60.400.000	33,33	25,92
27	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang dan Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	72	233.011.422	24	60.400.000			0	-			24	60.400.000	33,33	25,92
Rata-rata capaian kinerja (%)													-				33,33	25,92	
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR	
27	01	2.0	5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		115.734.150		30.000.000				-	0,00			30.000.000	33,33	25,92
27	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Data dan Informasi mengenai Jabatan dan Kinerja ASN pada Dinas TPH	648	77.156.100	216	20.000.000			0	-			216	20.000.000	33,33	25,92
27	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Evaluasi Kinerja ASN Dinas TPH	648	38.578.050	216	10.000.000			0	-			216	10.000.000	33,33	25,92
Rata-rata capaian kinerja (%)													-				33,33	25,92	
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR	
27	01	2.0	6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.209.570.310		766.951.736		471.742.800		275.164.912	49,02	58,33		1.042.116.648	39,73	33,29
27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	73	34.951.713	24	9.060.000	1	4.530.000	1	4.530.000	100,00	100,00	25	13.590.000	34,25	38,88
27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	75	430.450.024	24	106.882.000	3	53.642.500	2	29.762.600	66,67	55,48	26	136.644.600	34,67	31,74
27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga untuk Mendukung Kegiatan Kantor	73	115.734.150	24	30.000.000	1	15.000.000	0	8.912.400	0,00	59,42	24	38.912.400	32,88	33,62
27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan Minum Rapat dan Jamuan Tamu	66	640.056.143	22	122.506.000	11	49.740.000	5	24.279.500	45,45	48,81	27	146.785.500	40,91	22,93
27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedainya Cetak, Fotocopy dan Penjilidan	72	355.662.616	24	94.938.800	12	78.842.300	6	36.993.600	50,00	46,92	30	131.932.400	41,67	37,09
27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Media Cetak	72	259.244.496	24	67.200.000			0	-			24	67.200.000	33,33	25,92
27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Keikutsertaan Rapat/Rapat Koordinasi dan Konsultasi	72	814.861.003	24	209.114.936	12	119.988.000	6	50.686.812	50,00	42,24	30	259.801.748	41,67	31,88
27	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Informasi Pembangunan Pertanian Daerah	65	558.610.164	14	127.250.000	30	150.000.000	24	120.000.000	80,00	80,00	38	247.250.000	58,46	44,26
Rata-rata capaian kinerja (%)													49,02	58,33			39,73	33,29	
Predikat kinerja													SR	R			SR	SR	

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)		Target RPJMD Perangkat Daerah ( periode Tahun 2021 s/d 2026 )		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2	3			4		5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
27	01	2.0	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			13.735.328.922		3.078.274.729		1.336.000.000		691.498.294	51,92	51,76		3.769.773.023	41,99	24,60
27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Listrik Kantor	72	277.761.960	24	52.074.729	12	36.000.000	6	7.998.294	50,00	22,22	30	60.073.023	41,67	21,63
27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji THLS, Honorarium Operator Komputer, Sespri, dan Tenaga Supir	78	13.457.566.962	26	3.026.200.000	13	1.300.000.000	7	683.500.000	53,85	52,58	33	3.709.700.000	42,31	27,57
Rata-rata capaian kinerja (%)														51,92	51,76			41,99	24,60
Predikat kinerja														R	R			SR	SR
27	01	2.0	9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.531.645.953		600.488.000	9	290.540.000,00		77.830.000	11,11	26,79		678.318.000	32,72	24,18
27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Dana Service, BBM, Suku Cadang	81	1.610.402.119	24	466.368.000	9	290.540.000	2	77.830.000	22,22	26,79	26	544.198.000	32,10	33,79
27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	6	921.243.834	2	134.120.000			0	-			2	134.120.000	33,33	14,56
Rata-rata capaian kinerja (%)														11,11	26,79			32,72	24,18
Predikat kinerja														SR	SR			SR	SR
27	02			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian			4.970.866.614		679.118.000		284.124.000		249.234.400	56,25	87,72		928.352.400	30,06	15,20
27	02	2.0	1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			3.561.224.667		268.435.000	4	74.094.000		72.494.000	75,00	97,84		340.929.000	38,24	9,57
27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pemeliharaan Tanaman Hortikultura di Hortipark Kab. Pesawaran, Tersedianya Demplot Percontohan Budidaya Jamur Tiram, Tersedianya Demplot Percontohan Kebun Hidroponik Tanaman Hortikultura, Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	34	3.561.224.667	10	268.435.000	4	74.094.000	3	72.494.000	75,00	97,84	13	340.929.000	38,24	9,57
Rata-rata capaian kinerja (%)														75,00	97,84			38,24	9,57
Predikat kinerja														S	ST			SR	SR
27	02	2.0	2	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			1.409.641.947		410.683.000		210.030.000		176.740.400	37,50	84,15		587.423.400	21,88	20,84
27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Hortikultura, Pengembangan Padi Bebas Residu, Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	16	1.409.641.947	4	410.683.000	4	210.030.000	3	176.740.400	75,00	84,15	7	587.423.400	43,75	41,67
Rata-rata capaian kinerja (%)														37,50	84,15			21,88	20,84
Predikat kinerja														SR	T			SR	SR
27	03			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian			79.475.722.001		18.895.256.650		3.301.967.000		32.612.200	0	0,99		18.927.868.850	43,95	38,64



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah ( periode Tahun 2021 s/d 2026 )		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
27 03 2.0 1	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian		335.780.500		50.000.000					-			50.000.000	60,00	57,45
27 03 2.01 02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah Penyusunan Perda LP2B	1	50.000.000	1	50.000.000			0		-	0,00	1	50.000.000	100,00	100,00
27 03 2.01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah luas lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B yang dikelola untuk pertanian	42260	335.780.500	845 2	50.000.000			0		-		845 2	50.000.000	20,00	14,89
Rata-rata capaian kinerja (%)											0	0			60,00	57,45
Predikat kinerja											SR	SR			R	R
27 03 2.0 2	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian dengan maksimal		79.139.941.501		18.845.256.650		3.301.967.000		32.612.200	0,00	0,99		18.877.868.850	27,89	19,84
27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terbangunnya Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Terlaksananya Pembangunan Irigasi Tanah Dangkal, Terlaksananya rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (DAK)	118	30.479.232.656	34	6.367.387.500	5	732.253.200	0	7.394.000	-	1,01	34	6.374.781.500	28,81	20,92
27 03 2.02 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Embung Pertanian (DAK)	29	4.920.742.154	5	637.246.500	1	133.042.000	0	2.885.600	-	0,00	5	640.132.100	17,24	13,01
27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Tersedianya Prasarana Transportasi pada Kawasan Pertanian	111	18.016.497.158	27	4.589.836.900	16	709.642.000	0	12.302.800	-	1,73	27	4.602.139.700	24,32	25,54
27 03 2.02 04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit	Terlaksananya Pembangunan DAM Parit	17	4.919.796.992	5	637.149.500	7	165.543.800	0	3.543.800	-	0,00	5	640.693.300	29,41	13,02
27 03 2.02 05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Terlaksananya Pembangunan Long Storage	13	4.944.247.760	5	640.313.000			0		-	0,00	5	640.313.000	38,46	12,95
27 03 2.02 06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Terlaksananya Pembangunan Pintu Air	12	1.854.531.735	4	229.086.850			0		-	0,00	4	229.086.850	33,33	12,35
27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Pertanian, Terlaksananya rehabilitasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) (DAK), Terlaksananya revitalisasi Jaringan Irigasi Desa, Terlaksananya Sarana Prasarana Pasca Panen Tanaman Pangan, Terlaksananya revitalisasi Jaringan Irigasi Tersier	355	14.004.893.046	84	5.744.236.400	1	1.561.486.000	0	6.486.000	-	0,42	84	5.750.722.400	23,66	41,06
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	0,99			27,89	19,84
Predikat kinerja											SR	SR			SR	SR
27 05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		2.148.797.385		474.352.300		139.572.000		124.372.000	25,00	89,11		598.724.300	25,01	27,86
27 05 2.0 1	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian untuk semua komoditas		2.148.797.385		474.352.300		139.572.000		124.372.000	25,00	89,11		598.724.300	25,01	27,86
27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian OPT Tanaman, Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	10012	2.148.797.385	4	474.352.300	10000	139.572.000	## #	124.372.000	25,00	89,11	250 4	598.724.300	25,01	27,86
Rata-rata capaian kinerja (%)											25,00	89,11			25,01	27,86
Predikat kinerja											SR	T			SR	SR

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah ( periode Tahun 2021 s/d 2026 )		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
27 07	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kualitas Program Penyuluhan Pertanian		18.843.016.448		4.113.417.100		1.910.864.200		228.857.200	22,73	11,98		4.342.274.300	64,26	23,02
27 07	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Tercapainya Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian dengan maksimal		18.843.016.448		4.113.417.100		1.910.864.200		228.857.200	22,73	11,98		4.342.274.300	64,26	23,02
27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terbayarnya BOP Penyuluh, Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Penyuluh (IPDMIP), Terlaksananya Rekrutmen Staf Lapangan (IPDMIP), Terselenggaranya Pertemuan Bulanan Penyuluh Pertanian (IPDMIP), Terlaksananya dukungan operasional dalam mendukung terlaksananya konstratani (DAK non fisik), Tersedianya peralatan pendukung manajemen IPDMIP, Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	763	6.155.899.439	275	1.422.688.000	11	973.750.000	0	1.855.000	-	0,19	275	1.424.543.000	36,04	23,14
27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Forum Temu Tani (IPDMIP), Terlaksananya Koordinasi/Konsultasi, Monitoring dan Supervisi Sekolah Lapang (IPDMIP), Terlaksananya Pelatihan bagi Ketua Kelompok menjadi Penyuluh Swadaya (IPDMIP), Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Petani (IPDMIP), Terlaksananya pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Petani, Terlaksananya pendampingan penyusunan RDK/RDKK, Partisipasi Rembug KTNA Nasional dan KTNA EXPO, Terselenggaranya kunjungan ke desa-desa per kecamatan (IPDMIP), Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	316	3.287.806.596	224	597.093.500	11	748.212.100	5	143.130.100	45,45	19,13	229	740.223.600	72,47	22,51
27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya demonstrasi peralatan pertanian (IPDMIP), Terlaksananya demonstrasi peralatan pertanian lainnya (IPDMIP), Terlaksananya kegiatan lomba-lomba, Terlaksananya pameran hasil produksi pertanian, Terlaksananya pembinaan dan supervisi bagi penyuluh, Terlaksananya penyusunan program penyuluhan tingkat desa kecamatan dan kabupaten, Tersedianya buku catatan usaha tani (IPDMIP), Terlaksananya dukungan operasional dalam mendukung terlaksananya konstratani (DAK non fisik), Tersedianya peralatan pendukung manajemen IPDMIP, Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1257	4.748.664.762	1137	773.907.000	11	99.902.100	5	83.872.100	45,45	83,95	1142	857.779.100	90,85	18,06
27 07 2.01 05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya sekolah lapang bagi petani (IPDMIP), Terlaksananya Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Tani Tingkat Kabupaten/Kota	26	4.650.645.652	15	1.319.728.600	11	89.000.000	0	-	-	0,00	15	1.319.728.600	57,69	28,38
Rata-rata capaian kinerja (%)											22,73	11,98			64,26	23,02
Predikat kinerja											SR	SR			R	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								17.224.134.866		6.408.677.330						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											26,20	37,21			40,26	26,73
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											SR	SR			SR	SR

### 35. Dinas Perkebunan dan Peternakan

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah ( periode Tahun 2021 s/d 2026 )			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
2						3	4	5			6		7		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 X 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 X 100%	
								K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	27					DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN																
3	27	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4.844.530.208			2.007.036.011						
3	27	01	2	02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		100%	62.210.518.370	1,00	11.075.780.438	1,00	4.268.200.708	40,12%	1.712.256.402	40,12%	40,12%		12.788.036.840	20,56%	20,56%	
3	27	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	84	bulan	60.929.179.982	28	10.745.508.438	14	4.067.520.708	800,00%	1.301.266.752	57,14%	31,99%	36	12.046.775.190	42,86%	19,77%
3	27	01	2	02	02	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	72	bulan	1.281.338.388	24	330.272.000	12	200.680.000	600,00%	410.989.650	50%	204,80%	30	741.261.650	41,67%	57,85%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	53,57%	118,40%	33	12.788.036.840	42,26%	38,81%
Predikat Kinerja																	R	ST			SR	SR
3	27	01	2	08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100%	10.870.130.550	1,00	2.185.418.929	1,00	337.800.000	67,08%	226.584.609	67,08%	67,08%		2.412.003.538	22,19%	22,19%	
3	27	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik	72	Bulan	219.783.600	24	42.348.929	12	36.000.000	600,00%	7.584.609	50,00%	21,07%	30	49.933.538	41,67%	22,72%
3	27	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pelayanan umum	78	Bulan	10.650.346.950	26	2.143.070.000	13	301.800.000	700,00%	219.000.000	53,85%	72,56%	33	2.362.070.000	42,31%	22,18%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	51,92%	46,82%	32	2.412.003.538	41,99%	22,45%
Predikat Kinerja																	R	SR			SR	SR
3	27	01	2	09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100%	1.698.438.820	1,00	448.925.000	1,00	238.529.500	28,59%	68.195.000	28,59%	28,59%		517.120.000	30,45%	30,45%	
3	27	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya BBM dan pelumas kendaraan dinas/operasional	72	Bulan	1.698.438.820	24	448.925.000	12	238.529.500	600,00%	68.195.000	50,00%	28,59%	30	517.120.000	42%	30,45%
27																	50,00%	28,59%	30	517.120.000	41,67%	30,45%
Predikat Kinerja																	SR	SR			SR	SR
3	27	02				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			2.121.000.000	1,00	1.452.640.900		902.370.000	6,80%	61.336.800		6,80%		1.641.097.700	77,37%	77,37%	
3	27	02	1	02		KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN		100%	1.956.000.000	1,00	1.137.640.900	1,00	587.370.000	5,94%	34.868.400	5,94%	5,94%		1.172.509.300	59,94%	59,94%	
3	27	02	1	02	01	Pengawasan Penggunaan SaranaPendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terawasinya penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan snesiafik lokasi	5	laporan	268.000.000	1	442.120.000	1	442.120.000	0,00%	26.468.400	0,00%	5,99%	1	468.588.400	20,00%	174,85%

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah ( periode Tahun 2021 s/d 2026 )			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
2						3	4	5			6		7		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 X 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 X 100%	
								K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	27	02	1	02	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	terpeliharanya sarana pendukung pertanian	300	Ha	1.688.000.000	100	695.520.900	50	145.250.000	0,00%	8.400.000	0	5,78%	100	703.920.900	33,33%	41,70%
3	27	02	2	03		<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>100%</b>	<b>165.000.000</b>		<b>1,00</b>	<b>315.000.000</b>	<b>1,00</b>	<b>315.000.000</b>	<b>3,41%</b>	<b>10.741.800</b>	<b>3,41%</b>	<b>3,41%</b>		<b>325.741.800</b>	<b>197,42%</b>	<b>197,42%</b>
3	27	02	2	3	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tana man Skala Kecil	50	Ha	165.000.000	10	315.000.000	10	315.000.000	0,00%	10.741.800	0	3,41%	10	325.741.800	20,00%	197,42%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																	<b>0,00%</b>	<b>5,06%</b>	<b>37</b>	<b>1.641.097.700</b>	<b>24,44%</b>	137,99%
<b>Predikat Kinerja</b>																	SR	SR			SR	ST
3	27	03				<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>				1.500.000.000	1,00	314.763.000		612.120.000	0,00%	3.030.000		0,50%		317.793.000		21,19%
3	27	03	2	02		<b>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</b>		<b>100%</b>	<b>1.500.000.000</b>		<b>1,00</b>	<b>314.763.000</b>	<b>1,00</b>	<b>612.120.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.030.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,50%</b>	<b>1</b>	<b>317.793.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,19%</b>
3	27	03	2	02	03	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terpeliharanya jalan usaha tani	14	Unit	1.500.000.000	2	314.763.000	2	612.120.000	0,00%	3.030.000	0,00%	0,50%	2	317.793.000	14,29%	21,19%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																	<b>0,00%</b>	<b>0,50%</b>	<b>2</b>	<b>317.793.000</b>	<b>14,29%</b>	21,19%
<b>Predikat Kinerja</b>																	SR	SR			SR	SR
3	27	04				<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>				1.318.000.000	1,00	562.988.000		649.945.000	#DIV/0!	265.018.800		40,78%		828.006.800		62,82%
3	27	04	2	01		<b>KEGIATAN PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>100%</b>	<b>882.500.000</b>		<b>1,00</b>	<b>332.633.000</b>	<b>1,00</b>	<b>557.845.000</b>	<b>42,38%</b>	<b>236.388.800</b>	<b>42,38%</b>	<b>42,38%</b>		<b>569.021.800</b>	<b>64,48%</b>	<b>64,48%</b>
3	27	04	2	01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Tertanggulangnya penyakit Hewan dan Zoonosis	6000	Ekor	882.500.000	2000	332.633.000	1000	557.845.000	0,00%	236.388.800	0%	42,38%	2000	569.021.800	33,33%	64,48%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																	<b>0,00%</b>	<b>42,38%</b>	<b>2000</b>	<b>569.021.800</b>	<b>33,33%</b>	64,48%
<b>Predikat Kinerja</b>																	SR	SR			SR	R
3	27	04	2	03		<b>KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH/ KABUPATEN/ KOTA</b>		<b>100%</b>	<b>435.500.000</b>		<b>1,00</b>	<b>230.355.000</b>	<b>1,00</b>	<b>92.100.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>230.355.000</b>	<b>52,89%</b>	<b>52,89%</b>
3	27	04	2	03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Terbayarnya BOP Petugas Paramedik & Petugas IB	96	Orang	435.500.000	32	230.355.000	16	92.100.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	32	230.355.000	33,33%	52,89%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>32</b>	<b>230.355.000</b>	<b>33,33%</b>	52,89%
<b>Predikat Kinerja</b>																	SR	SR			SR	R
3	27	07				<b>PROGRAM PENYULUH PERTANIAN</b>				289.715.000	1,00	115.800.000		115.800.000	0,00%	28.630.000		24,72%		144.430.000		49,85%

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah ( periode Tahun 2021 s/d 2026 )		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		
2						3	4	5		6		7		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 12 / 7 X 100%		14 = 6 + 12		15 = 14 / 5 X 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
3	27	07	2	01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		100%	289.715.000	1,00	115.800.000	1,00	115.800.000	24,72%	28.630.000	24,72%	24,72%		144.430.000	49,85%	49,85%	
3	27	07	2	01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	16	unit	289.715.000	4	115.800.000	4	115.800.000	0,00%	28.630.000	0%	24,72%	4	144.430.000	0,25	49,85%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	24,72%	4	144.430.000	25,00%	49,85%	
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR	
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program												7.124.765.208	3,94	2.336.421.611								
														TOTAL RATA-ATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM								
														SR	SR					SR	R	

## 36. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023 (kosongkan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
2						3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
3	30	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penerapan Kepatuhan Pelayanan Publik		37.868.638.000	100	5.782.979.798	100	5.174.494.750		2.466.160.199,00						
3	30	01	2.01			Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten			2	31.411.000	2	30.496.500	2	13.758.200,00		45,11%	2	45.169.200		
3	30	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja	10	Dokumen	2	111.000.000	1	12.476.500	1	6.958.200,00	100,00 %	55,77%	3	29.158.200	30,00%	26,27%
3	30	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP, LKPJ, dan LPPD	15	Laporan	3	9.211.000	4	18.020.000	2	6.800.000,00	50,00%	37,74%	5	16.011.000	33,33%	21,35%
3	30	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten			3	3.532.433.098	4	3.859.326.350	3	1.823.584.869,00		47,25%		5.356.017.967		
3	30	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	14	3.318.918.098	14	3.613.504.750	3	1.699.039.369,00	21,43%	47,02%	17	5.017.957.467	28,33%	27,28%
3	30	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	60	Bulan	12	204.960.000	12	224.040.000	3	109.980.000,00	25,00%	49,09%	15	314.940.000	25,00%	41,99%
						Koordinas dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD		1	Laporan	0	-	1	11.781.600	0	4.565.500,00	0,00%	38,75%	0	4.565.500	0,00%	8,30%
3	30	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	20	Laporan	2	8.555.000	4	10.000.000	1	10.000.000,00		100,00%	3	18.555.000	15,00%	33,74%

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan						Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)						Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)						Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu						Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023 (kosongkan)						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)					
																		K			Rp.			K	Rp.			K	Rp.			K	Rp.			K	Rp.			K	Rp.			K	Rp.			K	Rp.			K	Rp.						
2						3						4						5						K	6			K	7			12=8+9+10+11						K	13=12/7*100			K	14=6+12			K	15=14/5*100												
3	30	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten									7	308.605.700			7	210.441.900			7	124.667.130,00				59,24%			14	433.272.830			-	-																						
3	30	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan						60	Bulan	14.042.000			12	2.300.000			1	5.810.000			0	1.900.000,00			0,00%	32,70%			12	4.200.000			20,00%	29,91%																				
3	30	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60	Bulan	305.255.000			12	44.785.000			5	27.254.300			1	12.460.500,00			20,00%	45,72%			13	57.245.500			21,67%	18,75%																				
3	30	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						60	Bulan	70.276.000			12	16.669.700			1	9.475.600			0	3.553.200,00			0,00%	37,50%			12	20.222.900			20,00%	28,78%																				
3	30	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan konsumsi makanan minuman rapat dan tamu kantor						60	Bulan	406.905.000			12	28.420.000			1	25.425.000			0	12.325.000,00			0,00%	48,48%			12	40.745.000			20,00%	10,01%																				
3	30	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						60	Bulan	64.647.000			12	23.569.000			1	10.069.000			0	5.000.000,00			0,00%	49,66%			12	28.569.000			20,00%	44,19%																				
3	30	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Surat Kabar						60	Bulan	61.723.000			12	12.110.000			1	12.110.000			0	6.000.000,00			0,00%	49,55%			12	18.110.000			20,00%	29,34%																				
3	30	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah						60	Bulan	903.760.000			12	180.752.000			12	120.298.000			3	83.428.430,00			25,00%	69,35%			15	264.180.430			25,00%	29,23%																				
3	30	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten									1	750.000.000			1	8.500.000			1	8.500.000,00			100,00 %	1,00			2	758.500.000			-	-																						
3	30	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor						20	Unit	366.306.000			1	750.000.000			10	8.500.000			0	8.500.000,00			0,00%	100,00%			1	758.500.000			5,00%	207,07%																				
3	30	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten									2	677.800.000			2	672.000.000			2	358.000.000,00				53,27%			4	1.035.800.000			-	-																						
3	30	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Listrik dan Internet						60	Bulan	249.088.000			12	40.800.000			3	48.000.000			0	24.000.000,00			0,00%	50,00%			12	64.800.000			20,00%	26,01%																				
3	30	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor THLS, Penjaga Malam dan Penjaga Kantor						60	Bulan	3.809.582.000			13	637.000.000			1	624.000.000			0	334.000.000,00			0,00%	53,53%			13	971.000.000			21,67%	25,49%																				
3	30	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten									2	482.730.000			2	393.730.000			2	137.650.000,00				34,96%			4	620.380.000			-	-																						
3	30	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional						60	Bulan	2.000.000.000			12	476.030.000			17	387.930.000			3	133.900.000,00			17,65%	34,52%			15	609.930.000			25,00%	30,50%																				
3	30	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor						35	Unit	40.904.000			7	6.700.000			8	5.800.000			0	3.750.000,00			0,00%	64,66%			7	10.450.000			20,00%	25,55%																				
																		Rata-rata capaian kinerja (%)						16,19%	51,58%													22,19%	38,86%																				
																		Predikat kinerja						SR	R													SR	SR																				
3	30	03				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar yang di Revitalisasi									100	1.460.700.000			100	1.460.700.000				265.884.000				18,20%			100	1.726.584.000				-																						
3	30	03	2.01			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terpenuhinya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan									1.341.500.000	2	1.290.700.000			2	1.290.700.000			2	180.850.000				14,01%			2	1.471.550.000				-																					
3	30	03	2.01	01		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat						5	Pasar	5.000.000.000			1	1.090.000.000			4	1.090.000.000			0	92.199.000			0,00%	8,46%			1	1.182.199.000			20,00%	23,64%																				
3	30	03	2.01	02		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang Tertata dan Sarana Kebersihan Pasar						5	Pasar	1.000.000.000			2	200.700.000			1	200.700.000			0	88.651.000			0,00%	44,17%			2	289.351.000			40,00%	28,94%																				



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023 (kosongkan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2	3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terpenuhinya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				1	170.000.000	1	170.000.000	1	85.034.000		50,02%	2	255.034.000	-	-
3 30 03 2.02 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terbayarnya Honor THLS, Penjaga Kantor dan Penjaga Malam	60	Bulan	877.500.000	13	170.000.000	12	170.000.000	3	85.034.000	25,00%	50,02%	16	255.034.000	26,67%	29,06%
Rata-rata capaian kinerja (%)												8,33%	34,22%			28,89%	27,21%
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal				43	84.791.000	42,6	90.000.000		33.442.400		37,16%	43	118.233.400	-	-
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			1.800.000.000	2	84.791.000	2	90.000.000	2	33.442.400		37,16%		118.233.400		
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	24	Dok	300.000.000	4	30.000.000	1	30.000.000	1	7.942.000	100,00 %	26,47%	5	37.942.000	20,83%	12,65%
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah KK Penerima Bantuan	7200	KK	1.500.000.000	1200	54.791.000	1	60.000.000	0	25.500.400	0,00%	51,38%	1200	80.291.400	16,67%	5,35%
Rata-rata capaian kinerja (%)												50,00%	38,93%			18,75%	9,00%
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
3 30 06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								165.500.000		29.535.000		17,85%		29.535.000		
3 30 06 2 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					0	-	3	165.500.000	3	29.535.000		17,85%	3	29.535.000		
3 30 06 2 01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		3200	Unit	428.000.000	0	-	500	80.000.000	100	19.920.000	20,00%	24,90%	100	19.920.000	3,13%	4,65%
3 30 06 2 01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		2300	Orang	428.000.000	0	-	350	80.000.000	50	7.715.000	14,29%	9,64%	50	7.715.000	2,17%	1,80%
3 30 06 2 01 03	Penyidikan Metrologi Legal		18	Unit	79.600.000	0	-	4	5.500.000	0	1.900.000	0,00%	34,55%	0	1.900.000	0,00%	2,39%
Rata-rata capaian kinerja (%)												11,43%	23,03%			1,77%	2,95%
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang di Bina				100	1.104.342.300	100	964.176.300		128.960.700		13,38%	100	1.233.303.000	-	-
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terpenuhinya Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri			571.111.000	2	1.104.342.300	2	964.176.300	2	128.960.700		13,38%	4	1.233.303.000	-	-
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah Promosi dan Pameran	15	Event	1.000.000.000	5	1.014.342.300	25	874.176.300	5	116.274.700	20,00%	13,30%	10	1.130.617.000	66,67%	113,06%
3 30 07 2.01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan Pemasaran	60	Bulan	450.000.000	12	90.000.000	50	90.000.000	0	12.686.000	0,00%	14,10%	12	102.686.000	20,00%	22,82%
Rata-rata capaian kinerja (%)												10,00%	13,70%			43,33%	67,94%
Predikat kinerja												SR	SR			SR	R
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin				100	1.072.327.500	99,6	1.323.735.000		429.698.000		32,46%	100	1.502.025.500		

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023 (kosongkan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)				
								K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2						3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
3	31	02	2.01			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Perencanaan dan Pembangunan Industri				2	1.072.327.500	4	1.323.735.000	2	429.698.000		32,46%	4	1.502.025.500					
3	31	02	2.01	02		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		4	Dokum en	300.000.000	0	-	1	55.000.000	0	4.807.000	0,00%	8,74%	0	4.807.000	0,00%	1,60%			
3	31	02	2.01	03		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		4	Dokum en	300.000.000	0	-	1	109.780.000	0	53.772.000	0,00%	48,98%	0	53.772.000	0,00%	17,92%			
3	31	02	2	04		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pelaksanaan Operasional Sarana dan Prasarana Industri	60	Bulan	2.500.000.000	12	144.000.000	1	170.000.000	0	72.000.000	0,00%	42,35%	12	216.000.000	20,00%	8,64%			
3	31	02	2	05		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelaku IKM dan Pengrajin	250	KUB	2.000.000.000	100	928.327.500	5	988.955.000	1	299.119.000	20,00%	30,25%	101	1.227.446.500	40,40%	61,37%			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	10,00%	36,30%			30,20%	35,01%			
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR			
			Kode			JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											9.178.606.050		3.324.145.299						
						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)											26,24	34,94			28,67	35,60			
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)											SR	SR			SR	SR			

## 37. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan														
	KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN															
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dan Terfasilitasinya Pelaksanaan Apkasi Kab. Pesawaran	78	2.844.667.500	13	425.000.000	13	68.000.000	7	55.217.000	53,85	81,20	20	480.217.000	25,64	16,88
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tersusunnya Peta Tematik, Peta Dasar dan Dokumen Penegasan Batas Wilayah	30	8.148.971.933	2	182.220.100	2	68.000.000	2	28.302.700	100,00	41,62	4	210.522.800	13,33	2,58
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersusunnya Buku LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dan	25	1.953.240.000	3	200.000.000	3	64.000.000	3	35.214.200	100,00	55,02	6	235.214.200	24,00	12,04

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
		SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan LKPJ														
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											84,62	59,28	10		20,99	10,50
Predikat Kinerja											T	R			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 2)											84,62	59,28			20,99	10,50
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1s/d PROGRAM 2)											T	R			SR	SR

### 38. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
		<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Terlaksananya Administrasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat														
		<b>KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>															
1		Sub Koordinator Bina Mental Spiritual	Kegiatan PHBI, Pembinaan Qori-Qori'ah, MTQ Provinsi, Istighozah, Pelepasan dan Penyambutan Jamaah Haji, Hari Santri, Safari Ramadhan dan Pemberian Hibah)	78	117.336.350.426	13	6.795.997.056	13	7.123.726.000	6	5.889.100.945	46,15	82,67	19	12.685.098.001	24,36	10,81
2		Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial	Kegiatan Pembinaan Himpunan Majelis Taklim, Festival Rebana dan Operasional Hibah	12	4.387.867.407	2	368.700.000	3	175.031.000	1	101.828.000	33,33	58,18	3	470.528.000	25,00	10,72
3		Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat	Kegiatan Peringatan Hari Nilai-Nilai Kebangsaan/PHBN dan Nilai-Nilai Kedaerahan	36	3.288.724.753	6	401.918.000	6	423.843.000	5	80.283.200	83,33	18,94	11	482.201.200	30,56	14,66
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												54,27	53,26	11		26,64	12,07
Predikat Kinerja												R	R			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 2)												54,27	53,26			26,64	12,07
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1s/d PROGRAM 2)												R	R			SR	SR

### 39. Bagian Hukum Sekretariat Daerah

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100	
1	Sekretariat Daerah	Terwujudnya pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	100	2.914.161.400	100%	703.261.400	100,00	200.000.000	95	194.840.000	95,00	97,42	9600%	898.101.400	0,96	0,31
2		<b>KEGIATAN BAGIAN HUKUM</b>	Indeks Reformasi Birokrasi	100	2.914.161.400	100%	703.261.400	100,00	200.000.000	95	194.840.000	95,00	97,42	9600%	898.101.400	0,96	0,31
3		Sub Kegiatan 1: Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	44	1.713.261.400	44	203.261.400	342	71.035.000	308	68.755.000	90,06	96,79	352	139.790.000	8,00	0,08
6		Sub Kegiatan 2: Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	10	1.200.000.000	10	345.000.000	3	81.810.000	3	78.930.000	100,00	96,48	13	160.740.000	1,30	0,13
		Sub Kegiatan 3: Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2	900.000	2	155.000.000	342	47.155.000	308	47.155.000	90,06	100,00	310	94.310.000	155,00	104,79
Rata-rata capaian kinerja (%)												94,02	97,76	173,40	131.613.333,33	32,86	21,12
Predikat Kinerja												ST	ST			SR	SR
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>																	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												100,00	97,76	100	131.613.333	32,86	21,12
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												ST	ST			SR	SR

### 40. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Urusan	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelayanan Publik	714	6.933.563.486	225	1.243.835.444	35	200.000.000	6	83.489.900	17,14	41,74	231	1.327.325.344	32	19,1
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian									-					
4 01 03 2 01 01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan BUMD	12	1.277.699.461	4	241.570.340	10	50.000.000	2	28.892.200	40,00	57,78	6	270.462.540	50	21,17
4 01 03 2 01 02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Laporan Data Ketersediaan Bahan Pokok dan Pengendalian Harga Bahan Pokok	24	2.299.256.101	8	449.395.944	13	75.000.000	2	30.344.700	15,38	40,46	10	479.740.644	42	20,9
4 01 03 2 01 03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah BUMDes dan UMKM yang Mendapat Akses Keuangan Daerah	600	1.200.764.953	200	273.456.000	12	75.000.000	2	24.253.000	16,67	32,34	202	297.709.000	34	24,79
0 0 0 0 0 0	Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Harga Bahan Pokok Strategis	Jumlah Data Bahan Pokok Strategis	72	1.229.969.771	12	159.413.160	-	-	0	-		0,00	12	159.413.160	17	12,96
0 0 0 0 0 0	Penyusunan Inventarisasi Data, Identifikasi dan Publikasi Bidang Perekonomian	Jumlah Data Bidang Perekonomian	6	925.873.200	1	120.000.000	-	-	0	-		0,00	1	120.000.000	17	12,96
Rata-rata capaian kinerja (%)												24,02	43,53		31,73	18,55
Predikat Kinerja												SR	R		SR	SR
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>																

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Urusan	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah Pada Tahun (2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
							35	200.000.000	6	83.489.900						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)											24,02	43,53			31,73	18,55
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)											SR	SR			SR	SR

41. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan						Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub kegiatan						Target RPJMD PD Pada Tahun (Periode 2021 s/d 2026)				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu 2023				Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD TW II Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD PD TW II Tahun 2023 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2023 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																		K		Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		K	Rp. (000)		K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2						3						4						5				6				7				12 = 8+9+10+11				13 = 12/7*100				14 = 6 + 12				15 = 14/5*100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		01	01	06		Program Perekonomian dan Pembangunan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

#### 42. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (Output)		Target RPJMD PD Pada Tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Reakalisasi Anggaran RKPD PD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Reakalisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2023 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
2		3					4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
4	01	03				Program Perekonomian dan Pembangunan			7.561.297.792		1.010.739.451		590.000.000	6	524.079.800	50,0	75,44		1.534.819.251	20,0	22,55
4	01	03	2	03																	
4	01	03	2	03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan Tender/Non Tender tepat Waktu, Efisien dan Efektif	60	5.845.500.440	12	714.614.451	12	318.750.000	6	297.382.800	50,00	93,30		863.305.101	20,00	14,77
4	01	03	2	03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Tesedianya OPD yang melaksanakan Layanan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (SPSE)	60	1.472.755.637	12	248.720.000	12	246.250.000	6	215.303.000	50,00	87,43		442.593.000	20,00	30,05
4	01	03	2	03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya untuk pengadaan Barang dan jasa	60	243.041.715	12	47.405.000	12	25.000.000	6	11.394.000	50,00	45,58		55.509.000	20,00	22,84
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,00	75,44			20,00	22,55
Predikat Kinerja																SR	T			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM.....)																50,00	75,44			20,00	22,55
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM.....)																SR	T			SR	SR

#### 43. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Out Come) Kegiatan (Out put)		Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
								K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)
2		3					4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100	
01	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
01	01	2	06																		
01	01	2	06			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Audiensi Kepala Daerah dengan Tokoh Masyarakat, Agama, Pimpinan/ Anggota dan Media	504	360.547.336	84	63.915.500	4	63.915.500	2	45.675.500	50	71,46	86	109.591.000	17,06	30,40
01	01	2	14			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan															
01	01	2	14	01			Terlaksananya Pelayanan Terhadap Pelaksanaan acara dan Upacara Serta Bimbingan Teknis Guna Meningkatkan SDM ASN	998	8.689.932.592	165	1.407.431.500	4	1.174.971.000	2	675.397.900	50,00	57,48	165	2.082.829.400	16,61	23,97
01	01	2	14	02		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Agenda Harian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	960	6.040.255.878	160	1.109.277.500	4	1.002.494.000	2	578.147.300	50,00	57,67	160	1.687.424.800	16,69	27,94
01	01	2	14	03	05	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Teraksananya Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan	960	1.897.494.196	160	345.375.500	4	334.619.500	2	201.657.000	50,00	60,26	160	547.032.500	16,69	28,83
														1.500.877.700							



# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Kegiatan (Out put)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		
			K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)											50,00	61,72				16,76	27,78
Predikat Kinerja											SR	R				SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																	
TOTAL JUMLAH RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											50,00	61,72				16,76	27,78
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM											SR	R				SR	SR

## 44. Bagian Umum Sekretariat Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah Tahun TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah Tahun TW II 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya penerapan kepatuhan pelayanan publik	1296	157.991.485.285	432	40.248.365.939	216	17.295.066.200	111	9.551.711.703	51,39	55,23	543	49.800.077.642	41,90	31,52
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	144	9.577.210.927	48	4.174.092.000	24	2.115.730.000	12	941.031.000	50,00	44,48	60	5.115.123.000	41,67	53,41
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya tunjangan PKK,PPTK dan bendahara serta honorarium tim pelaksana kegiatan DIPA DAK	72	8.882.806.027	24	3.997.800.000	12	2.017.330.000	6	890.388.000	50,00	44,14	30	4.888.188.000	41,67	55,03
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Tersedianya laporan tiap bulan dan akhir tahun	72	694.404.900	24	176.292.000	12	98.400.000	6	50.643.000	50,00	51,47	30	226.935.000	41,67	32,68
Rata-rata Capaian Kinerja										50,00	47,80			41,67	43,86
Predikat Kinerja										SR	SR			SR	SR
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	288	28.098.052.671	96	6.740.830.389	48	2.723.480.400	24	1.554.495.065	50,00	57,08	120	8.295.325.454	41,67	29,52
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat tulis kantor sekretariat dan kantor bupati	72	4.629.366.000	24	1.194.070.500	12	520.726.000	6	268.695.200	50,00	51,60	30	1.462.765.700	41,67	31,60
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Adanya pemenuhan kebutuhan makan dan minum kantor serta rumah dinas	72	5.805.996.525	24	1.551.269.500	12	780.000.000	6	346.315.400	50,00	44,40	30	1.897.584.900	41,67	32,68
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Barang cetakan keperluan kantor	72	4.166.429.400	24	1.124.340.825	12	539.309.400	6	275.786.125	50,00	51,14	30	1.400.126.950	41,67	33,60
Pemeliharaan apat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dan konsultasi	72	13.496.260.746	24	2.871.149.564	12	883.445.000	6	663.698.340	50,00	75,13	30	3.534.847.904	41,67	26,19
Rata-rata Capaian Kinerja										50,00	55,57			41,67	31,02
Predikat Kinerja										SR	SR			SR	SR
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	72	15.067.179.576	24	5.443.215.200	12	954.850.000	12	952.536.500	100,00	99,76	36	6.395.751.700	50,00	42,45
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Auat Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor KDH / WKDH	72	15.067.179.576	24	5.443.215.200	12	954.850.000	12	952.536.500	100,00	99,76	36	6.395.751.700	50,00	42,45
Rata-rata Capaian Kinerja										100,00	99,76			50,00	42,45
Predikat Kinerja										ST	ST			SR	SR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288	55.842.421.664	96	11.859.877.665	48	5.910.328.000	24	2.876.566.270	50,00	48,67	120	14.736.443.935	41,67	26,39
Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya tertib administrasi perkantoran	72	555.523.920	24	161.790.000	12	75.000.000	6	50.900.000	50,00	67,87	30	212.690.000	41,67	38,29

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah Tahun TW II 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah Tahun TW II 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		<b>6</b>		<b>7</b>		<b>12 = 8+9+10+11</b>		<b>13 = 12/7*100</b>		<b>14 = 6 + 12</b>		<b>15 = 14/5*100</b>	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	72	21.820.439.369	24	2.529.936.065	12	1.380.000.000	6	682.456.270	50,00	49,45	30	3.212.392.335	41,67	14,72
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya biaya spanduk untuk ucapan, Giant Banner, Komputer dan Printer kantor	72	1.639.567.125	24	477.982.000	12	243.098.000	6	142.810.000	50,00	58,75	30	620.792.000	41,67	37,86
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Adanya biaya untuk gaji thls, keperluan sewa kantor, dan pemeliharaan rumah dinas	72	31.826.891.250	24	8.690.169.600	12	4.212.230.000	6	2.000.400.000	50,00	47,49	30	10.690.569.600	41,67	33,59
Rata-rata Capaian Kinerja										<b>50,00</b>	<b>55,89</b>			<b>41,67</b>	<b>31,12</b>
Predikat Kinerja										<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana gedung kantor dan gedung lainnya</b>	<b>144</b>	<b>9.420.142.561</b>	<b>48</b>	<b>2.702.625.377</b>	<b>24</b>	<b>1.077.000.000</b>	<b>12</b>	<b>560.497.700</b>	<b>50,00</b>	<b>52,04</b>	<b>60</b>	<b>3.263.123.077</b>	<b>41,67</b>	<b>34,64</b>
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	72	5.400.927.000	24	1.490.934.377	12	500.000.000	6	240.497.700	50,00	48,10	30	1.731.432.077	41,67	32,06
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Terpeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	72	4.019.215.561	24	1.211.691.000	12	577.000.000	6	320.000.000	50,00	55,46	30	1.531.691.000	41,67	38,11
Rata-rata Capaian Kinerja										<b>50,00</b>	<b>51,78</b>			<b>41,67</b>	<b>35,08</b>
Predikat Kinerja										<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>
<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Cakupan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah</b>	<b>144</b>	<b>12.341.503.976</b>	<b>48</b>	<b>2.090.230.684</b>	<b>24</b>	<b>1.074.632.000</b>	<b>9</b>	<b>445.622.300</b>	<b>37,50</b>	<b>41,47</b>	<b>57</b>	<b>2.535.852.984</b>	<b>39,58</b>	<b>20,55</b>
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya jaminan kesehatan untuk Kepala Daerah	72	771.561.000	24	248.121.086	12	150.000.000	3	477.000	<b>25,00</b>	0,32	27	248.598.086	37,50	32,22
Penyediaan Danan Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Perjalanan Dinas Kepala Daerah ke luar daerah	72	11.569.942.976	24	1.842.109.598	12	924.632.000	6	445.145.300	<b>50,00</b>	48,14	30	2.287.254.898	41,67	19,77
Rata-rata Capaian Kinerja										<b>37,50</b>	<b>24,23</b>			<b>39,58</b>	<b>25,99</b>
Predikat Kinerja										<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>
<b>Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah</b>	<b>Cakupan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah</b>	<b>216</b>	<b>27.644.973.909</b>	<b>72</b>	<b>7.237.494.624</b>	<b>36</b>	<b>3.439.045.800</b>	<b>18</b>	<b>2.220.962.868</b>	<b>50,00</b>	<b>64,58</b>	<b>90</b>	<b>9.458.457.492</b>	<b>41,67</b>	<b>34,21</b>
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah dinas KDH	72	6.292.234.267	24	1.656.181.535	12	856.777.800	6	471.129.600	50,00	54,99	30	2.127.311.135	41,67	33,81
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah dinas WKDH	72	5.117.764.113	24	1.489.829.002	12	680.106.500	6	313.220.800	50,00	46,05	30	1.803.049.802	41,67	35,23
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya Penerima Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah non Departemen non Departemen / Luar negeri	72	16.234.975.529	24	4.091.484.087	12	1.902.161.500	6	1.436.612.468	<b>50,00</b>	75,53	30	5.528.096.555	41,67	34,05
Rata-rata Capaian Kinerja										<b>50,00</b>	<b>58,86</b>			<b>41,67</b>	<b>34,36</b>
Predikat Kinerja										<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>
<b>Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program</b>							<b>17.295.066.200</b>		<b>9.551.711.703</b>						
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (Program 1 s.d Program 7)										<b>55,36</b>	<b>56,27</b>			<b>42,56</b>	<b>34,84</b>
Predikat Kinerja dari Seluruh Program (Program 1 s.d Program 7)										<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>

#### 45. Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD OPD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD OPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Triwulan II Tahun 2022 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7*100		10 = 6+8		11 = 10/5*100	
		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>															
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah	24	1.064.118.930		156.656.000	4	206.006.500	1	48.308.241	25,00	23,45	1	204.964.241	4,17	19,26
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terdistribusi dan tersimpannya BMD dengan baik	5728	305.255.000		49.926.700	1190	130.908.500	291	55.328.600	24,45	42,27	291	105.255.300	5,08	34,48
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi aparat	3084	2.616.340.500		416.592.000	561	574.750.000	0	11.750.000	0,00	2,04	0	428.342.000	0,00	16,37
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	tersedianya kendaraan dinas operasional	320	10.704.682.300		4.451.000.000	19	2.182.321.000	13	481.451.000	68,42	22,06	13	4.932.451.000	4,06	46,08
		Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeuler	1500	111.418.075		349.744.000	261	1.481.978.750	174	381.965.000	66,67	25,77	174	731.709.000	11,60	656,72
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	824	314.094.900		480.825.000	121	1.628.828.250	104	1.604.952.300	85,95	98,53	104	2.085.777.300	12,62	664,06
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional	1000	34.009.962.500		4.982.149.807	138	7.196.751.500	34	3.478.466.214	24,64	48,33	34	8.460.616.021	3,40	24,88
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												42,16	37,49			5,85	20,88
Predikat Kinerja												SR	SR			SR	ST
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									6.062.221.355								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 5)												42,16	37,49			5,85	20,88
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1s/d PROGRAM 5)												SR	SR			SR	ST

#### 46. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/ 7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100	
1	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>	Persentase Penerapan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	100	8.360.000.000	47	2.268.483.776	100	500.000.000	0,00	180.000.000	-	36,00	47,37	2.448.483.776	0,47	0,29
2		<b>KEGIATAN PENATAAN ORGANISASI</b>	Persentase Peningkatan Penataan Organisasi	100	8.360.000.000	47	2.268.483.776	100	500.000.000	0,00	180.000.000	-	36,00	47,37	2.448.483.776	0,47	0,29
3		Sub Kegiatan 1: Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	45	2.280.000.000	25	659.071.800	5	100.000.000	0	61.508.900	-	61,51	25	720.580.700	0,56	0,32

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Urusan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100	
4		Sub Kegiatan 2: Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6	1.965.000.000	2	497.915.000	1	100.000.000	0	59.780.300	-	59,78	2	557.695.300	0,33	0,28
5		Sub Kegiatan 3: Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7	845.000.000	3	194.336.200	1	25.000.000	0	11.063.600	-	44,25	3	205.399.800	0,43	0,24
6		Sub Kegiatan 4: Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6	1.290.000.000	2	357.014.000	1	200.000.000	0	-	-	-	2	357.014.000	0,33	0,28
7		Sub Kegiatan 5: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	12	1.980.000.000	4	560.146.776	2	75.000.000	2	47.647.200	100,00	63,53	6	607.793.976	0,50	0,31
Rata-rata capaian kinerja (%)												14,29	45,81	18,96	489.696.755	0,43	0,29
Predikat Kinerja																	
Rata-rata capaian kinerja (%)												14,29	45,81	18,96	489.696.755	0,43	0,29
Predikat Kinerja												SR	SR			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												14,29	45,81	18,96	489.696.755	11,24	13,45
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												SR	SR			SR	SR

## 47. Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) kegiatan (Output)	Target RPJMD PD Pada Tahun (periode 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD s/d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD PD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD PD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Reaklisasi Anggaran RKPD PD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Reaklisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2023 (%)															
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)														
2						3						4						5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100					
4	01	03				Program Perekonomian dan Pembangunan			7.561.297.792			1.010.739.451			590.000.000		6	524.079.800		50,0	75,44			1.534.819.251		20,0	22,55								
4	01	03	2	03				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																											
4	01	03	2	03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan Tender/Non Tender tepat Waktu, Efisien dan Efektif	60	5.845.500.440		12	714.614.451		12	318.750.000		6	297.382.800		50,00	93,30			863.305.101		20,00	14,77								
4	01	03	2	03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Tesedianya OPD yang melaksanakan Layanan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (SPSE)	60	1.472.755.637		12	248.720.000		12	246.250.000		6	215.303.000		50,00	87,43			442.593.000		20,00	30,05								
4	01	03	2	03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya untuk pengadaan Barang dan jasa	60	243.041.715		12	47.405.000		12	25.000.000		6	11.394.000		50,00	45,58			55.509.000		20,00	22,84								
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,00	75,44						20,00		22,55										
Predikat Kinerja																SR	T						SR		SR										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																						1.010.739.451			590.000.000			524.079.800							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM.....)																		50,00	75,44						20,00		22,55								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM.....)																		SR	T						SR		SR								

#### 48. Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021 s.d 2025)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K		Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp.(000)	K	Rp.
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
1	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				2.288.000.000		649.874.400		200.000.000		105.213.600		52,78		867.686.600		36,63
	4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		12	Laporan	1.257.922.000	1	448.482.400	1	100.000.000		52.080.000	-	52,08	1	500.562.400	8,33	39,79
	4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		12	Laporan	586.080.000	1	201.392.000	1	50.000.000	-	29.236.200	-	58,47	1	230.628.200	8,33	39,35
	4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		12	Laporan	443.998.000	1	112.598.600	1	50.000.000	-	23.897.400	-	47,79	1	136.496.000	8,33	30,74
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	52,61			4,17	36,63	
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										200.000.000	105.213.600	-	24,47					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)												0,00	24,47			4,17	36,63	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)												SR	SR			SR	SR	

#### 49. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021 S/d 2026)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		
						K	Rp. (000)		jumlah	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2				3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
4	02	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecepatan, Ketetapan, dan keakuratan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	223.521.053.865		66.751.617.942		33.901.260.400,00		15.714.181.814,00			82.465.799.756			
4	02	01	2.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100					127.934.400,00		71.755.000,00						
		2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran	30	326.269.937	10	85.224.000	5	49.875.000,00		9.620.000	-	19,29	10	94.844.000	33,33	29,07
		2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan triwulan dan keikutsertaan pameran pembangunan	30	762.656.484	10	141.708.000	5	78.059.400	1	62.135.000	20,00	79,60	11	203.843.000	36,67	26,73

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021 s/d 2026					Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021 S/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
						K	Rp. (000)	jumlah			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2				3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100			
4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Adminsitasi Keuangan OPD	100							3.151.748.800		1.452.030.410							
		2.02	01	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersediany gaji dan tunjangan ASN	198	15.769.001.770		66	4.970.964.298	33	2.560.244.200	0	1.184.456.410	-	46,26	66	6.155.420.708	33,33	39,03		
		2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terbayarnya honorarium tim penata usahaaan pengelolaan keuangan	696	4.045.889.000		319	1.208.661.000	116	582.919.600	58	261.344.000	50,00	44,83	377	1.470.005.000	54,17	36,33		
		2.02	07	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triulan/semesteran SKPD	Tersedianya dokumen LKPJ, CALK , LAKIP, LPPD	24	13.530.000		8	12.660.000	4	6.330.000	4	6.230.000	100,00	98,42	12	18.890.000	50,00	139,62		
		2.02	08	penyusunan pelaporan dan analisa prognosis realisasi anggaran	Tersedianya dokumen prognosis	12	37.980.000		2	4.510.000	1	2.255.000,00	0	-	-	-	2	4.510.000	16,67	11,87		
4	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah	100							130.150.000,00									
		2.05	02	pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas DPRD dan unsur Sekretariat DPRD	6	709.800.000		2	187.675.000	1	130.150.000	0	-	-	-	2	187.675.000	33,33	26,44		
4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah	100							3.883.701.000		1.568.131.010							
		2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor.	Tersedianya instalasi komponen listrik.	72	256.136.000,00		24	78.740.000	12	38.220.000	6	21.300.600	50,00	55,73	30	100.040.600	41,67	39,06		
		2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas staf sekretariat DPRD dalam upaya peningkatan kinerja alat kelengkapan DPRD Kab. Pesawaran	72	524.674.584		24	287.289.500	12	44.351.000,00	6	25.084.600,00	50,00	56,56	30	312.374.100	41,67	59,54		
		2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas staf sekretariat DPRD dalam upaya peningkatan kinerja alat kelengkapan DPRD Kab. Pesawaran	72	687.077.200		24	349.131.400	12	96.000.000,00	6	55.133.500	50,00	57,43	30	404.264.900	41,67	58,84		
		2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Tersedianya makan minum ketua, rata-rapat .	72	1.005.273.494		24	308.100.000	12	106.000.000	6	47.542.500	50,00	44,85	30	355.642.500	41,67	35,38		
		2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.	72	285.064.000		24	84.443.700	12	42.232.000,00	6	22.554.300	50,00	53,41	30	106.998.000	41,67	37,53		
		2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan .	198	7.646.816.000,00		66	2.739.473.000	33	1.310.136.000,00	16	557.920.000	48,48	42,58	82	3.297.393.000	41,41	43,12		
		2.06	08	fasilitasi Kunjungan tamu	Tersedianya makan minum tamu	72	626.460.600,00		24	184.000.000,00	12	96.000.000,00	6	44.825.000	50,00	46,69	30	228.825.000	41,67	36,53		
		2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	144	25.480.173.000		48	4.202.370.450,00	24	2.150.762.000,00	14	793.770.510	58,33	36,91	62	4.996.140.960	43,06	19,61		
4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100							140.000.000,00		-							



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021 S/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)	jumlah	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	2.07 05	Pengadaan Meubeler	192	527.637.002		64	113.700.000,00	41		0	-	-	-	64	113.700.000	33,33	21,55
	2.07 06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	410	508.476.578		155	722.155.000,00	60	140.000.000,00			-		155	722.155.000	37,80	142,02
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD	100						2.008.310.000,00		904.666.298,00						
	2.08 01	Penyediaan jasa surat menyurat	72	43.200.000		24	13.800.000,00	12	7.200.000,00	6	3.600.000	50,00	50,00	30	17.400.000	41,67	40,28
	2.08 02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	72	1.791.960.000		24	404.880.970,00	12	321.960.000,00	6	116.816.298	50,00	36,28	30	521.697.268	41,67	29,11
	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	72	9.489.900.000		24	3.220.760.000,00	12	1.679.150.000,00	6	784.250.000	50,00	46,71	30	4.005.010.000	41,67	42,20
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100						663.750.000,00		265.174.534,00						
	2.09 02	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya,pemeliharaan,pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	90	5.882.878.000		30	1.218.440.734,00	15	613.750.000,00	8	228.174.534	53,33	37,18	38	1.446.615.268	42,22	24,59
	2.09 06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	646	1.755.652.000		194	563.065.000,00	98	25.000.000,00	48	12.500.000	48,98	50,00	242	575.565.000	37,46	32,78
	2.09 09	Pemeliharaan /Rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	30	719.665.700		10	348.650.000,00	5	25.000.000,00	5	24.500.000	100,00	98,00	15	373.150.000	50,00	51,85
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pelaksanaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100						21.789.034.000,00		10.227.124.762,00						
	2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD	270	130.151.844.000		90	40.769.786.228	45	21.253.074.000,00	0	10.227.124.762	-	48,12	90	50.996.910.990	33,33	39,18
	2.15 02	penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	6	2.803.000.000		2	895.977.162,00	1	468.460.000,00	0	-	-	-	2	895.977.162	33,33	31,96
	2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	270	405.000.000		64	34.336.500,00	45	67.500.000,00	0	-	-	-	64	34.336.500	23,70	8,48
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD.	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Tugas-tugas DPRD	100						2.006.632.200,00		1.225.299.800,00						
	2.16 03	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	900	4.191.038.515		264	1.305.645.000,00	150	827.632.200,00	74	363.959.800	49,33	43,98	338	1.669.604.800	37,56	39,84
	2.16 04	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	24	7.074.000.000		8	2.295.471.000,00	4	1.179.000.000,00	4	861.340.000	100,00	73,06	12	3.156.811.000	50,00	44,63
Rata-rata capaian kinerja (%)												38,52	41,64			39,13	42,40
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021 s/d 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021 S/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
					K	Rp. (000)	jumlah	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3			4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
02	02			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	134.272.262.736			37.975.879.500		20.098.739.600		8.601.603.800						
4	02	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100						1.920.232.300		1.410.166.400						
		2.01	01	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	6	8.633.785.771		2	2.730.172.200	1	1.378.316.800	0	1.132.881.000	-	82,19	2	3.863.053.200	33,33	44,74
		2.01	02	Pembahasan rancangan peraturan daerah	90	4.059.563.407		24	1.205.224.000	15	541.915.500	2	277.285.400	13,33	51,17	26	1.482.509.400	28,89	36,52
4	02	02	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100						221.065.000		91.065.000						
		2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	6	390.578.611		2	111.343.000	1	20.000.000	0	-	-	-	2	111.343.000	33,33	28,51
		2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	6	386.479.502		2	106.756.000	1	20.000.000	0	-	-	-	2	106.756.000	33,33	27,62
		2.02	03	Pembahasan APBD	6	635.732.433		1	91.418.000	1	126.065.000	0	91.065.000	-	72,24	1	182.483.000	16,67	28,70
		2.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	6	600.676.742		1	172.054.000	1	35.000.000	0	-	-	-	1	172.054.000	16,67	28,64
		2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	6	385.141.748		2	113.796.000	1	20.000.000								
4	02	02	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100						24.620.300		24.620.300						
		2.03	08	Pembahasan LKJP Kepala Daerah	6	456.650.624		2	76.146.000	1	24.620.300	1	24.620.300	100,00	100,00	3	100.766.300	50,00	22,07
4	02	02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	100						2.976.007.000		1.536.434.030						
		2.04	01	Pendalaman Tugas DPRD	24	12.638.897.746		9	4.177.117.500	4	2.204.447.000	1	1.214.114.030	25,00	55,08	10	5.391.231.530	41,67	42,66
		2.04	03	Pubikasi dan dokumentasi Dewan	516	5.360.456.142		164	1.725.134.000	86	771.560.000	42	322.320.000	48,84	41,78	206	2.047.454.000	39,92	38,20
4	02	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100						3.140.935.000		1.189.480.000						
		2.05	01	Kunjungan Kerja dalam daerah	48	15.600.820.288		16	2.677.613.000	8	1.491.000.000	3	639.500.000	37,50	42,89	19	3.317.113.000	39,58	21,26
		2.05	03	Pelaksanaan reses	18	7.911.909.445		6	819.879.500	3	1.649.935.000	1	549.980.000	33,33	33,33	7	1.369.859.500	38,89	17,31
4	02	02	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	100						11.815.880.000		4.349.838.070						
		2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	144	77.211.570.276		48	23.969.226.300	24	11.815.880.000	10	4.349.838.070	41,67	36,81	58	28.319.064.370	40,28	36,68

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021 s/d 2026		jumlah	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2021 S/d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		
			K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
Rata-rata capaian kinerja (%)												23,05	39,65				31,74	28,69
Predikat kinerja												SR	SR				SR	SR
01	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Pengetahuan Dasar dan Kompetensi terhadap Aparatur meningkat.	100	2.371.136.200		256	1.412.848.700		-		-				
01	02	05	20	Pendidikan dan peltihan Formal.	Terfasilitasinya pelaksanaan Bintek Bagi PNS diligkungan Sekretariat DPRD	186	2.371.136.200		145	1.412.848.700	-		0	-		145	1.412.848.700	
																77,96	59,59	
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-				77,96	59,59
Predikat kinerja																	T	R
01	02	15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.	Cakupan Layanan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.	100	1.183.805.850			63.347.500	100	0		-		63.347.500		
			15	Keikutsertaan pameran pembangunan	Terlaksananya Pameran DPRD.	10	491.475.850		6	63.347.500					6	63.347.500	60,00	
																	12,89	
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-				6,00	1,29
Predikat kinerja												SR	SR				SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											54.000.000.000,00		24.315.785.614					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)												30,78	40,65				35,43	35,54
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)												SR	SR				SR	SR

50. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d Tahun 2023 (%)				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
			2	3	4	5	6	7	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100							
1	05	01			Program Penunjangn Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		15.092.849.300		2.584.157.886		2.795.131.820		1.340.249.200						
1	05	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.847.408.000		1.927.231.291		2.142.666.820		1.081.525.796	-	-		3.008.757.087	-	-

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, serta Belanja Tambahan Penghasilan PNS	72	9.947.700.000	24	1.791.471.291	12	1.967.090.820	6	988.057.796	50	50	30	2.779.529.087	42	28
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	72	899.708.000	24	135.760.000	12	175.576.000	6	93.468.000	50	53	30	229.228.000	42	25
Rata-rata capaian kinerja (%)											50	51,73			28	18
Predikat Kinerja											SR	R			SR	SR
1 05 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			538.410.000		83.927.200		30.000.000		21.660.000	-	-	-	105.587.200	-	-
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	61.000.000	24	9.000.000	12	10.000.000	6	5.260.000	50	53	30	14.260.000	50	23
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	477.410.000	26	74.927.200	25	20.000.000	21	16.400.000	84	82	47	91.327.200	31	19
Rata-rata capaian kinerja (%)											67,00	67,30			12	6
Predikat Kinerja											S	S			SR	SR
1 05 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.597.000.000		260.408.095	-	265.000.000		127.849.404				388.257.499		
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	128.000.000	24	16.408.095	12	18.000.000	6	8.849.404	50	49	30	25.257.499	50	20
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	72	1.469.000.000	24	244.000.000	12	247.000.000	6	119.000.000	50	48	30	363.000.000	42	25
Rata-rata capaian kinerja (%)											50	49			46	22
Rata-rata capaian kinerja (%)											SR	SR			SR	SR
1 05 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.110.031.300		312.591.300	-	357.465.000		109.214.000				421.805.300		
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45	2.110.031.300	18	312.591.300	9	357.465.000	4	109.214.000	44	31	22	421.805.300	49	20
Rata-rata capaian kinerja (%)											44,44	30,55			16	7
Predikat Kinerja											SR	SR			SR	SR
1 05 03	Program Penanggulangan Bencana			6.939.230.700		780.830.325		420.000.000		143.914.000						
1 05 03 2 01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			230.000.000		-	-	10.000.000		4.072.800				4.072.800		
01	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota secara tatap muka	160	230.000.000	-	-	30	10.000.000	-	4.072.800	-	41	-	4.072.800	-	2
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	40,73			-	0
Predikat Kinerja											SR	SR			S	SR
1 05 03 2 02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			2.643.455.000		139.820.000		270.000.000		78.591.200				218.411.200		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	10	400.000.000	2	49.820.000	2	10.000.000	-	-	-	-	2	49.820.000	20	12
08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Provinsi dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	7	1.133.455.000	2	20.000.000	1	220.000.000	-	78.591.200	-	36	2	98.591.200	29	9
09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi yang dilegalisasi	4	360.000.000	-	-	1	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah	10	750.000.000	2	70.000.000	1	30.000.000	-	-	-	-	2	70.000.000	20	9
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	8,93			23	10
Predikat Kinerja											SR	SR	-		SR	SR
1 05 03 2 03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			4.065.775.700		641.010.325		140.000.000		61.250.000				702.260.325		
03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	90	1.207.565.000	36	199.710.000	18	120.000.000	8	55.200.000	44	46	44	254.910.000	49	21
04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	15	1.012.125.000	6	150.000.000	1	10.000.000	-	3.250.000	-	33	6	153.250.000	40	15
06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	60	1.846.085.700	2	291.300.325	1	10.000.000	-	2.800.000	-	28	2	294.100.325	3	16
Rata-rata capaian kinerja (%)											14,81	35,50			30,74	17,39
Predikat Kinerja											SR	SR			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM :										3.215.131.820		1.484.163.200				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											32,32	40,49			22,16	11,51
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM											SR	SR			SR	SR

51. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD OPD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD OPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7*100		10 = 6+8		11 = 10/5*100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab pesawaran			20.683.000.678				3.154.014.600		1.608.005.416				1.608.005.416		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD OPD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD OPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7 * 100		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5 * 100	
01	Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah layanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	60	Bulan	14.951.626.090		12	2.536.856.000	3	1.201.934.206	25,00	47,38	3	1.201.934.206	5,00	8,04
06	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan	52	dokumen	125.826.111		11	44.856.000	11	44.856.000	100,00	100,00	11	44.856.000	21,15	35,65
03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi SKPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan opd	10	dokumen	3.111.501.000		2	170.640.000	1	83.140.000	50,00	32,42	1	83.140.000	10,00	1,78
06	Penyediaan komponen instalasi bangunan kantor listrik/penerangan	Jumlah penyediaan komponen listrik (jenis)	60	Bulan	42.735.700		12	5.150.000	12	5.150.000	100,00	100,00	12	5.150.000	20,00	12,05
02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah layanan pengadaan ATK	60	Bulan	91.576.500		12	16.031.800	3	7.720.800	25,00	34,32	3	7.720.800	5,00	8,43
03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah layanan penyediaan peralatan rumah tangga	60	Bulan	64.469.856		12	3.589.500	3	1.389.500	25,00	38,72	3	1.389.500	5,00	2,16
04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah layanan makan minum	60	Bulan	145.850.839		11	5.000.000	3	3.000.000	27,27	60,00	3	3.000.000	5,00	2,06
05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah layanan barang cetak dan penggandaan	60	Bulan	182.062.222		12	3.520.000	12	3.520.000	100,00	100,00	12	3.520.000	20,00	1,93
06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60	Bulan	64.396.595		12	3.840.000	12	3.840.000	100,00	100,00	12	3.840.000	20,00	5,96
06	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	jumlah rapat dan koordinasi konsultasi	60	Bulan	117.854.455		12	17.550.000	12	17.550.000	100,00	100,00	12	17.550.000	20,00	14,89
0'8	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	300	jenis	12.210.200		60	1.350.000	20	650.000	33,33	48,15	20	650.000	6,67	5,32
0'2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan	128.207.100		12	21.000.000	3	5.154.910	25,00	24,55	3	5.154.910	5,00	4,02
0'4	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah layanan adm.keu dan layanan umum	60	Bulan	585.000.000		12	117.000.000	3	63.000.000	25,00	53,85	3	63.000.000	5,00	4,61
0'2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kend.dinas oprasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ops	67	Unit	815.480.010		17	173.631.300	6	133.100.000	35,29	10,50	6	133.100.000	8,96	16,32
0'9	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sewa gedung kantor	15	Paket	152.627.500		3	30.000.000	3	30.000.000	100,00	100,00	3	30.000.000	20,00	19,66
11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	250	unit	91.576.500		50	4.000.000	50	4.000.000	100,00	100,00	50	4.000.000	20,00	4,37
Rata-rata capaian kinerja (%)											60,68	58,37			12,30	8,80
											R	R			SR	SR
<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>									<b>48.500.000</b>				<b>48.500.000</b>			
01	Pelaksanaan koordinasi s/d bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara dan karakter bangsa	Jumlah sosialisasi	55	Kecamatan	335.780.000		55	50.000.000	11	48.500.000	20,00	97,00	11	48.500.000	20	14,44
											20,00	97,00	11,00	48.500.000,00	20,00	14,44
											Predikat kinerja	SR	ST		SR	SR
<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>									<b>1.069.905.000</b>				<b>730.449.000</b>			
0'3	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan s/d bidang pendidikan politik, etika budaya dan politik	Jumlah berkas partai politik penerima bantuan yang di verifikasi	55	Parpol	6.229.809.838		11	1.069.905.000	3	730.449.000	27,27	68,27	3	730.449.000	5,45	11,73
											27,27	68,27	3,00	730.449.000,00	5,45	11,73
											Predikat kinerja	SR	S		SR	SR



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD OPD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD OPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
			K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	5			6		7		8		9 = 8 / 7*100		10 = 6+8		11 = 10/5*100	
	<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>								2.772.322.000		487.322.000				487.322.000		
04 05	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evakuasi dan mediasi sengketa ormas	Jumlah bantuan hibah kepada instansi vertikal serta ormas dan LSM di Kab. Pesawaran	160 ormas dan 50 instansi vertikal		19.415.439.020			42	2.772.322.000	2	487.322.000	4,76	18	2	487.322.000	5	2,51
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	4,76	17,58	2,00	487.322.000,00	4,76	2,51
											Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR
	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan konflik Sosial</b>								275.600.000		217.000.000				217.000.000		
06 04	Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi bidang kewaspadaan serta penanganan konflik daerah	Jumlah laporan terlaksananya forum koordinasi dan komunikasi pemda dengan unsur intelejen dan elemen masyarakat (KOMINDA)	60 laporan		183.153.000			12	26.700.000	11	25.450.000	100,00	95,32	11	25.450.000	91,67	13,90
06 02	Pelaksanaan monitoring di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi bidang kewaspadaan serta penanganan konflik daerah	Jumlah penerima bantuan operasional bagi aparat keamanan tingkat desa dan kecamatan	880 Orang		3.219.116.059			176	248.900.000	60	191.550.000	34,09	76,96	60	191.550.000	34,09	5,95
												67,05	86,14	35,50	108.500.000,00	62,88	9,92
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>									<b>7.321.841.600</b>		<b>3.091.276.416</b>	S	T		3.091.276.416	R	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)												35,95	65,47	10,30	274.954.200,00	21,08	9,48
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)												SR	R			SR	SR

## 52. Kecamatan Gedong Tataan

No	Kode Rek				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2				3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
7	01	01	2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			12.210.200		2.000.000		2.846.200		2.846.200						

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode Rek				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2				3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	12.210.000	1	2.000.000	1	2.846.200	1	2.846.200	100,00	100,00	2	4.846.200	40,00	39,69
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	100,00			40,00	39,69
Predikat kinerja															ST	ST			SR	SR
7	01	01	2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		9.309.848.762		3.193.284.220		1.639.588.008		716.361.400							
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Belanja Tambahan Penghasilan ASN	60	7.375.157.082	24	2.675.734.220	12	1.362.788.008	6	395.780.139	50,00	29,04	30	3.071.514.359	50,00	41,65
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	72	1.934.691.680	24	517.550.000	12	276.800.000	6	82.589.400	50,00	29,84	30	600.139.400	41,67	31,02
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,00	29,44			45,83	36,33
Predikat kinerja															SR	SR			SR	SR
7	01	01	2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		430.670.570		111.115.200		118.478.000		38.528.900							
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	72	68.779.450	24	19.676.000	12	15.554.200	6	4.853.700	50,00	31,21	30	24.529.700	41,67	35,66
7	01	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	72	21.315.300	24	6.000.000	12	3.000.000	3	700.000	25,00	23,33	27	6.700.000	37,50	31,43
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	72	106.789.653	24	26.415.000	12	24.630.000	6	4.675.000	50,00	18,98	30	31.090.000	41,67	29,11
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	72	37.161.651	24	11.104.200	12	5.113.800	6	2.690.200	50,00	52,61	30	13.794.400	41,67	37,12
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72	36.662.316	24	10.320.000	12	7.680.000	6	2.560.000	50,00	33,33	30	12.880.000	41,67	35,13
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	72	159.962.200	24	37.600.000	12	62.500.000	6	23.050.000	50,00	36,88	30	60.650.000	41,67	37,92
Rata-rata capaian kinerja (%)															45,83	32,72			40,97	34,40
Predikat kinerja															SR	SR			SR	SR
4	11	01	01.28		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		51.156.720		7.000.000											
4	11	01	01.28	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2	7.000.000	1	7.000.000			-	-			1	7.000.000	50,00	100,00
Rata-rata capaian kinerja (%)															0,00	0,00			50,00	100,00
Predikat kinerja															SR	SR			SR	ST
4	11	01	01.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		51.156.720		14.400.000											
4	11	01	01.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN	24	51.156.720	24	14.400.000			-	-			24	14.400.000	100,00	28,15
Rata-rata capaian kinerja (%)															0,00	0,00			100,00	28,15
Predikat kinerja															SR	SR			ST	SR
7	01	01	2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		285.625.020		63.718.340		67.300.000		13.600.000							
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	12.789.180	24	2.250.000	12	2.500.000	6	800.000	50,00	32,00	30	3.050.000	41,67	23,85

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode Rek				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2				3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	72	42.630.600	24	11.968.340	12	8.400.000	6	2.000.000	50,00	23,81	30	13.968.340	41,67	32,77
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Petugas Tenaga Kontrak	72	230.205.240	24	49.500.000	12	56.400.000	6	10.800.000	50,00	19,15	30	60.300.000	41,67	26,19
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,00	24,99			41,67	27,60
Predikat kinerja															SR	SR			SR	SR
7	01	01	2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			611.899.141		137.430.000		136.480.000		18.735.500						
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang Terpelihara	72	583.478.741	24	129.430.000	12	132.480.000	6	18.235.500	50,00	13,76	30	147.665.500	41,67	25,31
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	6	28.420.400	2	8.000.000	1	4.000.000	1	500.000	100,00	12,50	3	8.500.000	50,00	29,91
Rata-rata capaian kinerja (%)															75,00	13,13			45,83	27,61
Predikat kinerja															S	SR			SR	SR
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
7	01	02	2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN			83.029.360				13.600.000		9.000.000						
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	JumlahKoordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	83.029.360			1	13.600.000	1	9.000.000	100,00	66,18	1	9.000.000	20,00	10,84
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	66,18			20,00	10,84
Predikat kinerja															ST	S			SR	SR
7	01	02	2.03		KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM			13.736.475				2.250.000		-						
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4	13.736.475			1	2.250.000	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)															0,00	0,00			0,00	0,00
Predikat kinerja															SR	SR			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												1.980.542.208		799.072.000						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															46,76	29,61			42,70	33,85
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															SR	SR			SR	SR

53. Kecamatan Negeri Katon

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD OPD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD OPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8 / 7*100		10 = 6+8		11 = 10/5*100	
1		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kot	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100%		3.033.542.308		375.434.070		436.811.700								
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	12	bln	12.210.200			12	2.000.000	3	1.137.600	25	57	3	2.000.000	25	16
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan dan [pengujian dan verifikasi keuangan SKPD	2	dok	34.060.353			2	5.579.000	1	2.589.000		46	1	5.579.000	50	16
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut lengkap	tersedianya Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapan lainnya	30	orang	30.525.500			30	5.000.000	30	5.000.000		100	30	5.000.000	100	16
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	72	bln	105.749.220	12	18.102.000	12	15.102.000	3	7.521.000	25	50	15	25.623.000	21	24
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	12	bln	9.888.168			3	1.391.700	1	671.700	33	48	1	671.700	8	7
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah tersedianya dana belanja makanan dan minuman	72	bln	95.918.850	12	12.375.000	12	13.500.000	3	6.750.000	25	50	15	19.125.000	21	20
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	bln	17.762.250	4	2.500.000	12	2.500.000	3	1.300.000	25	52	7	3.800.000	58	21
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	bln	17.053.240	4	2.400.000	12	2.400.000	3	1.200.000	25	50	7	3.600.000	58	21
		penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah tersedianya dana penunjang perjalanan perjalanan dinas	72	bln	124.372.900	12	8.250.000	12	19.000.000	3	14.200.000	25	75	15	22.450.000	21	18
		Penyediaan surat menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	dok	23.427.819	12	900.000	12	3.690.000	3	820.000	25	22	15	1.720.000	21	7
		Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	item	106.576.500	1	15.000.000	12	15.000.000	3	5.214.389	25	35	4	20.214.389	33	19
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah jasa tenaga kontrak 18 orang , kebersihan	90	orang	2.055.761.565	17	265.321.000	18	291.699.000	18	154.554.000	100	53	35	419.875.000	39	20
		Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	jumlah terpeliharanya kendaraan dinas	12	bln	311.040.620	3	45.336.070	12	46.200.000	3	21.300.000	25	46	6	66.636.070	50	21
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan peralatan dan mesin lainnya	4	unit	89.195.123	1	5.250.000	2	13.750.000	2	8.250.000	100	-	3	13.500.000	75	15
Rata-rata capaian kinerja (%)													33	49			41	17
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		185.595.040		-		30.400.000								
		koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Tingkat kecamatan	6	kegiatan	100.123.640	1		5	16.400.000	5	7.550.000	100	46	6	16.400.000	100	16
		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah rekomendasi perizinan non usaha yang dikeluarkan	50	dok	42.735.700	20		10	7.000.000	-	3.500.000	-	50	20	7.000.000	40	16

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD OPD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD OPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)			
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7*100		10 = 6+8		11 = 10/5*100				
		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah pelaksanaan pelayanan pembuatan surat izin usaha UMKM	350	Izin	42.735.700				7.000.000	30	3.485.000		50	30	7.000.000	9	16		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat kinerja													33	49					50	16
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												467.211.700								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)													33,04	48,74					45,50	16,90
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)													SR	SR					SR	SR

54. Kecamatan Tegineneng

No	Urusan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra RPJMD pada Tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja Restra RPJMD s/d Tahun lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD TW Tahun 2023		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Restra RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Restra RPJMD s/d Tahun 2022(%)	
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
1	KEWILAYAHAN	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kot	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100%		3.003.016.808		375.434.070		545.152.400								
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	12	bln	12.210.200			12	7.660.800	3	3.867.200	25,00	50,48	3	7.660.800	25,00	62,74
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan dan pengujian dan verifikasi keuangan SKPD	2	dok	34.060.353			2	51.644.600	1	25.620.000		49,61	1	51.644.600	50,00	151,63
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	bln	105.749.220	12	18.102.000	12	16.073.000	3	7.530.000	25,00	46,85	15	25.632.000	125,00	24,24
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	12	bln	9.888.168			3	6.197.500	1	3.102.000	33,33	50,05	1	3.102.000	8,33	31,37
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah tersedianya dana belanja makanan dan minuman	12	bln	95.918.850	1050	12.375.000	12	22.000.000	3	11.550.000	25,00	52,50	3	23.925.000	25,00	24,94
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan	12	bln	17.762.250	4	2.500.000	12	5.500.000	3	2.350.000	25,00	42,73	7	4.850.000	58,33	27,31

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023**

No	Urusan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra RPJMD pada Tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja Restra RPJMD s/d Tahun lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD TW Tahun 2023		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Restra RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Restra RPJMD s/d Tahun 2022(%)	
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
			dan Penggandaan															
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12	bln	17.053.240	4	2.400.000	12	4.400.000	3	2.200.000	25,00	50,00	7	4.600.000	58,33	26,97
		penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah tersedianya dana penunjang perjalanan perjalanan dinas	12	bln	124.372.900	70	8.250.000	12	26.155.000	3	18.055.000	25,00	69,03	3	26.305.000	25,00	21,15
		Penyediaan surat menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	dok	23.427.819	75	900.000	12	190.000	3	70.000	25,00	36,84	5	970.000	41,67	4,14
		Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	item	106.576.500	1	15.000.000	12	12.000.000	3	3.356.038	25,00	27,97	4	18.356.038	33,33	17,22
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantoor	jumlah jasa tenaga kontrak 18 orang , kebersihan	19	orang	2.055.761.565	17	265.321.000	18	250.961.500	18	134.057.700	100,00	53,42	6	399.378.700	31,58	19,43
		Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	jumlah terpeliharanya kendaraan dinas	12	bln	311.040.620	3	45.336.070	12	125.370.000	3	102.330.000	25,00	81,62	6	147.666.070	50,00	47,47
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	4	unit	89.195.123	6	5.250.000	4	17.000.000	2	4.000.000	50,00	23,53	1	9.250.000	25,00	10,37
Rata-rata capaian kinerja (%)													29,17	45,33			39,76	33,50
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		185.595.040				52.079.300								
		koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Tingkat kecamatan	1	kegiatan	100.123.640	44		1	17.799.300	1	17.779.300	100,00	99,89	1	17.799.300	100,00	17,78
		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah rekomendasi perizinan non usaha yang dikeluarkan	50	dok	42.735.700	20		10	17.220.000	-	4.167.500	-	24,20	20	17.220.000	40,00	40,29



# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Urusan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Restra RPJMD pada Tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja Restra RPJMD s/d Tahun lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja RKPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD TW Tahun 2023		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja RKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Restra RPJMD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Restra RPJMD s/d Tahun 2022(%)	
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3	4	5			6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah pelaksanaan pelayanan pembuatan surat izin usaha UMKM	350	Izin	42.735.700			30	17.060.000	15	4.127.500	50,00	24,19	15	17.060.000	4,29	39,92
Rata-rata capaian kinerja (%)													50,00	49,43			48,10	32,66
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR
Rata-rata capaian kinerja (%)													79,17	94,76			87,85	66,16
Predikat kinerja													T	ST			T	S
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												597.231.700						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)													79,17	94,76			4,29	39,92
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)													T	ST			SR	SR

## 55. Kecamatan Way Lima

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun( 2021 S/D Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu ( 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	9.256.791.258	100%	251.425.300	100%	310.470.400	1	148.515.845	47,84	47,84	2	399.941.145	0,00	4,32
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	12.210.200	0	900.000	2	2.500.000	2	1.500.000	60,00	60,00	2	3.400.000	33,33	27,85
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	7.394.988.521	12				0							
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	1.482.940.242	12	210.480.000	12	214.960.000	6	113.680.020	52,88	52,88	18	425.440.000	25,00	28,69
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah							0							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	57.314.525	12	6.539.000	12	22.500.000	6	9.087.000	40,39	40,39	18	29.039.000	25,00	50,67
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72	14.210.200	12	856.300	12	7.291.300	6	3.096.300	42,47	42,47	18	8.147.600	25,00	57,34

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun( 2021 S/D Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu ( 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72	63.945.900	12	4.500.000	12	22.500.000	12	9.200.000	40,89	40,89	24	27.000.000	33,33	42,22
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72	18.052.240	12	450.000	12	3.312.100	6	846.000	25,54	25,54	18	3.762.100	25,00	20,84
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72	38.946.520	1	3.000.000	12	3.000.000	6	2.000.000	66,67	66,67	7	6.000.000	9,72	15,41
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	26.657.340	1	10.000.000	12	24.625.000	3	3.375.000	13,71	13,71	4	34.625.000	5,56	129,89
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	6.394.590	12	900.000	12	1.000.000	6	720.000	72,00	72,00	18	1.900.000	25,00	29,71
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	55.869.780	12	1.800.000	12	8.782.000	6	5.011.525	57,07	57,07	18	10.582.000	25,00	18,94
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72	85.261.200	12	12.000.000			0	-	-	-	12	12.000.000	16,67	14,07
Rata-rata capaian kinerja (%)											23,83	23,83			15,15	20,69
Predikat kinerja											SR	SR			SR	SR
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	474.762.782		55.403.000	-	120.870.000	0	67.842.000	56,13	56,13	-	123.245.000	-	25,96
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	72	453.447.482	3	53.970.000	12	117.870.000	3	27.492.000	23,32	23,32	6	171.840.000	8,33	37,90
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Terpeliharanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	5	21.315.300	1	1.433.000	1	3.000.000	1	3.000.000	100,00	100,00	2	4.433.000	40,00	20,80
Rata-rata capaian kinerja (%)											30,83	30,83			9,67	11,74
Predikat kinerja											SR	SR			SR	SR
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	37.851.620	-	0	-	-	0							
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terbayarnya Jasa Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	50	37.851.620	10	-		-	0							
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-			-	-
Predikat kinerja											SR	SR	0		SR	SR
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	100%	156.551.380	-	23.800.000	-	23.800.000	0	18.675.000	78,47	78,47	-	47.600.000		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	98.292.110	1	16.100.000	1	16.100.000	1	16.100.000	100,00	100,00	2	32.200.000	40,00	32,76
	Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan/instansi vertikal yang terkait dlm pemeliharaan sarana dan	Terlaksananya Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan/instansi vertikal yang terkait dlm pemeliharaan sarana dan	20	47.009.270	-	7.700.000	4	7.700.000	2	2.575.000	33,44	33,44	2	15.400.000	10,00	32,76

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun( 2021 S/D Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu ( 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
	prasarana pelayanan umum kec. Way lima	prasarana pelayanan umum kec. Way lima														
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa	1	11.250.000	1	-	-	0								
Rata-rata capaian kinerja (%)											19,06	19,06			7,14	9,36
Predikat kinerja											SR	SR			SR	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)											18,43	18,43			7,99	10,45
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)											SR	SR			SR	SR

## 56. Kecamatan Padang Cermin

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD OPD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD OPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7*100		10 = 6+8		11 = 10/ 5*100		
	0.8.0.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%			2.594.040.000		2.035.995.000		364.621.000	-	-		2.400.616.000	-	93	
	0.1.0.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Jasa Surat-menyurat	3900	buah	12.840.000	698	10.800.000	400	1.800.000	65	450.000	25	25	763	12.600.000	20	98
	0.1.0.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi dan SDA dan Listrik	71	bulan	42.000.000	60	35.400.000	12	6.000.000	6	3.000.000	50	50	66	41.400.000	0	99
	0.1.0.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan dan Tenaga Kontrak	114	Orang	1.397.532.000	67	1.108.568.000	20	244.800.000	10	128.550.000	53	53	77	1.353.368.000	0	97
	0.1.1.0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	210	Item	93.691.100	83	75.011.000	27	10.781.000	16	6.028.000	56	56	99	85.792.000	0	92
	0.1.1.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	42	Item	39.100.000	30	32.200.000	4	6.000.000	1	1.755.000	29	29	31	38.200.000	0	98
	0.1.1.4	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah perlatan rumah tangga	84	Item	21.624.000	66	18.534.000	16	3.000.000	8	1.175.000	39,2	39	74	21.534.000	0	100
	0.1.1.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	18	Item	31.320.000	17	26.160.000	4	5.160.000	2	2.580.000	50	50	19	31.320.000	0	100
	0.1.1.7	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	7572	Kotak	181.750.000	5134	150.250.000	668	15.030.000	192	3.840.000	26	26	5.326	165.280.000	0	91
	0.1.1.8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	2052	kali	114.225.000	1368	88.575.000	171	25.650.000	56	9.207.000	36	36	1.424	114.225.000	0	100
	0.1.1.9	Kegiatan Lomba Desa	Jumlah Lomba Desa Tingkat Kecamatan dan terealisasinya kegiatan limba Kesrak PKK, P3KSS,Lomba Desa Tingkat Kabupaten	16	kegiatan	127.700.000	4	84.800.000		-	-	0	-	4	84.800.000	0	66	
	0.1.2.0	Musabaqoh Tilawatil Qur'an	Jumlah MTQ Tingkat Kecamatan	4	kegiatan	106.289.000	2	72.620.000				0		2	72.620.000	0	68	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD OPD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD OPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8 / 7*100		10 = 6+8		11 = 10/5*100	
	0.1.2.1	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang	4	kegiatan	38.683.500	4	27.305.000	1	7.000.000	1	7.000.000	100	100	5	34.305.000	0	89
	0.1.2.2	Fasilitasi Gadis	Jumlah Fasilitasi Gerakan Desa Ikut Sejahtera	4	kegiatan	64.945.400	2	50.002.000	1	7.000.000			-		2	57.002.000	0	88
	0.1.2.4	Kunjungan Silaturahmi Ramadhan (Safari Ramadhan)	Jumlah Terlaksananya Silaturahmi Ramadhan (Safari Ramadhan)	4	kegiatan	53.430.000	2	43.600.000					-		2	43.600.000	0	82
	0.1.2.7	Penyediaan Jasa Kebersihan, Sopir dan Keamanan	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan, Sopir dan Keamanan	18	Orang	218.310.000	18	176.370.000	3	32.400.000	2	11.100.000	34	34	20	208.770.000	111	96
	0.1	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah Pembantu ( PPID )	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah Pembantu	12	Dokumen	25.000.000	12	25.000.000	-	-	-	-	-	-	12	25.000.000	0	100
	2.3.0.4	Penyediaan Jasa WebSite	Tersedianya data/informasi	2	Web site	25.600.000	1	10.800.000	-	-	-	-	-	-	1	10.800.000	0	42
Rata-rata capaian kinerja (%)													36	55			8	88
Predikat kinerja													SR	R			SR	T
4	0.8.0.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1		645.148.100	-	535.738.100	-	87.410.000	-	18.790.000	21	21	-	623.148.100	-	97
	0.2.0.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Penyediaan perlengkapan gedung Kantor	4	Unit	55.500.000	2	50.000.000			-	-		-		50.000.000	-	90
	0.2.0.9	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	6	Unit	67.700.000	4	51.200.000			-		-	-	4	51.200.000	67	76
	0.2.2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas operasional	22	Item	454.948.100	20	371.538.100	4	83.410.000	2	27.470.000	33	33	22	454.948.100	100	100
	0.2.2.8	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan Gedung kantor	24	Item	27.000.000	18	23.000.000	3	4.000.000	2	1.800.000	45	45	20	27.000.000	83	100
	0.2.6.5	Sewa Kantor	Tersedianya kantor kecamatan	2	Tahun	40.000.000	2	40.000.000	-	-	-	-	-	-	2	40.000.000	100	100
Rata-rata capaian kinerja (%)													39	39			70	93
Predikat kinerja													SR	SR			S	ST
4	8.6.0.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya peningkatan disiplin aparaturnya	1		38.500.000	-	36.600.000	-	7.200.000	-	-	-	-	-	43.800.000	-	114
	0.3.0.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Penyediaan pakaian dinas	108	Stel	63.840.000	71	36.600.000	13	7.200.000	13	7.200.000	100	100	84	43.800.000	78	69
Rata-rata capaian kinerja (%)													100	100			78	69
Predikat kinerja													ST	ST			T	S
4	0.8.0.6	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1		281.094.000	-	232.506.000	-	-	-	-	-	-	-	232.506.000	-	83
	0.6.0.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja	28	Dokumen	73.229.800	24	68.667.000			-	-	-	-	24	68.667.000	86	94
	0.6.0.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan Keuangan semesteran	10	Dokumen	7.626.000	8	6.306.000			-	-	-	-	8	6.306.000	80	83
	0.6.0.3	Ekspose Capaian Pembangunan	Jumlah Ekspose capaian pembangunan	9	Kegiatan	77.000.000	7	52.540.000			-	-	-	-	7	52.540.000	78	68

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD OPD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD OPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7*100		10 = 6+8		11 = 10/5*100	
	0.6.0.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah pembinaan dan fasilitasi pengelolaan desa	76	Desa	80.124.700	57	66.051.000		-	-	-	-	57	66.051.000	75	82
	0.6.0.5	Penyusunan Renja OPD	Jumlah Renja Kecamatan Gedong Tataan	5	Dokumen	21.201.500	2	17.330.000				-	-	2	17.330.000	40	82
	2.1.2.5	Penyusunan/Revisi Renstra	Tersedianya dokumen keuangan (renstra)	1	Dokumen	1.500.000	1	1.200.000	-	-	-	-	-	1	1.200.000	100	80
	5.5.3.2	Penyusunan Profil Kecamatan	Tersedianya data/informasi kegiatan	1	Buku	9.612.000	1	9.612.000	-	-	-	-	-	1	9.612.000	100	100
	0.5.0.8	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya koordinasi dan pelaporan aparatur	1	Laporan	10.800.000	1	10.800.000	-	-	-	-	-	1	10.800.000	100	100
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-			82	86
Predikat kinerja												SR	SR			T	T
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													459.231.000				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)												32,26	13,65		R	SR	SR

57. Kecamatan Punduh Pedada

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD OPD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD OPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD SKPD TW II Tahun 2023 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7*100		10 = 6+8		11 = 10/5*100	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.633.559.178		1.056.792.444		1.253.109.950		607.885.963		309,30		2.305.255.394		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.483.447.390		979.408.252		1.088.387.950	-	488.800.511		96,28		2.067.796.202		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84	6.579.678.670	14	852.208.252	14	961.187.950	8	422.200.511	43,92	43,92	22	1.813.396.202	26,19	27,56
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	903.768.720	12	127.200.000	12	127.200.000	6	66.600.000	52,36	52,36	18	254.400.000	25,00	28,15
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		421.110.895		18.023.392		69.352.000	-	36.112.452	52,07	52,07	-	87.375.392	-	20,75
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72	14.210.200	12	1.000.000		2.000.000	-	-	-	-	12	3.000.000	16,67	21,11
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	81.543.194	12	6.739.000	12	11.391.000	6	7.362.500	64,63	64,63	18	18.130.000	25,00	22,23
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72	28.420.400	12	120.000	12	4.000.000	6	4.000.000	100,00	100,00	18	4.120.000	25,00	14,50
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72	95.918.850	12	2.300.000	12	13.500.000	6	4.500.000	33,33	33,33	18	15.800.000	25,00	16,47

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD OPD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD OPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD SKPD TW II Tahun 2023 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7*100		10 = 6+8		11 = 10/5*100	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72	23.169.731	12	986.200	12	3.261.000	3	3.261.000	100,00	100,00	15	4.247.200	20,83	18,33
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72	17.052.240	1	2.400.000	12	2.400.000	6	1.200.000	50,00	50,00	7	4.800.000	9,72	28,15
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	85.261.200	1	2.900.000	12	22.000.000	6	14.575.000	66,25	66,25	7	24.900.000	9,72	29,20
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	75.535.080	12	1.578.192	12	10.800.000	6	1.213.952	11,24	11,24	18	12.378.192	25,00	16,39
Rata-rata capaian kinerja (%)												40,57	49,33			14,88	15,37
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1	583.699.513		50.660.000	-	71.570.000	-	66.923.000	93,51	93,51	-	117.583.000	-	20,14
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	72	556.897.738	3	50.410.000	12	66.320.000	6	34.823.000	52,51	52,51	9	116.730.000	12,50	20,96
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Terpeliharanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	6	26.801.775	1	250.000	1	5.250.000	0	-	-	-	1	5.500.000	16,67	20,52
Rata-rata capaian kinerja (%)												13,13	13,13			7,29	10,37
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
		<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	1	145.301.380	-	8.700.800	-	23.800.000	-	16.050.000	67,44	67,44	-	32.500.800		
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	98.292.110	1	8.151.000	1	16.100.000	1	12.200.000	75,78	75,78	2	24.251.000	40,00	24,67
		Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal yang terkait dlm pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum kec. Way lima	Terlaksananya Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal yang terkait dlm pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	20	47.009.270	1	549.800	1	7.700.000	2	3.850.000	50,00	50,00	3	8.249.800	15,00	17,55
Rata-rata capaian kinerja (%)												17,97	17,97			7,86	6,03
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)												17,92	20,11			7,51	7,94
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)												SR	SR			SR	SR



58. Kecamatan Kedondong

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD OPD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD OPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD SKPD TW II Tahun 2023 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7*100		10 = 6+8		11 = 10/5*100	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>															
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	9.256.791.258	####	224.520.500	100%	251.425.300	100%	125.290.175	49,83	52,78	2	349.810.675	0,00	3,78
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	12.210.200	0	-	1	900.000	1	900.000	100,00	100,00	1	900.000	16,67	7,37
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							-							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	7.394.988.521	12	-			-							
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	1.482.940.242	12	192.200.000	12	210.480.000	6	99.240.000	47,15	47,15	18	402.680.000	25,00	27,15
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah							-							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	57.314.525	12	2.890.500	12	5.939.000	6	3.395.000	57,16	57,16	18	8.829.500	25,00	15,41
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72	14.210.200	12	-	12	856.300	6	635.000	74,16	74,16	18	856.300	25,00	6,03
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72	63.945.900	12	2.700.000	12	4.500.000	6	2.700.000	60,00	60,00	18	7.200.000	25,00	11,26
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72	18.052.240	12	1.470.000,00	12	450.000	3	450.000	100,00	100,00	15	1.920.000	20,83	10,64
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72	38.946.520	1	7.200.000	12	3.000.000	6	1.000.000	33,33	33,33	7	10.200.000	9,72	26,19
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	26.657.340	1	1.500.000	12	10.000.000	3	10.000.000	100,00	100,00	4	11.500.000	5,56	43,14
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	6.394.590	12	360.000	12	900.000	6	540.000	60,00	60,00	18	1.260.000	25,00	19,70
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	55.869.780	12	4.200.000	12	2.400.000	3	430.175	17,92	17,92	15	6.600.000	20,83	11,81
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72	85.261.200	12	12.000.000	12	12.000.000	6	6.000.000	50,00	50,00	18	24.000.000	25,00	28,15
Rata-rata capaian kinerja (%)												<b>39,86</b>	<b>35,67</b>			<b>12,50</b>	<b>7,08</b>
Predikat kinerja												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	100%	474.762.782		52.860.000	-	55.403.000	-	47.410.000	85,57	83,49	-	100.270.000	0,00	21,12

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023**

		Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah														
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	72	453.447.482	3	51.350.000	12	53.970.000	6	25.860.000	47,92	47,92	9	105.320.000	12,50	23,23
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Terpeliharanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	5	21.315.300	1	1.510.000	1	1.433.000	0	-	0,00	0,00	1	2.943.000	20,00	13,81
Rata-rata capaian kinerja (%)												11,98	13,26			6,50	7,41
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	37.851.620	-	0	-	-	-	-						
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terbayarnya Jasa Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	50	37.851.620	10	-	-	-	-	-						
Rata-rata capaian kinerja (%)												0,00	0,00			0,00	0,00
												SR	SR	0		SR	SR
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	156.551.380	-	11.250.000	-	23.800.000	-	10.775.000	45,27	46,62	-	35.050.000		
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	98.292.110	1	0	1	16.100.000	1	8.850.000	54,97	54,97	2	16.100.000	40,00	16,38
		Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan/instansi vertikal yang terkait dlm pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum kec. Way lima	Terlaksannya Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan/instansi vertikal yang terkait dlm pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum kec. Way lima	20	47.009.270	-	0	4	7.700.000	1	1.925.000	25,00	25,00	1	7.700.000	5,00	16,38
		Fasilitasi Sinnkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinnkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa	1	11.250.000	1	11.250.000	-	0								
							-										
Rata-rata capaian kinerja (%)												11,42	15,89			6,43	4,68
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)												15,82	17,33			6,36	4,79
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)												SR	SR			SR	SR

59. Kecamatan Marga Punduh

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD OPD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD OPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD SKPD TW II Tahun 2023 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4		5		6		7		8	9 = 8 / 7*100		10 = 6+8		11 = 10 / 5*100	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>8.633.559.178</b>		<b>1.056.792.444</b>		<b>1.253.109.950</b>		<b>607.885.963</b>		<b>309,30</b>		<b>2.305.255.394</b>		
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>7.483.447.390</b>		<b>979.408.252</b>		<b>1.088.387.950</b>	-	<b>488.800.511</b>		<b>96,28</b>		<b>2.067.796.202</b>		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84	6.579.678.670	14	852.208.252	14	961.187.950	8	422.200.511	43,92	43,92	22	1.813.396.202	26,19	27,56
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	903.768.720	12	127.200.000	12	127.200.000	6	66.600.000	52,36	52,36	18	254.400.000	25,00	28,15
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>421.110.895</b>		<b>18.023.392</b>		<b>69.352.000</b>	-	<b>36.112.452</b>	<b>52,07</b>	<b>52,07</b>	-	<b>87.375.392</b>	-	<b>20,75</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72	14.210.200	12	1.000.000		2.000.000	-	-	-	-	12	3.000.000	16,67	21,11
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	81.543.194	12	6.739.000	12	11.391.000	6	7.362.500	64,63	64,63	18	18.130.000	25,00	22,23
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72	28.420.400	12	120.000	12	4.000.000	6	4.000.000	100,00	100,00	18	4.120.000	25,00	14,50
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72	95.918.850	12	2.300.000	12	13.500.000	6	4.500.000	33,33	33,33	18	15.800.000	25,00	16,47
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72	23.169.731	12	986.200	12	3.261.000	3	3.261.000	100,00	100,00	15	4.247.200	20,83	18,33
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72	17.052.240	1	2.400.000	12	2.400.000	6	1.200.000	50,00	50,00	7	4.800.000	9,72	28,15
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	85.261.200	1	2.900.000	12	22.000.000	6	14.575.000	66,25	66,25	7	24.900.000	9,72	29,20
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	75.535.080	12	1.578.192	12	10.800.000	6	1.213.952	11,24	11,24	18	12.378.192	25,00	16,39
Rata-rata capaian kinerja (%)												<b>40,57</b>	<b>49,33</b>			<b>14,88</b>	<b>15,37</b>
Predikat kinerja												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1</b>	<b>583.699.513</b>		<b>50.660.000</b>	<b>-</b>	<b>71.570.000</b>	<b>-</b>	<b>66.923.000</b>	<b>93,51</b>	<b>93,51</b>	<b>-</b>	<b>117.583.000</b>	<b>-</b>	<b>20,14</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	72	556.897.738	3	50.410.000	12	66.320.000	6	34.823.000	52,51	52,51	9	116.730.000	12,50	20,96
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Terpeliharanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	6	26.801.775	1	250.000	1	5.250.000	0	-	-	-	1	5.500.000	16,67	20,52

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD OPD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD OPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD SKPD TW II Tahun 2023 (%)		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7*100		10 = 6+8		11 = 10/5*100		
Rata-rata capaian kinerja (%)												13,13	13,13				7,29	10,37
Predikat kinerja												SR	SR				SR	SR
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1		145.301.380	-	8.700.800	-	23.800.000	-	16.050.000	67,44	67,44	-	32.500.800		
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5		98.292.110	1	8.151.000	1	16.100.000	1	12.200.000	75,78	75,78	2	24.251.000	40,00	24,67
		Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan/instansi vertikal yang terkait dlm pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum kec. Way lima	Terlaksannya Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan/instansi vertikal yang terkait dlm pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	20		47.009.270	1	549.800	1	7.700.000	2	3.850.000	50,00	50,00	3	8.249.800	15,00	17,55
Rata-rata capaian kinerja (%)												11,97	22,32				14,29	24,04
Predikat kinerja												SR	SR				SR	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)												11,97	22,32				14,29	24,04
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)												SR	SR				SR	SR

60. Kecamatan Way Khilau

No	Kode Rek				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2				3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
7	01	01	2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			12.210.200		2.000.000		2.846.200		2.846.200						
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	12.210.000	1	2.000.000	1	2.846.200	1	2.846.200	100,00	100,00	2	4.846.200	40,00	39,69
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	100,00			40,00	39,69
Predikat kinerja															ST	ST			SR	SR
7	01	01	2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			7.800.917.997		3.193.284.220		1.639.588.008		716.361.400						
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Belanja Tambahan Penghasilan ASN	50	5.866.226.317	24	2.675.734.220	12	1.362.788.008	6	395.780.139	50,00	29,04	30	3.071.514.359	60,00	52,36

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode Rek				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2				3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	72	1.934.691.680	24	517.550.000	12	276.800.000	6	82.589.400	50,00	29,84	30	600.139.400	41,67	31,02
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,00	29,44			50,83	41,69
Predikat kinerja															SR	SR			R	SR
7	01	01	2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			323.880.917		84.700.200		118.478.000		35.778.900						
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	72	68.779.450	24	19.676.000	12	15.554.200	6	4.853.700	50,00	31,21	30	24.529.700	41,67	35,66
7	01	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	72	21.315.300	24	6.000.000	12	3.000.000	3	700.000	25,00	23,33	27	6.700.000	37,50	31,43
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	72	37.161.651	24	11.104.200	12	5.113.800	6	2.690.200	50,00	52,61	30	13.794.400	41,67	37,12
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72	36.662.316	24	10.320.000	12	7.680.000	6	2.560.000	50,00	33,33	30	12.880.000	41,67	35,13
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	72	159.962.200	24	37.600.000	12	62.500.000	6	23.050.000	50,00	36,88	30	60.650.000	41,67	37,92
Rata-rata capaian kinerja (%)															37,50	29,56			34,03	29,54
Predikat kinerja															SR	SR			SR	SR
4	11	01	01.28		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			51.156.720		7.000.000										
4	11	01	01.28	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2	7.000.000	1	7.000.000			-	-			1	7.000.000	50,00	100,00
Rata-rata capaian kinerja (%)															0,00	0,00			50,00	100,00
Predikat kinerja															SR	SR			SR	ST
7	01	01	2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			285.625.020		63.718.340		67.300.000		13.600.000						
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	12.789.180	24	2.250.000	12	2.500.000	6	800.000	50,00	32,00	30	3.050.000	41,67	23,85
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	72	42.630.600	24	11.968.340	12	8.400.000	6	2.000.000	50,00	23,81	30	13.968.340	41,67	32,77
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Petugas Tenaga Kontrak	72	230.205.240	24	49.500.000	12	56.400.000	6	10.800.000	50,00	19,15	30	60.300.000	41,67	26,19
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,00	24,99			41,67	27,60
Predikat kinerja															SR	SR			SR	SR
7	01	01	2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			611.899.141		137.430.000		136.480.000		18.735.500						
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang Terpelihara	72	583.478.741	24	129.430.000	12	132.480.000	6	18.235.500	50,00	13,76	30	147.665.500	41,67	25,31
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	6	28.420.400	2	8.000.000	1	4.000.000	1	500.000	100,00	12,50	3	8.500.000	50,00	29,91
Rata-rata capaian kinerja (%)															75,00	13,13			45,83	27,61
Predikat kinerja															S	SR			SR	SR
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN															

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode Rek				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (2021 s/d Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2				3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
					PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
7	01	02	2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN			83.029.360				13.600.000		9.000.000						
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	83.029.360			1	13.600.000	1	9.000.000	100,00	66,18	1	9.000.000	20,00	10,84
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	66,18			20,00	10,84
Predikat kinerja															ST	S			SR	SR
7	01	02	2.03		KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM			13.736.475				2.250.000		-						
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4	13.736.475			1	2.250.000	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja (%)															0,00	0,00			0,00	0,00
Predikat kinerja															SR	SR			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												1.980.542.208		796.322.000						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															45,83	32,91			35,30	34,62
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															SR	SR			SR	SR

## 61. Kecamatan Teluk Pandan

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD OPD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD OPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7*100		10 = 6+8		11 = 10/ 5*100		
	0.8.0.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	2.594.040.000		2.035.995.000		364.621.000	-		9	-		2.400.616.000	-	93	
	0.1.0.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Jasa Surat-menyurat	3900	buah	12.840.000	698	10.800.000	400	1.800.000	65	450.000	25	25	763	12.600.000	20	98
	0.1.0.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi dan SDA dan Listrik	71	bulan	42.000.000	60	35.400.000	12	6.000.000	6	3.000.000	50	50	66	41.400.000	0	99
	0.1.0.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan dan Tenaga Kontrak	114	Orang	1.397.532.000	67	1.108.568.000	20	244.800.000	10	128.550.000	53	53	77	1.353.368.000	0	97
	0.1.1.0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	210	Item	93.691.100	83	75.011.000	27	10.781.000	16	6.028.000	56	56	99	85.792.000	0	92
	0.1.1.1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	42	Item	39.100.000	30	32.200.000	4	6.000.000	1	1.755.000	29	29	31	38.200.000	0	98
	0.1.1.4	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah perlatan rumah tangga	84	Item	21.624.000	66	18.534.000	16	3.000.000	8	1.175.000	39,2	39	74	21.534.000	0	100
	0.1.1.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	18	Item	31.320.000	17	26.160.000	4	5.160.000	2	2.580.000	50	50	19	31.320.000	0	100



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD OPD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD OPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3	4	5			6		7		8		9 = 8 / 7*100		10 = 6+8		11 = 10/5*100	
	0.1.1.7	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	7572	Kotak	181.750.000	5134	150.250.000	668	15.030.000	192	3.840.000	26	26	5.326	165.280.000	0	91
	0.1.1.8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	2052	kali	114.225.000	1368	88.575.000	171	25.650.000	56	9.207.000	36	36	1.424	114.225.000	0	100
	0.1.1.9	Kegiatan Lomba Desa	Jumlah Lomba Desa Tingkat Kecamatan dan terealisasinya kegiatan limba Kesrak PKK, P3KSS,Lomba Desa Tingkat Kabupaten	16	kegiatan	127.700.000	4	84.800.000			-	-	0	-	4	84.800.000	0	66
	0.1.2.0	Musabaqoh Tilawatil Qur'an	Jumlah MTQ Tingkat Kecamatan	4	kegiatan	106.289.000	2	72.620.000					0		2	72.620.000	0	68
	0.1.2.1	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang	4	kegiatan	38.683.500	4	27.305.000	1	7.000.000	1	7.000.000	100	100	5	34.305.000	0	89
	0.1.2.2	Fasilitasi Gadis	Jumlah Fasilitasi Gerakan Desa Ikut Sejahtera	4	kegiatan	64.945.400	2	50.002.000	1	7.000.000			-		2	57.002.000	0	88
	0.1.2.4	Kunjungan Silaturahmi Ramadhan (Safari Ramadhan)	Jumlah Terlaksananya Silaturahmi Ramadhan (Safari Ramadhan)	4	kegiatan	53.430.000	2	43.600.000					-		2	43.600.000	0	82
	0.1.2.7	Penyediaan Jasa Kebersihan, Sopir dan Keamanan	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan, Sopir dan Keamanan	18	Orang	218.310.000	18	176.370.000	3	32.400.000	2	11.100.000	34	34	20	208.770.000	111	96
	0.1	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah Pembantu ( PPID )	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah Pembantu	12	Dokumen	25.000.000	12	25.000.000	-	-	-	-	-	-	12	25.000.000	0	100
	2.3.0.4	Penyediaan Jasa WebSite	Tersedianya data/informasi	2	Web site	25.600.000	1	10.800.000	-	-	-	-	-	-	1	10.800.000	0	42
Rata-rata capaian kinerja (%)													36	55			8	88
Predikat kinerja													SR	R			SR	T
4	0.8.0.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1		645.148.100	-	535.738.100	-	87.410.000	-	18.790.000	21	21	-	623.148.100	-	97
	0.2.0.7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Penyediaan perlengkapan gedung Kantor	4	Unit	55.500.000	2	50.000.000			-	-		-		50.000.000	-	90
	0.2.0.9	Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	6	Unit	67.700.000	4	51.200.000			-		-	-	4	51.200.000	67	76
	0.2.2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas operasional	22	Item	454.948.100	20	371.538.100	4	83.410.000	2	27.470.000	33	33	22	454.948.100	100	100
	0.2.2.8	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan Gedung kantor	24	Item	27.000.000	18	23.000.000	3	4.000.000	2	1.800.000	45	45	20	27.000.000	83	100
	0.2.6.5	Sewa Kantor	Tersedianya kantor kecamatan	2	Tahun	40.000.000	2	40.000.000	-	-	-	-	-	-	2	40.000.000	100	100
Rata-rata capaian kinerja (%)													39	39			70	93
Predikat kinerja													SR	SR			S	ST
4	8.6.0.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya peningkatan disiplin apartur	1		38.500.000	-	36.600.000	-	7.200.000	-	-	-	-	-	43.800.000	-	114
	0.3.0.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Penyediaan pakaian dinas	108	Stel	63.840.000	71	36.600.000	13	7.200.000	13	7.200.000	100	100	84	43.800.000	78	69
Rata-rata capaian kinerja (%)													100	100			78	69
Predikat kinerja													ST	ST			T	S

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD OPD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD OPD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Triwulan II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Akhir Triwulan II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Triwulan II Tahun 2023 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7*100		10 = 6+8		11 = 10/5*100	
4	0.8.0.6	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	281.094.000	-	232.506.000	-	-	-	-	-	-	-	232.506.000	-	83
	0.6.0.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja	28	Dokumen 73.229.800	24	68.667.000			-	-	-	-	24	68.667.000	86	94
	0.6.0.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan Keuangan semesteran	10	Dokumen 7.626.000	8	6.306.000			-	-	-	-	8	6.306.000	80	83
	0.6.0.3	Ekspose Capaian Pembangunan	Jumlah Ekspose capaian pembangunan	9	Kegiatan 77.000.000	7	52.540.000			-	-	-	-	7	52.540.000	78	68
	0.6.0.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah pembinaan dan fasilitasi pengelolaan desa	76	Desa 80.124.700	57	66.051.000			-	-	-	-	57	66.051.000	75	82
	0.6.0.5	Penyusunan Renja OPD	Jumlah Renja Kecamatan Gedong Tataan	5	Dokumen 21.201.500	2	17.330.000					-	-	2	17.330.000	40	82
Rata-rata capaian kinerja (%)												-	-			72	74
Predikat kinerja												SR	SR			T	T
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											459.231.000						
												24,3	23,0			24,34	23,0
												4	1				1
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)												SR	SR		R	SR	SR

## 62. Kecamatan Way Ratai

No	Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun( 2021 S/D Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu ( 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
1	Kewilayahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.633.559.178		1.442.904.202		1.442.904.202		756.782.078		334,94		2.890.110.004		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.483.447.390		1.152.297.202		1.152.297.202	-	530.456.950		97,49		2.304.594.404		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84	6.579.678.670	14	1.020.982.202	14	1.020.982.202	8	461.838.450	45,23	45,23	22	2.041.964.404	26,19	31,03
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	903.768.720	12	131.315.000	12	131.315.000	6	68.618.500	52,25	52,25	18	262.630.000	25,00	29,06
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		421.110.895		130.699.100		130.699.100	-	65.965.628	50,47	50,47	-	261.398.200	0,00	62,07
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72	14.210.200	12	2.000.000	12	2.000.000	-	-	0,00	0,00	12	4.000.000	16,67	28,15

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023**

No	Urusan				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun( 2021 S/D Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu ( 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2				3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	81.543.194	12	22.891.000	12	22.891.000	6	12.108.400	52,90	52,90	18	45.782.000	25,00	56,14
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72	28.420.400	12	10.035.500	12	10.035.500	6	6.255.500	62,33	62,33	18	20.071.000	25,00	70,62
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72	95.918.850	12	28.700.000	12	28.700.000	6	11.500.000	40,07	40,07	18	57.400.000	25,00	59,84
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72	23.169.731	12	7.157.600	12	7.157.600	6	3.484.600	48,68	48,68	18	14.315.200	25,00	61,78
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72	17.052.240	1	3.600.000	12	3.600.000	6	1.800.000	50,00	50,00	7	7.200.000	9,72	42,22
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	85.261.200	1	42.515.000	12	42.515.000	6	26.615.000	62,60	62,60	7	85.030.000	9,72	99,73
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	75.535.080	12	13.800.000	12	13.800.000	6	4.202.128	30,45	30,45	18	27.600.000	25,00	36,54
Rata-rata capaian kinerja (%)															31,99	40,86			15,26	36,25
Predikat kinerja															SR	SR			SR	SR
					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	<b>583.699.513</b>		<b>136.107.900</b>	-	<b>136.107.900</b>	-	<b>140.409.500</b>	<b>103,16</b>	<b>103,16</b>	-	<b>276.517.400</b>	<b>0,00</b>	<b>47,37</b>
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	72	556.897.738	3	121.570.000	12	121.570.000		100.509.500	82,68	82,68	3	243.140.000		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	26.801.775	1	14.537.900	1	14.537.900			0,00	0,00	1	29.075.800		
Rata-rata capaian kinerja (%)															20,67	20,67			0,00	0,00
Predikat kinerja															SR	SR			SR	SR
					<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	100%	<b>145.301.380</b>	-	<b>23.800.000</b>	-	<b>23.800.000</b>	-	<b>19.950.000</b>	83,82	83,82	-	<b>47.600.000</b>		
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	98.292.110	1	16.100.000	1	16.100.000	1	16.100.000	100,00	100,00	2	32.200.000	40,00	32,76
					Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan/instansi vertikal yang terkait dlm pemeliharaan sarana dan prasarana	Terlaksananya Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan/instansi vertikal yang terkait dlm pemeliharaan	20	47.009.270	1	7.700.000	1	7.700.000	1	3.850.000	50,00	50,00	2	15.400.000		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun( 2021 S/D Tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu ( 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
		pelayanan umum kec. Way Ratai	sarana dan prasarana pelayanan umum														
Rata-rata capaian kinerja (%)												21,43	21,43			5,71	4,68
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)												18,52	20,74			5,24	10,23
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)												SR	SR			SR	SR

### 63. Inspektorat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023(%)			
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.	K	Rp. (000)		K	Rp.	
2					3	4	5			6			7			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100			
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			60.867.232.375				15.602.001.118				8.645.259.598		3.884.912.483								
6	01	01	2.01				100%		423.075.200		100%	92.955.200		1		-		-						92.955.200		21,97
				07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			169	OPD		146	92.955.200	0		0		-	-	-	-	146	92.955.200	86,39	21,97	
						Jumlah Evaluasi SPIP																				
						Jumlah Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah																				
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat daerah			100%		54.169.257.275		100%	14.387.672.712		1		8.227.232.798		3.625.277.198							
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Inspektorat)			72	orang		51.155.826.275	24	13.628.471.712	12		7.781.152.798	6		3.397.457.198	50,00	43,66	30	17.025.928.910	41,67	33,28	
				02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD(Inspektorat)			72	Bulan		3.013.431.000	24	759.201.000	12		446.080.000	6		227.820.000	50,00	51,07	30	987.021.000	41,67	32,75	
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%		1.733.633.000		100%	219.124.400		1		-		-				219.124.400	0,00	12,64	
				01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			170	Orang		1.419.520.000	31	188.324.400	0		-	0		-	-	-	31	188.324.400	18,24	13,27	
				02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			328	Orang		314.113.000	96	30.800.000	0		-	0		-	-	-	96	30.800.000	29,27	9,81	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%		1.883.370.600		100%	404.091.452		1		145.355.500		88.372.864							
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik			72	bulan		68.725.000	24	13.180.000	0		-	0		-	-	-	24	13.180.000	33,33	19,18	
				02	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor			72	bulan		306.772.000	24	63.682.000	12		30.023.500	6		16.550.150	50,00	55,12	30	80.232.150	41,67	26,15	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023(%)			
2					3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100			
				03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah tangga	72	bulan	69.293.000	24	14.163.000	0	-	0	-	-	-	24	14.163.000	33,33	20,44		
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik kantor	72	bulan	270.534.000	24	61.689.000	12	10.000.000	6	5.242.000	50,00	52,42	30	66.931.000	41,67	24,74		
				05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72	bulan	276.766.600	24	61.196.600	12	25.194.000	6	22.600.000	50,00	89,70	30	83.796.600	41,67	30,28		
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	72	bulan	212.850.000	24	54.000.000	12	25.000.000	6	12.600.000	50,00	50,40	30	66.600.000	41,67	31,29		
				07	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	bulan	678.430.000	24	136.180.852	12	55.138.000	6	31.380.714	50,00	56,91	30	167.561.566	41,67	24,70		
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		667.390.000		100%	49.240.000		1	15.000.000			113.950.000					
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Laninnya	72	bulan	667.390.000	24	49.240.000	12	15.000.000	5	15.000.000	41,67	100,00	29	64.240.000	40,28	9,63		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Lainnya	200	unit	2.293.389.599	0	-	9	195.144.500										
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		288.400.000		100%	23.949.554		1	55.200.000			17.853.221			41.802.775	0,00	14,49
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	bulan	288.400.000	24	23.949.554	12	55.200.000	6	17.853.221	50,00	32,34	30	41.802.775	41,67	14,49		
6	01	01	2.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		1.702.106.300		100%	424.967.800		1	202.471.300			39.459.200					
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	72	bulan	1.219.906.300	24	330.967.800	12	202.471.300	6	39.459.200	50,00	19,49	30	370.427.000	41,67	30,37		
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72	bulan	112.200.000	24	26.000.000	0	-	0	-	-	-	24	26.000.000	33,33	23,17		
				09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	unit	370.000.000	13	68.000.000	0	-	0	-	-	-	13	68.000.000	216,67	18,38		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	35,12	39,37			61,85	30,93	
Predikat kinerja																	SR	SR			R	SR	
6	1	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan				7.068.975.500		2.646.139.504		36.000.000		68.250.000								
			01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100%		7.068.975.500		100%	2.646.139.504		1	36.000.000			68.250.000					
				01	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah ASN yang Melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	910	laporan	2.001.908.500		364	811.172.504	0	-	0	-	-	-	364	811.172.504	40,00	40,52	
					Jumlah Laporan Pemuktahiran Data Irien																		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023(%)		
2					3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
						Departemen pada Kementerian dan BPK RI																
						Jumlah Laporan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT)																
						Jumlah Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan																
						Jumlah Tindak Lanjut Pemeriksaan Khusus																
					02	Jumlah reviu LKPD	30	Laporan		30	167.967.000	0	-	0	-	-	-	30	167.967.000	100,00	99,94	
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Reviu LAKIP, SSH,BMD,HSPK dan ASB/ SBM			168.067.000													
						Jumlah Reviu PBJ																
						Jumlah Reviu RKA																
						Jumlah Reviu RKPD																
						Jumlah Reviu KUA dan PPAS																
						Jumlah Reviu Renja OPD																
					03	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	592	Laporan	-	-	50	69.300.000									
					04	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	590	Laporan	-	-	50	72.000.000									
					05	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Koperehensif	1070	Laporan	4.899.000.000	428	1.667.000.000	10	36.000.000	10	36.000.000	100,00	100,00	438	1.703.000.000	40,93	34,76
					06	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	225	laporan	-	-	15	67.200.000									
Rata-rata capaian kinerja (%)																33,33	33,33			60,31	58,41	
Predikat kinerja																SR	SR			R	R	
6	01	03			Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi				982.617.000		886.021.000		-		-							
				2.02	Pendampingan dan Assistensi			100%	982.617.000	100%	886.021.000	1	-		-							
				01	Pendampingan dan Assistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelaksanaan pengelolaan Wistle Blowing System (WBS)	115	Laporan	113.770.000	46	113.190.000	0	0	0	-	-	-	46	113.190.000	40,00	99,49	
						Jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat																
						Jumlah Tindak Lanjut antar APIP dan APH																
				02	Pendampingan, Assistensi, Verifikasi dan Repormasi Birokrasi	Jumlah Tim Satgas Unit Pemberantasan Pungli	239	Laporan	868.847.000	92	772.831.000	0	-	0	-	-	-	92	772.831.000	38,49	88,95	
						Jumlah Unit Pengendalian Gratifikasi																
						Jumlah Laporan Survey Penilaian Integritas																
						Jumlah Zona Integritas																



# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023(%)	
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
		Jumlah Koordinasi MCP (Monitoring Center Prevention)														
Rata-rata capaian kinerja (%)											-	-	69	443.010.500	26,16	62,81
Predikat kinerja											SR	SR			SR	S
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											8.681.259.598	3.953.162.483				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)											22,82	24,23	23	147.670.167	49,44	50,72
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)											SR	SR			SR	SR

## 64. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			
								K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		K	Rp. (000)
1	2					3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		K	Rp.		14 = 6 + 12		K	Rp.	
1	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	100	Persen	33.173.704.779	17,30	8.727.885.382	100	4.731.526.600	37,16	2.493.017.134	37,16	52,69	179,35	11.220.902.516	179,35	33,82		
2	01	01	2.02			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Persen	102.102.000	0,00	-	100	20.000.000	85,71	1.181.494.426	85,71	5907,47	1072,08	1.181.494.426	1072,08	1157,17		
3	01	01	2.02	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dok	51.051.000	0		7	10.000.000	17	5.016.800	246,94	50,17	17	5.016.800	432,14	9,83		
			02			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Lap	51.051.000	0		8	10.000.000	137	1.176.477.626	1712,02	11764,78	137	1.176.477.626	1712,02	2304,51		
2	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	Persen	24.459.883.885	20,68	6.913.040.111	100	3.833.716.600	406,82	822.643.004	406,82	21,46	143,34	7.735.683.115	143,34	31,63		
3	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, serta Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2232	Org/Bln	23.440.263.575	744	6.633.442.911	360	3.688.996.600	92	791.961.004	25,58	21,47	836	7.425.403.915	37,46	31,68		
4	01	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	Dok	474.901.600	2	272.147.200	8	139.720.000	19	28.420.000	239,42	20,34	21	300.567.200	352,56	63,29		
5	01	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	Dok	544.718.710	4	7.450.000	16	5.000.000	4	2.262.000	25,00	45,24	8	9.712.000	40,00	1,78		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
								K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2					3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
6	0	1	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen	61.051.000	6,6667	8.495.000	100	-	0,00	4.305.000	0,00	0,00	89,71	12.800.000	89,71	20,97
7	0	1	0	2.0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15	Lap	61.051.000	3	8.495.000	3		10,4563	4.305.000	348,54	0,00	13	12.800.000	89,71	20,97
8	0	1	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	1.120.686.944	11,6667	133.128.200	100	33.500.000	10,80	59.978.172	10,80	179,04	116,30	193.106.372	116,30	17,23
9	0	1	0	2.0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15	Paket	317.461.000	3	113.128.200	0		3	-	0,00	0,00	6	113.128.200	40,00	35,64
10	0	1	0	2.0	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	Dok	313.035.872	1	10.000.000	1		12,9318	4.305.000	1293,18	0,00	14	14.305.000	278,64	4,57
11	0	1	0	2.0	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60	Dok	45.030.600	12	10.000.000	12	17.000.000	31,8933	4.525.000	265,78	26,62	44	14.525.000	73,16	32,26
			0			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55	Orang	445.159.472			11	16.500.000	40,3858	51.148.172	367,14	309,99	40	51.148.172	73,43	11,49
12	0	1	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	2.034.196.946	18,10	377.411.934	100	183.782.500	30,88	80.089.672	30,88	43,58	700,77	457.501.606	700,77	22,49
13	0	1	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	75.826.500	2	9.150.000	0		19,6576	9.854.000	0,00	0,00	22	19.004.000	360,96	25,06
14	0	1	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	158.449.633	2	55.867.500	12	30.000.000	7,39278	12.699.500	61,61	42,33	9	68.567.000	156,55	43,27
15	0	1	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	125.095.415	2	20.244.100	7	14.500.000	37,2407	11.096.500	532,01	76,53	39	31.340.600	654,01	25,05
16	0	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	256.510.460	2	31.100.000	12	12.509.500	18,4367	6.062.000	153,64	48,46	20	37.162.000	340,61	14,49
17	0	1	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	419.573.795	2	44.865.000	12	17.970.000	3	16.988.000	25,00	94,54	5	61.853.000	83,33	14,74
18	0	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	Dok	491.202.425	2	77.535.000	1	34.480.000	194,973	19.618.672	19497,30	56,90	197	97.153.672	3282,88	19,78
19	0	1	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347	Lap	507.538.719	80,122	138.650.334	75	74.323.000	13,7046	3.771.000	18,27	5,07	94	142.421.334	27,04	28,06
20	0	1	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	1.729.158.302	19,4643	222.563.700	100	23.587.500	31,69	133.714.800	31,69	566,89	23,19	356.278.500	23,19	20,60
20	0	1	0	2.0		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	56	Unit	510.946.600	11	163.082.700	7,00	23.587.500	2	23.500.000	28,57	99,63	13	186.582.700	23,21	36,52
21	0	1	0	2.0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	280	Unit	1.218.211.702	54	59.481.000	0		10,8701	110.214.800	0,00	0,00	65	169.695.800	23,17	13,93
22	0	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	1.873.250.225	20,83	604.605.097	100	423.000.000	35,11	189.054.560	35,11	44,69	60,65	417.233.434	157,34	22,27

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.	
1	2				3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
23	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	Lap	939.497.675	2	88.424.097	12	150.000.000	14,6308	109.277.060	121,92	72,85	17	197.701.157	277,18	21,04
24	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Lap	933.752.550	24	516.181.000	12	273.000.000	3	79.777.500	25,00	29,22	27	595.958.500	37,50	63,82
25	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	1.793.375.478	23,70	468.641.340	100	213.940.000	0,00	21.737.500	0,00	10,16	24,81	490.378.840	24,81	27,34
26	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	Unit	945.961.188	10	286.624.390	5	213.940.000	0	21.737.500	0,00	10,16	10	308.361.890	33,33	32,60
27	01	01	2.08	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	206	Unit	155.730.050	16	12.690.000	0		0	-	0,00	0,00	16	12.690.000	7,77	8,15
28	01	01	2.08	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	691.684.240	2	169.326.950	0		0	-	0,00	0,00	2	169.326.950	33,33	24,48
29																75,13	846,66			290,94	164,96
30																SR	SR			SR	SR
31	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100	Persen	14.072.970.908	63,71	3.312.090.949	100	685.300.000	43,22	323.811.200	43,22	47,25	49,90	3.635.902.149	49,90	25,84
32	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100	Persen	7.484.471.327	26,98	1.624.920.229	100	353.800.000	66,67	198.078.500	66,67	55,99	14,88	1.822.998.729	14,88	24,36
32	01	02	2.01		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	7	Dok	2.625.000.000	1	334.613.000	2	125.000.000	0	28.644.808	0,00	22,92	1	363.257.808	14,29	13,84
		02			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah pPelaksanaan Konsultasi Publik						1	30.000.000	2	30.000.000	200,00	100,00	2	30.000.000	0,00	0,00
33	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	12	Berita Acara	3.552.409.703	4	937.098.900	1	30.000.000	1	49.850.000	100,00	166,17	5	986.948.900	41,67	27,78
					Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota							1	70.000.000	1	50.150.000	100,00	71,64	1	50.150.000	0,00	0,00
					Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan							11	23.800.000	11	36.525.550	100,00	153,47	11	36.525.550	0,00	0,00
34	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	12	Dok	1.307.061.624	4	353.208.329	2	75.000.000	0	61.552.950	0,00	82,07	4	414.761.279	33,33	31,73
35	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Persen	3.589.802.981	76,64	932.825.458	100	211.500.000	25,00	82.694.650	25,00	39,10	93,85	1.015.520.108	93,85	28,29
36	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	61	Masukan	1.497.532.313	3	413.705.778	2	131.500.000	1	21.453.900	50,00	16,31	4	435.159.678	6,56	29,06
36	01	02	2.02	01	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	12	Org	192.500.167	25	174.790.000	0		0	21.168.450	0,00	0,00	25	195.958.450	208,33	101,80

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
								K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.	
1	2					3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
37	01	02	2.0	03		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	6	Buku	1.899.770.501	2	344.329.680	1	80.000.000	2	40.072.300	200,00	50,09	4	384.401.980	66,67	20,23
38	01	02	2.0	3		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Persen	2.998.696.600	28,47	754.345.262	100	120.000.000	37,50	43.038.050	37,50	35,87	40,97	797.383.312	40,97	26,59
39	01	02	2.0	01		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	54	Lap	1.585.370.807	18	446.157.410	4	60.000.000	6	28.100.500	150,00	46,83	24	474.257.910	44,44	29,91
40	01	02	2.0	03		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	24	Lap	1.413.325.794	8	308.187.852	4	60.000.000	1	14.937.550	25,00	24,90	9	323.125.402	37,50	22,86
41																	43,06	43,65			49,90	26,41
42																	SR	SR			SR	SR
43	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100	Persen	19.964.673.610	24,05	5.042.802.525	100	984.396.167	27,69	646.540.014	27,69	65,68	53,27	5.689.342.539	53,27	28,50
44	01	03	2.0	1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Persen	6.538.047.431	28,62	1.497.659.884	100	295.046.167	0,00	190.794.534	0,00	64,67	32,75	1.688.454.418	32,75	25,83
45	01	03	2.0	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	39	Dok	703.075.065	23	113.198.000	1	39.012.300	0	8.535.000	0,00	21,88	23	121.733.000	58,97	17,31
46	01	03	2.0	02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	25	Perangkat Daerah	77.112.128	9	21.825.148	4	8.695.700	0	3.659.700	0,00	42,09	9	25.484.848	36,00	33,05
47	01	03	2.0	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	24	Lap	54.398.649	5	14.957.900	-	-	0	-	0,00	0,00	5	14.957.900	20,83	27,50
48	01	03	2.0	04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	18	Lap	2.619.463.805	7	425.328.700	3	10.382.000	0	33.730.700	0,00	324,90	7	459.059.400	38,89	17,52
49	01	03	2.0	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	29	Dok	1.096.115.741	4	407.925.864	2	104.846.767	0	11.576.250	0,00	11,04	4	419.502.114	13,79	38,27
50	01	03	2.0	06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	25	Perangkat Daerah	90.306.872	9	20.950.000	4	10.199.100	0	2.987.000	0,00	29,29	9	23.937.000	36,00	26,51
51	01	03	2.0	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan	24	Perangkat Daerah	100.323.873	8	24.554.900	-	-	0	29.842.384	0,00	0,00	8	54.397.284	33,33	54,22

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		
								K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.	K	Rp. (000)
1	2					3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		K	Rp.	K	Rp. (000)		K	Rp.
						Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia									13 = 12/7*100				14 = 6 + 12			
52	013	03	2.01	08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	40	Lap	1.797.251.299	9	468.919.372	7	121.910.300	0,66667	100.463.500	9,52	82,41	10	569.382.872	24,17	31,68	
53	013	03	2.02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	Persen	5.337.402.978	27,85	1.345.720.000	100	394.350.000	13,75	328.806.900	13,75	83,38	42,18	1.674.526.900	42,18	31,37	
54	013	03	2.02	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	36	Dok	730.873.822	12	212.478.200	-	1	-	0,00	0,00	13	212.478.200	36,11	29,07		
55	013	03	2.02	02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan	30	Perangkat Daerah	366.267.664	8	82.152.250	-	3,33333	-	0,00	0,00	11	82.152.250	37,78	22,43		
56	013	03	2.02	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan	24	Perangkat Daerah	1.029.885.635	7	181.193.000	5	99.350.000	5	121.423.000	100,00	122,22	12	302.616.000	50,00	29,38	
57	013	03	2.02	04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan	6	Lap	1.334.782.520	2	356.209.100	2	71.906.500	1	31.276.000	50,00	43,50	3	387.485.100	50,00	29,03	
58	013	03	2.02	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	36	Dok	693.439.274	12	224.452.100	-	1	21.090.900	0,00	0,00	13	245.543.000	36,11	35,41		
59	013	03	2.02	06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	30	Perangkat Daerah	262.839.856	10	68.703.600	5	90.515.000	0	44.982.700	0,00	49,70	10	113.686.300	33,33	43,25	
60	013	03	2.02	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	24	Perangkat Daerah	330.602.334	8	79.728.150	5	82.593.500	0	24.466.500	0,00	29,62	8	104.194.650	33,33	31,52	
61	013	03	2.02	08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	6	Lap	588.711.875	2	140.803.600	2	49.985.000	1,64583	85.567.800	82,29	171,19	4	226.371.400	60,76	38,45	
62	013	03	2.03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	Persen	8.089.223.200	25,07	2.199.422.641	100	295.000.000	69,32	126.938.580	69,32	43,03	84,88	2.326.361.221	84,88	28,76	
63	013	03	2.03	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16	Dok	2.647.060.600	8	730.579.893	6	54.797.750	6	54.736.430	100,00	99,89	14	785.316.323	87,50	29,67	
64	013	03	2.03	02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam	35	Perangkat Daerah	265.086.138	11	135.620.200	6	34.979.000	6	4.559.000	100,00	13,03	17	140.179.200	48,57	52,88	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023(%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		
								K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.	K	Rp. (000)		K	Rp.		
1	2					3	4	5			6			7			12 = 8+9+10+11			K	Rp.	14 = 6 + 12			K	Rp.		
						Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur																					
65	01	03	2.03	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	9	Perangka t Daerah	625.694.007	5	108.333.012	6	23.005.000	2	32.305.000	33,33	140,43	7	140.638.012	77,78	22,48						
66	01	03	2.03	04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6	Lap	827.160.900	2	444.063.036	2	45.711.000	1	11.363.500	50,00	24,86	3	455.426.536	50,00	55,06						
66	01	03	2.03	04		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	17	Dok	2.173.116.569	14	601.439.500	11	33.231.500	11	9.565.000	100,00	28,78	25	611.004.500	147,06	28,12						
67	01	03	2.03	06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	66	Perangka t Daerah	235.536.086	16	41.291.000	11	25.365.000	20	4.100.000	183,33	16,16	36	45.391.000	54,80	19,27						
68	01	03	2.03	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5	Perangka t Daerah	488.408.000	1	79.350.000	11	23.535.100	8	4.200.000	72,73	17,85	9	83.550.000	180,00	17,11						
69	01	03	2.03	08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	6	Lap	827.160.900	1	58.746.000	2	54.375.650	1	6.109.650	50,00	11,24	2	64.855.650	33,33	7,84						
Rata-rata capaian kinerja (%)																		27,69	63,69				53,27	28,65				
Predikat kinerja																		SR	SR				SR	SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														6.401.222.767												SR	SR	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)																		36,02	55,21				94,17	29,39				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)																		SR	R				ST	SR				

65. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun ( 2021 s/d tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan															
5	02	Keuangan															



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode						Urusan / Bidang Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun ( 2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
									K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	%	K
1						2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
5	0	2	0	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	% Penerapan Kepatuhan Pelayanan Publik			229.479.333.035	100	38.084.548.092	100	33.456.053.028	-	10.409.373.180	-	27,33	100	48.493.921.272		21,13
5	0	2	0	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Dokumen Perencanaan yang tersusun			1.076.865.100	100	167.573.000	100	176.037.100	-	66.151.638	-	39,48	100	233.724.638		21,70
5	02	01		2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	Dokumen	305.270.000	3	58.220.000	3	50.000.000	1	16.459.038	33,33	32,92	4	74.679.038	22,22	24,46
5	02	01		2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	Dokumen	127.559.000	2	15.539.000	2	20.905.000	-	-	-	-	2	15.539.000	16,67	12,18
5	02	01		2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12	Dokumen	109.496.900	2	16.719.000	2	16.759.000	-	-	-	-	2	16.719.000	16,67	15,27
5	02	01		2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	87.085.600	1	13.033.000	1	14.533.000	-	-	-	-	1	13.033.000	16,67	14,97
5	02	01		2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen	78.356.000	1	12.523.000	1	13.000.000	-	-	-	-	1	12.523.000	16,67	15,98
5	02	01		2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36	Laporan	268.282.600	6	35.539.000	6	45.840.100	6	45.840.100	100,00	100,00	12	81.379.100	33,33	30,33
5	02	01		2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	100.815.000	2	16.000.000	2	15.000.000	1	3.852.500	50,00	25,68	3	19.852.500	25,00	19,69
Rata-rata capaian kinerja (%)																		26,19	22,66			21,03	18,98
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode					Urusan / Bidang Urusan		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)		Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun ( 2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%	
1					2		3		4		5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
5	0	0	2	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			212.981.499.235	100	35.565.480.892	100	30.854.674.428	-	9.204.649.871	-	25,88	100	44.770.130.763		21,02		
5	02	01	2.02	0	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2520	Orang/Bulan	208.110.913.335	420	34.857.076.892	420	30.105.332.828	420	8.830.422.971	25,00	29,33	840	43.687.499.863	33,33	20,99		
5	02	01	2.02	0	2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	Dokumen	729.135.600	12	111.600.000	12	111.600.000	6	52.300.000	50,00	46,86	18	163.900.000	25,00	22,48		
5	02	01	2.02	0	3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	Dokumen	3.891.728.300	12	569.404.000	12	595.741.600	6	279.926.900	50,00	46,99	18	849.330.900	25,00	21,82		
5	02	01	2.02	0	5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	169.630.000	1	15.200.000	1	30.000.000	1	30.000.000	100,00	100,00	2	45.200.000	33,33	26,65		
5	02	01	2.02	0	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6	Laporan	80.092.000	1	12.200.000	1	12.000.000	1	12.000.000	100,00	100,00	2	24.200.000	33,33	30,22		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		65,00	64,64			30,00	24,43		
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR		
5	0	0	2	0	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			463.950.100	100	55.250.000	100	76.158.200	-	11.503.600	-	20,82	100	66.753.600		14,39		
5	02	01	2.05	0	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6	Paket	372.020.300	1	55.250.000	1	56.350.000	-	-	-	-	1	55.250.000	16,67	14,85		
5	02	01	2.05	0	5		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	48	Dokumen	91.929.800	0	-	12	19.808.200	3	11.503.600	25,00	58,07	3	11.503.600	6,25	12,51		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		12,50	29,04			11,46	13,68		
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR		
5	0	0	2	0	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Administrasi Umum Perangkat Daerah			8.991.148.900	100	1.333.484.200	100	1.418.233.300	-	638.573.200	-	47,89	100	1.972.057.400				
5	02	01	2.06	0	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah Paket Komponen Instalasi	6	Paket	430.143.000	1	53.886.000	1	65.000.000	-	35.706.400	-	54,93	1	89.592.400	16,67	20,83		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode					Urusan / Bidang Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun ( 2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
								K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	%	K
1					2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan															
5	02	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	2.535.646.400	1	401.301.000	1	460.776.400	-	222.272.500	-	48,24	1	623.573.500	16,67	24,59
5	02	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	779.556.600	1	111.748.500	1	120.429.500	-	56.061.700	-	46,55	1	167.810.200	16,67	21,53
5	02	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	626.954.200	1	140.427.100	1	70.000.000	-	37.830.600	-	54,04	1	178.257.700	16,67	28,43
5	02	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	939.812.400	1	159.646.600	1	132.958.400	-	44.288.000	-	33,31	1	203.934.600	16,67	21,70
5	02	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Dokumen	601.990.200	6	94.120.000	6	92.200.000	3	32.000.000	50,00	34,71	9	126.120.000	25,00	20,95
5	02	01	2.06	08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	72	Laporan	810.255.000	12	51.380.000	12	155.905.000	6	98.180.000	50,00	62,97	18	149.560.000	25,00	18,46
5	02	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	Laporan	2.266.791.100	12	320.975.000	12	320.964.000	6	112.234.000	50,00	34,97	18	433.209.000	25,00	19,11
Rata-rata capaian kinerja (%)																	18,75	46,22			19,79	21,95
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR
5	02	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			88.179.000	100	-	100	19.000.000	-	-	-	-	100	-	-	
5	02	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	Unit	88.179.000	0	-	5	19.000.000	-	-	-	-	0	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	-	-			-	-
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR
5	02	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.692.422.300	100	561.960.000	100	567.960.000	-	287.589.171	-	51,18	100	849.549.171		23,01
5	02	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	Laporan	26.298.300	12	3.960.000	12	3.960.000	6	1.980.000	50,00	50,00	18	5.940.000	25,00	22,59
5	02	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	72	Laporan	105.138.000	12	12.000.000	12	18.000.000	6	6.609.171	50,00	36,72	18	18.609.171	25,00	17,70

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode						Urusan / Bidang Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun ( 2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		
									K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	%	K	Rp.
1						2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		K	%	K	Rp.		K	%
								dan Listrik yang Disediakan									12 = 8+9+10+11							
5	02	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	Laporan	3.560.986.000	12	546.000.000	12	546.000.000	6	279.000.000	50,00	51,10	18	825.000.000	25,00	23,17	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		50,00	45,94			25,00	21,15	
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR	
5	02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.273.447.400	100	400.800.000	100	343.990.000	-	200.905.700	-	50,13	100	601.705.700		26,47	
5	02	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	54	Unit	1.504.775.900	9	289.300.000	9	232.490.000	-	179.055.700	-	77,02	9	468.355.700	16,67	31,12	
5	02	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	276	Unit	635.851.500	46	91.500.000	46	91.500.000	24	21.850.000	52,17	23,88	70	113.350.000	25,36	17,83	
5	02	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6	Unit	132.820.000	1	20.000.000	1	20.000.000	-	-	-	-	1	20.000.000	16,67	15,06	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		17,39	33,63			19,57	21,34	
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR	
5	02	02				Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah			1.580.222.283.384	100	239.310.542.356	100	238.233.694.319	-	38.487.395.910	-	16,08	100	277.797.938.266		17,58	
5	02	02	2.01			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		% Meningkatnya Penyusunan APBD tepat waktu sesuai dengan Sistem dan Prosedur Mekanisme dan Tahapan Penyusunan APBD			19.970.607.900	100	3.618.439.400	100	2.860.264.500	-	1.456.604.600	-	40,26	100	5.075.044.000		25,41	
5	02	02	2.01	01		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	12	Dokumen	1.652.374.200	2	258.284.000	2	242.578.400	-	178.627.400	-	73,64	2	436.911.400	16,67	26,44	
5	02	02	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	12	Dokumen	1.298.523.700	2	216.680.000	2	188.572.200	-	-	-	-	2	216.680.000	16,67	16,69	
5	02	02	2.01	03		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	342	Dokumen	683.638.000	57	113.930.600	57	97.698.000	15	18.384.000	26,32	18,82	72	132.314.600	21,05	19,35	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode					Urusan / Bidang Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun ( 2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)			
								K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	%	K	Rp.	
1					2	3	4	5			6			7			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
5	02	02	2.01	04		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	342	Dokumen	666.966.400	57	106.573.400	57	98.955.000	15	24.057.000	26,32	24,31	72	130.630.400	21,05	19,59		
5	02	02	2.01	05		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	342	Dokumen	717.652.000	57	121.724.200	57	112.933.500	57	112.733.500	100,00	99,82	114	234.457.700	33,33	32,67		
5	02	02	2.01	06		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	342	Dokumen	658.706.300	57	111.776.000	57	96.043.000	15	41.851.000	26,32	43,58	72	153.627.000	21,05	23,32		
5	02	02	2.01	07		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	18	Dokumen	8.914.909.800	3	1.713.866.700	3	1.297.615.800	1	639.869.000	33,33	49,31	4	2.353.735.700	22,22	26,40		
5	02	02	2.01	08		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	18	Dokumen	1.713.668.100	3	249.303.600	3	249.341.700	1	148.240.300	33,33	59,45	4	397.543.900	22,22	23,20		
5	02	02	2.01	09		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12	Dokumen	1.319.756.400	2	303.032.000	2	153.778.400	-	119.476.000	-	77,69	2	422.508.000	16,67	32,01		
5	02	02	2.01	10		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	24	Dokumen	587.000.300	4	96.649.000	4	84.831.400	-	38.145.400	-	44,97	4	134.794.400	25,00	22,96		
5	02	02	2.01	11		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	24	Dokumen	810.950.900	4	129.775.500	4	118.810.600	-	48.420.000	-	40,75	4	178.195.500	25,00	21,97		
5	02	02	2.01	12		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	12	Dokumen	540.465.300	2	101.619.400	2	72.662.500	-	50.596.000	-	69,63	2	152.215.400	16,67	28,16		
5	02	02	2.01	13		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	270	Orang	405.996.500	45	95.225.000	45	46.444.000	30	36.205.000	66,67	77,95	75	131.430.000	27,78	32,37		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	24,02	52,30			21,95	25,01		
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR		
5	02	02	2.02			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	% Meningkatnya jumlah Laporan OPD dalam Pengelolaan Keuangan yang tepat waktu			7.294.011.900	100	1.408.929.500	100	963.567.000	-	508.428.050	-	36,09	100	1.917.357.550		26,29		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode					Urusan / Bidang Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun ( 2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		
								K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	%	K	Rp.
1					2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		K	%	K	14 = 6 + 12		K	%
5	02	02	2.02	01		Koordinasin dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	258	Dokumen	4.264.340.400	43	769.890.000	43	590.890.000	22	307.269.600	51,16	52,00	65	1.077.159.600	25,19	25,26	
5	02	02	2.02	03		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1032	Dokumen	574.046.400	172	78.000.000	172	96.110.000	86	49.108.400	50,00	51,10	258	127.108.400	25,00	22,14	
5	02	02	2.02	04		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	72	Dokumen	634.190.600	12	188.214.500	12	56.402.100	6	32.027.150	50,00	56,78	18	220.241.650	25,00	34,73	
5	02	02	2.02	05		Koordinasi, Fasilitas, asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	270	Dokumen	360.752.800	45	100.000.000	45	23.864.000	24	9.500.000	53,33	39,81	69	109.500.000	25,00	30,35	
5	02	02	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	144	Laporan	998.684.800	24	217.465.000	24	120.610.900	12	69.750.900	50,00	57,83	36	287.215.900	25,00	28,76	
5	02	02	2.02	08		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan	360	Dokumen	461.996.900	60	55.360.000	60	75.690.000	30	40.772.000	50,00	53,87	90	96.132.000	25,00	20,81	



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

Kode					Urusan / Bidang Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun ( 2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
								K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	%	K
1					2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
						daerah sebagai Optimalisasi kas	dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas															
Rata-rata capaian kinerja (%)																	50,75	51,90			25,03	27,01
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR
5	02	02	2.03			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	% Meningkatnya jumlah OPD dalam pengelolaan keuda berdasarkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah			6.289.957.000	100	1.124.654.000	100	907.244.000	-	438.245.600	-	38,97	100	1.562.899.600		24,85
5	02	02	2.03	01		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	144	Laporan	317.958.000	24	63.969.000	24	40.000.000	12	38.381.900	50,00	95,95	36	102.350.900	25,00	32,19
5	02	02	2.03	03		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	102	Laporan	541.372.000	17	132.139.000	17	70.000.000	10	51.024.000	58,82	72,89	27	183.163.000	25,00	33,83
5	02	02	2.03	04		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12	Laporan	1.063.666.000	2	226.931.000	2	148.331.000	-	77.760.000	-	52,42	2	304.691.000	16,67	28,65
5	02	02	2.03	05		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	24	Dokumen	1.533.946.000	4	231.788.000	4	220.000.000	-	72.183.600	-	32,81	4	303.971.600	16,67	19,82
5	02	02	2.03	07		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	18	Dokumen	2.833.015.000	3	469.827.000	3	428.913.000	-	198.896.100	-	46,37	3	668.723.100	25,00	23,60
Rata-rata capaian kinerja (%)																	21,76	60,09			21,67	27,62

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023**

Kode	Urusan / Bidang Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun ( 2021 s/d tahun 2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)						
				K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	%			
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100						
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR					
5	02	02	2.04					1.546.667.706.584	100	233.158.519.456	100	233.502.618.819	-	36.084.117.660	-	15,48	100	269.242.637.116		17,41			
5	02	02	2.04	04					60	Laporan	32.166.500.000	12	2.000.000.000,00	12	6.500.000.000	6	1.977.564.046	50,00	30,42	18	3.977.564.046	30,00	12,37
5	02	02	2.04	08					48	Laporan	1.435.396.397.232	8	223.672.444.456	8	213.222.940.157	4	28.344.541.891	50,00	13,29	12	252.016.986.347	25,00	17,56
5	02	02	2.04	09					18	Laporan	27.249.405.000	3	300.000.000	3	5.000.000.000	-	463.375.000	-	9,27	3	763.375.000	16,67	2,80
5	02	02	2.04	10					12	Laporan	51.855.404.352	2	7.186.075.000	2	8.779.678.662	-	5.298.636.723	-	60,35	2	12.484.711.723	16,67	24,08
Rata-rata capaian kinerja (%)													25,00	28,33			22,08	14,20					
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR					
5	02	03						6.487.030.600	100	1.362.549.700	100	908.778.200	-	377.292.900	-	27,69	100	1.739.842.600		26,82			
5	02	03	2.01					6.487.030.600	100	1.362.549.700	100	908.778.200	-	377.292.900	-	27,69	100	1.739.842.600		26,82			
5	02	03	2.01	03					6	Dokumen	612.108.500	1	126.879.800	1	90.997.600	-	62.260.000	-	68,42	1	189.139.800	25,00	30,90
5	02	03	2.01	04					72	Dokumen	180.910.200	12	39.197.500	12	24.940.200	6	12.500.200	50,00	50,12	18	51.697.700	25,00	28,58
5	02	03	2.01	05					258	Laporan	1.137.582.100	43	230.036.400	43	151.750.000	22	48.549.000	51,16	31,99	65	278.585.400	25,19	24,49
5	02	03	2.01	06					258	Laporan	214.889.700	43	49.400.000	43	24.453.700	22	20.703.700	51,16	84,66	65	70.103.700	25,00	32,62
5	02	03	2.01	07					360	Laporan	1.808.769.800	60	391.329.700	60	266.455.700	30	61.400.000	50,00	23,04	90	452.729.700	25,00	25,03

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023**

Kode	Urusan / Bidang Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada Tahun ( 2021 s/d tahun 2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	%	K	Rp.	K	%
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
5	02	03	2.01	0													
			Penilaian Barang Milik Daerah	6	Laporan	263.540.600	1	62.801.400	1	38.736.000	-	2.350.000	-	6,07	1	65.151.400	16,67
5	02	03	2.01	1													
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6	Dokumen	778.722.600	1	153.540.100	1	121.705.000	-	62.650.000	-	51,48	1	216.190.100	25,00
5	02	03	2.01	1													
			Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	342	Laporan	1.091.484.100	57	212.665.000	57	143.540.000	30	76.430.000	52,63	53,25	87	289.095.000	25,00
5	02	03	2.01	1													
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	258	Laporan	399.023.000	43	96.699.800	43	46.200.000	-	30.450.000	-	65,91	43	127.149.800	25,00
Rata-rata capaian kinerja (%)												28,33	48,33			24,10	28,05
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN											49.274.061.990		17,68				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)												30,88	43,92			21,97	22,13

**66. Badan Pendapatan Daerah**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN							9.819.093.578								
5.	02	01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	100	Persen	62.042.365.046	398	7.697.592.015	316	8.192.910.478	2	4.026.040.148	400	11.723.632.163	400	18,90
5.	02	01. 2. 01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	persen	488.408.680	140	84.999.800	19	59.653.900	2	24.253.400	142	109.253.200	142	22,37

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)					
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100					
5.	02.	01.	2.	01.	01.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26	Dokumen	124.696.750	5	25.425.000	4	8.025.000	0	4.302.000	-	53,61	5	29.727.000,00	19,23	23,84
5.	02.	01.	2.	01.	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	282	Dokumen	72.827.850	47	11.929.000	1	8.179.000	1	3.506.200	100,00	42,87	48	15.435.200,00	17,02	21,19
5.	02.	01.	2.	01.	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	282	Dokumen	30.910.230	47	5.063.000	1	4.963.000	0	-	-	-	47	5.063.000,00	16,67	16,38
5.	02.	01.	2.	01.	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumalh Dokumen DPA- SKPD	5	Dokumen	30.098.200	1	4.930.000	1	6.830.000	0	634.500	-	9,29	1	5.564.500,00	20,00	18,49
5.	02.	01.	2.	01.	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	25.116.600	1	4.114.000	1	6.617.900	0	1.964.400	-	29,68	1	6.078.400,00	20,00	24,20
5.	02.	01.	2.	01.	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	95	laporan	97.919.800	19	16.039.000	3	12.289.000	1	6.593.600	33,33	53,65	20	22.632.600,00	21,05	23,11
5.	02.	01.	2.	01.	07.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	laporan	106.839.250	20	17.499.800	8	12.750.000	0	7.252.700	-	56,88	20	24.752.500,00	20,00	23,17
Rata-rata capaian kinerja (%)														19,05	35,14			19,14	21,48			
Predikat kinerja														SR	SR			SR	SR			
5.	02	01.	2.	02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Badan Pendapatan Daerah	100	persen	42.587.630.706	64	4.982.904.755	94	5.665.366.078	12	2.227.627.975	12,77	39,32	76	7.210.532.730	76	16,93
5.	02.	01.	2.	02.	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72	bulan	42.181.387.550	12	4.907.816.755	42	5.608.816.078	6	2.187.761.275	14,29	39,01	18	7.095.578.030	25,00	16,82
5.	02.	01.	2.	02.	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	laporan	138.085.300	12	22.618.000	12	15.618.000	2	9.034.600	16,67	57,85	14	31.652.600	23,33	22,92
5.	02.	01.	2.	02.	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	60	laporan	82.608.400	12	13.531.000	12	20.531.000	2	18.358.800	16,67	89,42	14	31.889.800	23,33	38,60
5.	02.	01.	2.	02.	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30	laporan	85.419.506	8	22.538.000	6	10.000.000	1	7.031.800	16,67	70,32	9	29.569.800	30,00	34,62
5.	02.	01.	2.	02.	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	110	laporan	100.129.950	20	16.401.000	22	10.401.000	1	5.441.500	4,55	52,32	21	21.842.500	19,09	21,81
Rata-rata capaian kinerja (%)														13,77	61,78			24,15	26,96			
Predikat kinerja														SR	SR			SR	SR			
5.	02	01.	2.	04.		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	persen	177.627.500	2	22.300.000	2	5.000.000	1	5.000.000	50,00	100,00	3	27.300.000	3	15,37
5.	02.	01.	2.	04.	01.	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Dokumen	177.627.500	2	22.300.000	2	5.000.000	1	5.000.000	50,00	100,00	3	27.300.000	25,00	15,37
Rata-rata capaian kinerja (%)														50,00	100			28,00	30,74			
Predikat kinerja														SR	SR			SR	SR			
5.	02	01.	2.	05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pernerapan Kepatuhan Pelayan Publik	100	persen	130.448.800	5	15.545.000	5	15.545.000	1	8.636.600	20,00	55,56	6	24.181.600	6	18,54
5.	02.	01.	2.	05.	03.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	30	Laporan	130.448.800	5	15.545.000	5	15.545.000	1	8.636.600	20,00	55,56	6	24.181.600	20,00	18,54
Rata-rata capaian kinerja (%)														20,00	55,56			13,00	18,54			
Predikat kinerja														SR	SR			SR	SR			
5.	02	01.	2.	06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi Umum Perangkat Daerah	100	persen	5.673.839.200	89	812.760.500	87	742.992.750	21	308.904.590	24,14	41,58	110	1.121.665.090	110	19,77
5.	02.	01.	2.	06.	02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK Sekretariat Dinas Kesehatan	72	bulan	1.029.336.150	12	133.193.900	12	281.325.150	3	52.152.250	25,00	18,54	15	185.346.150	20,83	18,01
5.	02.	01.	2.	06.	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	72	bulan	164.455.600	12	34.396.200	12	21.494.200	3	16.685.340	25,00	77,63	15	51.081.540	20,83	31,06

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	
								K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	
1	2					3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
5.	02.	01.	2.	06.	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	72	bulan	333.235.750	12	47.304.000	11	30.804.000	2	12.767.000	18,18	41,45	14	60.071.000	19,44	18,03
5.	02.	01.	2.	06.	05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	72	bulan	231.452.450	12	43.938.400	12	33.081.400	3	27.721.500	25,00	83,80	15	71.659.900	20,83	30,96
5.	02.	01.	2.	06.	06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian dan Buku Perundang-Undangan	72	bulan	375.433.550	12	52.440.000	12	42.840.000	3	17.120.000	25,00	39,96	15	69.560.000	20,83	18,53
5.	02.	01.	2.	06.	08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum Rapat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	66	bulan	141.005.250	12	31.430.000	12	20.430.000	3	14.907.800	25,00	72,97	15	46.337.800	22,73	32,86
5.	02.	01.	2.	06.	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Kepala Dinas, Sekretaris dan Sub Bagian Sekretariat Dinas Kesehatan	72	bulan	1.094.587.950	12	135.973.000	12	61.413.000	3	44.151.500	25,00	71,89	15	180.124.500	20,83	16,46
5.	02.	01.	2.	06.	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6	Laporan	110.963.600	1	14.210.000	1	14.210.000	0	7.382.600	-	51,95	1	21.592.600	16,67	19,46
5.	02.	01.	2.	06.	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem/ Aplikasi	24	Sistem/Apl ikasi	2.193.368.900	4	319.875.000	3	237.395.000	1	116.016.600	33,33	48,87	5	435.891.600	20,83	19,87
Rata-rata capaian kinerja (%)																	5,00	14,49			4,36	4,93
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR
5.	02	01.	2.	08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	persen	8.263.493.400	24	1.129.346.500	24	1.289.742.750	11	479.669.943	45,83	37,19	35	1.609.016.443	35	19,47
5.	02.	01.	2.	08.	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tersedianya jasa listrik pada Dinas Kesehatan dan Instalasi Farmasi	72	bulan	216.000	12	157.250.000	12	219.000.000	9	83.524.943	75,00	38,14	21	240.774.943	29,17	88,00
5.	02.	01.	2.	08.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pelayanan Umum Kantor	72	bulan	8.263.277.400	12	972.096.500	12	1.070.742.750	2	396.145.000	16,67	37,00	14	1.368.241.500	19,44	16,56
Rata-rata capaian kinerja (%)																	37,50	19,07			14,58	44,00
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR
5.	02	01.	2.	09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	100	persen	4.571.634.650	79	665.280.460	90	414.610.000	32	168.610.940	35,56	40,67	111	833.891.400	111	18,24
5.	02.	01.	2.	09.	01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	72	unit	4.022.634.650	12	593.530.460	23	364.610.000	5	133.070.940	21,74	36,50	17	726.601.400	23,61	18,06
5.	02.	01.	2.	09.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin	526	unit	549.000.000	67	71.750.000	67	50.000.000	27	35.540.000	40,30	71,08	94	107.290.000	17,87	19,54
Rata-rata capaian kinerja (%)																	15,51	26,89			10,37	9,40
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR
5.	02	03.				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Pengelolaan Barang	100	Persen	148.058.700	5	18.969.500	2	18.969.500	0	12.405.500	-	65,40	5	31.375.000	5	21,19
5.	02	03.	2.	01.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	persen	148.058.700	5	18.969.500	2	18.969.500	0	12.405.500	-	65,40	5	31.375.000	5	21,19
5.	02.	03.	2.	01.	03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	Laporan	48.578.050	1	5.500.000	1	5.500.000	0	5.500.000	-	100,00	1	11.000.000	16,67	22,64
5.	02.	03.	2.	01.	05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24	Laporan	99.480.650	4	13.469.500	1	13.469.500	0	6.905.500	-	51,27	4	20.375.000	16,67	20,48
Rata-rata capaian kinerja (%)																	-	75,63			16,67	21,56
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR
5.	02	04.				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli	7	Persen	1.223.410	###	3.225.125.200	###	1.607.213.600	63	790.931.200	4,03	49,21	251	4.016.056.400	36,887	328.267,42

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		
								K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
								1	2	3	4	5	6	7	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100					
5.	02	04	2	01		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100	Persen	21.090.935.610	###	3.225.125.200	###	#	1.607.213.600	637	790.931.200	4,03	49,21	2512	4.016.056.400	2.512	19,04
5.	02.	04.	2.	01.	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	42	Dokumen	536.460.550	7	80.500.000	7	29.087.000	2	16.192.000	28,57	55,67	9	96.692.000	21,43	18,02	
5.	02.	04.	2.	01.	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajaak Daerah	Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	48	Dokumen	4.182.841.850	8	656.600.000	8	245.000.000	2	50.767.700	25,00	20,72	10	707.367.700	20,83	16,91	
5.	02.	04.	2.	01.	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24	Kegiatan	536.460.550	4	165.000.000	4	70.000.000	0	17.402.000	-	24,86	4	182.402.000	16,67	34,00	
5.	02.	04.	2.	01.	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	2256	Objek Pajak	1.236.657.000	376	174.052.000	376	50.000.000	97	23.826.400	25,80	47,65	473	197.878.400	20,97	16,00	
5.	02.	04.	2.	01.	06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	6	Dokumen	1.338.143.200	1	181.454.000	1	90.000.000	0	39.870.500	-	44,30	1	221.324.500	16,67	16,54	
5.	02.	04.	2.	01.	07	Penilaian Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	300	Objek Pajak	4.633.112.160	50	749.417.500	###	#	378.289.100	149	302.477.000	1,06	79,96	199	1.051.894.500	66,33	22,70
5.	02.	04.	2.	01.	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Penetapan Wajib Pajak Daerah	2256	Objek Pajak	1.073.580.650	376	150.270.000	376	30.000.000	117	17.107.200	31,12	57,02	493	167.377.200	21,85	15,59	
5.	02.	04.	2.	01.	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	180	Dokumen	908.654.600	30	118.254.000	1	71.500.000	0	34.886.100	-	48,79	30	153.140.100	16,67	16,85	
5.	02.	04.	2.	01.	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	114	Laporan	1.080.657.500	19	152.096.000	19	64.200.000	3	30.833.900	15,79	48,03	22	182.929.900	19,30	16,93	
5.	02.	04.	2.	01.	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Penagihan Pajak Daerah	2400	Objek Pajak	1.385.494.500	400	195.000.000	400	60.000.000	96	27.374.100	24,00	45,62	496	222.374.100	20,67	16,05	
5.	02.	04.	2.	01.	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Penyelesaian Pajak Daerah	500		1.796.558.450	100	252.291.700	100	130.423.500	80	84.463.700	80,00	64,76	180	336.755.400	36,00	18,74	
5.	02.	04.	2.	01.	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3000	Objek Pajak	1.238.446.600	500	195.590.000	500	202.450.000	91	55.945.300	18,20	27,63	591	251.535.300	19,70	20,31	
5.	02.	04.	2.	01.	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi	JumlahLaporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi	24	Laporan	1.143.868.000	4	154.600.000	4	66.264.000	0	28.356.300	-	42,79	4	182.956.300	16,67	15,99	
5.	02.	04.	2.	01.	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2	Laporan	120.000.000	0	-	2	120.000.000	0	61.429.000	-	51,19	0	61.429.000	-	51,19	
Rata-rata capaian kinerja (%)																17,82	47,07			22,41	21,13		
Predikat kinerja																SR	SR			SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														9.819.093.578			4.026.040.148						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																15,86	38,01			13,97	18,02		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																SR	SR			SR	SR		



67. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun ( periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		
							K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K
1	2				3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
4	01	01	2.05		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				137.800.000		27.560.000			-	-							
4	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	Jumlah konsultasi hukum anggota korpri dan tersedianya koordinasi kekecamatan	60	bln	137.800.000	12	27.560.000				-	-			12	27.560.000	20,00	20,00
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-				20,00	20,00
Predikat kinerja																					SR	SR
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
5	03	01	2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				120.000.000		17.214.500			-	-							
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	20	lap	120.000.000	4	17.214.500				-	-			4	17.214.500	20,00	14,35
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-				10,00	7,17
Predikat kinerja																					SR	SR
5	03	01	2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				16.174.789.880		5.847.493.594		3.249.757.976		1.744.561.826							
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Belanja Tambahan Penghasilan ASN	60	bln	15.247.789.880	24	5.508.192.594	12	3.049.557.976	6	1.643.541.826	50,00	53,89	30	7.151.734.420	50,00	46,90	
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	60	bln	840.000.000	24	334.301.000	12	200.200.000	6	101.020.000	50,00	50,46	30	435.321.000	50,00	51,82	
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	10	dok	87.000.000	2	5.000.000				-	-			2	5.000.000	20,00	5,75
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,00	52,18				40,00	34,82
Predikat kinerja																SR	R				SR	SR
5	03	01	2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				165.300.000		72.450.000		7.500.000		3.648.300							
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN	128	stel	44.300.000	64	22.150.000				-	-			64	22.150.000	50,00	50,00
5	03	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah PNS yang Pensiun	1500	Org	121.000.000	368	50.300.000	230	7.500.000	129	3.648.300	56,09	48,64	497	53.948.300	33,13	44,59	
Rata-rata capaian kinerja (%)																56,09	48,64				41,57	47,29

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023**

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2				3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
														Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR
5	03	01	2.06		<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>			<b>1.345.723.000</b>			<b>410.499.650</b>		<b>130.230.000</b>		73.657.960						
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75	jns	48.000.000	30	18.000.000			-	-			30	18.000.000	40,00	37,50
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	388	jns	82.695.000	80	39.335.500	40	27.220.400	20	13.584.600	50,00	<b>49,91</b>	100	52.920.100	25,77	63,99
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	108	jns	30.000.000	36	19.999.150	18	3.010.000	8	2.830.200	44,44	<b>94,03</b>	44	22.829.350	40,74	76,10
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	60	Bln	195.270.000	24	46.960.000	12	15.000.000	6	7.590.000	50,00	<b>50,60</b>	30	54.550.000	50,00	27,94
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	84	jns	124.000.000	28	20.000.000	14	4.997.600	7	2.699.100	50,00	<b>54,01</b>	35	22.699.100	41,67	18,31
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	Bln	144.000.000	24	36.000.000	12	20.000.000	6	12.000.000	50,00	<b>60,00</b>	30	48.000.000	50,00	33,33
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	187	kali	721.758.000	40	230.205.000	24	60.002.000	12	34.954.060	50,00	<b>58,25</b>	52	265.159.060	27,81	36,74
Rata-rata capaian kinerja (%)																49,07	61,13			39,43	41,99
														Predikat kinerja		SR	R			SR	SR
5	03	01	2.08		<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			<b>3.834.400.000</b>			<b>967.197.202</b>		<b>482.000.000</b>		266.206.952						
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bln	338.400.000	24	110.197.202	12	66.000.000	6	28.206.952	50,00	<b>42,74</b>	30	138.404.154	50,00	40,90
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Petugas Tenaga Kontrak	60	Bln	3.496.000.000	24	857.000.000	12	416.000.000	6	238.000.000	50,00	<b>57,21</b>	30	1.095.000.000	50,00	31,32
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,00	49,97			50,00	36,11
														Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR
5	03	01	2.09		<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			<b>1.293.487.800</b>			<b>309.370.000</b>		<b>185.701.300</b>		39.850.000						
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang Terpelihara	24	Unit	1.104.787.800	8	271.980.000	4	185.701.300	2	39.850.000	50,00	<b>21,46</b>	10	311.830.000	41,67	28,23

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun ( periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
								K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	
1	2					3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
5	03	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	89	Unit	68.700.000	17	12.390.000			-	-			17	12.390.000	19,10	18,03
5	03	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	6	pkt	120.000.000	2	25.000.000			-	-			2	25.000.000	33,33	20,83
Rata-rata capaian kinerja (%)																	50,00	21,46			31,37	22,36
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR
5	03	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH																
5	03	02	2.01			PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN				5.390.111.200		1.099.425.512		87.200.000		26.314.661						
5	03	02	2.01	02		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Penyusunan Dokumen Kebutuhan Pegawai	6	Kgt	220.000.000	2	36.386.000			-	-			2	36.386.000	33,33	16,54
5	03	02	2.01	03		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Validasi Data Tenaga Kontrak Jumlah Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS	6	Kgt	3.558.121.200	2	830.984.600	1	72.200.000	1	18.048.800	100,00	25,00	3	849.033.400	50,00	23,86
5	03	02	2.01	10		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data/Informasi Kepegawaian yang Ter Update	60	Bln	1.245.890.000	24	184.607.912	12	15.000.000	6	8.265.861	50,00	55,11	30	192.873.773	50,00	15,48
5	03	02	2.01	11		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian	6	dok	320.500.000	2	47.447.000			-	-			2	47.447.000	33,33	14,80
							Jumlah Kartu-kartu yang diterbitkan	769	krt	45.600.000	279				-	-			279	-	36,28	-
Rata-rata capaian kinerja (%)																	75,00	40,05			40,59	14,14
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR
5	03	02	2.02			MUTASI DAN PROMOSI ASN				4.109.980.400		1.296.786.313		487.800.000		337.570.800						
5	03	02	2.02	01		Pengelolaan Mutasi ASN	Tersedianya Dokumen SK Alih Tugas yang diterbitkan	520	Org	298.566.400	65	45.945.200			-	-			65	45.945.200	12,50	15,39
5	03	02	2.02	02		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala	12000	SK	643.576.000	#####	161.553.354	#####	5.000.000	525	2.700.400	27,63	54,01	#####	164.253.754	37,15	25,52
							SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	4500	SK		#####		500		269	-			#####	-	38,62	
5	03	02	2.02	03		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promosi dan Evaluasi Jabatan	36	kgt	3.167.838.000	12	1.089.287.759	4	482.800.000	2	334.870.400	50,00	69,36	14	1.424.158.159	38,89	44,96
Rata-rata capaian kinerja (%)																	38,82	61,68			12,96	14,99
Predikat kinerja																	SR	R			SR	SR

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2				3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
5	03	02	2.03		<b>PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN</b>			1.564.690.000			356.350.035		17.000.000		8.789.500						
5	03	02	2.03	03	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang profesional dan terampil dalam mengelola aset atau barang daerah	45	Org	347.800.000	27	58.395.000			-	-			27	58.395.000	60,00	16,79
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah SK Ijin Belajar yang diterbitkan	720	SK	210.000.000	243	69.049.500	120	12.000.000	61	6.044.000	50,83	<b>50,37</b>	304	75.093.500	42,22	35,76
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Peserta ASN Mengikuti Diklat	1125	Org	756.890.000	590	49.859.200			-	-			590	49.859.200	52,44	6,59
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK Fungsional yang diterbitkan	3000	SK	250.000.000	####	179.046.335	700	5.000.000	315	2.745.500	45,00	<b>54,91</b>	####	181.791.835	46,50	72,72
Rata-rata capaian kinerja (%)																<b>47,92</b>	<b>52,64</b>			<b>50,29</b>	<b>32,96</b>
Predikat kinerja																SR	R			SR	SR
5	03	02	2.04		<b>PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR</b>			1.639.341.000			1.049.729.010		490.768.000		114.826.983						
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Peserta Pembinaan SKP dan Verifikasi Berkas Pembayaran TPP	27600	Org	541.437.000	####	815.376.000	####	483.268.000	-	111.179.683	-	<b>23,01</b>	####	926.555.683	31,08	171,13
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Menerima SLKS	1044	Org	185.178.000	212	36.193.000			-	-			212	36.193.000	20,31	19,54
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Peserta Sumpah Janji	1362	Org	182.112.000	227	40.119.100		7.500.000	-	3.647.300		<b>48,63</b>	227	43.766.400	16,67	24,03
						Jumlah Peserta Wajib Lapo LHKPN	594	Org		177		96		-	-	-		177	-	29,80	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN yang diberikan Sanksi Pelanggaran	48	Org	730.614.000	14	158.040.910			-	-			14	158.040.910	29,17	21,63
Rata-rata capaian kinerja (%)																<b>94,21</b>	<b>17,91</b>			<b>26,30</b>	<b>59,08</b>
Predikat kinerja																ST	SR			SR	R
5	04	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>																
5	04	02	2.02		<b>SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL</b>			12.012.678.000			3.850.517.521		63.000.000		32.469.000						
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,	Jumlah Pejabat yang mengikuti Diklat Pim II, III, IV	900	Org	12.012.678.000	248	3.850.517.521	4	63.000.000	4	32.469.000	100,00	<b>51,54</b>	252	3.882.986.521	28,00	32,32

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun (periode 2021 s/d 2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
		Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan															
			Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Prajabatan			80											
			Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Fungsional			26											
Rata-rata capaian kinerja (%)												100,00	51,54			28,00	32,32
Predikat kinerja												ST	R			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										5.200.957.276	2.647.895.982						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM/KEGIATAN (KEGIATAN 1 s.d. KEGIATAN 12)												50,93	38,10			32,54	30,27
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM/KEGIATAN (KEGIATAN 1 s.d. KEGIATAN 12)												SR	SR			SR	SR

68. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Urusan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Out Put)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		
1	UNSUBSISTEM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terfasilitasinya Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	17.064.406.000	145	2.449.950.000	55	2.447.361.118	16	1.141.418.021	300,38	227,06	177	3.591.368.021	126,16	136,73
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Urusan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Out Put)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	8.000.000	-	-										
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Laporan	20.000.000	-	-										
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>14.331.160.000</b>	<b>26</b>	<b>2.099.360.000</b>	<b>26</b>	<b>2.105.985.218</b>		<b>1.009.523.221</b>	<b>121,43</b>	<b>94,14</b>	<b>42</b>	<b>3.108.883.221</b>	<b>58,33</b>	<b>43,33</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	Bulan	13.175.380.000	14	1.943.580.000	14	1.901.130.218	10	915.304.221	71,43	48,15	24	2.858.884.221	33,33	21,70
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	Dokumen	1.155.780.000	12	155.780.000	12	204.855.000	6	94.219.000	50,00	45,99	18	249.999.000	25,00	21,63
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	8.000.000												
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	Laporan	24.000.000												
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Dokumen	8.000.000												
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>24.600.000</b>												
		Penyusunan Perencanaan	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan	4	Dokumen	8.200.000												



# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Urusan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Out Put)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
		Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah SKPD														
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Laporan	16.400.000											
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>61.200.000</b>	<b>-</b>										
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	92	Paket	61.200.000	-										
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum SKPD</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>554.956.000</b>	<b>108</b>	<b>90.100.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>108</b>	<b>90.100.000</b>	<b>16,24</b>	<b>16,24</b>
		Penyediaan Peralatan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	58.603.400	1	2.620.000		-				1	2.620.000	4,47	4,47
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	64.684.000	12	14.684.000		-				12	14.684.000	22,70	22,70
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	Paket	18.247.600	12	2.247.600		-				12	2.247.600	12,32	12,32
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55	Paket	93.680.000	11	15.679.000		-				11	15.679.000	16,74	16,74
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	95.679.000	12	8.603.400		-				12	8.603.400	8,99	8,99
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dokumen	21.476.000	12	13.680.000		-				12	13.680.000	63,70	63,70
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	Laporan	20.000.000								0	-	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	182.586.000	48	32.586.000		-				48	32.586.000	17,85	17,85
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>140.000.000</b>	<b>-</b>					<b>51,95</b>	<b>51,01</b>			<b>24,59</b>	<b>30,66</b>

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Urusan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Out Put)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
		<b>Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>														
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	Unit	40.000.000											
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	60.000.000											
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SJumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	30.000.000											
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	10.000.000											
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan</b>	100	%	640.000.000	128.000.000	25	135.400.000	13	70.650.500	52,00	52,18	13	198.650.500	13,00	31,04
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	120.000.000	12 24.000.000	12	24.000.000	6	11.450.500	50,00	47,71	18	35.450.500	30,00	29,54
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	65	Laporan	520.000.000	13 104.000.000	13	111.400.000	7	59.200.000	53,85	53,14	20	163.200.000	30,77	31,38
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	%	1.252.490.000	11 132.490.000	4	205.975.900	3	61.244.300	75,00	29,73	14	193.734.300	14,00	15,47
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	1.098.590.000	3 98.590.000	3	180.975.900	2	36.244.300	66,67	20,03	5	134.834.300	33,33	12,27
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	125.000.000	1 25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	100,00	100,00	2	50.000.000	40,00	40,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27	Unit	28.900.000	7 8.900.000							7	8.900.000	25,93	30,80
Rata-Rata Capaian Kinerja												82,79	58,29			56,58	52,84
Predikat Kinerja												T	R			R	R

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Urusan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Out Put)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	
				K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
2		<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Meningkatnya hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti</b>	100	%	4.518.295.100	-	338.195.100	2	269.882.000	0	162.558.232	-	60,23	-	500.753.332	11,08	11,08
		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	100	%	1.019.100.000		19.100.000	2	100.000.000	0	82.462.500	-	54,98	0	101.562.500	-	9,97
		Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	4	Laporan	319.100.000	1	19.100.000			0	-			1	19.100.000	25,00	5,99
		Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1	Laporan	100.000.000			1	50.000.000	0	44.430.000	-	88,86	0	44.430.000	-	44,43
		Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	4	Laporan	400.000.000			1	50.000.000	0	38.032.500	-	76,07	0	38.032.500	-	9,51
		Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1	Laporan	100.000.000									-			
		Fasilitasi dan Evaluasi Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1	Laporan	100.000.000									-			
		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosiol dan Kependudukan</b>	<b>Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosiol dan Kependudukan</b>	100	%	300.000.000			-									
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	1 Dok	Dokumen	100.000.000												

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

No	Urusan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Out Put)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
			Pendidikan dan Kebudayaan															
		Penelitian dan Pengembangan Kesehatn	jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatn	1 Dok	Dokumen	100.000.000												
		Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangann Partisipasi Masyarakat	1 Dok	Dokumen	100.000.000												
		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>819.100.000</b>												
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	Dokumen	119.100.000	1	19.100.000				-			1	19.100.000	50,00	
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1	Dokumen	100.000.000												
		Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Dokumen	100.000.000												
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan PengembanganPerumahan dan Kawasan Pemukiman	1	Dokumen	100.000.000												
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2	Dokumen	200.000.000												
		Penelitian dan Pengembangan Peantaaan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangann Peantaaan Ruang dan Pertanahan	2	Dokumen	200.000.000												
		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Persentase Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>2.380.095.100</b>		<b>319.095.100</b>		<b>169.882.000</b>			<b>-</b>	<b>47,15</b>	<b>0</b>	<b>319.095.100</b>	<b>13,41</b>	<b>34,55</b>
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5	Laporan	1.100.000.000	1	300.000.000	1	169.882.000	0	80.095.732	-	47,15	1	380.095.732	20,00	<b>34,55</b>
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi	4	Laporan	461.000.000												-

No	Urusan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Out Put)	Target RPJMD Perangkat Daerah pada tahun (Periode 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
			Hak Kekayaan Intelektual														
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5	Laporan	819.095.100		1	19.095.100					1	19.095.100	20,00	2,33
Rata-Rata Capaian Kinerja												-	51,06			6,70	22,26
Predikat Kinerja												SR	R			SR	SR
						21.582.701.100	145	2.788.145.100	57	2.717.243.118		162.558.232	-	-	2.950.703.332		
Rata-rata capaian kinerja (%)												26,92	26,57			15,38	15,69
Predikat kinerja												SR	SR			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)												41,40	54,68			31,64	37,55
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)												SR	S			SR	SR

### 2.2.3 Evaluasi Indikator Kerja Utama Pembangunan Daerah

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut sebagian besar telah tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran tahun 2021-2026. IKU Pemerintah Kabupaten Pesawaran merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Dalam suatu organisasi pemerintah daerah, yang merupakan miniatur dari organisasi pemerintah pusat di daerah, terdapat puluhan bahkan ratusan indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stakeholder sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelaksana atas tingkat keberhasilan kinerjanya.

Untuk itu, sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesawaran dilaporkan beberapa indikator kinerja yang paling utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja organisasi. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Capaian indikator kinerja utama ini diharapkan secara proporsional dan akuntabel memberikan gambaran tentang sejauh mana Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021—2026 secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, yang ditawarkan pada saat proses Pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2021, dan selanjutnya menjadi bahan masukan dalam menetapkan struktur perumusan strategis, yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Kebijakan serta implementasi strategis berupa program-program pembangunan daerah, program prioritas Kepala Daerah, indikator program beserta arah kebijakan keuangan daerah.

Evaluasi RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021—2026 dilakukan terhadap hasil capaian/pelaksanaan RPJMD yang diukur melalui capaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021—2026. Tabel IKU sebagaimana lampiran Peraturan Bupati dimaksud dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.



Tabel 2.83 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PENGHITUNGAN	TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih dan melayani	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	60,04 (B)	62,50 (B)	65,00 (B)	67,50 (B)	70,00 (BB)	80,00 (A)	Hasil evaluasi AKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi), Inspektorat
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks SPBE	1,27	1,91	2,41	2,91	3,41	3,91	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
		Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	Nilai IPK	2,51/62,75	2,66/66,50	2,81/70,25	2,96/74,00	3,11/77,75	3,25/81,25	Hasil survei persepsi korupsi	Inspektorat
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan terhadap LKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat
		Indeks kepuasan masyarakat	Nilai indeks kepuasan masyarakat	3,01	3,06	3,4	3,5	3,6	3,70	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
2	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah dan sektor strategis	Tingkat aksesibilitas antar wilayah dan sektor strategis	Persentase jalan mantap, fasilitas pelengkap jalan, dan prasarana dermaga.	66,02%	67,64%	69,22%	70,81%	72,41%	74,00%	Rekap data pembangunan Jalan, pelengkap jalan dan dermaga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	Indeks infrastruktur dasar	Persentase ketersediaan akses irigasi, akses terhadap air minum, sanitasi dan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU)	83,86%	85,21%	86,70%	88,19%	89,92%	91,29%	Rekap data pembangunan irigasi, data pembangunan air minum, sanitasi dan PSU	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PENGHITUNGAN	TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLHi = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL): >80 (Sangat Baik); 70-80 (Baik); 60-70 (cukup baik); 50-60 (kurang baik); 40-50 (sangat kurang baik); 30-40 (waspada)	61,83	62,48	63,13	63,77	64,42	65,07	Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
5	Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan yang merata	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	7,70	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70	Badan Pusat Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Harapan Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur diatas 7 tahun di masa mendatang	12,36	12,40	12,44	12,48	12,52	12,56	Badan Pusat Statistik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	69,04	69,34	69,64	69,94	70,24	70,54	Badan Pusat Statistik	Dinas Kesehatan
7	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	Pengeluaran per Kapita (dalam Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	Standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson	8.515,90	8.899,12	9.299,58	9.718,06	10.155,37	10.612,36	Badan Pusat Statistik	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk Keluarga

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PENGHITUNGAN	TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
											Berencana, Dinas Sosial
8	Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Jumlah Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	11.150,65	11.579,76	12.174,16	12.803,65	13.559,48	14.368,67	Badan Pusat Statistik	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
9	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran	Persentase angka kemiskinan	Angka kemiskinan	14,76	13,98	13,20	12,42	11,64	10,86	Badan Pusat Statistik	Dinas Sosial
		Tingkat pengangguran terbuka	Jumlah pengangguran /Jumlah angkatan kerja	4,64	4,34	4,04	3,74	3,44	3,14	Badan Pusat Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
10	Meningkatnya nilai investasi	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/ Penanaman Modal Asing (PMA))	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA dalam juta rupiah)	216.218,00	237.839,80	261.623,78	287.786,16	316.564,77	348.221,25	Data investasi pada Badan Koordinasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Maju dan Mandiri	Jumlah Desa Maju dan Mandiri / Jumlah Desa *100	10,42%	11,81%	15,97%	22,22%	30,56%	45,14%	Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut sebagian besar telah tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran tahun 2021-2026. IKU Pemerintah Kabupaten Pesawaran merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Dalam suatu organisasi pemerintah daerah, yang merupakan miniatur dari organisasi pemerintah pusat di daerah, terdapat puluhan bahkan ratusan indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stakeholder sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelaksana atas tingkat keberhasilan kinerjanya.

Untuk itu, sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesawaran dilaporkan beberapa indikator kinerja yang paling utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja organisasi. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Capaian indikator kinerja utama ini diharapkan secara proporsional dan akuntabel memberikan gambaran tentang sejauh mana Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya.

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang ditetapkan tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) tahun 2021-2026, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 serta Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023.

Tabel 2.84 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesawaran Tahun 2022

Sasaran		Indikator		Satuan	Tahun 2022		Persentase Capaian (%)
					Target	Realisasi	
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih dan melayani	1	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	62,50 (B)	62,08 (B)	99,32 (100,00)
		2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	indeks	1,91	1,95	102,09
		3	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	indeks	2,66 / 66,50	2,99 / 74,84	112,54
		4	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	opini	WTP	WTP	100,00
		5	Indeks kepuasan masyarakat	indeks	3.06	3,15	102,94
2	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah dan sektor strategis	6	Tingkat aksesibilitas antar wilayah dan sektor strategis	persen	67,64	64,78	95,77
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	7	Indeks infrastruktur dasar	persen	85,21	89,75	105,32
4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan	8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	62,48	64,21	102,76

Sasaran		Indikator		Satuan	Tahun 2022		Persentase Capaian (%)
					Target	Realisasi	
5	Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan yang merata	9	Angka rata-rata lama sekolah	poin	7,9	7,77	98,35
			Angka harapan lama sekolah	poin	12,40	12,61	101,69
6	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat	11	Angka harapan hidup	Rasio	69.34	69,44	100,14
7	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	12	Pengeluaran per Kapita (dalam Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	Ribu Rupiah	8.899,12	8.192,00	92,05
8	Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah	13	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Milyar Rupiah	11,579,76	12.016,34	103,77
9	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran	14	Persentase angka kemiskinan	persen	13,98	13,85	100,93
		15	Tingkat pengangguran terbuka	poin	4,84	5,06	95,65
10	Meningkatnya nilai investasi	16	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/ Penanaman Modal Asing (PMA))	Juta/Rupiah	287.889,80	314.881,13	109,37
11	Meningkatnya kemandirian desa	17	Persentase Desa Maju dan Mandiri	persen	11,81	27,70	234,54

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, yang ditawarkan pada saat proses Pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2021, dan selanjutnya menjadi bahan masukan dalam menetapkan struktur perumusan strategis, yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Kebijakan serta implementasi strategis berupa program-program pembangunan daerah, program prioritas Kepala Daerah, indikator program beserta arah kebijakan keuangan daerah.

Evaluasi RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 dilakukan terhadap hasil capaian/pelaksanaan RPJMD yang diukur melalui capaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026. Tabel IKU sebagaimana lampiran Peraturan Bupati dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut.

2.3 PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pada sidang umum PBB ke-70 pada tanggal 25—27 September 2015, telah disepakati kerangka pembangunan global yang baru yakni *Sustainable Development Goal* (SDGs) yang disepakati oleh 192 negara termasuk Indonesia yang kemudian diadopsi sebagai *platform* pembangunan berkelanjutan negara-negara tersebut. SDGs dalam terminologi pembangunan di Indonesia dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

TPB merupakan tantangan pembangunan di Kabupaten Pesawaran di mana pada tahun pada tahun 2030 cita-cita dari *SDGs* tertuang dalam 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator harus dicapai. Ketujuh belas TPB tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk apapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.
4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak

- perempuan.
- Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua.
  - Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan moderen bagi semua.
  - Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua.
  - Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi.
  - Mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara.
  - Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
  - Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
  - Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
  - Mengkonversi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan.
  - Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.
  - Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.
  - Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Ketujuhbelas tujuan tersebut diuraikan ke dalam 169 target. Untuk memudahkan pemantauan, 17 tujuan dan 169 target TPB dikelompokkan ke dalam 4 pilar, sebagai berikut.

- Pilar pembangunan sosial, meliputi tujuan ke-1, 2, 3, 4, dan 5.
- Pilar pembangunan ekonomi meliputi tujuan ke-7, 8, 9, 10, dan 17.
- Pilar pembangunan lingkungan meliputi tujuan ke-6, 11, 12, 13, 14, dan 15.
- Pilar pembangunan hukum dan tata kelola meliputi tujuan ke-16.

Terdapat 17 tujuan dan 208 target TPB yang menjadi urusan Kabupaten Pesawaran. Hingga tahun 2019, diperoleh capaian TPB di Kabupaten Pesawaran adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.85 Rekapitulasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No	TPB	Indikator	Mencapai Target	Belum Mencapai Target	Perlu Pendataan	Perlu Peningkatan	Perlu Penurunan	Tidak Ada Data
1	Tanpa Kemiskinan	27	4	5	1	3	1	13
2	Tanpa Kelaparan	15	1	1	0	4	0	9
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	39	4	2	0	2	2	21
4	Pendidikan Berkualitas	11	2	4	0	1	0	4
5	Kesetaraan Gender	13	0	1	0	1	0	11
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	12	1	4	0	0	0	7
7	Menjamin Akses Energi	1	0	1	0	0	0	0
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	16	1	1	0	1	0	13
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	8	0	1	0	3	0	5
10	Mengurangi Kesenjangan	12	3	0	0	0	0	9
11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	10	2	2	2	0	2	2



No	TPB	Indikator	Mencapai Target	Belum Mencapai Target	Perlu Pendataan	Perlu Peningkatan	Perlu Penurunan	Tidak Ada Data
12	Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	4	0	1	2	0	0	1
13	Penanganan Perubahan Iklim	3	0	0	2	0	0	1
15	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	3	0	0	0	0	0	2
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	24	2	1	0	1	0	20
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	10	3	0	0	1	0	6
TOTAL		208	23	24	7	17	5	124

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari 208 indikator TPB di Kabupaten Pesawaran, terdapat 23 indikator yang telah mencapai target, 24 tujuan belum mencapai target, 7 indikator perlu pendataan, 17 indikator perlu peningkatan, 5 indikator perlu penurunan, dan 124 indikator lainnya tidak tersedia data (N/A).

Beberapa indikator yang belum mencapai target pada pilar pembangunan sosial antara lain di Kabupaten Pesawaran adalah; (a) proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, (b) persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap, (c) prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin, (d) persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap, (e) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan, (f) kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan, (g) proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, (h) cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), (i) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat, (j) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat, (k) rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun, (l) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan (m) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.

Beberapa indikator yang belum mencapai target pada pilar pembangunan ekonomi antara lain adalah; (a) rasio penggunaan gas rumah tangga, (b) PDB per kapita, (c) laju pertumbuhan PDB industri manufaktur, dan (d) proporsi individu yang menggunakan internet. Beberapa indikator yang belum mencapai target pada pilar pembangunan lingkungan antara lain adalah; (a) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, (b) proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan, (c) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, (d) proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat, (e) persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan, (f) persentase sampah perkotaan yang tertangani, dan (g) jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. Selebihnya, selain keberhasilan mencapai target indikator dari masing-masing pilar pembangunan dalam TPB, masih banyaknya indikator yang tersedia datanya untuk dievaluasi (59,6%).

## 2.4 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

### 2.4.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil analisis untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan kajian terhadap dokumen perencanaan Nasional, Provinsi Lampung serta evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesawaran tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Pesawaran 2005-2025, serta juga memperhatikan berbagai isu-isu internasional, nasional, regional dan Provinsi Lampung yang dapat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Pesawaran, beberapa isu strategis pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bidang Sosial Budaya  
Memperhatikan dampak pandemi Covid-19 yang masih terasa hingga awal Tahun 2023, dimungkinkan akan mempengaruhi sektor sosial budaya, antara lain:
  - a) Tingginya prevalensi gizi buruk/stunting.
  - b) Masih Rendahnya Peningkatan IPM/ Kualitas Sumber Daya Manusia masih rendah.
  - c) Tingkat pengangguran yang mengalami peningkatan.
  - d) Masih rendahnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Bidang Ekonomi  
Memperhatikan dampak pandemi Covid-19 yang masih terus terjadi yang dimungkinkan akan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2023 sehingga akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan yang ada seperti:
  - a) Capaian Target PDRB Sektor Pariwisata (*Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Transportasi dan Perdagangan, serta Jasa Lainnya*)
  - b) Belum optimalnya pengembangan potensi obyek wisata unggulan (One Village One Destination)
  - c) Pengendalian inflasi
  - d) Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan dan Optimalisasi Industri Hilir Pengolahan hasil Pertanian/Pekebunan/Peternakan
  - e) Pengembangan Ekonomi masyarakat berbasis Potensi kawasan perdesaan
  - f) Percepatan Pembangunan Kawasan Industri maupun Kawasan Ekonomi Khusus.
  - g) Optimalisasi tingkat pertumbuhan investasi cenderung melambat.
3. Bidang Infrastruktur
  - a) Masih belum optimalnya Jalan dalam kondisi Mantap.
  - b) Masih belum optimalnya Jembatan dalam kondisi Mantap .
  - c) Belum Optimalnya ketersediaan rumah layak huni.
  - d) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah.
  - e) Pembangunan kawasan strategis .
  - f) Belum optimalnya Desa Siaga Bencana Pesawaran sebagai daerah rawan bencana.
4. Bidang Pemerintahan
  - a) Keterbatasan Kapasitas Fiskal
  - b) Belum Optimalnya Pembinaan Dan Pengawasan Dana Desa
  - c) Penerapan E-Government masih belum optimal.
  - d) Peningkatan Pelayanan Masyarakat

## 2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

### Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan, dilakukan melalui pendekatan urusan wajib dan urusan pilihan, sesuai dengan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

#### A. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

##### 1. URUSAN PENDIDIKAN

- a) Perlunya inovasi Perangkat Daerah dalam peningkatan komposit IPM sektor Pendidikan.
- b) Penerapan SPM sesuai Permendagri 59 Tahun 2021 tentang SPM belum optimal.
- c) Sarana dan prasarana ekstrakurikuler yang dapat menunjang perkembangan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, sosial dan kesehatan peserta didik perlu ditingkatkan.
- d) Penerapan PAUD *holistic integrated* yang belum optimal.
- e) Peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
- f) Manajemen pendidikan di setiap jenjang pendidikan perlu ditingkatkan kembali.

##### 2. URUSAN KESEHATAN

- a) Belum terpenuhinya SDM Kesehatan sesuai dengan jenis tenaga kesehatan sesuai dengan Permenkes No. 75 Tahun 2014 dan maldistribusi SDM.
- b) Perlunya inovasi perangkat daerah dalam peningkatan komposit IPM sektor kesehatan.
- c) Penerapan SPM sesuai Permendagri 59 Tahun 2021 tentang SPM belum optimal.
- d) Akses dan mutu pelayanan kesehatan (peningkatan sarana, prasarana, sumber daya manusia).
- e) Meningkatnya penyakit tidak menular (hipertensi dan diabetes mellitus).
- f) Prevalensi gizi buruk dan optimalisasi penanganan *stunting*.
- g) Tingginya angka penyebaran penyakit endemi baru akibat mutasi penyebab penyakit.
- h) Kurangnya penanganan terhadap penderita *human immunodeficiency* (HIV), *Tuberculosis* (TB), Malaria.

##### 3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- a) Penerapan SPM sesuai Permendagri 59 Tahun 2021 tentang SPM belum optimal.
- b) Masih belum optimalnya jalan dalam kondisi mantap, capaian sampai tahun 2022 sebesar 73,95% dari target RPJMD sebesar 82,41%.
- c) Optimalisasi dan penguatan kelembagaan Komisi Irigasi.
- d) Percepatan dan penyelesaian penetapan Perkada RDTR Gedung Tataan dan RDTR Teluk Pandan.

##### 4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- a) Penerapan SPM sesuai Permendagri 59 Tahun 2021 tentang SPM belum optimal.
- b) Kurangnya cakupan ketersediaan fasum dan fasos pada perumahan layak huni dan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- c) Penataan lingkungan kawasan perumahan.
- d) Meminimalisir angka kejadian embrional kawasan kumuh perkotaan dan perdesaan.

##### 5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- a) Penerapan SPM sesuai Permendagri 59 Tahun 2021 tentang SPM belum optimal.
- b) Kurangnya PPNS penegak perda dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- c) Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana pemadam kebakaran.

- d) Optimalisasi TRC dalam penanganan bencana daerah.
- e) Belum optimalnya peningkatan kapasitas masyarakat pengurangan risiko bencana di desa rawan bencana.
- f) Masih minimnya rambu-rambu peringatan ancaman bencana.
- g) Penguatan desa tangguh bencana.

**6. URUSAN SOSIAL**

- a) Penerapan SPM sesuai Permendagri 59 Tahun 2021 tentang SPM belum optimal.
- b) Optimalisasi penurunan tingkat kemiskinan.
- c) Belum optimalnya pemanfaatan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim (P3KE).
- d) Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin.
- e) Kurang optimalnya pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

**B. URUSAN WAJIB YANG TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR**

**1. URUSAN TENAGA KERJA**

- a) Pengembangan Ekonomi masyarakat berbasis Potensi kawasan perdesaan.
- b) Terbatasnya kesempatan kerja dan peluang usaha.

**2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- a) Masih rentan permasalahan *trafficking* terhadap perempuan dan anak.
- b) Masih sering timbulnya KDRT dan kekerasan pada perempuan dan anak.
- c) Tingginya Pengaruh negatif dari globalisasi terhadap perilaku anak-anak dan remaja.
- d) Optimalisasi Tim Pendamping Keluarga dalam penanganan dan pelaporan *stunting*.

**3. URUSAN PANGAN**

- a) Belum optimalnya ketersediaan cadangan pangan bagi masyarakat.
- b) Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan dan pendataan daerah rawan pangan.
- c) Kurangnya pengetahuan untuk pemanfaatan lahan pekarangan kosong.

**4. URUSAN PERTANAHAN**

- a) Percepatan penyelesaian penetapan peraturan daerah tentang pertanahan.
- b) Belum optimalnya sertifikasi pertanahan.

**5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**

- a) Peningkatan suhu udara dan penurunan kualitas udara.
- b) Advokasi kesadaran dan kepedulian masyarakat serta pihak swasta terhadap kelestarian lingkungan.
- c) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan.
- d) Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah perkotaan.
- e) Kurangnya jumlah SDM pengelola persampahan.
- f) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana persampahan.

**6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

- a) Tindak lanjut penginputan hasil pencacahan Regsosek.
- b) Masih kurangnya fasilitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c) Kurang terkoordinasi, terintegrasi, terarah dan komperhensif data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- d) Pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil lebih dioptimalkan.

**7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

- a) Penguatan BUMDes/BUMDesMa dalam pengelolaan dan advokasi program Badan Usaha Jejama Berkembang (BUJANG).
- b) Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha.
- c) Minimnya penggunaan dan pemanfaatan IPTEK Masyarakat pedesaan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
- d) Kurangnya kemampuan SDM aparatur desa dalam administrasi perencanaan pembangunan dan administrasi pengelolaan keuangan desa.
- e) Belum optimalnya kelembagaan dan kualitas aparatur desa.

**8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

- a) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya keluarga berencana menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS);
- b) Kurang terkoordinasi, terintegrasi, terarah dan komperhensif data pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

**9. URUSAN PERHUBUNGAN**

- a) Belum maksimalnya PAD sektor perhubungan.
- b) Belum optimalnya sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah.
- c) Belum adanya rencana pengembangan trayek dan rute angkutan desa dan angkutan antar kota dalam provinsi.
- d) Belum optimalnya penyediaan prasarana dan fasilitas transportasi darat dan laut.
- e) Optimalisasi penyediaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
- f) Belum optimalnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas.
- g) Belum optimalnya kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor.

**10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- a) Belum optimalnya pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terpadu dalam *Command Center* Kabupaten Pesawaran.
- b) Persiapan pembentukan *Computer Security Response Team* (CSRT) Kabupaten Pesawaran.

**11. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

- a) Belum optimalnya pasar hasil UMKM.
- b) Belum optimalnya pengembangan sistem pembiayaan dan jaringan bisnis dengan kemitraan pemerintah dan swasta.
- c) Kurangnya infrastruktur produksi untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UKM.
- d) Kualitas lembaga dan SDM koperasi belum optimal.
- e) Masih banyak koperasi yang kurang sehat dalam operasionalnya.

**12. URUSAN PENANAMAN MODAL**

- a) Belum optimalnya dukungan regulasi terkait penanaman modal dan investasi.
- b) Kurang intensifnya promosi potensi dan peluang investasi.
- c) Rendahnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam melengkapi legalitas bangunan dan usaha.

**13. URUSAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA**

- a) Belum optimalnya pendataan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan.
- b) Masih rendahnya kreatifitas, inovasi dan jiwa kewirausahaan pemuda.
- c) Belum optimalnya memasyarakatkan budaya olahraga.
- d) Kurangnya frekuensi kejuaraan olah raga tingkat Kabupaten.

**14. URUSAN STATISTIK**

- a) Belum tersedianya portal Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Pesawaran.

**15. URUSAN PERSANDIAN**

- a) Belum efektifnya Sistem Pelaporan Pemerintah Daerah (SP4N Lapor) yang terintegrasi.
- b) Masih minimnya prasarana dan fasilitas dalam menunjang kegiatan persandian.

**16. URUSAN KEBUDAYAAN**

- a) Kurangnya pendokumentasian dan penggalian budaya daerah.
- b) Kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda.
- c) Masih rendahnya promosi budaya lokal di dalam dan luar negeri.

**17. URUSAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

- a) Kurang melembaganya budaya literasi dalam kehidupan masyarakat.
- b) Optimalnya SDM arsiparis dan pustakawan.
- c) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan Arsip dan Perpustakaan.

**C. URUSAN PILIHAN**

**1. URUSAN PERTANIAN**

- a) Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan dan optimalisasi industri hilir pengolahan hasil pertanian.
- b) Tingginya angka kejadian alih fungsi lahan (peruntukan dan jenis komoditas).



- c) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM penyuluh pertanian, perkebunan, dan peternakan.
- d) Belum optimalnya inovasi dan kreatifitas pengolahan hasil produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan.
- e) Percepatan terbentuknya komisi pengawasan pupuk dan pestisida.
- f) Belum optimalnya penanganan penyakit tanaman dan penyakit ternak.

**2. URUSAN PARIWISATA**

- a) Belum maksimalnya PAD sektor pariwisata.
- b) Belum tercapainya Target PDRB Sektor Pariwisata (*Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Transportasi dan Perdagangan, serta Jasa Lainnya*).
- c) RIPPPDA yang belum selaras dan optimal.
- d) Konservasi terumbu karang belum ada revitalisasi terumbu karang.
- e) Fasum fasos belum memiliki strandar pariwisata (toilet, mushola, dll).
- f) Pokdarwis masih sedikit yang aktif.
- g) Kesadaran masyarakat akan sapta pesona.
- h) Belum ada mekanisme monev terkait kinerja internal pariwisata.

**3. URUSAN PERIKANAN**

- a) Belum maksimalnya PAD sektor perikanan.
- b) Belum optimalnya produksi perikanan air tawar.
- c) Penguatan inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan.
- d) Belum optimalnya pengawasan terhadap pencemaran akibat industri perikanan.

**4. URUSAN PERDAGANGAN**

- a) Pentingnya pengendalian inflasi.
- b) Belum maksimalnya sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional.
- d) Tingginya tingkat pertumbuhan pasar modern dan waralaba.

**5. URUSAN PERINDUSTRIAN**

- a) Kurang optimalnya pembiayaan dan kemitraan antara industri kecil (*home industry*).
- b) Pertumbuhan sektor industri skala besar masih relatif stagnan, sementara industri kecil dan menengah masih memiliki keterbatasan dalam hal daya saing produk dan pemasaran.

**6. URUSAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**

- a) Perlunya peningkatan suplai listrik di daerah pelosok dan pulau-pulau kecil.

**7. URUSAN TRANSMIGRASI**

- a) Kurangnya kesempatan penduduk sebagai calon peserta transmigrasi.

**D. UNSUR PENUNJANG**

**1. SEKRETARIAT DAERAH**

- a) Penguatan kesekretariatan TPID.
- b) Pendampingan OPD dalam penilaian SAKIP dan RB.
- c) Laporan evaluasi pemerintah daerah (LPPD, SPM dan LKPJ) yang tepat waktu.
- d) Updating SSH, SBM dan HSPK.
- e) Sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah.
- f) Percepatan perwujudan command center Kabupaten Pesawaran.
- g) Penyelenggaraan rakor forkopimda (*Coffee morning*) secara berkala.
- h) Fasilitas tindak lanjut MoU (kerjasama daerah).
- i) Implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).
- j) Percepatan penyelesaian batas wilayah dan batas desa.

**2. SEKRETARIAT DPRD**

- a) Harmonisasi agenda reses DPRD dalam proses perencanaan pembangunan kabupaten.
- b) Harmonisasi agenda kerja DPRD dalam proses penganggaran (APBD) kabupaten.
- c) Harmonisasi dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda).

**3. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

- a) Penguatan koordinasi komunikasi intelijen daerah (KOMINDA).
- b) Pemahaman yang terbatas terhadap kebhinekaan menimbulkan ancaman disintegritas kebangsaan.



- c) Munculnya hoax, perilaku menyimpang, ajaran sesat, maupun ancaman terorisme dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
  - d) Terdapat potensi gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat karena latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik dan yang bernuansa Sara.
  - e) Tingginya angka penyalahgunaan/penguasaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza).
- 4. PENGAWASAN**
- a) Penguatan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP).
  - b) Optimalisasi pelaksanaan review terhadap dokumen perencanaan, penganggaran dan dokumen teknis lainnya.
  - c) Penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada pemerintah desa.
  - d) Peningkatan indeks perspektif korupsi dan pendampingan MCP KPK.
- 5. PERENCANAAN**
- a) Harmonisasi agenda kerja perencanaan pembangunan kabupaten.
  - b) Percepatan implementasi satu data indonesia (SDI) Kabupaten Pesawaran.
  - c) Penguatan peran TKPK dalam penurunan angka kemiskinan.
- 6. KEUANGAN**
- a) KUA-PPAS dan APBD belum sepenuhnya mempedomani RKPD.
  - b) Belum optimalnya kerja tim koordinasi dalam penanganan TPTGR.
  - c) Belum optimalnya pemanfaatan dan penataan aset daerah.
  - d) Belum tersedianya data proyeksi sumber pendanaan pembangunan daerah dalam SIPD.
  - e) Optimalisasi kerjasama implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah.
  - f) Belum optimalnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD).
- 7. KEPEGAWAIAN**
- a) Masih kurangnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.
  - b) Masih kurangnya jumlah ASN untuk memenuhi kebutuhan minimal pemerintah daerah.
- 8. PENELITIAN**
- a) Belum adanya road map pengembangan inovasi daerah.
  - b) Belum adanya rencana kelitbangan.
  - c) Optimalisasi pemanfaatan hasil kelitbangan.

## BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan menggambarkan secara umum kondisi dan analisis statistik serta karakteristik perekonomian dan keuangan Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 dan perkiraan Tahun 2024, serta prospek perekonomian Tahun 2024. Didalam bab ini akan dibahas mengenai tantangan perekonomian Kabupaten Pesawaran serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah, serta kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

### 3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 bahwa Perubahan RKPD Tahun 2023 mengakomodir arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2023 yang diselaraskan terhadap Perubahan RKP 2023 dan Perubahan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023. Penyelarasan ini dilakukan sebagai upaya sinkronisasi antar dokumen perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan dan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada tahun tersebut. Dalam implementasinya arah kebijakan ekonomi daerah ini akan menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan lebih lanjut kedalam program dan kegiatan.

#### 3.1.1 Kondisi dan Arah Perekonomian Nasional

Kebijakan ekonomi yang dicanangkan pemerintah pusat pada Tahun 2023 dapat menjadi tantangan maupun peluang bagi perekonomian Kabupaten Pesawaran kedepan. Kerangka perekonomian nasional secara makro dalam Tahun 2023 disusun berdasarkan kondisi umum perekonomian Indonesia, masalah yang masih perlu diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, peluang serta tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan perekonomian Indonesia yang diperkirakan dapat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Pesawaran meliputi sasaran dan kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi yang tercermin dalam stabilitas moneter, fiskal dan neraca pembayaran, serta kebutuhan investasi untuk mendorong pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Pada RPJMN Tahun 2020–2024, pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
2. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Sesuai dengan Tema Pembangunan IV RPJMN Tahun 2020-2024 : “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”, dengan arah kebijakan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada 2036, Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* (MIT). Oleh karena itu, di 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju dan berdasarkan RPJMN

Tahun 2020-2024 bahwa Kabupaten Pesawaran tercantum dalam Kawasan pengembangan industri baru diluar pulau jawa yaitu Kawasan Industri Pesawaran (Tegineneng) yang akan dikembangkan dalam kerangka industrialisasi dengan dimanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun, kerja sama regional, serta diversifikasi perekonomian daerah.

Kondisi ekonomi global pada tahun ini diperkirakan masih belum terlalu kondusif. Bank Dunia pada awal Juni 2023 memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami penurunan dari 3,1% di Tahun 2022 menjadi 2,1% di akhir Tahun 2023. Adapun untuk laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, pada pertengahan tahun 2022 diprediksi akan tumbuh 5,1% namun pada akhir Juni 2023 Bank Dunia memproyeksi kembali bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih moderat pada angka 4,9% diakhir 2023, lebih rendah daripada realisasi pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 diangka 5,3%. Perekonomian global masih dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti masih berlangsungnya perang Russia dan Ukraina dan inflasi di negara maju.

Selain tantangan global, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dibayangi juga oleh tantangan domestik. Unsur-unsur penting penggerak ekonomi, yakni investasi, ekspor, industri manufaktur, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami perlambatan dalam tiga tahun terakhir. Sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2023 bergantung pada realisasi pertumbuhan pada triwulan ketiga dan keempat Tahun 2023.

Sasaran dan target yang akan dicapai pada akhir Tahun 2023, mencakup:

- 1) Pertumbuhan ekonomi antara 5,3-5,7%.
- 2) Inflasi berkisar antara 3% dengan tingkat deviasi sebesar kurang lebih 1% (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, 2023, dan 2024).
- 3) Tingkat kemiskinan pada kisaran 6,5-7,5%.
- 4) IPM menjadi 73-74.
- 5) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 27,27%.
- 6) Gini rasio pada kisaran 0,374-0,377.
- 7) Tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7%.
- 8) Nilai tukar petani 105-108.
- 9) Nilai tukar nelayan 110.

Memahami kondisi tersebut Tema RKP Tahun 2023 menjadi: **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan Fokus Pembangunan RKP Tahun 2023 ialah pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem jaringan pengaman nasional; dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Araha Kebijakan Nasional yang menjadi penekanan pada RKP Tahun 2023 yaitu:

- 1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- 2) Peningkatan kualitas SDM.
- 3) Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*.
- 4) Mendorong pemulihan dunia usaha.
- 5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
- 6) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim.
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi).
- 8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

### 3.1.2 Kondisi dan Arahan Perekonomian Provinsi Lampung

Secara substansial misi terkait dengan pengembangan perekonomian Provinsi Lampung adalah dengan mengembangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki dengan orientasi kepada skala ekonomi nasional dan global. Di lain sisi, ekonomi berbasis agro juga akan terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa dengan dukungan penguasaan teknologi dan penguasaan informasi pasar. Selain itu

kebijakan ekonomi daerah akan diarahkan pada peningkatan investasi baru baik dalam dan luar negeri yang dipacu untuk memperluas kesempatan kerja, peningkatan produktifitas tenaga kerja, menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang konsumsi. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya juga diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung dengan lingkungan yang berkelanjutan.

Target yang ingin dicapai dengan penetapan kebijakan ekonomi makro yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung, antara lain: 1) Menciptakan kesempatan kerja yang tinggi untuk mengurangi pengangguran; 2) Meningkatkan kapasitas perekonomian daerah; 3) Meningkatkan pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat; 4) Menciptakan kondisi perekonomian daerah yang stabil; dan 5) Pemerataan distribusi pendapatan.

Perkembangan kegiatan ekonomi Provinsi Lampung yang dicerminkan dengan PDRB atas dasar harga konstan maupun harga berlaku mengalami pertumbuhan. Nilai PDRB Provinsi Lampung atas dasar harga berlaku pada Tahun 2021 adalah sebesar 371,198 trilyun, meningkat di Tahun 2022 menjadi 414,131 trilyun. Empat lapangan usaha penyumbang terbesar pembentuk PDRB Provinsi Lampung adalah sektor pertanian dengan kontribusi 27,90 persen; industri pengolahan dengan kontribusi 18,55 persen; perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi 13,20 persen; dan konstruksi dengan kontribusi 9,75 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Provinsi Lampung selama periode 2018-2022 menunjukkan tren fluktuasi akibat Pandemi Covid-19. Laju pertumbuhan ekonomi di pada Tahun 2018 sebesar 5,23 persen, meningkat di Tahun 2019 menjadi 5,26 persen. Pada Tahun 2020 terjadi kontraksi hingga -1,67 persen dan Tahun 2021 mulai meningkat kembali pada angka 2,79 persen dan mulai bergerak bangkit ke angka 4,28 persen pada Tahun 2022..

Perkembangan inflasi di Provinsi Lampung pada Triwulan III Tahun 2021 tercatat terendah pada batas bawah kisaran sasaran  $3,0 \pm 1$  persen yaitu sebesar 1,56 persen (yoy) atau melambat dibandingkan Triwulan tahun sebelumnya 2,34 persen (yoy). Rendahnya angka inflasi pada periode ini dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan mobilitas dan sosial masyarakat serta masuknya masa panen pada komoditas strategis. Secara periode tahunan, penyumbang inflasi terbesar pada Triwulan III Tahun 2021 disumbang oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan porsi 1,08 persen dengan nilai inflasi 3,81 persen (yoy).

Pada Tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung sebanyak 1.083,93 ribu jiwa bertambah menjadi sebesar 1.002,41 ribu jiwa pada Tahun 2022 atau menurun sebesar 7,52 persen dari tahun sebelumnya.

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk diperlihatkan dengan Rasio Gini. Rasio Gini Provinsi Lampung per September 2019 sebesar 0,33 dan terus mengalami penurunan dari Tahun 2020 sampai Tahun 2022 secara berturut-turut yakni 0,320, 0,314 dan 0,313, Indeks Gini Lampung lebih baik dari Nasional yang berada pada angka 0,381.

Tema RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah “*Penguatan Ekonomi yang Inklusif untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah*”. Berdasarkan tema tersebut, maka dirumuskan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 3) Pembangunan infrastruktur.
- 4) Reformasi birokrasi.
- 5) Kehidupan masyarakat yang religius, aman, dan berbudaya.
- 6) Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

### 3.1.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Pesawaran

Identifikasi kondisi pembangunan mencakup pencapaian indikator makro ekonomi, pencapaian indikator pembangunan daerah, termasuk analisis dan proyeksi kapasitas

fiskal daerah sebagai sumber dana bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah.

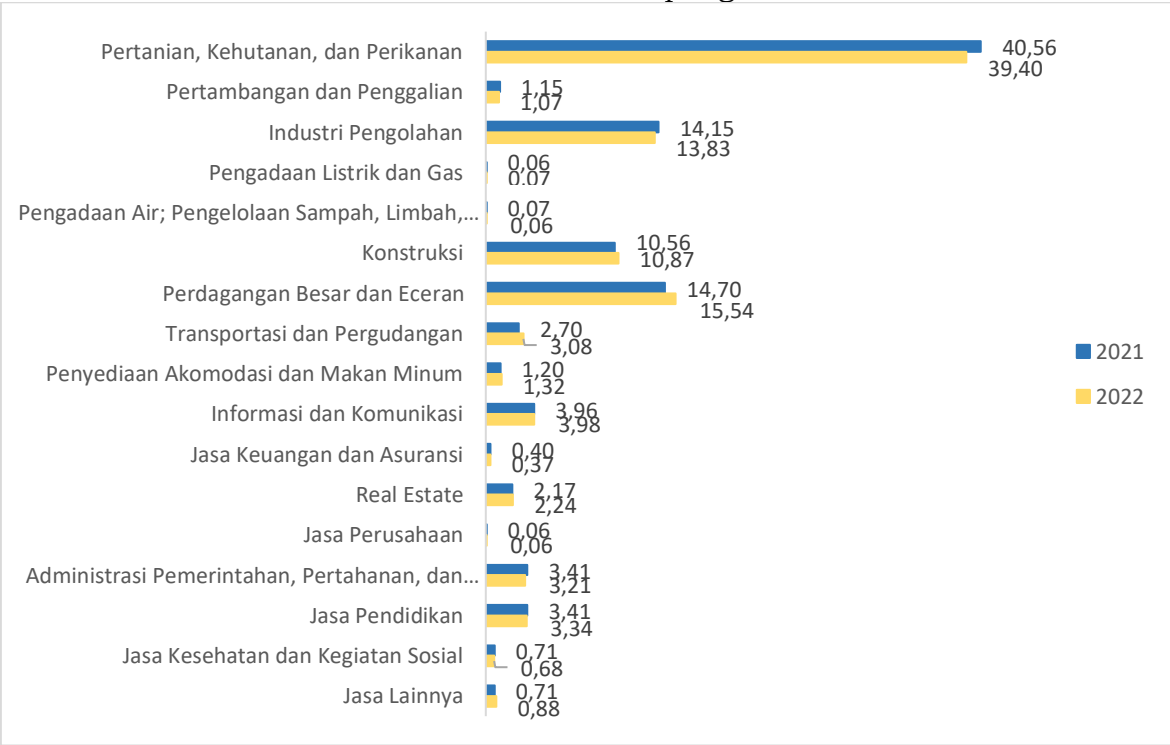
Kerangka ekonomi makro Tahun 2023 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Pesawaran hingga triwulan kedua Tahun 2023 dan perkiraan Tahun 2023, masalah-masalah yang akan diselesaikan, tantangan yang akan dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan Pesawaran yang Maju, Makmur dan Sejahtera. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan sebagai pasca pandemi Covid-19 di daerah, dilakukan kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi serta arah kebijakan keuangan daerah.

Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Pesawaran dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro Nasional dan Provinsi Lampung. Kemajuan ekonomi Kabupaten Pesawaran dapat diketahui dengan menyandingkan data perekonomian Kabupaten Pesawaran dengan Provinsi Lampung dan Nasional.

**a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemajuan perekonomian Kabupaten Pesawaran yaitu PDRB. PDRB menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Dari PDRB dapat diketahui nilai tambah dari kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi daerah. Oleh karena itu dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah khususnya pembangunan ekonomi guna penyusunan atau menggariskan kebijakan lebih lanjut.

Gambar 3.1 Struktur PDRB Rill Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2022



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

Catatan :

- A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- B Pertambangan dan Penggalian
- C Industri Pengolahan
- D Pengadaan Listrik dan Gas
- E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- F Konstruksi
- G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- H Transportasi dan Pergudangan
- I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- J Informasi dan Komunikasi
- K Jasa Keuangan dan Asuransi
- L Real Estate



- M, N    Jasa Perusahaan
- O       Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- P       Jasa Pendidikan
- Q       Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- R, S, T, U    Jasa Lainnya

Seiring dengan terjadinya pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Pesawaran dari sektor primer ke sektor tersier maka untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi melalui sektor tersebut, beberapa upaya yang dilakukan adalah; 1). Peningkatan kualitas SDM; 2). Peningkatan jumlah Wira Usaha Baru (WUB); 3). Membuka lapangan kerja baru; 3). Meningkatkan investasi; 4). Meningkatkan nilai ekspor dan 5). Perbaikan infratraktur.

**b. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) merupakan indikator makro yang masih relevan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi, variabel lainnya, dan distribusi pendapatan (distribution of income) antar golongan masyarakat. Dengan demikian ukuran pertumbuhan ekonomi masih tetap digunakan sebagai tolok ukur terutama oleh negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi dari barang dan jasa pada periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya jika negatif menunjukkan adanya penurunan perekonomian. Munculnya Covid-19 pada akhir Tahun 2019 memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan tabel dibawah ini pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor lapangan usaha pada Tahun 2020 tertinggi pada sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,26% dan terendah pada sektor jasa lainnya yang berkontraksi hingga -11,57%, namun pada Tahun 2021 terjadi pergeseran dimana sektor lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yakni pada sektor Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 8,39% dan terendah pada sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkontraksi hingga -1,27%. Pada akhir Tahun 2022 kembali terjadi pergeseran dimana sektor jasa lainnya tumbuh mencapai 28,54% dan terendah pada sektor pertambangan dan penggalian yang berkontraksi hingga -2,84%. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Pertumbuhan PDRB Rill Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,58	1,19	0,07	-1,27	1,56
2	Pertambangan dan Penggalian	4,23	2,35	-0,03	1,87	-2,84
3	Industri Pengolahan	7,51	5,59	-4,77	6,90	2,20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,58	7,62	7,23	4,49	6,18
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,58	6,48	5,18	8,39	1,20
6	Konstruksi	9,96	9,00	-2,18	1,59	7,57
7	Perdagangan Besar dan Eceran	7,39	8,55	-4,87	5,63	10,52
8	Transportasi dan Pergudangan	6,74	10,46	-4,03	5,25	18,93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,53	17,93	-3,81	0,28	14,51
10	Informasi dan Komunikasi	8,96	8,88	9,05	6,67	5,14
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,04	3,59	2,78	0,91	-1,56
12	Real Estate	5,92	6,51	-2,29	1,32	7,59
13	Jasa Perusahaan	2,12	4,16	-2,15	2,04	14,31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,06	5,11	3,84	2,45	-1,61
15	Jasa Pendidikan	9,49	10,03	3,85	3,32	2,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,88	7,04	9,26	5,12	0,01
17	Jasa Lainnya	7,96	12,78	-11,57	4,28	28,54
	Kabupaten Pesawaran	5,05	5,00	-1,26	2,08	4,55

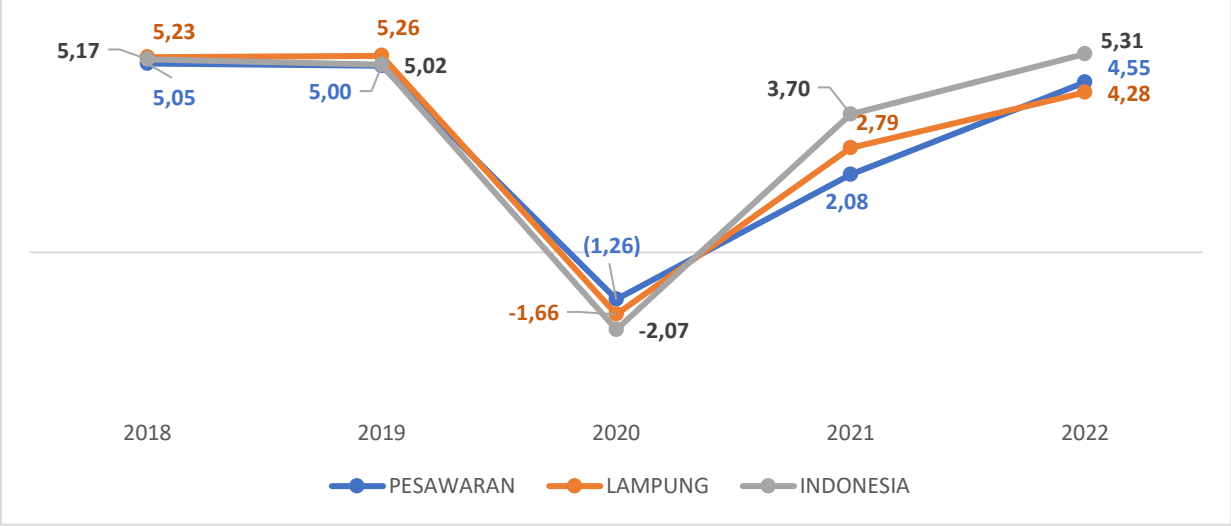
Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

Secara total berdasarkan PDRB harga konstan Tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran fluktuatif, Tahun 2018 sebesar 5,05%, Tahun 2019 sebesar 5,00%, Tahun 2020 menjadi -1,26%, dan Tahun 2021 menjadi 2,08% serta meningkat



ke 4,55% pada Tahun 2022. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022 tersaji pada gambar berikut.

Gambar 3.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022



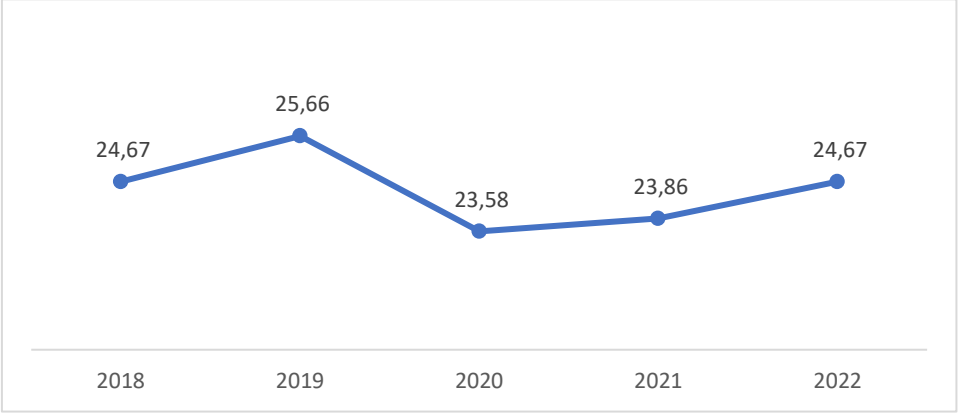
Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

c. PDRB per Kapita

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan dari meningkatnya tingkat pendapatan per kapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah Penduduk Pertengahan tahun yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita.

PDRB Per kapita Kabupaten Pesawaran berdasarkan data BPS Tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. Pada Tahun 2018 PDRB Per kapita Kabupaten Pesawaran sebesar sebesar 24,67 juta per tahun, tahun 2019 sebesar 25,66 juta per tahun, tahun 2020 menurun menjadi 23,58 juta per tahun akibat Pandemi Covid-19 dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 23,86 juta per tahun serta peningkatan kembali pada tahun 2022 pada angka 24,67, sebagaimana tercantum dalam grafik di bawah.

Gambar 3.3 Grafik Perkembangan PDRB Riil per Kapita Tahun 2018-2022 (dalam Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

d. PDRB Menurut Pengeluaran

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Pesawaran akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2018-2022, tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal, banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pesawaran periode 2018-2022 berfluktuasi dengan capaian berurut-turut pada kurun waktu tersebut yaitu 5,05 persen, 5,00 persen, -1,26 persen, 2,08 persen, dan 4,55 persen. Perkembangan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Jika dilihat dari permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesawaran didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB. Pada periode 2018-2022, PDRB Kabupaten Pesawaran atas dasar harga berlaku meningkat cukup pesat, yakni sebesar 15.099,61 miliar Rupiah (2018); 16.208,20 miliar Rupiah (2019); 16.211,74 miliar Rupiah (2020); dan 16.845,05 miliar Rupiah (2021); serta 18.687,38 miliar Rupiah (2022). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Pesawaran pada periode 2018-2022 dapat dilihat dari dibawah ini.

Tabel 3.2 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (dalam Miliar Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.659,59	9.349,29	9.325,11	9.780,52	10.816,88
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT NPISH	198,79	220,37	225,11	230,55	243,87
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.074,8	1.125,38	1.119,81	1.141,64	1.103,13
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.706,00	5.167,52	5.029,77	5.324,66	5.702,62
5	Perubahan Inventori	5,61	2,07	182,34	-245,34	0,48
6	Net Ekspor Barang dan Jasa/Net	454,82	343,57	329,60	613,02	820,40
	<b>PDRB</b>	<b>15.099,61</b>	<b>16.208,20</b>	<b>16.211,74</b>	<b>16.845,05</b>	<b>18.687,38</b>

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2022

Seiring dengan terjadinya pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Pesawaran dari sektor primer ke sektor tersier maka untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi melalui sektor tersebut, beberapa upaya yang dilakukan adalah; 1). Peningkatan kualitas SDM; 2). Peningkatan jumlah Wira Usaha Baru (WUB); 3). Membuka lapangan kerja baru; 3). Meningkatkan investasi; 4). Meningkatkan nilai ekspor dan 5). Perbaikan infratraktur.

**e. Inflasi**

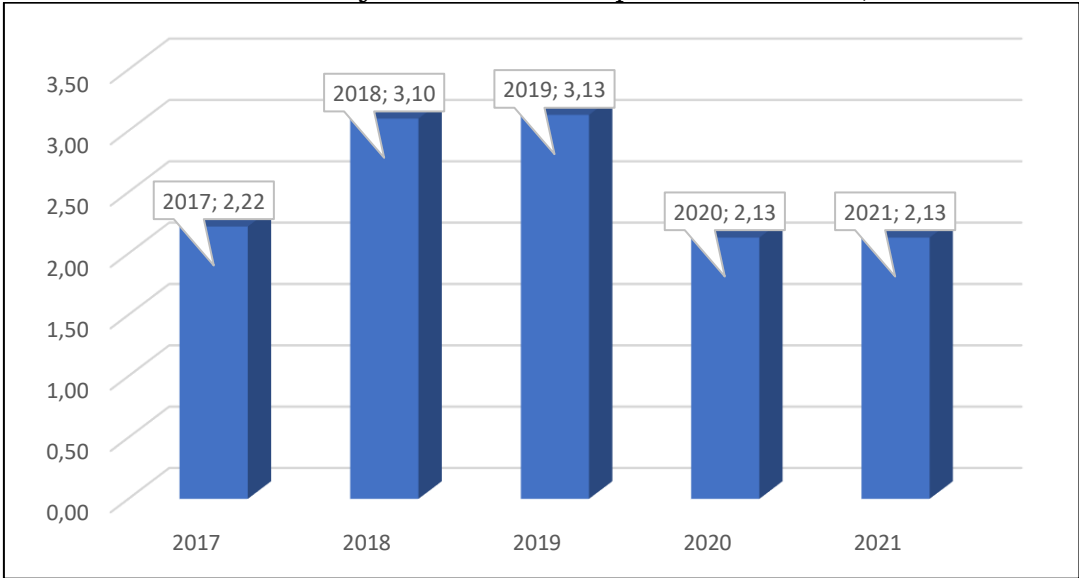
Inflasi menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat, data inflasi Kabupaten Pesawaran dilihat dari inflasi kota terdekat yakni Kota Bandar Lampung. Laju inflasi di Kabupaten Pesawaran dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 tercatat bahwa inflasi di Kabupaten Pesawaran adalah sebesar 2,22, mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 3,10, selanjutnya tahun 2019 mengalami penurunan pada angka 3,13 dan terus menurun hingga pada angka 2,13 pada Tahun 2020 dan 2021.

Meski demikian, peningkatan Inflasi Kabupaten Pesawaran masih dalam ambang batas target tingkat inflasi yang ditetapkan, yaitu  $2 \pm 0,5$  persen. Disatu sisi, tingkat inflasi yang terkendali dapat menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat, yang juga mendukung stabilitas perekonomian regional khususnya insentif pada sisi suplai produksi (produsen). Disisi yang lain juga dapat mengindikasikan masih lemahnya daya beli masyarakat yang sekaligus mencerminkan lambatnya pertumbuhan ekonomi regional daerah. Laju Inflasi Di Kabupaten Pesawaran tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tersaji pada gambar dibawah ini..

Upaya strategi efektif yang dilakukan oleh Tim Pemantau dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pesawaran yaitu; 1). Upaya menjaga keterjangkauan harga;

- 2). Menjaga ketersediaan pasokanbahan kebutuhan pokok, cadangan pangan pemerintah daerah dan kelembagaan; 3). Mendorong kelancaran distribusimelalui kerja sama perdagangan antardaerah dan meningkatkan infrastruktur perdagangan; serta 4). Melakukan komunikasi efektif dengan perbaikan kualitas dan validitas data.

Gambar 3.4 Grafik Laju Inflasi Di Kabupaten Pesawaran, 2017-2021



Sumber : BPS Kabupaten Pesawaran, 2022

**f. Ketenagakerjaan**

Indikator ketenagakerjaan yang paling umum digunakan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja pada usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Sedangkan TPT adalah ukuran yang menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan data pada tabel dibawah, TPAK Kabupaten Pesawaran pada lima tahun terakhir mengalami perkembangan menuju tren positif. Selama kurun waktu tersebut persentase jumlah angkatan kerja yang terserap dalam dunia kerja berfluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2018 persentase jumlah angkatan kerja yang berkerja sebesar 68,23 persen yang menurun menjadi 67,80 persen pada tahun 2019 namun mengalami peningkatan pada Tahun 2020 menjadi 69,49 persen dan menurun akibat Pandemi Covid-19 pada Tahun 2021 ke angka 65,42 persen serta berhasil kembali naik ke angka tertinggi selama lima tahun terakhir pada posisi 71,27 persen di Tahun 2022. Namun cerminan angka fluktuasi tersebut tidak berpengaruh terhadap progress menurunnya tingkat pengangguran dari 4,64 persen pada tahun 2018 menjadi 4,19 pada Tahun 2021 serta pada Tahun 2022 berbanding terhadap TPAK yang meningkat, tetapi tingkat pengangguran yang diharapkan menurun namun juga meningkat menjadi 5,06 persen.

Tabel 3.3 Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2018-2022

Tahun	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka
2018	68,23	4,64
2019	67,80	4,34
2020	69,49	4,64
2021	65,42	4,19
2022	71,27	5,06

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

**g. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)**

Dalam kurun waktu Tahun 2018 hingga 2022, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pesawaran mengalami tren yang fluktuatif dari 15,97% menjadi 13,85% atau dari 71.140 orang menjadi 63.170 orang. Data perkembangan penduduk miskin dari Tahun 2018 hingga 2022 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 3.4** Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Tahun 2018-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Per kapita per bulan)	Penduduk Miskin		Indeks Gini
		Jumlah	Persentase (%)	
2018	360.909	70.140	15,97	0,316
2019	372.649	67.360	15,19	0,310
2020	403.444	66.040	14,76	0,288
2021	420.032	68.310	15,11	0,299
2022	452.521	63.170	13,85	0,251

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

Selanjutnya indeks Gini di Kabupaten Pesawaran menunjukkan tren fluktuatif, pada Tahun 2018 berada pada 0,316, mengalami penurunan pada angka 0,310 pada tahun 2019 dan kembali menurun pada Tahun 2020 di angka 0,288 poin. Namun mengalami peningkatan pada Tahun 2021 menjadi 0,299 poin dan hingga Tahun 2022 mengalami tren positif yang menurun pada angka 0,251 poin. Hal ini bermakna bahwa terjadi penurunan angka ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pesawaran, lebih lanjut indeks Gini Kabupaten Pesawaran lebih baik dengan capaian Provinsi Lampung (0,313) pada Tahun 2022 dan lebih baik dari capaian nasional (0,381).

**3.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2023**

**a. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Pesawaran mencapai titik terendah sejak Tahun 2015 pada 2020, yaitu -1,26% akibat Pandemi Covid-19. Kemudian pada Tahun 2021 mulai tumbuh kembali pada angka 2,08% dan terus meningkat hingga mencapai 4,55% pada Tahun 2022. Namun demikian, sektor pertanian justru mengalami penurunan pertumbuhan seiring dengan sebagian sektor lainnya mengalami peningkatan pertumbuhan yang secara total PDRB Pesawaran mengalami kenaikan pertumbuhan. Artinya, fluktuasi sektor-sektor ekonomi akan menentukan dinamika perekonomian Kabupaten Pesawaran, terutama pada tiga sektor yang dominan yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor perdagangan besar dan eceran; dan industri pengolahan. Selanjutnya indeks Gini di Kabupaten Pesawaran menunjukkan tren fluktuatif, pada Tahun 2018 berada pada 0,316 dan menurun menjadi 0,251 pada Tahun 2022. Hal ini bermakna bahwa terjadi penurunan angka ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pesawaran, lebih lanjut indeks Gini Kabupaten Pesawaran lebih baik dengan capaian Provinsi Lampung (0,313) pada Tahun 2022 dan lebih baik dari capaian nasional (0,381).

Berdasarkan kondisi tersebut, pada 2024 pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5±0,5%. Dengan berbagai kebijakan dan program-kegiatan yang ada serta dampak positif perekonomian provinsi dan nasional yang pertumbuhannya juga mengalami kenaikan maka diperkirakan pada 2024 pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%. Walau tidak mencapai target tapi sudah ada peningkatan yang cukup.

Berdasarkan dinamika perekonomian nasional dan Lampung yang cukup dipengaruhi oleh pandemi covid-19 dan arah kebijakan serta program-kegiatan pembangunan Pesawaran maka pada 2023 pertumbuhan ekonomi Pesawaran juga mengalami penyesuaian.

Mengingat belum adanya perhitungan riil pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 maka perkiraan capaian diatas menjadi dasar untuk menetapkan target 2024. Atas pertimbangan dimana pertumbuhan ekonomi dan nasional yang masih dalam fase pemulihan pasca pandemi covid-19 maka Pesawaran juga menetapkan target

pertumbuhan ekonomi 2024 menyesuaikan dengan realitas yang ada sebesar  $5 \pm 0,5\%$ . Tentu saja hal ini memiliki dasar yaitu arah kebijakan dan program-kegiatan yang akan dijalankan. Potensi sumberdaya dan rencana pembangunan yang disusun serta pengaruh perekonomian Lampung dan nasional target ini akan tercapai. Paling tidak pertumbuhan ekonomi Pesawaran 2024 cukup baik.

**b. Pertumbuhan Sektoral**

Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar  $5 \pm 0,5\%$  pada Tahun 2024 maka akan ditopang pertumbuhan secara sektoral. Sektor basis ekonomi di Kabupaten Pesawaran terdiri dari Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; dan Industri Pengolahan. Seiring dengan munculnya Pandemi Covid-19 pada akhir Tahun 2019 dan penetapan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak Pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan perkembangan ekonomi khususnya pada sektor basis yang secara umum mengalami pelambatan. Sektor ekonomi non basis yang menunjukkan pertumbuhan cukup baik yakni Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Informasi dan Komunikasi; dan Transportasi dan Pergudangan. Perlunya penetapan kebijakan strategis pada sektor basis dan sektor non basis yang tumbuh cukup baik menjadi perhatian penting dalam mewujudkan target capaian pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024.

Tabel 3.5 Pertumbuhan Sektoral PDRB Riil Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,58	1,19	0,07	-1,27	1,56
2	Pertambangan dan Penggalian	4,23	2,35	-0,03	1,87	-2,84
3	Industri Pengolahan	7,51	5,59	-4,77	6,90	2,20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,58	7,62	7,23	4,49	6,18
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,58	6,48	5,18	8,39	1,20
6	Konstruksi	9,96	9,00	-2,18	1,59	7,57
7	Perdagangan Besar dan Eceran	7,39	8,55	-4,87	5,63	10,52
8	Transportasi dan Pergudangan	6,74	10,46	-4,03	5,25	18,93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,53	17,93	-3,81	0,28	14,51
10	Informasi dan Komunikasi	8,96	8,88	9,05	6,67	5,14
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,04	3,59	2,78	0,91	-1,56
12	Real Estate	5,92	6,51	-2,29	1,32	7,59
13	Jasa Perusahaan	2,12	4,16	-2,15	2,04	14,31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,06	5,11	3,84	2,45	-1,61
15	Jasa Pendidikan	9,49	10,03	3,85	3,32	2,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,88	7,04	9,26	5,12	0,01
17	Jasa Lainnya	7,96	12,78	-11,57	4,28	28,54
	Kabupaten Pesawaran	5,05	5,00	-1,26	2,08	4,55

Sumber: BPS Kabupaten Pesawaran, 2023

**c. Kebutuhan Investasi**

Investasi yang dicerminkan PMTB menunjukkan perkembangan yang stabil dengan rata-rata pertumbuhan 6,52% per tahun selama periode tahun 2015-2019. Namun demikian, dampaknya pada perekonomian cenderung menurun. Hal ini tercermin pada ICOR (*incremental capital output ratio*), yaitu perbandingan antara tambahan kapital dengan tambahan output. Artinya, semakin tinggi ICOR semakin besar kebutuhan kapital untuk menghasilkan output yang sama. Dengan kata lain, semakin tinggi ICOR semakin tidak efisien investasi karena semakin mahal. Pada 2011-2013, ICOR Kabupaten Pesawaran menunjukkan penurunan.

Pada tahun 2011, ICOR Kabupaten Pesawaran sebesar 5,57 dan turun menjadi 4,95 pada 2013. Lalu pada tahun 2014 naik kembali menjadi 5,48 dan terus naik hingga mencapai 6,51 pada 2019. Ini mencerminkan investasi semakin mahal atau semakin tidak efisien. Atau bisa juga dipahami sebagai perubahan pada kegiatan padat modal. Kegiatan padat modal biasanya dicerminkan oleh sektor industri pengolahan. Melihat perkembangan sektor industri pengolahan yang kontribusinya stabil pada kisaran 13-14%, sepertinya belum mengindikasikan adanya industrialisasi yang padat modal.



Perlu ada upaya untuk menekan ICOR sehingga menarik bagi investor karena biaya modal yang tidak semakin mahal. Dengan semakin besar investasi maka akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dengan menciptakan lapangan kerja yang akan menciptakan permintaan barang dan jasa maupun menambah kebutuhan bahan baku yang menciptakan pasar faktor produksi. Perkembangan nilai ICOR Kabupaten Pesawaran tahun 2016-2019 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.6 Perkembangan ICOR Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2019

No	Tahun	ICOR
1	2016	6,14
2	2017	6,25
3	2018	6,34
4	2019	6,51

**d. Kemampuan Mengurangi Kemiskinan**

Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi bukan sekedar mengejar kenaikan PDRB, yang berarti akan menaikkan permintaan dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan. Tapi dengan naiknya PDRB diharapkan kemiskinan akan berkurang dan pengangguran juga berkurang. Capaian riil terakhir kemampuan menurunkan kemiskinan adalah 5.100 orang pada tahun 2022. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,55% maka setiap satu persen pertumbuhan ekonomi akan mampu menurunkan penduduk miskin sebanyak 1.100 orang lebih, kemampuan ini merupakan yang terbesar dibandingkan tahun 2017 dimana satu persen pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 551 orang. Penurunan kemampuan menurunkan jumlah penduduk miskin pada 2021 salah satu faktornya adalah pandemi covid-19 yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -1,26% yang berdampak pada peningkatan penduduk miskin menjadi 68.310 jiwa atau sebesar 15,11%. Dengan asumsi pertumbuhan penduduk 1,13% maka agar terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin maka target penduduk miskin ditetapkan dibawah 12,42%.

**e. Ketenagakerjaan**

Kemampuan perekonomian Kabupaten Pesawaran menyerap pekerja adalah 291 orang setiap 1% pertumbuhan ekonomi atau mampu menyediakan lapangan kerja sebanyak 1.459 orang pada tahun 2019. Dengan pengangguran sebanyak 9.607 orang pada 2019 berarti dibutuhkan 6,58 tahun untuk menyerap semua pengangguran, dengan asumsi tidak ada penambahan karena pertambahan angkatan kerja. Artinya, kapasitas perekonomian menyediakan lapangan kerja diupayakan semakin besar agar pengangguran dapat diatasi.

Sedangkan kondisi menunjukkan kapasitas perekonomian semakin menurun dalam menyerap lapangan kerja. Pada 2018, 1% pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 1.380 pekerja. Ada penurunan yang drastis dari tahun 2018 ke 2019. Kondisi terendah pada 2013 di mana 1% pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap 181 pekerja. Selain kapasitas ekonomi, kondisi ini juga menunjukkan bahwa mobilitas penduduk umur bekerja sangat tinggi, yaitu antara sekolah dan mengurus rumah tangga atau bekerja. Pada saat perekonomian membaik banyak yang memilih menjadi menjadi ibu rumah tangga atau sekolah dan sebaliknya.

Peningkatan kapasitas perekonomian menyediakan lapangan kerja tidak harus mengejar setinggi-tingginya pertumbuhan ekonomi, tapi adalah mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Pertanian dan jasa adalah sektor yang banyak menyerap lapangan kerja. Pada 2022 yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 115.755 orang dan di sektor jasa sebanyak 89.980 orang.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi penduduk miskin maka persoalan ketenagakerjaan perlu mendapat prioritas. Dengan status bekerja, ada sebanyak 41.327 orang adalah pekerja keluarga/tidak dibayar. Dengan demikian



tidak semua yang bekerja mendapat penghasilan. Belum lagi yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau setengah menganggur sehingga pendapatannya pun rendah.

Dengan fokus pada kedua masalah tersebut diharapkan produktivitas pekerja meningkat dan pertumbuhan ekonomi pun meningkat sekaligus menurunkan penduduk miskin. Produktivitas pekerja mencapai Rp 54,9 juta pada 2019, yang meningkat dari Rp 51,87 juta pada 2017 dan Rp 52,65 juta pada 2018.

Sedangkan pengangguran sendiri, lebih difokuskan pada lulusan SMA/SMK yang sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai. Perlu ada upaya sistematis untuk memberikan tambahan keterampilan (skill) dan penumbuhan jiwa kewirausahaan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri atau masuk dalam bursa kerja yang tersedia. Kemandirian juga perlu didorong pada pengangguran yang lulusan diploma/sarjana, karena jumlahnya juga cukup banyak. Sebagai lulusan diploma/sarjana sebenarnya sudah cukup bekal untuk masuk atau menciptakan lapangan kerja.

Kebijakan ekonomi daerah di Kabupaten Pesawaran diarahkan dalam rangka pencapaian daya saing daerah yang tangguh guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Pencapaian daya saing daerah yang tangguh dimaknai sebagai upaya mengurangi kemiskinan melalui pengembangan produk unggulan lokal Kabupaten Pesawaran yang kompetitif, sehingga dapat terbentuk daya saing daerah yang tangguh dan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Pencapaian daya saing daerah yang tangguh difokuskan pada peningkatan aspek kompetitif dari sektor-sektor unggulan yang meliputi pariwisata dan industri kreatif dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk-produk lokal, tenaga kerja, maupun pemasaran ke luar daerah sehingga mampu bersaing di pasar. Hal ini didukung oleh ketersediaan sumber daya alam dan infrastruktur yang memadai serta adanya kawasan peruntukan industri menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Selain itu masyarakat diharapkan tidak hanya sebagai penonton tetapi juga menjadi bagian dari pelaku pasar.

Untuk Tahun 2023, perekonomian Pesawaran akan kembali pulih sejalan dengan pulihnya perekonomian nasional dan Provinsi Lampung dengan keberhasilan percepatan penanganan pasca pandemi covid-19 melalui berbagai langkah pengalokasian APBD yang diprioritaskan pada upaya peningkatan akses kesehatan masyarakat, jaringan pengaman sosial dan pemulihan dampak ekonomi. Meskipun di triwulan awal tahun 2023 beberapa program pembangunan tetap akan berfokus pada pemulihan ekonomi daerah, seiring dengan menguatnya tingkat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha maka Kabupaten Pesawaran akan memberikan ekspektasi positif baik secara regional sumatera maupun nasional sepanjang tahun 2023.

Memahami kondisi tersebut, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2023, dengan berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJMN Tahun 2019-2024) dan Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung (RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024), serta memperhatikan Kondisi dan Arahana Perekonomian Nasional dan Provinsi Lampung, dilaksanakan untuk mendukung Tema Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 yaitu “Mengoptimalkan Pelayanan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Kemandirian Desa dan Pengentasan Kemiskinan” yang diimplementasikan kedalam Prioritas Pembangunan tahun 2023 yaitu:

- 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkinerja tinggi.
- 2) Peningkatan kualitas SDM yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, unggul dan berdaya saing.
- 3) Pemerataan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan dan berkualitas.
- 4) Peningkatan iklim investasi dan berusaha yang kondusif.
- 5) Mewujudkan desa mandiri sebagai titik berat pembangunan berbasis kemasyarakatan dan potensi lokal.

Proyeksi perkembangan indikator ekonomi makro Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.7 Proyeksi Perubahan Indikator Kinerja Makro Tahun 2023

NO	INDIKATOR	RKPD 2023	REALISASI 2022	P-RKPD 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5 ± 0,5	4,55	5 ± 0,5
2	Nilai PDRB ADHB (Miliar)	18.431,25	18.687,39	19.124,59
3	Nilai PDRB ADHK (Miliar)	12.174,16	12.016,34	12.354,33
4	Inflasi (%)	2 ± 0,5	2,13	2 ± 0,5
5	PDRB ADHB per Kapita (Juta Rupiah)	35,72	38,36	38,60
6	PDRB ADHK per Kapita (Juta Rupiah)	23,59	24,67	24,93
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,04	5,06	4,58 – 4,90
8	Penduduk Miskin (%)	13,20	13,85	13,20
9	Indeks Pembangunan Manusia	70,00	66,70	67,42 – 70,00
	Angka Harapan Hidup	73,00	69,44	69,67 – 73,00
	Rata-rata Lama Sekolah	8,50	7,77	7,86 – 8,50
	Harapan Lama Sekolah	13,10	12,61	12,78 – 13,10
	Pengeluaran per Kapita	8.715,00	8.192,00	8.434,00 – 8.715,00
10	Indeks Gini	0,30	0,251	0,251
11	Nilai Tukar Petani (NTP)	103,33	104,34	104,34

3.3 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran telah memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi. Selain hal tersebut diatas, juga berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

- 1) **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah**  
Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan.
- 2) **Disiplin Anggaran**  
Adanya program yang telah disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pada pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) **Keadilan Anggaran**  
Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat.

Untuk itu pemerintah telah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia telah dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, guna kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan juga untuk mengakomodir Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 untuk alokasi DBH, DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Desa; Perubahan alokasi pendapatan transfer Pemerintah Provinsi Lampung pada komponen Dana Bagi Hasil Pajak Rokok; Perubahan proyeksi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP; Perubahan proyeksi Belanja Daerah untuk menyesuaikan kebutuhan belanja untuk PBI Non BPJS dan penyesuaian besaran alokasi dana transfer ke daerah; Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Hutang yang Jatuh Tempo sesuai akta perjanjian pinjaman Daerah Nomor 11 Tahun 2022; serta penyesuaian terhadap asumsi saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (Silpa) pada Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022.

### 3.3.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya dan pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, untuk itu maka dapat dirumuskan arah kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2023 meliputi :

#### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penganggaran Pajak daerah dan Retribusi daerah :
  - a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
  - b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Pemerintah Kabupaten Pesawaran serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
  - c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah akan melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.  
Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah Kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.
- f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- j) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- k) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan



Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- l) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - m) Proyeksi perubahan Pajak Daerah direncanakan mengalami peningkatan dari pagu APBD 2023 sebesar Rp73.522.000.000,00 menjadi Rp74.222.000.000,00 atau meningkat sebesar Rp700.000.000,00. Selanjutnya proyeksi perubahan Retribusi Daerah direncanakan juga mengalami peningkatan dari pagu APBD 2023 sebesar Rp6.973.607.500,00 menjadi Rp7.169.607.500,00 atau meningkat sebesar Rp196.000.000,00.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
  - b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
  - d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
  - e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; Sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
  - f) Proyeksi perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan direncanakan tetap sesuai pagu APBD 2023 sebesar Rp4.457.888.271,00.
- 3) Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah :
- a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi :
    - (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
    - (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
    - (3) hasil kerja sama daerah;
    - (4) jasa giro;
    - (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
    - (6) pendapatan bunga;
    - (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
    - (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
    - (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
    - (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
    - (11) pendapatan denda pajak daerah;
    - (12) Pendapatan denda retribusi daerah;

- (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - (14) pendapatan dari pengembalian;
  - (15) pendapatan dari BLUD; dan
  - (16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah akan mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
  - c) Proyeksi perubahan Lain-lain PAD Yang Sah direncanakan mengalami peningkatan dari pagu APBD 2023 sebesar Rp83.739.826.845,00 menjadi Rp85.579.826.845,00 atau meningkat sebesar Rp1.840.000.000,00.

## 2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Intentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa sedangkan Transfer Antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan/Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

### 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) :

- a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah akan menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah akan menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang



tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBHSDA Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah akan menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- d) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah akan menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- e) Proyeksi perubahan Dana Bagi Hasil direncanakan tetap sesuai pagu APBD 2023 sebesar Rp19.000.111.912,00.

- 2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) :

DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya proyeksi perubahan Dana Alokasi Umum direncanakan tetap sesuai pagu APBD 2023 sebesar Rp634.676.295.000,00.

- 3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) :

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal

Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023. Selanjutnya proyeksi perubahan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik direncanakan tetap sesuai pagu APBD 2023 masing-masing sebesar Rp58.042.740.000,00 dan Rp191.411.028.000,00.

- 4) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) :  
Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah akan menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.
- 5) Penganggaran Dana Desa (DD) :  
Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah akan menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya proyeksi perubahan Dana Desa direncanakan tetap sesuai pagu APBD 2023 sebesar Rp137.428.595.000,00.
- 6) Penganggaran Pendapatan Bagi Hasil:  
Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan

pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya proyeksi perubahan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi direncanakan tetap sesuai pagu APBD 2023 sebesar Rp93.777.517.494,00.

7) Penganggaran Pendapatan Bantuan Keuangan :

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah akan menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah akan menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

### 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan. Selanjutnya proyeksi perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan tetap sesuai pagu APBD 2023 sebesar Rp967.670.000,00.

2) Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek

pendapatan Dana Darurat. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah akan menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Bonus Produksi Pengusahaan Panas Bumi

Sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah, jenis bonus produksi dari pengusahaan panas bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.

4) Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota akan menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2022 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer, diperhitungkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD. Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2023 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2023 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota, agar diperhitungkan pada APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesawaran maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Melakukan sinergi dengan pemerintah desa dalam rangka pemungutan pajak daerah melalui Layanan Mobil Keliling Pajak;
3. Pendayagunaan Aset Daerah;
4. Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD;
5. Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.

Adapun hasil analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020-2023 tercantum dalam tabel dibawah ini.



Tabel 3.8 Realisasi Pendapatan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020–2023 (Rupiah)

Kode Rekening					Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi Triwulan II APBD 2023 (Rp)
4					<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,275,131,350,807.13</b>	<b>1.236.502.482.314,95</b>	<b>1.222.558.571.198,16</b>	<b>417.072.354.029,99</b>
4	1				<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>72,158,809,476.04</b>	<b>81.674.500.723,95</b>	<b>82.092.045.212,16</b>	<b>21.630.677.038,98</b>
4	1	1			Pajak Daerah	29,123,833,409.50	28.179.870.661,00	36.760.093.377,24	10.919.889.042,36
4	1	2			Retribusi Daerah	12,192,774,802.00	16.745.519.738,00	3.054.372.585,00	1.624.542.690,40
4	1	3			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,602,625,700.69	1.798.157.126,62	1.768.545.375,60	1.998.524.639,60
4	1	4			Lain-lain PAD yang Sah	29,239,575,563.85	34.950.953.198,33	40.509.033.874,32	7.087.720.666,63
4	2				<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,145,114,014,858.09</b>	<b>1.082.462.221.860,00</b>	<b>1.128.935.236.714,00</b>	<b>395.311.117.991,00</b>
4	2	1			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,075,496,437,363.00	1.017.457.193.625,00	1.048.614.556.005,00	365.910.162.537,00
4	2	1	1		Dana Perimbangan	859,551,873,363.00	860.849.797.625,00	897.709.336.405,00	352.108.736.037,00
4	2	1	1	1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	20,445,904,872.00	27.606.372.430,00	34.857.954.275,00	7.245.250.407,00
4	2	1	1	2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	619,834,916,000.00	611.838.446.000,00	609.487.647.000,00	273.460.085.000,00
4	2	1	1	3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	92,551,592,843.00	95.476.065.575,00	85.688.689.759,00	0,00
4	2	1	1	4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	126,719,459,648.00	125.928.913.620,00	167.675.045.371,00	71.403.400.630,00
4	2	1	2		Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	1	3		Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	1	4		Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	1	5		Dana Tambahan Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	1	6		Dana Desa	155,789,561,000.00	156.607.396.000,00	150.905.219.600,00	13.801.426.500,00
4	2	2			Pendapatan Transfer Antar Daerah	69,617,577,495.09	65.005.028.235,00	80.320.680.709,00	29.400.955.454,00
4	2	2	1		Pendapatan Bagi Hasil	69,617,577,495.09	65.005.028.235,00	80.320.680.709,00	29.400.955.454,00

Kode Rekening					Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi Triwulan II APBD 2023 (Rp)
4	2	2	2		Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3				<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>57,858,526,473.00</b>	<b>72.365.759.731,00</b>	<b>11.531.289.272,00</b>	<b>130.559.000,00</b>
4	3	1			Pendapatan Hibah	1,536,766,473.00	16.594.484.477,00	11.417.430.872,00	130.559.000,00
4	3	2			Dana Darurat	0.00	0,00	0,00	0,00
4	3	3			Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	56,321,760,000.00	55.771.275.254,00	113.858.400,00	0,00

Sumber: Hasil Analisis, 2023 sesuai dengan tabel T-C.19 Permendagri 86 Tahun 2017

Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 (Rupiah)

Kode Rekening					Uraian	APBD 2023 (Rp)	Realisasi Triwulan II APBD 2023 (Rp)	Proyeksi P-APBD 2023 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) Rp
4					<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.304.842.516.841,00</b>	<b>417.072.354.029,99</b>	<b>1.307.578.516.841,00</b>	<b>2.736.000.000,00</b>
4	1				<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>168.693.322.616,00</b>	<b>21.630.677.038,98</b>	<b>171.429.322.616,00</b>	<b>2.736.000.000,00</b>
4	1	1			Pajak Daerah	73.522.000.000,00	10.919.889.042,36	74.222.000.000,00	700.000.000,00
4	1	2			Retribusi Daerah	6.973.607.500,00	1.624.542.690,40	7.169.607.500,00	196.000.000,00
4	1	3			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.457.888.271,00	1.998.524.639,60	4.457.888.271,00	0,00
4	1	4			Lain-lain PAD yang Sah	83.739.826.845,00	7.087.720.666,63	85.579.826.845,00	1.840.000.000,00
4	2				<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.134.336.287.406,00</b>	<b>395.311.117.991,00</b>	<b>1.134.336.287.406,00</b>	<b>0,00</b>
4	2	1			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.040.558.769.912,00	365.910.162.537,00	1.040.558.769.912,00	0,00
4	2	1	1		Dana Perimbangan	903.130.174.912,00	352.108.736.037,00	903.130.174.912,00	0,00
4	2	1	1	1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	19.000.111.912,00	7.245.250.407,00	19.000.111.912,00	0,00
4	2	1	1	2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	634.676.295.000,00	273.460.085.000,00	634.676.295.000,00	0,00



Kode Rekening					Uraian	APBD 2023 (Rp)	Realisasi Triwulan II APBD 2023 (Rp)	Proyeksi P-APBD 2023 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) Rp
4	2	1	1	3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	58.042.740.000,00	0,00	58.042.740.000,00	0,00
4	2	1	1	4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	191.411.028.000,00	71.403.400.630,00	191.411.028.000,00	0,00
4	2	1	2		Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	1	3		Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	1	4		Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	1	5		Dana Tambahan Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	1	6		Dana Desa	137.428.595.000,00	13.801.426.500,00	137.428.595.000,00	0,00
4	2	2			Pendapatan Transfer Antar Daerah	93.777.517.494,00	29.400.955.454,00	93.777.517.494,00	0,00
4	2	2	1		Pendapatan Bagi Hasil	93.777.517.494,00	29.400.955.454,00	93.777.517.494,00	0,00
4	2	2	2		Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3				<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1.812.906.819,00</b>	<b>130.559.000,00</b>	<b>1.812.906.819,00</b>	<b>0,00</b>
4	3	1			Pendapatan Hibah	967.670.000,00	130.559.000,00	967.670.000,00	0,00
4	3	2			Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	3			Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	845.236.819,00	0,00	845.236.819,00	0,00

Sumber: Hasil Analisis, 2023 sesuai dengan tabel T-C.20 Permendagri 86 Tahun 2017

### 3.3.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

1. Belanja Operasi
  - a) Belanja Pegawai;
  - b) Belanja Barang dan Jasa;
  - c) Belanja Bunga;
  - d) Belanja Subsidi;
  - e) Belanja Hibah; dan
  - f) Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
  - a) Belanja Tanah;
  - b) Belanja Peralatan dan Mesin;
  - c) Belanja Bangunan dan Gedung;
  - d) Belanja Jalan;
  - e) Belanja Irigasi dan Jaringan;
  - f) Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
  - a) Belanja Bagi Hasil;
  - b) Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga diharapkan dapat mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penggunaan APBD akan lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2024.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.  
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- 7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - 8) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsure perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
  - 9) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
  - 10) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).6), sedangkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).7).
  - 11) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN.
  - 12) Proyeksi perubahan Belanja Pegawai direncanakan mengalami penurunan dari pagu APBD 2023 sebesar Rp508.852.019.308,00 menjadi Rp505.888.692.823,34 atau menurun sebesar Rp2.963.326.484,66.
- b) Belanja Bunga
- Pemerintah Daerah menganggarkan belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya proyeksi perubahan Belanja Bunga direncanakan tetap sesuai pagu APBD 2023 sebesar Rp6.500.000.000,00.
- c) Belanja Subsidi
- Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya

diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas.

Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, perusahaan/lembaga penerima subsidi telah terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Audit tersebut dilakukan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit dimaksud merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tariff yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, Pemerintah Daerah akan menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

d) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

1) Belanja hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang



Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Adapun proyeksi perubahan Belanja Hibah direncanakan tetap sesuai pagu APBD 2023 sebesar Rp15.755.784.000,00.

- 2) **Belanja Bantuan Sosial**  
Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proyeksi perubahan Belanja Bantuan Sosial direncanakan tetap sesuai pagu APBD 2023 sebesar Rp231.000.000,00.
- e) **Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah**
  - 1) Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 pada akhir tahun anggaran yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada proyeksi perubahan Belanja Bagi Hasil direncanakan tetap sesuai pagu APBD 2023 sebesar Rp8.779.678.662,00.
  - 2) Selanjutnya, untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa akan diuraikan ke dalam daftar pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- f) **Belanja Bantuan Keuangan**
  - 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan akan diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan. Dalam proyeksi perubahan Belanja Bantuan Keuangan direncanakan tetap sesuai pagu APBD 2023 sebesar Rp211.222.940.157,00.

- 3) Pemerintah kabupaten/kota akan mengalokasikan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengalokasikan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut akan diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut akan diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- 3) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
- g) **Belanja Tidak Terduga**  
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan. Pada proyeksi perubahan Belanja Tidak Terduga direncanakan tetap sesuai pagu APBD 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00.  
Keadaan darurat tersebut, meliputi:
- 1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - 2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
  - 3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- Keperluan mendesak tersebut, meliputi:
- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- h) **Belanja Barang dan Jasa**  
Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pada proyeksi perubahan Belanja Barang dan Jasa direncanakan mengalami penurunan dari pagu APBD 2023 sebesar Rp371.605.180.037,00 menjadi Rp369.532.702.994,13 atau menurun sebesar Rp2.072.477.042,87. Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
  - 3) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
  - 4) Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 5) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 6) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 7) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
  - a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- 8) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- 9) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing OPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- 10) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.  
Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- 11) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 12) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 13) Penganggaran belanja perjalanan dinas akan memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
  - b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
  - d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarnya dirasionalkan sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
- 14) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
  - a) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
  - b) Pimpinan dan anggota DPRD; serta
  - c) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara



serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

- 15) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
- 16) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

i) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah akan memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.  
Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Aktual.
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 4) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-PD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi

Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

- 5) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- 6) Proyeksi perubahan Belanja Modal direncanakan mengalami penurunan dari pagu APBD 2023 sebesar Rp201.495.914.677,00 menjadi Rp199.117.292.238,53 atau menurun sebesar Rp2.378.622.438,47).

Adapun realisasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020-2023 tercantum dalam tabel dibawah ini.



Tabel 3.10 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020-2023 (Rupiah)

Kode Rekening				Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi TW II 2023 (Rp)
5				<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.274.376.606.860,42</b>	<b>1.230.497.757.291,40</b>	<b>1.263.091.522.281,00</b>	<b>369.683.423.987,00</b>
5	1			<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>852.097.047.556,82</b>	<b>864.624.390.945,40</b>	<b>859.904.544.352,00</b>	<b>306.980.522.298,00</b>
5	1	1		Belanja Pegawai	544.189.807.606,00	506.591.834.990,00	486.337.458.781,00	202.438.489.486,00
5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	247.296.169.950,82	326.556.786.705,40	350.024.502.809,00	101.776.615.818,00
5	1	3		Belanja Bunga	0,00	0,00	61.216.762,00	1.554.316.994,00
5	1	4		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	5		Belanja Hibah	60.611.070.000,00	11.840.534.000,00	20.262.276.000,00	1.211.100.000,00
5	1	6		Belanja Bantuan Sosial	0,00	19.635.235.250,00	3.219.090.000,00	0,00
5	2			<b>BELANJA MODAL</b>	<b>174.099.729.788,60</b>	<b>138.736.595.739,00</b>	<b>176.775.764.265,00</b>	<b>38.020.360.869,00</b>
5	3			<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>24.024.466.415,00</b>	<b>3.661.687.700,00</b>	<b>291.360.000,00</b>	<b>463.375.000,00</b>
5	4			<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>224.155.363.100,00</b>	<b>223.475.082.907,00</b>	<b>226.119.853.664,00</b>	<b>24.219.165.820,00</b>
5	4	1		Belanja Bagi Hasil	224.155.363.100,00	3.162.486.908,00	2.945.000.000,00	0,00
5	4	2		Belanja Bantuan Keuangan	0,00	220.312.595.999,00	223.174.853.664,00	24.219.165.820,00

Sumber: Hasil Analisis, 2023 sesuai dengan tabel T-C.21 Permendagri 86 Tahun 2017 yang dimutakhirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 (Rupiah)

Kode Rekening				Uraian	APBD 2023 (Rp)	Realisasi TW II 2023 (Rp)	Proyeksi P-APBD 2023 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) Rp
5				<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.329.442.516.841,00</b>	<b>369.683.423.987,00</b>	<b>1.322.028.090.875,00</b>	<b>(7.414.425.966,00)</b>
5	1			<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>902.943.983.345,00</b>	<b>306.980.522.298,00</b>	<b>897.908.179.817,47</b>	<b>(5.035.803.527,53)</b>
5	1	1		Belanja Pegawai	508.852.019.308,00	202.438.489.486,00	505.888.692.823,34	(2.963.326.484,66)

Kode Rekening				Uraian	APBD 2023 (Rp)	Realisasi TW II 2023 (Rp)	Proyeksi P-APBD 2023 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) Rp
5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	371.605.180.037,00	101.776.615.818,00	369.532.702.994,13	(2.072.477.042,87)
5	1	3		Belanja Bunga	6.500.000.000,00	1.554.316.994,00	6.500.000.000,00	0,00
5	1	4		Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	5		Belanja Hibah	15.755.784.000,00	1.211.100.000,00	15.755.784.000,00	0,00
5	1	6		Belanja Bantuan Sosial	231.000.000,00	0,00	231.000.000,00	0,00
5	2			<b>BELANJA MODAL</b>	<b>201.495.914.677,00</b>	<b>38.020.360.869,00</b>	<b>199.117.292.238,53</b>	<b>(2.378.622.438,47)</b>
5	3			<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>463.375.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
5	4			<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>220.002.618.819,00</b>	<b>24.219.165.820,00</b>	<b>220.002.618.819,00</b>	<b>0,00</b>
5	4	1		Belanja Bagi Hasil	8.779.678.662,00	0,00	8.779.678.662,00	0,00
5	4	2		Belanja Bantuan Keuangan	211.222.940.157,00	24.219.165.820,00	211.222.940.157,00	0,00

Sumber: Hasil Analisis, 2023 sesuai dengan tabel T-C.21 Permendagri 86 Tahun 2017 yang dimutakhirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

### 3.3.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2022, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 diarahkan sebagai berikut:

#### 1) Penerimaan Pembiayaan

- a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:
  - Pelampauan penerimaan PAD;
  - Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
  - Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
  - Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
  - Penghematan belanja;
  - Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
  - Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Selanjutnya proyeksi perubahan SiLPA mengalami penurunan sesuai dengan hasil audit BPK RI dari pagu APBD 2023 sebesar Rp19.000.000.000,00 menjadi Rp8.163.766.434,97 atau menurun sebesar Rp10.836.233.565,03.
- b) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- c) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- d) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Pinjaman daerah dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan:
  - Persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
  - Salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
  - Kerangka acuan kegiatan;
  - RPJMD;
  - RKPD;
  - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
  - APBD tahun anggaran berjalan;
  - Rancangan Perda tentang APBD tahun berkenaan;

- Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
  - Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
  - Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
  - Perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
- Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
- Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan:
- Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
  - Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
  - Memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
- e) Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - g) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - h) Selanjutnya proyeksi perubahan Penerimaan Pinjaman Daerah mengalami peningkatan dari semula sesuai pagu APBD 2023 sebesar Rp42.800.000.000,00 menjadi Rp43.485.807.600,00 atau meningkat sebesar Rp685.807.600,00.

## **2) Pengeluaran Pembiayaan**

- a) Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah akan dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. Selanjutnya proyeksi perubahan Pembayaran Cicilan Pokok Hutang direncanakan tetap sesuai pagu APBD 2023 sebesar Rp37.200.000.000,00.
- b) Pemerintah Daerah menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, penyusunan analisis investasi yang dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- c) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.
- d) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD guna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah.
- e) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- f) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan

penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

- g) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- h) Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **3) Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan**

- a) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan untuk Perubahan RKPD 2023 bersaldo nol.
- b) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan Perubahan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah akan memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan perubahan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Secara rinci, data historis realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2020-2023 disajikan dalam Tabel dibawah ini.



Tabel 3.12 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020-2023 (Rupiah)

Kode Rekening					Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi TW II APBD 2023 (Rp)
6	1				<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>13.307.629.410,34</b>	<b>9.948.919.697,05</b>	<b>49.696.717.517,81</b>	<b>9.469.688.400,00</b>
6	1	1			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13.307.629.410,34	9.948.919.697,05	14.981.874.117,81	0,00
6	1	2			Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	3			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	4			Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	34.714.843.400,00	9.469.688.400,00
6	1	5			Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	6			Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Ketentuan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2				<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.602.625.700,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>4.208.050.648,00</b>
6	2	1			Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	2			Penyertaan Modal Daerah	2.602.625.700,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
6	2	2	1		Penyertaan Modal Daerah BUMN	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	2	2		Penyertaan Modal Daerah BUMD	2.602.625.700,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
6	2	3			Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	4.208.050.648,00
6	2	4			Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	5			Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Hasil Analisis, 2023 seusai dengan tabel T-C.22 Permendagri 86 Tahun 2017

Tabel 3.13 Realisasi dan Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 (Rupiah)

Kode Rekening				Uraian	Perda APBD 2023 (Rp)	Realisasi TW II APBD 2023 (Rp)	Proyeksi P-APBD 2023 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) Rp
<b>6</b>	<b>1</b>			<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>61.800.000.000,00</b>	<b>9.469.688.400,00</b>	<b>51.649.574.034,97</b>	<b>(10.150.425.965,03)</b>
6	1	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.000.000.000,00	0,00	8.163.766.434,97	(10.836.233.565,03)
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	4		Penerimaan Pinjaman Daerah	42.800.000.000,00	9.469.688.400,00	43.485.807.600,00	685.807.600,00
6	1	5		Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	6		Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Ketentuan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>2</b>			<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>37.200.000.000,00</b>	<b>4.208.050.648,00</b>	<b>37.200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	2		Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	2	1	Penyertaan Modal Daerah BUMN	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	2	2	Penyertaan Modal Daerah BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	3		Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	37.200.000.000,00	4.208.050.648,00	37.200.000.000,00	0,00
6	2	4		Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	5		Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Hasil Analisis, 2023 sesuai dengan tabel T-C.22 Permendagri 86 Tahun 2017

## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 bahwa RKPD Tahun 2023 bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang berpedoman pada RPJPD Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021–2026 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dokumen perencanaan Kabupaten Pesawaran menekankan pada pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan urusan unggulan serta penguatan sektor pertanian dan pariwisata menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Pesawaran.

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan hasil analisa terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Pesawaran Semester I Tahun 2023, capaian kinerja yang direncanakan tahun 2023 yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026, identifikasi isu strategis, permasalahan strategis di tingkat Provinsi Lampung dan Nasional, dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Selain itu, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya juga memperhatikan apa yang diusulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun 2023. Disisi yang lain, penyusunan prioritas dan sasaran dalam RKPD Tahun 2023 juga memperhatikan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perpaduan dari berbagai tinjauan tersebut selanjutnya dituangkan menjadi prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan-RKPD) Tahun 2023 juga disebabkan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.17/2021 tentang Pengelolaan TKDD dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penggunaan DAU dan DBH dalam rangka mendukung Vaksinasi Covid-19; Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke daerah dan dana desa untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/923/KEUDA hal Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik DAK Non Fisik untuk Kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID; Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/1351/KEUDA hal Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sanitasi, dan Lingkungan Hidup serta DAK Non Fisik Jenis Data Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/1622/KEUDA hal Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Non Fisik Jenis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dan DAK Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, serta menindaklanjuti amanat dan regulasi lainnya, maka Pemerintah Kabupaten Pesawaran perlu mengambil Langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi dalam rangka percepatan penanganan pasca pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pesawaran dengan melakukan perubahan asumsi prioritas pembangunan Daerah,

kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2023.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN DAERAH

Visi dan misi, tujuan, dan sasaran merupakan rangkaian upaya dalam merealisasikan visi dan misi menjadi program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, merealisasikan hal yang abstrak menjadi konkret. Visi dan misi bermaksud untuk memberi gambaran besar mengenai keadaan yang ingin diwujudkan dari/melalui pembangunan daerah, secara rinci dituangkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Visi: “PESAWARAN LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN MASYARAKAT YANG PRODUKTIF”				
No	Misi	Tujuan	Indikator Sasaran	Target 2023
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi	Terwujudnya pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih, dan melayani	Predikat Sakip	65,00 (B)
			Indeks SPBE	2,41
			Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	2,81 / 70,25
			Opini BPK-RI	WTP
			Indeks Kepuasan Masyarakat	3,4
2	Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata	Terwujudnya Akses dan Konektivitas antar wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata.	Tingkat aksesibilitas antar wilayah dan sektor strategis	69,22%
			Indeks infrastruktur dasar	86,70%
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,13
3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing	Terwujudnya kualitas dan akses pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang unggul dan berdaya saing	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,86 – 8,50
			Angka Harapan Lama Sekolah	12,78 – 13,10
			Angka harapan hidup	69,67 – 73,00
			Pengeluaran per Kapita (dalam Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	8.434,00 – 8.715,00
4	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan memperkuat Perekonomian Daerah	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas	Nilai PDRB	12.354,33
			Persentase angka kemiskinan	13,20
			Tingkat pengangguran terbuka	4,58 – 4,90
			Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	261.623,78
5	Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika	Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Persentase Desa Maju dan Mandiri	15,97%

4.1.1 Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Pesawaran

Pendekatan spasial dilakukan untuk menentukan lokus pembangunan yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesawaran

untuk memaksimalkan hasil pembangunan. Dalam Penataan Ruang dikenal kawasan strategis, yaitu suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting bagi perkembangan wilayah dalam aspek ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan, teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Kebijakan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi Lampung di Kabupaten Pesawaran, sebagai berikut:

1. Kawasan Strategis Nasional

Kawasan strategis Nasional berupa kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan Komando Armada RI Kawasan Barat (KOARMABAR).

2. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis Provinsi meliputi:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan sekitarnya; dan
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman.

3. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

Gambar 4.1 Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Pesawaran



1) Kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan ekonomi Kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan ekonomi meliputi:

a. Kawasan Industri Tegineneng

Kawasan Industri Tegineneng yang merupakan salah satu kawasan industri untuk mendukung Metropolitan Bandar Lampung, lokasinya sangat strategis yaitu di penghujung rencana jalan bebas hambatan (jalan tol) Terbanggi Besar- Pematang Panggang, dimana salah satu pintu keluar tol tersebut berada di Tegineneng. Selain itu juga terdapat dilintasi oleh jalan kereta api yang menghubungkan beberapa kota di Provinsi Lampung.

Gambar 4.2 Rencana Tahapan Pengembangan Kawasan Industri Tegineneng





- b. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Punduh Pidada  
Kawasan Minapolitan; berbeda dengan kawasan agropolitan, kawasan minapolitan yaitu suatu konsep kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi. Dengan panjang garis pantai  $\pm$  160 km yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Selain itu juga terdapat beberapa sungai dan berair sepanjang tahun (antara lain; Sungai danlainnya) dimana sungai-sungai tersebut dapat dikembangkan sebagai areal perikanan darat. Kawasan minapolitan di Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Marga Punduh dan Kecamatan Punduh Pedada.
- c. Kawasan Agropolitan Gedong Tataan  
Kawasan Agropolitan di Kecamatan Gedongtataan adalah sebagai kawasan terpadu pertanian lahan basah dan lahan kering, yang ditetapkan sebagai lokasi ketahanan pangan di Provinsi Lampung. Berdasarkan kajian tipologi desa dalam kawasan agropolitan serta penentuan jenis komoditas unggulan, maka daerah pengembangan agribisnis adalah sebagai berikut;
  1. Daerah Pengembangan Agribisnis (DPA) sebagai desa penghasil bahan baku berbasis tanaman perkebunan terutama tanaman kakao di Desa Way layap, Sungai Langka, Negeri sakti, Sukadadi, Kurungan Nyawa, Bogorejo, Pampangan, Cipadang, Padang ratu dan Taman Sari.
  2. DPA untuk bahan baku berbasis tanaman pangan dan hortikultura terutama tanaman padi, jagung, pisang, tomat dan jahe, berlokasi di Desa Padang ratu, Karang Anyar, Kutoarjo, Way Layap, Bogorejo dan Taman Sari.
  3. DPA untuk penghasil bahan baku berbasis peternakan terutama kambing, di Desa Sungai Langka, Bernung, Bogorejo dan Kebagusan.
- d. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah  
kawasan strategis pariwisata daerah, meliputi:
  1. KSPD Teluk Pandan dan Marina Teluk Ratai;
  2. KSPD Pulau Pahawang dan Pulau-Pulau Sekitarnya;
  3. KSPD Padang Cermin, Way Ratai dan sekitarnya;
  4. KSPD Marga Punduh, Punduh Pidada dan sekitarnya;
  5. KSPD Gedong Tataan, Negeri Katon dan sekitarnya;dan
  6. KSPD Way Lima, Kedondong dan sekitarnya.
- e. Kawasan Perkotaan Gedong Tataan  
Kawasan perkotaan Gedongtataan merupakan salah satu kota yang dipromosikan oleh Provinsi Lampung sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa regional serta fungsi lainnya. Lokasinya yang strategis di lintas Barat Pulau Sumatera menyebabkan Kota Gedongtataan akan berkembang pada masa mendatang.
- f. Kawasan energi panas bumi di Kecamatan Padang Cermin, dan Kecamatan Way Ratai.
- g. Kawasan ekonomi khusus (KEK) Pariwisata Teluk Pandan.

Gambar 4.3 Peta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Teluk Pandan

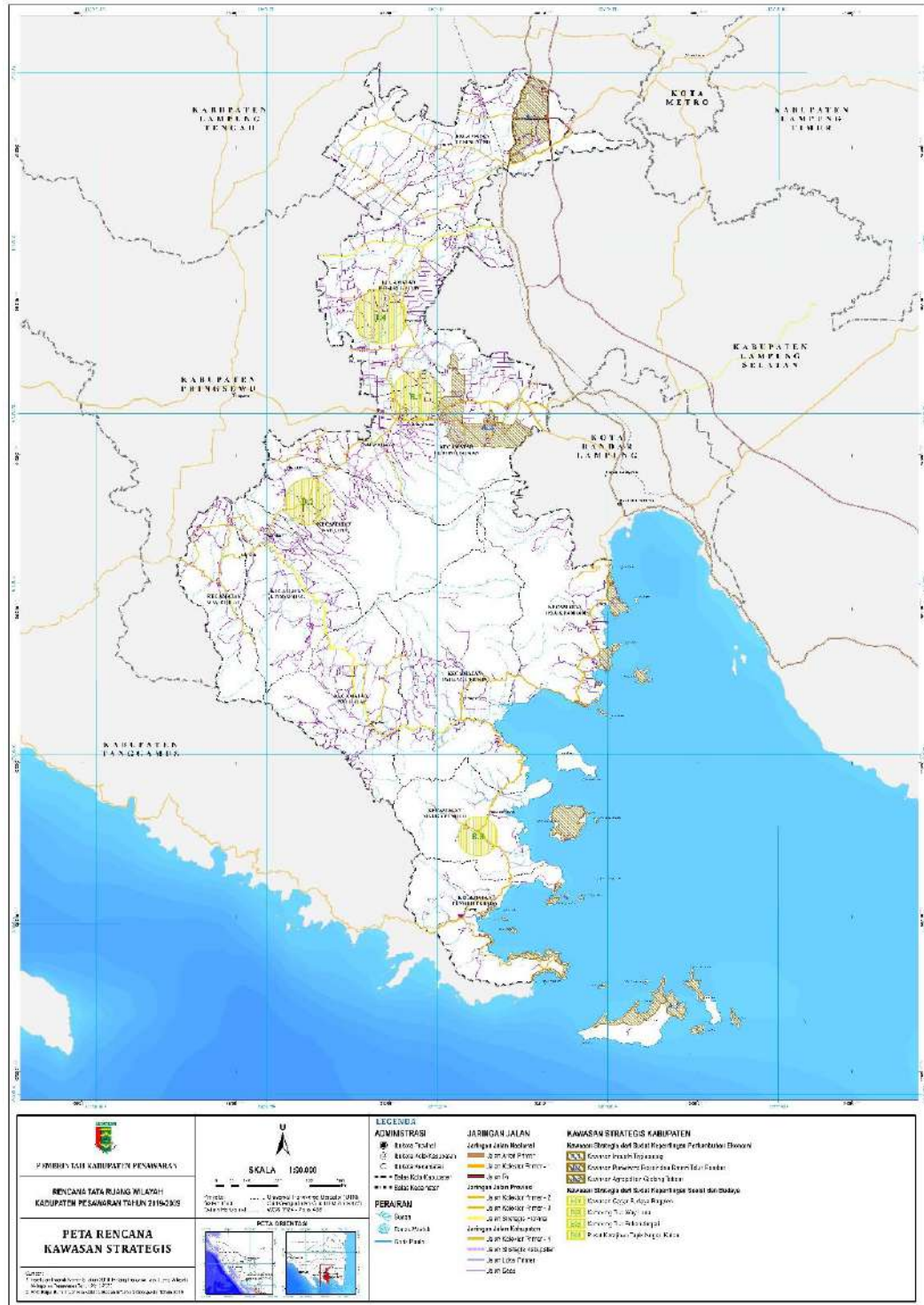




- 2) Kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan sosial budaya

Kawasan strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan sosial budaya meliputi kawasan cagar budaya Bagelen, Kampung Tua Way Lima, Kampung Tua Pekon Ampai dan Pusat Kerajinan Tapis Negeri Katon. Kawasan Bagelen terletak di pusat Kota Gedongtataan merupakan lokasi pertama ditempatkan transmigrasi di tanah air. Dengan dibangunnya Musium Transmigrasi di Bagelen membuat kawasan ini mempunyai nilai yang tinggi sebagai kawasan bersejarah. Artinya bahwa kelestarian dari kawasan ini penting untuk dilakukan, sebagai daerah tujuan wisata bukan hanya mengunjungi musium saja tetapi juga dapat melihat situasi dari Kawasan Begelen secara keseluruhan.

Gambar 4.4 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Pesawaran



Rencana pengembangan desa wisata kabupaten meliputi:

- 50 Desa Wisata
- 16 Desa Wisata Event
- 25 Desa Wisata Unggulan

Gambar 4.5 Peta Rencana Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Pesawaran



## 4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

### 4.2.1 Prioritas dan Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2023

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan Prioritas Nasional Tahun 2023, yaitu :

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.  
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :
  - a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
  - b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisheery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.  
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :
  - a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
  - b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
  - c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
  - d) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
  - e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.  
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
  - a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
  - c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;

- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - f) Pengentasan kemiskinan; dan
  - g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
- Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada :
- a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
  - b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
  - c) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
  - b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
  - c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
  - d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
  - e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
- Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :
- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
  - b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
  - c) Pembangunan Rendah Karbon.
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
- Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :
- a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
  - b) Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
  - c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola
  - d) keamanan siber;
  - e) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
  - f) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Luar negeri.

Adapun, sasaran makro pembangunan nasional Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Sasaran Makro RKP 2023

No.	Indikator	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,9
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,3-6,0
3	Rasio Gini (Indeks)	0,375-0,378
4	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) *menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement)	27,02
5	Nilai Tukar Petani/NTP	103-105



No.	Indikator	Target 2023
6	Nilai Tukar Nelayan/NTN	105-107
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,29-73,35
8	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5-8,5

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023

Pemerintah Provinsi Lampung telah pula menetapkan prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 yang bertema “Penguatan Ekonomi yang Inklusif untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah” dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan;
- 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 3. Pembangunan infrastruktur;
- 4. Reformasi birokrasi;
- 5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya;
- 6. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan bauran hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan perekonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah dan sinergi pembangunan antara daerah dan nasional; Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 di arahkan pada:

Tabel 4.3 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023

No	Indikator	Tahun 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5-4,5
2	Inflasi (%)	3±1
3	PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	43-44
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0-4,3
5	Tingkat Kemiskinan (%)	11,4-11,9
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,3-70,6
7	Indeks Gini	0,302-0,319
8	Nilai Tukar Petani	104-105
9	Pertumbuhan PAD (%)	4,74
10	Kemantapan Jalan Provinsi (%)	77
11	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	7.066

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

A. Dasar Perumusan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 bahwa RKPD Tahun 2023 bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang berpedoman pada RPJPD Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2020–2024, Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021–2026 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 disusun sebagai rangkaian perencanaan yang bersifat *holistik, integratif, tematik, dan spasial*. Holistik integratif diimplementasikan melalui keterkaitan OPD sebagai suatu sistem dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk melaksanakan prioritas pembangunan, termasuk dalam hal Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 sesuai dengan arahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, menjadi dasar dalam perumusan tema dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2023. Adapun skenario dalam percepatan penanganan Covid-19, apabila Covid-19 masih berlanjut hingga 2023 maka yang akan dilakukan adalah melanjutkan dan memprioritaskan program dan kegiatan pada penanganan Covid-19 dengan Fokus *Kesehatan; Dampak ekonomi; dan Penyediaan jaring pengaman sosial*, serta Program-program mendesak lainnya di daerah, dan dukungan terhadap program strategis nasional. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- Pertama*, melakukan peningkatan pelayanan sistem pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata akibat dampak pandemi Covid-19.
- Kedua*, melakukan percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata sebagai salah satu fokus pembangunan paska pandemi Covid-19, serta melakukan pengembangan wilayah ekonomi sesuai tata ruang dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- Ketiga*, melakukan peningkatan perekonomian Pesawaran yang kreatif dan berdaya saing paska dampak pandemi Covid-19.
- Keempat*, melakukan tata Kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkinerja tinggi.
- Kelima*, melakukan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa paska dampak pandemi Covid-19.

Dengan memperhatikan kondisi dan arahan serta rangkaian perencanaan yang bersifat *holistik, integratif, tematik, dan spasial*, maka Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 adalah:

**“Mengoptimalkan Pelayanan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Kemandirian Desa dan Pengentasan Kemiskinan”**

Tabel 4.4 Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pesawaran

TEMA PEMBANGUNAN 2023		
NASIONAL	PROVINSI LAMPUNG	KABUPATEN PESAWARAN
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Ekonomi yang Inklusif untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Mengoptimalkan Pelayanan Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Kemandirian Desa dan Pengentasan Kemiskinan

- Arah kebijakan Makro Kabupaten Pesawaran Tahun 2023, dalam rangka:
- Mengoptimalkan Pelayanan Publik yang Berkualitas**
- a) Meningkatkan perencanaan pembangunan yang efektif, akuntabel, bersih, dan melayani;
  - b) Meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara;
  - c) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan akurat;

d) Mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi dan terpadu.

**Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan**

- a) Meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas wilayah sektor ekonomi strategis agribisnis, industri dan pariwisata;
- b) Meningkatkan kemudahan berusaha dan investasi daerah;
- c) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja;
- d) Pemulihan ekonomi mikro.

**Mewujudkan Kemandirian Desa dan Pengentasan Kemiskinan**

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata;
- b) Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas Pemerintahan Desa;
- c) Meningkatkan kemandirian masyarakat desa;
- d) Pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah

Tabel 4.5 Sasaran Makro Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

NO	INDIKATOR	RKPD 2023	REALISASI 2022	P-RKPD 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5 ± 0,5	4,55	5 ± 0,5
2	Nilai PDRB ADHB (Miliar)	18.431,25	18.687,39	19.124,59
3	Nilai PDRB ADHK (Miliar)	12.174,16	12.016,34	12.354,33
4	Inflasi (%)	2 ± 0,5	2,13	2 ± 0,5
5	PDRB ADHB per Kapita (Juta Rupiah)	35,72	38,36	38,60
6	PDRB ADHK per Kapita (Juta Rupiah)	23,59	24,67	24,93
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,04	5,06	4,58 - 4,90
8	Penduduk Miskin (%)	13,20	13,85	13,20
9	Indeks Pembangunan Manusia	70,00	66,70	67,42 – 70,00
	Angka Harapan Hidup	73,00	69,44	69,67 – 73,00
	Rata-rata Lama Sekolah	8,50	7,77	7,86 – 8,50
	Harapan Lama Sekolah	13,10	12,61	12,78 – 13,10
	Pengeluaran per Kapita	8.715,00	8.192,00	8.434,00 – 8.715,00
10	Indeks Gini	0,30	0,251	0,251
11	Nilai Tukar Petani (NTP)	103,33	104,34	104,34

Adapun tabel dibawah ini merupakan perbandingan indikator makro pada Tahun 2023 antara target indikator Nasional, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pesawaran.

No	Indikator Makro Pembangunan	Pembangunan Nasional	RKPD Provinsi Lampung	P-RKPD Kabupaten Pesawaran
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,9	3,5-4,5	5±0,5
2	Inflasi (%)	3±1	3±1	2±0,5
3	PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	US\$4400–4430	43-44	38,60
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3-6,0	4,0-4,3	4,58 - 4,90
5	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5-8,5	11,4-11,9	13,20
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,29-73,35	70,3-70,6	67,42 – 70,00
7	Indeks Gini	0,375-0,378	0,302-0,319	0,251
8	Nilai Tukar Petani	103-105	104-105	104,34
9	Penurunan Emisi GRK (%) *menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement)	27,02	7.066	-
10	Tingkat Kemantapan Jalan	-	77	-
11	Pertumbuhan PAD	-	4,74	-



## B. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

Secara prinsip antara agenda prioritas pembangunan nasional dan sasaran pokok pembangunan nasional merupakan satu bagian integral yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional 5 (lima) tahunan (2020-2024). Dalam hal ini tentunya prinsip perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan tersebut juga menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah baik dalam konteks perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan maupun perencanaan pembangunan tahunan pada wilayah provinsi maupun kabupaten yang dalam hal ini adalah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

### Penentuan prioritas program pembangunan Kabupaten Pesawaran Tahun 2023, mengacu pada:

1. Arah pembangunan tahap terakhir RPJPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025, yaitu diarahkan pada sasaran melanjutkan program-program Pembangunan tahap sebelumnya yang belum terselesaikan dengan penekanan kebijakan sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan perekonomian daerah;
  - b. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal;
  - c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
  - d. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat;
  - e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
  - f. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
  - g. Meningkatnya daya dukung, kualitas dan kuantitas infrastruktur
  - h. Meningkatnya daya dukung, kualitas dan kuantitas sarana prasarana umum
  - i. Terwujudnya masyarakat yang religious
  - j. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya
  - k. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum.
  - l. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal serta berkelanjutan.
  - m. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dengan kebijakan
  - n. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah
  - o. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
  - p. Pembangunan politik local
  - q. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian alam
  - r. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
2. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 bahwa RKPD Tahun 2023 bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran, antara lain :
  - a. Bidang Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pemerintahan
    - 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mengedepankan kecepatan, kemudahan dan transparansi pelayanan administrasi pemerintahan.
    - 2) Pembuatan standar lama maksimal pembuatan dokumen kependudukan
    - 3) Kanalisasi aduan/keluhan warga dan pembuatan standar kecepatan serta ketepatan penanganan keluhan warga
    - 4) Evaluasi dan mekanisme pemberhentian kepala desa yang melanggar aturan dan dinilai tidak dapat melaksanakan amanah pembangunan desa
    - 5) Tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan pada setiap pelaksanaan reses dan juga disampaikan pada musrembangdes dan musrembangcam untuk dapat dilaksanakan oleh pihak eksekutif.
    - 6) Penataan pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan keahlian, kecakapan dan profesionalitas kerja (*the right man on the right place*).
    - 7) Pembuatan sistem *e-performance* untuk mengukur kinerja ASN.

- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada proses pelayanan pembuatan e-KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga
- b. Bidang Pendidikan
  - 1) Peningkatan Daya Dukung Sekolah

Dalam jangka waktu yang terukur melakukan:

    - Rehabilitasi sekolah kurang layak
    - Rehabilitasi sanitasi sekolah (toilet dan air bersih) untuk peningkatan kesehatan siswa
    - Penambahan ruang kelas terutama pada pendidikan menengah
    - Rehabilitasi dan membangun sarana pendukung pendidikan perpustakaan, laboratorium, sarana olahraga di setiap tingkat pendidikan.
  - 2) Kualitas Pengajar

Secara terukur dan berkelanjutan melakukan:

    - Melakukan pemerataan penempatan tenaga kependidikan (ASN) disemua tingkat pendidikan.
    - Peningkatan kompetensi guru/tenaga pendidikan melalui: pelatihan berkala di tingkat lokal dan nasional.
    - Memberikan keterampilan digital teaching dan digital learning.
    - Pengadaan alat-alat ajar seperti: alat peraga, buku ajar, internet sekolah.
    - Fasilitasi beasiswa bagi guru/tenaga pengajar berprestasi.
  - 3) Kualitas Siswa

Secara terukur dan berkelanjutan melakukan:

    - Mendorong dan memotivasi putra putri Pesawaran untuk melanjutkan pendidikan tinggi , terutama jurusan eksakta atau jurusan yang masih langka dengan fasilitasi beasiswa ikatan dinas ataupun yang bukan ikatan dinas.
    - Fasilitasi sarana ibadah pada tiap tingkat pendidikan sebagai wujud terintegrasinya pembinaan kerohanian di lembaga pendidikan.
    - Penguatan program ekstrakurikuler berbasis peningkatan keterampilan siswa, seperti tourism hospitality, komputer dan elektronika
- c. Bidang Kesehatan
  - 1) Sarana Dan Jaminan Kesehatan
    - Penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah dalam rangka peningkatan status menjadi tipe B
    - Pelayanan puskesmas 24 jam (yang betul-betul tidak lagi ada keluhan dari masyarakat atau pasien)
    - Pemberian jaminan atau asuransi kesehatan kepada masyarakat Pesawaran minimal keluarga miskin.
    - Optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Pesawaran.
  - 2) Tenaga Kesehatan
    - Mengupayakan penambahan jumlah tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, mantri kesehatan). Penambahan dapat dilakukan dengan meminta tambahan alokasi dokter PTT ke Kementerian Kesehatan
    - Beasiswa untuk dokter spesialis, terutama spesialis yang berkaitan dengan risiko kesehatan tertinggi warga Pesawaran (jantung, gigi, penyakit dalam, bedah, ibu dan anak) dan harus ditugaskan kembali ke Kabupaten Pesawaran
    - Peningkatan kompetensi bidan dan tenaga perawat Puskesmas. Hal ini untuk memperkuat fungsi rawat inap di Puskesmas.
- d. Bidang Ekonomi
  - 1) Pengembangan Ekonomi Desa
    - Mendorong peningkatan nilai tambah produk agrobisnis di tingkatan pedesaan.
    - Mendorong tumbuhnya pusat-pusat agrobisnis dan agroindustri dengan menjamin tersedianya infrastruktur sarana infrastruktur yang baik menuju sentra agrobisnis yang dimaksud sebagai contoh sentra kakao di wilayah kedondong dan way khilau
    - Mendorong kolaborasi ekonomi antar desa melalui pengembangan kawasan perdesaan, seperti pasar antar desa, produk unggulan bersama dan badan usaha bersama.

- Pengembangan sektor wisata berbasis pelibatan masyarakat desa. Mendorong dan merekayasa tumbuhnya industri kecil dan menengah yang berbasis pada potensi di daerah setempat/souvenir bagi wisatawan.
  - Menggandeng stakeholder nasional untuk memberikan dukungan kebijakan dan finansial untuk pengembangan ekonomi kawasan perdesaan
- 2) Pengembangan Kawasan Industri
- Mengambil manfaat dari terbangunnya jalan tol lintas Sumatera dengan mempersiapkan kawasan industri terpadu di Kabupaten Pesawaran.
  - Melakukan kajian kelayakan sosial, ekonomi dan kultural untuk persiapan kawasan industri di Kabupaten Pesawaran
  - Pemetaan dan peningkatan promosi potensi ekonomi Pesawaran untuk menarik minat investor berkelas nasional dan internasional.
  - Menggandeng stakeholder nasional untuk dukungan kebijakan pengembangan kawasan industri terpadu di Kabupaten Pesawaran
  - Kawasan industri tersebut dapat mendorong investasi yang menjadi wadah penampungan tenaga kerja bagi masyarakat tempatan.
  - Pembuatan kebijakan agar 60% tenaga kerja lokal direkrut pada perusahaan yang ada di kabupaten pesawaran.
- e. Bidang Infrastruktur
- Infrastruktur Dasar Dan Pendukung
- 1) Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar (transportasi, listrik, air bersih dan telekomunikasi khususnya di daerah sulit dan sangat sulit atau daerah yang terisolir
  - 2) Pembangunan jalan dan jembatan yang layak yang bisa dilalui oleh kendaraan bermotor kendaraan roda empat penyediaan alat berat pada UPTD
  - 3) Penempatan UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada wilayah yang rawan banjir, longsor atau jalan tanah agar cepat dapat diatasi ketika terjadi bencana;
  - 4) Peningkatan akses infrastruktur dan sarana pendukung yang memadai akan membantu pemerintah dan masyarakat untuk menggali potensi wisata secara maksimal.
  - 5) Perbaikan saluran irigasi dan pembangunan embung untuk kawasan pertanian
- f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam
- 1) Mendukung penemuan sumber daya alam baru.
  - 2) Mendukung eksplorasi sumber daya alam untuk penambahan penghasilan daerah. Sehingga jika ada pengurangan dana perimbangan dari pemerintah pusat, kabupaten pesawaran ini tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan Pesawaran.
- g. Agar program/kegiatan perencanaan pembangunan daerah terealisasi dengan optimal, maka pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak mendapat perhatian. Terutama mengenai pajak daerah, perlu pengelolaannya dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah secara profesional dan rasional.
- h. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, tugas DPRD adalah memperjuangkan aspirasi rakyat, maka dalam pembangunan Kabupaten Pesawaran diharapkan bisa merata sampai ke pelosok-pelosok desa tetap menjadi perhatian oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran.
- i. Sumber pendapatan daerah dari Dana Perimbangan yang perlu diperjuangkan dengan proaktif yaitu dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak dan Dana Alokasi Umum, sehingga pembangunan di Kabupaten Pesawaran berhasil guna dan berdaya guna dan juga memperjuangkan dana yang bersumber dari APBN agar dapat diimplementasikan di Kabupaten Pesawaran semaksimal mungkin.
4. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Lampung dan Nasional;
  5. Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2022 dan rencana target capaian Tahun 2023;
  6. Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal.

Secara substansial dalam konteks perencanaan jangka panjang dan jangka menengah Kabupaten Pesawaran indikasi tema pembangunan Tahun 2023 yang berpedoman

pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021–2026 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah memiliki **unsur-unsur utama** dalam tema tersebut, yaitu :

- (1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi;
- (2) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing;
- (3) Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas;
- (4) Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif;
- (5) Mewujudkan Desa Mandiri sebagai Titik Berat Pembangunan berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal.

Program Inovasi Kepala Daerah Periode 2021-2026 memiliki **35 Agenda Kerja** sebagai berikut:

1. Berobat Gratis di Seluruh Fasilitas Kesehatan bagi Seluruh Warga Pesawaran. \*\*
2. Biaya Pendidikan (PAUD-TK, SD dan SMP) Gratis bagi Seluruh Warga Pesawaran. \*\*
3. Penyediaan Dana Pendamping Kesehatan untuk Pasien Khusus. \*\*
4. Peningkatan Program Bina Murid bagi Siswa Tidak Mampu dan Berprestasi.
5. “BERKAT” (Bedah Rumah Layak Sehat).
6. “BERKAH” (Beras Sedekah).
7. Penyediaan Perumahan yang Terjangkau dan Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. \*\*
8. Penyediaan Perumahan bagi ASN, Guru Honor, Tenaga Kesehatan dan THLS (MoU dengan Perumnas). \*\*
9. Peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, Insentif Guru Honor, Tenaga Kesehatan dan THLS.
10. Penambahan Insentif Kadus, RT, Guru Ngaji, Penjaga Makam, Majelis Taklim dan Kader Posyandu.
11. Penambahan Insentif Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Hansip Linmas.
12. Peningkatan Stimulus BUMDes melalui Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GADIS) dari 100 Juta perdesa menjadi 200 Juta perdesa.
13. Pengadaan Ambulance Desa. \*\*
14. Peningkatan Jalan Lingkungan dari Onderlaagh menjadi Hotmix, Rigid dan Rabat Beton.
15. Membentuk Tim Reaksi Cepat (URC) dalam Pemeliharaan Jalan melalui Metode Pemberdayaan Masyarakat (Mandor dan Pekerja Jalan) dan Pemanfaatan IT. \*\*
16. Pengaturan Air Irigasi Terintegrasi melalui Pamantauan Debit Air Menggunakan IT untuk Menjaga dan Mengamankan Jaringan Irigasi agar Selalu Berfungsi dengan Baik. \*\*
17. Perbaikan Jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula dan Pompanisasi.
18. Penanganan Daerah Rawan Bencana melalui Normalisasi Sungai dan Pengendalian Banjir serta Penguatan Desa Tangguh Bencana.
19. Pembangunan Stadion dan Gelanggang Olah Raga (GOR) serta Stadion Mini di Setiap Kecamatan. \*\*
20. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum dan Ruang Publik, Fasilitas Sosial Masyarakat serta Musium Tapis Alquran.
21. Peningkatan Produksi Pabrik Coklat Mini Kakao “KAHUT” dan Peningkatan Produksi Beras melalui kerjasama dengan BUMD PT. Aneka Usaha Laba Jaya.
22. Penambahan Fasilitas Kampung Tapis di Negeri Katon.
23. Pembinaan dan Peningkatan Daya Saing Pengrajin Souvenir Wisata.
24. Pembentukan Pesawaran Mart (P-MART) dan Bantuan Permodalan UMKM. \*\*
25. Pengembangan Hortipark Pesawaran di Negeri Sakti.
26. Pembangunan Pasar di setiap Kecamatan.
27. Pengembangan Wisata Edukasi. \*\*
28. Promosi Desa Digital dan Desa Wisata (“DEDI-DEWI”).
29. Pembangunan Kawasan Industri Pesawaran (KITARAN) di Tegineneng. \*\*
30. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Teluk Pandan. \*\*



31. Penyerapan 35.000 Tenaga Kerja Lokal Warga Kabupaten Pesawaran pada Kawasan Industri Pesawaran (KITARAN) di Tegineneng dengan Penghasilan diatas rata-rata Upah Minimum Regional (UMR). \*\*
32. Penyerapan 10.000 Tenaga Kerja Lokal Warga Kabupaten Pesawaran pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Teluk Pandan dengan Penghasilan diatas rata-rata Upah Minimum Regional (UMR). \*\*
33. “Sate Puan” yakni Satu Desa Satu Kelompok Usaha Perempuan. \*\*
34. Pemberian Hak Pengelolaan Hutan kepada Petani Pengelola Hutan melalui Program Perhutanan Sosial.
35. Menjadikan Pesawaran sebagai Kabupaten Penghasil Garam.

Agenda pembangunan di Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 terkait dengan prioritas pembangunan diharapkan dapat memberikan *trigger* pertumbuhan ekonomi wilayah. Prioritas Pembangunan Daerah kabupaten Pesawaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi**

Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani serta dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Perangkat Daerah guna mewujudkan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah, peningkatan kualitas manajemen keuangan daerah, serta Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan politik lokal. Prioritas ini akan diampu oleh Urusan:

- a. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Kearsipan
- c. Komunikasi dan Informatika
- d. Persandian
- e. Statistik
- f. Pengawasan/Inspektorat
- g. Kewilayahan/Kecamatan
- h. Kepegawaian
- i. Kesatuan Bangsa dan Politik
- j. Keuangan
- k. Pendidikan dan Pelatihan
- l. Penelitian dan Pengembangan
- m. Perencanaan
- n. Sekretariat Daerah
- o. Sekretarian DPRD

#### **2. Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing**

Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitas sumber daya manusia, melalui akses dan kualitas pendidikan serta perwujudan masyarakat yang religius, berbudaya, dan taat hukum dalam kehidupan sosial yang harmonis, serta pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Penanganan dan penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, ibu dan anak, serta Rencana aksi daerah pangan dan gizi, Fokus dalam Penanganan Dampak Covid-19 dengan melakukan program pemulihan (recovery) Pasca Covid-19 dengan memprioritaskan program dan kegiatan pada penanganan Covid-19, seperti penyediaan sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan, pemeriksaan laboratorium, dan penanganan kesehatan lainnya.

Prioritas ini akan diampu oleh Urusan :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Sosial
- d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- e. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- f. Perpustakaan
- g. Kepemudaan dan Olahraga

### 3. Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas

Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah, Pengembangan Perumahan dan Permukiman, serta Peningkatan Kesiapan Penanggulangan Bencana, diarahkan dalam rangka pemantapan dan peningkatan daya dukung, kualitas dan kuantitas cakupan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, dan persampahan), pengembangan kawasan permukiman dan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan daya dukung kualitas dan kuantitas sarana prasarana umum, serta dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesiapan penanggulangan bencana serta pemanfaatan tata ruang melalui penyesuaian dan pengendalian tata ruang. Fokus dalam Penanganan Dampak Covid-19 dengan melakukan program pemulihan (recovery) Pasca Covid-19 dengan memprioritaskan program dan kegiatan melalui padat karya.

Prioritas ini akan diampu oleh Urusan:

- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Pertanahan
- Lingkungan Hidup
- Perhubungan

### 4. Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha Yang Kondusif

Percepatan Pembangunan sektor unggulan melalui peningkatan Iklim Investasi dan pengembangan Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, Energi Sumber Daya Mineral dan Destinasi Wisata. dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, serta dalam rangka program pemulihan (recovery) Pasca Covid-19 dengan memprioritaskan program dan kegiatan pada penanganan Covid-19, seperti penetapan kebijakan yang mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan kebijakan yang bersifat stimulus bagi dunia usaha UMKM dan Industri terdampak serta pemberian insentif ekonomi, Pelatihan Kerja dan Kewirausahaan bagi Tenaga Kerja dan Pekerja Migran Indonesia terdampak, serta penanganan dampak ekonomi lainnya.

Prioritas ini akan diampu oleh Urusan:

- Tenaga Kerja
- Kelautan dan Perikanan
- Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
- Pariwisata
- Penanaman Modal
- Perdagangan
- Perindustrian
- Pertanian
- Transmigrasi

### 5. Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal

Percepatan Perwujudan Desa Tangguh dan Mandiri diarahkan demi terwujudnya percepatan pembangunan pada sektor unggulan dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal, meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta koordinasi dan sinergitas yang lebih baik antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam berbasis Pertanian dan Perikanan guna mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal serta berkelanjutan, serta pemantapan pengembangan dan diversifikasi produk pertanian sejalan dengan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.

Fokus dalam Penanganan Dampak Covid-19 dengan melakukan pemulihan (recovery) Pasca Covid-19 dengan memprioritaskan program dan kegiatan pada penanganan dampak Ekonomi, seperti Pengadaan bahan pangan dan ketahanan pangan, serta Penyediaan Jaring Pengaman Sosial seperti bansos dan hibah individu/masyarakat terdampak atau memiliki resiko sosial seperti pekerja informal/harian, dan keluarga miskin.

Prioritas ini akan diampu oleh Urusan :

- Kebudayaan
- Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Pangan
- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Tabel 4.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dan Nasional beserta Pagu per Prioritas (Perubahan)

PRIORITAS NASIONAL	PAGU PRIORITAS NASIONAL (Rp)	PRIORITAS PROVINSI	PAGU PRIORITAS PROVINSI (Rp)	PRIORITAS KABUPATEN	PAGU PRIORITAS KABUPATEN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS DAN BERKEADILAN	12.313.219.300,00	MENINGKATKAN INVESTASI DAN NILAI TAMBAH PRODUK UNGGULAN	12.313.219.300,00	PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN BERUSAHA YANG KONDUSIF	4.646.348.800,00	1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2) Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja 3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				MEWUJUDKAN DESA MANDIRI SEBAGAI TITIK BERAT PEMBANGUNAN BERBASIS KEMASYARAKATAN DAN POTENSI LOKAL	7.666.870.500,00	1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi 2) Dinas Pariwisata 3) Dinas Perikanan 4) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 5) Dinas Perkebunan dan Peternakan 6) Dinas Ketahanan Pangan
MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	101.242.467.875,00	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	174.778.370.040,00	PEMERATAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKUALITAS	177.182.364.040,00	1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2) Dinas Perhubungan 3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 5) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7) Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar
MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	73.535.902.165,00					
MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM	2.403.994.000,00	PENGELOLAAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN DAN MITIGASI BENCANA	2.403.994.000,00			

PRIORITAS NASIONAL	PAGU PRIORITAS NASIONAL (Rp)	PRIORITAS PROVINSI	PAGU PRIORITAS PROVINSI (Rp)	PRIORITAS KABUPATEN	PAGU PRIORITAS KABUPATEN (Rp)	OPD PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	221.577.369.720,00	MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	221.126.569.720,00	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT JASMANI DAN ROHANI, CERDAS, UNGGUL DAN BERDAYA SAING	222.814.228.620,00	1) Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja 2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 3) Dinas Perkebunan dan Peternakan 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5) Dinas Perpustakaan dan Arsip 6) Dinas Kesehatan 7) Dinas Sosial 8) Dinas PPPA dan PPKB 9) Dinas Pemuda dan Olahraga 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi 11) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	1.236.858.900,00	KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS, AMAN DAN BERBUDAYA	1.687.658.900,00			
MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	909.718.278.915,00	REFORMASI BIROKRASI	909.718.278.915,00	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN LAYANAN PUBLIK YANG BERKINERJA TINGGI	909.718.278.915,00	1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 3) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 4) Dinas Perpustakaan dan Arsip 5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6) Inspektorat 7) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 8) Badan Pendapatan Daerah 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi 12) Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 13) Sekretariat Daerah 14) Sekretariat DPRD 15) Kecamatan
JUMLAH	1.322.028.090.875,00		1.322.028.090.875,00		1.322.028.090.875,00	

### 4.3 SASARAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN PESAWARAN

#### 1. Bidang Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan pada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- Pendidikan anak usia dini; usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- Pendidikan dasar; usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
- Pendidikan kesetaraan; usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

#### 2. Bidang Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- pelayanan kesehatan ibu hamil;
- pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- pelayanan kesehatan balita;
- pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

#### 3. Bidang Pekerjaan Umum

- pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

#### 4. Bidang Perumahan Rakyat

- penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar dengan ketentuan :

- korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

#### 5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- pelayanan informasi rawan bencana;
- pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar dengan ketentuan:

- yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan

- peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana,
  - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
  - d. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

**6. Bidang Sosial**

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti;
- b. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti;
- c. Lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti;
- d. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti;
- e. Korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi; dan
- f. Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Target capaian SPM untuk tahun 2023 sebagaimana telah tercantum pada tabel dibawah ini.

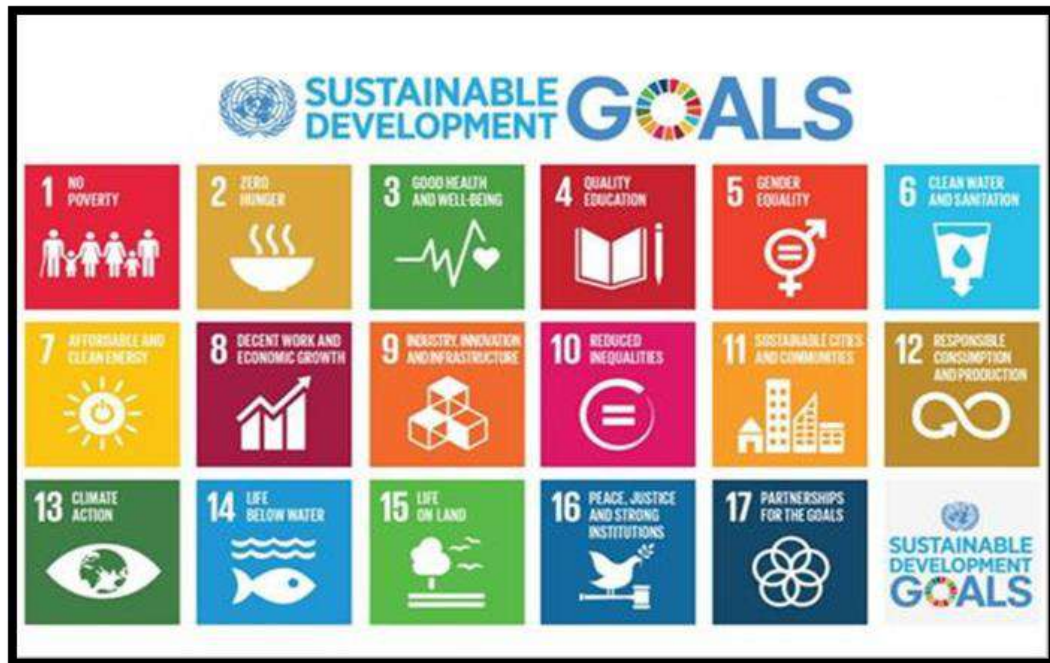
Tabel 4.7 Target capaian SPM Bidang Trantibumlinmas untuk Tahun 2023

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan Akibat dari Penegakkan Hukum	100
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100
4	Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100
5	Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100

#### 4.4 SASARAN PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) KABUPATEN PESAWARAN

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui *platform* agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Rumusan SDGs terdiri dari 17 tujuan pembangunan yang meliputi:

Gambar 4.6 17 Goals SDG's



TPB merupakan tantangan pembangunan di Kabupaten Pesawaran di mana pada tahun pada tahun 2030 cita-cita dari SDGs tertuang dalam 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator harus dicapai. Ketujuh belas TPB tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk apapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.
4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua.
7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan moderen bagi semua.
8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara.
11. Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Mengkonversi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi

- desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.
16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.
  17. Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Ketujuhbelas tujuan tersebut diuraikan ke dalam 169 target. Untuk memudahkan pemantauan, 17 tujuan dan 169 target TPB dikelompokkan ke dalam 4 pilar, sebagai berikut.

1. Pilar pembangunan sosial, meliputi tujuan ke-1, 2, 3, 4, dan 5.
2. Pilar pembangunan ekonomi meliputi tujuan ke-7, 8, 9, 10, dan 17.
3. Pilar pembangunan lingkungan meliputi tujuan ke-6, 11, 12, 13, 14, dan 15.
4. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola meliputi tujuan ke-16.

Adapun target TPB yang menjadi urusan Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2023 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.8 Target TPB yang menjadi urusan Kabupaten Pesawaran Tahun 2023

No	TPB	Indikator	Mencapai Target	Belum Mencapai Target	Perlu Pendataan	Perlu Peningkatan	Perlu Penurunan	Tdk Ada Data
1	Tanpa Kemiskinan	27	4	5	1	3	1	13
2	Tanpa Kelaparan	15	1	1	0	4	0	9
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	39	4	2	0	2	2	21
4	Pendidikan Berkualitas	11	2	4	0	1	0	4
5	Kesetaraan Gender	13	0	1	0	1	0	11
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	12	1	4	0	0	0	7
7	Menjamin Akses Energi	1	0	1	0	0	0	0
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	16	1	1	0	1	0	13
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	8	0	1	0	3	0	5
10	Mengurangi Kesenjangan	12	3	0	0	0	0	9
11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	10	2	2	2	0	2	2
12	Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	4	0	1	2	0	0	1
13	Penanganan Perubahan Iklim	3	0	0	2	0	0	1
15	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	3	0	0	0	0	0	2
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	24	2	1	0	1	0	20
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	10	3	0	0	1	0	6
Total		208	23	24	7	17	5	124

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari 208 indikator TPB di Kabupaten Pesawaran, terdapat 23 indikator yang telah mencapai target, 24 tujuan belum mencapai target, 7 indikator perlu pendataan, 17 indikator perlu peningkatan, 5 indikator perlu penurunan, dan 124 indikator lainnya tidak tersedia data (N/A).



Beberapa indikator yang belum mencapai target pada pilar pembangunan sosial antara lain di Kabupaten Pesawaran adalah; (a) proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, (b) persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap, (c) prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin, (d) persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap, (e) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan, (f) kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan, (g) proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, (h) cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), (i) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat, (j) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat, (k) rata-rata lama sekolah penduduk umur  $\geq 15$  tahun, (l) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan (m) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. Beberapa indikator yang belum mencapai target pada pilar pembangunan ekonomi antara lain adalah; (a) rasio penggunaan gas rumah tangga, (b) PDB per kapita, (c) laju pertumbuhan PDB industri manufaktur, (d) jumlah Desa Mandiri, dan (e) proporsi individu yang menggunakan internet.

Beberapa indikator yang belum mencapai target pada pilar pembangunan lingkungan antara lain adalah; (a) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, (b) proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan, (c) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, (d) proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat, (e) persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan, (f) persentase sampah perkotaan yang tertangani, dan (g) jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. Selebihnya, selain keberhasilan mencapai target indikator dari masing-masing pilar pembangunan dalam TPB, masih banyaknya indikator yang tersedia datanya untuk dievaluasi (59,6%).

#### 4.5 PRIORITAS PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023

Prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada penyediaan dukungan pendanaan untuk Belanja dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan Belanja Prioritas lainnya, diantaranya:

- a. Pengentasan kemiskinan melalui program inovasi BERKAT BENAR BERKAH BAPAK SIJI kerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Pesawaran.  
*Output* inovasi “BERKAH BENAR BERKAT BAPAK SIJI” ini adalah bantuan langsung kepada masyarakat miskin berupa:
  - 1) “BERKAH” (BERas sedeKAH), bantuan beras sebanyak Rp150.000,00 per KK.
  - 2) “BENAR” (BENAh Rumah), bantuan benah rumah sebesar Rp7.000.000,00 per unit rumah.
  - 3) “BERKAT” (BEDah Rumah layaK sehAT), bantuan bedah rumah sebesar Rp16.000.000,00 per unit rumah.
  - 4) “BAPAK SIJI” (BANTuan PAngan Kaum duaFa SIap saJI), bantuan makanan siap saji untuk kaum duaFa sebesar Rp20.000,00/orang sebanyak 3 kali dalam seminggu dengan melibatkan UMKM setempat.
- b. Strategi penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan UMKM dan IKM di Kabupaten Pesawaran melalui program inovasi TABIK PUN (Teknologi dan Digitalisasi, Bantuan Modal, Insentif, Kolaborasi dan Pusat Perbelanjaan).  
 UMKM dan IKM memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan perekonomian daerah sehingga Pemerintah Kabupaten Pesawaran melihat peluang sebagai salah satu peluang untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus terkait UMKM dan IKM yakni:
  - 1) Minimnya permodalan;
  - 2) Infrastruktur kurang memadai;
  - 3) Kebijakan makroekonomi yang kurang mendukung;
  - 4) Biaya bahan baku yang tinggi;

- 5) Permintaan rendah; dan
- 6) Pekerja yang kurang terampil.

Sejalan dengan Janji Kerja Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2021-2026 dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagai berikut:

- 1) Pemberian insentif/*reward* UMKM dan IKM berprestasi;
- 2) Peningkatan pengembangan SDM;
- 3) Memenuhi potensi pasar; dan
- 4) Mengidentifikasi permasalahan pengembangan UMKM dan IKM.

Adapun sasaran yang diharapkan dengan dilaksanakannya inovasi ini adalah:

- 1) Meningkatnya pendapatan pelaku UMKM dan IKM;
- 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi UMKM dan IKM;
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang;
- 4) Meningkatnya pemasaran produk UMKM dan IKM ke pasar nasional dan internasional; dan
- 5) Meningkatnya tenaga kerja yang terampil.

- c. Strategi penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan UMKM dan IKM di Kabupaten Pesawaran melalui program inovasi INDIRA (Integrasi UMKM dan IKM, Digitalisasi, dan Regenerasi) yang merupakan keberlanjutan program inovasi TABIK PUN.

Keberlanjutan program dalam upaya pengembangan ekosistem bisnis UMKM dan IKM melalui:

- 1) Integrasi UMKM dan IKM
  - Pemerintah menjadi fasilitator dalam mengintegrasikan UMKM dengan penyedia bahan baku yang tepat dan sesuai dengan kondisi perekonomian.
  - Integrasi antara UMKM dengan pihak swasta dalam penjualan produk.
  - Integrasi dilakukan antar sesama UMKM dan IKM untuk meningkatkan branding bersama dan mengembangkan pangsa pasar lebih luas
- 2) Digitalisasi
  - Perubahan dari sistem konvensional ke digital sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis dan operasional UMKM dan IKM.
  - Digitalisasi dalam bentuk platform yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk menampung, mengembangkan dan menjual produk-produk dari UMKM dan IKM di Kabupaten Pesawaran.
  - Digitalisasi secara mandiri oleh masing-masing UMKM dan IKM.
- 3) Regenerasi
  - Pendidikan keterampilan dan bisnis bagi pemuda di Kabupaten Pesawaran, khususnya bagi putra dan putri pemilik UMKM dan IKM.
  - Bekerjasama atau berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi untuk mendampingi dan membantu UMKM dan IKM dalam pemasaran dan peningkatan kualitas produk.

- d. Pemenuhan belanja untuk menindaklanjuti temuan LHP oleh BPK RI Tahun 2022 dengan nomor 28A/LHP/XVIII.BLP/05/2023.
- e. Belanja kegiatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat seperti peningkatan layanan *universal health coverage* (UHC) melalui penyaluran PBI Non BPJS dan pemenuhan belanja transfer ke daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  
BERDASARKAN PRIORITAS KABUPATEN TAHUN 2023

Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 pada dasarnya merupakan program prioritas yang berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota, RPJMD Provinsi, dan program prioritas nasional dalam RKP; evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya dan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya; evaluasi capaian kinerja RKP Tahun 2023 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Elemen-elemen utama Program Prioritas memuat Kegiatan yang akan dilaksanakan, yang memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 bahwa Kabupaten Pesawaran tercantum dalam Kawasan pengembangan industri baru diluar pulau jawa yaitu Kawasan Industri Pesawaran (Tegineneng) yang akan dikembangkan dalam kerangka industrialisasi dengan dimanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun, kerja sama regional, serta diversifikasi perekonomian daerah.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 memuat kewenangan urusan sebagai berikut:

- 1 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
  - 1.1 Urusan Pendidikan
  - 1.2 Urusan Kesehatan
  - 1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - 1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - 1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
  - 1.6 Urusan Sosial
- 2 URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
  - 2.1 Urusan Tenaga Kerja
  - 2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - 2.3 Urusan Pangan
  - 2.4 Urusan Pertanahan
  - 2.5 Urusan Lingkungan Hidup
  - 2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - 2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - 2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - 2.9 Urusan Perhubungan
  - 2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika
  - 2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- 2.12 Urusan Penanaman Modal
- 2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga
- 2.14 Urusan Statistik
- 2.15 Urusan Persandian
- 2.16 Urusan Kebudayaan
- 2.17 Urusan Perpustakaan
- 2.18 Urusan Kearsipan
- 3 URUSAN PILIHAN
- 3.1. Urusan Perikanan dan Kelautan
- 3.2 Urusan Pariwisata
- 3.3 Urusan Pertanian
- 3.4 Urusan Perdagangan
- 3.5 Urusan Perindustrian
- 3.6 Urusan Ketransmigrasian
- 4 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN\*)
- 4.1 Perencanaan
- 4.2 Keuangan
- 4.3 Kepegawaian dan Diklat
- 4.4 Penelitian dan Pengembangan
- 4.5 Pengawasan
- 4.6 Kecamatan
- 5 PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN\*)
- 5.1 Sekretariat DPRD
- 5.2 Sekretariat Daerah
- 5.3 Sekretariat Korpri
- 6 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM\*)
- 6.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

**5.2 RENCANA PERUBAHAN PAGU INDIKATIF BELANJA TAHUN 2023**

Belanja daerah tahun 2023 disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2023 dilaksanakan untuk mendanai urusan konkuren yang merupakan kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, serta urusan penunjang dan pendukung pemerintahan. Besarnya belanja tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp1.329.442.516.841,00.

Dalam pelaksanaan anggaran hingga pertengahan tahun 2023, terjadi perubahan target pendapatan transfer, belanja, dan penerimaan pembiayaan daerah. Keadaan tersebut menyebabkan harus dilakukan perubahan atau pergeseran anggaran belanja pada unit organisasi, kegiatan dan jenis belanja. Perubahan dilakukan juga pada dokumen perencanaan PPAS APBD tahun anggaran 2023, menjadi PPAS Perubahan APBD 2023. Perubahan belanja daerah dilakukan dengan melakukan penataan berupa pengurangan keluaran (*output*) pada kegiatan-kegiatan di masing-masing OPD yang penting dan penambahan pada kegiatan yang mendesak dan prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2023.

Kondisi di atas mempengaruhi kapasitas fiskal Kabupaten Pesawaran, sehingga perlu dilakukan penyusunan perubahan APBD. Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2023 setelah dilakukan perubahan diperkirakan sebesar **Rp1.322.028.090.875,00** atau **berkurang** sebesar **Rp7.414.425.966,00** (0,56%). Secara lebih rinci rencana kerja dan pendanaan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Perubahan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	APBD 2023	Rencana Perubahan 2023	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	409.324.726.760,00	408.324.726.760,00	(1.000.000.000,00)
2	Dinas Kesehatan	84.211.797.282,00	84.036.622.282,00	(175.175.000,00)
2a	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	23.301.760.000,00	23.301.760.000,00	-
2b	Puskesmas	40.369.994.784,00	40.369.994.784,00	-
	2b1.PKM Gedong Tataan	4.293.062.609,00	4.293.062.609,00	-
	2b2.PKM Roworejo	2.954.076.535,00	2.954.076.535,00	-
	2b3.PKM Bernung	2.857.013.035,00	2.857.013.035,00	-
	2b4.PKM Trimulyo	2.675.810.065,00	2.675.810.065,00	-
	2b5.PKM Tegineneng	2.984.862.618,00	2.984.862.618,00	-
	2b6.PKM Kedondong	3.781.255.080,00	3.781.255.080,00	-
	2b7.PKM Way Lima	2.845.902.020,00	2.845.902.020,00	-
	2b8.PKM Bunut	2.954.673.947,00	2.954.673.947,00	-
	2b9.PKM Padang Cermin	3.388.285.663,00	3.388.285.663,00	-
	2b10.PKM Hanura	3.952.582.226,00	3.952.582.226,00	-
	2b11.PKM Pedada	2.482.378.525,00	2.482.378.525,00	-
	2b12.PKM Kalirejo	3.290.586.496,00	3.290.586.496,00	-
	2b13.PKM Maja	1.909.505.965,00	1.909.505.965,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	157.146.191.148,00	149.146.191.148,00	(8.000.000.000,00)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	30.302.772.420,00	30.302.772.420,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14.536.365.590,00	14.536.365.590,00	0,00
6	Dinas Sosial	3.390.100.344,00	3.350.100.344,00	(40.000.000,00)
7	Dinas Koperasi, Dan Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	4.092.099.226,00	4.052.099.226,00	(40.000.000,00)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.287.865.890,00	13.187.865.890,00	(100.000.000,00)
9	Dinas Ketahanan Pangan	3.371.004.276,00	3.341.004.276,00	(30.000.000,00)
10	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	5.354.068.564,00	5.304.068.564,00	(50.000.000,00)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.981.642.984,00	3.931.642.984,00	(50.000.000,00)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.684.215.198,00	4.684.215.198,00	0,00
13	Dinas Perhubungan	9.182.772.120,00	9.157.772.120,00	(25.000.000,00)
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	12.549.606.580,00	12.499.606.580,00	(50.000.000,00)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.165.179.748,00	5.065.179.748,00	(100.000.000,00)
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.589.136.430,00	5.438.636.430,00	849.500.000,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.924.746.450,00	14.824.746.450,00	(100.000.000,00)
18	Dinas Perikanan	3.668.333.772,00	3.658.333.772,00	(10.000.000,00)
19	Dinas Pariwisata	4.990.254.770,00	4.990.254.770,00	0,00
20	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	17.224.134.866,00	16.724.134.866,00	(500.000.000,00)
21	Dinas Perkebunan dan Peternakan	7.124.765.208,00	7.104.765.208,00	(20.000.000,00)



No	Perangkat Daerah	APBD 2023	Rencana Perubahan 2023	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.178.606.050,00	8.379.606.050,00	(799.000.000,00)
23	Sekretariat Daerah Kabupaten	54.428.968.499,00	59.924.168.499,00	5.495.200.000,00
	a. Bagian Tata Pemerintahan	200.000.000,00	192.500.000,00	(7.500.000,00)
	b. Bagian Kesejahteraan Rakyat	7.722.600.000,00	11.780.300.000,00	4.057.700.000,00
	c. Bagian Hukum	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00
	d. Bagian Perekonomian	200.000.000,00	192.500.000,00	(7.500.000,00)
	e. Bagian Administrasi Pembangunan	300.000.000,00	292.500.000,00	(7.500.000,00)
	f. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	590.000.000,00	582.500.000,00	(7.500.000,00)
	g. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.576.000.000,00	2.566.000.000,00	(10.000.000,00)
	h. Bagian Umum	29.970.499.906,00	31.370.499.906,00	1.400.000.000,00
	i. Bagian Perlengkapan	11.769.868.593,00	11.769.868.593,00	0,00
	j. Bagian Organisasi	500.000.000,00	492.500.000,00	(7.500.000,00)
	k. Bagian Kerjasama	200.000.000,00	192.500.000,00	(7.500.000,00)
	l. Bagian Sumber Daya Alam	200.000.000,00	192.500.000,00	(7.500.000,00)
24	Sekretariat DPRD	54.000.000.000,00	52.146.768.500,00	(1.853.231.500,00)
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.215.131.820,00	3.119.481.820,00	(95.650.000,00)
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.739.121.330,00	9.739.121.330,00	2.000.000.000,00
27	Kecamatan Gedong Tataan	1.980.542.208,00	1.970.542.208,00	(10.000.000,00)
28	Kecamatan Negeri Katon	1.741.610.622,00	1.731.610.622,00	(10.000.000,00)
29	Kecamatan Tegineneng	1.819.030.280,00	1.809.030.280,00	(10.000.000,00)
30	Kecamatan Way Lima	1.683.186.144,00	1.673.186.144,00	(10.000.000,00)
31	Kecamatan Padang Cermin	1.681.978.884,00	1.671.978.884,00	(10.000.000,00)
32	Kecamatan Punduh Pidada	1.464.403.218,00	1.454.403.218,00	(10.000.000,00)
33	Kecamatan Kedondong	1.747.895.890,00	1.737.895.890,00	(10.000.000,00)
34	Kecamatan Marga Punduh	1.583.207.708,00	1.573.207.708,00	(10.000.000,00)
35	Kecamatan Way Khilau	1.542.800.568,00	1.532.800.568,00	(10.000.000,00)
36	Kecamatan Teluk Pandan	1.597.648.624,00	1.587.648.624,00	(10.000.000,00)
37	Kecamatan Way Ratai	1.442.904.202,00	1.432.904.202,00	(10.000.000,00)
38	Inspektorat	9.084.904.098,00	9.074.904.098,00	(10.000.000,00)
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.401.222.767,00	6.151.222.767,00	(250.000.000,00)
40	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	272.598.525.547,00	270.298.525.547,00	(2.300.000.000,00)
41	Badan Pendapatan Daerah	9.819.093.578,00	9.722.849.112,47	(96.244.465,53)
42	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.200.957.276,00	5.256.132.276,00	55.175.000,00
43	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.717.243.118,00	2.707.243.118,00	(10.000.000,00)
JUMLAH		1.329.442.516.841,00	1.322.028.090.875,00	(7.414.425.966,00)

Sumber : SIPD Kabupaten Pesawaran, 2023



Tabel 5.2 Perubahan Pagu Indikatif Program Prioritas Tahun 2023

No	Program Prioritas	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Berkat Benar Berkah Bapak Siji	5.546.006.000,00	Dinas PRKP
2	TABIK PUN & INDIRA	3.994.051.300,00	Dinas K-UMKM dan Tenaga Kerja; Dinas Perindag
3	Belanja Tindak Lanjut LHP BPK RI Tahun 2022	11.262.772.559,00	Dinas PUPR; Dinas PRKP; Dinas Pertanahan dan LH; Dinas Dukcapil; Dinas TPH; BPBD;
4	Belanja Prioritas Lainnya	6.528.731.779,00	Dinas Kesehatan; BPKAD

Sedangkan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dijabarkan pada Rekapitulasi Daftar Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 sebagaimana dibawah ini.

Tabel 5.3 Rekapitulasi Daftar Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
1	2	3	KINERJA 4	ANGGARAN (Rp) 5	KINERJA 9	ANGGARAN (Rp) 10	11 = 10 - 5
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			409.324.726.760		408.324.726.760	- 1.000.000.000
	URUSAN BIDANG PENDIDIKAN			408.117.867.860		407.117.867.860	- 1.000.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			271.775.883.360		270.975.883.360	- 800.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.000.000		22.900.000	- 7.100.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen	22.900.000	- 7.100.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			267.456.743.360		266.970.698.360	- 486.045.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Gaji dan Tunjangan ASN	1048	267.436.743.360	1048	266.950.698.360	- 486.045.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	20.000.000	5 Dokumen	20.000.000	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			601.521.000		487.346.000	- 114.175.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	60.000.000	-
	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	96.045.000	12 Bulan	96.045.000	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Tahun	15.400.000	1 Tahun	15.400.000	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun	157.795.000	1 Tahun	122.795.000	- 35.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun	24.721.000	1 Tahun	24.721.000	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	197.560.000	1 Tahun	118.385.000	- 79.175.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			466.747.000		415.747.000	- 51.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Tahun	466.747.000	1 Tahun	415.747.000	- 51.000.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.602.480.000		2.512.600.000	89.880.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	79.600.000	1 Tahun	60.600.000	- 19.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	2.522.880.000	1 Tahun	2.452.000.000	- 70.880.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			618.392.000		566.592.000	- 51.800.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Tahun	276.392.000	1 Tahun	224.592.000	- 51.800.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	12.000.000	1 Tahun	12.000.000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	330.000.000	1 Tahun	330.000.000	-
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			136.255.134.500		136.055.134.500	- 200.000.000
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			83.886.014.900		83.686.014.900	- 200.000.000
	Penambahan Ruang Kelas Baru						-
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang	411.608.400	5 Ruang	411.608.400	-
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	20 Ruang	856.959.000	20 Ruang	856.959.000	-
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	587.905.600	4 Ruang	587.905.600	-
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30 Unit	3.334.284.900	30 Unit	3.334.284.900	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	55 Ruang	3.382.217.000	55 Ruang	3.382.217.000	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terwujudnya Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	730 unit	240.400.400	730 unit	240.400.400	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Terwujudnya Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	60 paket	244.660.000	60 paket	244.660.000	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terwujudnya Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	12 Paket	295.529.600	12 Paket	295.529.600	-
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		552.500.000		552.500.000	-
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	terwujudnya Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	315 Paket	1.625.000.000	315 Paket	1.625.000.000	-
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	316 Satuan Pendidikan	1.091.134.000	316 Satuan Pendidikan	1.091.134.000	-

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	33.560.400	50 Peserta Didik	33.560.400	-
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		26.777.429.400		26.577.429.400	- 200.000.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	314 Satuan Pendidikan	51.481.200	314 Satuan Pendidikan	51.481.200	-
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	316 Satuan Pendidikan	41.515.300.000	316 Satuan Pendidikan	41.515.300.000	-
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Terwujudnya Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	4 Paket	2.886.045.000	4 Paket	2.886.045.000	-
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			40.742.727.600		40.742.727.600	-
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terwujudnya Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	12 Paket	2.772.660.000	12 Paket	2.772.660.000	-
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	9.960.727.000	5 Unit	9.960.727.000	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terwujudnya Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	10 unit	4.721.640.000	10 unit	4.721.640.000	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Terwujudnya Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		344.699.000		344.699.000	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terwujudnya Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 unit	47.044.000	6 unit	47.044.000	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Terwujudnya Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	986.597.000	6 Unit	986.597.000	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Terwujudnya Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	740.724.000	2 Unit	740.724.000	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terwujudnya Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	13 unit	423.619.600	13 unit	423.619.600	-
	Pengadaan Perlengkapan Siswa (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	730 Paket	2.098.899.000	730 Paket	2.098.899.000	-
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	15 Unit	125.000.000	15 Unit	125.000.000	-
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	5063 Peserta Didik	498.240.000	5063 Peserta Didik	498.240.000	-
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	terwujudnya Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Peserta Didik	40.000.000	80 Peserta Didik	40.000.000	-
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	1.700.000.000	150 Orang	1.700.000.000	-

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	64 Satuan Pendidikan	429.686.000	64 Satuan Pendidikan	429.686.000	-
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	70 Satuan	15.464.900.000	70 Satuan	15.464.900.000	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Terwujudnya Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		338.848.000		338.848.000	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	terwujudnya Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 unit	49.444.000	2 unit	49.444.000	-
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			9.555.483.000		9.555.483.000	-
	Pembangunan Sarana, Prasaran dan Utilitas PAUD	Terwujudnya Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5 Unit	264.747.000	5 Unit	264.747.000	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Paket	222.632.000	10 Paket	222.632.000	-
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	351 Peserta Didik	449.710.000	351 Peserta Didik	449.710.000	-
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	68 Orang	8.369.037.000	68 Orang	8.369.037.000	-
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	70 Peserta	249.357.000	70 Peserta	249.357.000	-
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			2.070.909.000		2.070.909.000	-
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Terwujudnya Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	4 Unit	408.979.000	4 Unit	408.979.000	-
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1397 Peserta Didik	1.661.930.000	1397 Peserta Didik	1.661.930.000	-
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			86.850.000		86.850.000	-
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			50.000.000		50.000.000	-
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Dokumen	25.000.000	5 Dokumen	25.000.000	-
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masvarakat (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan	6 Dokumen	25.000.000	6 Dokumen	25.000.000	-

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
		Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			36.850.000		36.850.000	-
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	terwujudnya Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Dikumen	25.000.000	5 Dikumen	25.000.000	-
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	terwujudnyan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Dikumen	11.850.000	5 Dikumen	11.850.000	-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.206.858.900		1.206.858.900	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			592.000.000		592.000.000	-
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			592.000.000		592.000.000	-
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Tewujudnyan Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga	592.000.000	6 Lembaga	592.000.000	-
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			614.858.900		614.858.900	-
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			36.300.000		36.300.000	-
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1 Objek	36.300.000	1 Objek	36.300.000	-
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			578.558.900		578.558.900	-
	Pelindungan Cagar Budaya (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Terwujudnya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 Objek	578.558.900	1 Objek	578.558.900	-

## 2. Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			84.211.797.282		84.036.622.282	-
01 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			84.211.797.282		84.036.622.282	-
1 0201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik		48.589.754.062	100%	48.489.754.062	-



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1 0201 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan pada Dinas Kesehatan		48.186.509.762	100%	48.086.509.762	100.000.000
1 0201 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		47.905.869.762	14 Orang/ bulan	47.805.869.762	100.000.000
102012 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		280.640.000	12 Dokumen	280.640.000	-
1 0201 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi Umum pada Dinas Kesehatan		25.000.000	100%	25.000.000	-
10201 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		25.000.000	12 Paket	25.000.000	-
1 02 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pada Dinas Kesehatan		72.000.000	100%	72.000.000	-
10201 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		72.000.000	13 Laporan	72.000.000	-
1 02 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan		306.244.300	100%	306.244.300	-
102012 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		306.244.300	6 Unit	306.244.300	-
1 0202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		27.738.571.220	100%	27.663.396.220	75.175.000
1 02 022 01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Kabupaten Pesawaran		11.532.593.000	100%	11.532.593.000	-
1 02 02 2 01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		3.104.145.000	4 paket	3.104.145.000	-
1 02 02 2 01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan		3.317.397.000	1 Paket	3.317.397.000	-
1 02 02 2 01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan		5.100.051.000	5 Paket	5.100.051.000	-
1 02 02 2 01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Gunung Sari)			11.000.000		11.000.000	
1 02 02 2 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Kabupaten Pesawaran		15.931.178.220	100%	15.856.003.220	75.175.000
1 02 02 2 02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		45.093.000	9253 Orang	45.093.000	-
1 02 02 2 02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Gunung Sari)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		46.100.000		46.100.000	
1 02 02 2 02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		372.430.000	8832 Orang	372.430.000	-
1 02 02 2 02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Gunung Sari)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		22.350.000		22.350.000	
1 02 02 2 02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		67.148.000	8411 Orang	67.148.000	-
1 02 02 2 02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Gunung Sari)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3.000.000		3.000.000	

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023**

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1 02 02 2 02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		71.481.000	53760 Orang	71.481.000	-
1 02 02 2 02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Gunung Sari)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		121.030.000		121.030.000	
1 02 02 2 02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		87.300.000	96064 Orang	87.300.000	-
1 02 02 2 02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Gunung Sari)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		65.850.000		65.850.000	
1 02 02 2 02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		502.836.000	289999 Orang	502.836.000	-
1 02 02 2 02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Gunung Sari)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		28.910.000		28.910.000	
1 02 02 2 02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		10.000.000	31451 Orang	10.000.000	-
1 02 02 2 02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Gunung Sari)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		50.700.000		50.700.000	
1 02 02 2 02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		10.000.000	95602 Orang	10.000.000	-
1 02 02 2 02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		12.460.000	3427 Orang	12.460.000	-
1 02 02 2 02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (Gunung Sari)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		18.690.000		18.690.000	
1 02 02 2 02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		49.000.000	7777 Orang	49.000.000	-
1 02 02 2 02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Gunung Sari)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		11.100.000		11.100.000	
1 02 02 2 02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		10.000.000	1332 Orang	10.000.000	-
1 02 02 2 02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Gunung Sari)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		5.650.000		5.650.000	
1 02 02 2 02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		140.000.000	9589 Orang	140.000.000	-
1 02 02 2 02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Gunung Sari)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		6.000.000		6.000.000	
1 02 02 2 02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		6.750.000	2 Dokumen	6.750.000	-
1 02 02 2 02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Gunung Sari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		319.550.000		319.550.000	
1 02 02 2 02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		153.572.000	2 Dokumen	153.572.000	-
1 02 02 2 02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Gunung Sari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		7.500.000		7.500.000	
1 02 02 2 02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Gunung Sari)			7.500.000		7.500.000	
1 02 02 2 02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	-
1 02 02 2 02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		36.000.000	1 Dokumen	36.000.000	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
1	2	3	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
			4	5	9	10	11 = 10 - 5
1 02 02 2 02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		10.956.376.788	3 Dokumen	10.881.201.788	- 75.175.000
1 02 02 2 02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Gunung Sari)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		957.236.432		957.236.432	
1 02 02 2 02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		292.290.000	2 Dokumen	292.290.000	-
1 02 02 2 02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Gunung Sari)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		237.255.000		237.255.000	
1 02 02 2 02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		138.312.000	5 Unit	138.312.000	-
1 02 02 2 02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		18.000.000	1 Laporan	18.000.000	-
1 02 02 2 02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Gunung Sari)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		750.000		750.000	
1 02 02 2 02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		74.400.000	1 Dokumen	74.400.000	-
1 02 02 2 0240	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		104.209.250	1332 orang	104.209.250	-
1 02 02 2 0240	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (Gunung Sari)	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		38.640.000		38.640.000	
1 02 02 2 0241	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		10.000.000	6 orang	10.000.000	-
1 02 02 2 0242	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		615.708.750	980 orang	615.708.750	-
1 02 02 2 04	Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		274.800.000	100%	274.800.000	-
1 02 02 2 04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		274.800.000	15 Unit	274.800.000	-
01 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk		6.409.000.000	100%	6.409.000.000	-
1 02 03 2 02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayaagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayaagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		6.409.000.000	100%	6.409.000.000	-
1 02 03 2 02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		6.409.000.000	443 Orang	6.409.000.000	-
10204	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MINUMAN	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan penduduk		406.572.000	100%	406.572.000	-
102042 03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai izin produksi untuk Produk Makanan dan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai izin produksi untuk Produk Makanan dan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga		406.572.000	100%	406.572.000	-
102042 03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk		406.572.000	3 Dokumen	406.572.000	-

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
	Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					
10205	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif		1.067.900.000	100%	1.067.900.000	-
102052 01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			196.520.000	100%	196.520.000	-
102052 01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		180.020.000	5 Dokumen	180.020.000	-
102052 01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Gunung Sari)	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		16.500.000		16.500.000	
102052 02	Pelaksanaan Hidup Sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota			197.380.000	100%	197.380.000	-
102052 02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		197.380.000	2 Dokumen	197.380.000	
102052 03	Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat Daerah kabupaten/kota			674.000.000	100%	674.000.000	-
102052 03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		674.000.000	12 Dokumen	674.000.000	-
JUMLAH				84.211.797.282		84.036.622.282	- 175.175.000

### 3. RSUD Pesawaran

KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
								TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
								KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1						2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1.	02.					Urusan Kabupaten/Kota			23.301.760.000		23.301.760.000	-
1.	02.					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			23.301.760.000		23.301.760.000	-
1.	02.	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	14.800.000.000	100%	14.800.000.000	-
1.	02.	01	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Kabupaten Pesawaran	1 unit	14.800.000.000	1 unit	14.800.000.000	-
1.	02.	01	2	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit	14.800.000.000	1 unit	14.800.000.000	-
1.	02.	02.				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		8.501.760.000		8.501.760.000	-
1.	02.	02.	2.	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Kabupaten Pesawaran		106.000.000		244.000.000	(138.000.000)
1.	02.	02.	2.	01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	10 unit	106.000.000	13 unit	244.000.000	(138.000.000)

KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
								KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1.	02.	02.	2.	02		Penyediaan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Kabupaten Pesawaran		8.395.760.000		8.257.760.000	138.000.000
1.	02.	02.	2.	02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	11 dokumen	8.395.760.000	11 dokumen	8.257.760.000	138.000.000
						Total			23.301.760.000		23.301.760.000	-

#### 4. Puskesmas Gedong Tataan

KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
								KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1.						Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		100%				
1.	02.					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		100%				
1.	02.	01.				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	12	3.037.549.609	12	3.037.549.609	-
1.	02.	01.	2.	10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Terselenggaranya BLUD di Puskesmas Gedong Tataan	12	3.037.549.609	12	3.037.549.609	-
1.	02.	01.	2.	10.	01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12	3.037.549.609	12	3.037.549.609	-
1.	02.	02.				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin	1	1.248.888.000	1	1.248.888.000	-
1.	02.	02.	2.	01.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal	1	13.810.000	1	13.810.000	-
1.	02.	02.	2.	01.	20.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1	13.810.000	1	13.810.000	-
1.	02.	02.	2.	02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	62.055	1.235.078.000	62.055	1.235.078.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	01.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.199	59.100.000	1.199	59.100.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.145	21.885.000	1.145	21.885.000	-

KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
								TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
1						2	3	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	11 = 10 - 5
1.	02.	02.	2.	02.	03.			4	5	9	10	
1.	02.	02.	2.	02.	03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.090	3.300.000	1.090	3.300.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.915	159.910.000	5.915	159.910.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12.451	87.975.000	12.451	87.975.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34.821	35.980.000	34.821	35.980.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.077	56.100.000	4.077	56.100.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	09.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	413	4.515.000	413	4.515.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92	14.700.000	92	14.700.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	674	5.380.000	674	5.380.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.272	6.000.000	1.272	6.000.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	429.705.000	1	429.705.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	18.300.000	1	18.300.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	20.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	2.250.000	1	2.250.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12	282.163.000	12	282.163.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	36.	Investigasi Awal Kejadian Tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	umlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	3.300.000	1	3.300.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1	160	44.515.000	160	44.515.000	-
1.	02.	05.				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Cakupan Desa Siaga Aktif</b>	1	6.625.000	1	6.625.000	-
1.	02.	05.	2.	01.		<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas</b>	<b>Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dn Sehat (PHBS) di akbupaten Pesawaran</b>	1	6.625.000	1	6.625.000	-



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
1	2	3	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	11 = 10 - 5
1. 02. 05. 2. 01. 01.	Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
1. 02. 05. 2. 01. 01.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	6.625.000	1	6.625.000	-
JUMLAH				4.293.062.609		4.293.062.609	-

#### 5. Puskesmas Kedondong

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
1	2	3	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	11 = 10 - 5
1. 02. 01. 2. 10. 01.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		100%	3.781.255.080		3.781.255.080	
1. 02. 01. 2. 10. 01.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		100%	3.781.255.080		3.781.255.080	
1. 02. 01. 2. 10. 01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	12	2.491.326.080	12	2.491.326.080	-
1. 02. 01. 2. 10. 01.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Terselenggaranya BLUD di Puskesmas Gedong Tataan	12	2.491.326.080	12	2.491.326.080	-
1. 02. 01. 2. 10. 01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12	2.491.326.080	12	2.491.326.080	-
1. 02. 02. 2. 01. 01.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin	1	1.268.924.000	1	1.268.924.000	-
1. 02. 02. 2. 01. 01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal	1	14.000.000	1	14.000.000	-
1. 02. 02. 2. 01. 20.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1	14.000.000	1	14.000.000	-
1. 02. 02. 2. 02. 01.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	41.606	1.254.924.000	41.606	1.254.924.000	-
1. 02. 02. 2. 02. 01.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	785	90.325.000	785	90.325.000	-
1. 02. 02. 2. 02. 02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	749	7.500.000	749	7.500.000	-
1. 02. 02. 2. 02. 03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	-	-
1. 02. 02. 2. 02. 04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.562	141.200.000	4.562	141.200.000	-

KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
								TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
								KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1						2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1.	02.	02.	2.	02.	05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.151	100.500.000	8.151	100.500.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22.955	58.850.000	22.955	58.850.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.669	109.920.000	2.669	109.920.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	09.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	271	10.080.000	271	10.080.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	62	24.300.000	62	24.300.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	442	57.000.000	442	57.000.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	838	3.300.000	838	3.300.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	350.100.000	1	350.100.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	5.700.000	1	5.700.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	20.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	6.550.000	1	6.550.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12	272.599.000	12	272.599.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	36.	Investigasi Awal Kejadian Tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	umlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	750.000	1	750.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	37.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	10.850.000	1	10.850.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1	105	5.400.000	105	5.400.000	-
1.	02.	05.				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	1	21.005.000	1	21.005.000	-
1.	02.	05.	2.	01.		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dn Sehat (PHBS) di akbupaten Pesawaran	1	21.005.000	1	21.005.000	-
1.	02.	05.	2.	01.	01.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	21.005.000	1	21.005.000	-
JUMLAH									3.781.255.080		3.781.255.080	-

6. Puskesmas Roworejo

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
	<b>BLUD Puskesmas Roworejo</b>						
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			2.954.076.535		2.954.076.535	
1,02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>			2.954.076.535		2.954.076.535	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik</b>		1.925.098.535		1.925.098.535	
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>			1.925.098.535		1.925.098.535	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.925.098.535	1 Unit Kerja	1.925.098.535	
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin</b>		1.026.678.000		1.026.678.000	
1.02.02.2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			11.340.000		11.340.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	11.340.000	1 Unit	11.340.000	
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			1.015.338.000		1.015.338.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	728 Orang	73.250.000	728 Orang	73.250.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	695 Orang	23.950.000	695 Orang	23.950.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4231 Orang	178.925.000	4231 Orang	178.925.000	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7560 Orang	68.625.000	7560 Orang	68.625.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21625 Orang	29.385.000	21625 Orang	29.385.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2475 Orang	32.000.000	2475 Orang	32.000.000	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	-
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	255 Orang	9.975.000	255 Orang	9.975.000	-
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	57 Orang	5.700.000	57 Orang	5.700.000	-
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	417 Orang	4.410.000	417 Orang	4.410.000	-
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	792 Orang	4.500.000	792 Orang	4.500.000	-
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	308.186.000	1 Dokumen	308.186.000	-
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	13.500.000	1 Dokumen	13.500.000	-
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	7.200.000	1 Dokumen	7.200.000	-
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	227.952.000	1 Dokumen	227.952.000	-
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0,00
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	-
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99 Orang	27.780.000	99 Orang	27.780.000	-
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	-
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	-
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa siaga aktif		2.300.000		2.300.000	-
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.300.000		2.300.000	-

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	2.300.000	1 Dokumen	2.300.000	

## 7. Puskesmas Bernung

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
	BLUD Puskesmas Bernung			2.857.013.035		2.857.013.035	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.857.013.035		2.857.013.035	
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.857.013.035		2.857.013.035	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik		1.801.141.035		1.801.141.035	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.801.141.035		1.801.141.035	
1.02.01.2.10.01		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.801.141.035	1 Unit Kerja	1.801.141.035	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		1.041.822.000		1.041.822.000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			11.610.000		11.610.000	
1.02.02.2.01.20		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	11.610.000	1 Unit	11.610.000	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.030.212.000		1.030.212.000	
1.02.02.2.02.01		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1018 Orang	68.550.000	1018 Orang	68.550.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
1.02.02.2.02.02		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	972 Orang	36.845.000	972 Orang	36.845.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						
1.02.02.2.02.03		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	925 Orang	4.800.000	925 Orang	4.800.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5919 Orang	141.630.000	5919 Orang	141.630.000	-
1.02.02.2.02.05		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10768 Orang	75.750.000	10768 Orang	75.750.000	-
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	32439 Orang	27.680.000	32439 Orang	27.680.000	-
1.02.02.2.02.07		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3460 Orang	36.150.000	3460 Orang	36.150.000	-
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	386 Orang	5.155.000	386 Orang	5.155.000	-
1.02.02.2.02.10		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	87 Orang	17.400.000	87 Orang	17.400.000	-
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5611 Orang	8.050.000	5611 Orang	8.050.000	-
1.02.02.2.02.15		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	318.980.000	1 Dokumen	318.980.000	-
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	13.550.000	1 Dokumen	13.550.000	-
1.02.02.2.02.20		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	3.750.000	1 Dokumen	3.750.000	-
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	233.602.000	1 Dokumen	233.602.000	-
1.02.02.2.02.40		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1000 Orang	38.320.000	1000 Orang	38.320.000	-
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa siaga aktif		14.050.000		14.050.000	-
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan			14.050.000		14.050.000	-



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
	<i>Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	14.050.000	1 Dokumen	14.050.000	-

#### 8. Puskesmas Hanura

KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
								TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
								KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1						2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1.						Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		100%	3.952.582.226		3.952.582.226	
1.	02.					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		100%	3.952.582.226		3.952.582.226	
1.	02.	01.				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	12	2.861.334.226	12	2.861.334.226	-
1.	02.	01.	2.	10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Terselenggaranya BLUD di Puskesmas Gedong Tataan	12	2.861.334.226	12	2.861.334.226	-
1.	02.	01.	2.	10.	01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12	2.861.334.226	12	2.861.334.226	-
1.	02.	02.				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin		1.083.598.000		1.083.598.000	
1.	02.	02.	2.	01.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal	1	12.000.000	1	12.000.000	-
1.	02.	02.	2.	01.	20.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1	12.000.000	1	12.000.000	-
1.	02.	02.	2.	02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	35.983	1.071.598.000	35.983	1.071.598.000	-

KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
								TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
								KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1						2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1.	02.	02.	2.	02.	01.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.199	23.100.000	1.199	23.100.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.145	8.200.000	1.145	8.200.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	-	-
1.	02.	02.	2.	02.	04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.570	88.300.000	3.570	88.300.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia sekolah dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.561	55.650.000	7.561	55.650.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25.522	58.375.000	25.522	58.375.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.619	36.000.000	3.619	36.000.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	09.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	292	22.200.000	292	22.200.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	61	1.500.000	61	1.500.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	829	9.000.000	274	9.000.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	342.430.000	12	342.430.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	14.475.000	1	14.475.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12	222.418.000	12	222.418.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12	37.500.000	12	37.500.000	-

KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
								TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
								KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1						2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1.	02.	02.	2.	02.	40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1		44.900.000		44.900.000	
1.	02.	02.	1	02.	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	12	107.550.000	12	107.550.000	-
1.	02.	05.				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	-	7.650.000	-	7.650.000	-
1.	02.	05.	2.	01.		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dn Sehat (PHBS) di akbupaten Pesawaran	1	7.650.000	1	7.650.000	-
1.	02.	05.	2.	01.	01.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	7.650.000	1	7.650.000	-
JUMLAH									3.952.582.226		3.952.582.226	-

#### 9. Puskesmas Kalirejo

KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
								TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
								KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1						2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1.						Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		100%	3.290.586.496		3.290.586.496	-
1.	02.					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		100%	3.290.586.496		3.290.586.496	-
1.	02.	01.				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	12	2.238.551.496	12	2.238.551.496	-
1.	02.	01.	2.	10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Terselenggaranya BLUD di Puskesmas Gedong Tataan	12	2.238.551.496	12	2.238.551.496	-
1.	02.	01.	2.	10.	01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12	2.238.551.496	12	2.238.551.496	-
1.	02.	02.				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin	1	1.039.715.000	1	1.039.715.000	-
1.	02.	02.	2.	01.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal	1	11.570.000	1	11.570.000	-

KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
								TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
								KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1						2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
						Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						
1.	02.	02.	2.	01.	20.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1	11.570.000	1	11.570.000	-
1.	02.	02.	2.	02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Yang mendapatkan jaminan Pelayanan Kesehatan	40.861	1.028.145.000	40.861	1.028.145.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	01.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	751	61.350.000	751	61.350.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	717	27.950.000	717	27.950.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	683	2.250.000	683	2.250.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.364	125.060.000	4.364	125.060.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	umlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standa	7.798	70.800.000	7.798	70.800.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22.303	55.020.000	22.303	55.020.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.553	37.400.000	2.553	37.400.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	09.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	264	4.025.000	264	4.025.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60	14.550.000	60	14.550.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	434	6.270.000	434	6.270.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	811	5.400.000	811	5.400.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	324.135.000	4	324.135.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3	22.500.000	3	22.500.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	20.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	3.750.000	1	3.750.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12	233.875.000	12	233.875.000	-

KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
								TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
								KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1						2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1.	02.	02.	2.	02.	40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1	103	33.810.000	103	33.810.000	-
1.	02.	05.				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	1	12.320.000	1	12.320.000	-
1.	02.	05.	2.	01.		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dn Sehat (PHBS) di Kabupaten Pesawaran	1	12.320.000	1	12.320.000	-
1.	02.	05.	2.	01.	01.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	12.320.000	1	12.320.000	-
JUMLAH									3.290.586.496	-	3.290.586.496	-

#### 10. Puskesmas Way Lima

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
	BLUD Puskesmas Way Lima			2.845.902.020		2.845.902.020	-
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.845.902.020		2.845.902.020	-
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.845.902.020		2.845.902.020	-
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik		1.799.797.020		1.799.797.020	-
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.799.797.020		1.799.797.020	-
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.799.797.020	1 Unit Kerja	1.799.797.020	-
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		1.042.355.000		1.042.355.000	-
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			11.500.000		11.500.000	-
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	11.500.000	1 Unit	11.500.000	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.030.855.000		1.030.855.000	-
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	772 Orang	47.550.000	772 Orang	47.550.000	-

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	737 Orang	42.165.000	737 Orang	42.165.000	-
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	702 Orang	7.200.000	702 Orang	7.200.000	-
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4487 Orang	136.570.000	4487 Orang	136.570.000	-
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11454 Orang	81.000.000	11454 Orang	81.000.000	-
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6486 Orang	52.250.000	6486 Orang	52.250.000	-
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2625 Orang	35.280.000	2625 Orang	35.280.000	-
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	56 Orang	2.100.000	56 Orang	2.100.000	-
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	400 Orang	21.210.000	400 Orang	21.210.000	-
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	867 Orang	2.400.000	867 Orang	2.400.000	-
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	318.875.000	1 Dokumen	318.875.000	-
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	9.085.000	1 Dokumen	9.085.000	-
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	2.250.000	1 Dokumen	2.250.000	-
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	235.335.000	1 Dokumen	235.335.000	-
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	2.400.000	1 Laporan	2.400.000	-
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51 Orang	35.185.000	51 Orang	35.185.000	-
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa siaga aktif		3.750.000		3.750.000	-
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.750.000		3.750.000	-
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	3.750.000	1 Dokumen	3.750.000	-



11. Puskesmas Trimulyo

KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
								TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
								KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1						2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1.						Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		100%	2.675.810.065	100%	2.675.810.065	
1.	02.					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		100%	2.675.810.065	100%	2.675.810.065	
1.	02.	01.				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	12	1.432.718.065	12	1.432.718.065	-
1.	02.	01.	2.	10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Terselenggaranya BLUD di Puskesmas Gedong Tataan	12	1.432.718.065	12	1.432.718.065	-
1.	02.	01.	2.	10.	01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12	1.432.718.065	12	1.432.718.065	-
1.	02.	02.				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien masyarakat miskin	1	1.175.142.000	1	1.175.142.000	-
1.	02.	02.	2.	01.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Berfungsinya fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal	1	13.670.000	1	13.670.000	-
1.	02.	02.	2.	01.	20.	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1	13.670.000	1	13.670.000	-
1.	02.	02.	2.	02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	31.591	1.161.472.000	31.591	1.161.472.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	01.	Pengelola Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	592	91.095.000	592	91.095.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	565	14.700.000	565	14.700.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	539	3.600.000	539	3.600.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.442	145.200.000	3.442	145.200.000	-

KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
								TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
								KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1						2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1.	02.	02.	2.	02.	05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.150	41.400.000	6.150	41.400.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17.508	30.600.000	17.508	30.600.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.014	91.200.000	2.014	91.200.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	09.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	207	3.950.000	207	3.950.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	47	13.800.000	47	13.800.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	341	40.390.000	341	40.390.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	81	1.500.000	81	1.500.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9	408.830.000	9	408.830.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2	1.500.000	2	1.500.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	20.	Pengelolaan Surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	4.050.000	1	4.050.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12	258.632.000	12	258.632.000	-
1.	02.	02.	2.	02.	40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1	81	11.025.000	81	11.025.000	-
1.	02.	05.				PROGRAM PEMBERDAYAAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	4	67.950.000	4	67.950.000	-

KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
								TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
								KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1						2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
						MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						
1.	02.	05.	2.	01.		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat dengan perilaku Hidup Bersih dn Sehat (PHBS) di akbupaten Pesawaran	4	67.950.000	4	67.950.000	-
1.	02.	05.	2.	01.	01.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	67.950.000	4	67.950.000	-
JUMLAH									2.675.810.065,000		2.675.810.065,000	-

## 12. Puskesmas Padang Cermin

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
	BLUD Puskesmas Padang Cermin			3.388.285.663		3.388.285.663	-
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.388.285.663		3.388.285.663	-
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.388.285.663		3.388.285.663	-
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik		2.127.983.663		2.127.983.663	-
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2.127.983.663		2.127.983.663	-
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.127.983.663	1 Unit Kerja	2.127.983.663	-
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		1.260.302.000		1.260.302.000	-
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			13.860.000		13.860.000	-
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	13.860.000	1 Unit	13.860.000	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.246.442.000		1.246.442.000	-

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	603 Orang	104.430.000	603 Orang	104.430.000	-
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	576 Orang	29.820.000	576 Orang	29.820.000	-
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	548 Orang	3.600.000	548 Orang	3.600.000	-
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3504 Orang	179.185.000	3504 Orang	179.185.000	-
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6261 Orang	54.000.000	6261 Orang	54.000.000	-
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18473 Orang	45.000.000	18473 Orang	45.000.000	-
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2050 Orang	108.000.000	2050 Orang	108.000.000	-
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	50 Orang	14.100.000	50 Orang	14.100.000	-
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	362 Orang	18.450.000	362 Orang	18.450.000	-
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	326.870.000	1 Orang	326.870.000	-
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	-
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	307.217.000	12 Dokumen	307.217.000	-
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	3.600.000	-	3.600.000	-
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	86 Orang	17.200.000	86 Orang	17.200.000	-
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	1.800.000	1 Orang	1.800.000	-
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	29170 Orang	18.170.000	29170 Orang	18.170.000	-

13. Puskesmas Bunut

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
	BLUD Puskesmas Bunut			2.954.673.947		2.954.673.947	-
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.954.673.947		2.954.673.947	-
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.954.673.947		2.954.673.947	-
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik		1.730.400.947		1.730.400.947	-
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.730.400.947		1.730.400.947	-
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.730.400.947	1 Unit Kerja	1.730.400.947	-
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		1.209.473.000		1.209.473.000	-
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			13.460.000		13.460.000	-
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	13.460.000	1 Unit	13.460.000	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.196.013.000		1.196.013.000	-
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	820 Orang	64.350.000	820 Orang	64.350.000	-
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	782 Orang	50.050.000	782 Orang	50.050.000	-
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3327 Orang	136.350.000	3327 Orang	136.350.000	-
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1396 Orang	67.800.000	1396 Orang	67.800.000	-
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	33.390.000	0 Orang	33.390.000	-
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2786 Orang	86.400.000	2786 Orang	86.400.000	-
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	140 Orang	17.330.000	140 Orang	17.330.000	-
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang	8.700.000	65 Orang	8.700.000	-
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	459 Orang	6.090.000	459 Orang	6.090.000	-

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	905 Orang	1.500.000	905 Orang	1.500.000	-
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	403.500.000	1 Dokumen	403.500.000	-
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	14.700.000	1 Dokumen	14.700.000	-
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	2.250.000	1 Dokumen	2.250.000	-
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	266.358.000	1 Dokumen	266.358.000	-
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85 Orang	37.245.000	85 Orang	37.245.000	-
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			14.800.000		14.800.000	-
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			14.800.000		14.800.000	-
.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	14.800.000	1 Dokumen	14.800.000	-

#### 14. Puskesmas Pedada

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
	BLUD Puskesmas Pedada			2.482.378.525		2.482.378.525	-
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.482.378.525		2.482.378.525	-
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.482.378.525		2.482.378.525	-
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik		1.296.919.525		1.296.919.525	-
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.296.919.525		1.296.919.525	-
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.296.919.525	1 Unit Kerja	1.296.919.525	-
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		1.031.409.000		1.031.409.000	-



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			13.040.000		13.040.000	-
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	13.040.000	1 Unit	13.040.000	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.018.369.000		1.018.369.000	-
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	320 Orang	55.000.000	320 Orang	55.000.000	-
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	306 Orang	750.000	306 Orang	750.000	-
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	291 Orang	900.000	291 Orang	900.000	-
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1860 Orang	128.500.000	1860 Orang	128.500.000	-
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3323 Orang	36.000.000	3323 Orang	36.000.000	-
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2688 Orang	42.450.000	2688 Orang	42.450.000	-
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1088 Orang	131.880.000	1088 Orang	131.880.000	-
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	31 Orang	7.800.000	31 Orang	7.800.000	-
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	183 Orang	18.750.000	183 Orang	18.750.000	-
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	315.730.000	1 Dokumen	315.730.000	-
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	19.380.000	1 Dokumen	19.380.000	-
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	33.560.000	1 Dokumen	33.560.000	-
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	197.669.000	1 Dokumen	197.669.000	-
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	34 Orang	4.800.000	34 Orang	4.800.000	-
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	15813 Orang	25.200.000	15813 Orang	25.200.000	-

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa siaga aktif		154.050.000		154.050.000	-
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			154.050.000		154.050.000	-
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	154.050.000	1 Dokumen	154.050.000	-

#### 15. Puskesmas Tegineneng

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.984.862.618		2.984.862.618	-
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.984.862.618		2.984.862.618	-
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik		1.790.149.618		1.790.149.618	-
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.790.149.618		1.790.149.618	-
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.790.149.618	1 Unit Kerja	1.790.149.618	-
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		1.194.713.000		1.194.713.000	-
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			13.140.000		13.140.000	-
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	13.140.000	1 Unit	13.140.000	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.181.573.000		1.181.573.000	-
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	597 Orang	120.670.000	597 Orang	120.670.000	-
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	570 Orang	34.700.000	570 Orang	34.700.000	-
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	543 Orang	2.400.000	543 Orang	2.400.000	-
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3469 Orang	119.775.000	3469 Orang	119.775.000	-
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8857 Orang	79.425.000	8857 Orang	79.425.000	-

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5015 Orang	46.780.000	5015 Orang	46.780.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2030 Orang	20.400.000	2030 Orang	20.400.000	-
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	27.900.000	48 Orang	27.900.000	-
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	286 Orang	42.990.000	286 Orang	42.990.000	-
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	236 Orang	-	236 Orang	-	-
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	320.630.000	1 Dokumen	320.630.000	-
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	11.100.000	1 Dokumen	11.100.000	-
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	319.183.000	1 Dokumen	319.183.000	-
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1.800.000	1 Laporan	1.800.000	-
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	286 Orang	28.420.000	286 Orang	28.420.000	-
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	263 Orang	5.400.000	263 Orang	5.400.000	-

#### 16. Puskesmas Maja

10. Puskesmas Maja							
KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
	BLUD Puskesmas Maja			1.909.505.965		1.909.505.965	-
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.909.505.965		1.909.505.965	-
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.909.505.965		1.909.505.965	-

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik		900.964.965		900.964.965	-
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			900.964.965		900.964.965	-
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	900.964.965	1 Unit Kerja	900.964.965	-
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		928.266.000		928.266.000	-
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			11.000.000		11.000.000	-
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	11.000.000	1 Unit	11.000.000	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			917.266.000		917.266.000	-
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	317 Orang	76.350.000	317 Orang	76.350.000	-
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	303 Orang	25.140.000	303 Orang	25.140.000	-
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	288 Orang	1.050.000	288 Orang	1.050.000	-
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1843 Orang	108.600.000	1843 Orang	108.600.000	-
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3293 Orang	42.900.000	3293 Orang	42.900.000	-
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10039 Orang	60.450.000	10039 Orang	60.450.000	-
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1078 Orang	64.620.000	1078 Orang	64.620.000	-
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3290 Orang	9.250.000	3290 Orang	9.250.000	-
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	118 Orang	9.555.000	118 Orang	9.555.000	-
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	27 Orang	3.000.000	27 Orang	3.000.000	-

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	178 Orang	12.900.000	178 Orang	12.900.000	-
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	15672 Dokumen	263.060.000	15672 Dokumen	263.060.000	-
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	11.100.000	12 Dokumen	11.100.000	-
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8.660.000	12 Dokumen	8.660.000	-
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	202.931.000	12 Dokumen	202.931.000	-
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	4.500.000	12 Dokumen	4.500.000	-
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33 Orang	3.600.000	33 Orang	3.600.000	-
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	7908 Orang	9.600.000	7908 Orang	9.600.000	-
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa siaga aktif		80.275.000		80.275.000	-
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			80.275.000		80.275.000	-
.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	80.275.000	12 Dokumen	80.275.000	-

#### 17. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN PERUBAHAN
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
							KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11) 10-5
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
					BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM						
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.293.300.510		7.746.895.458	(546.405.052)
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			108.218.200		104.218.200	(4.000.000)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN PERUBAHAN
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
							KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11) 10-5
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	21.781.000	1 Dokumen	21.781.000	-
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	64.103.200	1 Dokumen	60.103.200	(4.000.000)
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	22.334.000	1 Laporan	22.334.000	-
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.065.697.858		5.065.697.858	-
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	5.042.082.858	14 Bulan	5.042.082.858	-
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	23.615.000	2 Laporan	23.615.000	-
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			73.970.000		73.970.000	-
1	03	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	73.970.000	12 Dokumen	73.970.000	-
1	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			454.990.300		390.990.300	(64.000.000)
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	229.236.300	60 Paket	229.236.300	-
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	27.766.000	7 Paket	27.766.000	-
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	-	(25.000.000)
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	-	(20.000.000)
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43 Laporan	152.988.000	43 Laporan	133.988.000	(19.000.000)
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			180.540.000		37.740.000	(142.800.000)
1	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	8 Unit	142.800.000	2 Unit	-	(142.800.000)
1	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	37.740.000	1 Unit	37.740.000	-
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.125.854.100		1.878.394.100	(247.460.000)
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang Disediakan	2 Laporan	153.000.000	2 Laporan	153.000.000	-
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	206 Laporan	1.972.854.100	206 Laporan	1.725.394.100	(247.460.000)
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			284.030.052		195.885.000	(88.145.052)



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN PERUBAHAN
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
							KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11) 10-5
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	230.780.052	7 Unit	173.885.000	(56.895.052)
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Unit	53.250.000	12 Unit	22.000.000	(31.250.000)
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik		13.032.809.602		12.872.565.602	(160.244.000)
1	03	02	2.01	01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			8.265.512.024		8.149.268.024	(116.244.000)
1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	273.491.878	1 Dokumen	272.131.878	(1.360.000)
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung air lainnya yang di bangun	Unit	-	Unit	-	-
1	3	2	2,01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul sungai yang direhabilitasi	4,14 KM	5.992.020.146	4,14 KM	5.877.311.146	(114.709.000)
1	03	02	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan tebing sungai yang dipelihara	1,3 KM	2.000.000.000	1,3 KM	1.999.825.000	(175.000)
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			4.767.297.578		4.723.297.578	(44.000.000)
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	1,26 KM	2.531.657.000	1,26 KM	2.487.657.000	(44.000.000)
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,00 KM	2.000.000.000	1,00 KM	2.000.000.000	-
1	03	02	2.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	3 Dokumen	235.640.578	3 Dokumen	235.640.578	-
1	03	03			PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum		7.778.300.000		7.054.109.000	(724.191.000)
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			7.778.300.000		7.054.109.000	(724.191.000)
1	03	03		03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	4 Liter/Detik	2.832.450.000	4 Liter/Detik	2.532.450.000	(300.000.000)
1	03	03	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	11 Unit	4.945.850.000	11 Unit	4.521.659.000	(424.191.000)
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi		195.000.000		191.000.000	(4.000.000)
1	03	05	02.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			195.000.000		191.000.000	(4.000.000)

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN PERUBAHAN
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11) 10-5
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang Disusun	1 Dokumen	195.000.000	1 Dokumen	191.000.000	(4.000.000)
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Unit	-	Unit	-	-
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Pemerintahan yang tertata		19.438.599.755		18.597.388.213	(841.211.542)
1	03	08	02.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			19.438.599.755		18.597.388.213	(841.211.542)
1	03	08	02.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungs (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen	249.000.000	1 Dokumen	249.000.000	-
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	17 Dokumen	19.189.599.755	17 Dokumen	18.348.388.213	(841.211.542)
1	03	09	2.01		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani		1.416.706.600		1.328.106.600	(88.600.000)
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			1.416.706.600		1.328.106.600	(88.600.000)
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	-
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	10 Kawasan	1.000.000.000	10 Kawasan	1.000.000.000	-
1	03	09	2.01	06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	416.706.600	1 Dokumen	328.106.600	(88.600.000)
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap		106.038.203.181		100.557.714.775	(5.480.488.406)
1	3	10	2,01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik		106.038.203.181		100.557.714.775	(5.480.488.406)
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	10 Dokumen	879.289.762	10 Dokumen	1.357.590.584	478.300.822
1	3	10	2,01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	3 KM	46.787.477.957	3 KM	41.006.539.729	(5.780.938.228)
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan (DAK)	Panjang Jalan yang dilakukan rekonstruksi Jalan	9,43 KM	21.996.560.000	9,43 KM	21.996.560.000	-
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi	KM	-	KM	-	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN PERUBAHAN
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11) 10-5
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	5 KM	2.000.000.000	5 KM	2.000.000.000	-
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan secara rutin	Km	-	Km	-	-
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	6 Meter	32.224.689.000	6 Meter	32.243.780.000	19.091.000
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Meter	-	Meter	-	-
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Meter	-	Meter	-	-
1	03	10	2.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan Pemeliharaan secara berkala	Meter	-	Meter	-	-
1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	Km	-	Km	-	-
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan penyelenggaraan Jalan/Jembatan	12 Dokumen	2.150.186.462	12 Dokumen	1.953.244.462	(196.942.000)
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi		423.271.500		323.271.500	(100.000.000)
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi yang sesuai kualifikasi		295.047.000		195.047.000	(100.000.000)
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	80 Orang	295.047.000	50 Orang	195.047.000	(100.000.000)
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			128.224.500		128.224.500	-
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha,Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	5 Orang	85.133.300	5 Orang	85.133.300	-
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan	43.091.200	1 Laporan	43.091.200	-
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang		530.000.000		475.140.000	(54.860.000)
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota			327.459.500		272.599.500	(54.860.000)
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	327.459.500	1 Dokumen	272.599.500	(54.860.000)
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/ Kota	Dokumen	-	Dokumen	-	-
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			202.540.500		202.540.500	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN PERUBAHAN
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
							KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11) 10-5
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	1 Dokumen	202.540.500	1 Dokumen	202.540.500	-
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			-		-	-
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Dokumen	-	Dokumen	-	-
TOTAL								157.146.191.148		149.146.191.148	(8.000.000.000)

#### 18. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
							KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1					2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			30.302.772.420,00		30.302.772.420,00	-
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			30.302.772.420,00		30.302.772.420,00	-
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.226.834.120,00		4.293.934.120,00	67.100.000,00
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			47.100.000,00		47.100.000,00	-
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	8.100.000,00	1 dokumen	8.100.000,00	-
1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	-
1	04	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	-
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	11.000.000,00	4 laporan	11.000.000,00	-
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	8.000.000,00	1 laporan	8.000.000,00	-
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.826.434.820,00		2.826.434.820,00	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
							KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1					2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28x14 orang/bulan	2.816.434.820,00	28x14 orang/bulan	2.816.434.820,00	-
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	10.000.000,00	1 laporan	10.000.000,00	-
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			92.900.000,00		113.880.500,00	20.980.500,00
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 paket	28.000.000,00	12 paket	36.920.500,00	8.920.500,00
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	12 paket	26.000.000,00	12 paket	32.670.000,00	6.670.000,00
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	15.000.000,00	12 laporan	20.390.000,00	5.390.000,00
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	23.900.000,00	12 laporan	23.900.000,00	-
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			963.308.000,00		864.207.500,00	(99.100.500,00)
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	26.400.000,00	12 laporan	38.400.000,00	12.000.000,00
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	936.908.000,00	12 laporan	825.807.500,00	(111.100.500,00)
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			297.091.300,00		442.311.300,00	145.220.000,00
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	297.091.300,00	5 unit	292.311.300,00	(4.780.000,00)
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya per tahun	-		1 paket	150.000.000,00	150.000.000,00
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			50.000.000,00		100.000.000,00	50.000.000,00
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			50.000.000,00		100.000.000,00	50.000.000,00
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Jumlah Laporan Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 laporan	50.000.000,00	1 laporan	50.000.000,00	-
2					Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen data rumah di Lokasi Rawan Bencana dan di lokasi			1 laporan	50.000.000,00	50.000.000,00

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
							KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1					2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
						yang berpotensi terkena relokasi Program Kabupaten /Kota					
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			1.709.043.000,00		1.709.043.000,00	-
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			400.000.000,00		400.000.000,00	-
1	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1 laporan	400.000.000,00	1 laporan	400.000.000,00	-
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			1.309.043.000,00		1.309.043.000,00	-
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	2 dokumen	225.000.000,00	2 dokumen	225.000.000,00	-
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	36 unit rumah	1.084.043.000,00	36 unit rumah	1.084.043.000,00	-
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			2.590.920.000,00		2.527.920.000,00	(63.000.000,00)
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			2.590.920.000,00		2.527.920.000,00	(63.000.000,00)
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang diperbaiki	110 unit rumah	2.590.920.000,00	110 unit rumah	2.527.920.000,00	(63.000.000,00)
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			21.725.975.300,00		21.671.875.300,00	(54.100.000,00)
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			21.725.975.300,00		21.671.875.300,00	(54.100.000,00)
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 dokumen	250.000.000,00	1 dokumen	238.000.000,00	(12.000.000,00)
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	110 lokasi	21.475.975.300,00	75 lokasi	21.433.875.300,00	(42.100.000,00)
JUMLAH								30.302.772.420,00		30.302.772.420,00	-



19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100%	14.536.365.590	100%	14.536.365.590	-
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan .....	100%	14.536.365.590	100%	14.536.365.590	-
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.478.124.290		3.512.970.483	34.846.193
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	3.341.884.290	14 Bulan	3.382.250.483	40.366.193
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Waktu Penyediaan Honorarium Jasa Administrasi Keuangan	7 Orang	136.240.000	7 Orang	130.720.000	(5.520.000)
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		45.480.000		80.113.807	34.633.807
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	14.435.000	12 Bulan	18.635.000	4.200.000
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Waktu PenyediaanBarang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	10.285.000	12 Bulan	10.285.000	-
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dab Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	20.760.000	12 Bulan	51.193.807	30.433.807
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		10.574.000.000		10.504.520.000	(69.480.000)
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	18.000.000	-
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (pembayaran gaji dan uang makan anggota SATPOL -PP)	12 Bulan	10.556.000.000	12 Bulan	10.486.520.000	(69.480.000)
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		438.761.300		438.761.300	-
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	438.761.300	12 Bulan	438.761.300	-
JUMLAH				14.536.365.590		14.536.365.590	-

20. Dinas Sosial

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10-5
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.390.100.344		3.350.100.344	(40.000.000)
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			3.390.100.344		3.350.100.344	(40.000.000)
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase LKS dan PSKS yang berperan aktif dalam penanganan PMKS		3.145.150.344		3.145.150.344	-
1.06 .01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.731.669.044		2.737.729.044	6.060.000
1.06 .01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang x 14 Bulan	2.613.219.044	22 orang x 14 Bulan	2.613.219.044	-
1.06 .01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Orang	118.450.000	28 Orang	124.510.000	6.060.000
1.06 .01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		199.000.000		192.940.000	(6.060.000)
1.06 .01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	23.940.000	(6.060.000)
1.06 .01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	169.000.000	13 Laporan	169.000.000	-
1.06 .01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		214.481.300		214.481.300	
1.06 .01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit x 12 bulan	214.481.300	7 unit x 12 bulan	214.481.300	-
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase LKS dan PSKS yang berperan aktif dalam penanganan PMKS		230.000.000		190.000.000	(40.000.000)
1.06 .02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase wahana kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat (WKBSM) / lembaga kesejahteraan sosial		230.000.000		190.000.000	(40.000.000)
1.06 .02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	110.000.000	5 Lembaga	70.000.000	(40.000.000)
1.06 .02.2.03.05	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	jumlah karang taruna peserta lomba desa dan bulan bakti karang taruna dan Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	120.000.000	1 Lembaga	120.000.000	-
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	cakupan penanganan korban bencana alam/Bencana Sosial		14.950.000		14.950.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10-5
1.06 .06.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanggulangan masalah - masalah yang menyangkut tanggap cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa (KLB)		14.950.000		14.950.000	
1.06 .06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Kejadian	14.950.000	8 Kejadian	14.950.000	
JUMLAH				3.390.100.344		3.350.100.344	(40.000.000)

## 21. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

21. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah							
KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	100%	3.276.809.226	100%	3.263.159.226	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.787.737.926	100%	2.782.087.926	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	2.582.697.926	14 Bulan	2.582.697.926	-
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium Tenaga Kontrak dan Pejabat Penatausahaan Keuangan yang terbayar	3 Dokumen	205.040.000	22 Orang	199.390.000	(5.650.000)
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	54.140.000	100%	54.140.000	-
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	1 Paket	11.889.400	12 Bulan	11.889.400	-
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	1 Paket	7.663.600	12 Bulan	7.663.600	-
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rakor Konsultasi dan Koordinasi yang dilaksanakan	15 Laporan	34.587.000	12 Bulan	34.587.000	-
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	255.000.000	100%	247.000.000	(8.000.000)
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Langganan jasa listrik, tv dan telpon yang dibayar	1 Laporan	21.000.000	12 Bulan	13.000.000	(8.000.000)
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium Tenaga Kontrak yang terbayar	1 Laporan	234.000.000	18 Orang	234.000.000	-

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100%	179.931.300	100%	179.931.300	-
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 yang terpelihara	7 Unit	179.931.300	3 Unit	179.931.300	-
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang dilatih	83,29%	457.770.000	83,29%	457.770.000	-
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	100%	457.770.000	100%	457.770.000	-
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pendampingan dan Penyuluhan Perkoperasian	3 Kali	457.770.000	3 Kali	457.770.000	-
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Cakupan sistem pendukung usaha koperasi terhadap koperasi	100%	145.000.000	100%	118.650.000	(26.350.000)
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi	100%	145.000.000	100%	118.650.000	(26.350.000)
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang meningkat penguatan kelembagaan melalui pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi	10 Koperasi	145.000.000	2 Koperasi	118.650.000	(26.350.000)
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cakupan Jumlah UMKM yang mendapat Sapras	100%	212.520.000	100%	212.520.000	-
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase jumlah usaha kecil yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	100%	212.520.000	100%	212.520.000	-
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	11 Kelompok	212.520.000	11 Kelompok	212.520.000	-
JUMLAH				4.092.099.226		4.052.099.226	(40.000.000)

22. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN	
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023			PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023			
							KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA			ANGGARAN (Rp)
1					2	3	4		5	9		10	11 = 10 - 5
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.118.177.800			1.102.777.800	(15.400.000)
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	34,10%		390.400.000			375.000.000	(15.400.000)
2	8	2	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	8	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	15.400.000	1	Dokumen	-	(15.400.000)
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Dokumen	175.000.000	4	Dokumen	175.000.000	-
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	120	Orang	200.000.000	120	Orang	200.000.000	-
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas	100,00%		376.204.000			376.204.000	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN		
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023				
							KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)			
1					2	3	4		5	9	10	11 = 10 - 5	
						terlatih di dalam unit pelayanan terpadu							
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	9	Dokumen	109.700.000	9	Dokumen	109.700.000	-
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	8	3	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	12	Orang	12.000.000	12	Orang	12.000.000	-
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Layanan	254.504.000	12	Layanan	254.504.000	-
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga pada Kelompok Usaha perempuan dan keluarga TKI	56,00%		138.756.800			138.756.800	-
2	8	4	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2	8	4	2.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Dokumen	138.756.800	3	Dokumen	138.756.800	-
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kecamatan yang telah membentuk forum anak dan berperan aktif	100,00%		138.221.000			138.221.000	-
2	8	6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023			PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023			
							KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	
1					2	3	4		5	9		10	11 = 10 - 5
2	8	6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	50	Organisasi	20.000.000	50	Organisasi	20.000.000	-
2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	8	6	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Orang	75.000.000	60	Orang	75.000.000	-
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dokumen	43.221.000	2	Dokumen	43.221.000	-
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase cakupan pelayanan pada anak yang memerlukan perlindungan khusus	100,00%		74.596.000	100,00%		74.596.000	-
2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2	8	7	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	74.596.000	2	Dokumen	74.596.000	-
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				12.169.688.090			12.085.088.090	(84.600.000)
2	14	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%		3.970.841.090			3.970.841.090	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN 11 = 10 - 5
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023			PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023			
							KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	
1					2	3	4		5	9		10	
2	14	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2	14	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	orang/bulan	3.062.059.790	27	orang/bulan	3.062.059.790	-
2	14	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	156.400.000	12	Dokumen	156.400.000	-
2	14	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-
2	14	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	6.000.000	12	Laporan	6.000.000	-
2	14	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	390.000.000	12	Laporan	390.000.000	-
2	14	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2	14	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	Unit	301.381.300	21	Unit	301.381.300	-
2	14	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	55.000.000	3	Unit	55.000.000	-
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Cakupan wilayah binaan keluarga berencana	85,00%		7.122.907.000			7.122.907.000	-
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								
2	14	3	2.02	2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	11	Unit	5.037.355.000	11	Unit	5.037.355.000	-
2	14	3	2.02	3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	11	Laporan	182.857.000	11	Laporan	182.857.000	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023			PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023			
							KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	
1					2	3	4		5	9		10	11 = 10 - 5
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1047	orang	1.000.000.000	1047	orang	1.000.000.000	-
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1600	orang	300.000.000	1600	orang	300.000.000	-
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11	Laporan	150.000.000	11	Laporan	150.000.000	-
2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								
2	14	3	2.04	1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2	Organisasi	257.695.000	2	Organisasi	257.695.000	-
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	22	Kampung	195.000.000	22	Kampung	195.000.000	-
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R,dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKA	52,31%		1.075.940.000			991.340.000	(84.600.000)
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023			PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023			
							KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)	
1					2	3	4		5	9		10	11 = 10 - 5
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	22	unit	161.000.000	22	unit	161.000.000	-
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	655	Orang	300.000.000	655	Orang	254.684.200	(45.315.800)
2	14	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	11	Laporan	519.940.000	11	Laporan	480.655.800	(39.284.200)
2	14	4	2.01	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	11	Laporan	95.000.000	11	Laporan	95.000.000	-
JUMLAH									13.287.865.890			13.187.865.890	(100.000.000)

### 23. Dinas Ketahanan Pangan

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN / PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ (KELUARN)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11=10-5
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			Rp 3.371.004.276		Rp 3.341.004.276	Rp (30.000.000)
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Penerapan Kepatuhan pelayanan Publik	100%	Rp 3.011.004.276	100%	Rp 3.011.004.276	Rp -
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Laporan Keuangan, Hasil Kegiatan dan Pertanggungjawaban OPD		Rp 2.626.004.276		Rp 2.626.004.276	Rp -

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN / PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ (KELUARN)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11=10-5
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	Rp 2.491.004.276	22 orang/bulan	Rp 2.491.004.276	Rp -
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 135.000.000	12 Dokumen	Rp 135.000.000	Rp -
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan SKPD	100%	Rp 205.000.000	100%	Rp 205.000.000	Rp -
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa, Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp 10.000.000	12 laporan	Rp 10.000.000	Rp -
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp 195.000.000	12 laporan	Rp 195.000.000	Rp -
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 180.000.000	100%	Rp 180.000.000	Rp -
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit	Rp 180.000.000	9 unit	Rp 180.000.000	Rp -
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam bergizi dan berimbang		Rp 360.000.000		Rp 330.000.000	Rp (30.000.000)
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Meningkatnya Stabilisasi Penyaluran dan Harga Pangan Pokok Sesuai Kebutuhan	100%	Rp 360.000.000	100%	Rp 330.000.000	Rp (30.000.000)
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	2 Laporan	Rp 230.000.000	2 Laporan	Rp 200.000.000	Rp (30.000.000)
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal )*	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	Rp 130.000.000	2 Laporan	Rp 130.000.000	Rp -
JUMLAH				Rp 3.371.004.276		Rp 3.371.004.276	Rp -

#### 24. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2.10.04	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN						
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TANAH GARAPAN	Peningkatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%	25.000.000	100%	25.000.000	-
2.10.04.2.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Kabupaten/Kota	4 Berita acara	25.000.000	4 Berita acara	25.000.000	-

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
2.10.04.2.01.02	Sub Kegiatan Mediasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah ganti kerugian dan santuunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Berita acara	25.000.000	4 Berita acara	25.000.000	-
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	3.732.564.564	100%	3.719.564.564	(13.000.000)
2.11.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	-
2.11.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.000.000	-
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.755.903.264	100%	2.755.903.264	-
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/perbulan	2.563.323.264	25 orang/perbulan	2.563.323.264	-
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	187.580.000	12 Dokumen	187.580.000	-
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	-
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	49.112.000	100%	49.112.000	-
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	7.126.000	12 paket	7.126.000	-
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	41.986.000	12 Laporan	41.986.000	-
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	478.158.000	100%	465.158.000	(13.000.000)
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.600.000	12 Laporan	18.600.000	-
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peratalatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peratalatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	31.558.000	12 Laporan	31.558.000	-
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	428.000.000	12 Laporan	415.000.000	(13.000.000)
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	444.391.300	100%	444.391.300	-
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenadraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	444.391.300	15 unit	444.391.300	-
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNNGAN HIDUP						
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	466.254.000	100%	436.754.000	(29.500.000)
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			2 Dokumen	-	-
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			2 Dokumen	-	-



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	466.254.000	2 Dokumen	436.754.000	(29.500.000)
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	466.254.000	2 Dokumen	436.754.000	(29.500.000)
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	100%	274.250.000	100%	274.250.000	-
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	10 ha	274.250.000	10 ha	274.250.000	-
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka hijau	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10 ha	274.250.000	10 ha	274.250.000	-
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100%	15.000.000	100%	15.000.000	-
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	-
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	-
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	MENINGKATNYA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	100%	841.000.000	100%	833.500.000	(7.500.000)
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pengelolaan Persampahan	12 Dokumen	841.000.000	12 Dokumen	833.500.000	(7.500.000)
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkornisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	12 Dokumen	841.000.000	12 Dokumen	841.000.000	-
JUMLAH				5.354.068.564		5.304.068.564	(50.000.000)

## 25. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.981.642.984		3.931.642.984	50.000.000
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			3.981.642.984		3.931.642.984	50.000.000

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
2 12 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.981.642.984		3.931.642.984	50.000.000
2 12 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.342.111.684		2.342.111.684	-
2 12 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12laporan	2.245.791.684	12laporan	2.245.791.684	-
2 12 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12laporan	96.320.000	12laporan	96.320.000	-
2 12 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			362.240.000		317.240.000	45.000.000
2 12 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	242.228.000	100%	231.116.000	11.112.000
2 12 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	120.012.000	100%	86.124.000	33.888.000
2 12 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	-
2 12 1 2.07.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor			14unit		-
2 12 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			999.000.000		994.000.000	5.000.000
2 12 1 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12laporan	60.000.000	12laporan	55.000.000	5.000.000
2 12 1 2.08 04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan pembayaran gaji THLS	12laporan	939.000.000	12laporan	939.000.000	-
2 12 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			278.291.300		278.291.300	-
2 12 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	278.291.300	100%	278.291.300	-
JUMLAH				3.981.642.984		3.931.642.984	50.000.000

## 26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
2.13.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	100%	Rp 3.206.781.598	100%	Rp 3.206.781.598	Rp -
2.13.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	Rp 2.715.880.298	100%	Rp 2.715.880.298	Rp -
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Rp 2.559.560.898	100%	Rp 2.559.560.898	Rp -

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
2.13.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	Rp 156.319.400	100%	Rp 156.319.400	Rp -
2.13.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas layanan jasa penunjang perkantoran	100%	Rp 277.000.000	100%	Rp 277.000.000	Rp -
2.13.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	Rp 18.000.000	100%	Rp 18.000.000	Rp -
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	Rp 259.000.000	100%	Rp 259.000.000	Rp -
2.13.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang perkantoran	100%	Rp 213.901.300	100%	Rp 213.901.300	Rp -
2.13.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	Rp 193.901.300	100%	Rp 193.901.300	Rp -
2.13.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	Rp 20.000.000	100%	Rp 20.000.000	Rp -
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Standar	100%	Rp 1.477.433.600	100%	Rp 1.477.433.600	Rp -
2.13.04.2.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Percepatan Pembangunan Desa Berbasis Kemasyarakatan	100%	Rp 1.477.433.600	100%	Rp 1.477.433.600	Rp -
2.13.04.2.01.01.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	Rp 55.000.000	100%	Rp 55.000.000	Rp -
2.13.04.2.01.12.	Sub Kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	100%	Rp 1.382.433.600	100%	Rp 1.382.433.600	Rp -
2.13.04.2.01.14.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 1	100%	Rp 40.000.000	100%	Rp 40.000.000	Rp -
JUMLAH				Rp 4.684.215.198		Rp 4.684.215.198	Rp -

## 27. Dinas Perhubungan

KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN		
								TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023			PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023					
								KINERJA		ANGGARAN (Rp)	KINERJA		ANGGARAN (Rp)			
1						2	3		4		5		9		10	11 = 10 - 5
2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	%	8.775.772.120	100	%	8.796.290.520		20.518.400	
2	15	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Keuangan	100	%	2.701.830.820	100	%	2.701.830.820		-	
2	15	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350	orang	2.510.884.220	350	orang	2.510.884.220		-	
2	15	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	190.946.600	12	dokumen	190.946.600		-	
2	15	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	%	-	100	%	16.000.000		16.000.000	
2	15	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	paket	-	4	paket	4.000.000		4.000.000	

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN		
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023				
							KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)			
1					2	3	4		5		9	10	11 = 10 - 5
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	paket	-	4	paket	12.000.000	12.000.000
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa yang Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat	100	%	5.677.960.000	100	%	5.677.960.000	-
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	4.754.960.000	12	laporan	4.754.960.000	-
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	923.000.000	12	laporan	923.000.000	-
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang Dipelihara	100	%	395.981.300	100	%	400.499.700	4.518.400
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	156	unit	395.981.300	156	unit	395.981.300	-
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	0	unit	-	-
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	-	1	unit	4.518.400	4.518.400
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas	100	%	190.000.000	100	%	198.640.000	8.640.000
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Terpasangnya Perlengkapan Lalu Lintas Jalan dan Pemeliharaannya yang ada di Kabupaten	100	%	60.000.000	100	%	60.000.000	-
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	43	unit	60.000.000	43	unit	60.000.000	-
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100	%	130.000.000	100	%	138.640.000	8.640.000
2	15	03	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	1	laporan	8.640.000	8.640.000
2	15	03	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2	paket	130.000.000	2	paket	130.000.000	-
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase orang/barang melalui dermaga per tahun	100	%	217.000.000	100	%	162.841.600	-54.158.400
2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Tersedianya Alur Penyeberangan Rakyat	100	%	207.000.000	100	%	152.841.600	-54.158.400
2	15	03	2.07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasioan untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupten/ Kota	12	laporan	207.000.000	12	laporan	152.841.600	-54.158.400

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN		
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023				
							KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)			
1					2	3	4		5	9	10	11 = 10 - 5	
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpanan Lokal	Presentase Pelaksanaan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpanan Lokal	100	%	10.000.000	`100	%	10.000.000	-
2	15	03	2.12	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpanan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpanan Lokal	1	dokumen	10.000.000	1	dokumen	10.000.000	-
JUMLAH									9.182.772.120			9.157.772.120	25.000.000

## 28. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
							KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1					2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
2	16	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	4.880.936.130	100%	4.853.436.130	-
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-	-
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	-	5 Dokumen	-	-
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.852.742.830		3.852.742.830	-
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/bulan	3.193.222.830	65 orang/bulan	3.193.222.830	-
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terkelolanya administrasi pelaksanaan tugas ASN	55 Dokumen	659.520.000	55 Dokumen	659.520.000	-
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			760.662.000		760.662.000	-
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Berfungsinya listrik dan/ penerangan bangunan kantor	10 Paket	-	10 Paket	-	-
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya ATK dinas	50 Paket	5.000.000	50 Paket	5.000.000	-
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih	20 Paket	-	20 Paket	-	-
2	16	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya makan minum kantor dan tamu	8 Paket	-	8 Paket	-	-
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan Penggandaan	15 Paket	1.998.000	15 Paket	1.998.000	-
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi antar instansi	30 Laporan	53.664.000	30 Laporan	53.664.000	-

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
							KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1					2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
2	16	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terselenggaranya SPBE	1 Dokumen	700.000.000	1 Dokumen	700.000.000	-
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang		42.000.000		42.000.000	-
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya listrik kantor	1 Laporan	42.000.000	1 Laporan	42.000.000	-
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dinas		225.531.300		198.031.300	(27.500.000)
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya operasional kendaraan dinas	4 Unit	225.531.300	4 Unit	198.031.300	(27.500.000)
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	1 Unit	-	1 Unit	-	-
2	16	02			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	5.098.720.350	100%	5.076.220.350	22.500.000
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya keterbukaan informasi publik		5.098.720.350		5.076.220.350	22.500.000
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Tatakelola Informasi Publik	1 Dokumen	78.332.000	1 Dokumen	78.332.000	-
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	60 Dokumen 600 konten	399.220.000	60 Dokumen 600 konten	399.220.000	-
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi publik	Terlaksananya tata kelola Informasi Publik	1 Dokumen	63.448.000	1 Dokumen	40.948.000	(22.500.000)
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Terlaksananya Tatakelola Informasi publik	420 Layanan	4.557.720.350	420 Layanan	4.557.720.350	-
2	16	03			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	100%	2.407.674.100	100%	2.407.674.100	-
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan tentang Pengelolaan Nama Domain Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkungan Pemerintah Daerah		2.175.612.100		2.175.612.100	-
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggara Pemerintah Daerah	57 Dokumen	66.279.650	57 Dokumen	66.279.650	-
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	46 Sistem	2.109.332.450	46 Sistem	2.109.332.450	-
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan e-Government yang Terintegrasi		232.062.000		232.062.000	-
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	169.000.000	1 Dokumen	169.000.000	-
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Terlaksananya tata kelola SPBE	1 Dokumen	44.062.000	1 Dokumen	44.062.000	-
2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya SPBE sesuai dengan rencana induk SPBE	1 Dokumen	19.000.000	1 Dokumen	19.000.000	-



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
							KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1					2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Membangun basis data daerah yang terpadu dan valid untuk kepentingan perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan, dan informasi pembangunan	100%	143.000.000	100%	143.000.000	-
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kuantitas dan kualitas data Statistik Sektoral		143.000.000		143.000.000	-
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000	-
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000	-
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	2 orang	48.000.000	2 orang	48.000.000	-
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Pengamanan Layanan Informasi	100%	19.276.000	100%	19.276.000	-
2	21	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		19.276.000		19.276.000	-
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non elektronik	Terlaksananya tata kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	19.276.000	1 Laporan	19.276.000	-
JUMLAH								12.549.606.580		12.499.606.580	(50.000.000)

## 29. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik					
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Keuangan					
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan	19 org/bln	2.467.419.748	19 org/bln	2.467.419.748	
2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	18 Dokumen	201.885.000	9 dokumen	201.885.000	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran					

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	33.757.500	3.757.500
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja	5 Dokumen	10.000.000	5 Dokumen	10.000.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran					
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16 paket	12.475.400	20 Paket	15.475.400	3.000.000
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	40 paket	34.726.800	42 Paket	37.627.700	2.900.900
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga	28 paket	17.785.400	30 Paket	20.785.400	3.000.000
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	11 paket	21.685.000	12 Paket	22.685.000	1.000.000
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	200 dokumen	25.000.000	195 Dokumen	22.800.000	(2.200.000)
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	127 laporan	123.537.000	128 laporan	129.682.000	6.145.000
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah					
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin	6 Unit	35.184.000	8 Unit	61.419.500	26.235.500
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	5 unit	106.000.000	4 unit	91.000.000	(15.000.000)
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	2 unit	10.475.000	2 unit	10.475.000	-
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran					
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 laporan	72.600.000	2 laporan	60.600.000	(12.000.000)
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	20 laporan	260.000.000	20 laporan	255.000.000	(5.000.000)
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah					
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	3 unit	238.500.000	3 unit	238.500.000	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	185.000.000	4 paket/1 unit	276.000.000	91.000.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Jutaan rupiah)					
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha	2 kegiatan usaha	111.440.000	2 kegiatan usaha	42.403.000	(69.037.000)

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tercapainya Nilai Investasi Tercapainya Pembuatan Peta Potensi					
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota	15 dokumen	445.085.000	15 dokumen	345.684.000	(99.401.000)
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan peningkatan jumlah investor					
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tercapainya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan					
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	473 Pelaku Usaha	73.945.000	473 Pelaku Usaha	73.945.000	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelakuk usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	473 Pelaku Usaha	86.015.900	473 Pelaku Usaha	81.615.000	(4.400.900)
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	7 orang	50.022.500	7 orang	50.022.500	
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Junmklah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	126 kegiatan usaha	50.431.000	126 kegiatan usaha	50.431.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP					
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Tercapainya Pengendalian Penanaman Modal					
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	20 kegiatan usaha	47.267.000	20 kegiatan usaha	17.267.000	(30.000.000)
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	210 pelaku usaha	295.250.000	210 pelaku usaha	295.250.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	40 kegiatan usaha	153.450.000	40 kegiatan usaha	153.450.000	
J U M L A H				5.165.179.748		5.065.179.748	(100.000.000)

30. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (KELUARAN)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (RP)	KINERJA	ANGGARAN (RP)	
2,19	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			4.589.136.430	-	5.438.636.430	849.500.000
2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.534.136.430	-	2.534.136.430	-
2 19 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.120.595.630	-	2.116.275.630	- 4.320.000
2 19 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	2.006.395.630		2.006.395.630	-
2 19 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 dokumen	114.200.000		109.880.000	- 4.320.000
2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.089.500	-	27.979.800	24.890.300
2 19 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 jenis	3.089.500		10.479.800	7.390.300
2 19 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4 jenis	2.500.000	2.500.000
2 19 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3 jenis	6.000.000	6.000.000
2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3 jenis	6.000.000	6.000.000
2 19 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan			4 exemplar	3.000.000	3.000.000
2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			198.400.000	-	181.900.000	- 16.500.000
2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	16.400.000		13.900.000	- 2.500.000
2 19 01 2.08 04	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	182 orang	182.000.000		168.000.000	- 14.000.000
2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			212.051.300	-	207.981.000	- 4.070.300
2 19 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	182.051.300		177.981.000	- 4.070.300
2 19 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	30.000.000		30.000.000	-
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			670.000.000	-	670.000.000	-
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			300.000.000	-	300.000.000	-
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terlaksananya Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	70 orang	300.000.000		300.000.000	-
2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			370.000.000	-	370.000.000	-
2 19 02 2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	3 organisasi	370.000.000		370.000.000	-
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			1.385.000.000	-	2.234.500.000	849.500.000

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (KELUARAN)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM)/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (RP)	KINERJA	ANGGARAN (RP)	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000	-	25.000.000	-
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1 organisasi	25.000.000		25.000.000	-
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.280.000.000	-	2.129.500.000	849.500.000
2 19 03 2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3 event	1.280.000.000		2.129.500.000	849.500.000
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			80.000.000	-	80.000.000	-
2 19 03 2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 organisasi	80.000.000		80.000.000	-

### 31. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.924.746.450	100%	14.824.746.450	(100.000.000,00)
2.23.01.2.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			2.885.288.450	100%	2.822.768.450	(62.520.000,00)
2.23.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.558.917.150	100%	2.535.317.150	(23.600.000,00)
2.23.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	2.143.337.150	100%	2.143.337.150	-
2.23.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	415.580.000	100%	391.980.000	(23.600.000,00)
2.23.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			71.790.000	100%	38.070.000	(33.720.000,00)
2.23.01.2.06.02.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	5.630.000	100%	5.630.000	-
2.23.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	66.160.000	100%	32.440.000	(33.720.000,00)
2.23.01.2.07.	Pengadaan Barang Mili Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			75.000.000	100%	75.000.000	-
2.23.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	75.000.000	100%	75.000.000	-
2.23.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.000.000	100%	6.000.000	-
2.23.01.2.08.02.	Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	6.000.000	100%	6.000.000	-
2.23.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			173.581.300	100%	168.381.300	(5.200.000,00)
2.23.01.2.09.01.5.1.02.02.04.0035	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	107.631.300	100%	107.631.300	-
2.23.01.2.09.01.5.1.02.03.02.0035	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	65.950.000	100%	60.750.000	(5.200.000,00)
2.23.02.	Program Pembinaan Perpustakaan			11.736.458.000	100%	11.698.978.000	(37.480.000,00)
2.23.02.2.01.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.109.998.000	100%	1.109.998.000	-

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
2.23.02.2.01.01.	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Meningkatnya Jumlah TIK	100%	300.000.000	100%	300.000.000	-
2.23.02.2.01.02.	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah perabot gedung perpustakaan	100%	500.000.000	100%	500.000.000	-
2.23.02.2.01.04.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Meningkatnya pelayanan pengelolaan perpustakaan desa dan sekolah	100%	70.000.000	100%	70.000.000	-
2.23.02.2.01.09.	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Meningkatnya jumlah buku yang terkelola dan Meningkatnya jumlah koleksi buku perpustakaan	100%	239.998.000	100%	239.998.000	-
2.23.02.2.02.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah kabupaten/Kota			10.626.460.000	100%	10.588.980.000	(37.480.000,00)
2.23.02.2.02.01.	Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Meningkatnya budaya gemar membaca	100%	200.000.000	100%	200.000.000	-
2.23.02.2.02.02.	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas perpustakaan kab/kota	100%	10.426.460.000	100%	10.388.980.000	(37.480.000,00)
2.24.02.	Program Pengelolaan Arsip			303.000.000	100%	303.000.000	-
2.24.02.2.01.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			60.000.000	100%	60.000.000	-
2.24.02.2.01.02.	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	Meningkatnya pelayanan perzinan dan non perzinan	100%	60.000.000	100%	60.000.000	-
2.24.02.2.02.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			52.000.000	100%	52.000.000	-
2.24.02.2.02.02.	Akuisisi, pengolahan, preservasi,dan akses arsip statis	Meningkatnya OPD penghimpun dan pemelihara arsip statis	100%	52.000.000	100%	52.000.000	-
2.24.02.2.03.	Pengelolaan Simpul Jarigan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			191.000.000	100%	191.000.000	-
2.24.02.2.03.01.	Penyediaan informasi akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota	Meningkatnya pengelolaan arsip dan pengembangan website	100%	31.000.000	100%	31.000.000	-
2.24.02.2.03.01.	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah/kota	Meningkatnya SDM yang memahami tentang arsip	100%	160.000.000	100%	160.000.000	-
Total				14.924.746.450	100%	14.824.746.450	(100.000.000,00)

### 32. Dinas Perikanan

KODE REKENING	URAIAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRSM (OUT COME)/ KEGIATAN (KELUARAN)/ SUB KEG (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM/ KEG/ SUB KEG/ TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (RP)	KINERJA	ANGGARAN (RP)	
1	2	3	4	5	9	10	11=10-5
3	Urusan Pemerintahan Pilihan						
3,25	Urusan PemerintahanBidang Kelautan dan Perikanan			3.668.333.772		3.658.333.772	(10.000.000)
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	100%	3.403.333.772	100%	3.403.333.772	-
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.882.833.772		2.882.833.772	-
2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Bulan	2.676.523.772	13 Bulan	2.676.523.772	-



KODE REKENING	URAIAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRSM (OUT COME)/ KEGIATAN (KELUARAN)/ SUB KEG (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
				TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM/ KEG/ SUB KEG/ TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
				KINERJA	ANGGARAN (RP)	KINERJA	ANGGARAN (RP)	
1	2		3	4	5	9	10	11=10-5
2.02.03		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40 Dokumen	206.310.000	40 Dokumen	206.310.000	-
3.25.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		278.000.000		278.000.000	-
2.08.02		Penyediaan Jasa Komuniasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	18.000.000	-
2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Bulan	260.000.000	13 Bulan	260.000.000	-
3.25.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		242.500.000		242.500.000	-
2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	217.500.000	8 Unit	217.500.000	-
2.09.07		Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan 55 Per Bungkus	25.000.000	12 Bulan 55 Per Bungkus	25.000.000	-
3.25.03		PROGRAM PENGELOLAANPERINGKINAN TANGKAP	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	60,14%	125.000.000	60,14%	125.000.000	-
3.25.03.2.02.01		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah kabupaten/ kota	Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		125.000.000		125.000.000	-
2.02.01		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	500 Orang	105.000.000	500 Orang	105.000.000	-
2.02.02		Pelaksanaan Kapasitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Kelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	20.000.000	10 Kelompok	20.000.000	-
3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan	79,44%	30.000.000	79,44%	30.000.000	-
3.25.04.2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	30.000.000	-	30.000.000	-
2.02.02		Pelayana Penerbitan Izin Usaha Perikan Bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya. Lokasi , dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota yang menggunakan teknologi sedeehana, semi intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan/ atau tenaga kerja asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	30 Rekomendasi	30.000.000	30 Rekomendasi	30.000.000	-
3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan	100%	110.000.000	100%	100.000.000	(10.000.000)
3.25.06.2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		110.000.000		100.000.000	(10.000.000)
2.03.01		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21,76 Ton	110.000.000	21,76 Ton	100.000.000	(10.000.000)

33. Dinas Pariwisata

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023	PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023			
1	2	3	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
3	Urusan Pemerintahan Pilihan		4	5	9	10	11 = 10 - 5
3.26	Bidang Urusan Pariwisata			Rp 4.990.254.770		Rp 4.990.254.770	-
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	100%	Rp 3.514.037.770	100%	Rp 3.514.037.770	-
3.26.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Rp 2.905.837.770	100%	Rp 2.905.837.770	-
3.26.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang / 14 Bulan	Rp 2.704.307.770	21 Orang / 14 Bulan	Rp 2.704.307.770	-
3.26.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 201.530.000	12 Dokumen	Rp 201.530.000	-
3.26.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 408.200.000	100%	Rp 408.200.000	-
3.26.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 33.600.000	12 Laporan	Rp 33.600.000	-
3.26.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 374.600.000	12 Laporan	Rp 374.600.000	-
3.26.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 200.000.000	100%	Rp 200.000.000	-
3.26.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Rp 200.000.000	3 Unit	Rp 200.000.000	-
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	100%	Rp 705.457.000	100%	Rp 705.457.000	-
3.26.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Terlaksananya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100%	Rp 705.457.000	100%	Rp 705.457.000	-
3.26.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	Rp 705.457.000	1 Lokasi	Rp 705.457.000	-
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatan Daya Saing Pariwisata	100%	Rp 350.000.000	100%	Rp 350.000.000	-
3.26.03.2.01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	100%	Rp 350.000.000	100%	Rp 350.000.000	-
3.26.03.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Laporan	Rp 350.000.000	1 Laporan	Rp 350.000.000	-
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	Rp 420.760.000	100%	Rp 420.760.000	-
3.26.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100%	Rp 420.760.000	100%	Rp 420.760.000	-
3.26.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan Kompetensinya	60 Orang	Rp 420.760.000	100 Orang	Rp 420.760.000	-

34. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
3	Urusan Pilihan						
3.27	Bidang Urusan Pertanian						
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	100%	11.587.607.666	100%	11.431.242.166	(156.365.500)
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 Dokumen	10.000.000	50 Dokumen	10.000.000	0
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	0
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13 Paket	9.479.324.866	13 Paket	9.434.674.866	(44.650.000)
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13 Paket	9.209.944.866	14 Paket	9.209.944.866	0
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	259.380.000	12 Dokumen	214.730.000	(44.650.000)
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000	0
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Paket	471.742.800	12 Paket	375.027.300	(96.715.500)
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.530.000	1 Paket	4.530.000	0
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	53.642.500	3 Paket	46.835.000	(6.807.500)
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	0
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	49.740.000	11 Paket	39.012.000	(10.728.000)
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	78.842.300	12 Paket	48.054.300	(30.788.000)
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan	-	-	96 Dokumen	9.600.000	9.600.000
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Paket	119.988.000	12 Paket	61.996.000	(57.992.000)
3.27.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 Dokumen	150.000.000	30 Dokumen	150.000.000	0
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13 Paket	1.336.000.000	13 Paket	1.321.000.000	(15.000.000)
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000	12 Laporan	21.000.000	(15.000.000)

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.300.000.000	12 Laporan	1.300.000.000	0
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Unit	290.540.000	10 Unit	290.540.000	0
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	290.540.000	9 Unit	290.540.000	0
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	100%	284.124.000	100%	267.974.000	(16.150.000)
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4 Laporan	74.094.000	4 Laporan	74.094.000	0
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	0 Laporan	74.094.000	4 Laporan	74.094.000	0
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4 Laporan				
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	210.030.000	4 Dokumen	193.880.000	(16.150.000)
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	210.030.000	4 Dokumen	193.880.000	(16.150.000)
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian	100%	3.301.967.000	100%	3.038.672.500	(263.294.500)
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	75 Unit	3.301.967.000	75 Unit	3.038.672.500	(263.294.500)
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	5 Unit	732.253.200	8 Unit	905.390.700	173.137.500
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	133.042.000	1 Unit	133.042.000	0
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	709.642.000	8 Unit	769.960.000	60.318.000
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	165.543.800	1 Unit	165.543.800	0
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1.561.486.000	1 Unit	1.064.736.000	(496.750.000)
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	5.56 Ton/Ha	139.572.000	5.56 Ton/Ha	134.572.000	(5.000.000)
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten /Kota	3 Laporan	139.572.000	3 Laporan	134.572.000	(5.000.000)

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	10000 Ha	139.572.000	10000 Ha	134.572.000	(5.000.000)
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan Kemampuan Penyuluhan	100%	1.910.864.200	100%	1.851.674.200	(59.190.000)
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	4 Unit	1.910.864.200	4 Unit	1.851.674.200	(59.190.000)
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	11 Unit	973.750.000	11 Unit	928.310.000	(45.440.000)
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	11 Unit	748.212.100	11 Unit	748.212.100	0
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	11 Unit	99.902.100	11 Unit	86.152.100	(13.750.000)
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Tani Tingkat Kabupaten/Kota	11 Unit	89.000.000	11 Unit	89.000.000	0
JUMLAH				17.224.134.866		16.724.134.866	(500.000.000)

### 35. Dinas Perkebunan dan Peternakan

Cat. Dinas Perkebunan dan Peternakan							
KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	4	10	11 = 10 - 5
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4.844.530.208	100%	4.824.530.208	(20.000.000)
3 27 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	4.268.200.708	100%	4.246.640.708	(21.560.000)
3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	4.067.520.708	14 bulan	4.067.520.708	-
3 27 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 bulan	200.680.000	12 bulan	179.120.000	(21.560.000)
3 27 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran	100%		100%	64.430.000	
3 27 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan		12 bulan	64.430.000	64.430.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	4	10	11 = 10 - 5
3 27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang perkantoran	100%	337.800.000	100%	313.600.000	(24.200.000)
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik	12 bulan	36.000.000	12 bulan	18.000.000	(18.000.000)
3 27 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pelayanan umum	13 bulan	301.800.000	13 bulan	295.600.000	(6.200.000)
3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perkantoran	100%	238.529.500	100%	199.859.500	(38.670.000)
3 27 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya BBM dan pelumas kendaraan dinas/operasional	12 bulan	238.529.500	12 bulan	199.859.500	(38.670.000)
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang terpenuhi	100%	902.370.000	100%	902.370.000	-
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100%	587.370.000	100%	587.370.000	-
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terawasinya penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	1 laporan	442.120.000	1 laporan	442.120.000	-
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	terpeliharanya sarana pendukung pertanian	50 Ha	145.250.000	50 Ha	145.250.000	-
3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	315.000.000	100%	315.000.000	-
3 27 02 2.03 01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	10 ekor ternak	315.000.000		315.000.000	-
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian yang dibutuhkan	100%	612.120.000	100%	612.120.000	-
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase pembangunan prasarana pertanian	100%	612.120.000	100%	612.120.000	-
3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terpeliharanya jalan usaha tani	2 unit	612.120.000	2 unit	612.120.000	-
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengendalian penyakit hewan	100%	649.945.000	100%	649.945.000	-
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular	100%	557.845.000	100%	557.845.000	-
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Tertanggulangnya penyakit Hewan dan Zoonosis	4 kasus	557.845.000	4 kasus	557.845.000	-



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	4	10	11 = 10 - 5
3 27 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah petugas paramedik veteriner dan petugas IB setiap tahunnya	100%	92.100.000	100%	92.100.000	-
3 27 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Terbayarnya BOP Petugas Paramedik & Petugas IB	16 orang	92.100.000	12 orang	92.100.000	-
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan Kemampuan Penyuluhan	100%	115.800.000	100%	115.800.000	-
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti Diklat	100%	115.800.000	100%	115.800.000	-
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	4 unit	115.800.000	4 unit	115.800.000	
JUMLAH				7.124.765.208		7.104.765.208	(20.000.000)

### 36. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			Rp 7,854,871,050		Rp 7,854,871,050	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan penerapan kepatuhan pelayanan publik	100 Persen	5174494750,00	100 Persen	Rp5.174.494.750	0
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	2 Kegiatan	Rp30.496.500	2 Kegiatan	Rp30.496.500	0
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	Rp12.476.500	1 dokumen	Rp12.476.500	0
3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp18.020.000	4 Laporan	Rp18.020.000	0
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	4 Kegiatan	Rp3.859.326.350	4 Kegiatan	Rp3.859.326.350	0
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	Rp3.613.504.750	14 Bulan	Rp3.613.504.750	0
3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp224.040.000	12 Dokumen	Rp224.040.000	0
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp11.781.600	1 Laporan	Rp11.781.600	0

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Rp10.000.000	4 Laporan	Rp10.000.000	0
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Kegiatan	Rp210.441.900	7 Kegiatan	Rp210.441.900	0
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp5.810.000	1 Paket	Rp5.810.000	0
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp27.254.300	5 Paket	Rp27.254.300	0
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp9.475.600	1 Paket	Rp9.475.600	0
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp25.425.000	1 Paket	Rp25.425.000	0
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp10.069.000	1 Paket	Rp10.069.000	0
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Surat Kabar	1 Dokumen	Rp12.110.000	1 Dokumen	Rp12.110.000	0
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	12 Laporan	Rp120.298.000	12 Laporan	Rp120.298.000	0
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	1 Kegiatan	Rp8.500.000	1 Kegiatan	Rp8.500.000	0
3.30.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Rp8.500.000	10 Unit	Rp8.500.000	0
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	2 Kegiatan	Rp672.000.000	2 Kegiatan	Rp672.000.000	0
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Rp48.000.000	3 Laporan	Rp48.000.000	0
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp624.000.000	1 Laporan	Rp624.000.000	0
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penunjang urusan daerah kabupaten	2 Kegiatan	Rp393.730.000	2 Kegiatan	Rp393.730.000	0
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Rp387.930.000	17 Unit	Rp387.930.000	0
3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Rp5.800.000	8 Unit	Rp5.800.000	0
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar yang di revitalisasi	100 Persen	Rp1.460.700.000	100 Persen	Rp661.700.000	(799.000.000)
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terpenuhinya peningkaptan sarana distribusi perdagangan	2 Kegiatan	Rp1.290.700.000	2 Kegiatan	Rp491.700.000	(799.000.000)

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN 11 = 10 - 5
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	Rp1.090.000.000	7 Unit	Rp291.000.000	(799.000.000)
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	Rp200.700.000	1 Unit	Rp200.700.000	0
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		1 Kegiatan	Rp170.000.000	1 Kegiatan	Rp170.000.000	0
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	Rp170.000.000	12 Dokumen	Rp170.000.000	0
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	42,59 Persen	Rp90.000.000	42,59 Persen	Rp90.000.000	0
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terpenuhinya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	2 Kegiatan	Rp90.000.000	2 Kegiatan	Rp90.000.000	0
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Rp30.000.000	1 Laporan	Rp30.000.000	0
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Penerima Manfaat Pasar Murah	1 Laporan	Rp60.000.000	1 Laporan	Rp60.000.000	0
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah UTTP yang telah ditera/tera ulang di Kabupaten Pesawaran		Rp165.500.000		Rp165.500.000	0
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	3 Kegiatan	Rp165.500.000	3 Kegiatan	Rp165.500.000	0
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	500 Unit	Rp80.000.000	500 Unit	Rp80.000.000	0
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	350 Orang	Rp80.000.000	350 Orang	Rp80.000.000	0
3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	4 Unit	Rp5.500.000	4 Unit	Rp5.500.000	0
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha perdagangan yang dibina	100 Persen	Rp964.176.300	100 Persen	Rp964.176.300	0
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terpenuhinya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	2 Kegiatan	Rp964.176.300	2 Kegiatan	Rp964.176.300	0
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	25 UMKM	Rp874.176.300	25 UMKM	Rp874.176.300	0
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50 UMKM	Rp90.000.000	50 UMKM	Rp90.000.000	0
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			Rp1.323.735.000		Rp1.323.735.000	0

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan bina kelompok pengrajin	99,57 Persen	Rp1.323.735.000	99,57 Persen	Rp1.323.735.000	0
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terpenuhinya perencanaan dan pembangunan industri	4 Kegiatan	Rp1.323.735.000	4 Kegiatan	Rp1.323.735.000	0
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terlaksananya Pengembangan dan penyebaran wilayah Industri Kecil Menengah	1 Dokumen	Rp55.000.000	1 Dokumen	Rp55.000.000	0
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Rp109.780.000	1 Dokumen	Rp109.780.000	0
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Sarana dan Prasarana IKM dan Kelompok Pengrajin, serta sarana pendukung kawasan industri	1 Dokumen	Rp170.000.000	1 Dokumen	Rp170.000.000	0
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	Rp988.955.000	5 Dokumen	Rp988.955.000	0
JUMLAH				Rp9.178.606.050		Rp8.379.606.050	(799.000.000)

### 37. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	200.000.000	100%	192.500.000	(7.500.000,00)
4.01.02.2.01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	200.000.000	-	192.500.000	(7.500.000,00)
4.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Kab.Pesawaran dan Terlaksananya Fasilitasi APKASI Kab. Pesawaran	2 Rapat dan 1 Kegiatan	68.000.000	-	68.000.000	-
4.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Fasilitasi Percepatan Penetapan Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	2 Dokumen Laporan	68.000.000	-	60.500.000	(7.500.000,00)
4.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	3 Buku	64.000.000	-	64.000.000	-
JUMLAH				200.000.000		192.500.000	(7.500.000,00)

**38. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah**

KODE REKENING						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
								TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
								KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1						2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4	01					Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Administrasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
4	01	02	2	02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya rasa Nasionalisme, Kedaerahan dan Binamental Spiritual	100%	Rp 7.722.600.000	100%	Rp 11.780.300.000	Rp 4.057.700.000
4	01	02	2	02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Rp 7.123.726.000		Rp 11.181.426.000	Rp 4.057.700.000
4	01	02	2	02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Rp 175.031.000		Rp 175.031.000	Rp -
4	01	02	2	02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksana Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Rp 423.843.000		Rp 423.843.000	Rp -
JUMLAH									Rp 7.722.600.000		Rp 11.780.300.000	Rp 4.057.700.000

**39. Bagian Hukum Sekretariat Daerah**

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
.....	Urusan .....						
.....	Bidang Urusan .....						
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terwujudnya pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih, dan melayani	100%	Rp 200.000.000	100%	Rp 300.000.000	Rp 100.000.000
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Meningkatkan Harmonisasi Terhadap Penerbitan Produk-Produk Hukum Daerah	100%	Rp 200.000.000	100%	Rp 300.000.000	Rp 100.000.000
4.01.01.2.13.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	342 Dokumen	Rp 71.035.000	342 Dokumen	Rp 71.035.000	Rp -
4.01.01.2.13.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	Rp 81.810.000	3 Kasus	Rp 181.810.000	Rp 100.000.000
4.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	342 Dokumen	Rp 47.155.000	342 Dokumen	Rp 47.155.000	Rp -
JUMLAH				Rp 200.000.000		Rp 300.000.000	Rp 100.000.000

**40. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah**

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (KELUARAN)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11=10-5
4	Urusan Pemerintahan						
4.01	Bidang Urusan Sekretariat Daerah						
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan					
4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Rp 200.000.000		Rp 192.500.000	Rp (7.500.000)
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	10 Dokumen	Rp 50.000.000	10 Laporan	Rp 50.000.000	Rp -
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	13 Dokumen	Rp 75.000.000	5 Laporan	Rp 67.500.000	Rp (7.500.000)
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen	Rp 75.000.000	5 Laporan	Rp 75.000.000	Rp -
	JUMLAH			Rp 200.000.000		Rp 192.500.000	Rp (7.500.000)

**41. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah**

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
04.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan	100%	Rp300.000.000	100%	Rp292.500.000	(7.500.000)
04.01.03	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	5 Dokumen, 16 Laporan, 1 Kegiatan	Rp300.000.000	5 Dokumen, 16 Laporan, 1 Kegiatan	Rp292.500.000	(7.500.000)
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Pedoman Standar Satuan Harga Barang Pemerintah dan Standar biaya masukan Pemerintah	2 Dokumen	76.540.000	2 Dokumen	76.540.000	-
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan Realisasi Anggaran OPD setiap bulannya serta Laporan Realisasi Anggaran dan Progres Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten	12 Laporan	Rp167.366.000	12 Laporan	Rp161.256.000	(6.110.000)
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen Renja,LAKIP dan LKPJ Sekretariat. Jumlah Laporan LRFK	3 Dokumen dan 4 Laporan	Rp56.094.000	3 Dokumen dan 4 Laporan	Rp54.704.000	(1.390.000)
JUMLAH				Rp300.000.000	100%	Rp292.500.000	(7.500.000)



**42. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah**

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			590.000.000		582.500.000	(7.500.000)
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			590.000.000		582.500.000	(7.500.000)
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya tenaga teknis untuk melaksanakan tender dan non tender	9 Orang	318750000	3 Bulan	318750000	-
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik	Tersedianya Layanan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (SPSE)		246.250.000		238.750.000	(7.500.000)
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya Aparatur yang Berkualitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa		25.000.000		25.000.000	-
JUMLAH				590.000.000		582.500.000	(7.500.000)

**43. Bagian Umum Sekretariat Daerah**

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA		100%	29.970.499.906	60%	31.370.499.906	1.400.000.000
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.617.625.574		14.472.125.574	- 145.500.000
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 orang	12.501.895.574	98 orang	12.501.895.574	-
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honorarium dan Tunjangan	12 dokumen	2.017.330.000	6 Dokumen	1.871.830.000	(145.500.000)
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Sesemteran dan Akhir Tahun	12 Laporan	98.400.000	6 Laporan	98.400.000	-
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.723.480.400		2.954.905.400	231.425.000
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Alat Tulis Kantor	4 Paket	520.726.000	2 paket	520.726.000	-
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	12 Paket	780.000.000	6 paket	832.250.000	52.250.000
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	539.309.400	6 paket	539.309.400	-
4.01.01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi Yang Baik untuk Penyelenggaraan Pemerintahan	12 Laporan	883.445.000	6 Laporan	1.062.620.000	179.175.000
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			954.850.000		1.219.294.000	264.444.000
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Tersedianya Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor KDH/WKDH	12 Unit	954.850.000	12 unit	1.219.294.000	264.444.000
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.910.328.000		5.765.328.000	(145.000.000)
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	75.000.000	6 Laporan	90.000.000	15.000.000

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	1.380.000.000	6 Laporan	1.330.000.000	(50.000.000)
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	243.098.000	6 Laporan	258.098.000	15.000.000
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	4.212.230.000	6 Laporan	4.087.230.000	(125.000.000)
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah			1.077.000.000		1.207.000.000	130.000.000
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor	120 Unit	500.000.000	60 unit	600.000.000	100.000.000
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	120 Unit	577.000.000	60 unit	607.000.000	30.000.000
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan & Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.248.170.132		1.300.612.132	52.442.000
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bupati dan Wakil Bupati	173.538.132	Bupati dan Wakil Bupati	173.538.132	-
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terciptanya Kesehatan Yang Baik Dalam Pelaksanaan Tugas	2 Orang	150.000.000	1 orang	150.000.000	-
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedia Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang / bulan	924.632.000	2 Orang / bulan	977.074.000	52.442.000
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			3.439.045.800		4.451.234.800	1.012.189.000
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 Paket	856.777.800	6 paket	909.916.800	53.139.000
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12 Paket	680.106.500	7 paket	713.106.500	33.000.000
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12 Paket	1.902.161.500	8 paket	2.828.211.500	926.050.000
JUMLAH			100%	29.970.499.906	60%	31.370.499.906	1.400.000.000

#### 44. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
4.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4.01.0.00.0.00.01.0000	Bidang Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten						
4.01.0.00.0.00.01.0011	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan						
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	100%	Rp 2.576.000.000	100%	Rp 2.566.000.000	Rp (10.000.000)

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
1	2	3	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	11 = 10 - 5
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Stakeholders		Rp 63.915.500		Rp 57.215.500	Rp (6.700.000)
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Rp 63.915.500	4 Laporan	Rp 57.215.500	Rp (6.700.000)
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kualitas Pelayanan Keprotokolan Pejabat, Tamu dan Acara		Rp 2.512.084.500		Rp 2.508.784.500	Rp (3.300.000)
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan	Rp 1.174.971.000	4 Laporan	Rp 1.174.971.000	Rp -
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan	Rp 1.002.494.000	4 Laporan	Rp 1.002.494.000	Rp -
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	Rp 334.619.500	4 Laporan	Rp 331.319.500	Rp (3.300.000)
JUMLAH				Rp 2.576.000.000		Rp 2.566.000.000	Rp (10.000.000)

#### 45. Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
1	2	3	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	11 = 10 - 5
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	100%	11.769.868.593	100%	11.769.868.593	-
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terpenuhinya barang milik daerah pada sekretariat daerah		320.711.300		337.017.300	16.306.000
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusun nya perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	4 Dokumen	135.903.000	2 Dokumen	152.209.000	16.306.000
4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terdistribusi dan tersimpan nya barang milik daerah	1560 Unit	184.808.300		184.808.300	-
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terkelola administrasi kepegawaian perangkat daerah		734.300.000		734.300.000	-
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	1124 Stel	734.300.000	1124 Stel	734.300.000	-
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksana nya pengadaan barang milik daerah		4.439.938.700		5.849.192.700	1.409.254.000
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya Kendaraan dinas Operasional/Lapangan	12 Unit	1.468.641.900	-	1.464.910.900	- 3.731.000
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Meubel	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	329 Unit	1.628.710.000	-	2.774.810.000	1.146.100.000
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	95 Unit	1.342.586.800	1 Unit	1.609.471.800	266.885.000

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		6.274.918.593		4.849.358.593	- 1.425.560.000
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	171 Unit	6.274.918.593	146 Unit	4.849.358.593	- 1.425.560.000
JUMLAH			1.560	11.769.868.593		11.769.868.593	-

#### 46. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Penerapan Kepatuhan Standar pelayanan Publik	100%	Rp 500.000.000	100%	Rp 492.500.000	Rp (7.500.000)
4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase Organisasi yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	100%	Rp 500.000.000	100%	Rp 492.500.000	Rp (7.500.000)
4.01.01.2.13.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	Rp 100.000.000	2 Dokumen	Rp 97.880.000	Rp (2.120.000)
4.01.01.2.13.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	Rp 100.000.000	1 Laporan	Rp 97.145.000	Rp (2.855.000)
4.01.01.2.13.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Rp 25.000.000	1 Dokumen	Rp 25.000.000	Rp -
4.01.01.2.13.04	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	Rp 200.000.000	1 Dokumen	Rp 200.000.000	Rp -
4.01.01.2.13.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	Rp 75.000.000	2 Dokumen	Rp 72.475.000	Rp (2.525.000)
JUMLAH				Rp 500.000.000		Rp 492.500.000	Rp (7.500.000)

#### 47. Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah

47. Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah							
KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Menigkatnya Pelayanan Kerjasama Daerah					
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			Rp 200.000.000		Rp 192.500.000	Rp (7.500.000)

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya fasilitasi Kerjasama dalam Negeri dan Koordinasi dengan OPD terkait	40 Dokumen	Rp 99.500.000	40 Dokumen	Rp 92.000.000	Rp (7.500.000)
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terlaksananya fasilitasi Kerjasama luar Negeri dan Koordinasi dengan OPD terkait	4 Dokumen	Rp 34.000.000	4 Dokumen	Rp 34.000.000	Rp -
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring Kerjasama Daerah luar Negeri dan Dalam Negeri	1 Laporan	Rp 66.500.000	1 Laporan	Rp 66.500.000	Rp -
	JUMLAH			Rp 200.000.000		Rp 192.500.000	Rp (7.500.000)

#### 48. Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan			200.000.000		192.500.000	(7.500.000,00)
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	98.990.000	(1.010.000,00)
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	-
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	43.510.000	(6.490.000,00)
JUMLAH				200.000.000		192.500.000	(7.500.000,00)

#### 49. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4.02	SEKRETARIAT DPRD						
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Berkinerja Tinggi	100%	Rp 33.901.260.400	100%	Rp 34.129.504.400	Rp 228.244.000
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 127.934.400		Rp 176.078.400	Rp 48.144.000
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renja OPD, RKA dan DPA	6 Dokumen	Rp 49.875.000	6 Dokumen	Rp 49.875.000	Rp -

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
	(Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)						
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Rp 78.059.400	7 Laporan	Rp 126.203.400	Rp 48.144.000
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp 3.151.748.800		Rp 3.230.148.800	Rp 78.400.000
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, serta Belanja Tambahan Penghasilan PNS	23 Org/Bln	Rp 2.560.244.200	23 Org/Bln	Rp 2.638.644.200	Rp 78.400.000
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	116 Dokumen	Rp 582.919.600	119 Dokumen	Rp 582.919.600	Rp -
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Tersedianya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	4 Laporan	Rp 6.330.000	4 Laporan	Rp 6.330.000	Rp -
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Tersedianya Dokumen Prognosis	2 Dokumen	Rp 2.255.000	2 Dokumen	Rp 2.255.000	Rp -
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp 130.150.000		Rp 130.150.000	Rp -
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Tersedianay Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	1 Paket	Rp 130.150.000	1 Paket	Rp 130.150.000	Rp -
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp 3.883.701.000		Rp 3.733.701.000	Rp (150.000.000)
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	Rp 38.220.000	12 Paket	Rp 38.220.000	Rp -
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer	12 Paket	Rp 44.351.000	12 Paket	Rp 44.351.000	Rp -
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	Rp 96.000.000	14 Paket	96.000.000	Rp -
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Terlaksananya Kegiatan Makanan dan Minuman	12 Paket	Rp 106.000.000	12 Paket	Rp 106.000.000	Rp -
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	Rp 42.232.000	12 Paket	Rp 42.232.000	Rp -
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Terlaksananya Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33 Dokumen	Rp 1.310.136.000	35 Dokumen	Rp 1.310.136.000	Rp -



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi KunjunganTamu (Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah)	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 96.000.000	12 Laporan	Rp 96.000.000	Rp -
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD (Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah)	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	24 Laporan	Rp 2.150.762.000	24 Laporan	Rp 2.000.762.000	Rp (150.000.000)
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp 140.000.000		Rp 140.000.000	Rp -
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah)	Tersedianay Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	Rp 140.000.000	2 Unit	Rp 140.000.000	Rp -
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah			Rp 2.008.310.000		Rp 2.008.310.000	Rp -
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Tersedianya Materai	12 Laporan	Rp 7.200.000	12 Laporan	Rp 7.200.000	Rp -
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Rp 321.960.000	12 Laporan	Rp 321.960.000	Rp -
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Rp 1.679.150.000	12 Laporan	Rp 1.679.150.000	Rp -
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp 663.750.000		Rp 1.135.450.000	Rp 471.700.000
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	15 Unit	Rp 613.750.000	18 Unit	Rp 745.450.000	Rp 131.700.000
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Mesin Kantor Lainnya	9 Unit	Rp 25.000.000	9 Unit	Rp 175.000.000	Rp 150.000.000
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	1 Unit	Rp 25.000.000	1 Unit	Rp 215.000.000	Rp 190.000.000
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			Rp 21.789.034.000		Rp 21.494.034.000	Rp (295.000.000)
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Penghasilan PNS	45 Org/Bln	Rp 21.253.074.000	45 Org/Bln	Rp 20.958.074.000	Rp (295.000.000)
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	1 Paket	Rp 468.460.000	1 Paket	Rp 468.460.000	Rp -

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Medical Check Up Pimpinan dan Anggota	45 Orang	Rp 67.500.000	45 Orang	Rp 67.500.000	Rp -
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			Rp 2.006.632.200		Rp 2.081.632.200	Rp 75.000.000
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Fasilitasi Rapat dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	Rp 827.632.200	12 Laporan	Rp 902.632.200	Rp 75.000.000
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	4 Paket	Rp 1.179.000.000	4 Paket	Rp 1.179.000.000	Rp -
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGASDAN FUNGSI DPRD	Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Berkinerja Tinggi	100%	Rp 20.098.739.600	100%	Rp 18.017.264.100	Rp (2.081.475.500)
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Meningkatnya Pelayanan Pimpinan dan Anggota DPRD		Rp 1.920.232.300		Rp 1.870.532.300	Rp (49.700.000)
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Terfasilitasinya Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif	1 Dokumen	Rp 1.378.316.800	1 Dokumen	Rp 1.328.616.800	Rp (49.700.000)
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Terfasilitasinya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen	Rp 541.915.500	15 Dokumen	Rp 541.915.500	Rp -
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			Rp 221.065.000		Rp 221.065.000	Rp -
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA danPPAS (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Terfasilitasinya Pembahasan KUA PPAS	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	Rp -
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Terfasilitasinya Pembahasan KUPA PPAS	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	Rp -
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Terfasilitasinya Pembahasan APBD	1 Dokumen	Rp 126.065.000	1 Dokumen	Rp 126.065.000	Rp -
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Terfasilitasinya Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	Rp 35.000.000	1 Dokumen	Rp 35.000.000	Rp -
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Terfasilitasinya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	Rp -
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			Rp 24.620.300		Rp 24.620.300	Rp -
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Terfasilitasinya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Rp 24.620.300	1 Dokumen	Rp 24.620.300	Rp -
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			Rp 2.976.007.000		Rp 2.938.507.000	Rp (37.500.000)
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah)	Terfasilitasinya Pendalamam Tugas dan Bimtek Anggota DPRD	4 Dokumen	Rp 2.204.447.000	4 Dokumen	Rp 2.204.447.000	Rp -

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Meningkatnya Kapasitas dan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	86 Dokumen	Rp 771.560.000	84 Dokumen	Rp 734.060.000	Rp (37.500.000)
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			Rp 3.140.935.000		Rp 3.140.935.000	Rp -
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Terfasilitasinya Kunjungan Kerja Dalam daerah	8 Laporan	Rp 1.491.000.000	8 Laporan	Rp 1.491.000.000	Rp -
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Terfasilitasinya Kegiatan Reses Bagi Anggota DPRD	3 Dokumen	Rp 1.649.935.000	3 Dokumen	Rp 1.649.935.000	Rp -
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			Rp 11.815.880.000		Rp 9.821.604.500	Rp (1.994.275.500)
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Koordinasi dan Kerjasama antar Anggota DPRD Lintas Kabupaten	150 Dokumen	Rp 11.815.880.000	37 Dokumen	Rp 9.821.604.500	Rp (1.994.275.500)
JUMLAH				Rp 54.000.000.000		Rp 52.146.768.500	Rp (1.853.231.500)

#### 50. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.215.131.820		3.119.481.820	(95.650.000)
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			3.215.131.820		3.119.481.820	(95.650.000)
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.795.131.820		2.775.131.820	(20.000.000)
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai peraturan yang ada		2.142.666.820		2.142.666.820	-
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1.967.090.820	14 Bulan	1.967.090.820	-
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	175.576.000	12 Bulan	175.576.000	-
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu		30.000.000		34.350.000	4.350.000
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10.000.000	10 Item	10.000.000	-
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	20.000.000	25 Laporan	24.350.000	4.350.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		265.000.000		239.750.000	(25.250.000)

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
1	2	3	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	11 = 10 - 5
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	18.000.000	24 Laporan	18.750.000	750.000
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	247.000.000	13 Laporan	221.000.000	(26.000.000)
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara</b>		<b>357.465.000</b>		<b>358.365.000</b>	<b>900.000</b>
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	357.465.000	10 Unit	358.365.000	900.000
<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Prosentase Desa Tangguh Bencana</b>		<b>420.000.000</b>		<b>344.350.000</b>	<b>(75.650.000)</b>
<b>1.05.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya Kesiapsiagaan terhadap Penanggulangan Bencana</b>		<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000</b>	-
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	30 Orang	10.000.000	30 Orang	10.000.000	-
<b>1.05.03.2.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Meningkatnya Kesiapsiagaan terhadap Penanggulangan Bencana</b>		<b>270.000.000</b>		<b>194.350.000</b>	<b>(75.650.000)</b>
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	0	-	1 Dokumen	-	-
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	-
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	36 Orang	220.000.000	36 Orang	124.350.000	(95.650.000)
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana kontegensi (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	-
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	40 Orang	30.000.000	40 Orang	50.000.000	20.000.000
<b>1.05.03.2.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		<b>140.000.000</b>		<b>140.000.000</b>	-
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	18 Orang	120.000.000	18 Orang	120.000.000	-
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	600 orang	10.000.000	600 orang	10.000.000	-
1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	-
<b>JUMLAH</b>				<b>3.215.131.820</b>		<b>3.119.481.820</b>	<b>(95.650.000)</b>

51. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
1	2	3	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	11 = 10-5
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
8.0	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			7.739.121.330		9.739.121.330	2.000.000.000
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkualitas dan terkinerja tinggi .		3.325.191.330		3.325.191.330	-
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			48.720.000		48.720.000	-
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan akhir tahun, laporan konsolidasi, neraca/ CLK, LPPD, RENSTRA dan Lakip	6 Laporan	48.720.000	6 Laporan	48.720.000	-
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.901.370.030		2.901.370.030	-
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, serta Belanja Tambahan Penghasilan PNS	100%	2.697.030.030	100%	2.697.030.030	-
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	204.340.000	12 Bulan	204.340.000	-
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			138.000.000		138.000.000	-
8.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik	12 Bulan	21.000.000	12 Bulan	21.000.000	-
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji THLS	100%	117.000.000	100%	117.000.000	-
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah			237.101.300		237.101.300	-
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraann perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharanya Kendaraan dinas operasional	6 unit	192.101.300	6 unit	192.101.300	-
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Baangunan Lainnya	tersedianya Jasa/Sewa Gedung kantor	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	30.000.000	-
8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Peralatan Gedung Kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	-
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			30.000.000		30.000.000	-
8.01.02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			30.000.000		30.000.000	-
8.01.02.01.05	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	terlaksananya Pembinaan dan Penanganan Ideologi Radikalisme, Intoleransi dan Terorisme	1 Kali	30.000.000	1 Kali	30.000.000	-
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			1.251.640.000		3.251.640.000	2.000.000.000
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						-
8.01.03.2.01.01	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, kerwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			155.540.000		155.540.000	-

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN 11 = 10-5
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
1	2	3	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
8 01 03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah penyampaian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1 Kali	1.096.100.000	1 Kali	3.096.100.000	2.000.000.000
8 01 04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASAYARAKATAN</b>			<b>2.378.940.000</b>		<b>2.378.940.000</b>	-
8 01 04 2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>						-
8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Bantuan Hibah kepada Ormas dan LSM di Kabupten Pesawaran	100%	2.378.940.000	100%	2.378.940.000	-
8 01 06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>			<b>753.350.000</b>		<b>753.350.000</b>	-
8 01 06 2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>						-
9 0106 2.01 04	<b>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</b>	Bantuan Kepada Kapolsek, Danramil, Babinsa dan Babinkamtibmas se Kabupaten Pesawaran	12 Bulan 177 Orang	730.200.000	12 Bulan 177 Orang	730.200.000	-
8 0106 2.01 05	<b>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</b>	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Kali	23.150.000	1 Kali	23.150.000	-
<b>JUMLAH</b>				<b>7.739.121.330</b>	-	<b>9.739.121.330</b>	<b>2.000.000.000</b>

## 52. Kecamatan Gedong Tataan

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN 11 = 10 - 5
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
1	2	3	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						
7.01	<b>KECAMATAN</b>			<b>Rp1.980.542.208</b>		<b>Rp1.970.542.208</b>	<b>(Rp10.000.000)</b>
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>Rp1.964.692.208</b>		<b>Rp1.954.692.208</b>	<b>(Rp10.000.000)</b>



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
1	2	3	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	11 = 10 - 5
<b>7 01 01 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>Rp2.846.200</b>		<b>Rp2.846.200</b>	<b>Rp0</b>
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp2.846.200	1 Dokumen	Rp2.846.200	Rp0
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>Rp1.639.588.008</b>		<b>Rp1.639.588.008</b>	<b>Rp0</b>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/Bulan	Rp1.362.788.008	10 Orang/Bulan	Rp1.362.788.008	Rp0
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Rp276.800.000	1 Dokumen	Rp276.800.000	Rp0
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>Rp118.478.000</b>		<b>Rp118.478.000</b>	<b>Rp0</b>
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp15.554.200	12 Paket	Rp15.554.200	Rp0
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Rp3.000.000	12 Paket	Rp3.000.000	Rp0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp24.630.000	10 Paket	Rp24.630.000	Rp0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Rp5.113.800	4 Paket	Rp5.113.800	Rp0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rp7.680.000	1 Dokumen	Rp7.680.000	Rp0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp62.500.000	1 Laporan	Rp62.500.000	Rp0
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Rp67.300.000</b>		<b>Rp57.300.000</b>	<b>(Rp10.000.000)</b>
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp2.500.000	1 Laporan	Rp2.500.000	Rp0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp8.400.000	1 Laporan	Rp8.400.000	Rp0
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp56.400.000	1 Laporan	Rp46.400.000	(Rp10.000.000)
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Rp136.480.000</b>		<b>Rp136.480.000</b>	<b>Rp0</b>
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Rp132.480.000	4 Unit	Rp132.480.000	Rp0
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Rp4.000.000	4 Unit	Rp4.000.000	Rp0
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>Rp15.850.000</b>		<b>Rp15.850.000</b>	<b>Rp0</b>

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan			Rp13.600.000		Rp13.600.000	Rp0
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Rp13.600.000	1 Laporan	Rp13.600.000	Rp0
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			Rp2.250.000		Rp2.250.000	Rp0
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	Rp2.250.000	1 Dokumen	Rp2.250.000	Rp0
JUMLAH				Rp1.980.542.208		Rp1.970.542.208	(Rp10.000.000)

### 53. Kecamatan Negeri Katon

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
7	Urusan Kewilayahan			-			
7.01	Bidang Urusan Kecamatan			1.741.610.622		1.731.610.622	(10.000.000,00)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan .....	100%	1.716.510.622	100%	1.716.510.622	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.500.000	100%	2.500.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Paket	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.281.720.622		1.281.720.622	-
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/Bulan	1.244.640.622	126 Orang/Bulan	1.244.640.622	-
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	37.080.000	1 Dokumen	37.080.000	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	81.220.000		81.220.000	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di disediakan	12 Paket	11.323.000	12 Paket	11.323.000	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.855.000	12 Paket	20.855.000	-
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Paket	3.002.000	2 Paket	3.002.000	-

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.440.000	2 Dokumen	4.440.000	-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	41.600.000	1 Laporan	41.600.000	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	230.000.000		230.000.000	-
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	9.000.000	12 Laporan	9.000.000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16 Orang	221.000.000	16 Orang/Bulan	221.000.000	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TerlaksananyaPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	121.070.000		121.070.000	-
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	121.070.000	3 Unit	121.070.000	-
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan .....	100 %	25.100.000		15.100.000	(10.000.000,00)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksannya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	12.900.000		2.900.000	(10.000.000,00)
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Laporan	12.900.000	1 Laporan	2.900.000	(10.000.000,00)
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 %	12.200.000		12.200.000	-
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Dokumen	12.200.000	1 Dokumen	12.200.000	-
JUMLAH				1.741.610.622		1.731.610.622	(10.000.000,00)

#### 54. Kecamatan Tegineneng

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
7	Urusan Kewilayahan						
7.01	Bidang Urusan Kecamatan						
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan .....	100%	1.766.970.980	100%	1.756.970.980	(10.000.000)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bln	1.221.818.580	12 bulan	1.221.818.580	-

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
7.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	12 dokumen	7.660.800	12 dokumen	7.660.800	-
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan dan [pengujian dan verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	51.644.600	12 bulan	51.644.600	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	16.073.000	12 bulan	16.073.000	-
7.01.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	6.197.500	12 bulan	6.197.500	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah tersedianya dana belanja makanan dan minuman	1200 kotak	22.000.000	1200 kotak	22.000.000	-
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2000 lmbar	5.500.000	2000 lmbar	5.500.000	-
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	JumlahPenyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	4.400.000	12 bulan	4.400.000	-
7.01.01.2.06.09	penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah tersedianya dana penunjang perjalanan perjalanan dinas	75 kegiatan	26.155.000	75 kegiatan	26.155.000	-
7.01.01.2.08.01	Penyediaan surat menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 surat	190.000	50 surat	190.000	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 item	12.000.000	12 item	7.000.000	(5.000.000)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah jasa tenaga kontrak 18 orang , kebersihan	234 orang	250.961.500	234 orang	250.961.500	-
7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	jumlah terpeliharanya kendaraan dinas	4 unit	125.370.000	4 unit	125.370.000	-
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan peralatan dan mesin lainnya	6 unit	17.000.000	6 unit	12.000.000	(5.000.000)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		52.059.300		52.059.300	-
7.01.02.2.01.01	koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Tingkat kecamatan	5 kegiatan	17.779.300	5 kegiatan	17.779.300	-
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah rekomendasi perizinan non usaha yang dikeluarkan	50 dokumen	17.220.000	50 dokumen	17.220.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah pelaksanaan pelayanan pembuatan surat izin usaha UMKM	100 Izin	17.060.000	100 Izin	17.060.000	-
JUMLAH				1.819.030.280		1.809.030.280	(10.000.000)

55. Kecamatan Way Lima

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
3	Urusan Pemerintahan Pilihan						
3.26	Bidang Urusan Way lima			1.683.186.144,00		1.673.186.144,00	(10.000.000)
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran	Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.659.386.144,00	100%	1.649.386.144,00	(10.000.000)
3.26.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.437.517.844,00	100%	1.437.517.844,00	-
3.26.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang / 14 Bulan	1.222.557.844,00	13 Orang / 14 Bulan	1.222.557.844,00	-
3.26.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	214.960.000,00	12 Dokumen	214.960.000,00	-
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	2.500.000,00	-
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	83.228.400,00	100%	74.028.400,00	(9.200.000)
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	22.500.000,00	12 Paket	22.300.000,00	(200.000)
7.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	7.291.300,00	12 Paket	7.291.300,00	-
7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	22.500.000,00	12 Paket	22.500.000,00	-
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	12 Paket	3.312.100,00	12 Paket	3.312.100,00	-
7.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Paket	3.000.000,00	12 Paket	3.000.000,00	-
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	24.625.000,00	12 Bulan	15.625.000,00	(9.000.000)
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	9.782.000,00	100%	8.982.000,00	(800.000)
7.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	12 Laporan	1.000.000,00	-
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	8.782.000,00	12 Laporan	7.982.000,00	(800.000)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	126.357.900,00	100%	126.357.900,00	-
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	117.870.000,00	2 Unit	117.870.000,00	-
7.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	3 Unit	8.487.900,00	3 Unit	8.487.900,00	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	23.800.000,00	100%	23.800.000,00	-

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	23.800.000,00	100%	23.800.000,00	-
7.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1 Kegiatan	16.100.000,00	1 Kegiatan	16.100.000,00	-
7.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	Jumlah Koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	1 Kegiatan	7.700.000,00	1 Kegiatan	7.700.000,00	-
JUMLAH				1.673.186.144,00		1.673.186.144,00	(10.000.000)

#### 56. Kecamatan Padang Cermin

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
7	UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01	KECAMATAN		100 %	1.681.978.884	100 %	1.671.978.884	(10.000.000)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penerapan Kepatuhan Pelayanan Publik	100 %	1.641.006.384	100 %	1.631.006.384	(10.000.000)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.287.500	100 %	7.287.500	-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2.500.000		2.500.000	-
5.1.02.01.01.0024	Alat tulis Kantor			450.000		450.000	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Cetak			100.000		100.000	-
5.1.02.04.01.0027	Belanja Perlengkapan Komputer			750.000		750.000	-
5.1.02.04.01.0003	Perjalanan Dinas			1.200.000		1.200.000	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2.298.000		2.298.000	-
5.1.02.01.01.0024	Alat tulis Kantor			572.000		572.000	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Cetak			526.000		526.000	-
5.1.02.04.01.0003	Perjalanan Dinas			1.200.000		1.200.000	-



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2.489.500		2.489.500	-
5.1.02.01.01.0024	Alat tulis Kantor			685.500		685.500	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Cetak			4.000		4.000	-
5.1.02.04.01.0003	Perjalanan Dinas			1.800.000		1.800.000	-
7.01.01.2.02	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.275.256.934		1.275.256.934	-
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	1.233.706.934	Orang / Bulan	1.233.706.934	-
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN			814.306.934		814.306.934	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS			605.171.400		605.171.400	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga			81.973.444		81.973.444	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS			68.460.000		68.460.000	-
	Belnja Tunjangan Fungsional PNS			-		-	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			12.740.000		12.740.000	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS			45.624.600		45.624.600	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjungan Khusus PNS			330.000		330.000	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS			7.490		7.490	-
5.1.01.01	Belanja Tambahan Penghasilan ASN			419.400.000		419.400.000	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			215.728.800		215.728.800	-
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS			8.539.200		8.539.200	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS			41.558.400		41.558.400	-
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS			153.573.600		153.573.600	-
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	41.550.000	Dokumen	41.550.000	-
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			37.800.000		37.800.000	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat Tulis Kantor			3.750.000		3.750.000	-
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah		2.500.000		2.500.000	-
7.01.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Dokumen	2.500.000	Dokumen	2.500.000	-
5.1.02.01.01.0024	Penvediaan Alat Tulis Kantor			347.000		347.000	-

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
5.1.02.01.01.0026	Belanja Cetak			503.000		503.000	-
5.1.02.04.01.0003	Perjalanan Dinas			1.650.000		1.650.000	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	90.811.950		80.811.950	(10.000.000)
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3.139.300	Paket	3.139.300	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			3.139.300		3.139.300	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9.780.700	Paket	9.780.700	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			8.580.700		8.580.700	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			1.200.000		1.200.000	-
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2.710.000	Paket	2.710.000	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			1.990.000		1.990.000	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			720.000		720.000	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	27.500.000	Paket	27.500.000	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat			27.500.000		27.500.000	-
7.01.01.2.06.05	Penyediaanaaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6.281.950	Paket	6.281.950	-
5.1.02.01.01.0026	Belanaja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak			6.281.950		6.281.950	-
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2.400.000	Dokumen	2.400.000	-
5.1.02.02.01.0062	Belanaja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah			2.400.000		2.400.000	-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	34.500.000	Laporan	24.500.000	(10.000.000)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis			10.000.000		10.000.000	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			24.450.000		14.450.000	(10.000.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanaja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak			50.000		50.000	-

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4.500.000	Dokumen	4.500.000	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan			4.500.000		4.500.000	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.000.000	100 %	2.000.000	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2.000.000	Unit	2.000.000	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya			2.000.000		2.000.000	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	124.400.000	100 %	124.400.000	-
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2.400.000	Laporan	2.400.000	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			2.400.000		2.400.000	-
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	9.000.000	Laporan	9.000.000	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik			9.000.000		9.000.000	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	113.000.000	Laporan	113.000.000	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1.685.600		1.685.600	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			314.400		314.400	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			600.000		600.000	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			78.000.000		78.000.000	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			12.000.000		12.000.000	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			12.000.000		12.000.000	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir			8.400.000		8.400.000	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	138.750.000	100 %	138.750.000	-
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	128.750.000	Unit	128.750.000	-

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			3.000.000		3.000.000	-
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			80.000.000		80.000.000	-
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja			2.520.000		2.520.000	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			37.620.000		37.620.000	-
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor			5.000.000		5.000.000	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya			610.000		610.000	-
7.01.01.2.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10.000.000	Unit	10.000.000	-
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor			6.000.000		6.000.000	-
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel			2.500.000		2.500.000	-
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			1.500.000		1.500.000	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	40.972.500	100 %	40.972.500	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	-
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	15.000.000	Laporan	15.000.000	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			819.000		819.000	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			502.600		502.600	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			628.400		628.400	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			3.300.000		3.300.000	-

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya			2.400.000		2.400.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			7.350.000		7.350.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	15.000.000	Dokumen	15.000.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			200.000		200.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			4.900.000		4.900.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			7.200.000		7.200.000	
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya			2.700.000		2.700.000	
7.01.02.2.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	10.972.500	100 %	10.972.500	-
7.01.02.2.01.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	6.000.000	Dokumen	6.000.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			2.315.800		2.315.800	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.834.200		1.834.200	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			1.850.000		1.850.000	
7.01.02.2.01.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	4.972.500	Laporan	4.972.500	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			2.114.400		2.114.400	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.912.100		1.912.100	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			946.000		946.000	
J U M L A H				1.681.978.884		1.671.978.884	(10.000.000)

#### 57. Kecamatan Punduh Pedada

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
7	UNSUR KEWILAYAHAN					10.000.000	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
7.01	KECAMATAN		100 %	1.464.403.218	100 %	1.454.403.218	(10.000.000)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Persentase Kepatuhan Pelayanan Publik	100 %	1.429.593.218	100 %	1.419.593.218	(10.000.000)
7.01.01.2.02	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.051.780.718		1.051.780.718	-
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	1.019.980.718	Orang / Bulan	1.019.980.718	-
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN			580.780.718		580.780.718	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS			422.258.200		422.258.200	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga			56.428.764		56.428.764	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS			60.900.000		60.900.000	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			7.490.000		7.490.000	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS			33.458.040		33.458.040	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjungan Khusus PNS			240.982		240.982	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS			4.732		4.732	-
5.1.01.01	Belanja Tambahan Penghasilan ASN			439.200.000		439.200.000	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			221.272.800		221.272.800	-
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS			8.539.200		8.539.200	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS			41.558.400		41.558.400	-
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS			167.829.600		167.829.600	-
7.01.01.2.02.03	Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	31.800.000	Dokumen	31.800.000	-
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			31.800.000		31.800.000	-
7.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		6.337.600		6.337.600	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.599.600		1.599.600	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			401.000		401.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanaja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak			598.600		598.600	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			600.000		600.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.160.000		1.160.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			510.000		510.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanaja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak			50.000		50.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			600.000		600.000	



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKP dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1.062.500		1.062.500	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			412.500		412.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak			50.000		50.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			600.000		600.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKP dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1.154.000		1.154.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			494.000		494.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak			60.000		60.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			300.000		300.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			300.000		300.000	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiarsi Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD		1.361.500		1.361.500	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			669.500		669.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak			92.000		92.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			300.000		300.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			300.000		300.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		90.404.900		85.404.900	(5.000.000)
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1.895.000	Paket	1.895.000	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			1.895.000		1.895.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	19.860.300	Paket	19.860.300	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			13.572.300		13.572.300	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			6.288.000		6.288.000	-
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	8.949.600	Paket	8.949.600	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			8.949.600		8.949.600	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15.110.000	Paket	15.110.000	-

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat			12.210.000		12.210.000	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			2.900.000		2.900.000	-
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11.370.000	Paket	11.370.000	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak			11.370.000		11.370.000	-
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1.320.000	Dokumen	1.320.000	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah			1.320.000		1.320.000	-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	31.900.000	Laporan	26.900.000	(5.000.000)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis			10.000.000		10.000.000	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			21.900.000		16.900.000	(5.000.000)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		144.400.000		139.400.000	(5.000.000)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.200.000	Laporan	1.200.000	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			1.200.000		1.200.000	-
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	13.800.000	Laporan	8.800.000	(5.000.000)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik			9.000.000		4.000.000	(5.000.000)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan			4.800.000		4.800.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	129.400.000	Laporan	129.400.000	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			91.000.000		91.000.000	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			12.000.000		12.000.000	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			12.000.000		12.000.000	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir			8.400.000		8.400.000	-
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			6.000.000		6.000.000	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		136.670.000		136.670.000	-
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	124.230.000	Unit	124.230.000	-
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			80.000.000		80.000.000	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			43.730.000		43.730.000	-
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan			500.000		500.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Unit	12.440.000	Unit	12.440.000	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			1.440.000		1.440.000	
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor			11.000.000		11.000.000	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	34.810.000	100 %	34.810.000	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		34.810.000		34.810.000	-
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Laporan	23.079.000	Laporan	23.079.000	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			5.244.000		5.244.000	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.695.000		1.695.000	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			11.000.000		11.000.000	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan MinumanAktifitas Lapangan			2.640.000		2.640.000	-
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya			1.000.000		1.000.000	-
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya			1.500.000		1.500.000	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	11.731.000	Laporan	11.731.000	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			3.057.200		3.057.200	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			486.600		486.600	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			3.542.200		3.542.200	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			2.620.000		2.620.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.025.000		2.025.000	
J U M L A H				1.464.403.218		1.454.403.218	(10.000.000)

#### 58. Kecamatan Kedondong

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
7	UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01	KECAMATAN		100 %	1.747.895.890	100 %	1.737.895.890	(10.000.000)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penerapan Kepatuhan Pelayanan Publik	100 %	1.727.326.990	100 %	1.717.696.990	(9.630.000)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penangggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penangggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	3.261.000	100 %	3.261.000	-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1.111.000		1.111.000	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			490.000		490.000	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			413.000		413.000	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			208.000		208.000	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	500.000		500.000	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			206.000		206.000	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			190.000		190.000	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			104.000		104.000	-
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1.650.000		1.650.000	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1.018.000		1.018.000	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			320.000		320.000	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			312.000		312.000	-
7.01.01.2.02	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.270.906.990		1.270.906.990	-

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	1.236.706.990	Orang / Bulan	1.236.706.990	-
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN			847.906.990		847.906.990	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS			637.070.710		637.070.710	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga			77.988.372		77.988.372	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS			75.320.000		75.320.000	-
	Belnja Tunjangan Fungsional PNS			-		-	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			12.600.000		12.600.000	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS			43.596.840		43.596.840	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjungan Khusus PNS			1.318.427		1.318.427	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS			12.641		12.641	-
5.1.01.01	Belanja Tambahan Penghasilan ASN			388.800.000		388.800.000	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			189.880.800		189.880.800	-
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS			8.539.200		8.539.200	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS			41.558.400		41.558.400	-
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS			148.821.600		148.821.600	-
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	34.200.000	Dokumen	34.200.000	-
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			34.200.000		34.200.000	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	88.397.000		95.147.000	6.750.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2.512.000	Paket	2.512.000	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			2.512.000		2.512.000	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20.000.000	Paket	33.150.000	13.150.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			9.360.000		11.060.000	1.700.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			8.640.000		8.640.000	-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer			2.000.000		6.000.000	4.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					7.450.000	7.450.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6.042.000	Paket	7.192.000	1.150.000

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			6.042.000		7.192.000	1.150.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	16.660.000	Paket	18.310.000	1.650.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat			11.200.000		12.850.000	1.650.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makan dan Minuman Jamuan Tamu			5.460.000		5.460.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3.983.000	Paket	4.783.000	800.000
5.1.02.01.01.0026	Belanaja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak			3.983.000		4.783.000	800.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3.600.000	Dokumen	3.900.000	300.000
5.1.02.02.01.0062	Belanaja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah			3.600.000		3.900.000	300.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	34.350.000	Laporan	24.050.000	(10.300.000)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis			10.000.000		10.000.000	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			24.350.000		14.050.000	(10.300.000)
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1.250.000	Dokumen	1.250.000	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1.250.000		1.250.000	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.892.000	100 %	2.942.000	50.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2.450.000	Unit	2.500.000	50.000
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat			850.000		1.700.000	850.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat			1.600.000		800.000	(800.000)
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	442.000	Unit	442.000	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			442.000		442.000	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	214.470.000	100 %	201.470.000	(13.000.000)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	870.000	Laporan	870.000	-



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			870.000		870.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	13.200.000	Laporan	13.200.000	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik			4.200.000		4.200.000	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan			9.000.000		9.000.000	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	200.400.000	Laporan	187.400.000	(13.000.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			156.000.000		143.000.000	(13.000.000)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			12.000.000		12.000.000	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			12.000.000		12.000.000	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir			8.400.000		8.400.000	-
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			12.000.000		12.000.000	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	147.400.000	100 %	143.970.000	(3.430.000)
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	125.770.000	Unit	127.020.000	1.250.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan			1.000.000		2.250.000	1.250.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			80.000.000		80.000.000	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			44.770.000		44.770.000	-
7.01.01.2.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10.270.000	Unit	10.270.000	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya			10.270.000		10.270.000	-
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	11.360.000	Unit	6.680.000	(4.680.000)
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja			11.360.000		6.680.000	(4.680.000)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	20.568.900	100 %	20.198.900	(370.000)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	19.189.900	100 %	18.819.900	(370.000)

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	17.089.900	Laporan	17.089.900	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			560.900		560.900	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.099.000		1.099.000	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			11.000.000		11.000.000	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			580.000		580.000	-
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya			3.050.000		3.050.000	-
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin			800.000		800.000	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2.100.000	Dokumen	1.730.000	(370.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			466.500		466.500	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.633.500		1.263.500	(370.000)
7.01.02.2.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	1.379.000	100 %	1.379.000	-
7.01.02.2.01.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	760.000	Dokumen	760.000	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			663.500		663.500	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			96.500		96.500	-
7.01.02.2.01.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	619.000	Laporan	619.000	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			522.500		522.500	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			96.500		96.500	-
J U M L A H				1.747.895.890		1.737.895.890	(10.000.000)

#### 59. Kecamatan Marga Punduh

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
1	2	3	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	11 = 10 - 5
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>		<b>100 %</b>	<b>1.583.207.708</b>	<b>100 %</b>	<b>1.573.207.708</b>	<b>(10.000.000)</b>
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Persentase Kepatuhan Pelayanan Publik	100 %	1.562.170.508	100 %	1.555.920.508	(6.250.000)
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>1.233.983.008</b>		<b>1.233.983.008</b>	<b>-</b>
<b>7.01.01.2.02.01</b>	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>Orang / Bulan</b>	<b>1.188.772.408</b>	<b>Orang / Bulan</b>	<b>1.188.772.408</b>	<b>-</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>			<b>779.956.408</b>		<b>779.956.408</b>	<b>-</b>
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS			591.649.800		591.649.800	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga			62.265.084		62.265.084	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS			76.020.000		76.020.000	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			10.220.000		10.220.000	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS			39.541.320		39.541.320	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			253.876		253.876	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS			6.328		6.328	-
<b>5.1.01.01</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>			<b>408.816.000</b>		<b>408.816.000</b>	<b>-</b>
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			209.896.800		209.896.800	-
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS			8.539.200		8.539.200	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS			41.558.400		41.558.400	-
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS			148.821.600		148.821.600	-
<b>7.01.01.2.02.03</b>	<b>Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>Dokumen</b>	<b>45.210.600</b>	<b>Dokumen</b>	<b>45.210.600</b>	<b>-</b>
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			36.960.000		36.960.000	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			7.350.000		7.350.000	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			900.600		900.600	-
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>66.217.500</b>		<b>59.967.500</b>	<b>(6.250.000)</b>
<b>7.01.01.2.06.02</b>	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b>	<b>Paket</b>	<b>13.918.500</b>	<b>Paket</b>	<b>13.918.500</b>	<b>-</b>
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			6.858.500		6.858.500	-

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
1	2	3	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	11 = 10 - 5
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			7.060.000		7.060.000	-
<b>7.01.01.2.06.03</b>	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</b>	<b>Paket</b>	<b>2.172.000</b>	<b>Paket</b>	<b>2.172.000</b>	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			2.172.000		2.172.000	-
<b>7.01.01.2.06.04</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</b>	<b>Paket</b>	<b>11.000.000</b>	<b>Paket</b>	<b>11.000.000</b>	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat			11.000.000		11.000.000	-
<b>7.01.01.2.06.05</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</b>	<b>Paket</b>	<b>5.427.000</b>	<b>Paket</b>	<b>5.427.000</b>	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak			5.427.000		5.427.000	-
<b>7.01.01.2.06.06</b>	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>4.800.000</b>	<b>Dokumen</b>	<b>4.800.000</b>	-
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah			4.800.000		4.800.000	-
<b>7.01.01.2.06.09</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>Laporan</b>	<b>28.900.000</b>	<b>Laporan</b>	<b>22.650.000</b>	<b>(6.250.000)</b>
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			3.020.000		3.020.000	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			2.230.000		2.230.000	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis			10.000.000		10.000.000	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			13.650.000		7.400.000	(6.250.000)
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>142.600.000</b>		<b>142.600.000</b>	-
<b>7.01.01.2.08.01</b>	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>Laporan</b>	<b>1.200.000</b>	<b>Laporan</b>	<b>1.200.000</b>	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			1.200.000		1.200.000	-
<b>7.01.01.2.08.02</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</b>	<b>Laporan</b>	<b>6.000.000</b>	<b>Laporan</b>	<b>6.000.000</b>	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan			6.000.000		6.000.000	-
<b>7.01.01.2.08.04</b>	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</b>	<b>Laporan</b>	<b>135.400.000</b>	<b>Laporan</b>	<b>135.400.000</b>	-

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
1	2	3	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	11 = 10 - 5
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			91.000.000		91.000.000	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			12.000.000		12.000.000	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			12.000.000		12.000.000	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir			8.400.000		8.400.000	-
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi			12.000.000		12.000.000	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		119.370.000		119.370.000	-
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	117.370.000	Unit	117.370.000	-
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			80.000.000		80.000.000	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			37.370.000		37.370.000	-
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	2.000.000	Unit	2.000.000	-
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor			2.000.000		2.000.000	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	21.037.200	100 %	17.287.200	(3.750.000)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		21.037.200		17.287.200	(3.750.000)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	21.037.200	Laporan	17.287.200	(3.750.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			557.200		557.200	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1.100.000		1.100.000	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			11.000.000		11.000.000	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			1.080.000		1.080.000	-
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya			2.750.000		2.750.000	-
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin			800.000		800.000	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.750.000		-	(3.750.000)
J U M L A H				1.583.207.708		1.573.207.708	(10.000.000)

## 60. Kecamatan Way Khilau

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
7.01	UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN WAY KHILAU		100%	Rp 1.542.800.568	100%	Rp 1.532.800.568	Rp (10.000.000)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan .....	100%	Rp 1.518.552.768	100%	Rp 1.508.552.768	Rp (10.000.000)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Presentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 (Dokumen)	Rp 1.451.900	6 (Dokumen)	Rp 1.451.900	Rp -
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 (Dokumen)	Rp 1.451.900	6 (Dokumen)	Rp 1.451.900	Rp -
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 (Dokumen)	Rp 451.900	1 (Dokumen)	Rp 451.900	Rp -
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 (Dokumen)	Rp 500.000	1 (Dokumen)	Rp 500.000	Rp -
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 (Dokumen)	Rp 500.000	4 (Dokumen)	Rp 500.000	Rp -
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10 ASN	Rp 1.113.509.208	13 ASN	Rp 1.096.109.208	Rp (17.400.000)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	Rp 1.049.909.208	182 Orang/bulan	Rp 1.049.909.208	Rp -
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Orang	Rp 63.600.000	5 Orang	Rp 46.200.000	Rp (17.400.000)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.600.000		Rp 5.600.000	Rp -
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			5.600.000		Rp 5.600.000	Rp -
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			650.000		Rp 650.000	Rp -
7.01.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah			650.000		Rp 650.000	Rp -
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			65.563.660		Rp 65.834.160	Rp 270.500
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.665.000		Rp 4.755.500	Rp 2.090.500
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.472.400		Rp 13.652.400	Rp 3.180.000



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			11.046.160		Rp 6.046.160	Rp (5.000.000)
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Rp 11.000.000		Rp 11.000.000	Rp -
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Rp 8.005.100		Rp 8.005.100	Rp -
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Rp 9.000.000		Rp 9.000.000	Rp -
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Rp 13.375.000		Rp 13.375.000	Rp -
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp 21.508.000		Rp 37.317.500	Rp 15.809.500
7.01.01.2.07	Pengadaan Mebel			Rp 1.668.000		Rp 1.668.000	Rp -
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Rp 11.767.000		Rp 27.576.500	Rp 15.809.500
7.01.01.2.07.11	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran			Rp 8.073.000		Rp 8.073.000	Rp -
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp -	Rp -	Rp 172.200.000	Rp -	Rp 165.600.000	Rp (6.600.000)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Rp 2.400.000		Rp 2.400.000	Rp -
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Rp 13.800.000		Rp 7.200.000	Rp (6.600.000)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Rp 156.000.000		Rp 156.000.000	Rp -
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp -	Rp -	Rp 138.070.000	Rp -	Rp 135.990.000	Rp (2.080.000)
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan			Rp 123.070.000		Rp 123.070.000	Rp -
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Rp 8.000.000		Rp 3.000.000	Rp (5.000.000)
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Rp 7.000.000		Rp 9.920.000	Rp 2.920.000
						Rp -	Rp -
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Rp 24.247.800		Rp 24.247.800	Rp -
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Rp 8.825.000		Rp 8.825.000	Rp -
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi			Rp 8.825.000		Rp 8.825.000	Rp -

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
	Vertikal Terkait Desa						
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			11.500.000		Rp 11.500.000	Rp -
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			6.000.000		Rp 6.000.000	Rp -
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			Rp 5.500.000		Rp 5.500.000	Rp -
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			Rp 3.922.800		Rp 3.922.800	Rp -
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Rp 3.922.800		Rp 3.922.800	Rp -
JUMLAH				Rp 1.542.800.568		Rp 1.532.800.568	Rp (10.000.000)

#### 61. Kecamatan Teluk Pandan

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		-	1.597.648.624			
7	KECAMATAN			1.597.648.624		1.587.648.624	(10.000.000)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.571.468.624		1.561.468.624	(10.000.000)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.174.411.724		1.174.411.724	-
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	0 Orang/bula 13 orang	1.151.450.724	0 Orang/bula 13 orang	1.151.450.724	-
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	0 Dokumen 13 orang	22.961.000	0 Dokumen 13 orang	22.961.000	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			61.618.000		52.618.000	(9.000.000)
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	0 Paket 5 Komponen	1.002.100	0 Paket 5 Komponen	1.002.100	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	0 Paket 12 Item	29.000.000	0 Paket 12 Item	22.000.000	(7.000.000)
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penerapan kepatuhan pelavanan publik	0 Paket 50 Kotak	11.500.000	0 Paket 50 Kotak	9.500.000	(2.000.000)

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	12 Cetak 0 Paket 7256 Lembar	2.350.900	12 Cetak 0 Paket 7256 Lembar	2.350.900	-
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	0 Dokumen 58 Media	2.640.000	0 Dokumen 58 Media	2.640.000	-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	0 Laporan 101 Kali	15.125.000	0 Laporan 101 Kali	15.125.000	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			198.835.000		198.835.000	-
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	0 Laporan 66 Lembar	660.000	0 Laporan 66 Lembar	660.000	-
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	0 Laporan 3 Item	9.900.000	0 Laporan 3 Item	9.900.000	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	0 Laporan 3 orang 11 orang	188.275.000	0 Laporan 3 orang 11 orang	188.275.000	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			136.603.900		135.603.900	(1.000.000)
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	0 Unit 3 Unit	117.366.000	0 Unit 3 Unit	117.366.000	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	0 Unit 3 Item	5.487.900	0 Unit 3 Item	4.487.900	(1.000.000)
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	3 Item 0 Unit	13.750.000	3 Item 0 Unit	13.750.000	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			26.180.000		26.180.000	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			9.707.500		9.707.500	-
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 % 0 Laporan	9.707.500	100 % 0 Laporan	9.707.500	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			6.022.500		6.022.500	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0 Laporan 100 %	6.022.500	0 Laporan 100 %	6.022.500	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			10.450.000		10.450.000	-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (RP.)	KINERJA	ANGGARAN (RP.)	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0 Dokumen 100 %	4.400.000	0 Dokumen 100 %	4.400.000	-
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0 Laporan 100 %	6.050.000	0 Laporan 100 %	6.050.000	-
JUMLAH				1.597.648.624		1.587.648.624	(10.000.000)

## 62. Kecamatan Way Ratai

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
7	Urusan Kewilayahan						
7.01	Bidang Urusan Kecamatan Way Ratai						
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.442.904.202	100%	1.432.904.202	(10.000.000)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.152.297.202		1.152.297.202	-
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/Bulan	1.020.982.202	126 Orang/Bulan	1.020.982.202	-
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	131.315.000	1 Dokumen	131.315.000	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		116.899.100		111.699.100	(5.200.000)
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.000.000	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di disediakan	12 Paket	22.891.000	12 Paket	22.891.000	-
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10.035.500	12 Paket	10.035.500	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	28.700.000	12 Paket	28.700.000	-
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Paket	7.157.600	2 Paket	7.057.600	(100.000)
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.600.000	2 Dokumen	3.600.000	-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	42.515.000	1 Laporan	37.415.000	(5.100.000)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		13.800.000		11.800.000	(2.000.000)
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	13.800.000	12 Laporan	11.800.000	(2.000.000)

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TerlaksananyaPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		136.107.900		133.307.900	(2.800.000)
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	121.570.000	3 Unit	121.570.000	-
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	14.537.900	6 Unit	11.737.900	(2.800.000)
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		23.800.000		23.800.000	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksannya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		16.100.000		16.100.000	-
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Laporan	16.100.000	1 Laporan	16.100.000	-
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		7.700.000		7.700.000	-
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Dokumen	7.700.000	1 Dokumen	7.700.000	-
JUMLAH				1.442.904.202		1.432.904.202	(10.000.000)

### 63. Inspektorat

KODE REKENING					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
							KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1					2	3	4	5	9	10	11=10-5
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			9.084.904.098		9.074.904.098	(10.000.000)
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.840.404.098		8.830.404.098	(10.000.000)
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.227.232.798		8.217.632.798	(9.600.000)
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlahorang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	770 orang/bulan	7.781.152.798	770 orang/bulan	7.781.152.798	-
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	446.080.000	12 Dokumen	436.480.000	(9.600.000)
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			145.355.500		145.355.500	-

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KODE REKENING					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
							KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1					2	3	4	5	9	10	11=10-5
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	30.023.500	12 paket	30.023.500	-
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 paket	10.000.000	12 paket	10.000.000	-
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	12 paket	25.194.000	12 paket	25.194.000	-
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	-
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	55.138.000	12 Laporan	55.138.000	-
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			210.144.500		210.144.500	-
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	-
6	01	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan Prasara Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	9 Unit	195.144.500	9 Unit	195.144.500	-
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			55.200.000		54.800.000	(400.000)
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	55.200.000	12 Laporan	54.800.000	(400.000)
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			202.471.300		202.471.300	-
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara atau dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Kendaraan	202.471.300	6 Kendaraan	202.471.300	-
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			244.500.000		244.500.000	-
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			177.300.000		177.300.000	-
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	34 Laporan	36.000.000	34 Laporan	36.000.000	-
6	01	02	2,01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	72 Laporan	69.300.000	72 Laporan	69.300.000	-
6	01	02	2,01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	50 Laporan	72.000.000	50 Laporan	72.000.000	-
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			67.200.000		67.200.000	-
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan	67.200.000	30 Laporan	67.200.000	-
TOTAL								9.084.904.098		9.074.904.098	(10.000.000)



64. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
							KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1					2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5	01				PERENCANAAN		100%	6.401.222.767	100%	6.151.222.767	(250.000.000)
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penerapan kepatuhan pelayanan publik	100%	4.735.876.600	100%	4.681.526.600	(54.350.000)
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	20.000.000	100%	20.000.000	-
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	10.000.000	7 Dokumen	10.000.000	-
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	10.000.000	8 Laporan	10.000.000	-
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.833.716.600	100%	3.831.716.600	(2.000.000)
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan	3.688.996.600	360 Orang/bulan	3.688.996.600	-
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	141 Dokumen	139.720.000	141 Dokumen	137.720.000	(2.000.000)
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest SKPD	16 Laporan	5.000.000	16 Laporan	5.000.000	-
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	33.500.000	100%	33.500.000	-
5	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	17.000.000	12 Dokumen	17.000.000	-
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	16.500.000	11 Orang	16.500.000	-
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	188.132.500	100%	153.509.850	(34.622.650)
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.000.000	12 Paket	30.000.000	-
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	14.500.000	7 Paket	10.508.700	(3.991.300)
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.509.500	12 Paket	12.509.500	-
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	17.970.000	12 Paket	17.970.000	-
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	264 Dokumen	34.480.000	264 Dokumen	29.480.000	(5.000.000)

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
							KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1					2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	78.673.000	75 Laporan	53.041.650	(25.631.350)
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	23.587.500	100%	23.587.500	-
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	23.587.500	7 Unit	23.587.500	-
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	423.000.000	100%	400.300.000	(22.700.000)
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	147.500.000	(2.500.000)
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	273.000.000	12 Laporan	252.800.000	(20.200.000)
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	213.940.000	100%	218.912.650	4.972.650
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	213.940.000	5 Unit	213.940.000	-
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	-	1 Unit	4.972.650	4.972.650
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100%	690.300.000	100%	635.300.000	(55.000.000)
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	358.800.000	100%	332.856.000	(25.944.000)
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	125.000.000	2 Dokumen	125.000.000	-
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	30.000.000	1 Berita Acara	30.000.000	-
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	30.000.000	2 Berita Acara	30.000.000	-
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	75.000.000	1 Berita Acara	70.000.000	(5.000.000)
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	11 Usulan	23.800.000	11 Usulan	23.800.000	-
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	54.056.000	(20.944.000)
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	211.500.000	100%	201.500.000	(10.000.000)
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penvusunan Kebijakan Perencanaan	2 Masukan	131.500.000	2 Masukan	131.500.000	-

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
							KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1					2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
						Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)					
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	80.000.000	1 Buku	70.000.000	(10.000.000)
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	120.000.000	100%	100.944.000	(19.056.000)
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	40.944.000	(19.056.000)
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	60.000.000	-
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	975.046.167	100%	834.396.167	(140.650.000)
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	375.046.167	100%	245.046.167	(130.000.000)
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	39.012.300	1 Dokumen	25.802.300	(13.210.000)
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	8.695.700	4 Laporan	8.695.700	-
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	90.428.167	3 Laporan	10.382.000	(80.046.167)
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	104.800.600	2 Dokumen	68.056.767	(36.743.833)
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	10.199.100	4 Laporan	10.199.100	-
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	121.910.300	7 Laporan	121.910.300	-
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	300.000.000	100%	344.350.000	44.350.000
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi	5 Perangkat Daerah	-	5 Perangkat Daerah	99.350.000	99.350.000

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
							KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1					2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
					Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian					
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	71.906.500	3 Laporan	71.906.500	-
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5 Perangkat Daerah	90.515.000	5 Perangkat Daerah	60.515.000	(30.000.000)
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5 Perangkat Daerah	87.593.500	5 Perangkat Daerah	62.593.500	(25.000.000)
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	49.985.000	2 Laporan	49.985.000	-
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan	100%	300.000.000	100%	245.000.000	(55.000.000)
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	54.797.750	6 Dokumen	54.797.750	-
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Perangkat Daerah	34.979.000	6 Perangkat Daerah	34.979.000	-
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6 Perangkat Daerah	23.005.000	6 Perangkat Daerah	13.005.000	(10.000.000)
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	50.711.000	2 Laporan	45.711.000	(5.000.000)
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayahahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayahahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen	33.231.500	11 Dokumen	33.231.500	-
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayahahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayahahan	11 Perangkat Daerah	25.365.000	11 Perangkat Daerah	25.365.000	-
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayahahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayahahan	11 Perangkat Daerah	23.535.100	11 Perangkat Daerah	23.535.100	-
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayahahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Wilayahahan	2 Laporan	54.375.650	2 Laporan	14.375.650	(40.000.000)

65. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
									TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
									KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1					2		3		4	5	9	10	11 = 10 - 5
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	02				KEUANGAN								
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		PERSENTASE PENERAPAN KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK		100%	33.456.053.028	100%	33.421.053.028	(35.000.000)
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan yang tersusun		100%	176.037.100	100%	176.037.100	-
5	02	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	-
5	02	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	20.905.000	2 Dokumen	20.905.000	-
5	02	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2 Dokumen	16.759.000	2 Dokumen	16.759.000	-
5	02	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	14.533.000	1 Dokumen	14.533.000	-
5	02	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	13.000.000	1 Dokumen	13.000.000	-
5	02	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6 Dokumen	45.840.100	6 Dokumen	45.840.100	-
5	02	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	-
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	30.854.674.428	100%	30.854.674.428	-
5	02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		420 Orang/Bulan	30.105.332.828	420 Orang/Bulan	30.105.332.828	-
5	02	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	111.600.000	12 Dokumen	111.600.000	-
5	02	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	595.741.600	12 Dokumen	595.741.600	-
5	02	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	-
5	02	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	12.000.000	-
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	76.158.200	100%	41.158.200	(35.000.000)
5	02	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	56.350.000	1 Paket	21.350.000	(35.000.000)
5	02	01	2.05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		12 Dokumen	19.808.200	12 Dokumen	19.808.200	-

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
								TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
								KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1					2		3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.418.233.300	100%	1.418.233.300	-	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.000.000	1 Paket	65.000.000	-	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	460.776.400	1 Paket	460.776.400	-	
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	120.429.500	1 Paket	120.429.500	-	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000	1 Paket	70.000.000	-	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	132.958.400	1 Paket	132.958.400	-	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	92.200.000	6 Dokumen	92.200.000	-	
5	02	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	155.905.000	12 Laporan	155.905.000	-	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	320.964.000	12 Laporan	320.964.000	-	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	19.000.000	100%	19.000.000	-	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	5 Unit	19.000.000	5 Unit	19.000.000	-	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	567.960.000	100%	567.960.000	-	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.960.000	12 Laporan	3.960.000	-	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.000.000	12 Laporan	18.000.000	-	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	546.000.000	12 Laporan	546.000.000	-	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	343.990.000	100%	343.990.000	-	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit	232.490.000	9 unit	232.490.000	-	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 unit	91.500.000	46 unit	91.500.000	-	
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	-	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100%	238.233.694.319	100%	235.978.694.319	(2.255.000.000)	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Penyusunan APBD tepat waktu sesuai dengan Sistem dan Prosedur Mekanisme dan Tahapan Penyusunan APBD	100%	2.860.264.500	100%	2.625.264.500	(235.000.000)	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	242.578.400	2 Dokumen	242.578.400	-	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	188.572.200	2 Dokumen	113.572.200	(75.000.000)	
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	57 Dokumen	97.698.000	57 Dokumen	97.698.000	-	



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
									TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
									KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1					2		3		4	5	9	10	11 = 10 - 5
5	02	02	2.01	04		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		57 Dokumen	98.955.000	57 Dokumen	98.955.000	-
5	02	02	2.01	05		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi		57 Dokumen	112.933.500	57 Dokumen	112.933.500	-
5	02	02	2.01	06		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		57 Dokumen	96.043.000	57 Dokumen	96.043.000	-
5	02	02	2.01	07		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		3 Dokumen	1.297.615.800	3 Dokumen	1.137.615.800	(160.000.000)
5	02	02	2.01	08		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		3 Dokumen	249.341.700	3 Dokumen	249.341.700	-
5	02	02	2.01	09		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		2 Dokumen	153.778.400	2 Dokumen	153.778.400	-
5	02	02	2.01	10		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		4 Dokumen	84.831.400	4 Dokumen	84.831.400	-
5	02	02	2.01	11		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		4 Dokumen	118.810.600	4 Dokumen	118.810.600	-
5	02	02	2.01	12		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		2 Dokumen	72.662.500	2 Dokumen	72.662.500	-
5	02	02	2.01	13		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		45 Orang	46.444.000	45 Orang	46.444.000	-
5	02	02	2.02			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Meningkatnya jumlah Laporan OPD dalam Pengelolaan Keuangan yang tepat waktu		100%	963.567.000	100%	953.567.000	(10.000.000)
5	02	02	2.02	01		Koordinasin dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		43 Dokumen	590.890.000	43 Dokumen	590.890.000	-
5	02	02	2.02	03		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		172 Dokumen	96.110.000	172 Dokumen	96.110.000	-
5	02	02	2.02	04		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah		12 Dokumen	56.402.100	12 Dokumen	56.402.100	-
5	02	02	2.02	05		Koordinasi, Fasilitas, asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		45 Dokumen	23.864.000	45 Dokumen	23.864.000	-
5	02	02	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		24 Laporan	120.610.900	24 Laporan	120.610.900	-
5	02	02	2.02	08		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang daerah sebagai Optimalisasi kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		60 Dokumen	75.690.000	60 Dokumen	65.690.000	(10.000.000)

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KODE REKENING					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
								TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
								KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1					2		3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase Meningkatnya jumlah OPD dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	907.244.000	100%	897.244.000	(10.000.000)
5	02	02	2.03	01		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24 Laporan	40.000.000	24 Laporan	40.000.000	-
5	02	02	2.03	03		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	70.000.000	17 Laporan	70.000.000	-
5	02	02	2.03	04		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	148.331.000	2 Laporan	146.331.000	(2.000.000)
5	02	02	2.03	05		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	220.000.000	4 Dokumen	212.000.000	(8.000.000)
5	02	02	2.03	07		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 Dokumen	428.913.000	3 Dokumen	428.913.000	-
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Pengelolaan Bunga, DBH, Transfer Ke Desa, BTT	100%	233.502.618.819	100%	231.502.618.819	(2.000.000.000)
5	02	02	2.04	04		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan	6.500.000.000	12 Laporan	6.500.000.000	-
5	02	02	2.04	08		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	8 Laporan	213.222.940.157	8 Laporan	211.222.940.157	(2.000.000.000)
5	02	02	2.04	09		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3 Laporan	5.000.000.000	3 Laporan	5.000.000.000	-
5	02	02	2.04	10		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2 laporan	8.779.678.662	2 laporan	8.779.678.662	-
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		PERSENTASE MENINGKATNYA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100%	908.778.200	100%	898.778.200	(10.000.000)
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Jumlah OPD yang melaksanakan rekonsiliasi Data,RKBMD,Stok Opname dan sensus Aset Daerah Serta pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan BMD sesuai standar Pengelolaan BMD	100%	908.778.200	100%	898.778.200	(10.000.000)
5	02	03	2.01	03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	90.997.600	1 Dokumen	90.997.600	-
5	02	03	2.01	04		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	24.940.200	12 Dokumen	24.940.200	-
5	02	03	2.01	05		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	43 Laporan	151.750.000	43 Laporan	151.750.000	-
5	02	03	2.01	06		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	43 Laporan	24.453.700	43 Laporan	24.453.700	-

KODE REKENING						URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
								TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
								KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1						2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
5	02	03	2.01	07		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	60 Laporan	266.455.700	60 Laporan	266.455.700	-
5	02	03	2.01	08		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	38.736.000	1 Laporan	38.736.000	-
5	02	03	2.01	10		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	121.705.000	1 Dokumen	111.705.000	(10.000.000)
5	02	03	2.01	11		Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	57 Laporan	143.540.000	57 Laporan	143.540.000	-
5	02	03	2.01	12		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	43 Laporan	46.200.000	43 Laporan	46.200.000	-
JUMLAH									272.598.525.547		270.298.525.547	(2.300.000.000)

#### 66. Badan Pendapatan Daerah

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
5,02	Keuangan			9.819.093.578,00		9.722.849.112,00	(96.244.466)
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			8.192.910.478,00		8.126.466.012,00	(66.444.466)
5 02 01 2.01	Perencanaan, penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Dearah			59.653.900,00		59.653.900,00	-
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.025.000,00	1 Dokumen	8.025.000,00	-
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	8.179.000,00	1 dokumen	8.179.000,00	-
5 02 01 2.01 03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	4.963.000,00	1 dokumen	4.963.000,00	-
5 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	6.830.000,00	1 dokumen	6.830.000,00	-
5 02 01 2.01 05	koordinasi penyusunan perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.617.900,00	1 Dokumen	6.617.900,00	-
5 02 01 2.01 06	koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	12.289.000,00	4 Laporan	12.289.000,00	-
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	12.750.000,00	4 laporan	12.750.000,00	-
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.665.366.078,00		5.665.366.078,00	-
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5.608.816.078,00	12 Bulan	5.608.816.078,00	-

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
1	2	3	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	11 = 10 - 5
6 02 01 2.02 02	penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	15.618.000,00	12 bulan	15.618.000,00	-
7 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 laporan	20.531.000,00	12 laporan	20.531.000,00	-
8 02 01 2.02 05	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 laporan	10.000.000,00	6 laporan	10.000.000,00	-
9 02 01 2.02 07	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan dan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	10.401.000,00	22 Laporan	10.401.000,00	-
<b>5 02 01 2 04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah</b>			<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	-
5 02 01 2 04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah BADAN PENDAPATAN	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Bulan	5.000.000,00	12 Bulan	5.000.000,00	-
<b>5 02 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>15.545.000,00</b>		<b>15.545.000,00</b>	-
5 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 buku	15.545.000,00	1 buku	15.545.000,00	-
<b>5 02 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>742.992.750,00</b>		<b>767.548.284,00</b>	<b>24.555.534</b>
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Unit	281.325.150,00	3 Unit	271.545.150,00	<b>(9.780.000)</b>
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Bulan	21.494.200,00	12 Bulan	29.049.734,00	<b>7.555.534</b>
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 2Bulan	30.804.000,00	12 2Bulan	40.804.000,00	<b>10.000.000</b>
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	33.081.400,00	12 Bulan	39.961.400,00	<b>6.880.000</b>
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	42.840.000,00	12 Bulan	42.840.000,00	-
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	20.430.000,00	12 Bulan	20.430.000,00	-
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	61.413.000,00	12 bulan	71.313.000,00	<b>9.900.000</b>
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Laporan	14.210.000,00	1 Laporan	14.210.000,00	-
5 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4/sistem Aplikasi	237.395.000,00	4/sistem Aplikasi	237.395.000,00	-
<b>5 02 01 2.08</b>	<b>Penyedia Jasa Penunjang Urusan Ppemerintahan Daerah</b>			<b>1.289.742.750,00</b>		<b>1.198.742.750,00</b>	<b>(91.000.000)</b>
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	219.000.000,00	12 Bulan	167.000.000,00	<b>(52.000.000)</b>
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	1.070.742.750,00	12 Bulan	1.031.742.750,00	<b>(39.000.000)</b>
<b>5 02 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah</b>			<b>414.610.000,00</b>		<b>414.610.000,00</b>	-

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
1	2	3	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	11 = 10 - 5
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Bulan	364.610.000,00	12 Bulan	364.610.000,00	-
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 unit	50.000.000,00	81 unit	50.000.000,00	-
5.02.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>			<b>18.969.500,00</b>		<b>18.969.500,00</b>	-
<b>5 02 03 2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>			<b>18.969.500,00</b>		<b>18.969.500,00</b>	-
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Laporan	5.500.000,00	1 Laporan	5.500.000,00	-
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5 Buku	13.469.500,00	5 Buku	13.469.500,00	-
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>1.607.213.600,00</b>		<b>1.577.413.600,00</b>	<b>(29.800.000)</b>
<b>5 02 04 2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>1.607.213.600,00</b>		<b>1.577.413.600,00</b>	<b>(29.800.000)</b>
5 02 04 2.01 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	7 Dokumen	29.087.000,00	7 Dokumen	29.087.000,00	-
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	7 Dokumen	245.000.000,00	7 Dokumen	233.500.000,00	<b>(11.500.000)</b>
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	70.000.000,00	4 Laporan	32.300.000,00	<b>(37.700.000)</b>
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	376 Objek Pajak	50.000.000,00	376 Objek Pajak	50.000.000,00	-
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 dokumen	90.000.000,00	1 dokumen	90.000.000,00	-
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	140.000SPPT PBB dan 1000 wajib Pajak BPHTB	378.289.100,00	140.000SPPT PBB dan 1000 wajib Pajak BPHTB	411.089.100,00	<b>32.800.000</b>
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	376 Objek Pajak	30.000.000,00	376 Objek Pajak	30.000.000,00	-
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 Dokumen	71.500.000,00	2 Dokumen	71.500.000,00	-
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 laporan	64.200.000,00	12 laporan	64.200.000,00	-
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	400 objek Pajak	60.000.000,00	400 objek Pajak	60.000.000,00	-
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100 Wajib Pajak	130.423.500,00	100 Wajib Pajak	130.423.500,00	-
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	500 Objek Pajak	202.450.000,00	500 Objek Pajak	198.250.000,00	<b>(4.200.000)</b>
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	66.264.000,00	4 Laporan	62.064.000,00	<b>(4.200.000)</b>
5 02 04 2.01 15	elektronivikasi transaksi pemerintah daerah	Jumlah Laporan elektronivikasi transaksi pemerintah daerah	4 Laporan	120.000.000,00	4 Laporan	115.000.000,00	<b>(5.000.000)</b>

67. Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
							KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1					2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5	3				KEPEGAWAIAN						
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	4.055.189.276	100%	4.055.189.276	-
5	3	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	12 Dokumen	3.249.757.976	12 Dokumen	3.249.757.976	-
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ bulan	3.049.557.976	32 Orang/ bulan	3.049.557.976	-
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	200.200.000	12 Dokumen	200.200.000	-
5	3	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	230 Orang	7.500.000	230 Orang	7.500.000	-
5	03	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	230 Orang	7.500.000	230 Orang	7.500.000	-
5	3	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan administrasi umum perkantoran	Paket	130.230.000	Paket	130.230.000	-
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	27.220.400	12 Paket	27.220.400	-
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3.010.000	12 Paket	3.010.000	-
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.000.000	12 Paket	15.000.000	-
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.997.600	12 Paket	4.997.600	-
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	20.000.000	-
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	60.002.000	24 Laporan	60.002.000	-
5	3	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kualitas layanan jasa penunjang perkantoran	24 Laporan	482.000.000	24 Laporan	482.000.000	-
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	66.000.000	12 Laporan	66.000.000	-
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	416.000.000	12 Laporan	416.000.000	-
5	3	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kualitas barang milik daerah penunjang perkantoran	4 Unit	185.701.300	4 Unit	185.701.300	-
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	185.701.300	4 Unit	185.701.300	-



KODE REKENING					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
							TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
							KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1					2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya Layanan Kepegawaian Daerah	100%	1.082.768.000	100%	1.147.943.000	65.175.000
5	3	2	2,01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan seleksi Penerimaan CPNSD dan PPPK dan akurasi updating data kepegawaian	13 Dokumen	87.200.000	13 Dokumen	162.375.000	75.175.000
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	72.200.000	2 Dokumen	147.375.000	75.175.000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	15.000.000	-
5	3	2	2,02		Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya penataan Pegawai sesuai kompetensi	503 Dokumen	487.800.000	503 Dokumen	485.600.000	(2.200.000)
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dan Terlaksananya Administrasi kenaikan Gaji Berkala	500 Dokumen	5.000.000	500 Dokumen	5.000.000	-
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	482.800.000	3 Dokumen	480.600.000	(2.200.000)
5	3	2	2,03		Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan kompetensi ASN	760 Orang	17.000.000	760 Orang	17.000.000	-
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	60 Orang	12.000.000	60 Orang	12.000.000	-
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	700 Orang	5.000.000	700 Orang	5.000.000	-
5	3	2	2,04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Kapasitas Kinerja Aparatur dan Pengelolaan penyelesaian pelanggaran Disiplin	12 Dokumen	490.768.000	12 Dokumen	482.968.000	(7.800.000)
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	483.268.000	12 Dokumen	475.468.000	(7.800.000)
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	96 Orang	7.500.000	96 Orang	7.500.000	-
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya penyelenggaraan Diklat teknis dan Fungsional	100%	63.000.000	100%	53.000.000	(10.000.000)
5	4	2	2,02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional	4 Dokumen	63.000.000	4 Dokumen	53.000.000	(10.000.000)
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	4 Dokumen	63.000.000	4 Dokumen	53.000.000	(10.000.000)
JUMLAH								5.200.957.276		5.256.132.276	55.175.000

**68. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (KELUARAN) / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH ANGGARAN SEBELUM DENGAN SETELAH PERUBAHAN
			TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		PERUBAHAN TARGET KINERJA & KEUANGAN (PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN) TAHUN 2023		
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	9	10	11 = 10 - 5
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			2.717.243.118		2.707.243.118	10.000.000
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			2.717.243.118		2.707.243.118	10.000.000
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.447.361.118		2.438.661.118	8.700.000
							-
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.105.985.218		2.097.285.218	8.700.000
5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1.901.130.218	14 Bulan	1.901.130.218	-
5.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	204.855.000	12 Bulan	196.155.000	8.700.000
							-
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			135.400.000		135.400.000	-
5.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	24.000.000	12 Bulan	24.000.000	-
5.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Bulan	111.400.000	13 Bulan	111.400.000	-
							-
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			205.975.900		205.975.900	-
5.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	180.975.900	3 Unit	180.975.900	-
5.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	-
							-
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			269.882.000		268.582.000	1.300.000
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		100.000.000		100.000.000	-
5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidangg Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidangg Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	-
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	-
							-
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			169.882.000		168.582.000	1.300.000
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	169.882.000	1 Laporan	168.582.000	1.300.000
JUMLAH				2.717.243.118		2.707.243.118	

Sumber : SIPD Kabupaten Pesawaran, 2023

## BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023 merupakan kelanjutan dari RKPD Tahun 2023 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain, baik perencanaan tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Perangkat Daerah (PD). Dalam penyusunannya telah menyelaraskan dengan dokumen yang ada pada tingkatan tersebut. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan pelaksanaan program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan demi terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD dalam menjawab tantangan dan permasalahan tidak hanya ditentukan oleh jajaran pemerintah, namun sangat membutuhkan dukungan masyarakat untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, oleh karena itu upaya mendorong partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 maupun Perubahan RKPD Tahun 2023, wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten, serta Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perubahan RKPD ini disusun sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Penyusunan Anggaran Pembangunan dan Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023.